mandiri syariah

MEMBERIKAN NILAI TAMBAH

MELALUI PENGEMBANGAN KAPABILITAS INTERNAL

Laporan Tahunan
2019

PT Bank Syariah Mandiri

Memberikan Nilai Tambah Melalui Pengembangan Kapabilitas Internal

Dalam upaya mewujudkan visi Mandiri Syariah menjadi "Bank Syariah Terdepan dan Modern", PT Bank Syariah Mandiri menyadari meningkatnya jumlah nasabah juga harus diimbangi dengan meningkatnya pelayanan. Salah satu cara meningkatkan pelayanan adalah dengan terus meningkatkan kehandalan teknologi informasi dalam setiap layanan dan produk-produk perbankan, penerapan teknologi informasi terkini serta melakukan inovasi-inovasi secara berkesinambungan guna meningkatkan daya saing dalam industri perbankan.Selain itu, PT Bank Syariah Mandiri juga fokus pada strategi peningkatan produktivitas, kapabilitas dengan memperkuat fungsi Mandiri Syariah University untuk menjadikan pegawai Mandiri Syariah sebagai Bankir Syariah yang unggul dan kompeten. Fokus strategi lainnya adalah memperkuat penerapan budaya *risk*, budaya *digital*, budaya sales dan mengimplementasikan *employee value proposition* yang membedakan dengan Bank Syariah ataupun bank lainnya.

Kesinambungan Tema

2014

2015

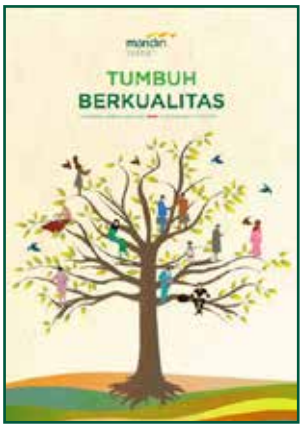

2016

Perkuat Pondasi Tumbuh Berkelanjutan

Bank Syariah Mandiri (BSM) berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang tumbuh berkelanjutan. Untuk itu, pondasi semangat, tujuan, dan cita-cita BSM menjadi akar yang tidak dapat diabaikan. Dari elemen yang paling dasar tersebut muncul budaya perusahaan yang menjadi ruh dalam bekerja, yang membawa BSM untuk konsisten berkarya dan memberikan kontribusi bagi Indonesia.

Semangat Perubahan untuk Menang

Setelah Memperkuat Pondasi untuk terus Tumbuh secara Berkelanjutan menjadi Tema Laporan Tahunan 2014, maka pada Laporan Tahunan 2015 ini, Bank menetapkan tema "Semangat Perubahan untuk Menang".

Tumbuh Berkualitas

Manajemen pada tahun 2016 berkomitmen untuk menumbuhkan bisnis secara berkualitas dan *sustain*. Tema ini setelah pada tahun 2015, BSM meletakkan dasar-dasar transformasi Perusahaan berkaitan dengan implementasi *Corporate Plan* 2016–2020.

Tumbuh dan berkualitas dilakukan dengan menjaga transparansi proses bisnis dan operasional sesuai ketentuan yang berlaku termasuk pengawalan terhadap aspek-aspek *corporate governance*, prudentialitas, legalitas, dan prinsip syariah.

Dengan tumbuh dan berkualitas, BSM dapat memantapkan kontribusi di dalam pembangunan ekonomi negeri terutama peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bisnis bank dan juga kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

2017

2018

2019

Tumbuh Sehat Berkelanjutan, Mengalirkan Berkah untuk Negeri

Alhamdulilah di tahun 2017, Bank Syariah Mandiri tetap menunjukkan kinerja dengan tumbuh positif sehingga Bank dapat terus berkontribusi membangun ekonomi negeri dan mengalirkan berkah bagi umat.

Memperkuat Daya Saing Melalui Peningkatan Keunggulan Perusahaan

Sebagai Bank Syariah terbesar, PT Bank Syariah Mandiri terus berkomitmen untuk selalu melakukan penguatan daya saing perusahaan. Hal tersebut antara lain dilakukan melalui penguatan kompetensi usaha dan peningkatan layanan *digital* di 2018. Berbagai upaya penguatan kompetensi telah dilakukan melalui berbagai pelatihan khusus antara lain pelatihan kepemimpinan (*leadership training*) ke luar negeri baik dalam bentuk Sekolah Staf dan Pimpinan Bank, *Management Development Program*, maupun *Graduate Development Program*. Diantara pelatihan tersebut dilakukan melalui sinergi dengan Bank Mandiri selaku induk Perusahaan. Di samping itu, peningkatan kompetensi juga dilakukan dengan cara menugaskan Pegawai ke berbagai pelatihan di luar negeri baik di level Group Head, Department Head, maupun Officer. Selain peningkatan kompetensi melalui berbagai pelatihan, PT Bank Syariah Mandiri juga telah mengubah pola *grading* pegawai, pola kenaikan *grade*, dan apresiasi, sehingga mampu mendorong produktivitas pegawai dengan efektif.

Memberikan Nilai Tambah Melalui Pengembangan Kapabilitas Internal

Dalam upaya mewujudkan visi Mandiri Syariah menjadi "Bank Syariah Terdepan dan Modern", PT Bank Syariah Mandiri menyadari meningkatnya jumlah nasabah juga harus diimbangi dengan meningkatnya pelayanan. Salah satu cara meningkatkan pelayanan adalah dengan terus meningkatkan kehandalan teknologi informasi dalam setiap layanan dan produk-produk perbankan, penerapan teknologi informasi terkini serta melakukan inovasi-inovasi secara berkesinambungan guna meningkatkan daya saing dalam industri perbankan. Selain itu, PT Bank Syariah Mandiri juga fokus pada strategi peningkatan produktivitas, kapabilitas dengan memperkuat fungsi Mandiri Syariah University untuk menjadikan pegawai Mandiri Syariah sebagai Bankir Syariah yang unggul dan kompeten. Fokus strategi lainnya adalah memperkuat penerapan budaya *risk*, budaya *digital*, budaya sales dan mengimplementasikan *employee value proposition* yang membedakan dengan Bank Syariah atau pun bank lainnya.

Daftar Isi

01
Kilas Kinerja

02
Laporan Dewan Komisaris dan Direksi

03
Profil Perusahaan

04
Analisis dan Pembahasan Manajemen Atas Kinerja Bank

1 Tema dan Arti Tema
2 Kesinambungan Tema
4 Daftar Isi
8 Sekilas Tentang Perseroan
9 Jejak Langkah
10 Kontribusi Terbaik Kami

KILAS KINERJA

14 Capaian Penting 2019
16 Ikhtisar Data Keuangan Penting
16 Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan
19 Ikhtisar Operasional
21 Informasi Harga Saham
21 Aksi Korporasi
21 Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)
21 Informasi Obligasi, Sukuk dan/atau Obligasi Konversi
22 Peristiwa Penting

LAPORAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

32 Laporan Dewan Komisaris
42 Laporan Dewan Pengawas
48 Laporan Direksi
60 Tanggung Jawab Laporan Tahunan 2019

PROFIL PERUSAHAAN

64 Identitas Perusahaan
65 *Brand* Perusahaan
66 Riwayat Singkat Perusahaan
68 Keterangan Perubahan Nama
69 Bidang Usaha
69 Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar dan yang Dijalankan
71 Produk dan Jasa
76 Peta Wilayah Usaha
78 Struktur Organisasi
80 Visi, Misi dan Budaya Perusahaan
80 Visi
80 Misi
81 *Review* Visi dan Misi Oleh Dewan Komisaris dan Direksi
82 Budaya Perusahaan
86 Profil Dewan Komisaris
92 Profil Dewan Pengawas
97 Profil Direksi
103 Profil Pejabat Dibawah Direksi
107 Profil Pejabat Eksekutif
121 Profil dan Pengembangan Kompetensi Pegawai
121 Jumlah Pegawai Untuk Masing-Masing Level Jabatan
121 Jumlah Pegawai Untuk Masing-Masing Tingkat Pendidikan
121 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
122 Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia
122 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
123 Jumlah Pegawai Berdasarkan Segmen
123 Pengembangan Kompetensi Pegawai
126 Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi
126 Biaya Pengembangan Kompetensi
127 Komposisi Pemegang Saham
127 Komposisi Pemegang Saham Mandiri Syariah Per Desember 2019
127 Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar Mandiri Syariah
127 Komposisi Pemegang Saham 5% Atau Lebih
127 Komposisi Kelompok Pemegang Saham Kurang Dari 5%
127 Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi
127 Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi
128 Struktur Grup Perusahaan
130 Kronologi Penerbitan Saham
130 Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Obligasi
132 Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya
133 Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang
134 Penghargaan dan Sertifikasi
142 Nama dan Alamat Kantor Cabang Serta Kantor Perwakilan Kantor Cabang
149 Informasi yang Tersedia pada *website*
150 Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA BANK

160 Tinjauan Perekonomian
160 Analisis Perekonomian Global
160 Analisis Perekonomian Nasional
160 Analisis Industri Perbankan Nasional
160 Analisis Industri Perbankan Syariah
161 Analisis Posisi Bank Syariah Mandiri Dalam Industri Perbankan
163 Tinjauan Operasional
163 Strategi Bank Tahun 2019
163 Arah Kebijakan Jangka Pendek

05
Human Capital

06
Teknologi Informasi

07
Tata Kelola Perusahaan

08
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

163 Arah Kebijakan Jangka Menengah
164 Strategi Utama Bank
165 Aspek Pemasaran
165 Strategi Pemasaran
166 Pangsa Pasar
169 Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
181 Prospek Usaha dan Strategi Ke Depan
183 Tinjauan Keuangan
183 Kinerja Keuangan
183 Laporan Posisi Keuangan
197 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
204 Laporan Arus Kas
205 Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil
206 Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
207 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
208 Rasio-Rasio Keuangan Utama
209 Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang
209 Kemampuan Membayar Utang
210 Kolektibilitas Piutang Bank
212 Struktur Permodalan dan Praktik Manajemen Risiko
212 Struktur Permodalan
214 Praktik Manajemen Risiko
256 Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal
258 Investasi Barang Modal
258 Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, dan Restrukturisasi Hutang dan Modal
259 Komitmen dan Kontinjensi
260 Pencapaian Target dan Target Ke Depan
260 Pencapaian Target
262 Target Ke Depan
264 Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan
264 Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen
264 Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan Manajemen (ESOP/MSOP)
264 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
265 Informasi Transaksi Material Yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi
270 Dampak Perubahan Suku Bunga terhadap Kinerja Bank
272 Aspek Perpajakan
272 Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya Terhadap Bank
274 Perubahan Kebijakan Akuntansi
275 Tingkat Kesehatan Bank
275 Informasi Kelangsungan Usaha

HUMAN CAPITAL

279 Profil Direktorat *Human Capital*
281 Strategi *Human Capital*
281 Pengembangan Organisasi
282 Manajemen *Human Capital*
289 Internalisasi Budaya Perusahaan
289 Rencana Ke Depan

TEKNOLOGI INFORMASI

292 *Master Plan* Teknologi Informasi
293 Profil Direktorat Teknologi Informasi
294 Manajemen Teknologi Informasi
294 Strategi Teknologi Informasi
295 Arsitektur Teknologi Informasi
296 IT *Governance*
298 Rencana Ke Depan
299 Pengelolaan *Digital Banking*

TATA KELOLA PERUSAHAAN

304 Pencapaian Dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan
304 Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan
305 Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan
305 Struktur Organ Perusahaan
306 *Governance Soft Stucture*
307 Mekanisme *Good Corporate Governance*
307 Pemegang Saham
307 Rapat Umum Pemegang Saham
314 Dewan Komisaris
333 Dewan Pengawas Syariah
340 Direksi
355 Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris
378 Organ dan Komite di Bawah Direksi
402 Remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi
404 Akuntan Publik
406 Manajemen Risiko
413 Sistem Pengendalian Internal
418 Fungsi Kepatuhan

424	Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/ atau Politik
424	Perkara Penting
427	Akses Informasi dan Data Perusahaan
429	Program Anti Korupsi
429	Kode Etik
431	Kebijakan Gratifikasi
432	*Whistleblowing System*
434	Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Serta Penerapannya
436	Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaian oleh Mandiri Syariah
437	Tata Kelola Terintegrasi dengan Entitas Utama
439	Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya
440	*Buy Back Share dan Buy Back Obligation*
440	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
443	*Assessment Good Corporate Governance*

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

452	Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial
458	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Hak Asasi Manusia
459	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Operasi yang Adil
461	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Lingkungan Hidup
462	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja
467	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Tanggung Jawab Terhadap Konsumen
475	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
486	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait dengan Tanggung Jawab Kepada Pemasok

INDEKS REFERENSI POJK

LAPORAN KEUANGAN

mandiri

SEKILAS TENTANG PERSEROAN

JEJAK LANGKAH

1955

Pendirian
PT Bank Industri Nasional
(PT BINA)

1967

PT BINA
berubah nama menjadi
PT Bank Maritim
Indonesia

1973

PT Bank Maritim
Indonesia
berubah nama
menjadi
PT Bank Susila Bakti

1999

PT Bank Susila Bakti
dikonversi menjadi bank syariah
dan berubah nama menjadi
PT Bank Syariah Mandiri

2018

Mandiri Syariah masuk ke dalam
kelompok Bank Syariah BUKU III.

2019

Aset Mandiri Syariah berhasil
menembus Rp100 Triliun. Selain
itu Mandiri Syariah meluncurkan
layanan *Digital Branch* dan
layanan pembukaan
Rekening *Online*.

KONTRIBUSI TERBAIK KAMI

BANK SYARIAH TERBESAR DAN KINERJA KUAT

PANGSA PASAR SYARIAH TERBESAR

PT Bank Syariah Mandiri atau Mandiri Syariah masih mengukuhkan diri sebagai bank syariah terbesar dengan total aset Rp112 triliun dan pangsa pasar Aset, Dana Pihak Ketiga, dan Pembiayaan masing-masing sekitar 22%. Tak hanya *market share*, dari sisi jaringan pun Mandiri Syariah cukup luas dengan 742 jaringan kantor, terdiri atas 129 Kantor Cabang, 389 Kantor Cabang Pembantu, 53 Kantor Kas, 50 KFO Gadai, 7 KFO Mikro, dan 114 *Payment Point*. Jumlah tersebut belum termasuk Layanan Syariah Bank yang hadir di 1.000 *outlet* Bank Mandiri.

BANK BUKU III

Bank memiliki modal inti sebear Rp9,2 triliun pada tahun 2019 naik dari Rp7,65 triliun pada tahun 2018. Dengan modal inti di atas Rp5 triliun, Mandiri Syariah sejak beberapa tahun terakhir sudah masuk ke dalam kelompok Bank Unit Kegiatan Usaha (BUKU) III.

KECUKUPAN MODAL DAN ROE

Posisi kecukupan modal perusahaan yang ditunjukkan dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 16,15% sehingga bank cukup kuat untuk menopang pertumbuhan bisnis pada tahun-tahun berikutnya. Dari sisi *Return on Equity* Bank membukukan angka 15,66% dan sudah jauh membaik dibandingkan 8,21% pada tahun 2018. Hal itu menunjukkan kinerja perusahaan terus membaik sehingga dapat memberikan *return* optimal.

MELAYANI PULAU TERLUAR DAN PEDALAMAN INDONESIA

Sebagai institusi keuangan, Mandiri Syariah juga memberikan akses kepada masyarakat di pedalaman dan pulau-pulau terluar Indonesia agar tetap dapat melakukan transaksi perbankan meski jauh dari kota besar. Hal itu karena manajemen berprinsip bahwa bank syariah tak hanya sebatas institusi finansial tapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut wilayah layanan Mandiri Syariah di pulau-pulau dan pedalaman Indonesia:

1. Pulau Simeleu, Aceh Samudra Hindia
2. Pulau Sabang, Aceh
3. Pulau Natuna
4. Pulau Anambas
5. Pulau Jemaja
6. Nunukan, Kalimantan
7. Bula, Maluku Utara
8. Bitung Sulawesi Utara
9. Pulau Bau-Bau Sulawesi Tenggara
10. Pulau Bacan

PENGUATAN *PLATFORM DIGITAL*

PEMBUKAAN REKENING MELALUI *MOBILE PHONE*

Perusahaan menyadari perubahan budaya seiring dengan kehadiran *smartphone*. Mengantisipasi keterbatasan waktu dan jangkauan akses untuk membuka rekening syariah, PT Bank Syariah Mandiri pada tanggal 5 Desember 2019 meluncurkan layanan pembukaan rekening *online* untuk memudahkan nasabah. Pembukaan Rekening *Online* tersebut telah mendapatkan persetujan dari OJK dengan Nomor persetujuan S-83/PB.34/2019. Pembukaan rekening secara *online* ini merupakan yang pertama bagi bank syariah. Setelah membuka rekening nasabah, dapat bertransaksi melalui *channel mobile banking* Mandiri Syariah. Pembukaan rekening secara *online* ini memenuhi ketentuan tentang aspek *compliance* dan keamanan Bank dan nasabah.

DIGITAL BRANCH

Masih dalam kaitan peningkatan pelayanan kepada Nasabah, Mandiri Syariah pada 8 November 2019 meluncurkan layanan *digital branch*. Layanan *digital branch* ini adalah transformasi dari layanan Kantor Cabang Thamrin biasa yang

sebelumya beroperasi dalam bentuk *outlet* bank biasa.
Pada konsep *digital branch*, nasabah diharapkan nyaman bertransaksi. Apalagi dengan suasana kantor yang didesain mirip *lounge* sebuah kafe di mana nasabah diharapkan dapat melakukan transaksi sendiri atau dibantu Customer Service dan Teller.

PENGAYAAN FITUR *MOBILE BANKING*

Fitur *mobile banking* Mandiri Syariah diharapkan tidak hanya berfungsi membantu nasabah dalam hal transaksi finansial tapi juga nonfinansial. Diharapkan Aplikasi Mandiri Syariah Mobile dapat menjadi *super apps* bagi umat Muslim zaman sekarang karena di dalamnya tersedia fitur pembayaran zakat/wakaf, Alquran, melacak lokasi masjid terdekat, waktu solat dan kutipan-kutipan hadis dan spiritual. Dari hasil pengayaan fitur, terjadi peningkatan pembayaran zakat melalui *online* sebanyak tiga kali lipat dari periode sebelumnya. Selain itu aplikasi ini juga telah dapat digunakan untuk kebutuhan nasabah dengan beragam fiturnya termasuk layanan pembayaran *digital*.

CSR YANG BERKUALITAS

MASJID CIPALI

Sebuah masjid di *rest area* Km 166 di ruas Tol Cipali merupakan bukti kegiatan sosial Mandiri Syariah. Dibangun di atas lahan seluas 2.500 m2, masjid Cipali menggunakan konsep yang modern. Masjid ini dapat menampung jamaah sholat hingga 1.000 orang. Selain itu, Masjid juga dilengkapi dengan fasilitas ruang laktasi untuk membantu para ibu yang butuh ruang untuk menyusui anaknya dan juga area bermain untuk anak. Masjid dengan bangunan *iconic* dari susunan bata teracota ini diresmikan pada 14 November 2019.

ISLAMIC SOCIOPRENEUR DEVELOPMENT PROGRAM (ISDP)

Sampai dengan Desember 2019, Mandiri Syariah masih menyelenggarakan program *Islamic Sociopreneur Development Program* dengan jumlah peserta hingga 100 mahasiswa yang siap jadi *entrepreneur* muda. Program ini diharapkan dapat menciptakan pengusaha muda yang dapat berarti menciptakan pasar bagi Bank pada masa depan.

MOBIL MUSHOLLA

Untuk mendukung kegiatan ibadah spiritual bagi masyarakat yang sedang berada di tempat wisata atau lokasi *event*, Mandiri Syariah menyediakan mobil Musholla yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Tahun 2019 Mandiri Syariah menyerahkan dua unit mobil musholla untuk digunakan di Pulau Bali dan daerah Surabaya, setelah satu unit pertama untuk wilayah DKI Jakarta.

DUKUNGAN INDUK PERUSAHAAN

Sebagai salah satu Entitas Anak dari Bank Mandiri, Mandiri Syariah mendapatkan implikasi positif dari Entitas Induk. Bank Mandiri merupakan salah satu Bank terbesar di Indonesia yang memiliki keunggulan kompetitif dalam pengelolaan Bank. Pemanfaatan infrastruktur Bank Mandiri untuk Entitas Anak adalah sebagai berikut:

- Pembukaan layanan Syariah Bank (pembukaan rekening di cabang Bank Mandiri).
- Kerjasama konter layanan gadai di Bank Mandiri.
- Kerjasama *co branding e-money* dengan Bank Mandiri.
- Kerjasama *host to host e-channel.*
- Kerjasama *cash pooling.*
- Kerjasama *wholesale.*

Mandiri Syariah juga menjalin sinergi yang efektif di tingkat Mandiri Group melalui:

1. Kerjasama AXA Mandiri Financial Services (AMFS).
2. Kerjasama layanan saham syariah dengan Mandiri Sekuritas.
3. Kerjasama produk reksa dana dengan Mandiri Investasi.
4. Kerjasama *counter* dengan layanan gadai di Bank Mantap.
5. Kerjasama penjualan produk layanan dengan Mandiri Tunas Finance.
6. Kerjasama penjualan produk Mandiri Syariah dengan Mandiri Utama Finance.
7. Kerjasama dengan Mandiri Inhealth.
8. Kerjasama dengan Mandiri Dana Pensiun.

mandiri
syariah

mandiri syariah

KILAS KINERJA

CAPAIAN PENTING 2019

Aset

Meningkat **14,19%**

dari **Rp98.341** miliar
pada tahun 2018

menjadi **Rp112.292** miliar
pada tahun 2019.

Pembiayaan + Pinjaman Qardh + Piutang

Meningkat **15,99%**

dari **Rp64,90** miliar
pada tahun 2018

menjadi **Rp73,21** miliar
pada tahun 2019.

Dana Syirkah Temporer

Rp

Meningkat **10,83%**

dari **Rp75.450** miliar
pada tahun 2018

menjadi **Rp83.619** miliar
pada tahun 2019.

Dana Pihak Ketiga

Meningkat **14,11%**

dari **Rp87.472** miliar
pada tahun 2018

menjadi **Rp99.810** miliar
pada tahun 2019.

Meningkat **14,98%**

dari **Rp8.039** miliar
pada tahun 2018

menjadi **Rp9.243** miliar
pada tahun 2019.

Ekuitas

Rp

Pendapatan sebagai Mudharib

Meningkat **9,48%**

dari **Rp7.688** miliar
pada tahun 2018

menjadi **Rp8.417** miliar
pada tahun 2019.

Meningkat **115,39%**

dari **Rp840** miliar
pada tahun 2018

menjadi **Rp1.758** miliar
pada tahun 2019.

Laba usaha

Laba bersih

Meningkat **110,68%**

dari **Rp605** miliar
pada tahun 2018

menjadi **Rp1.275** miliar
pada tahun 2019.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

IKHTISAR KEUANGAN DAN RASIO KEUANGAN

Tabel Ikhtisar Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	2017*)	2016	2015
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN					
ASET					
Kas	1.591.962	1.324.081	1.135.610	1.086.569	1.611.125
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	11.010.935	9.658.298	14.391.293	13.004.700	8.312.711
Giro Pada Bank Lain – Bersih	2.259.529	1.452.103	701.347	1.550.966	530.756
Investasi Pada Surat Berharga - Bersih	21.088.128	17.475.441	10.235.644	6.752.180	7.575.001
Piutang :					
- Murabahah	40.170.279	38.355.135	36.233.737	36.198.342	34.807.005
- Istishna	262	359	3.144	6.042	11.593
- Piutang Ijarah	1.567	1.264	13.706	7.702	18.286
- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dan Penyisihan Kerugian	(1.069.184)	(1.349.283)	(1.511.157)	(1.424.620)	(1.393.313)
Pinjaman Qardh - Bersih	6.441.269	4.044.308	2.609.571	1.963.321	1.931.684
Pembiayaan - Bersih	27.663.292	23.849.276	20.628.438	16.086.673	13.111.451
Tagihan Akseptasi - Bersih	233.513	246.316	97.569	112.890	257.721
Aset yang Diperoleh Untuk Ijarah - Bersih	367.516	607.100	787.769	907.190	806.048
Penyertaan Modal Sementara - Bersih	-	25.166	42.782	42.782	42.782
Aset Tetap	1.121.079	984.630	881.504	973.273	1.124.136
Aset Lain	1.411.720	1.666.922	1.664.063	1.563.712	1.622.723
JUMLAH ASET	**112.291.867**	**98.341.116**	**87.915.020**	**78.831.722**	**70.369.709**
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, SURAT BERHARGA SUBORDINASI YANG DITERBITKAN DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
Liabilitas Segera	312.026	226.274	1.037.608	1.010.959	912.490
Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer dan Bonus Wadiah Pihak Ketiga yang Belum Dibagikan	97.155	79.117	89.592	71.489	54.582
Simpanan Wadiah	16.637.027	12.455.764	11.629.334	9.454.288	8.057.950
Simpanan Dari Bank Lain	67.135	78.245	69.384	56.563	44.424
Liabilitas Akseptasi	235.872	248.804	98.554	114.030	260.325
Utang Pajak	187.853	115.419	181.775	79.864	105.699
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	16.740	12.493	32.366	14.257	24.883
Liabilitas Lain-Lain	1.498.495	1.261.146	392.822	431.347	422.755
JUMLAH LIABILITAS	**19.052.303**	**14.477.262**	**13.506.681**	**11.232.797**	**9.883.107**
DANA SYIRKAH TEMPORER					
Dana Syirkah Temporer Bukan Bank	83.166.495	75.008.760	66.267.487	60.488.992	54.044.429
Dana Syirkah Temporer Bank	446.027	433.610	445.289	335.914	317.933

Uraian	2019	2018	2017*)	2016	2015
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	**83.618.729**	**75.449.689**	**66.719.098**	**60.831.488**	**54.372.863**
SURAT BERHARGA SUBORDINASI YANG DITERBITKAN					
JUMLAH SURAT BERHARGA SUBORDINASI YANG DITERBITKAN	375.000	375.000	375.000	375.000	500.000
EKUITAS					
JUMLAH EKUITAS	**9.245.835**	**8.039.165**	**7.314.241**	**6.392.437**	**5.613.739**
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, SURAT BERHARGA SUBORDINASI YANG DITERBITKAN DAN EKUITAS	**112.291.867**	**98.341.116**	**87.915.020**	**78.831.722**	**70.369.709**
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB					
- Pendapatan dari Jual Beli	4.776.751	4.565.821	4.336.028	4.048.565	3.832.690
- Pendapatan Bagi Hasil	2.263.661	1.947.006	1.747.950	1.466.768	1.252.209
- Pendapatan Usaha Utama Lainnya	1.323.834	1.150.605	1.057.128	903.410	756.548
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank sebagai Mudharib	8.417.750	7.688.793	7.286.674	6.467.897	5.960.016
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER	(3.014.676)	(2.659.310)	(2.541.130)	(2.339.720)	(2.438.224)
HAK BAGI HASIL MILIK BANK	5.403.074	5.029.483	4.745.544	4.128.177	3.521.792
PENDAPATAN USAHA LAINNYA	1.866.238	1.605.055	943.252	860.071	938.859
BEBAN USAHA	(5.460.048)	(5.794.548)	(5.218.590)	(4.545.261)	(4.090.736)
LABA USAHA	1.809.264	839.990	470.206	442.987	369.915
PENDAPATAN DAN BEBAN NON-USAHA	(50.284)	(3.341)	29.342	2.863	13.804
LABA SEBELUM ZAKAT DAN PAJAK PENGHASILAN	1.758.980	836.649	499.548	445.850	383.719
ZAKAT	(43.974)	(20.916)	(12.488)	(11.146)	(9.593)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.715.006	815.733	487.060	434.704	374.126
(BEBAN)/MANFAAT PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(439.972)	(210.520)	(121.894)	(109.290)	(84.551)
LABA BERSIH **)	1.275.034	605.213	365.166	325.414	289.576
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA	(68.364)	119.711	56.638	(46.716)	392.199
JUMLAH LABA RUGI KOMPREHENSIF	1.206.670	724.924	421.804	(46.716)	681.775
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (Dalam Rupiah Penuh)	2.133	1.012	734	818	946
LAPORAN ARUS KAS					
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi - Bersih	8.304.311	4.699.431	6.247.630	1.031.514	1.819.355
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi - Bersih	(6.686.179)	(5.521.495)	(3.541.658)	950.953	(6.124.279)

Uraian	2019	2018	2017*)	2016	2015
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan - Bersih	-	-	500.000	375.000	350.000
(PENURUNAN)/KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	1.618.132	(822.064)	3.205.972	2.357.467	(3.954.924)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	13.296.197	14.118.261	10.912.289	8.554.822	12.509.745
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	14.914.329	13.296.197	14.118.261	10.912.289	8.554.822
LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL					
Pendapatan Usaha Utama (Akrual)	8.417.750	7.688.793	7.286.674	6.467.897	5.960.016
- Pengurang	(506.578)	(592.140)	(552.823)	(537.031)	374.935
- Penambah	592.140	552.823	537.031	374.935	336.863
Pendapatan Yang Tersedia Untuk Bagi Hasil	8.503.312	7.649.476	7.270.882	6.305.801	5.921.944
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT					
Sumber Dana Zakat	61.515	35.326	26.029	24.321	22.851
Penyaluran Dana Zakat	(36.850)	27.751	24.636	22.766	31.285
Saldo Awal Dana Zakat	22.263	14.688	13.295	11.740	20.173
Saldo Akhir Dana Zakat	46.928	22.263	14.688	13.295	11.740
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN					
Sumber Dana Kebajikan	16.709	23.973	49.613	40.677	73.738
Penggunaan Dana Kebajikan	(61.699)	(27.751)	(21.349)	(36.990)	(5.540)
Saldo Awal Dana Kebajikan	78.357	139.592	136.051	132.486	64.113
Saldo Akhir Dana Kebajikan	33.141	78.357	164.346	136.051	132.486
RASIO KEUANGAN (*Bank Only*)					
PERMODALAN					
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	16,15%	16,26%	15,89%	14,01%	12,85%
Aktiva Tetap Terhadap Modal	28,11%	28,66%	28,89%	32,45%	35,20%
ASET PRODUKTIF (%)					
Aset Produktif dan Non Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif dan Non Produktif	1,71%	2,41%	3,65%	4,00%	5,28%
Aset Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif	1,74%	2,45%	3,50%	4,03%	5,08%
CKPN Aset Keuangan Terhadap Aset Produktif	1,89%	2,48%	2,46%	2,76%	3,12%
NPF *Gross*	2,44%	3,28%	4,53%	4,92%	6,06%
NPF *Nett*	1,00%	1,56%	2,71%	3,13%	4,05%
PROFITABILITAS					
ROA	1,69%	0,88%	0,59%	0,59%	0,56%
ROE	15,66%	8,21%	5,72%	5,81%	5,92%
NIM	6,36%	6,56%	7,35%	6,75%	6,54%
BOPO	82,89%	91,16%	94,44%	94,12%	94,78%
LIKUIDITAS					
Loan to Funding Ratio (LFR)	75,54%	74,89%	75,43%	76,83%	79,36%
Rasio aset likuid terhadap total aset	25,59%	21,51%	23,79%	19,88%	19,78%
Rasio Total Aset Likuid terhadap Pendanaan Jangka Pendek	28,79%	24,18%	26,84%	22,41%	22,41%
Rasio total kredit kepada UMKM terhadap total kredit	16,85%	20,46%	22,89%	25,52%	27,86%

Uraian	2019	2018	2017*)	2016	2015
KEPATUHAN					
Persentase Pelanggaran BMPD					
Pihak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pihak Tidak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Persentase Pelampauan BMPD					
Pihak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pihak Tidak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Giro Wajib Minimum (GWM)					
- GWM Rupiah	4,88%	5,05%	8,05%	5,14%	5,09%
- GWM Valuta Asing	1,13%	1,13%	1,05%		
Posisi Devisa Netto	4,41%	2,37%	3,16%	8,65%	2,12%
RASIO LAINNYA					
LLR/NPL Bruto (*Coverage Ratio*) (%)	107,02%	101,26%	70,33%	67,25%	58,11%
CIR (Rasio Biaya Terhadap Pendapatan) (%)	82,89%	91,16%	94,44%	94,12%	94,78%
Operating Income/Employee (dalam juta Rupiah)	205.68	96.44	52.99	48.29	38.68

*) Direklasifikasi
**) Mandiri Syariah tidak memiliki Entitas Anak, sehingga perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total.

IKHTISAR OPERASIONAL

RETAIL BANKING

Tabel Pembiayaan *Retail Banking*

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	2017
Business Banking (BBG)	7.979.607	8.595.213	8.950.378
Micro Banking (MBG)	3.796.198	4.344.973	4.266.141
Consumer Banking (CHG)	30.204.558	24.310.583	18.833.848
Pawning (PWG)	2.985.861	2.708.697	2.358.308
Retail	**44.966.223**	**39.959.466**	**34.408.676**

RETAIL BANKING

Tabel Pendanaan *Retail Banking*

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	2017
Business Banking (BBG)	**1.734.624**	**1.877.811**	**1.339.717**
Giro	501.179	600.511	561.988
Tabungan	659.754	718.001	510.715
Deposito	573.691	559.299	267.014
Micro Banking (MBG)	**365.472**	**428.705**	**447.771**
Giro	2.725	3.435	2.735
Tabungan	315.736	389.822	416.289
Deposito	47.012	35.448	28.747

Tabel Pendanaan *Retail Banking*

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	2017
***Funding, Hajj & Umra* (FHU) & *Wealth Management Group* (WMG)**	**66.860.814**	**57.012.177**	**49.391.086**
Giro	4.876.759	4.319.668	3.662.178
Tabungan	37.877.879	32.785.521	28.934.692
Deposito	24.106.176	19.906.988	16.794.216
Total	**68.960.910**	**59.969.821**	**51.178.575**
Giro	5.380.662	4.479.185	4.226.901
Tabungan	38.540.358	34.011.930	29.861.696
Deposito	24.726.879	21.478.707	17.089.978

WHOLESALE BANKING

Tabel Pembiayaan *Wholesale Banking*

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	2017
Corporate Banking (CB)	22.353.676	21.122.561	20.178.333
Commercial Banking (CMG)	8.223.959	6.670.770	5.870.885
Total Pembiayaan *Wholesale Banking*	**30.576.635**	**27.793.331**	**26.049.219**

Tabel Pendanaan *Wholesale Banking*

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	2017
***Corporate Banking* (CBG)**	3.104.142	**1.847.764**	**2.883.035**
Giro	2.241.378	1.163.802	1.608.945
Tabungan	113.720	386.799	903.980
Deposito	749.044	297.163	370.110
***Commercial Banking* (CMG)**	**2.217.292**	**813.917**	**835.468**
Giro	954.557	587.725	468.700
Tabungan	251.078	130.240	143.285
Deposito	1.011.657	95.952	223.483
***Institutional Banking* (IBG)**	**26.040.547**	**25.022.042**	**23.370.303**
Giro	5.970.588	2.903.786	2.575.451
Tabungan	925.154	818.363	801.919
Deposito	19.144.805	21.299.892	19.992.933

INFORMASI HARGA SAHAM

Modal ditempatkan dan disetor penuh tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebanyak 597.804.387 saham dengan nilai nominal Rp5.000 per saham, sehingga total modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp2.989.021.935.000.

Sampai dengan 31 Desember 2019, Mandiri Syariah belum menjadi perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa saham. Dengan demikian, tidak terdapat informasi harga saham, kapitalisasi pasar saham, dan volume perdagangan saham. Sedangkan informasi modal saham selama dua tahun terakhir disajikan sebagai berikut:

Tabel Harga Saham

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018
Modal saham - nilai nominal Rp5.000 per saham Modal dasar - 600.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 Modal ditempatkan dan disetor penuh 597.804.387 dan 497.804.387 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018	2.989.022	2.989.022

AKSI KORPORASI

Selama tahun 2019, Mandiri Syariah tidak melakukan Aksi Korporasi.

AKSI PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM (*SUSPENSION*) DAN/ATAU PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM (*DELISTING*)

Sampai dengan 31 Desember 2019, Mandiri Syariah belum menjadi perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa saham. Dengan demikian, tidak terdapat Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*).

INFORMASI OBLIGASI, SUKUK DAN/ATAU OBLIGASI KONVERSI

Mandiri Syariah memiliki Sukuk *Mudharabah* Subordinasi (*Subordinated Notes Mudharabah* Bank Syariah) tahun 2016. *Subordinated notes (subnotes) mudharabah* Mandiri Syariah tahun 2016 sebesar Rp375.000 juta merupakan surat berharga yang diterbitkan Bank pada tanggal 22 Desember 2016 dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2023. *Nisbah* yang diberikan kepada pemegang *subnotes* adalah sebesar 27,07% dari pendapatan yang dibagihasilkan yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.

Bertindak sebagai wali amanat Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Mandiri Syariah Tahun 2016 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir, Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Mandiri Syariah Tahun 2016 memiliki peringkat idAA– (*Double A Minus Sharia*) di tahun 2019 dari agen pemeringkat efek PT Pefindo sama dengan peringkat di tahun 2018.

Tabel Informasi Sukuk

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah Sukuk (jutaan Rupiah)	Nilai Penawaran (jutaan Rupiah)	Nisbah sebelum tanggal jatuh tempo	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat	
						2019	2018
Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BSM Tahun 2016	375.000	375.000 (100%)	Nisbah 27,07%	22 Desember 2016	22 Desember 2023	PT Pefindo idAA (*Double A Minus Sharia*)	PT Pefindo idAA (*Double A Minus Sharia*)

Sampai dengan 31 Desember 2019, Mandiri Syariah tidak memiliki Obligasi dan Obligasi Konversi, sehingga tidak terdapat informasi mengenai Obligasi dan Obligasi Konversi.

PERISTIWA PENTING

30 JANUARI

SEVP Distribution and Service Mandiri Syariah Anton Sukarna, Corporate Secretary Ahmad Reza dan Group Head Retail Deposit DB Ivan Baruna berbincang usai menjelaskan kesiapan Mandiri Syariah sebagai mitra distributor Sukuk Tabungan Seri ST003.

18 FEBRUARI

Mandiri Syariah bersama Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto meresmikan pabrik pengolahan Padi Sehat milik Gabungan Kelompok Tani Sehat dan Ramah Lingkungan (Gapsera) desa Rejoasri, Lampung Tengah. Mandiri Syariah menyalurkan dana sosial senilai Rp2,5 miliar bagi Gapsera dalam program Desa Berdaya Sejahtera Mandiri.

18 FEBRUARI

Menyambut bulan suci Ramadan, Mandiri Syariah secara serentak menyelenggarakan Tarhib Ramadhan di seluruh Cabang di Indonesia dengan dimeriahkan acara jalan santai, bazaar, hiburan, tausyiah serta santunan 11.600 anak yatim dhuafa dari seluruh Indonesia.

29 FEBRUARI

Corporate Secretary Mandiri Syariah Ahmad Reza bersama Direktur Eksekutif Laznas BSM Umat Rizqi Okto Priansyah melihat peternakan ulat Hong Kong Sugeng Jaya Farm didampingi mahasiswa binaan *Islamic Sociopreneur Development* Program (ISDP) di Institut Pertanian Bogor (IPB), di Bogor, Jawa Barat

12 MARET

Mandiri Syariah membukukan laba bersih di sepanjang tahun 2018 sebesar Rp605 miliar, atau mengalami kenaikan hingga 65,74 persen (yoy) bila dibandingkan dengan posisi per akhir 2017 yang tercatat sebesar Rp365 miliar.

19 MARET

Corporate Secretary Mandiri Syariah Ahmad Reza dan Region Head III Jakarta Deden Durachman mendampingi petugas layanan nasabah melayani calon jamaah haji yang akan melakukan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Kantor Cabang Mandiri Syariah Area Bekasi, Jawa Barat.

01
APRIL

Mandiri Syariah Gandeng Hijup Layani Transaksi Pembayaran Syariah.

03
MEI

Mandiri Syariah bersama Lembaga Amil Zakat (Laznas) BSM Umat meresmikan program Desa Berdaya Sejahtera Mandiri (BSM) Klaster Peternakan Kambing di Purbalingga, Jawa Tengah.

08
MEI

Mandiri Syariah meluncurkan *platform* wakaf *digital* jadiberkah.id. untuk memudahkan transaksi wakaf baik bagi pemberi wakaf (wakif) ataupun pihak yang menerima harta benda wakaf (*nazhir*).

16
MEI

Mandiri Syariah memperoleh penghargaan 8th Digital Infobank Awards 2019 yang diselenggarakan Infobank dan Isentia.

17
MEI

Direktur Utama Mandiri Syariah Toni EB Subari dan Direktur Wholesale Kusman Yandi, berbincang dengan Direksi PT Angkasa Pura Support usai penandatanganan Perjanjian *Line Facility* Pembiayaan Investasi dan Modal Kerja dengan limit total sebesar Rp600 Miliar.

24
MEI

Direktur Utama Mandiri Syariah Toni EB Subari berbincang dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prof. DR. Zudan Arif Fakrulloh SH, MH usai penandatanganan perjanjian kerjasama antara 23 bank dan lembaga keuangan nonbank dengan Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri di Kantor Pusat Mandiri Syariah.

26 MEI

Secara serentak di seluruh Indonesia, Mandiri Syariah menggelar Sahabat Belanja Yatim dengan mengajak seribu anak yatim berbelanja pakaian Lebaran untuk menyambut Idul Fitri 1440 H.

01 JUNI

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Direktur Utama Mandiri Syariah Toni EB Subari dan Komisaris Utama Mandiri Syariah Mulya E. Siregar membantu peserta program Mudik Bareng Disabilitas yang tengah menaiki mobil di sela acara program Mudik Bareng Disabilitas yang diselenggarakan Mandiri Syariah di Jakarta.

25 JUNI

Menjelang musim haji 2019, Mandiri Syariah menyediakan layanan penukaran Saudi Arabian Riyal (SAR) bagi calon jamaah haji Indonesia.

27 JUNI

Mandiri Syariah kembali mendapatkan penghargaan *Infobank Banking Service Excellence Award* 2019 yang diselenggarakan Majalah Infobank dan MRI.

29 JUNI

Mandiri Syariah terus meningkatkan layanan digital, salah satunya melalui kerjasama di bidang Jaminan Produk Halal dan Pengembangan *E-Commerce* Syariah.

04 JULI

Mandiri Syariah Raih Penghargaan The Asset Triple A Islamic Finance Awards 2019, yakni *Islamic Bank of the Year in Indonesia, Best Islamic Retail Bank, Best Islamic Trade Finance Bank* dan *Islamic Banker of the Year 2019* atas nama Direktur Utama Mandiri Syariah Toni EB Subari.

23
AGUSTUS

Mandiri Syariah memperoleh penghargaan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Award 2019 untuk kategori aset terbesar bank umum syariah.

28
AGUSTUS

Mandiri Syariah memperoleh penghargaan 24th Infobank Awards 2019 dengan predikat Sangat Bagus.

20
SEPTEMBER

Mandiri Syariah Menjadi Wali Amanat Penerbitan Sukuk PNM Senilai Rp435 Miliar.

20
SEPTEMBER

Mandiri Syariah kembali meluncurkan mobil musholla generasi kedua di Surabaya. Mobil musholla ini untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat di tengah acara-acara *outdoor* sesuai dengan kebutuhan *event* yang diselenggarakan Mandiri Syariah ataupun instansi yang bekerja sama dengan Mandiri Syariah.

22
SEPTEMBER

Mandiri Syariah menyelenggarakan acara Serambi Berkah Silaturahim di *Car Free Day* (CFD) Jakarta Thamrin.

25
SEPTEMBER

Mandiri Syariah bersama nasabah dan Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Umat bergerak membuat program Ekspedisi Mandiri Syariah Melawan Asap berupa pengadaan rumah aman asap, layanan kesehatan dan mobile klinik serta penyediaan makanan sehat dan bergizi bagi masyarakat Riau.

29
SEPTEMBER

Mandiri Syariah memperoleh penghargaan *Best Islamic Finance Awards* 2019 untuk kategori *Best Islamic Finance Retail Bank* dan *Best* FX *Bank for Corporate Islamic Treasury dari Alpha Southeast Asia.*

05
OKTOBER

Mandiri Syariah memberangkatkan lebih dari 600 pegawai untuk melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci sebagai bagian dari program *engagement* dan apresiasi atas kinerja pegawai di 2018.

09
OKTOBER

Mandiri Syariah Salurkan Bantuan Perbaikan Sekolah Di Sigi Sulawesi Tengah.

09
OKTOBER

Mandiri Syariah bersama dengan Laznas BSM Umat melakukan dukungan pemberdayaan masyarakat di Desa Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

12
OKTOBER

Mandiri Syariah menyerahkan bantuan dua motor *home care* kepada Rumah Sakit (RS) Aisyiyah Muntilan dan Yayasan Syubbanul Wathon, di Magelang, Jawa Tengah.

01
NOVEMBER

Mandiri Syariah kembali ditunjuk pemerintah menjadi mitra penjualan sukuk tabungan seri ST 006.

01 NOVEMBER

Mandiri Syariah menyambut milad ke-20 dengan menggelar gerakan donasi 20 ribu Alquran *Braille* dan program promo spesial untuk nasabah.

04 NOVEMBER

Mandiri Syariah raih tiga penghargaan internasional yakni *Strongest Islamic Retail Bank in Indonesia* 2019, *Most Innovative Islamic Retail Bank in Indonesia* 2019, dan *Best Sustainable Finance Strategy* 2019 dari *Cambridge International Financial Advisory* (IFA) dalam ajang *Islamic Retail Banking Award* (IRBA).

06 NOVEMBER

Mandiri Syariah meluncurkan fitur Mandiri Syariah Mobile (MSM) *Keyboard* untuk mengakomodir tingginya aktivitas dan ketergantungan masyarakat *modern* pada media *digital* khususnya *handphone*.

08 NOVEMBER

Direktur Utama Mandiri Syariah Toni EB Subari mendampingi nasabah melakukan transaksi secara daring di *Digital Branch* Mandiri Syariah Kantor Cabang Thamrin. Mandiri Syariah mempersembahkan Digital Branch, inovasi kantor nyaman berbasis teknologi sebagai bentuk peningkatan layanan kepada nasabah.

10 NOVEMBER

Mandiri Syariah merupakan Bank Syariah dengan kontributor QR *Code* terbanyak di kotak amal, bersama dengan 17 bank BUMN dan swasta di Jawa Timur memecahkan Rekor Nasional Elektronifikasi Rumah Ibadah menggunakan *quick response code* (QR code) dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI).

14 NOVEMBER

Mandiri Syariah meresmikan Masjid Cipali yang berlokasi di Rest Area Km 166 Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) arah Cirebon. Masjid yang megah ini untuk mengakomodir kebutuhan beribadah masyarakat yang tengah dalam perjalanan.

14 NOVEMBER

Bank Mandiri dan Mandiri Syariah meraih penghargaan tertinggi pada *Annual Report Award* (ARA) atas laporan keuangan tahun 2018. Bank Mandiri menjadi juara pertama kategori BUMN Keuangan Listed. Sedangkan Mandiri Syariah menjadi juara pertama untuk kategori Perusahaan Swasta Keuangan *Non Listed.*

19 NOVEMBER

Mandiri Syariah mendapatkan penghargaan Anugerah Syariah Republika Awards 2019 sebagai Bank Syariah Terbaik kategori Bank Buku 3.

27 NOVEMBER

Mandiri Syariah mendapatkan penghargaan Tempo *Financial Award* 2019 sebagai *The Best Bank in retail Banking Services* kategori Bank Syariah.

27 NOVEMBER

Mandiri Syariah mendapatkan penghargaan The *Indonesia Best Brand Award* (IBBA) 2019 untuk kategori Bank Syariah.

28 NOVEMBER

Mandiri Syariah memperoleh penghargaan sebagai Bank Pendukung Pengendalian Moneter Terbaik dari Bank Indonesia.

5 DESEMBER

Mandiri Syariah meluncurkan fitur pembukaan rekening *online* demi kemudahan dan kenyamanan nasabah.

5
DESEMBER

Mandiri Syariah mendapatkan *penghargaan Financial Award 2019 for the excellence in brand building among Indonesian millennials in* 2019.

11
DESEMBER

Mandiri Syariah menerima penghargaan dari *The Finance*, anak perusahaan Infobank sebagai salah satu *Top 20 Financial Institutions 2019*.

11
DESEMBER

Mandiri Syariah meraih kategori tertinggi **"***The Most Trusted Company***"** dalam *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) Award 2019.

16
DESEMBER

Mandiri Syariah memperoleh penghargaan sebagai Mitra Distribusi SBSN Ritel Terbaik 2019 dan Peserta Lelang SBSN Terbaik Tahun 2019 oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia.

mandiri
syariah

mandiri syariah

LAPORAN MANAJEMEN

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Tantangan dan peluang yang terjadi diperekonomian dan industri telah dihadapi dengan baik oleh Direksi. Atas kepengurusan yang efektif, Mandiri Syariah telah mencatatkan kinerja yang baik di 2019. Pertumbuhan aset Mandiri Syariah mencapai 14,19% (YoY), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset perbankan umum sebesar 5,93% (YoY). Di sisi lain, pembiayaan Mandiri Syariah tumbuh 11,50% (YoY) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan perbankan syariah dan perbankan umum masing-masing sebesar 10,36% (YoY) dan 6,53% (YoY). Laba bersih Mandiri Syariah tumbuh 110,68% (YoY) jauh lebih tinggi dibandingkan perbankan syariah sebesar 23,89% (YoY) dan perbankan umum sebesar 6,05% (YoY).

Mulya Effendi Siregar
Komisaris Utama

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya yang kami hormati,

Bersama ini kami sampaikan Laporan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat atas jalannya kepengurusan Perseroan. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perusahaan.

Beberapa hal penting terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, kami sampaikan sebagai berikut:

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI PERSEROAN

Dalam menjalankan pengawasan terhadap implementasi strategi, Dewan Komisaris telah mewujudkan dengan menyelenggarakan Rapat Gabungan dengan Direksi, Rapat dengan Dewan Pengawas Syariah serta melalui pelaksanaan tugas komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Hasil pengawasan dan penasehatan ditindaklanjuti dengan mengeluarkan keputusan pengawasan dan penasehatan antara lain terkait dengan:

a. Pembiayaan kepada Pihak Terkait Mandiri Syariah.
b. Perubahan Struktur Organisasi Mandiri Syariah.
c. Rencana Bisnis Bank Tahun 2019-2021.

Dewan Komisaris memberikan arahan untuk fokus pada pertumbuhan yang sehat dan berkualitas serta penguatan berbagai aspek antara lain *business refocusing* (*first core: consumer, the second core: corporate, low cost fund, wealth management, transaction banking*, dan *digital ecosystem*), *fixing the fundamental (lean organization* & KPI, *digitalization business process,* dan *marketing communication*), dan *strengthening enablers* (aliansi *wholesale & retail, people (capability & productivity*), *cost efficiency,* dan sinergi Mandiri Group).

Dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis Mandiri Syariah, Dewan Komisaris telah meminta Direksi untuk mengoptimalkan kekuatan dan keunggulan yang dimiliki Bank Mandiri dan anak perusahaannya (Mandiri Group), yaitu dengan melaksanakan sinergi. Dewan Komisaris juga meminta Direksi agar sinergi dengan Mandiri Group dilakukan dalam aspek yang lebih luas antara lain pertumbuhan bisnis, pengembangan SDM (dengan tetap mengedepankan perkembangan karir pegawai yang berasal dari internal Mandiri Syariah), pengembangan teknologi informasi, dan sebagainya. Dewan Komisaris secara intensif melakukan pengawasan dan pemberian nasihat agar pelaksanaan inisiatif strategis sinergi dengan Mandiri Group dapat terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan.

Dewan Komisaris *concern* terhadap kepatuhan Mandiri Syariah termasuk implementasi prinsip-prinsip syariah, antara lain dengan meminta Direksi agar memastikan penggunaan akad-akad telah sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, Dewan Komisaris juga meminta Direksi agar meningkatkan penyaluran pembiayaan yang menggunakan skema akad-akad selain murabahah, melakukan komunikasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menciptakan terobosan/inovasi produk dan aktivitas baru yang unik dan khas syariah, serta memastikan produk dan aktivitas baru Mandiri Syariah mendapatkan opini syariah terlebih dahulu sebelum diimplementasikan.

FREKUENSI DAN CARA PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI

Dalam menjalankan tugas pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris menggunakan mekanisme rapat-rapat yang diselenggarakan yang meliputi Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (Rakomdir), Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (Ragab), dan Rapat Komite-Komite. Adapun pembahasan rapat antara lain mengenai evaluasi berkala terhadap realisasi pencapaian target RBB Tahun 2019, pembahasan terkait isu-isu yang berkembang, tantangan yang dihadapi, strategi/*action plan* yang akan dilakukan, dan sebagainya.

1. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi (Rakomdir)
   Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi atau Direktur Bidang, dengan agenda realisasi pencapaian rencana bisnis bank bulanan, *issue-issue* terkini Bank, inisiatif strategis Bank seperti *corporate plan, core banking system,* dan lainnya.
2. Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (Ragab)
   Rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dengan agenda kinerja Bank, *issue-issue* terkini Bank, inisiatif strategis Bank, kepatuhan pelaksanaan prinsip syariah pada kegiatan usaha Bank, dan sebagainya.
3. Rapat Komite-Komite
   Rapat yang dilaksanakan Komite-Komite (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi) sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing guna mendukung Dewan Komisaris untuk melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

Selama tahun 2019, jumlah Rapat yang telah dilakukan Dewan Komisaris sebanyak 14 (empat belas) kali rapat internal dan 14 (empat belas) kali rapat gabungan. Secara keseluruhan, Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (Rakomdir), Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (Ragab), dan Rapat Komite-Komite diselenggarakan sebanyak 88 (delapan puluh delapan) kali.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi. Dasar penilaian yang digunakan oleh Dewan Komisaris adalah pencapaian kinerja keuangan dan operasional dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan industri. Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas capaian Direksi dalam menghadapi tantangan maupun menangkap peluang yang terjadi pada kondisi perekonomian dan industri.

Di tengah melemahnya perekonomian global, pertumbuhan ekonomi domestik tercatat sebesar 5,1% (YoY). Stabilnya perekonomian nasional juga diikuti dengan terjaganya dengan baik kondisi perbankan di Indonesia. Hal ini juga terjadi pada industri perbankan syariah.

Aset perbankan syariah 2019 mencapai Rp499,98 triliun, tumbuh 10,07% (YoY). Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, pangsa pasar aset perbankan syariah terhadap perbankan nasional mencapai 5,99%. Penghimpunan DPK perbankan syariah 2019 mencapai Rp402,36 triliun, tumbuh 13,05% (YoY). Pangsa pasar DPK perbankan syariah terhadap DPK perbankan nasional sebesar 6,81%. Dari sisi pembiayaan, pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah telah mencapai Rp345,28 triliun, tumbuh 10,36% (YoY). Pangsa pasar pembiayaan perbankan syariah terhadap perbankan nasional sebesar 6,27%. Sementara itu, kualitas pembiayaan perbankan syariah yang tercermin dari rasio *Non Performing Financing* (NPF) *gross* meningkat dari 2,85% di akhir tahun 2018 menjadi 3,18% di 2019.

Tantangan dan peluang yang terjadi di perekonomian dan industri telah dihadapi dengan baik oleh Direksi. Atas kepengurusan yang efektif, Mandiri Syariah telah mencatatkan kinerja yang baik di 2019. Pertumbuhan aset Mandiri Syariah mencapai 11,61% (YoY), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset perbankan umum sebesar 5,93% (YoY). Di sisi lain, pembiayaan Mandiri Syariah tumbuh 10,77% (YoY) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan perbankan syariah dan perbankan umum masing-masing sebesar 10,36% (YoY) dan 6,53% (YoY). Laba bersih Mandiri Syariah tumbuh 99,67% (YoY) jauh lebih tinggi dibandingkan perbankan syariah sebesar 23,89% (YoY) dan perbankan umum sebesar 6,05% (YoY).

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN OLEH DIREKSI

Kemampuan Direksi dalam melakukan analisis prospek usaha merupakan suatu hal yang penting. Dewan Komisaris berpandangan bahwa prospek usaha yang telah disusun Direksi sudah tepat. Dasar penilaian yang menjadi pertimbangan Dewan Komisaris meliputi prakiraan kondisi perekonomian dan industri perbankan, keunggulan-keunggulan yang dimiliki Bank serta *trend* pertumbuhan kinerja Bank.

Kondisi perekonomian Indonesia di masa yang akan datang menunjukkan sentimen yang positif, begitu pula dengan industri perbankan baik umum maupun syariah. Berbagai kebijakan Pemerintah juga mendukung kegiatan bisnis perbankan nasional. Stabilitas industri perbankan tetap terjaga disertai risiko kredit yang terkendali. Pada Desember 2019, rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) perbankan tetap tinggi mencapai 23,4% dan rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*/NPL) tetap rendah yaitu sebesar 2,73% (*gross*) atau 1,25% (net).

Berdasarkan kondisi perekonomian dan industri perbankan yang diperkirakan akan semakin membaik di masa yang akan datang, Dewan Komisaris berpandangan bahwa prospek usaha yang disusun oleh Direksi sudah tepat sebagai bank syariah terbesar di Indonesia.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Dewan Komisaris senantiasa memberikan saran kepada Direksi untuk terus melakukan evaluasi dan penguatan terhadap praktek-praktek GCG dalam menjalankan kegiatan usaha Mandiri Syariah, sehingga diharapkan Mandiri Syariah dapat tumbuh secara cepat, sehat, dan *sustainable*. Dewan Komisaris berpendapat bahwa Mandiri Syariah telah memiliki kesadaran bahwa penerapan GCG merupakan proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Mandiri Syariah telah menginternalisasi pelaksanaan prinsip-prinsip GCG ke dalam sistem dan prosedur kerja serta perilaku jajaran Mandiri Syariah sehingga menjadi budaya organisasi.

Untuk melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan GCG, Mandiri Syariah secara periodik melakukan *self assessment* Pelaksanaan Tata Kelola sesuai dengan Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG maka Mandiri Syariah secara rutin telah melaksanakan *self assessment* Pelaksanaan GCG yang dilaksanakan secara semesteran. Pada semester I dan II tahun 2019 hasil *assessment* menunjukkan hasil penilaian 1 atau kategori predikat "Sangat Baik".

Efektivitas penerapan GCG juga sudah mendapat pengakuan dari pihak eksternal melalui keikutsertaan Mandiri Syariah dalam program *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). Beberapa mekanisme penerapan GCG disajikan sebagai berikut:

MANAJEMEN RISIKO

Bank senantiasa berupaya untuk meningkatkan pengelolaan risiko yang efektif melalui penerapan manajemen risiko yang terintegrasi. Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan manajemen risiko sudah baik.

Pengelolaan risiko Bank telah dilakukan secara proaktif dan terintegrasi untuk mengelola risiko sesuai *risk appetite* dan *risk tolerance* guna menjaga ketersediaan modal, mendukung strategi bisnis serta menjaga reputasi bank. Implementasi manajemen risiko dilaksanakan melalui empat pilar penerapan manajemen risiko sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Komisaris. Organisasi manajemen risiko terdiri atas Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan risiko dibantu oleh Komite Pemantau Risiko (KPR) dan Direksi yang menjalankan fungsi kebijakan dan strategi risiko (*risk policy*) dibantu oleh Komite Manajemen Risiko.
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit. Bank memiliki Kebijakan Manajemen Risiko dan Standar Prosedur Manajemen Risiko sebagai pedoman utama penerapan manajemen risiko, yang merupakan landasan bagi kebijakan dan prosedur bisnis dan operasional.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Bank melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, dan sistem informasi manajemen risiko dengan pendekatan pengelolaan risiko melalui aktivitas operasional dan permodalan. Bank mengimplementasikan *Enterprise Risk Management* menggunakan pendekatan *two-prong*, untuk memastikan bahwa risiko tidak hanya dimitigasi dengan baik melalui proses bisnis sehari-hari, namun juga pada kondisi yang tidak terduga (*downturn*) melalui pencadangan modal.
4. Sistem Pengendalian Intern. Bank menjalankan praktik pengelolaan risiko yang efektif di seluruh Unit Kerja dengan menerapkan kebijakan *Three line of defense models*, yaitu unit kerja (*risk owner*), Unit Risk Management, dan Unit Internal Audit. Pelaksanaan sistem pengendalian internal atas fungsi Manajemen Risiko merupakan tanggung jawab bersama baik *first, second* maupun *third line of defense*.
5. Kecukupan sistem pengendalian risiko. Bank menyadari bahwa proses penerapan manajemen risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian risiko yang handal. Untuk memastikan kecukupan sistem pengendalian risiko, Bank melaksanakan kaji ulang secara berkala baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko maupun Satuan Kerja Audit Intern.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pengendalian internal merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan (*on going basis*). Tujuan pengendalian internal adalah untuk menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank, menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan atau dampak kerugian, penyimpangan termasuk *fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan sistem pengendalian sudah berjalan dengan baik. Mandiri Syariah telah menjalankan pengawasan manajemen dan budaya pengendalian yang baik. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut. Direksi telah menciptakan dan

memelihara Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut telah berjalan secara aman dan andal sesuai dengan tujuan pengendalian intern yang ditetapkan oleh Bank. Adapun direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan telah berperan aktif dalam mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian. Dewan Pengawas Syariah telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank dengan melakukan analisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi internal audit dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. Di samping itu unit kerja terkait telah menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam memelihara dan melaksanakan sistem pengendalian yang efektif di unit kerja masing-masing serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai tujuan sistem pengendalian intern yang ditetapkan Bank.

KODE ETIK

Code of Conduct (CoC) merupakan bagian dari pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik. CoC mengatur tentang perilaku secara syariah, profesional, bertanggung jawab, wajar, patut, dan dapat dipercaya bagi Jajaran Bank, dalam melakukan hubungan bisnis baik dengan nasabah/calon nasabah, rekanan/calon rekanan, rekan sekerja maupun *stakeholders* lainnya.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan CoC di Mandiri Syariah telah cukup efektif. Jajaran Mandiri Syariah telah memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan Kode Eitk ke dalam setiap perilaku, sehingga tidak akan merugikan masing-masing insan yang bersangkutan ataupun Perusahaan karena tingkah laku insan mencerminkan etika bisnis Perusahaan.

Jajaran Bank wajib mematuhi pedoman *Code of Conduct* sebagai pedoman berperilaku, baik di dalam maupun di luar lingkungan Bank yang membawa citra Bank dengan penuh tanggung jawab. Pengenaan sanksi atas pelanggaran/ketidakpatuhan terhadap *Code of Conduct* mengacu pada peraturan kepegawaian yang berlaku. Sosialisasi *Code of Conduct* kepada seluruh jajaran manajemen dan pegawai telah dilakukan dengan membagikan buku pedoman *Code of Conduct*. Selain itu, juga melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Direksi dan pejabat *structural* di unit kerja masing-masing.

Mandiri Syariah memiliki Program Pengenalan CoC yaitu dengan menginternalisasi CoC kepada pegawai baru melalui pelatihan guna memberikan pemahaman pengertian dari benturan kepentingan dan kewajiban untuk menghindari kondisi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Untuk menjaga kode etik, manajemen melakukan tindak lanjut atas peristiwa terindikasi pelanggaran terhadap ketentuan perusahaan dalam bentuk *code of conduct* maupun ketentuan perundangan. Manajemen telah menindaklanjuti peristiwa terindikasi pelanggaran terhadap ketentuan *code of conduct* dengan pemeriksaan (investigasi) dan menindaklanjuti hasil investigasi tersebut. Selama tahun 2019, terdapat 5 (lima) peristiwa terindikasi pelanggaran atas kode etik dan *La Risywah*. Terhadap pelaku telah diberikan sanksi tegas termasuk pemutusan hubungan kerja.

KEBIJAKAN GRATIFIKASI

Dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari Bank perlu menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan nasabah, *vendor*, rekanan, mitra kerja dan seluruh *stakeholder* yang didasarkan pada etika, rasa saling percaya, dan bertanggung jawab. Bank telah memiliki kesadaran bahwa pengendalian gratifikasi merupakan kegiatan yang penting untuk menjaga proses bisnis berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa Kebijakan Gratifikasi telah dijalankan dengan baik. Mandiri Syariah telah memiliki Unit Pengendali Gratifikasi yang didukung dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) No.54/2018 tanggal 31 Desember 2018 Perihal Petunjuk Teknis Operasional Pengendali Gratifikasi. Petunjuk Teknis Operasional Pengendalian Gratifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang gratifikasi, menguraikan proses pelaporan, aspek pencegahan dan penindakan, serta pengenalan Sistem Pengendalian Gratifikasi, sehingga kepentingan bisnis tetap berjalan dengan baik dan beretika namun tidak bertentangan dengan ketentuan larangan gratifikasi dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari dengan nasabah, *vendor*, rekanan dan seluruh *stakeholder*. Dengan implementasi pengendalian gratifikasi maka diharapkan seluruh jajaran pegawai dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membangun nilai-nilai *Good Corporate Governance* dan menanamkan *value integrity.*
2. Tidak menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
3. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada Unit Pengendali Gratifikasi.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Untuk menciptakan praktik bisnis yang sehat, Mandiri Syariah telah memiliki mekanisme pengaduan laporan dugaan pelanggaran/penyimpangan yang disebut dengan mekanisme *whistleblowing system* (WBS). Bank melalui Internal Audit Group wajib menerima dan menindaklanjuti seluruh laporan dugaan pelanggaran/penyimpangan.

Saluran pengaduan yang digunakan adalah melalui email ke pengaduan@bsm.co.id yang dikelola oleh Decentralized Compliance & Operational Risk (DCOR)/Regional Bussiness Control (RBC) atau datang langsung ke Internal Audit Group untuk melaporkan adanya indikasi penyimpangan atau *fraud*.

Dewan Komisaris sangat berkomitmen dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi WBS. Melalui pelaksanaan tugas Komite Audit, Dewan Komisaris melakukan analisis setiap hasil investigasi yang telah dilakukan oleh Internal Audit Group. Dewan Komisaris berpandangan bahwa mekanisme WBS telah berjalan dengan baik. Sanksi dan penegakkannya sudah diterapkan dengan baik. Namun demikian, peningkatan kualitas mekanisme WBS masih sangat diperlukan, khususnya dengan meningkatkan saluran pengaduan secara langsung ke Komite Audit sebagai organ penunjang Dewan Komisaris.

TATA KELOLA TERINTEGRASI DENGAN ENTITAS UTAMA

Mandiri Syariah sebagai Perusahaan Anak dari Mandiri Group secara aktif telah ikut serta dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT) yang dibentuk Entitas Utama (Bank Mandiri) dan ditetapkan keanggotaannya sesuai ketentuan berdasarkan SK Direksi PT Bank Mandiri No. KEP. DIR/136/2015 tentang Perubahan Keanggotaan Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah terwakili dari beberapa Perusahaan Anak sesuai kebutuhan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Mandiri Syariah sebagai perusahaan anak telah mengikuti arahan sesuai rekomendasi dari rapat Tata Kelola Terintegrasi. Komite TKT memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit untuk mengevaluasi pelaksanaan intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.

Pembentukan Tata Kelola Terintegrasi ditujukan untuk menjamin terwujudnya persamaan persepsi antara dan seluruh Perusahaan Anak dengan Bank Mandiri terkait peningkatan kualitas tata kelola yang baik dalam Konglomerasi Keuangan dan membangun sinergi dan aliansi bisnis yang kuat antara seluruh Perusahaan Anak dengan Bank Mandiri untuk menciptakan nilai tambah bagi Konglomerasi Keuangan secara berkesinambungan.

Komite TKT telah melakukan evaluasi dengan melalui rapat yang diadakan tanggal 4 Desember 2019 dengan fokus pembahasan mengenai:

1. Tindak Lanjut Masukan Komite TKT
2. Penyesuaian Piagam TKT
3. Rencana Kerja Satuan Kerja Terintegrasi 2020

PENDAPATAN NON-HALAL DAN PENGGUNAANNYA

Pendapatan non halal dan penggunaannya dalam bank syariah merupakan faktor penting dalam pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah. Sebagai bentuk pelaksanaan GCG terkait dengan pendapatan non halal dan penggunaannya, Bank telah menginternalisasi aturan tersebut dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Corporate Secretary Mandiri Syariah dengan nomor registrasi SPO/06-2016 berlaku tanggal 15 November 2018. Dalam SPO tersebut mengatur:

1. Lembaga Mitra, adalah lembaga pengelola zakat/sosial yang memiliki *track record* baik dalam penyaluran dana zakat/infaq/kebajikan/sosial, berbadan hukum yang sah, dan dijadikan sebagai mitra Bank dalam penyaluran dana zakat/infaq/kebajikan/sosial. Sebagai bentuk pelaksanaan GCG dan untuk menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*), maka pemberian atau penyaluran Dana Kebajikan (sosial) tidak diperkenankan kepada:
   a. Lembaga dimana Pengurus Bank (Dekom, Direksi), Dewan Pengawas Syariah, maupun Pejabat Eksekutif Bank menjadi pengurus lembaga tersebut.
   b. Perorangan atau lembaga yang pengurusnya memiliki hubungan keluarga dengan Pengurus Bank, Dewan Pengawas Syariah maupun Pejabat Eksekutif Bank.
2. Pendapatan non halal menjadi sumber dana Kebajikan Bank yang terdiri dari:
   a. Dana Kebajikan dari *Penalty*, yakni Dana yang berasal dari denda keterlambatan (*penalty*) pembayaran angsuran.
   b. Dana Kebajikan dari Jasa Giro, yakni Dana kebajikan yang berasal dari jasa giro yang diterima Bank dari penempatan pada bank konvensional.
   c. Dana Kebajikan Lainnya, yakni Dana kebajikan yang berasal dari komisi, fee, atau pendapatan dalam bentuk lainnya dari rekanan Bank selain pendapatan yang berhak diterima sesuai dengan ketentuan manajemen.

   Dewan Komisaris berpendapat bahwa pengelolaan dana non hal pada Mandiri Syariah telah berjalan dengan baik.

PENILAIAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah membentuk 3 (tiga) komite yaitu:
1. Komite Audit
2. Komite Remunerasi dan Nominasi
3. Komite Pemantau Risiko

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Bank, terutama dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal (*Internal Control System*), serta efektivitas pemeriksaan oleh internal dan auditor eksternal. Sepanjang tahun 2019, Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Kajian atas Hasil Penelaahan Realisasi Audit *Top Letters* Internal Audit Group.
2. *Review* Usulan Penunjukkan Kembali Kantor Akuntan Publik Tanuredja, Wibisono, Rintis & Rekan untuk Melakukan Audit Laporan KeuanganTahunan Mandiri Syariah Tahun Buku 2019.
3. Hasil Penelaahan atas Laporan Keuangan Publikasi Mandiri Syariah.
4. *Review* atas Nilai Rasio PDN pada Laporan Pos-Pos Tertentu Mandiri Syariah.

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. Sepanjang tahun 2019, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:
1. Pengusulan Remunerasi Pengurus Perseroan.
2. Usulan Perubahan Pengurus Mandiri Syariah.
3. Menindaklanjuti temuan OJK serta Implementasi *Material Risk Taker* (MRT).

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait manajemen risiko Bank. Sepanjang tahun 2019, Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 40 (empat puluh) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:
1. Kajian (*Review*) atas Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Mandiri Syariah (*Risk Based Bank Rating*).
2. *Review draft* RKAP 2020 dan RBB 2020-2022.
3. *Review* Implementasi Jasa Kustodian Mandiri Syariah.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2019, komposisi Dewan Komisaris telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan dilakukan atas dasar kebutuhan Bank. Perubahan komposisi Dewan Komisaris disajikan sebagai berikut:

Komposisi Dewan Komisaris Periode 1 Januari– 15 Januari 2019
Komposisi Dewan Komisaris periode 1 Januari – 15 Januari 2019 sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Komisaris Independen, dan 2 (dua) orang Komisaris Independen.

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama/Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017	18 September 2017
Bambang Widianto	Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 29 Mei 2013	25 Agustus 2014
Dimas Oky Nugroho	Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 12 Maret 2018	Masih dalam *fit and proper test*.

Komposisi Dewan Komisaris Periode 15 Januari – 27 Maret 2019
Melalui RUPS Sirkuler tanggal 15 Januari 2019, RUPS memutuskan mengangkat Dikdik Yustandi sebagai Komisaris Perseroan. Sehingga Komposisi Dewan Komisaris periode 15 Januari – 27 Maret 2019 sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Komisaris Independen, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris.

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama/Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017	18 September 2017
Bambang Widianto	Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 29 Mei 2013	25 Agustus 2014
Dimas Oky Nugroho	Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 12 Maret 2018	Masih dalam *fit and proper test*.
Dikdik Yustandi	Komisaris	RUPS Sirkuler tanggal 15 Januari 2019	Masih dalam *fit and proper test*.

Komposisi Dewan Komisaris Periode 27 Maret 2019 – 15 April 2019
RUPS Tahunan 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2019 memutuskan mengangkat Agus Sudiarto sebagai Komisaris Perseroan. Sehingga Komposisi Dewan Komisaris periode 27 Maret – 15 April 2019 sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Komisaris Independen, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Komisaris.

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama/Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017	18 September 2017
Bambang Widianto	Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 29 Mei 2013	25 Agustus 2014
Dimas Oky Nugroho	Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 12 Maret 2018	Masih dalam *fit and proper test*.
Dikdik Yustandi	Komisaris	RUPS Sirkuler tanggal 15 Januari 2019	Masih dalam *fit and proper test*.
Agus Sudiarto	Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 27 Maret 2019	Masih dalam *fit and proper test*.

Komposisi Dewan Komisaris Periode 15 April 2019 – 1 Oktober 2019
Pada RUPS Sirkuler tanggal 15 April 2019, menyetujui pengunduran diri Dikdik Yustandi dikarenakan beliau diangkat sebagai Direktur Pelaksana di Lembaga Pembiayaan Export Indonesia (LPEI). Sehingga Komposisi Dewan Komisaris periode 15 April – 1 Oktober 2019 sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Komisaris Independen, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris.

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama/Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017	18 September 2017
Bambang Widianto	Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 29 Mei 2013	25 Agustus 2014
Dimas Oky Nugroho	Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 12 Maret 2018	Masih dalam *fit and proper test*.
Agus Sudiarto	Komisaris	RUPS Tahunan tanggal 27 Maret 2019	Masih dalam *fit and proper test*.

Komposisi Dewan Komisaris Periode 1 Oktober 2019 – 14 Oktober 2019
Pada RUPS Sirkuler tanggal 1 Oktober 2019, menyetujui pengunduran diri Agus Sudiarto dikarenakan beliau diangkat sebagai Direktur di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sehingga komposisi Dewan Komisaris periode 1 Oktober – 14 Oktober 2019 sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Komisaris Independen.

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama/Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017	18 September 2017
Bambang Widianto	Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 29 Mei 2013	25 Agustus 2014
Dimas Oky Nugroho	Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 12 Maret 2018	Masih dalam *fit and proper test*.

Komposisi Dewan Komisaris Periode 14 Oktober 2019 – 31 Desember 2019
Melalui RUPS Sirkuler tanggal 14 Oktober 2019, memutuskan untuk memberhentikan Dimas Oky Nugroho sebagai Komisaris Independen dan mengangkat Muhammad Kapitra Ampera sebagai Komisaris Independen Perseroan. Sehingga Komposisi Dewan Komisaris periode 14 Oktober – 31 Desember 2019 sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Komisaris Independen.

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama/Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017	18 September 2017
Bambang Widianto	Komisaris Independen	RUPS Tahunan tanggal 29 Mei 2013	25 Agustus 2014
M. Kapitra Ampera	Komisaris Independen	RUPS Sirkuler tanggal 14 Oktober 2019	Masih dalam *fit and proper test*.

PENUTUP

Demikian laporan kami sampaikan. Atas kinerja Direksi, jajaran manajemen dan seluruh pegawai Mandiri Syariah, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham atas kepercayaan yang telah diberikan. Dewan Komisaris akan tetap memberikan kontribusi terbaiknya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanahkan.

Wabillaahi taufik wal hidayah
Wassalaamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Jakarta, Januari 2020
Atas Nama Dewan Komisaris

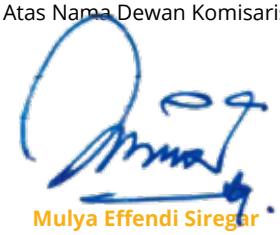

Mulya Effendi Siregar
Komisaris Utama/Independen

DEWAN KOMISARIS

Mulya Effendi Siregar
Komisaris Utama

Bambang Widianto
Komisaris Independen

Muhammad Kapitra Ampera
Komisaris Independen

LAPORAN DEWAN PENGAWAS

DPS mengadakan Forum Klinik Syariah untuk menjawab pertanyaan dan penguatan aspek syariah kepada kepala cabang dan area di seluruh Indonesia agar seluruh praktik operasional sesuai dengan ketentuan syariah

Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Para Pemangku Kepentingan dan Pemegang Saham yang Terhormat,

Bismillaahirrahmaanirrahiim
Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Mencukupi. Shalawat dan salam semoga senantiasa melimpah atas Rasul-Nya, Muhammad SAW. Mudah-mudahan taufiq dan hidayah Allah SWT senantiasa tercurah bagi kita semua.

Perkenankan, saya mewakili Dewan Pengawas Syariah menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan Bank selama tahun 2019.

PELAKSANAAN KEGIATAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TAHUN 2019

Sepanjang tahun 2019, Dewan Pengawas Syariah telah menjalankan tugasnya sesuai dengan PBI No. 11/33/PBI/2009 dan SE BI No. 12/13/DPbS. Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Bank dengan melakukan:

1. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. Pada 13 kali pelaksanaan uji petik selama tahun 2019, DPS Mandiri Syariah melakukan koordinasi dengan unit kerja Internal Audit dan *Shariah Compliance* untuk mengumpulkan data dan informasi terhadap cabang tertentu, sebelum uji petik itu sendiri dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar DPS sudah memiliki informasi yang utuh atas suatu cabang, sehingga lebih fokus pada saat pelaksanaan uji petik.

2. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan. Pada setiap awal tahun, DPS Mandiri Syariah melakukan rapat internal DPS untuk menentukan beberapa cabang yang akan diuji petik.

3. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan internal Bank yang berlaku. Fokus pemeriksaan DPS Mandiri Syariah adalah terhadap pemenuhan aspek-aspek syariah/ *sharia compliance*. Antara lain:
   a. Kesesuaian akad yang digunakan,
   b. Terpenuhinya unsur-unsur akad dimaksud pada suatu skim pembiayaan,
   c. Pemeriksaan terhadap Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan (SP3), Nota Analisa Pembiayaan (NAP), Akad dan Akta Notariil.

4. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/ atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen;

5. Melakukan *review* terhadap ketentuan internal yang berlaku terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah;

6. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. Opini Syariah DPS khusus untuk hal ini menjadi suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Mandiri Syariah dalam rangka pemenuhan persyaratan proses audit laporan keuangan tahunan Mandiri Syariah oleh KAP.

7. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Laporan ini memuat dokumentasi kegiatan DPS yang disusun secara semesteran yang memuat, antara lain:
   a. Hasil pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank meliputi tujuan, karakteristik, akad dalam produk, kesesuaiannya dengan Fatwa DSN - MUI, *review system* dan prosedur produk baru.
   b. Hasil pengawasan terhadap kegiatan bank meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa Bank. Bentuk pengawasan berupa; analisis Laporan Hasil Audit Intern, penetapan dan pemeriksaan jumlah uji petik transaksi, review terhadap SOP terkait aspek Syariah.
   c. Opini Umum DPS terhadap operasional Bank per periode. Periode I yaitu 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 dan periode II yaitu 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
   d. Opini DPS terhadap kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa Bank. Dengan menyajikan data berupa jumlah SE (Surat Edaran), data pembiayaan serta opini DPS atas produk baru Bank. Adapun Opini yang dikeluarkan DPS adalah sebagai berikut:
      - Opini DPS Mandiri Syariah No. 21/02/DPS/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Produk Layanan *Acquirer* EDC PT BSM
      - Opini DPS Mandiri Syariah No. 21/03/DPS/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Layanan *Customer Online Boarding*
      - Opini DPS Mandiri Syariah No. 21/04/DPS/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Temuan Audit OJK Perihal Pembiayaan Akad Musyarakah nasabah atas nama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)
      - Opini DPS Mandiri Syariah No. 21/05/DPS/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang Penggunaan dan Distribusi Dana Sosial No. 21/06/DPS/VI/ tanggal 27 Juni 2019 tentang Layanan *Application Programming Interface* (API)
      - Opini DPS Mandiri Syariah No. 21/07/DPS/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang Transaksi *Primary Dealer Syariah*
      - Opini DPS Mandiri Syariah No. 21/08/DPS/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang Kegiatan Impor Uang Kertas Asing (UKA)
      - Opini DPS Mandiri Syariah No. 21/09/DPS/VIII/2019 tanggal 25 Agustus 2019 tentang *Electronic Money Server Based* LinkAja Syariah
      - Opini DPS Mandiri Syariah No. 21/10/DPS/IX/2019 tanggal 13 September 2019 tentang Layanan Himbara-Link
      - Opini DPS Mandiri Syariah No. 21/11/DPS/IX/2019 tanggal 13 September 2019 tentang Akad Pembiayaan Digital
      - Opini DPS Mandiri Syariah No. 21/12/DPS/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Produk dan Operasional PT Bank Syariah Mandiri Periode 1 Januari 2019 s.d. 31 Juli 2019
      - Opini DPS Mandiri Syariah No. 21/13/DPS/XI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang Penggunaan *Negative Confirmation* dan Asuransi Konvensional dalam Proses Konversi Portofolio Bank Mandiri ke Bank Syariah Mandiri dalam Implementasi Qanun Aceh
      - Opini DPS Mandiri Syariah No. 21/14/DPS/XI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang Layanan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di PT Bank Syariah Mandiri
      - Opini DPS Mandiri Syariah No. 21/15/DPS/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Skema *Joint Financing* antara PT Bank Syariah Mandiri dan PT Mandiri Utama Finance (MUF) Syariah
      - DPS Mandiri Syariah No. 21/16/DPS/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Layanan *Cash Recycle Machine* (CRM)
      - DPS Mandiri Syariah No. 21/17/DPS/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Produk dan Operasional Bank Syariah Mandiri Periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
   e. Metodologi dan teknik pengambilan uji sampel pemeriksaan

      Pada tahun 2019 DPS telah melakukan uji petik/pengawasan langsung ke 16 lokasi yaitu:

      Semester I Tahun 2019
      1) Area Padang
      2) KC Buah Batu Bandung
      3) Area Bandar Lampung
      4) KCP Cipanas
      5) KCP Mojokerto
      6) KCP Kuningan
      7) KC Yogyakarta

      Semester II Tahun 2019
      8) KC Pekanbaru
      9) Area Solo
      10) Area Semarang
      11) Area Bogor
      12) Area Surabaya Darmo
      13) Area Banjarmasin
      14) KC Pamekasan
      15) Area Balikpapan
      16) KC Samarinda

Dengan konsentrasi uji petik yaitu dokumen transaksi pendanaan, pembiayaan dengan basis akad:

a) Wadiah.
b) Murabahah.
c) Mudharabah.
d) Musyarakah.
e) Musyarakah Mutanaqisah.
f) Ijarah.
g) Ijarah Muntahiya Bittamlik.
h) *Line Facility.*
i) Pembiayaan *Take Over*, baik dari Lembaga Keuangan Konvensional maupun Lembaga Keuangan Syariah.
j) Pembiayaan dengan tujuan *Refinancing.*
k) Pembiayaan kepada koperasi.
l) Formulir Pembukaan Rekening Tabungan, Giro dan Deposito.

Guna melengkapi proses pemeriksaan, DPS juga meminta dan mempelajari hasil temuan Internal Audit (IAG) dari masing-masing Kantor Cabang yang diuji petik.

8. Meningkatkan Pemahaman Praktek Perbankan Syariah
Hal penting lainnya adalah pada saat melakukan Uji Petik DPS Mandiri Syariah melakukan dialog dengan pimpinan dan pegawai cabang, untuk menganalisa lebih dalam kendala-kendala bisnis dan operasional cabang yang berkaitan dengan aspek syariah, sehingga dapat dipastikan kesesuian dengan prinsip syariah.

Selain itu DPS juga memberikan arahan dan penguatan materi "Akad dan Produk Perbankan Syariah" kepada para Manajer yang berada di Area, Cabang/*Branch* dan semua pegawai Cabang/*Branch*, dengan mengadakan Forum Klinik Syariah untuk menjawab keluhan sekaligus menerima masukan yang dapat memperbaiki kualitas pemenuhan aspek syariah.

Hal ini dimaksudkan agar semua pejabat Area dan Cabang/*Branch* memahami dan mengenali kembali skema produk dan jasa perbankan syariah. Termasuk akad-akad standar yang digunakan dalam produk pendanaan, pembiayaan dan jasa. DPS berharap dari sisi bisnis tetap tumbuh dan dari aspek syariah terpenuhi (*shariah compliance*).

Untuk menunjang semua pencapaian di atas, DPS secara moral spiritual memiliki kewajiban untuk menyampaikan motivasi dan arahan kepada semua pejabat Area, Cabang/*Branch* dan semua pegawai cabang agar senantiasa mengedepankan akhlak/etika islami dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang menjadi amanah Perusahaan. Karena hal inilah yang menjadi nilai tambah sekaligus kekuatan yang sangat fundamental bagi Bank Syariah Mandiri.

Hasil pengawasan terhadap kegiatan Bank meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa Bank. Bentuk pengawasan berupa; analisis Laporan Hasil Audit Intern, penetapan dan pemeriksaan jumlah uji petik transaksi, review terhadap SOP terkait aspek Syariah.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Selama tahun 2019, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Pengawas Syariah. Dengan demikian, komposisi Dewan Pengawas Syariah di tahun 2019 sebagai berikut:

Komposisi Dewan Pengawas Syariah Periode 1 Januari 2019 – 27 Maret 2019
Komposisi Dewan Pengawas Syariah periode 1 Januari – 27 Maret 2019 sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas Syariah, 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas Syariah. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Mandiri Syariah.

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin	Ketua	Akta No. 07 tanggal 5 April 2016	5 April 2017
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Anggota	– Akta No. 24 tanggal 8 September 1999 – Akta No. 10 tanggal 19 Juni 2008 – Akta No. 19 tanggal 28 Juni 2011 – Akta No. 07 tanggal 5 April 2016 – Akta No. 55 tanggal 22 Oktober 2019	5 April 2017
Dr. H. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec	Anggota	– Akta No. 10 tanggal 3 Juli 2001 – Akta No. 10 tanggal 19 Juni 2008 – Akta No. 19 tanggal 28 Juni 2011 – Akta No. 07 tanggal 5 April 2016	5 April 2017

Komposisi Dewan Pengawas Syariah Periode 27 Maret 2019 – 14 Oktober 2019
Pada RUPS Tahunan 2019 tanggal 27 Maret 2019, menyatakan pemberhentian dan pengangkatan kembali Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah dan Dr. H. Mohamad Hidayat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta memberhentikan Dr. H. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah. Sehingga komposisi Dewan Pengawas Syariah periode 27 Maret – 14 Oktober 2019 sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas Syariah, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas Syariah. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Mandiri Syariah.

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin	Ketua	– Akta No. 07 tanggal 5 April 2016 – Akta No. 86 tanggal 27 Maret 2019	5 April 2017
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Anggota	– Akta No. 24 tanggal 8 September 1999 – Akta No. 10 tanggal 19 Juni 2008 – Akta No. 19 tanggal 28 Juni 2011 – Akta No. 07 tanggal 5 April 2016 – Akta No. 86 tanggal 27 Maret 2019.	5 April 2017

Komposisi Dewan Pengawas Syariah Periode 14 Oktober 2019 – 13 November 2019
Melalui RUPS Sirkuler tanggal 14 Oktober 2019, menyatakan menerima dan menyetuji pengunduran diri Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah, mengangkat Dr. H. Oni Sahron, MA sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah serta menetapak Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah. Sehingga komposisi Dewan Pengawas Syariah periode 14 Oktober – 13 November 2019 sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas Syariah, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas Syariah. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Mandiri Syariah.

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Ketua	– Akta No. 55 tanggal 14 Oktober 2019	22 Oktober 2019
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota	– Akta No. 5 tanggal 14 Oktober 2019	Masih dalam Proses Persetujuan OJK

Komposisi Dewan Pengawas Syariah Periode 13 November 2019 – 31 Desember 2019
Berdasarkan surat rekomendasi dari Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. U-676/DSN-MUI/IX/2019 tanggal 23 September 2019 menyampaikan bahwa DSN MUI merekomendasi dan menetapkan Ibu Dr. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang disetujui melalui RUPS Sirkuler tanggal 13 November 2019.

Sehingga Komposisi Dewan Pengawas Syariah periode 13 November – 31 Desember 2019 sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas Syariah, 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas Syariah. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Mandiri Syariah.

Nama	Jabatan		Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Ketua	–	Akta No. 5 tanggal 14 Oktober 2019	22 Oktober 2019
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota	–	Akta No. 5 tanggal 14 Oktober 2019	Masih dalam Proses Persetujuan OJK
Dr. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH.	Anggota	–	Akta No. 24 tanggal 13 November 2019	Masih dalam Proses Persetujuan OJK

Demikian Laporan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun 2019. Kedepannya, Dewan Pengawas Syariah akan tetap komitmen dalam memastikan ketaatan pada prinsip-prinsip syariah serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan dengan senantiasa mengingatkan kepada jajaran Manajemen Mandiri Syariah. Dengan demikian Mandiri Syariah dapat mencapai visi dan misinya dengan baik.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Januari 2020
Atas nama Dewan Pengawas Syariah,

Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH
Ketua

LAPORAN DIREKSI

Dalam kondisi ekonomi yang dinamis ini, Mandiri Syariah memegang pangsa pasar terbesar pada lingkup perbankan syariah di Indonesia, berdasarkan aset 11,61%, pembiayaan 10,77%, dan dana pihak ketiga 11,42%. Pencapaian pertumbuhan aset Mandiri Syariah lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset perbankan umum sebesar 5,93%. Di sisi lain, pembiayaan Mandiri Syariah tumbuh 10,77% (YoY) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan perbankan syariah dan perbankan umum masing-masing sebesar 10,36% (YoY) dan 6,53% (YoY). Sedangkan dana pihak ketiga Mandiri Syariah tumbuh mencapai 11,42% (YoY), lebih tinggi dibandingkan perbankan umum sebesar 6,29%.

Toni E. B. Subari
Direktur Utama

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya yang kami hormati,

Bersama ini, kami sampaikan laporan pelaksanaan kepengurusan Bank oleh Direksi selama tahun 2019. Syukur alhamdulillah, kinerja Bank di tahun 2019 menunjukkan hasil yang menggembirakan, Bank mengalami peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya. Atas dukungan dari seluruh *stakeholder* yaitu pemegang saham, nasabah, pemerintah dan regulator, serta masyarakat, Direksi mengucapkan terima kasih. Atas kerja sama dan sinergi yang baik, Bank mampu menghadapi berbagai tantangan baik internal maupun eksternal.

Berikut beberapa hal penting terkait dengan pelaksanaan tugas kepengurusan Bank oleh Direksi.

ANALISIS KINERJA PERSEROAN

Dalam menghadapi tantangan dan menangkap peluang yang terjadi pada kondisi perekonomian yang sangat dinamis, khususnya di industri Perbankan, selama tahun 2019 Direksi telah menjalankan berbagai strategi bisnis yang diperlukan. Oleh karena itu Direksi senantiasa mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam merumuskan strategi Bank.

Tahun 2019 perang dagang Amerika dengan China terus berlangsung dan masih menjadi penyebab perlambatan perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan turun dari 3,6% pada 2018 menjadi hanya 3,0% pada 2019. Perang dagang telah menurunkan pertumbuhan ekonomi AS dari 2,9% pada tahun 2018 menjadi 2,3% pada tahun 2019. Ekspor AS mengalami tekanan sehingga berdampak pada permintaan domestik, terutama investasi non residensial dan konsumsi rumah tangga. Demikian halnya dengan China, ekspor dan investasi berdampak pada pertumbuhan ekonomi China yang diperkirakan menurun dari 6,6% pada tahun 2018 menjadi 6,2% pada 2019. Perkembangan pasar keuangan global mengindikasikan ketidakpastian mereda sehingga aliran masuk modal asing ke negara berkembang berlanjut.

Dalam kondisi ekonomi yang dinamis ini, alhamdulillah kinerja Mandiri Syariah tumbuh dengan sehat dan sustain. Pencapaian pertumbuhan asset Mandiri Syariah di tahun 2019 sebesar 14,19% yoy, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset perbankan nasional yang sebesar 6,21% ataupun perbankan syariah sebesar 9,93% . Pertumbuhan aset Mandiri Syariah tersebut terutama dikontribusi oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 14,10% (yoy). Pertumbuhan DPK tersebut juga lebih tinggi dibandingkan Perbankan Nasional sebesar 6,6% dan Perbankan Syariah sebesar 11,8%. Sedangkan dari sisi pembiayaan, Mandiri Syariah tumbuh sebesar 11,50% yoy. Sama seperti pertumbuhan aset dan DPK, pertumbuhan pembiayaan Mandiri Syariah di tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan Perbankan Nasional yang sebesar 6,2% serta Perbankan Syariah yang sebesar 10,9%. Pertumbuhan Mandiri Syariah di tahun 2019 tetap menjadikan Mandiri Syariah sebagai pemimpin pasar di Perbankan Syariah Indonesia. Pangsa pasar Mandiri Syariah di tahun di 2019 dari sisi aset sebesar 21,41%, meningkat dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 20,60%. Begitupula dengan pangsa pasar Bank dari sisi DPK yang meningkat semula 23,52% di tahun 2018 menjadi 23,96% di tahun 2019. Pangsa pasar Mandiri Syariah untuk pembiayaan juga turut meningkat, semula 21,08% di tahun 2018 menjadi 21,27% di tahun 2019.

Stabilitas Industri perbankan tetap terjaga disertai risiko kredit yang terkendali. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/ CAR) tetap tinggi mencapai 23,3% dan rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*/ NPL) tetap rendah yaitu sebesar 2,44%

(*gross*). Likuiditas perbankan juga tetap baik, tercermin dari rasio likuiditas (Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga - AL/DPK) masih aman yakni sebesar 20,86% pada Desember 2019. Dari fungsi intermediasi perbankan, pertumbuhan kredit 2019 sebesar 6,2% (YoY), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2018 sebesar 11,7% (YoY). Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) 2019 tumbuh sebesar 6,6% (YoY), naik tipis dibandingkan dengan pertumbuhan 2018 sebesar 6,5% (YoY).

Sejalan dengan kondisi posifif di industri perbankan secara umum, industri perbankan syariah menujukkan kinerjanya yang positif. Aset perbankan syariah 2019 mencapai Rp538 triliun, tumbuh 9,93% (YoY). Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, pangsa pasar aset perbankan syariah terhadap perbankan nasional mencapai 6,17%. Penghimpunan DPK perbankan syariah 2019 mencapai Rp425 triliun, tumbuh 11,83% (YoY). Pangsa pasar DPK perbankan syariah terhadap DPK perbankan nasional sebesar 6,96%. Dari sisi pembiayaan, pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah telah mencapai Rp365 triliun, tumbuh 10,85% (YoY). Pangsa pasar pembiayaan perbankan syariah terhadap perbankan nasional sebesar 6,37%. Sementara itu, kualitas pembiayaan perbankan syariah yang tercermin dari rasio *Non Performing Financing* (NPF) *gross* meningkat dari 3,03% di akhir tahun 2018 menjadi 3,21% di 2019.

Dalam menghadapi kondisi perekonomian dan industri tersebut, Direksi telah menetapkan strategi utama Bank dalam mengeksekusi strategi pengembangan bisnis dalam rangka mendukung tercapainya target kinerja operasional dan keuangan sesuai yang telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank serta meraih setiap peluang dan potensi bisnis yang ada di tahun 2019. Strategi dirumuskan berdasarkan arah kebijakan jangka pendek tahun 2019 yang merupakan bagian dari arah kebijakan jangka panjang. Arah kebijakan di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan 5 (lima) fokus strategi Mandiri Syariah, yaitu:
   - Pertumbuhan Bisnis yang Sehat dan Sustain
   - Kualitas Pembiayaan
   - *Fee Based Income*
   - Produktivitas dan Efisiensi
   - *Contribution Margin*
2. Melakukan perbaikan fundamental melalui penajaman struktur organisasi, penguatan budaya (*culture*) dan penajaman target segmen termasuk *business model*.
3. Peningkatan sistem dan infrastuktur IT untuk mendukung pertumbuhan bisnis.
4. Memperkuat *positioning* Mandiri Syariah untuk dana murah terutama tabungan.
5. Mencapai NPF *gross* di bawah 3,2% melalui penyaluran pembiayaan sesuai target *market*, implementasi *watchlist*, *vintage analysis*, *early restructuring*.
6. Peningkatan *Fee Based Income* melalui produk-produk yang memiliki potensi besar seperti umroh, gadai, *e-channel*, Forex Saudi Arabian Riyal (SAR).
7. Optimalisasi sinergi jaringan dan bisnis dengan Mandiri Group.

Strategi bisnis tersebut kemudian dijalankan untuk mencapai aspirasi bank yang terdiri dari 3 (tiga) strategi utama yakni:

1. *Business Refocusing*
   Pada pilar *business refocusing*, Bank menentukan Segmen *Consumer* menjadi *main core* perusahaan, Segmen *Corporate* menjadi *second core* yang pada akhirnya tetap mendukung pertumbuhan *Retail Banking*.

2. *Fixing the Fundamental*
   Pada Pilar *fixing the fundamental*, hal yang Mandiri Syariah lakukan yaitu:
   1. Penyesuaian struktur organisasi baik kantor pusat, kanwil maupun area.
   2. Implementasi: *Refining Business Process* dan *Business Model, Simplification Product*, Perbaikan Nota Analisa Pembiayaan dan *Customer Base Information* (*Big Data*).
   3. Program efisiensi dan peningkatan produktivitas.

3. *Strengthen Enablers*
   Pada Pilar *Strengthen Enablers*, Bank melakukan peningkatan *capability* dan kompetensi sumber daya manusia, penguatan *culture*, peningkatan informasi dan teknologi dan terus memperkuat sinergi antar Perusahaan Group Bank Mandiri.

Pada tahun 2019, Mandiri Syariah telah mengimplementasikan 10 (sepuluh) inisiatif strategis sebagai berikut:

Retail Business Strategy	Mengimplementasikan akusisi nasabah melalui strategi komunitas.
Streamline Business Process	Mengimplementasikan *Retail Financing Process.*
Capital Strategy	Menyusun persiapan untuk melaksanakan *Initial Public Offering*.
Branch Operational Strategy	Membuat model layanan cabang dengan konsep *digital branch*.
Human Capital Strategy	Memberikan *reward* kepada Pegawai yang memiliki kontribusi optimal dan memberikan pelatihan serta *refreshment* secara rutin kepada Pegawai di Mandiri Syariah University ataupun tempat pendidikan lainnya.
Integrate With Mandiri Group	Bekerjasama dengan Mandiri Utama Finance untuk pembiayaan segmen ritel konsumer.
Wholesale Banking Strategy	Mengembangkan *New Cash Management System* dan *Trade Service System*.

Digital Banking Strategy	Mengimplementasikan *digital* wakaf.
Sharia Sustainable Finance	Membuat rencana aksi keuangan berkelanjutan (RAKB).
Operational Risk	Melakukan penguatan bisnis proses melalui revitalisasi proses bisnis ritel dan e*nhance financing originating system*.

Tahun 2019, kinerja pembiayaan *Retail Banking* mencapai sebesar Rp44,97 triliun, tumbuh sebesar Rp5,01 triliun atau 12,53% dibandingkan kinerja pembiayaan *Retail Banking* pada tahun 2018 sebesar Rp39,96 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan *Consumer Banking* sebesar 24,24% atau Rp5,89 triliun.

Secara komposisi, pencapaian *Retail Banking* dikontribusi oleh pembiayaan *Consumer Banking* sebesar Rp30,20 triliun, pembiayaan *Pawning* sebesar Rp2,99 triliun, pembiayaan *Micro Banking* sebesar Rp3,80 triliun, dan pembiayaan *Business Banking* sebesar Rp7,98 triliun.

Tahun 2019, Mandiri Syariah telah menyalurkan pembiayaan segmen *business banking* sebesar Rp2,99 triliun dengan portfolio yang dikelola sebesar Rp8,595 triliun. Kondisi ini menurun bila dibandingkan dengan portfolio tahun 2018 sebesar Rp8,595 triliun. Penurunan portfolio yang terjadi, merupakan konsekuensi atas kondisi konsolidasi pada 2019, dimana Bank mengambil kebijakan berupa pertumbuhan yang sehat dengan selektif sektor-sektor usaha untuk penyaluran pembiayaan.

Dengan status bisnis konsolidasi di tahun 2019, kualitas pembiayaan segmen *Business Banking* mengalami perbaikan, NPF membaik dari Rp238 miliar (2,77%) menjadi Rp153 miliar (1,92%) dan kol 2 mengalami perbaikan dari Rp225 miliar (2,62%) menjadi Rp105 miliar (1,32%). Hal ini disebabkan oleh perbaikan *business process*, selektif terhadap *target market* dan fokus pada penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Kinerja pembiayaan *Wholesale Banking* tahun 2019 mencapai Rp30,58 triliun, tumbuh sebesar Rp2,78 triliun atau 10,01% dibandingkan kinerja pembiayaan *Wholesale Banking* pada tahun 2018 sebesar Rp27,79 triliun. Pertumbuhan pembiayaan *Wholesale Banking* terutama berasal dari meningkatnya pembiayaan *Commercial Banking* sebesar 23,27% dari Rp6,67 triliun di tahun 2018 menjadi Rp8,22 triliun di tahun 2019

Secara komposisi, pencapaian *Wholesale Banking* dikontribusi oleh pembiayaan *Corporate Banking* sebesar Rp22,35 triliun atau 73,11% dan pembiayaan *Commercial Banking* sebesar Rp8,22 triliun atau 26,89%.

Sedangkan kinerja pendanaan 2019 pada segmen *Wholesale Banking* mencapai sebesar Rp31,36 triliun meningkat sebesar 10,31% atau Rp2,93 triliun dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp28,43 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan pendanaan *Commercial Banking* sebesar Rp1,54 triliun.

Untuk kinerja *fee based* tahun 2019 pada segmen *Wholesale Banking* mencapai sebesar Rp339,80 miliar mengalami pertumbuhan sebesar Rp152,27 miliar atau 81,20% dibandingkan kinerja *fee based Wholesale Banking* pada tahun 2018 sebesar Rp187,53 miliar. Pertumbuhan tersebut karena pertumbuhan *fee based* dari *Commercial Banking* sebesar 176,01% atau Rp86,40 miliar.

Tahun 2019, kinerja pendapatan bagi hasil *Wholesale Banking* mencapai Rp2,40 triliun mengalami pertumbuhan 8,94% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,20 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari kontribusi pertumbuhan pendapatan bagi hasil *Corporate Banking* sebesar Rp109,50 milar atau 6,72%, pertumbuhan pendapatan bagi hasil tersebut sejalan dengan kenaikan pendapatan margin bersih *Corporate Banking* yang mencapai 12,80%. Total pendapatan margin bersih *Wholesale Banking* secara total sedikit mengalami penurunan sebesar 0,47% hal tersebut karena Bank lebih berhati-hati membidik sektor yang prudent untuk diberikan pembiayaan dikarenakan kondisi makro ekonomi yang belum kondusif, selain itu tidak adanya pendapatan dari *Institutional Banking* di tahun 2019.

Berbagai capaian positif yang diperoleh di tahun 2019 tidak lepas dari kemampuan Bank dalam menghadapi kendala-kendala yang dihadapi. Di tahun 2019, Bank masih menghadapi kendala terkait optimalisasi teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan perkembangan teknologi informasi terutama kebutuhan transaksi *e-commerce*. Untuk mengatasi hal tersebut, Mandiri Syariah telah mengakselerasi implementasi sistem IT untuk mengantisipasi perkembangan *financial technology* yang dituangkan IT Strategy Strategic Plan (ITSP) 2018 – 2022. Pengembangan fitur *digital* berdampak pada peningkatan pendapatan *Fee Based Income* (FBI) *digital channel* yang naik 24,86% dari Rp166,47 miliar per Desember 2018 menjadi Rp207,86 miliar per Desember 2019. *Fee Based Income* dari *mobile banking* berkontribusi tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 88,03% dari Rp27,46 miliar per Desember 2018 menjadi Rp51,64 miliar per Desember 2019.

Sampai dengan Desember 2019, *user* Mandiri Syariah Mobile mencapai 1,05 juta user dengan jumlah transaksi sebanyak 24 juta transaksi. Pertumbuhan transaksi tertinggi berasal dari transaksi Zakat, Infaq, Sedekah & *Waqaf* (*Ziswaf*) yang naik 374% semula 440 ribu transaksi di 2018 menjadi 2 juta transaksi di 2019.

ANALISIS TENTANG PROSPEK USAHA

Mandiri Syariah senantiasa melakukan analisis terhadap prospek usaha ke depan. Prospek usaha ke depan merupakan dasar dalam merumuskan strategi Bank. Analisis didasarkan pada analisis kondisi sosial politik, makro ekonomi dan perbankan nasional. Tahun 2019 merupakan tahun politik bagi Indonesia karena adanya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan anggota Dewan Legislatif DPR, DPD dan DPRD secara serentak. Hal ini tentu saja menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam melakukan analisis prospek usaha.

Terkait dengan analisis perekonomian, pemulihan ekonomi Indonesia diprakirakan akan terus berlanjut pada 2019 terutama bersumber dari menguatnya permintaan domestik. Prospek pertumbuhan ekonomi pada 2019 akan meningkat, meski berada dalam rentang yang lebih rendah yakni 5,0%-5,4% (YoY). Trend positif juga diperkirakan akan diikuti oleh pertumbuhan positif di industri perbankan nasional pada umumnya dan perbankan syariah pada khususnya. Hal ini terlihat dari adanya trend positif di tahun 2018 yang diharapkan akan berlanjut di 2019.

Pada 2019, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit berada dalam kisaran 10-12% (YoY) sedangkan pertumbuhan DPK diprakirakan sekitar 8-10% (YoY). Ke depan, Bank Indonesia akan menempuh kebijakan makroprudensial yang akomodatif guna mendorong pembiayaan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan, berkoordinasi dengan otoritas terkait.

Melihat kondisi perekonomian dan industri perbankan, khususnya industri perbankan syariah, Bank Syariah Mandiri yakin bahwa prospek usaha ke depannya akan semakin baik. Hal ini didasarkan pada kekuatan yang dimiliki oleh Bank yaitu:

1. Dukungan kuat dari pemegang saham (Bank Mandiri) dan sinergi dengan Mandiri Group.
2. Posisi sebagai bank syariah terbesar (aset, pembiayaan dan dana) serta menempati posisi sebagai 15 terbesar perbankan nasional dari sisi aset.
3. Posisi likuiditas dan kecukupan modal yang terjaga baik.
4. Struktur demografi kepegawaian yang didominasi pegawai berusia muda dan memiliki potensi untuk dikembangkan.
5. Bank memiliki pengalaman bisnis di industri syariah yang relatif lama sehingga telah memiliki *brand positioning* di masyarakat terutama di industri syariah.

PERKEMBANGAN PENERAPAN *CORPORATE GOVERNANCE* 2019

Dalam rangka peningkatan kualitas *corporate governance* secara berkelanjutan, Bank Syariah Mandiri senantiasa melakukan pengukuran Pelaksanaan Tata Kelola sebagai wujud komitmen Mandiri Syariah terhadap Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG maka Mandiri Syariah secara rutin telah melaksanakan *self assessment* Pelaksanaan GCG yang dilaksanakan secara setiap semester.

Pelaksanaan *self assessment* Pelaksanaan GCG telah sesuai dengan SE OJK yang meliputi tiga aspek *governance*, yaitu *governance structure, governance process* dan *governance outcome.* Penilaian ketiga aspek *governance* tersebut dilakukan terhadap:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
6. Penanganan benturan kepentingan;
7. Penerapan fungsi kepatuhan;
8. Penerapan fungsi audit intern;
9. Penerapan fungsi audit ekstern;
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); dan
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta pelaporan internal.

Mandiri Syariah telah menyampaikan hasil *self assessment* pelaksanaan GCG kepada OJK setiap semester. Pada semester I tahun 2019 dengan hasil penilaian 1 atau kategori predikat “sangat baik”.

Berdasarkan hasil *self* assessment, terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan telah ditindaklanjuti, antara lain:

Rekomendasi	Tindak Lanjut
Masih terdapat Dewan Komisaris dalam proses *fit and proper test* untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Bank Syariah Mandiri telah melakukan upaya-upaya dalam pemenuhan persyaratan kelengkapan dokumen *fit and proper test* anggota Dewan Komisaris dalam rangka mendapatkan persetujuan OJK. Anggota Dewan Komisaris yang telah lulus *fit and proper test* sebagai berikut: 1. Mulya E Siregar, KEP- 184/D.03/2017 tanggal 18 September 2017. 2. Bambang Widianto, KEP-76/D-03/2014 tanggal 25 Agustus 2014.
Masih terdapat Direksi dalam proses *fit and proper test* untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Bank Syariah Mandiri telah melakukan upaya-upaya dalam pemenuhan persyaratan kelengkapan dokumen *fit and proper test* anggota Direksi dalam rangka mendapatkan persetujuan OJK. Anggota Direksi yang telah lulus *fit and proper test* sebagai berikut: 1. Toni Eko Boy Subari, Kep-20/D.03/2018, tanggal 15 Februari 2018. 2. Achmad Syafii, Kep-21/D.03/2018, tanggal 15 Februari 2018. 3. Putu Rahwidhiyasa, Kep-100/D03/2014, tanggal 10 Oktober 2014. 4. Kusman Yandi, Kep-51/D-03/2015, tanggal 24 Agustus 2015. 5. Ade Cahyo Nugroho, Kep-2/D.03/2018, tanggal 4 Januari 2018.
Masih terdapat denda dan temuan berulang.	Bank Syariah Mandiri telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Mengembangkan Sistem Informasi Kepatuhan yang berfungsi melakukan *reminder* kepada seluruh jajaran Mandiri Syariah terkait kewajiban pelaporan yang jatuh tempo kepada pihak ketiga. 2. Melakukan sosialisasi kepada PIC Laporan Pihak ketiga untuk meningkatkan *risk awareness* agar tidak terjadi pelanggaran berulang kembali di masa yang akan datang. 3. Melakukan penguatan *maker*, *checker* dan *approval* terkait penyampaian laporan kepada regulator. 4. Melakukan perbaikan kualitas data yakni pengkinian data nasabah dan *cleansing* data debitur agar data yang dilaporkan lengkap dan valid. 5. Melakukan sosialisasi ke jajaran Mandiri Syariah khususnya cabang-cabang di daerah agar *awareness* terhadap ketentuan eksternal termasuk fatwa DSN-MUI meningkat. 6. Melakukan penguatan *internal control* dengan mewajibkan unit kerja yang terkena denda untuk mengisi lembar formulir identifikasi sanksi agar tidak terdapat denda di kemudian hari.
Perlu adanya peningkatan pelaksanaan jumlah Rapat DPS.	Bank Syariah Mandiri telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut: 1. Melakukan Evaluasi kinerja DPS melalui Rapat Komite Pemantau Risiko. 2. Melakukan penguatan fungsi Corporate Secretary Mandiri Syariah agar Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jaawab DPS dapat lebih Optimal. 3. Me-*reminder Executive Secretary to* DPS dan Syariah *Compliance Department* agar berkoordinasi dengan DPS terkait realisasi peningkatan jumlah Rapat.

Mandiri Syariah juga secara rutin mengikuti pemeringkatan dan survei *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). CGPI merupakan Program riset dan pemeringkatan GCG untuk melakukan Penilaian kualitas *Corporate Governance* suatu perusahaan. Pada tahun 2019, Bank telah memperoleh peringkat sebagai "*The Most Trusted Companies.*"

Berdasarkan hasil CGPI, di tahun 2019, Mandiri Syariah telah menindaklanjuti rekomendasi antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris telah mengikuti berbagai kegiatan *training* untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi guna menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Dalam rangka memenuhi kebutuhan perkembangan bisnis, struktur organisasi baru Mandiri Syariah telah ditetapkan melalui SK Direksi, No. 20/591-KEP/DIR tanggal 30 Oktober 2018.
3. Mandiri Syariah telah melaksanakan dua program *sustainable finance*, pertama terkait bisnis yang mencakup produk dan layanan, *governance* dan *capacity building*. Kedua *sustainable* terkait sosial melaksanakan program yang diberi nama BISA (Bank Mandiri Syariah *Integrated Sosial Action*) yang mencakup 4 pilar yakni pengembangan ekonomi sosial, pengembangan komunitas, pengembangan spiritual, dan pengembangan Sumber Daya Manusia.
4. Bank telah melakukan pengkinian standar prosedur operasional dan petunjuk teknis terkait teknologi informasi mencakup perencanaan, pengembangan, pengelolaan operasional dan pengamanan Teknologi Informasi.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam melaksanaan tugas kepengurusannya, Direksi juga dibantu oleh Komite di bawah Direksi atau disebut juga Komite Eksekutif sebanyak 7 (tujuh) Komite, yaitu:

1. Komite Manajemen Risiko
2. *IT Steering Committee*
3. Komite Kebijakan dan Prosedur
4. Komite Bisnis
5. Komite Pembiayaan/Penanganan Pembiayaan Bermasalah
6. Komite Sumber Daya Manusia
7. Komite *Asset* dan *Liabilities/Asset and Liability Committee* (ALCO)

Selama tahun 2019, Direksi menilai bahwa komite-komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Komite Manajemen Risiko merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi penerapan manajemen risiko secara berkala/insidentil karena perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko. Selama tahun 2019, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan 7 (tujuh) kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

IT *Steering Committee* (ISC) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam penetapan IT *strategic plan* dan IT *budgeting*, penetapan proyek IT *strategic* dan pengamanan IT, dengan susunan keanggotaan, tugas, kewenangan dan tanggung jawab serta untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku. Selama tahun 2019, IT Steering Committee telah melaksanakan 2 (dua) kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Komite Kebijakan dan Prosedur merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam merekomendasikan/menetapkan kebijakan dan prosedur di luar kebijakan manajemen risiko dan pemuktahirannya yang akan diterbitkan. Selama tahun 2019, Komite Kebijakan dan Prosedur telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Komite Bisnis (KB) merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam fungsi bisnis termasuk *marketing*, *relationship management* berdasarkan target *market/targeted customer* yang telah ditetapkan dan melakukan analisa serta pemutusan. Selama tahun 2019, telah melaksanakan 7 (tujuh) kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Komite Kebijakan Pembiayaan/Penanganan Pembiayaan Bermasalah merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam membahas penyusunan Kebijakan Pembiayaan, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan selama tahun 2019, Komite Kebijakan Pembiayaan/Penanganan Pembiayaan Bermasalah telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Human Capital Policy Committee merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam memastikan penerapan Kebijakan *Human Capital* dilaksanakan secara optimal serta sesuai dengan arah dan strategi perusahaan. Selama tahun 2019, *Human Capital Policy Committee* telah melaksanakan 21 (dua puluh satu) kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Asset and Libility Committee (ALCO) merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam memastikan pencapaian tingkat profitabilitas yang optimum serta risiko likuiditas yang terkendali, melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas (*assets and liabilities management*). Selama tahun 2019, *Asset and Liability Committee* (ALCO) telah melaksanakan 18 (delapan belas) kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Dalam rangka memenuhi kebutuhan bisnis Bank, sepanjang tahun 2019 telah dilakukan beberapa kali perubahan komposisi Direksi sebagai berikut.

KOMPOSISI DIREKSI PERIODE 1 JANUARI 2019 – 14 OKTOBER 2019

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Toni E.B. Subari	Direktur Utama	RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017	15 Februari 2018
Achmad Syafii	Direktur	RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017	15 Februari 2018
Putu Rahwidhiyasa	Direktur	– RUPS Tahunan tanggal 7 Mei 2014 – RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017	10 Oktober 2014
Kusman Yandi	Direktur	– RUPS Tahunan tanggal 1 April 2015 – RUPS Tahunan tanggal 12 Maret 2018	24 Agustus 2015
Ade Cahyo Nugroho	Direktur	RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017	4 Januari 2018

KOMPOSISI DIREKSI PERIODE 14 OKTOBER 2019 – 31 DESEMBER 2019

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Toni E.B. Subari	Direktur Utama	RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017	15 Februari 2018
Achmad Syafii	Direktur	RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017	15 Februari 2018
Putu Rahwidhiyasa	Direktur	– RUPS Tahunan tanggal 7 Mei 2014 – RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017	10 Oktober 2014
Kusman Yandi	Direktur	– RUPS Tahunan tanggal 1 April 2015 – RUPS Tahunan tanggal 12 Maret 2018	24 Agustus 2015
Ade Cahyo Nugroho	Direktur	RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017	4 Januari 2018
Rosma Handayani	Direktur	RUPS Sirkuler tanggal 14 Oktober 2019	Masih dalam *fit and proper test*.

PENUTUP

Demikian laporan kami sampaikan. Atas pencapaian kinerja di tahun 2019, Direksi memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran manajemen dan pegawai Mandiri Syariah atas kinerja terbaik yang telah diberikan. Kepada jajaran Dewan Komisaris, Direksi mengucapkan terima kasih atas arahan yang telah diberikan. Direksi mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham atas kepercayaan yang telah diberikan. Begitu pula dengan seluruh mitra kerja, Direksi juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik di tahun 2019.

Kedepannya, Direksi akan tetap berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaiknya untuk terus mengembangkan Bank, khususnya dalam mempersiapkan Bank menuju BUKU IV. Semoga pencapaian di tahun 2019 akan terus berlanjut dan meningkat di masa yang akan datang.

Wabillaahi taufik wal hidayah
Wassalaamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Jakarta, Januari 2020
Atas Nama Direksi
PT Bank Syariah Mandiri

Toni E. B. Subari
Direktur Utama

DEWAN DIREKSI

Toni E. B. Subari
Direktur Utama

Putu Rahwidhiyasa
Direktur Risk Management and Compliance

Kusman Yandi
Direktur Wholesale Banking

Ade Cahyo Nugroho
Direktur Finance, Strategy & Treasury

Achmad Syafii
Direktur IT, Operations & Digital Banking

Rosma Handayani *
Direktur Human Capital

* Berlaku Efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas *fit and proper test*

PEJABAT DI BAWAH DIREKSI

Wawan Setiawan
SEVP Retail Banking

Nury Sriandajani
SEVP Retail Financing Risk Restructuring & Recovery

Karya Prasetya Budi
SEVP Wholesale Financing Risk Restructuring & Recovery

Anton Sukarna
SEVP Distribution & Sales

SURAT PERNYATAAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS KEBENARAN ISI LAPORAN TAHUNAN PT BANK SYARIAH MANDIRI TAHUN 2019

Laporan Tahunan ini, termasuk Laporan Tata Kelola Perusahaan, Laporan Keuangan dan Informasi terkait lainnya merupakan tanggung-jawab Manajemen Mandiri Syariah dan telah disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi melalui penandatanganan masing-masing di bawah ini:

Jakarta,
Februari 2020

Dewan Komisaris

Mulya Effendi Siregar
Komisaris Utama

Muhammad Kapitra Ampera*
Komisaris Independen

Bambang Widianto
Komisaris Independen

* Berlaku Efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas *fit and proper test*

Direksi

Toni E. B. Subari
Direktur Utama

Putu Rahwidhiyasa
Direktur Risk Management & Compliance

Kusman Yandi
Direktur Wholesale Banking

Ade Cahyo Nugroho
Direktur Finance, Strategy & Treasury

Rosma Handayani*
Direktur Human Capital

Achmad Syafii
Direktur IT, Operation & Digital Banking

mandiri
syariah

mandiri syariah

PROFIL
PERUSAHAAN

IDENTITAS PERUSAHAAN

Nama Perusahaan

PT Bank Syariah Mandiri

Nama Panggilan

Mandiri Syariah

Bidang Usaha

Perbankan

Tanggal Pendirian

25 Oktober 1999

Dasar Hukum Pendirian

Akta No. 23 tanggal 08 September 1999, dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, S.H. dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 16495. HT.01.04.TH.99 tanggal 16 September 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 6588.

Kepemilikan

- PT Bank Mandiri (Persero) : 99,9999999983%
- PT Mandiri Sekuritas : 0,00000017%

Modal Dasar

Rp3.000.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Rp2.989.021.935,- yang terdiri atas 597.804.387 saham, terbagi atas:
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 597.804.387 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp2.989.021.935.000,-
- PT Mandiri Sekuritas sebanyak 1 (satu) saham atau dengan nilai nominal Rp5.000,-

Kode SWIFT

BSMDIDJA

Data Jaringan Kantor

1	Kantor Pusat
8	Kantor Wilayah
129	Kantor Cabang
389	Kantor Cabang Pembantu
53	Kantor Kas
50	*Outlet* Kantor Layanan Gadai
7	Kantor Layanan Mikro
114	*Payment Point*
600	Layanan Syariah Bank

Jumlah Pegawai

2019: 8.552 orang

Sekretaris Perusahaan

Ahmad Reza
Telp : (021) 2300509, 3983 9000 (hunting)
Fax : (021) 3983 2989
Website:www.mandirisyariah.co.id
Email: CSG@syariahmandiri.co.id

Alamat Kantor Pusat

Wisma Mandiri I Jl. M. H. Thamrin No. 5
Jakarta 10340
Telepon: (021) 2300 509, 3983 9000 (hunting)
Faks: (021) 3983 2989

Situs *Web*

Website: www.mandirisyariah.co.id

Call Center

Layanan Mandiri Syariah Call 14040, (021) 2953 4040

Contact Address

Corporate Secretary Group (CSG)
E-mail : CSG@syariahmandiri.co.id

Live Chat
Asisten Interaktif Mandiri Syariah (Aisyah)

Media Sosial:
Twitter : @syariahmandiri
Facebook : Bank Syariah Mandiri
Instagram : @BankSyariahMandiri
Youtube : Bank Syariah Mandiri

Jaringan ATM

Mandiri Syariah Card dapat digunakan di lebih dari 200.0000 jaringan ATM meliputi:
- ATM Syariah Mandiri : 1.038 unit
- ATM Mandiri : 17.341 unit
- ATM BERSAMA : 80.959 unit
- ATM Prima : 114.553 unit, dan
- Malaysia Electronic Payment System (MEPS): 9.722 unit.

BRAND PERUSAHAAN

Identitas *brand* Bank Mandiri Syariah terdiri dari simbol, huruf logo, warna dan *tagline*. Secara sederhana masing-masing *items* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1 Makna Umum

- Bentuk Logo dengan huruf kecil: Melambangkan sikap ramah dan rendah hati.
- Ramah terhadap semua segmen bisnis dari semua kalangan.
- Kedua tulisan logo (“mandiri” dan “syariah’) sebagai satu kesatuan, namun boleh berganti warna bilamana diperlukan.

2 Warna Huruf

- Warna Huruf Hijau Tua: Hijau melambangkan tumbuh berkembang, kesuburan dan kesegaran.
- Warna ini umumnya juga dipakai oleh kalangan umat Islam untuk meneguhkan identitas kelslaman mereka.

3 Gelombang Emas Cair (*Liquid Gold*)

- Gelombang emas cair sebagai simbol dari kekayaan finansial dan berkelanjutan.
- Lengkung emas simbol karakter yang gesit, progresif, pandangan ke depan, *excellent* menghadapi segala kemungkinan yang akan datang.
- Warna Kuning Emas (kuning ke arah *orange*): Warna logam mulia (emas) menunjukkan keagungan, kemuliaan, kemakmuran, kekayaan.

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

PT Bank Syariah Mandiri (selanjutnya disebut "Mandiri Syariah" atau "Bank) didirikan pertama kali dengan nama PT Bank Industri Nasional disingkat PT BINA atau disebut juga PT National Industrial Banking Corporation Ltd., berkantor pusat di Jakarta, berdasarkan Akta No. 115 tanggal 15 Juni 1955 dibuat di hadapan Meester Raden Soedja, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman Republik Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/69/23 tanggal 16 Juli 1955, dan telah didaftarkan pada buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1810 tanggal 6 Oktober 1955 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 8 Mei 1956, Tambahan No. 390.

Sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 12 tanggal 6 April 1967 yang diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 37 tanggal 4 Oktober 1967, keduanya dibuat dihadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 29 April 1969, Tambahan No. 55, nama Bank diubah dari PT Bank Industri Nasional disingkat PT BINA atau disebut juga PT National Industrial Banking Corporation Ltd., menjadi PT Bank Maritim Indonesia.

Sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 146 tanggal 10 Agustus 1973 dibuat di hadapan Raden Soeratman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 1 Oktober 1974, Tambahan No. 554, nama Bank diubah dari PT Bank Maritim Indonesia menjadi PT Bank Susila Bakti.

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 29 tanggal 19 Mei 1999 dibuat di hadapan Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-1210.HT.01.04. TH 99 tanggal 1 Juli 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan No. 6587, nama Bank diubah dari PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Sakinah Mandiri.

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 7 Juli 1999 dibuat di hadapan Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta, yang diubah berturut-turut dengan Akta Berita Acara Rapat No. 6 tanggal 22 Juli 1999 dan Akta Berita Acara No. 9 tanggal 23 Juli 1999, keduanya dibuat di hadapan Hasanal Yani Ali Amin, S.H., Notaris di Jakarta, serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 23 tanggal 8 September 1999 dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 16495.HT.01.04.TH.99 tanggal 16 September 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan No. 6588, nama Bank diubah dari PT Bank Syariah Sakinah Mandiri menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Selanjutnya Bank mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/ KEP.GBI/1999 tanggal 25 Oktober 1999 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sejak tanggal 1 November 1999. Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 38 tanggal 10 Maret 2000 dibuat dihadapan Lia Muliani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, Bank melakukan perubahan jumlah modal saham yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-11545.HT.01.04. TH.2000 tanggal 6 Juni 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan No. 6589.

Pada tahun 2006 terdapat perubahan terhadap anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Syariah Mandiri No. 59 tanggal 17 Mei 2006, dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 15 September 2006, tambahan No. 960.

Bank telah mengubah dan menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta No. 10 tertanggal 19 Juni tahun 2008, yang dibuat dihadapan Badarusyamsi, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-729922.01.02 tahun 2008 tertanggal 13 Oktober 2008.

Sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2008, pemegang saham memutuskan menyetujui penambahan modal disetor sebesar Rp199.871 atau sebanyak 39.974.200 lembar saham yang akan dikeluarkan dari saham portepel. Keseluruhan

saham-saham tersebut diambil bagian seluruhnya oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penyetoran saham-saham tersebut dilakukan dengan cara yakni: Pertama, sebesar Rp100.000 disetor penuh secara tunai ke dalam kas Bank. Kedua, Sebesar Rp99.871 disetor dengan cara non-tunai (*inbreng*) berupa tanah dan bangunan milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Setoran modal secara non-tunai (*inbreng*) sebesar Rp99.871 telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2008 dan setoran modal tunai sebesar Rp100.000 telah dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2009. Setoran modal tersebut dituangkan dalam Akta No. 211 tanggal 31 Desember 2008 yang dibuat oleh Aulia Taufani, S.H., sebagai Notaris Pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 23 Februari 2009 No. AHU-AH.01.01-00922 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Mandiri.

Sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2013 dan dituangkan dalam Akta No. 20 tanggal 22 Januari 2014, dibuat oleh Chairul Bachtiar, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham memutuskan menyetujui penambahan modal disetor sebesar Rp30.778 atau sebanyak 6.155.674 saham yang akan dikeluarkan dari saham dalam portepel. Keseluruhan saham-saham tersebut diambil bagian seluruhnya oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri No. 09 tanggal 7 Desember 2016, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, pemegang saham (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.) menyetujui untuk melakukan penambahan modal saham disetor sebesar 100.000.000 lembar saham atau setara Rp500.000. Akta tersebut telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0106588 tanggal 8 Desember 2016. Bank telah menerima tambahan modal disetor tersebut pada tanggal 14 November 2016. Persetujuan OJK terkait tambahan setoran modal ini telah diterima sesuai dengan surat OJK No.S-16/PB.13/2017 pada tanggal 24 Januari 2017.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri No. 22 tanggal 12 Desember 2017, dibuat dihadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, pemegang saham (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.) menyetujui untuk melakukan penambahan modal saham disetor sebesar 100.000.000 lembar saham atau setara Rp500.000. Akta tersebut telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0200755 tanggal 14 Desember 2017. Persetujuan OJK terkait tambahan setoran modal ini telah diterima sesuai dengan surat OJK No.S-07/PB.13/2018 pada tanggal 15 Januari 2018.

Kantor Pusat Bank berlokasi di Jl. M. H. Thamrin No. 5 Jakarta 10340. Pada tanggal 31 Desember 2019, Bank memiliki 129 kantor cabang, 389 kantor cabang pembantu, 53 kantor kas, 117 payment point dan 53 outlet kantor layanan gadai (tidak diaudit).

Anggaran dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang dilakukan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 24 tanggal 13 November 2019.

KETERANGAN PERUBAHAN NAMA

Sesuai dengan uraian riwayat singkat Bank, Mandiri Syariah pernah mengganti nama sebanyak 5 (lima) kali, sejak pertama kali berdiri, dari semula bernama PT Bank Industri Nasional (BINA) berdasarkan Akta No. 115 tanggal 15 Juni 1955 dihadapan Notaris Meester Raden Soedja, S.H,. Kemudian, berubah nama dari PT Bank Industri Nasional (BINA) menjadi PT Bank Maritim Indonesia berdasarkan Anggaran Dasar No. 12 tanggal 06 April 1967.

Selanjutnya, terjadi perubahan nama kembali dari PT Bank Maritim Indonesia menjadi PT Bank Susila Bakti (BSB) sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 146 tanggal 10 Agustus 1973 dibuat di hadapan Notaris Raden Soeratman, S.H,. Pada tahun 1973, PT Bank Susila Bakti mengalami perubahan kegiatan usaha dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Perubahan tersebut, mengakibatkan terjadi perubahan nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Sakinah Mandiri berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 29 tanggal 19 Mei 1999 dihadapan Notaris Machrani Moertolo Soenarto, S.H.

Pada tahun 1999, mengalami perubahan nama kembali dari PT Bank Syariah Sakinah Mandiri menjadi PT Bank Syariah Mandiri sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 23 tanggal 08 September 1999. Selanjutnya Bank telah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia (BI) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, tanggal 25 Oktober 1999 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah.

Kemudian, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 01 November 1999.

BIDANG USAHA

KEGIATAN USAHA MENURUT ANGGARAN DASAR DAN YANG DIJALANKAN

Bidang usaha Mandiri Syariah berdasarkan Akta Perubahan terakhir No. 2 Tanggal 2 Juni 2014 persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Surat Keputusan No. AHU-12852.40.22.2014 Tanggal 10 Juni 2014, Anggaran Dasar Mandiri Syariah adalah:

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah *muntahiyah bittamlik* milik atau Akad lain yang tldak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

7. Melakukan pengambilalihan hutang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
10. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
15. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
16. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau Bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah;
17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;
18. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
19. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
20. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
21. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
22. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
23. Menyelenggarakan kegiatan atau produk Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
24. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
25. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
26. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah. Semua kegiatan usaha menurut Anggaran Dasar telah dijalankan, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Bank.

Semua kegiatan usaha menurut Anggaran Dasar telah dijalankan, baik secara langsung oleh Bank.

PRODUK DAN JASA

Kegiatan usaha Mandiri Syariah dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) produk/jasa meliputi produk pendanaan, produk pembiayaan, serta berbagai produk layanan yang dijelaskan sebagai berikut:

PRODUK PENDANAAN

PRODUK PEMBIAYAAN

PRODUK LAYANAN

PRODUK PENDANAAN

TABUNGAN MUDHARABAH
Merupakan tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan Prinsip Syariah yaitu *Mudharabah Mutlaqah.*

TABUNGAN BERENCANA
Merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam melakukan perencanaan investasi dengan berdasarkan prinsip syariah yaitu akad *Mudharabah Muthlaqah*.

TABUNGAN MABRUR
Merupakan tabungan untuk membantu masyarakat dalam merencanakan ibadah dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*.

TABUNGAN MABRUR JUNIOR
Merupakan tabungan masyarakat dengan usia di bawah 17 tahun untuk merencanakan ibadah.

REKENING TABUNGAN JEMAAH HAJI (RTJH)
Merupakan rekening tabungan yang dibuka oleh warga Negara Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji.

TABUNGAN DOLLAR
Merupakan tabungan dalam mata uang dollar berdasarkan Prinsip Syariah yaitu akad *Wadi'ah Yad Dhamana* yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan dengan menggunakan slip penarikan.

TABUNGAN INVESTA CENDEKIA (TIC)
Merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam melakukan perencanaan investasi pendidikan berdasarkan Prinsip Syariah yaitu *Mudharabah Muthlaqah*.

TABUNGAN WADIAH
Media penyimpanan dana atas prinsip *wadi'ah* dalam bentuk tabungan di bank yang diperuntukkan bagi masyarakat.

TABUNGAN PERUSAHAAN
Merupakan tabungan yang digunakan untuk menampung kelebihan dana rekening giro yang berdasarkan prinsip syariah yaitu akad *Mudharabah Muthlaqah* yang dimiliki Institusi/Perusahaan berbadan hukum dengan menggunakan fasilitas *autosave*.

TABUNGAN PENSIUN
Merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi penerima manfaat pensiun untuk menampung atau menerima pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada Pensiunan berdasarkan daftar yang diberikan oleh Lembaga Pengelola Pensiun kepada Bank dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*.

TABUNGANKU
Merupakan tabungan atas prinsip Wadi'ah yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BSM DEPOSITO
Merupakan produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

BSM DEPOSITO VALAS
Merupakan produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam bentuk valuta asing.

BSM GIRO
Merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

BSM GIRO PRIMA
Merupakan simpanan yang memililki fasilitas keringanan biaya transaksi kepada nasabah BSM Giro dengan syarat saldo rata-rata tertentu. BSM Giro Prima terutama ditujukan kepada komunitas pedagang yang cukup sensitif terhadap biaya transaksi bank.

BSM GIRO VALAS
Merupakan simpanan dalam mata uang dollar Amerika yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

BSM GIRO SINGAPORE DOLLAR
Merupakan simpanan dalam mata uang dollar Singapore yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

BSM GIRO EURO
Merupakan simpanan dalam mata uang euro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

GIRO SAR
Merupakan simpanan dalam mata uang SAR dengan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah.*

BSM SIMPANAN PELAJAR iB
Merupakan tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

MANDIRI SYARIAH PRIORITY
Merupakan layanan eksklusif dari Mandiri Syariah khusus bagi Nasabah terpilih. Mandiri Syariah bertekad membangun kemitraan bersama Nasabah dengan mengembangkan *one stop financial services* yang inovatif dan menghadirkan *Priority Banking Officer* yang berdedikasi untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan manfaat aset nasabah secara seimbang sesuai dengan prinsip syariah.

SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN) INVESTOR RITEL
Mandiri Syariah sebagai Agen Penjual di Pasar Perdana, menawarkan produk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau yang dikenal dengan istilah Sukuk Negara yang ditawarkan kepada Nasabah Ritel.

SUKUK NEGARA RETAIL
Mandiri Syariah sebagai Agen Penjual di Pasar Perdana, menawarkan produk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang bersifat Retail atau yang dikenal dengan istilah Sukuk Negara Retail. Sukuk Negara Retail adalah Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di Pasar Perdana dalam negeri. Penunjukan Mandiri Syariah sebagai Agen Penjual Sukuk Negara Retail ditetapkan oleh Pemerintah. Produk Sukuk Negara Retail yang ditawarkan oleh Mandiri Syariah SR 001 – SR 010.

SUKUK TABUNGAN
Merupakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang berbentuk tabungan investasi perseorangan Warga Negara Indonesia yang ditawarkan dalam mata uang Rupiah melalui Agen Penjual yang diterbitkan tanpa warkat, tidak dapat diperdagangkan dan dialihkan. Penunjukan Mandiri Syariah sebagai Agen Penjual SBSN untuk Investor Ritel ditetapkan oleh Pemerintah.

REKSA DANA

Mandiri Syariah telah terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Nomor: 25/BL/STTD/APERD/2007 dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 24 April 2007.

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang dipasarkan melalui Mandiri Syariah adalah Kontrak Investasi Kolektif. Adapun produk Reksa Dana yang ditawarkan melalui Mandiri Syariah adalah sebagai berikut:

REKSA DANA MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG (MISB)
Merupakan Produk Reksa Dana Syariah yang dikeluarkan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI), jenis Reksa Dana Campuran (*balanced fund*) yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal (investor) untuk selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi dalam portfolio Efek Saham Syariah, Efek Pasar Uang Syariah dan Obligasi Syariah.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF SYARIAH (MITRA SYARIAH)
Merupakan Produk Reksa Dana Syariah yang dikeluarkan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI), jenis Reksa Dana Saham (*equity fund*) yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal (investor) untuk selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi minimal 80% dalam portofolio Efek Saham Syariah.

REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS PESONA SYARIAH (BNPP PS)
Merupakan Produk Reksa Dana Syariah yang dikeluarkan oleh PT BNP Paribas Investment Partners, jenis Reksa Dana Saham (*equity fund*) yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal (investor) untuk selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi minimal 80% dalam portfolio Efek Saham Syariah.

TABUNGAN SAHAM SYARIAH
Merupakan Rekening Dana Nasabah berupa produk tabungan yang khusus digunakan untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek (baik berupa kewajiban maupun hak Nasabah), serta untuk menerima hak Nasabah yang terkait dengan Efek yang dimilikinya melalui Pemegang Rekening KSEI berdasarkan Prinsip Syariah yaitu akad *Mudharabah Muthlaqah*.

PRODUK PEMBIAYAAN

BSM PEMBIAYAAN MUDHARABAH
Merupakan pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

BSM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
Merupakan pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

BSM PEMBIAYAAN MURABAHAH
Merupakan pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati. Dapat dipergunakan untuk keperluan usaha (investasi, modal kerja) dan pembiayaan konsumer.

BSM PEMBIAYAAN ISTISHNA
Merupakan pembiayaan pengadaan barang dengan skema Istishna adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, dan panjang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang (obyek istishna), di mana masa angsuran melebihi periode pengadaan barang (*goods in process* fi dan bank mengakui pendapatan yang menjadi haknya pada periode angsuran, baik pada saat pengadaan berdasarkan persentase penyerahan barang, maupun setelah barang selesai dikerjakan.

PEMBIAYAAN DENGAN SKEMA IMBT (IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIIK)
Merupakan pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamliik adalah fasilitas pembiayaan dengan skema sewa atas suatu obyek sewa antara Bank dan Nasabah dalam periode yang ditentukan yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan nasabah.

PKPA
Merupakan pembiayaan kepada Koperasi Pegawai untuk Para Anggota (PKPA) adalah penyaluran pembiayaan kepada koperasi Pegawai untuk pemenuhan kebutuhan consumer para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan kepada koperasi Pegawai.

BSM IMPLAN
Merupakan pembiayaan konsumer dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada Pegawai tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kolektif) melalui rekomendasi perusahaan.

BSM PEMBIAYAAN GRIYA BSM
Merupakan pembiayaan konsumtif dalam valuta rupiah yang diberikan oleh Bank kepada perseorangan/individual untuk membiayai pembelian rumah baru, rumah *second*, renovasi maupun *take over* berupa rumah tinggal.

BSM PEMBIAYAAN PEMIIIKAN RUMAH SEJAHTERA SYARIAH TAPAK
Merupakan Pembiayaan BSM Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak adalah Pembiayaan berdasarkan prinsip dengan dukungan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat) yang diterbitkan oleh Bank pelaksana yang beroperasi secara syariah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak yang dibeli dari orang perseorangan dan/atau badan hukum.

BSM PEMBIAYAAN GRIYA PUMP-KB
Merupakan Pembiayaan Griya BSM Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama Bank (PUMP-KB) adalah Pembiayaan dengan dukungan pendanaan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada BSM untuk pemilikan atau pembelian rumah kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan.

BSM OPTIMA PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH
Merupakan Pembiayaan Griya BSM Optima adalah pembiayaan pemilikan rumah dengan tambahan *benefit* berupa adanya fasilitas pembiayaan tambahan yang dapat diambil nasabah pada waktu tertentu sepanjang *coverage* atas agunannya masih dapat meng-*cover* total pembiayaannya dan dengan memperhitungkukupan *debt to service ratio* nasabah.

BSM PENSIUN
Merupakan Pembiayaan BSM Pensiun adalah pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan atau pegawai yang kurang dari 6 (enam) bulan lagi akan pensiun (pra pensiun) atau janda pensiun dan telah menerima SK pensiun.

BSM ALAT KEDOKTERAN
Merupakan Pembiayaan BSM Alat Kedokteran adalah Pembiayaan untuk pembelian barang modal atau peralatan penunjang kerja dibidang kedokteran.

BSM OTO
Merupakan Pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor berupa mobil baru atau bekas berdasarkan prinsip syariah.

BSM EDUKA
Merupakan Pembiayaan BSM Eduka adalah Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan.

PEMBIAYAAN DANA BERPUTAR
Merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip *musyarakah* yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan *riil* nasabah.

PEMBIAYAAN DENGAN AGUNAN INVESTASI TERIKAT SYARIAH MANDIRI
Merupakan pembiayaan dengan agunan berupa dana investasi (*cash collateral*) dimana pemilik dana (*investor*) memberikan batasan kepada Bank mengenai tempat, cara dan objek investasinya.

BSM PEMBIAYAAN MIKRO
Merupakan pembiayaan dengan akad *Murabahah* dan *Ijarah* dengan maksimal pembiayaan sampai dengan Rp200 Juta yang digunakan untuk memfasilitasi:
1. Kebutuhan usaha
2. Kebutuhan multiguna
3. Pembiayaan Umrah

GADAI EMAS BSM
Merupakan pembiayaan yang menggunakan akad *qardh* dengan jaminan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn* yang diikat dengan akad *ijarah.*

CICIL EMAS BSM
Merupakan pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *Murabahah*.

PRODUK LAYANAN

MANDIRI SYARIAH CARD
Merupakan sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran, dan pemindahbukuan dana pada ATM BSM, ATM Mandiri, ATM Bersama, ATM Prima maupun ATM MEPS (Malaysia). Selain itu juga berfungsi sebagai kartu debit yang dapat digunakan untuk transaksi belanja di *merchant-merchant* yang menggunakan EDC Bank Mandiri atau Prima Debit (BCA).

MANDIRI SYARIAH ATM
Merupakan Mesin Anjungan Tunai Mandiri yang dimiliki oleh Mandiri Syariah. Mandiri Syariah ATM dapat digunakan oleh nasabah Mandiri Syariah, nasabah bank anggota Prima, nasabah bank anggota ATM Bersama dan nasabah anggota *Bancard* (Malaysia).

MANDIRI SYARIAH CALL 14040
Merupakan layanan perbankan melalui telepon dengan nomor akses 14040 atau 021 2953 4040, yang dapat digunakan oleh nasabah untuk mendapatkan informasi terkait layanan perbankan.

MANDIRI SYARIAH MOBILE BANKING
Merupakan produk layanan perbankan yang berbasis teknologi SMS telepon selular (ponsel) yang memberikan kemudahan untuk melakukan berbagai transaksi perbankan di mana saja, kapan saja.

MANDIRI SYARIAH MOBILE BANKING MULTI PLATFORM
Merupakan saluran distribusi yang dimiliki oleh BSM untuk mengakses rekening yang dimiliki nasabah dengan menggunakan teknologi GPRS/EDGE/3G/BIS dan WIFI melalui *smartphone*.

MANDIRI SYARIAH *NET BANKING*
Merupakan fasilitas layanan bank yang dapat digunakan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan (ditentukan bank) melalui jaringan internet menggunakan komputer/ *smart phone*.

MANDIRI SYARIAH NOTIFIKASI
Merupakan layanan untuk memberikan informasi segera dari setiap mutasi transaksi nasabah sesuai dengan jenis transaksi yang didaftarkan oleh nasabah yang dikirimkan melalui media SMS atau *email.*

MBP (MULTI BANK PAYMENT)
Merupakan layanan untuk mempermudah pembayaran kepada institusi (lembaga pendidikan, asuransi, lembaga khusus, lembaga keuangan non bank) melalui menu pemindahbukuan di ATM bank manapun.

BPI (BSM PEMBAYARAN INSTITUSI)
Merupakan layanan pembayaran yang terhubung ke institusi secara *real time online*.

BPR HOST TO HOST
Merupakan bentuk kerjasama Mandiri Syariah dengan BPR/BPRS yang memungkinkan nasabah BPR/BPRS untuk mempunyai kartu ATM yang dapat digunakan di ATM BSM, ATM Bank Mandiri, ATM Bersama dan ATM Prima.

BSM E-MONEY
Merupakan kartu prabayar berbasis *smart card* yang diterbitkan oleh Bank Mandiri bekerjasama dengan Mandiri Syariah.

PRODUK LAYANAN *REMITTANCE*

TRANSFER D.U.I.T.
Merupakan jasa pengiriman uang dari luar negeri ke semua bank dan kantor Pos di Indonesia secara cepat dan mudah. Pengiriman uang dilakukan melalui mitra BSM (*Remittance Company*) yang telah bekerjasama dengan bank dan perusahaan jasa keuangan di berbagai Negara.

BSM TRANSFER VALAS
Merupakan layanan transfer valuta asing (valas) secara cepat dan mudah antar rekening bank di Indonesia atau luar negeri ke berbagai mata uang tujuan di dunia. Transfer dapat dilakukan di semua jaringan outlet Mandiri Syariah yang tersebar di seluruh Indonesia.

WESTERN UNION
Merupakan jasa pengiriman uang domestik atau antarnegara secara cepat dan mudah dengan jaringan *outlet* yang luas dan tersebar di seluruh dunia lebih dari 500.000 lokasi. Pengiriman dan pencairan uang di Indonesia dapat dilakukan di Cabang dan *e-channel* BSM.

NUSANTARA
Merupakan jasa pengiriman uang domestik secara cepat dan mudah melalui SKN, BI-RTGS dan Wesel Pos Instan yang dapat dilakukan di Cabang dan *e-channel* BSM.

MULTIBILLER
Merupakan layanan penerimaan pembayaran tagihan jasa layanannya melalui *channel* BSMNet.

PENGEMBANGAN FITUR-FITUR *E-CHANNEL*
Dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah, Mandiri Syariah konsisten dalam pengembangan teknologi menggunakan *E-Channel*. Fitur-fitur yang telah dikembangkan antara lain: BSM Token adalah kode rahasia berupa *One Time Password* (OTP) via SMS yang digunakan untuk melakukan otorisasi transaksi nasabah dalam bertransaksi di BSM *Net Banking*.

LAYANAN ZAKAT
Merupakan layanan yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan penyaluran zakat berbasis aplikasi.

NEW MOBILE BANKING
Merupakan aplikasi layanan mobile banking di dalam *platform* android dan iOS, dimana terdapat fitur –fitur yakni layanan transaksi perbankan serta kebutuhan ibadah masyarakat (layanan zakat infak,waktu sholat, mesjid terdekat dan arah kiblat).

QRPAY
Merupakan fitur pembayaran transaksi pada *merchant* menggunakan *scan* QR *code*.

ASISTEN INTERAKTIF MANDIRI SYARIAH (AISYAH)
Merupakan fitur aplikasi live *chatting* atau mesin *intelligence* untuk menjawab para konsumen melalui layanan *digital* yang hadir pada 3 (tiga) *platform* yakni *website*, Facebook dan telegram.

BSM PESTA HADIAH
Merupakan program pemberian *direct gift.* Program berlaku untuk produk Tabungan BSM dengan mekanisme penempatan dana baru (*fresh fund*) minimal Rp25 juta.

BSM SAHABAT
Merupakan program *member get member*, dimana peserta program mengajak orang lain menjadi nasabah Mandiri Syariah. Peserta program (pemberi referensi) mendapatkan insentif uang berdasarkan volume dana dari nasabah yang tereferensi. BSM Sahabat juga merupakan upaya pemasaran berbasis *word of mouth.*

PETA WILAYAH USAHA

Saat ini Mandiri Syariah memiliki 1 Kantor Pusat dan 1.343 jaringan kantor yang terdiri dari kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan jaringan kantor lainnya seperti *payment point* di seluruh propinsi di Indonesia.

Tabel Jaringan Kantor Tahun selama 5 (Lima) tahun terakhir

Jenis Kantor	2019	2018	2017	2016	2015
Kantor Pusat	**1**	1	1	1	1
Kantor Cabang	**129**	129	129	129	136
Kantor Cabang Pembantu	**389**	389	389	389	469
Kantor Kas	**53**	53	52	52	65
Kegiatan Pelayanan Kas					
Payment Point	**114**	116	118	145	145
Kantor Fungsional Operasional					
Kantor Layanan Gadai	**50**	53	49	50	50
Mikro	**7**	7	0	0	0
Layanan Syariah Bank	**600**	100	0	0	0
ATM (Jaringan Mandiri Syariah)	**1.047**	**1.040**	**1.040**	**996**	**1.014**

Peta Sebaran Jaringan Kantor Mandiri Syariah di Provinsi di Indonesia Pada Tahun 2019

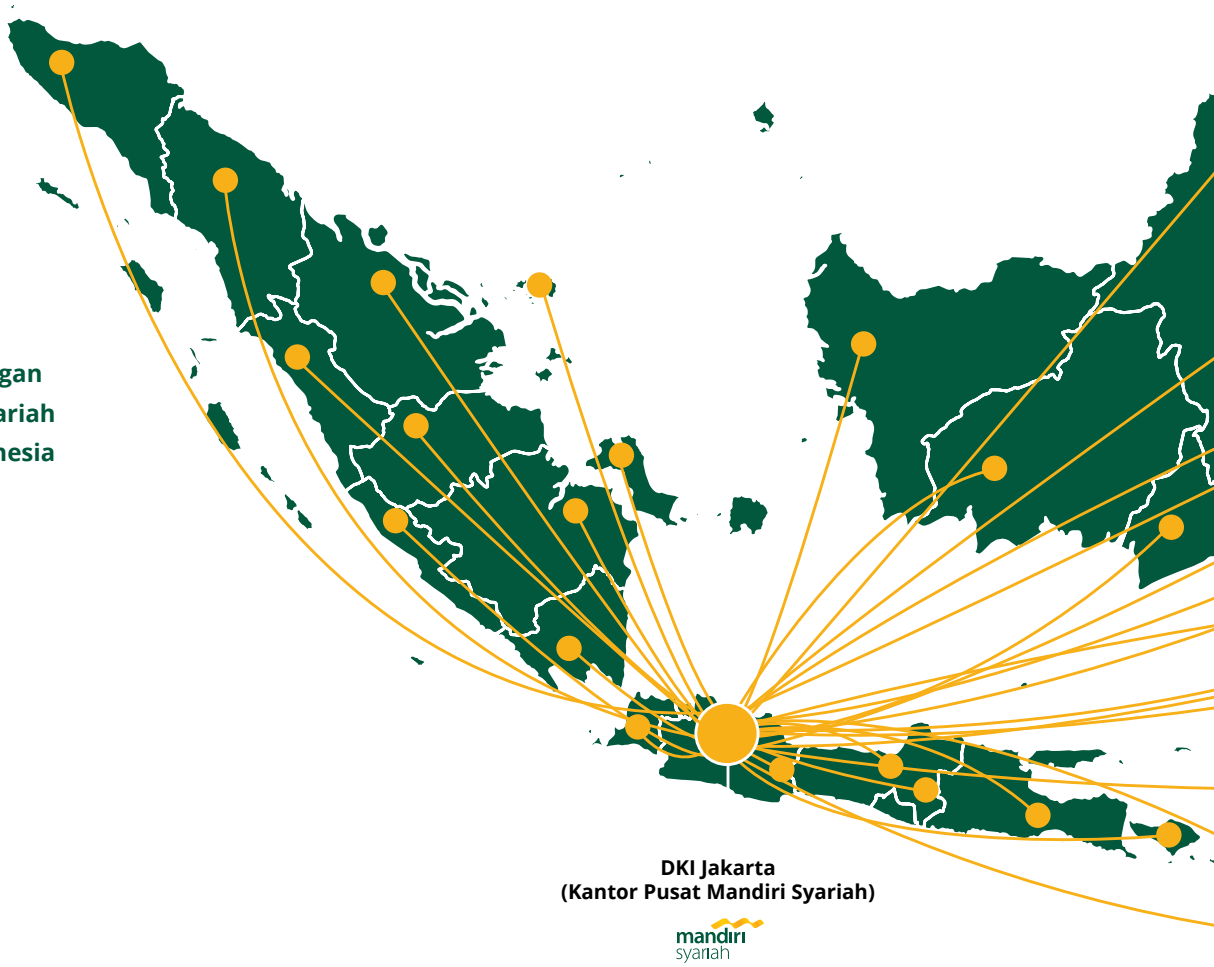

Tabel Jaringan Kantor Per Wilayah Tahun 2019

Wilayah	Jenis Kantor				
	Kantor Cabang	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Kas	Jaringan Kantor Lainnya	
				Payment Point	ATM
Region Office I/ Medan	**22**	**69**	**9**	20	187
Region Office II/ Palembang	**14**	**41**	**6**	10	99
Region Office III/ Jakarta	**32**	**96**	**15**	21	235
Region Office IV/ Bandung	**9**	**32**	**4**	8	119
Region Office V/ Semarang	**11**	**42**	**6**	19	125
Region Office VI/ Surabaya	**15**	**53**	**6**	28	123
Region Office VII/ Banjarmasin	**14**	**29**	**6**	2	92
Region Office VIII/ Makassar	**12**	**27**	**1**	6	67
TOTAL	**129**	**389**	**53**	**114**	**1.047**

Selain itu, pada tahun 2019, Mandiri Syariah bekerjasama dengan Bank Mandiri menyediakan layanan khusus pembukaan rekening syariah di kantor cabang di Bank Mandiri dengan jumlah 1.000 *outlet*.

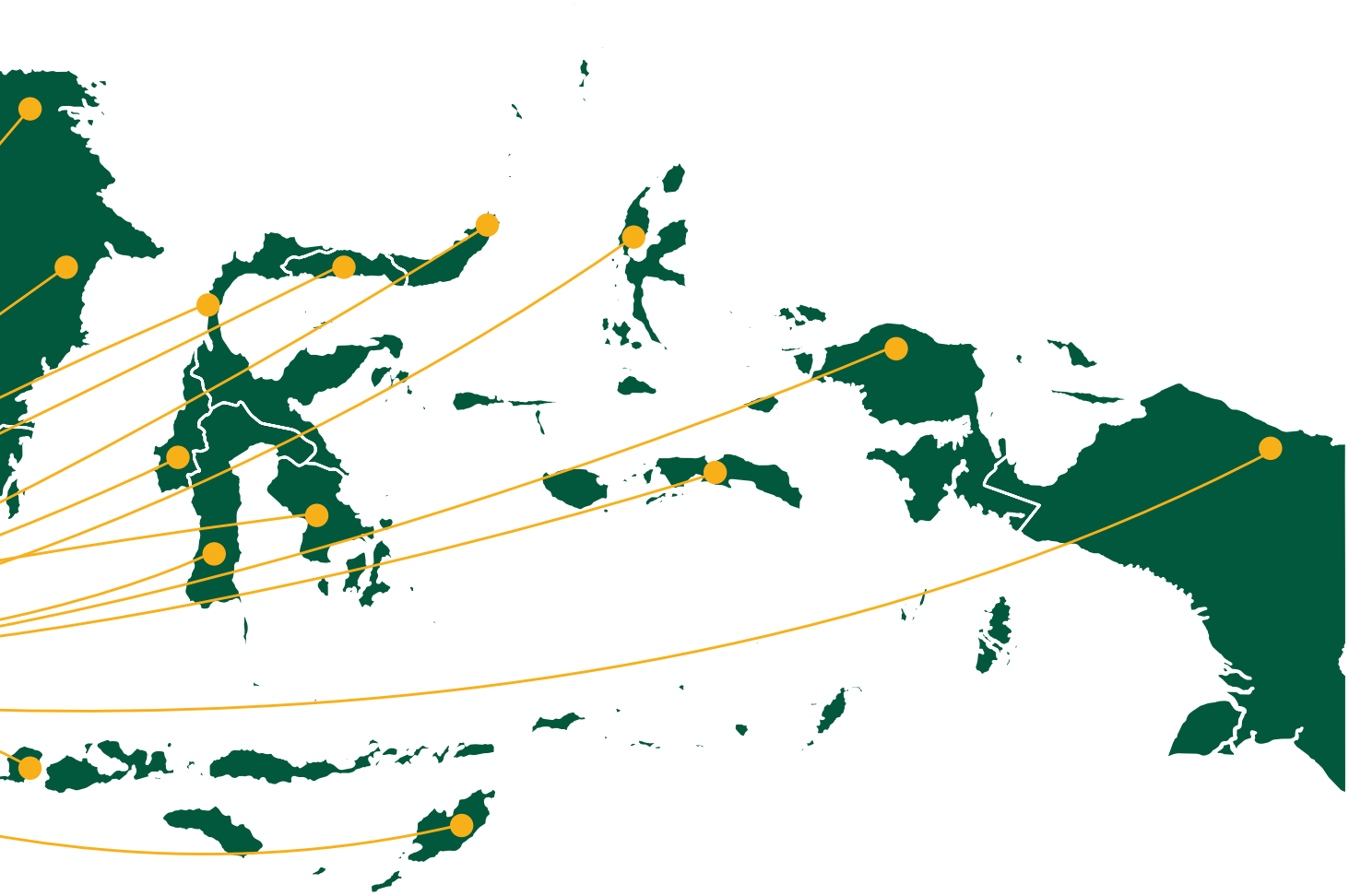

STRUKTUR ORGANISASI

Seiring dengan perkembangan bisnis Perusahaan, Struktur Organisasi Mandiri Syariah telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No SK: 21/350-KEP/DIR tentang Struktur Organisasi tanggal 24 Juni 2019.

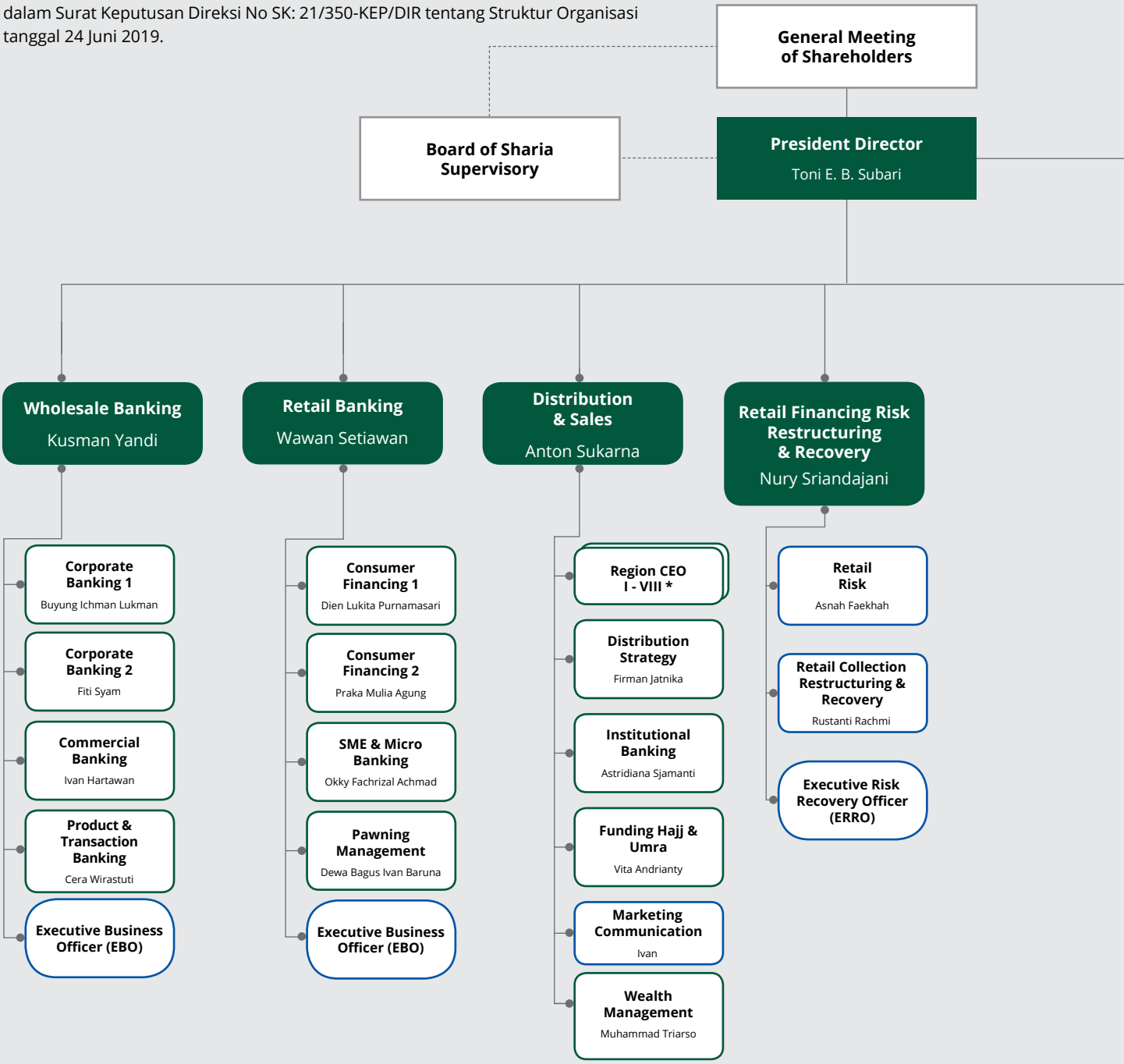

Keterangan:
* Nama Pejabat Regional CEO dapat dilihat di Profil Pejabat Eksekutif
** Rangkap Jabatan

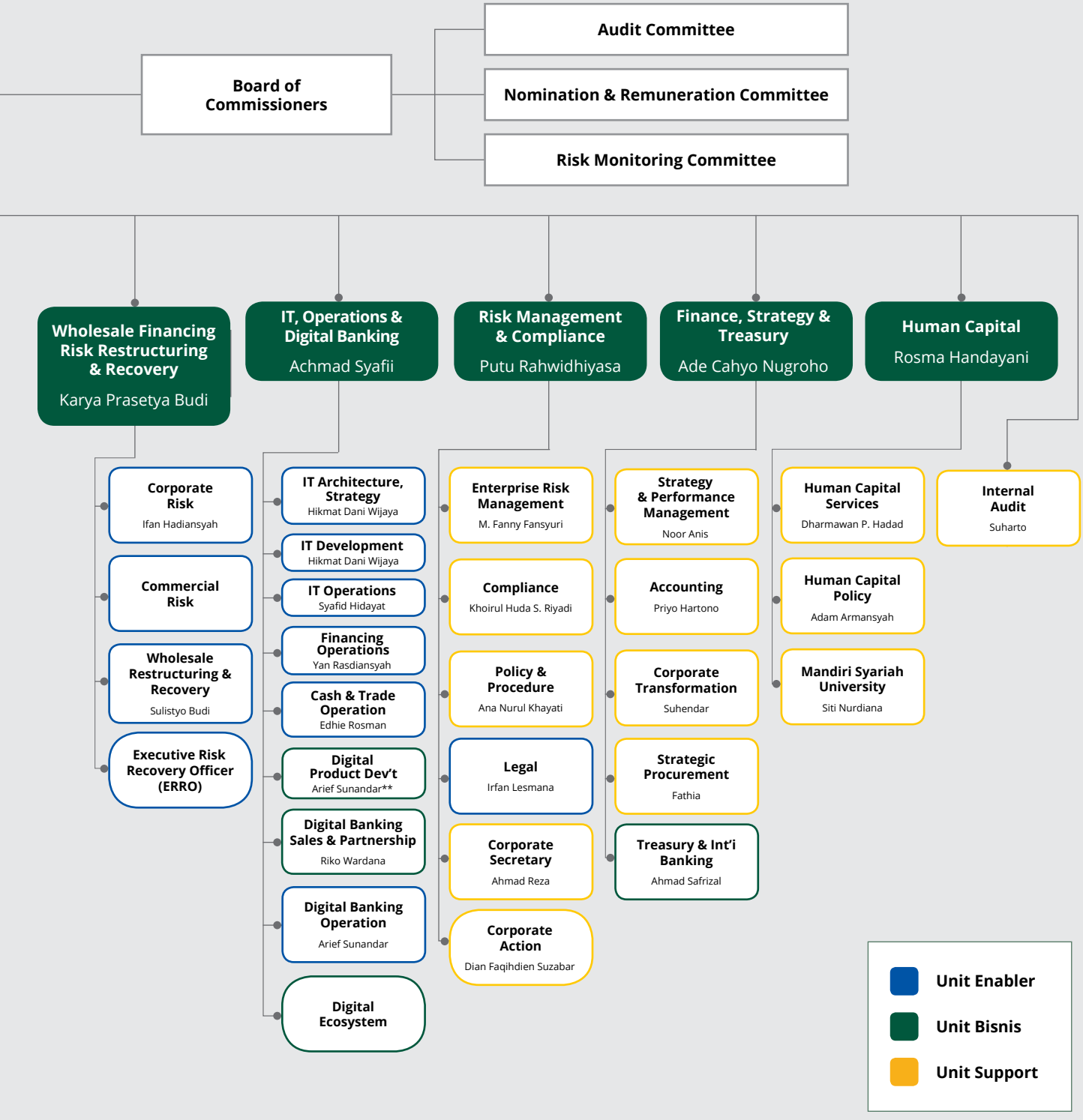
Board of Commissioners
Audit Committee
Nomination & Remuneration Committee
Risk Monitoring Committee
Wholesale Financing Risk Restructuring & Recovery
Karya Prasetya Budi
IT, Operations & Digital Banking
Achmad Syafii
Risk Management & Compliance
Putu Rahwidhiyasa
Finance, Strategy & Treasury
Ade Cahyo Nugroho
Human Capital
Rosma Handayani
Corporate Risk
Ifan Hadiansyah
Commercial Risk
Wholesale Restructuring & Recovery
Sulistyo Budi
Executive Risk Recovery Officer (ERRO)
IT Architecture, Strategy
Hikmat Dani Wijaya
IT Development
Hikmat Dani Wijaya
IT Operations
Syafid Hidayat
Financing Operations
Yan Rasdiansyah
Cash & Trade Operation
Edhie Rosman
Digital Product Dev't
Arief Sunandar**
Digital Banking Sales & Partnership
Riko Wardana
Digital Banking Operation
Arief Sunandar
Digital Ecosystem
Enterprise Risk Management
M. Fanny Fansyuri
Compliance
Khoirul Huda S. Riyadi
Policy & Procedure
Ana Nurul Khayati
Legal
Irfan Lesmana
Corporate Secretary
Ahmad Reza
Corporate Action
Dian Faqihdien Suzabar
Strategy & Performance Management
Noor Anis
Accounting
Priyo Hartono
Corporate Transformation
Suhendar
Strategic Procurement
Fathia
Treasury & Int'i Banking
Ahmad Safrizal
Human Capital Services
Dharmawan P. Hadad
Human Capital Policy
Adam Armansyah
Mandiri Syariah University
Siti Nurdiana
Internal Audit
Suharto
Unit Enabler
Unit Bisnis
Unit Support

VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN

Visi

BANK SYARIAH TERDEPAN dan MODERN
(*The Leading and Modern Sharia Bank*)
Adil, Seimbang dan Maslahat

UNTUK NASABAH	UNTUK PEGAWAI	UNTUK INVESTOR	UNTUK UMAT DAN BANGSA
Mandiri Syariah merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menentramkan dan memakmurkan. Sehingga Mandiri Syariah akan berupaya menjadi bank terpercaya serta memberikan produk dan servis yang terbaik.	Bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional.	Institusi keuangan syariah Indonesia yang paling terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan.	Memberikan kemaslahatan bagi Umat dan memberikan kontribusi pembangunan negara.

- Bank Terpercaya
- Memberikan Produk dan Servis yang Terbaik
- Profesionalisme
- Integritas
- *Team work*
- Laba
- Tumbuh & Berkelanjutan
- Zakat
- Pajak
- *Market Share*

Misi

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

REVIEW VISI DAN MISI OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dalam rangka memastikan kesesuaian Visi dan Misi Mandiri Syariah yang selama ini berjalan, Mandiri Syariah senantiasa melakukan *review* terhadap Visi dan Misi. Pada tahun 2019, adanya pelaksanaan Muhasabah ke-VIII yang diikuti seluruh Direksi dan Senior Executive Vice President (SEVP) terdapat pembahasan pada *review* visi dan misi Mandiri Syariah, namun dinyatakan masih terdapat kesesuaian dengan perkembangan dan tantangan perusahaan ke depan. Kegiatan Muhasabah tersebut dilaksanakan pada tanggal 4 - 5 April 2019 yang bertempat di Bali. Mandiri Syariah juga mengundang pihak independen untuk melakukan *review* terhadap Visi dan Misi serta pencapaian beberapa indikator utama agar dapat tercapai sesuai dengan target yang telah disepakati. Dengan penetapan target tersebut, visi dan misi Mandiri Syariah telah dibahas dan disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Tahapan Penyusunan Visi, Misi, dan Mandiri Syariah *Shared Values*

1. **Mandiri Syariah melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan kekuatan internal Mandiri Syariah.**
2. **Mandiri Syariah melakukan evaluasi terhadap perubahan strategis lingkungan eksternal Perusahaan dan mempertimbangkan peluang bisnis di masa akan datang.**
3. **Mandiri Syariah melakukan evaluasi dan identifikasi terhadap harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan.**
4. Dengan mempertimbangkan Kekuatan Internal dan Peluang Eksternal serta harapan para pemangku kepentingan, Direksi merumuskan Visi dan Misi, Direksi beserta Senior Management dan perwakilan pegawai merumuskan Mandiri Syariah *Shared Values.*
5. Visi, Misi, dan Mandiri Syariah *Shared Values* tersebut kemudian disampaikan dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris yang kemudian ditetapkan dan disepakati bersama oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Direksi menetapkan Visi, Misi, dan Mandiri Syariah *Shared Values* di dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan.

Visi dan Misi Mandiri Syariah telah ditetapkan dalam Surat Edaran No. 10/001/UMM tanggal 30 Januari 2008, yang diperbarui dengan SE No. 16/005/UMM, tanggal 10 Maret 2015 tentang The 7 (*Seven) Fundamentals of BSM).*

Budaya Perusahaan

E

Excellence

Bekerja keras, cerdas, tuntas dengan sepenuh hati untuk memberikan hasil terbaik.

T

Teamwork

Aktif, bersinergi untuk sukses bersama.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Mandiri Syariah, insan-insan Mandiri Syariah perlu menerapkan nilai-nilai yang relatif seragam. Insan-insan Mandiri Syariah telah menggali dan menyepakati nilai-nilai dimaksud, yang kemudian disebut Mandiri Syariah *Shared Values.*

Mandiri Syariah *Shared Values* tersebut adalah ETHIC (*Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity,* dan *Customer Focus*).

H

Humanity

Peduli, ikhlas, memberi maslahat dan mengalirkan berkah bagi negeri.

I

Integrity

Jujur, taat, amanah, dan bertanggung jawab.

C

Customer Focus

Berorientasi kepada kepuasan pelanggan yang berkesinambungan dan saling menguntungkan.

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Mulya Effendi Siregar
Komisaris Utama

Bambang Widianto
Komisaris Independen

Muhammad Kapitra Ampera*
Komisaris Independen

Dimas Oky Nugroho
Komisaris Independen
(Berhenti menjabat sejak tanggal 14 Oktober 2019)

Dikdik Yustandi
Komisaris
(Berhenti menjabat sejak tanggal 15 April 2019)

Agus Sudiarto
Komisaris
(Berhenti menjabat sejak 1 Oktober 2019)

PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dr. H. Mohamad Hidayat
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Dr. H. Oni Sahroni, MA
Anggota Dewan Pengawas Syariah

Dr. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH.
(Anggota Dewan Pengawas Syariah)

Dr. H. Muhammad Syafii Antonio, M. Ec
Anggota Dewan Pengawas Syariah
(Berhenti menjabat sejak 27 Maret 2019)

Prof. Dr. (HC) K.H. Ma'ruf Amin.
Ketua Dewan Pengawas
(Berhenti menjabat sejak 14 Oktober 2019).

* Berlaku Efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas *fit and proper test*

PROFIL DIREKSI

Toni E. B. Subari
Direktur Utama

Putu Rahwidhiyasa
Direktur Risk Management & Compliance

Kusman Yandi
Direktur Wholesale Banking

Ade Cahyo Nugroho
Direktur Finance, Strategy & Treasury

Achmad Syafii
Direktur IT, Operations & Digital Banking

Rosma Handayani*
Direktur Human Capital

PROFIL PEJABAT DI BAWAH DIREKSI

Wawan Setiawan
SEVP Retail Banking

Nury Sriandajani
SEVP Retail Financing Risk Restructuring & Recovery

Karya Prasetya Budi
SEVP Wholesale Financing Risk Restructuring & Recovery

Anton Sukarna
SEVP Distribution & Sales

Niken Andonowarih
SEVP Retail Banking
(Berhenti menjabat sejak 2 September 2019).

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Mulya Effendi Siregar
Komisaris Utama

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Lahir di Jakarta pada tahun 1957, usia 62 tahun per Desember 2019.

Riwayat Pendidikan
- Sarjana bidang Sosial dari Institut Pertanian Bogor (1980).
- Master of Science bidang Agricultural Economics dari The Ohio State University (1989); dan
- Doctor of Philosophy (PhD) bidang Consumer Economics dari The Ohio State University (1998).

Pendidikan/Sertifikasi
- *Leadership* Program di USA (2014);
- *Refreshment* oleh BSMR (2014);
- *Refreshment* oleh BSMR (2014);
- *Risk Management Certificate Refresment Course* oleh IRFA oleh BSMR (2014);
- *Leadership Programme* oleh Georgia Tech University (2014);
- Program Pemeliharaan SMR Tingkat V oleh BSMR (2016);
- Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko (USMR) Level 5 oleh BSMR (2016);
- *Sharing Session Mengenai Implementasi Sustainability Finance* (2018);
- *4th Cambridge Islamic Finance Leadership Programme* (Cambridge IFLP) 2018 oleh *Cambridge International Financial Advisory* (IFA) (2018);
- *Refreshment* USMR Level V (2018);
- *Leadership* Forum 2018 di Sumatera Barat (2018);
- *Cambridge Islamic Finance Leadership Programme* (2018);
- *Panel Dialogue in Global Islamic Finance Forum* (GIFF) *Programme* (2018);
- Pembaruan Sertifikat manajemen Risiko 10 Juni 2019, Jakarta *Risk Management*, LSPP;
- Leadership Forum 2019 10 - 12 Oktober 2019, Magelang, *Leadership*, BSM MSU;
- *Executive risk management refresher program Batch* 3 29 Oktober -7 November 2019, Oslo dan Stockholm *Leaderrship*, LPPI.

Pengalaman Kerja
Sebelum menjabat sebagai **Komisaris Utama Mandiri Syariah**, beliau pernah menjabat sebagai:
- Peneliti Senior Tim Litbang Perbankan Syariah (1999-2002);
- Anggota Working Committee International Islamic Financial Market (IIFM) (2000-2002);
- Ketua Tim Litbang Perbankan Syariah Bank Indonesia (2002-2006);
- Kepala Biro Penelitian Pengembangan dan Pengaturan Perbankan Syariah Bank Indonesia (2006-2010);
- Kepala Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (2010-2012);
- Direktur Eksekutif DPNP Bank Indonesia (2012-2013);
- Asisstant Gubernur Bank Indonesia (Mei 2013-Desember 2013);
- Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 1 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2014-2017);
- Anggota Pleno Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (2010 - saat ini);
- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank Mandiri (2017 - 2019);
- Direktur Bidang I LPPI (2019-2022).

Riwayat Penunjukan
Diangkat sebagai Komisaris Utama Mandiri Syariah untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPST 2017 Akta No. 01 tanggal 2 Mei 2017.

Periode Jabatan
Tahun 2017 - Penutupan RUPS Tahunan 2020 (Periode Pertama).

Jabatan Rangkap
- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank Mandiri Sejak 2017.
- Direktur Bidang I LPPI (2019-2022).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah
Nihil

Bambang Widianto

Komisaris Independen

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Lahir di Jakarta pada tahun 1959, usia 60 tahun per Desember 2019.

Riwayat Pendidikan
- Sarjana bidang Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung (1984).
- Master of Art (MA) bidang *Computer Science*, Boston University-Boston USA (1990).
- Doctor of Philoshopy (Ph.D) bidang Ilmu Ekonomi di Northeastern University-Boston USA (1995).

Pendidikan/Sertifikasi
- *Executive Distance Learning on Islamic Banking Training* (2018);
- *Leadership* Forum (2018) di Sumatra Barat;
- Sertifikasi Perbankan Syariah (2018) di Jakarta.

Pengalaman Kerja
Sebelum menjabat sebagai **Komisaris Independen Mandiri Syariah**, beliau juga pernah menjabat sebagai:
- Pengajar Pada Program Magister Perencanaan dan kebijakan Publik - Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (1999 - saat ini);
- Anggota Forum Masyarakat Statistik (1999 - 2010);
- Pengajar Pada Program Magister Ilmu Administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara (2002 - saat ini);
- Presiden Komisaris PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) (2004-2006);
- Staf Ahli Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/ Kepala BAPPENAS Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan (2007 - 2008);
- Anggota Dewan Penelitian dan Pengupahan Nasional (2003 - 2010);
- Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan (2008 - 2009);
- Komisaris Utama PT Barata Indonesia (Persero) (Maret 2008-2012);
- Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) (November 2012);
- Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan / Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) (2009-2019);
- Anggota Tim Ahli Wakil Presiden RI (2019 - saat ini).

Riwayat Penunjukan
Diangkat sebagai Komisaris Independen Mandiri Syariah untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPST 2013 Akta No. 24 tanggal 29 Mei 2013, diangkat kembali Keputusan RUPST 2018 Akta No. 27 tanggal 12 Maret 2018.

Periode Jabatan
2013 - Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 2018 (Periode Pertama).
2018 - Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 2021 (Periode Kedua).

Jabatan Rangkap
Tim Ahli Wakil Presiden RI (2019 - saat ini)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah
Nihil

Dimas Oky Nugroho

Komisaris Independen

(Berhenti menjabat sejak tanggal 14 Oktober 2019).

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Lahir di Pematangsiantar, Sumatera Utara pada tahun 1978, usia 41 tahun per Desember 2019.

Riwayat Pendidikan
- Sarjana bidang Ilmu Politik dari Universitas Airlangga Surabaya (2001).
- Master of Philosophy in International Politics University of Glasgow, Scotland UK (2005).
- Doctor of Philoshopy (Ph.D) bidang Politik dari University of New South Wales, Sydney, Australia (2016).

Pendidikan/Sertifikasi
- Sertifikasi Perbankan Syariah (2018);
- Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) (2018);
- *High Level Policy Talk The Future of Finance* (2018).

Pengalaman Kerja
Sebelum menjabat sebagai **Komisaris Independen Mandiri Syariah**, beliau pernah menjabat sebagai:
- Asisten Program, Aliansi Demokrasi Anak Bangsa(ADAB)-USAID Projek, Surabaya (1999-2001);
- Research Associate, United Nations Support Facilities for Indonesia Recovery (UNSFIR), Jakarta (2005 - 2006);
- Dosen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya (2006-2008);
- Dosen Departemen Hubungan Internasional, Universitas Paramadina, Jakarta (2008);
- Program Office Strengthening Sustainable Peace and Development in Aceh – SSPDA, UNDP-BAPPENAS (2007 - 2008);
- Program Indonesia Climate Change Trust Fund, UNDP-Bappenas (2010);
- Asisten Pengajar Indonesia Studies, UNSW di Australian Defense Force Academy (ADFA), Canberra (2010);
- Pendiri Kader Bangsa Fellowship Program (KBFP), pelatihan kepemimpinan dan kebangsaan untuk anak muda dan pemimpin komunitas kreatif secara nasional (2011 - saat ini);
- Pendiri dan Direktur Eksekutif, Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) (2012-2017);
- Dosen Pasca Sarjana Ilmu Sosiologi, Universitas Padjajaran, Bandung (2016);
- Staf Khusus Kepala Staf Kantor Kepresidenan Republik Indonesia (Januari 2017- Januari 2018).

Riwayat Penunjukan
Diangkat sebagai Komisaris Independen Mandiri Syariah untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPST Akta No. 27 tanggal 12 Maret 2018.

Periode Jabatan
Tahun 2018 - 14 Oktober 2019.

Jabatan Rangkap
Tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah
Nihil

Muhammad Kapitra Ampera*

Komisaris Independen

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Lahir di Padang pada tahun 1966, usia 53 tahun per Desember 2019.

Riwayat Pendidikan
- Sarjana bidang Hukum Pidana di Universitas Muhammadiyah, Jakarta (1991).
- Master bidang Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia Jogjakarta (2005).
- Doktor bidang Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia Jogjakarta (2016).

Pendidikan/Sertifikasi
- *Training for* Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) –*Risk Management Competency for Banking Profession –Level 1 Commissioner* oleh PT Peak Pratama (2019);
- *Training for* Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) –*Risk Management Competency for Banking Profession* –Level 2 *Commissioner* oleh PT Peak Pratama (2019);
- *Executive Training on Islamic Banking* (2019);
- Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) (2019);
- Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) (2019).

Pengalaman Kerja
Sebelum menjabat sebagai **Komisaris Independen Mandiri Syariah**, beliau juga pernah menjabat sebagai:
- Wakil Direktur LBH Permahi Jaya, Jakarta (1987-1989);
- Advokat di Tim Advokasi Tokoh Masyarakat (Agustus 1991 – 2007);
- Advokat di Tim Advokasi Tokoh Masyarakat (April 1991 – saat ini);
- Senior Advokat di Law Firm M. Kapitra & Associates (1991-sekarang);
- Advokat di Tim Advokasi Tentara Nasional Indonesia, Jakarta (Juli 2001 – Oktober 2007);
- Advokat di Tim Advokasi GNPF – MUI (Desember 2016 – Juli 2018);
- Staf Khusus Kepala BIN di Badan Intelejen Indonesia (BIN) (Oktober 2018 – saat ini).

Riwayat Penunjukan
Diangkat sebagai Komisaris Independen Mandiri Syariah untuk pertama kalinya berdasarkan RUPS Sirkuler tanggal 14 Oktober 2019.

Periode Jabatan
Tahun 2019 - Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 2022 (Periode Pertama).

Jabatan Rangkap
Staff Khusus Kepala Badan Intelejen Negara (BIN)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah
Nihil

*) Berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas *fit & proper test*.

Dikdik Yustandi

Komisaris

(Berhenti menjabat sejak tanggal 15 April 2019).

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Tangerang, Banten

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
lahir di Bogor pada tahun 1963, usia 56 tahun per Desember 2019.

Riwayat Pendidikan
- Sarjana bidang Perikanan dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987.
- Magister bidang Marketing dari Universitas Satyagama pada tahun 1997.

Pendidikan/Sertifikasi
- Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Level 2 (2006);
- *Company Analysis: Valuation, Forecasting and Modeling, Systematic Inventive Thinking For, Cashflow CDO's and Synthetic Structuring* (2009);
- *Leading Organizational Effectiveness* (2011);
- Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Level 4 (2012);
- Manager As a Coach level 3 (2013);
- *Cash Management Banking* Seminar (2014);
- *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko (2014);
- *Workshop Legal for Corporate Banking* (2016);
- *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko (2016);
- Pelatihan Dasar-Dasar Perbankan Syariah – KARIM Consulting Indonesia (2017);
- *Workshop with Mark Coopersmith* (2018).

Pengalaman Kerja
Sebelum menjabat sebagai Komisaris Mandiri Syariah, beliau juga pernah menjabat sebagai:
- Corporate Relationship Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1999-2003);
- Vice President-Dept Head Structured Finance, Corporate Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2003-2005);
- Vice President, Dept Head Corporate Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2005-2009);
- Kepala Kantor Wilayah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Regional Office VIII Surabaya (2009 -2010);
- General Manager Hong Kong Branch PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2010-2014);
- Marketing and Distribution Director Mandiri InHealth (2014-2016);
- Senior Executive Vice President (SEVP) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016 - 2018);
- SEVP Large Corporate Bank Mandiri (2018 - saat ini).

Riwayat Penunjukan
Diangkat sebagai Komisaris Mandiri Syariah untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPS Sirkuler tanggal 15 Januari 2019.

Periode Jabatan
15 Januari 2019 – 15 April 2019 karena beliau diangkat sebagai Direktur Pelaksana di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Jabatan Rangkap
SEVP *Large Corporate* Bank Mandiri (sejak 2018)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah
Nihil

Agus Sudiarto

Komisaris

(Berhenti menjabat sejak 1 Oktober 2019).

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
lahir di Jakarta pada tahun 1964, usia 55 tahun per Desember 2019.

Riwayat Pendidikan
- Sarjana bidang Hukum dari Universitas Indonesia (1988).
- Magister Manajemen dari Universitas Indonesia (2004).

Pendidikan/Sertifikasi
- *Corporate Debt Management* di Singapura (2002);
- SME & Comm. *Banking Attachment* Program di New York, Amerika Serikat (2003);
- *High Impact Leadership* di New York, Amerika Serikat (2008);
- INSEAD *Blue Ocean Strategy* di Fountainebleau, Perancis (2011);
- *Leading Team for Growth and Change* di Virginia, Amerika Serikat (2013).

Pengalaman Kerja
Sebelum menjabat sebagai **Komisaris Mandiri Syariah**, beliau juga pernah menjabat sebagai:
- Vice President Recovery Manager - Medan Bank Mandiri (2005-2006);
- Vice President Regional Credit Recovery I - Medan Bank Mandiri (2006-2007);
- Senior Vice President Group Head Assets Management Bank Mandiri (2007- 2010);
- Senior Vice President Group Head Special Asset Management Bank Mandiri (2010-2014);
- Direktur Utama Mandiri Syariah (2014-2017);
- Senior Executive Vice President Special Asset Management Bank Mandiri (2017-2019).

Riwayat Penunjukan
Diangkat sebagai Komisaris Mandiri Syariah untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 27 Maret 2019.

Periode Jabatan
27 Maret 2019 - 1 Oktober 2019 dikarenakan beliau diangkat sebagai Direktur di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Jabatan Rangkap
Senior Executive Vice President Special Asset Management Bank Mandiri (2017-2019).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah
Nihil

PROFIL
DEWAN PENGAWAS SYARIAH

DR. H. Mohamad Hidayat

Ketua Dewan Pengawas Syariah

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Lahir di Jakarta pada tahun 1967, usia 52 tahun per Desember 2019.

Riwayat Pendidikan
- Sarjana dari Fakultas Syariah IAIN Jakarta (1991).
- Master of Business Administration dari IPWI Jakarta.
- Pasca Sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Institute at Business Law & Legal Management (IBLAM) Jakarta (2003).
- Doktor bidang Islamic Economic and Finance di Universitas Trisakti, Jakarta (2014).

Pendidikan/Sertifikasi
- Sertifikasi Islamic Bank, BIRTH Langkawi Malaysia;
- Sertifikasi Kompetensi DPS, LSP DSN;
- Sertifikasi Hukum Kontrak, The A Team Jakarta.

Pengalaman Kerja
Sebelum menjabat sebagai **Ketua Dewan Pengawas Mandiri Syariah**, beliau pernah menjabat sebagai:
- Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional (BPH DSN) MUI;
- Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES);
- Dosen Pasca Sarjana Program PSTTI Universitas Indonesia;
- Dosen Pasca Sarjana Program IEF Universitas Trisakti;
- Aktif menjadi supervisor dan advisor di beberapa institusi keuangan/non keuangan Islam;
- Khotib tetap Masjid di Istana Presiden dan Masjid di Instana Wakil Presiden Republik Indonesia;
- Penulis Buku;
- Ketua Umum Al- Washiyyah Foundation.

Riwayat Penunjukan
Diangkat sebagai Dewan Pengawas Syariah Mandiri Syariah untuk pertama kalinya berdasarkan Akta No. 24, tanggal 8 September 1999, kemudian diangkat kembali berdasarkan Akta No. 10 tanggal. 19 Juni 2008, diangkat kembali berdasarkan Akta No. 19 tanggal 28 Juni 2011, dan diangkat kembali berdasarkan Akta No. 07 tanggal 5 April 2016.

Periode Jabatan
1999 – Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 2022 (Periode Pertama).

Jabatan Rangkap
- Anggota DPS PT Asuransi Manulife (asuransi);
- Anggota DPS PT Asuransi Allianz Syariah (asuransi);
- Anggota DPS PT BRIngin Life Syariah;
- Anggota DPS UUS BTN Syariah (perbankan).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah
Nihil

Prof. Dr. (HC) K.H. Ma'ruf Amin.

Ketua Dewan Pengawas

(Berhenti menjabat sejak 14 Oktober 2019).

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Lahir di Tangerang pada tahun 1943, usia 76 tahun per Desember 2019.

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Filsafat Islam dari Fakultas Ushuluddin, Universitas Ibnu Kholdun, Jakarta (1967).
- Doktor Honoris Causa pada bidang Hukum Ekonomi Syariah dari Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2012).
- Profesor bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2017).

Pendidikan/Sertifikasi
- Sertifikasi DPS Perusahaan Perasuransian Syariah Level I Angkatan II, OJK dan DSN MUI, Jakarta (2013);
- Sertifikasi DPS Perasuransian Syariah Level II, OJK dan DSN MUI, Jakarta (2014);
- Sertifikasi DPS Perusahaan Pembiayaan Level I, OJK dan DSN MUI, Jakarta (2015);
- Ijtima' Sanawi DPS LKS, OJK dan DSN MUI, Bandung, (2015);
- Ijtima' Sanawi DPS LKS, OJK dan DSN MUI, Jakarta, (2016).

Pengalaman Kerja
Sebelum menjabat sebagai **Ketua Dewan Pengawas Mandiri Syariah**, beliau pernah menjabat sebagai:
- Ketua DPS pada beberapa Lembaga Keuangan Syariah (Bank Syariah, Asuransi Syariah dan Investasi Syariah) di Indonesia;
- Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia periode 2007-2009, 2001- 2012, 2012-2014;
- Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) (Desember 2014 - saat ini);
- Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) (2015 - 2020);
- Ra'Is 'Aam PBNU (2015-2020).

Riwayat Penunjukan
Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Mandiri Syariah untuk pertama kalinya berdasarkan Akta No. 07 tanggal 05 April 2016 dan Surat Keputusan OJK: Nomor SR-6/PB.13/2017 tanggal 03 Maret 2017.

Periode Jabatan
2017 – 14 Oktober 2019.

Jabatan Rangkap
- Ketua DPS Bank Muamalat Indonesia (perbankan);
- Ketua DPS BNI Syariah (perbankan).;
- Ketua DPS Mega Syariah (perbankan);
- Ketua DPS BNI Life (asuransi);
- Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) sejak Desember 2014.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah
Nihil

Dr. H. Muhammad Syafii Antonio, M. Ec

Anggota Dewan Pengawas
(Berhenti menjabat sejak 27 Maret 2019).

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Lahir di Sukabumi pada tahun 1967, usia 52 tahun per Desember 2019.

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Bidang Syariah dan Hukum Islam dari University of Jordan (1990).
- Magister bidang Ekonomi International Islamic University (IIU) Malaysia tahun (1992).
- Doktor bidang Banking & Micro Finance Micro Finance, University of Melbourne Australia (2004).

Pendidikan/Sertifikasi
Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK tahun 2016.

Pengalaman Kerja
Sebelum menjabat sebagai **Anggota Dewan Pengawas Mandiri Syariah**, beliau pernah menjabat sebagai:
- Komite Ahli Pengembangan Perbankan Syariah pada Bank Indonesia;
- Anggota Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional MUI;
- Rektor Tazkia University College of Islamic Economics;
- Global Shariah Advisor di Dubai;
- Komite Ahli Perbankan Syariah Kuala Lumpur dan Bank Indonesia;
- Anggota Komite Ekonomi Nasional yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia (2010);
- Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (2016).

Riwayat Penunjukan
Diangkat sebagai Dewan Pengawas Syariah Mandiri Syariah berdasarkan Akta No. 07 tanggal 5 April 2016.

Periode Jabatan
2016 - 27 Maret 2019.

Jabatan Rangkap
- Pimpinan STEI Tazkia (konsultan dan pendidikan);
- Anggota DPS BSM (perbankan);
- Anggota DPS Schroders Investment Management.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah
Nihil

Dr. H. Oni Sahroni, MA *

Anggota Dewan Pengawas

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Lahir di Serang pada tahun 1975, usia 44 tahun per Desember 2019.

Riwayat Pendidikan
- Sarjana bidang Syariah Islamiah di Universitas Al Azhar Kairo (2000).
- Master Fiqh Muqaran di Universitas Al Azhar Kairo (2005).
- Doktor Fiqh Muqaran (Islamic Law Comparative Study) di Universitas Al Azhar Kairo (2009).

Pendidikan/Sertifikasi
-

Pengalaman Kerja
Sebelum menjabat sebagai **Anggota Dewan Pengawas Mandiri Syariah**, beliau pernah menjabat sebagai:
- Anggota BPH Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI sejak tahun 2011 hingga sekarang;
- Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah – Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAS – IAI), tahun 2017 – 2020;
- Anggota ISRA (The Internasional Shari'ah Research Academy for Islamic Finance) Council of Scholars Malaysia sejak tahun 2005 hingga sekarang;
- Direktur Lembaga Penelitian dan Riset di Syariah Economic & Banking Institute (SEBI), di jakarta sejak tahun 2013 hingga sekarang;
- Dosen Fikih Ekonomi Syariah Economic & Banking Institute (SEBI) sejak tahun 2014 hingga sekarang;
- Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah Maybank, Bank Muamalat Indonesia, Adira Multi Finance Syariah dan BNP Paribas Investment partners di Jakarta;
- Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Amil Zakat – Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) (2016 - saat ini).

Riwayat Penunjukan
Diangkat sebagai Dewan Pengawas Syariah Mandiri Syariah berdasarkan RUPS Sirkuler tanggal 14 Oktober 2019.

Periode Jabatan
22 oktober 2019 - Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 2022 (Periode Pertama).

Jabatan Rangkap
- Tenaga Ahli Syariah pada International Shariah Research Academy for Islamic Finance di Kuala Lumpur;
- DPS PT BNP Paribas Investment Partners;
- DPS PT Adira Dinamika Multifinance;
- DPS PT Bank Muamalat Indonesia Tbk;
- Anggota Dewan Syariah Nasional;
- Direktur Lembaga Penelitian dan Riset di Syariah Economic and Banking Institute (SEBI).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah
Nihil

*) Berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dr. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH. *

Anggota Dewan Pengawas

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Lahir di Jakarta pada tahun 1967, usia 52 tahun per Desember 2019.

Riwayat Pendidikan
- Sarjana bidang Tarbiyah dari STAISA (1990).
- Sarjana bidang Hukum dari Universitas Krisna Dwipayana (1999).
- Master bidang Manajemen Pemasaran dari Unitama Jagakarsa (2002).
- Master bidang Hukum dari Universitas Krisnadwipayana (2010).
- Doktor bidang Ilmu Hukum dari Universitas Krisnadwipayana (2020).

Pendidikan/Sertifikasi
- Pelatihan dan Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, 2010, Basyarnas;
- Lokakarya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, 2010, MUI/ KumDang;
- Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah Perasurasian Syariah, 2011, DSN MUI;
- Sosialisasi dan Seminar Buku Pedoman GCG, 2012, LPPI;
- Penerapan Fatwa-Fatwa DSN MUI dalam Industri Perbankan Syariah, 2013 , Bank Indonesia/ DSN MUI;
- Pelatihan Sertifikasi Asuransi Syariah Dewan Syaruag Nasional-MUI, 2017, Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- Sertifikat Kompetensi Pengawas Syariah, BNSP, 2017;
- Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah Finance, 2018, Dewan Syariah Nasional – MUI;
- Sertifikasi Assesor Rumah Sakit Syariah, 2018, Mukisi dan Dewan Syariah Nasional – MUI;
- Sertifikasi Uji Kompetensi dengan Kualifikasi Asesor Kompetensi Perbankan Syariah, 2018, Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- Workshop Pra-Ijtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Syariah, 2018, Dewan Syariah Nasional – MUI;
- Sertifikat Uji Kompetensi Asesor Kompetensi, BNSP, 2018.

Pengalaman Kerja
Sebelum menjabat sebagai **Anggota Dewan Pengawas Mandiri Syariah**, beliau pernah menjabat sebagai:
- Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta (1999-2004);
- Dosen STAISA Jakarta;
- PUKET III (Bidang Kemahasiswaan) STAISA Jakarta (1997-2005);
- Anggota DPS PT Asuransi Panin Life Syariah;
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Reasuransi Nasional Indonesia (sejak tahun 2013);
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Jiwa Central Asia Raya.

Riwayat Penunjukan
Diangkat sebagai Dewan Pengawas Syariah Mandiri Syariah berdasarkan Akta No. 24 tanggal 19 Nopember 2019.

Periode Jabatan
22 oktober 2019 - Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 2022 (Periode Pertama).

Jabatan Rangkap
- Dosen STAISA Jakarta;
- Ketua Senat STAISA Jakarta;
- DPS PT Panin Dai-Ichi Life;
- DPS PT Jiwa Central Asia Raya;
- DPS Reasuransi Nasional Indonesia.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.dan utama.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah
Nihil

* Berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

PROFIL DIREKSI

Toni E. B. Subari

Direktur Utama

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Lahir di Magetan pada tahun 1964, usia 55 tahun per Desember 2019.

Riwayat Pendidikan
Sarjana bidang Teknologi Industri Pertanian, Institute Pertanian Bogor (IPB) (1988).

Pendidikan/Sertifikasi
- Sertifikat Wholesale Banker Summit (2016);
- Sertifikat Senior Risk Forum (2016);
- Sertifikat manajemen risiko (2016);
- Pelatihan Dasar-Dasar Perbankan Syariah (2017);
- Training for LSPP Risk Management Competency for Banking Profession – Level 5 (2017);
- Training Leadership Forum (2018);
- In House Training: Strategic Leadership Competencies (2019);
- PSAK 71 Impairment Deep Dive in Risk Management Perspective (2019).

Pengalaman Kerja
Sebelum menjabat sebagai **Direktur Utama Mandiri Syariah**, beliau pernah menjabat sebagai:
- Kepala Tim Cabang Madya, PT Bank Mandiri (1996 – 1999);
- Senior Officer – Loan Workout, PT Bank Mandiri (1999 – 1999);
- Manager, PT Bank Mandiri (1999 – 2000);
- Senior Officer – Loan Workout Group, PT Bank Mandiri (2000 – 2001);
- Credit Recovery Officer, PT Bank Mandiri (2001 – 2005);
- Senior Recovery Manager, PT Bank Mandiri (2005 – 2008);
- Client Service Team Manager, PT Bank Mandiri (2008);
- Asst. Vice President, PT Bank Mandiri (2008 – 2009);
- Vice President, PT Bank Mandiri (2009 – 2010);
- Corporate Banking Medan Head, PT Bank Mandiri (2010 – 2011);
- PKMK Commercial & Business Banking, PT Bank Mandiri (2011 – 2011);
- Senior Vice President, PT Bank Mandiri (2011 – 2013);
- Executive Business Officer, PT Bank Mandiri (2013 – 2013);
- Pj. Group Head Business Banking III, PT Bank Mandiri (2013 – 2014);
- CEO Regional I Medan, PT Bank Mandiri (2014 – 2016);
- Senior Executive Vice President – Special Asset Management (SEVP SAM), PT Bank Mandiri (2016 – 2017).

Riwayat Penunjukan
Diangkat pertama kali sebagai Direktur Mandiri Syariah berdasarkan Keputusan RUPST 2017 Akta No. 01 tanggal 2 Mei 2017.

Periode Jabatan
2017 - Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 2020 (Periode Pertama).

Jabatan Rangkap
Tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah
Nihil.

Putu Rahwidhiyasa

Direktur Risk Management & Compliance

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Tangerang Selatan

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Lahir di Jakarta pada tahun 1964, usia 55 tahun per Desember 2019.

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Pertanian bidang studi Agronomi Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (1986).
- Master of Business Administration bidang studi Finance and Strategy Management dari University of Illionis USA (1995).

Pendidikan/Sertifikasi
- Conference: "Indonesia International Conference on Islamic Finance; Revitalizing Islamic Finance in the "Normal Era"", The Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta (2016);
- Prophetic Leadership and Management Wisdom (2016);
- Forum Indonesia Banking Human Capital (2016);
- Revisit Enterprise And Risk Management And Learning Best Practice Of Credit Risk Management (2016);
- Seminar: BARa Risk Forum Sound Practices In ICAAP Implementation: "How to Pinpoint the Weak Spots in the Business Strategic Plan and Risk Management", Prague & Vienna (2017);
- Workshop Implementating Enterprise Risk Management (2018);
- Sertifikasi Coaching, Leadership (2018);
- Cambridge Islamic Finance Leadership Programme (2019).

Pengalaman Kerja
Sebelum menjabat sebagai **Direktur Risk Management & Compliance Mandiri Syariah**, beliau pernah menjabat sebagai:
- Assisten Manager PT Tata Wisata (1987);
- Management Trainee PT Bank Ekspor Indonesia (1987-1989);
- Assistan Manager PT Bank Ekspor Impor Indonesia (1989-1992);
- Pre MBA Program PT Bank Ekspor Impor Indonesia (1993);
- MBA Program PT Bank Ekspor Impor Indonesia (1993-1995);
- Manager PT Bank Ekspor Impor Indonesia (1995-1997);
- Senior Manager PT Bank Ekspor Impor Indonesia (1997-1999);
- Asisten Komisaris Utama Bank Mandiri (1999-2000);
- Vice President Bank Mandiri (2000-2001);
- Assistant Vice President Human Capital Bank Mandiri (2001–2004);
- Vice President Risk Management Bank Mandiri (2004-2008);
- Kepala Divisi Pegadaian Mandiri Syariah (2008–2010);
- Division Head Transformation Management & Corporate Culture Mandiri Syariah (2010–2014);
- Assessor: Risk Management BSM (2011-saat ini).

Riwayat Penunjukan
Diangkat pertama kali sebagai Direktur Mandiri Syariah berdasarkan Akta No. 6 tanggal 07 Mei 2014.

Periode Jabatan
2014 - Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 2020 (Periode Pertama).

Jabatan Rangkap
Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah
Nihil.

Kusman Yandi

Direktur Wholesale Banking

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Lahir di Dumai pada tahun 1965, usia 54 tahun per Desember 2019.

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Ekonomi bidang studi Akuntansi dari Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Riau (1989).
- Master of Business Administration bidang Business Administration dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2018).

Pendidikan/Sertifikasi
- Executive Distance Learning on Islamic Banking Training, Jakarta (2014);
- Refreshment of Risk Management Certification oleh BARA, Bandung (2014);
- Sertifikasi Coach 60 Hour APPR (2014);
- Training Risk Management Competency for Banking Profession level V, Jakarta (2015);
- Sertifikasi Manajemen Resiko level V, Jakarta (2015);
- International Risk Management Refreshment Program for Executives (2017);
- Tapping Potential Opportunities In Indonesian Sustainable Palm Oil Industry (2018).

Pengalaman Kerja
Sebelum menjabat sebagai **Direktur Wholesale Banking Mandiri Syariah**, beliau pernah menjabat sebagai:
- Vice President Commercial Banking Center Manager Area Bekasi (2007);
- Vice President Commercial Banking Center Manager Area Jakarta Kelapa Gading (2007–2010);
- Vice President Commercial Banking Center Manager Area Jakarta Plaza Mandiri (2010–2013);
- Executive Business Office Commercial & Business Banking Bank Mandiri (2013–2014);
- SEVP Wholesale Mandiri Syariah (2014–2015).

Riwayat Penunjukan
Diangkat pertama kali sebagai Direktur Mandiri Syariah berdasarkan Keputusan RUPST Akta No. 01 tanggal 01 April 2015.

Periode Jabatan
2015 - Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 2021 (Periode Pertama).

Jabatan Rangkap
Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah
Nihil

Ade Cahyo Nugroho

Direktur Finance, Strategy & Treasury

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Lahir di Jakarta pada tahun 1978, usia 41 tahun per Desember 2019.

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Ekonomi bidang studi Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2003).
- Master in Business Administration bidang studi Business Administration dari Rotterdam School of Management, Erasmus University, Netherland (2011).

Pendidikan/Sertifikasi
- Sertifikasi Keahlian Perusahaan Multi Finance, Jakarta (2015);
- Pelatihan Sertifikasi Perbankan Syariah, Jakarta (2016);
- Expand Leadership Program, Kuta – Denpasar (2016);
- Prophetic Leadership and Management Wisdom, Bogor (2016);
- Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko, Jakarta (2016);
- Uji Kompetensi Bidang Manajemen Risiko Level 5 (2017);
- Financial Strategies for Value Creation, London (2017);
- Training GDP Cohort 2 Modul 1 (2018);
- Training GDP Cohort 2 Modul 2 (2018);
- Sertifikasi Treasury Dealer Level Advance, Jakarta (2018);
- Training GDP Cohort 2 Modul 3, Palo Alto-USA (2019);
- Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko, Denpasar (2019);
- Open Enrollment GDP Cohort 2, Barcelona (2019).

Pengalaman Kerja
Sebelum menjabat sebagai **Direktur Finance, Strategy & Treasury Mandiri Syariah**, beliau pernah menjabat sebagai:
- Officer Development Program PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2003);
- Manager General Admin & Support – Finance & Strategy Directorate – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2005-2007);
- Senior Manager Strategic & Performance Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2007-2010);
- Department Head Decision Support Consumer Finance PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2012-2014);
- Deputy Director PT Mandiri Tunas Finance (2014- 2015);
- Direktur Finance & Strategy PT Mandiri Tunas Finance (2015-2016);
- SEVP Finance & Strategy PT Bank Syariah Mandiri (2016 – 2017).

Riwayat Penunjukan
Diangkat pertama kali sebagai Direktur Mandiri Syariah berdasarkan Keputusan RUPST 2017 Akta No. 01 tanggal 2 Mei 2017

Periode Jabatan
2017 - Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 2020 (Periode Pertama).

Jabatan Rangkap
Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah
Nihil

Achmad Syafii

Direktur IT, Operations & Digital Banking

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Tangerang

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Lahir di Brebes pada tahun 1967, usia 52 tahun per Desember 2019.

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Bidang Teknik Informatika dan Komputer STMIK Budiluhur (2009).
- Pasca Sarjana Bidang Manajemen Informatik STMIK Budiluhur (2013).

Pendidikan/Sertifikasi
- Workshop APBN 2014 dan Potensi Bisnis Bank (2014);
- Training I-Know for Department Head (2014);
- Wholesale Bankers Summit (2014);
- Bedah Buku Sinergi Sukses Pengusaha (2014);
- Refreshment Sertifikasi Manajemen Risik (2014);
- Enterprise Architecture Togaf 9.1 Founda (2015);
- EUT 8 Mandarin Unggul oleh HCP Mandiri University (2016);
- Pelatihan Dasar-Dasar Perbankan Syariah (2017);
- Training Risk Management Competency For Banking Proffession Level 5 (2017);
- Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 5 (2017);
- Executive Risk Management Refreshment Program di Germany-Swiss (2018);
- Seminar Nasional Teknologi dan Inovasi Untuk Masa Depan Keuangan Islam (2019);
- International Seminar On Encountering Digital Era of Banking Operation: Challenges and Opportunities (2019);
- Business Model Innovation in The Digital Age (2019).

Pengalaman Kerja
Mengawali karir sejak awal di Bank Mandiri pada unit Information and Technology. Sebelum menjabat sebagai **Direktur Technology, Operation & Digital Mandiri Syariah**, beliau pernah menjabat sebagai:
- Clerk di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (1988);
- Senior Clerk di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (1988 - 1988);
- Assistant Manager di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2000 - 2003);
- Manager di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2003);
- Senior Manager di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2004 – 2006);
- Assistant Vice President di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2006 – 2007);
- Vice President di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2008);
- DH Integration Hub. & Common Application Services di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2012);
- DH Integration Hub Common (2012);
- DH IT Integration & Core Banking Support di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2015);
- Departement Head Core Banking Support (2015);
- Vice President di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2015);
- Pjs. Group Head IT Application Support (2016).

Riwayat Penunjukan
Diangkat pertama kali sebagai Direktur Mandiri Syariah berdasarkan Keputusan RUPST 2017 Akta No. 01 tanggal 2 Mei 2017.

Periode Jabatan
2017 - Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 2020 (Periode Pertama).

Jabatan Rangkap
Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah
Nihil

Rosma Handayani*

Direktur Human Capital

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Lahir di Jakarta pada tahun 1969, usia 50 tahun per Desember 2019.

Riwayat Pendidikan
- Sarjana S1 bidang studi Hukum Perdata dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1993).
- Magister Manajemen bidang studi Human Resources Management dari Universitas Gadjah Mada (UGM) (2005).

Pendidikan/Sertifikasi
- Registered Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) Associate Member With Membership no. 04.IV.IHT.2014 (2014);
- BSMR (Risk Management) Certification level 1 (2015);
- Talent Mobility System (2015);
- Global Executive Mindset (2016);
- Indonesia Banking Human Capital Conference (2016);
- Management Control System (2017);
- Credit Culture Workshop (2017);
- Workshop Improving Business Performance Through People (2018);
- Seminar Banking Employee Engagement in Industry Revolution 4.0 (2018);
- Sharia Banking Certification (2018);
- HR, workforce planning, recruiting, and talent management system (2019);
- HR, Culture Insights, Zappos (2019);
- A new way of leadership in digital transformation, Executive Panel Discussion (2019);
- Navigation Digital Disruption: An In-Depth Look at How Leadership Must Change in this 21st Century (2019);
- Indonesia HR Conference 2019: A new way of leadership in digital transformation (2019);
- Value Based Leadership: Leading Cultural Transformation (2019);
- Sharia Banking in The Fintech World: Challenges & Opportunities (Refreshment Sertifikasi level1) (2019);
- BSMR (Risk Management) Certification level 4 (2019).

Pengalaman Kerja
Sebelum menjabat sebagai **Direktur Human Capital Mandiri Syariah,** beliau pernah menjabat sebagai:
- Recruitment Manager, Human Resources Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1999 – 2004);
- Senior Manager Learning Center Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2004 – 2005);
- Head of Human Capital Strategy & Projects Department PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2009 – 2011);
- Head of Organization Development Departement, Human Capital Strategy & Policy Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2011 – 2013);
- Head of Human Capital Services Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015 – 2017);
- Senior Vice President, Senior HC Bussiness Partner - Support (2017);
- Senior Vice PresidentSenior HC Buss. Partner - Support (2017);
- Senior Executive Vice Presiden (SEVP) Human Capital (2018-2019).

Riwayat Penunjukan
Diangkat pertama kali sebagai Direktur Mandiri Syariah berdasarkan RUPS Sirkuler 14 Oktober 2019.

Periode Jabatan
Oktober 2019 – penutupan RUPS Tahunan 2022 (Periode Pertama).

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah
Nihil

*) Berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas fit & proper test.

PROFIL
PEJABAT DI BAWAH DIREKSI

Wawan Setiawan
SEVP Retail Banking

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Lahir di Jambi pada tahun 1974, usia 45 tahun per Desember 2019.

Riwayat Pendidikan
- Sarjana bidang Teknik Sipil di Universitas Indonesia (1997).
- Magister bidang Manajemen Keuangan di PPM Graduate School of Management (2000).

Pendidikan/Sertifikasi
- SESPIBANK 59, Jakarta (2013);
- BSMR Level 1-2 (Jakarta);
- BARA Level 3 (Jakarta);
- Kompetisi General Banking Level 3, Jakarta (2014);
- Risk Management Certification Refresment Program, Bandung (2014).

Pengalaman Kerja
Sebelum menjabat sebagai **SEVP Retail Banking Mandiri Syariah** beliau pernah menjabat sebagai:
- Officer Development Programme PT Bank Mandiri (2000-2001);
- Manager PT Bank Mandiri PT Bank Mandiri (2001-2004);
- Manager, Cash Outlet Manager (2004-2005);
- Senior Manager, Branch Manager (2005-2006);
- Assistant Vice President, Branch Manager (2006);
- Assistant Vice President, Branch Manager (2006-2007);
- Assistant Vice President, Branch Manager (2007-2009);
- Assistant Vice President, Marketing Manager & Wealth Business Manager (2009-2010);
- Assistant Vice President, Project Manager (2010-2011);
- Vice President, Area Manager (2011-2012);
- Vice President, Area Manager (2012-2014);
- Vice President, Deputy Regional Manager (2014-2015);
- Vice President, Regional Retail Head (2015-2016);
- Senior Vice President, Micro Banking Group Head (2016-2019).

Riwayat Penunjukan
Diangkat sebagai SEVP Mandiri Syariah untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Syariah Mandiri No. 18/859A-KEP/DIR tanggal 21 Juli 2016.

Periode Jabatan
2016 – Sekarang.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah
Nihil

Nury Sriandajani

SEVP Retail Financing Risk Restructuring & Recovery

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Lahir di Palangkaraya pada tahun 1966, usia 53 tahun per Desember 2019.

Riwayat Pendidikan
- Sarjana S1 bidang Kedokteran Gigi di Univerasitas Airlangga (1989).
- Magister Management di Universitas Indonesia (1997).

Pendidikan/Sertifikasi
- *Insead Leadership Senior Training* (2003);
- *Consumer Product Lending* FSVC, New York (2004);
- *Business Card & Visa Busniness School* (2004);
- *Consumer Risk Management* ABN AMRO *Bank*, Amsterdam (2007);
- *Housing Finance Management* HDFC, India (2008);
- *Negotiation Strategy & Skill Michigan Ross School*, Hongkong (2009);
- *Top Management Program Innovative & Value Based Leadership Asian Institute of Management* Philipines (2012);
- Sertifikasi Kompetensi Management Resiko Level 4 (2015);
- *General Development Program* IMD *Business School* (2015-2016).

Pengalaman Kerja
Sebelum menjabat sebagai **SEVP Retail Financing Risk Restructuring & Recovery Mandiri Syariah** beliau pernah menjabat sebagai:
- Senior Manager Credit Risk Management – Consumer Risk Management Retail - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1999- 2000);
- Senior Manager Credit Risk Management – Asisten Regional Risk Manager Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2001);
- Asisten Vice President – Consumer Credit Approval Departement – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2002- 2003);
- Asisten Vice President – Consumer Product Policy Departement – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2004- 2006);
- Vice President – Credit Cycle Analytic Departement - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2007- 2008);
- Vice President – Regional Collection Retail Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2009- 2014);
- Vice President – Collection Strategy Departement - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015);
- Senior Vice President – Retail Collection & Recovery Group - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015- 2017).

Riwayat Penunjukan
Diangkat sebagai SEVP Mandiri Syariah untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Syariah Mandiri No. 20/253/KUA-DIR tanggal 27 November 2018.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah
Nihil.

Karya Prasetya Budi

SEVP Wholesale Financing Risk Restructuring & Recovery

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Depok

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Lahir di Pemalang pada tahun 1960, usia 59 tahun per Desember 2019.

Riwayat Pendidikan
- Sarjana S1 bidang studi Ekonomi Managemen di Universitas Diponegoro (1988).
- Magister Management di Sekolah Tinggi Manajemen Labora (2001).

Pendidikan/Sertifikasi
- *Key Risk Management Challenges In* 2015, Bali (2015);
- EUT 8 Mandirian Unggul, HCP/MU Jakarta. (2016);
- *Workshop Credit Culture,* DIR *Wholesale Banking,* Jakarta. (2017);
- *Workshop With Mark Coopersmith,* Mandiri University (2018);
- *Risk Management Certification Refresher Program*, Bara Risk Forum (2018);
- *Strategic leadership Competencies*, Mandiri University Group (2018);
- Sertifikasi Syariah, Karim Consulting Indonesia. (2018);
- *Training For* Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) *Risk Management Competency For Banking Profession* – Level 5, Peak Pratama Indonesia (2019);
- Sertifikat Kompetensi Level 5, BNSP (2019);
- *London School of Management & Leadership,* Euromoney Learning (2019).

Pengalaman Kerja
Sebelum menjabat sebagai **SEVP Wholesale Financing Risk Restructuring & Recovery Mandiri Syariah** beliau pernah menjabat sebagai:
- Trainee - PT. Bank Dagang Negara (Persero) (1989-1990);
- Analyst Credit - PT. Bank Dagang Negara (Persero) (1990-1995);
- Assistant Relationship Manager (ARM) - PT. Bank Dagang Negara (Persero) (1995-1999);
- Senior Officer Credit Risk Management Commercial Wilayah Semarang - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2000 - 2002);
- Assistant Regional & Risk Manager, Credit Risk Management Regional & Risk Management Wilayah Surabaya- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2002-2004);
- Regional & Risk Manager, Credit Risk Management Regional & Risk Management Wilayah Surabaya - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2005-2007);
- Department Head Corporate Risk Group - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2007-2010);
- Executive Credit Officer B – Risk Management - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2010-2014);
- Executive Credit Officer A – Wholesale Risk - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2014-2017);
- Group Head Large Commercial Risk 2 – Wholesale Risk - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2017 - 2018);
- Executive Credit Officer A – Wholesale Risk - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2018 - Oktober 2018).

Riwayat Penunjukan
Diangkat sebagai SEVP Mandiri Syariah untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Syariah Mandiri No. 20/252/KUA-DIR tanggal 27 November 2018.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah
Nihil.

Anton Sukarna

SEVP Distribution & Sales

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Tangerang Selatan

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia
Lahir di Bandung pada tahun 1970, usia 49 tahun per Desember 2019.

Riwayat Pendidikan
Sarjana bidang Peternakan di Institut Pertanian Bogor (1994).

Pendidikan/Sertifikasi
- Ujian Level I Sertifikasi Manajemen Risiko (2007);
- Ujian Level II Sertifikasi Manajemen Risiko (2008);
- *Service Quality Delivery Training* (2008);
- *Service Leadership Training* (2009);
- *The 7 Habits Of Highly Effective* People (2012);
- Aspek Hukum Pidana Pembiyaan Perbankan (2013);
- *Industry Focus Mastery:* Perkapalan (2014);
- BSM *Leadership Forum*: *Manager As A Coach* (2015);
- *Refreshment* UKMR Level 4 (2015);
- *Leadership* Forum (2016).

Pengalaman Kerja
Sebelum menjabat sebagai **SEVP Distribution & Sales Mandiri Syariah** beliau pernah menjabat sebagai:
- Manager Marketing Cabang Bandung PT Bank Syariah Mandiri (2002-2003);
- Branch Manager Tasikmalaya PT Bank Syariah Mandiri (2003);
- Branch Manager Cirebon PT Bank Syariah Mandiri (2004-2005);
- Branch Manager Kelapa Gading PT Bank Syariah Mandiri (2007);
- Branch Manager Depok PT Bank Syariah Mandiri (2008-2009);
- Deputy Group Head Consumer Banking (2010-2012);
- Group Head Commercial Banking (2012-2016);
- Regional Head Region VII/Indonesia Timur (2016-2018);
- Regional Head Region III/Jakarta (2018-2019).

Riwayat Penunjukan
Diangkat sebagai SEVP Mandiri Syariah untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Syariah Mandiri No. 21/052-Kep/DIR tanggal 22 Januari 2019.

Kepemilikan Saham Mandiri Syariah
Nihil.

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

President Directorate

Suharto

Head of Internal Audit Group (IAG). Lahir di Indramayu, 20 Maret 1966. Lulus dari Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, STIE Jagakarsa pada tahun 1996. Bergabung dengan Mandiri Syariah terhitung sejak tanggal 11 Januari 2017. Diangkat menjadi Head of Internal Audit Group berdasarkan SK No. 19/007-KEP/DIR tanggal 9 Januari 2017.

Wholesale Banking Directorate:

Buyung Ichman Lukman

Head of Corporate Banking 1 Group (CB1). Lahir di Yogyakarta tanggal 21 Juli 1967. Lulus dari Universitas Gadjah Mada Jurusan Ilmu Sosial Komunikasi tahun 1991 dan Magister Manajemen Keuangan Perbankan Universitas Gadjah Mada tahun 1993. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 6 April 2017. Diangkat menjadi Head of Corporate Banking 1 Group berdasarkan SK No. 19/185-KEP/DIR tanggal 6 April 2017.

Fiti Syam

Head of Corporate Banking 2 Group (CB2). Lahir di Jakarta tanggal 16 September 1976. Lulus dari Fakultas MIPA Universitas Indonesia tahun 2000 dan Magister Manajemen Universitas Indonesia tahun 2002. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 3 September 2002. Diangkat menjadi Head of Corporate Banking 2 Group berdasarkan SK No. 19/017-KEP/DIR tanggal 20 Januari 2017.

Ivan Hartawan

Head of Commercial Banking Group (CMG). Lahir di Jakarta tanggal 7 Desember 1968. Lulus dari STIE Nasional Indonesia Jurusan Akuntansi tahun 1996. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 Juli 2018. Diangkat menjadi Head of Commercial Banking Group berdasarkan SK No. 20/262-KEP/DIR tanggal 26 Juni 2018.

Cera Wirastuti

Head of Product & Transaction Banking Group (PTG). Lahir di Surabaya tanggal 12 Nopember 1969. Lulus dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen jurusan Manajemen Universitas Jenderal Soedirman tahun 1993 dan Magister Edith Cowan University tahun 1996. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 Juli 2018. Diangkat menjadi Head of Product & Transaction Banking Group berdasarkan SK No. 20/262-KEP/DIR tanggal 26 Juni 2018.

Retail Banking Directorate:

Dien Lukita Purnamasari

Head of Consumer Financing Group 1 (CF 1). Lahir di Jayapura tanggal 10 Mei 1974. Lulus Fakultas Manajemen Informatika Universitas Gunadarma tahun 1996 dan Magister Ekonomi Universitas Trisakti tahun 2008. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 21 Maret 2001. Diangkat menjadi Head of Consumer Financing Group berdasarkan SK No. 19/444-KEP/ DIR tanggal 26 September 2017.

Praka Mulia Agung

Head of Consumer Financing Group 2 (CF 2). Lahir di Surabaya tanggal 2 Desember 1978. Sarjana jurusan Commerces tahun 2000 dan Master jurusan International Business tahun 2001 dari University of Wollongong. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 Maret 2019. Diangkat menjadi Head of Consumer Financing Group berdasarkan SK No. 20/065/HCS-PKWT tanggal 20 Desember 2018.

Okky Fachrizal Achmad

Head of SME & Micro Banking Group (MBG). Lahir di Surabaya tanggal 24 Oktober 1968. Lulus dari Universitas Surabaya Disiplin Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan tahun 1995. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 Juni tahun 2015. Diangkat menjadi Head of SME & Micro Banking Group berdasarkan SK No. 18/010-KEP/DIR tanggal 12 Januari 2016.

Dewa Bagus Ivan Baruna

Head of Pawning Management Group (PWG). Lahir di Denpasar tanggal 29 September 1965. Lulus dari Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan Institut Sains dan Teknologi Nasional tahun 1990. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 27 Desember 1999. Diangkat menjadi Head of Pawning Management Group berdasarkan SK No. 21/069-KEP/DIR tanggal 4 Februari 2019.

Distribution & Sales Directorate:

Firman Jatnika

Head of Distribution Strategy Group (DSG). Lahir di Jakarta tanggal 26 Februari 1970. Lulus Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran tahun 1995 dan Magister Ekonomi dari Universitas Indonesia tahun 2005. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 November 1999. Diangkat menjadi Head of Distribution Strategy Group berdasarkan SK No. 21/459-KEP/DIR tanggal 14 Agustus 2019.

Astridiana Sjamanti

Head of Institutional Banking Group (IBG). Lahir di Jakarta tanggal 14 Februari 1970. Lulus dari Fakultas Ekonomi STIE Perbanas tahun 2005. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 September 2017. Diangkat menjadi Head of Institutional Banking Group berdasarkan SK No. 21/426-KEP/DIR tanggal 26 Juli 2019.

Vita Andrianty

Head of Funding, Hajj & Umra Group (FHG). Lahir di Tangerang tanggal 18 Agustus 1981. Lulus dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia tahun 2003. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 September 2003. Diangkat menjadi Head of Funding, Hajj & Umra Group berdasarkan SK No.21/688-KEP/DIR tanggal 3 Desember 2019.

Muhammad Triarso

Head of Wealth Management Group (WMG). Lahir di Jakarta tanggal 28 Februari 1977. Lulus dari Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung tahun 1999. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 November 2019. Diangkat menjadi Head of Wealth Management Group berdasarkan SK No. 21/125/HCS-PKWT Tanggal 4 Oktober 2019.

Retail Financing Risk, Restructuring, & Recovery Directorate

Suryo Kuncoro

Head of Retail Collection, Restructuring & Recovery 1 Group (RC 1). Lahir di Gombong tanggal 7 September 1973. Lulus dari Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana tahun 2001 dan Magister Administrasi Bisnis Institut Teknologi Bandung tahun 2015. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 Oktober 2010. Diangkat menjadi Head of Retail Collection, Restructuring, & Recovery 1 Group berdasarkan SK Dir No. 20/287-KEP/DIR Tanggal 11 Juli 2018.

Rustanti Rachmi

Head of Retail Collection, Restructuring, & Recovery 2 Group (RC 2). Lahir di Gombong tanggal 20 Januari 1967. Lulus dari Universitas Indonesia Jurusan Geografi tahun 1990. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 Nopember 1999. Diangkat menjadi Head of Retail Collection, Restructuring, & Recovery 2 Group berdasarkan SK Dir No. 20/287-KEP/DIR Tanggal 11 Juli 2018.

Rustanti Rachmi*

Head of Retail Collection, Restructuring, & Recovery Group (RCC). Lahir di Gombong tanggal 20 Januari 1967. Lulus dari Universitas Indonesia Jurusan Geografi tahun 1990. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 Nopember 1999. Diangkat menjadi Head of Retail Collection, Restructuring, & Recovery Group berdasarkan SK Dir No. 22/008-KEP/DIR Tanggal 9 Januari 2020.

Asnah Faekhah

Head of Retail Risk Group (RRG). Lahir di Lampung Tengah tanggal 26 Februari 1969. Lulus dari Fakultas Agriculture Universitas Brawijaya tahun 1991 dan Magister Management dari Universitas Gadjah Mada tahun 1993. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 April 2016. Diangkat menjadi Head of Retail Risk Group berdasarkan SK No. 18/597-KEP/DIR tanggal 7 Maret 2016.

Keterangan:
* Mulai menjabat per Triwulan I 2020

Wholesale Financing Risk, Restructuring, & Recovery Directorate:

Ifan Hadiansyah

Head of Corporate Risk Group (CRR). Lahir di Muara Enim tanggal 15 Desember 1976. Lulus dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung tahun 1999 dan Magister Management dari Prasetya Mulya tahun 2001. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 Juli 2018. Diangkat menjadi Head of Corporate Risk Group berdasarkan SK No. 20/009/ HCS-PKWT - 20 Maret 2018.

Diar Fitrada*

Head of Corporate Risk Group (CRR). Lahir di Sumedang tanggal 7 Juni 1986. Lulus dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Pertanian Institut Pertanian Bogor tahun 2010. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 15 Desember 2010. Diangkat menjadi Head of Corporate Risk Group berdasarkan SK No. 22/008-KEP/DIR tanggal 9 Januari 2020.

Sulistyo Budi

Head of Wholesale Restructuring & Recovery Group (WHC). Lahir di Jember tanggal 14 Januari 1963.Lulus pendidikan S-1 dan S-2 dari Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor pada tahun 1985 dan 2001. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 Agustus 2007. Diangkat menjadi Head of Wholesale Restructuring & Recovery Group berdasarkan SK No. 18/010-KEP/DIR tanggal 12 Januari 2016.

Yuwono*

Head of Wholesale Restructuring & Recovery Group (WHC). Lahir di Cianjur tanggal 5 Juli 1980. Lulus dari Fakultas Ekonomi Akutansi Universitas Gunadarma tahun 2002. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 4 Maret 2003. Diangkat menjadi Head of Wholesale Restructuring & Recovery Group berdasarkan SK No. 22/008-KEP/DIR tanggal 9 Januari 2020.

Keterangan:
* Mulai menjabat per Triwulan I 2020
** Rangkap Jabatan Triwulan IV 13 November 2019

IT, Operation & Digital Banking Directorate

Hikmat Dani Wijaya**

Head of IT Architecture & Strategy Group (ISG). Lahir di Jayapura tanggal 22 September 1964. Menyelesaikan Magister Management di STMI Jakarta tahun 1990. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 September 2017. Diangkat menjadi Head of IT Architecture & Strategy Group berdasarkan SK No. 21/637-KEP/DIR tanggal 11 November 2019.

Hikmat Dani Wijaya*

Head of IT Development Group (IDG). Lahir di Jayapura tanggal 22 September 1964. Menyelesaikan Magister Management di STMI Jakarta tahun 1990. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 September 2017. Diangkat menjadi Head of IT Development Group berdasarkan SK No. 21/637-KEP/DIR tanggal 11 November 2019.

Syafid Hidayat

Head of IT Operations Group (IOG). Lahir di Palembang tanggal 1 Desember 1972. Lulus dari Universitas Sriwijaya Jurusan Akuntansi tahun 1996. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 Februari 2012. Diangkat menjadi Head of IT Operations Group berdasarkan SK No.19/437-KEP/DIR tanggal 15 September 2017.

Edhie Rosman

Head of Cash & Trade Operation Group (CTG). Lahir di Jakarta tanggal 13 Desember 1966. Lulus dari Fakultas Pertanian jurusan Ilmu Tanah Institut Pertanian Bogor tahun 1989. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 6 Maret 2000. Diangkat menjadi Head of Cash & Trade Operation Group berdasarkan SK No. 21/637-KEP/DIR tanggal 11 November 2019.

Yan Rasdiansyah

Head of Financing Operations Group (FOG). Lahir di Palembang tanggal 13 Januari 1976. Lulus dari Universitas Tamansiswa jurusan Akuntansi tahun 2003 dan S2 Universitas Sriwijaya Jurusan Magister Management tahun 2010. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 7 Januari 2019. Diangkat menjadi Head of Financing Operations Group berdasarkan SK No.21/007-KEP/DIR tanggal 7 Januari 2019.

Arief Sunandar**

Head of Digital Product Development Group (DBP). Lahir di Jakarta tanggal 8 April 1973. Lulus dari Institut Teknologi Indonesia jurusan Teknik Industri tahun 1997. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 15 Oktober 2019. Diangkat mennjadi Head of Digital Banking Operation Product Development Group berdasarkan SK No. 21/637-KEP/DIR tanggal 11 November 2019.

Keterangan:
** Rangkap Jabatan Triwulan IV 13 November 2019

Riko Wardhana

Head of Digital Banking Sales & Partnership Group (DBS). Lahir di Jakarta tanggal 30 Oktober 1973. Lulus dari STIE Perbanas jurusan Manajemen tahun 1996 dan Magister City University of Seattle tahun 2000. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 Juli 2018. Diangkat menjadi Head of Digital Banking Sales & Partnership Group berdasarkan SK No. 21/637-KEP/DIR tanggal 11 November 2019.

Arief Sunandar

Head of Digital Banking Operation Group (DBO). Lahir di Jakarta tanggal 8 April 1973. Lulus dari Institut Teknologi Indonesia jurusan Teknik Industri tahun 1997. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 15 Oktober 2019. Diangkat mennjadi Head of Digital Banking Operation Group berdasarkan SK No. KEP.DIR/HC.298/2019 tanggal 26 September 2019.

Risk Management & Compliance Directorate

M. Fanny Fansyuri

Head of Enterprise Risk Management Group (ERM). Lahir di Bandung pada tanggal 14 April 1967. Lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran tahun 1991. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 November 1999. Diangkat menjadi Head of Enterprise Risk Management Group berdasarkan SK No.18/010-KEP/DIR tanggal 12 Januari 2016.

Khoirul Huda S Riyadi

Head of Compliance Group (CPG). Lahir di Jakarta tanggal 6 Oktober 1975. Lulus dari Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor tahun 1999 dan Pasca Sarjana (S2) dari Magister Management, Universitas Budi Luhur tahun 2004. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 September 2003. Diangkat menjadi Head of Compliance Group berdasarkan SK No.18/396-KEP/DIR tanggal 22 Februari 2016.

Ana Nurul Khayati

Head of Policy & Procedure Group (PPG). Lahir di Madiun tanggal 26 Maret 1972. Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tahun 1997 dan Pasca Sarjana (S2) dari Fakultas Hukum, Universitas Indonesia tahun 2006. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 13 Januari 2000. Diangkat menjadi Head of Policy & Procedure Group berdasarkan SK No.18/010-KEP/DIR tanggal 12 Januari 2016.

Ahmad Reza

Head of Corporate Secretary Group (CSG). Lahir di Medan pada tanggal 26 April 1977 Lulus dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen Jurusan Manajemen STIE IBII (Kwik Kian Gie School of Business) Jakarta Tahun 2000. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 Juli 2018. Diangkat menjadi Head of Corporate Secretary Group berdasarkan 20/260-KEP/DIR tanggal 26 Juni 2018.

Irfan Lesmana

Head of Legal Group (LGG). Lahir di Jakarta tanggal 24 Februari 1971. Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1995. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 15 Juli 2016. Diangkat menjadi Head of Legal Group berdasarkan SK No.18/868-KEP/DIR tanggal 26 Juli 2016.

Dian Faqihdien Suzabar

Head of Corporate Action Project. Lahir di Bandung 18 November 1975. Lulus dari S1 Fakultas Teknik Universitas Indonesia tahun 1999, S2 Fakultas Teknik Royal Melbourne Institute. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 15 September 2011. Diangkat menjadi Head of Corporate Action Project berdasarkan SK Direksi No.20/058-KEP/DIR Tanggal 20 Februari 2018.

Finance, Strategy & Treasury Directorate

Noor Anis

Head of Strategy & Performance Management Group (SPM). Lahir di Kudus tanggal 11 Agustus 1964. Lulus dari Institut Teknologi Bandung disiplin ilmu Statistika tahun 1989. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 26 Januari 2015. Diangkat menjadi Head of Strategy & Performance Management Group berdasarkan SK No.18/010-KEP/DIR tanggal 12 Januari 2016.

Suhendar

Head of Corporate Transformation Group (CTF). Lahir di Jakarta pada tanggal 11 Mei 1976. Lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 2002. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 26 Agustus 2004. Diangkat menjadi Head of Corporate Transformation Group berdasarkan SK No.21/069-KEP/DIR tanggal 4 Februari 2019.

Priyo Hartono

Head of Accounting Group (ACG). Lahir di Kediri pada tanggal 16 November 1977. Lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Jurusan Akuntansi tahun 2000. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 8 Juni 2015. Diangkat menjadi Head of Accounting Group (ACG) berdasarkan SK No. 21/069-KEP/DIR tanggal 4 Februari 2019.

Fathia

Head of Strategic Procurement Group (SCG). Lahir di Jakarta pada tanggal 19 September 1958. Lulus dari Universitas YAI Jurusan Akuntansi tahun 2001. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 15 Januari 2016. Diangkat menjadi Head of Strategic Procurement Group berdasarkan No.18/003/HCGPKWT tanggal 5 Januari 2016.

Ahmad Safrizal

Head of Treasury & International Banking Group (TIG). Lahir di Bandung tanggal 23 Mei 1967. Lulus dari Fakultas Ekonomi Akutansi Universitas Padjajaran tahun 1990. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 7 Januari 2019. Diangkat menjadi Head of Treasury & International Banking Group berdasarkan SK No. 21/008-KEP/DIR Tanggal 07 Januari 2019.

Human Capital Directorate

Dharmawan P. Hadad

Head of Human Capital Services Group (HCS). Lahir di Bekasi pada tanggal 17 Maret 1966. Lulus dari Fakultas Kurikulum & Teknologi IKIP Jakarta tahun 1991 dan Magister Manajemen di STIE IPWI tahun 2000. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 Maret 2015. Diangkat menjadi Head of Human Capital Services Group berdasarkan SK Dir No. 20/058-KEP/DIR tanggal 20 Februari 2018.

Adam Armansyah

Head of Human Capital Policy Group (HCP). Lahir di Jakarta pada tanggal 10 November 1972. Lulus dari Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen Pemasaran tahun 1996 dan S2 di Waseda University Jurusan MBA tahun 2014. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 15 Januari 2019. Diangkat menjadi Head of Human Capital Policy Group berdasarkan SK Dir No. 20/045/HCS-PKWT tanggal 4 Desember 2018.

Dharmawan P. Hadad***

Head of Human Capital Policy Group (HCP). Lahir di Bekasi pada tanggal 17 Maret 1966. Lulus dari Fakultas Kurikulum & Teknologi IKIP Jakarta tahun 1991 dan Magister Manajemen di STIE IPWI tahun 2000. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 Maret 2015. Diangkat menjadi Head of Human Capital Policy Group berdasarkan SK Dir No.22/034-KEP/DIR tanggal 29 Januari 2020.

Siti Nurdiana

Head of Mandiri Syariah University (MSU). Lahir di Jakarta tanggal 16 Desember 1966. Lulus dari Universitas Padjadjaran jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan tahun 1991 dan Master jurusan Accounting & Finance dari Maastricht School of Management The Netherlands tahun 2002. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 1 November 1999. Diangkat menjadi Head of Mandiri Syariah University berdasarkan SK No. 21/459-KEP/DIR tanggal 14 Agustus 2019.

Keterangan:
***Rangkap Jabatan Triwulan I 2020

Regional Head

Ahmad Zailani

Head of Region I/ Medan. Lahir di Medan 28 April 1964, lulus dari D3 Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara tahun 1987, S1 Fakultas Ekonomi STIE Medan tahun 1992 bergabung di Mandiri Syariah sejak 1 November 1999. Diangkat menjadi Head of Region I/ Medan berdasarkan Surat No. 18/10801-3-HCMS/HCG.

Dedy Suryadi Dharmawan

Head of Region II/Palembang. Lahir di Jakarta 7 Maret 1979. Lulus dari S1 Fakultas Teknik Institut Teknologi Bandung tahun 2002, S2 Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2011 dan bergabung di Mandiri Syariah 3 September 2002. Diangkat menjadi Head of Region II/ Palembang berdasarkan SK Direksi No. 21/069-KEP/DIR Tanggal 04 Februari 2019.

Deden Durachman

Head of Region III/Jakarta. Lahir di Bandung 17 September 1972. Lulus dari S1 Fakultas Ekonomi Universitas Pajajaran Bandung tahun 1996, S1 Fakultas Hukum Universitas Pajajaran tahun 1999 dan bergabung di Mandiri Syariah 2 Februari 2000. Diangkat menjadi Head of Region III/Jakarta berdasarkan SK Direksi No. 21/069-KEP/DIR Tanggal 04 Februari 2019.

Iman Himawan Ridwan

Head of Region V/Semarang. Lahir di Sukabumi 17 Juni 1967. Lulus dari S1 Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya tahun 1991 dan bergabung di Mandiri Syariah sejak 13 Januari 2016. Diangkat menjadi Head of Region V/Semarang berdasarkan Surat No. 21/448-KEP/DIR Tanggal 12 Agustus 2019.

Mahendra Nusanto S

Head of Region IV/Bandung. Lahir di Serang tanggal 7 Juli 1971. Lulus dari Fakultas Ilmu Komputer Jurusan Teknik Komputer Universitas Gunadarma tahun 1996. Bergabung dengan Mandiri Syariah sejak 15 Juli 2002. Diangkat menjadi Head of Region IV/ Bandung berdasarkan Surat No.21/459-KEP/DIR Tanggal 14 Agustus 2019.

Gunawan Arief Hartoyo

Head of Region VI/Surabaya. Lahir di Sukoharjo tanggal 26 Maret 1971. Lulus dari S1 Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga tahun 1995 dan S2 dari Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada tahun 2018. Bergabung di Mandiri Syariah sejak 27 Desember 1999. Diangkat menjadi Head of Region VI/Surabaya berdasarkan Surat No. 20/761-3-HCMS/HCG.

Wisnu Sunandar

Head of Region VII/Kalimantan. Lahir di Jakarta 1 Oktober 1978, lulus dari S1 Fakultas Teknik Universitas Indonesia tahun 2003, S2 Fakultas Ekonomi STIE Prasetiya Mulya tahun 2014 dan bergabung di Mandiri Syariah sejak 1 September 2003. Diangkat menjadi Head of Region VI/Kalimantan berdasarkan Surat No. 20/759-3-HCMS/HCG.

Kemas Erwan Husainy

Head of Region VIII/Makassar. Lahir di Palembang 29 Oktober 1975. Lulus dari S1 Fakultas Ekonomi Universitas Kader Bangsa tahun 2005 dan Magister Manajemen Pemasaran Universitas Bina Darma tahun 2008. Bergabung di Mandiri Syariah sejak 21 Februari 2001. Diangkat menjadi Head of Region VIII/Makassar berdasarkan Surat No.21/600-KEP/DIR Tanggal 2 Oktober 2019.

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN LEVEL JABATAN

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Jabatan

(dalam satuan Orang)

Level Jabatan	2019			2018		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Senior Management	40	9	49	37	8	45
Middle Management	628	219	847	606	206	812
Officer	2.046	912	2.958	2.063	913	2.976
Staff	2.312	2.378	4.690	2.453	2.409	4.862
Non Staff	8	0	8	15	0	15
Jumlah	**5.034**	**3.518**	**8.552**	**5.174**	**3.536**	**8.710**

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

(dalam satuan Orang)

Tingkat Pendidikan	2019			2018		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Strata 3	0	0	0	1	0	1
Strata 2	266	80	346	246	76	322
Strata 1	4.297	2.986	7.283	4.400	2.982	7.382
Diploma	452	448	900	495	474	969
SD - SMU	19	4	23	32	4	36
Jumlah	**5.034**	**3.518**	**8.552**	**5.174**	**3.536**	**8.710**

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

(dalam satuan Orang)

Status Kepegawaian	2019			2018		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Tetap	4.860	3.246	8.106	4.971	3.294	8.265
Kontrak	174	272	446	233	242	445
Jumlah	**5.034**	**3.518**	**8.552**	**5.174**	**3.536**	**8.710**

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN RENTANG USIA

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

(dalam satuan Orang)

Rentang Usia	2019			2018		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
>50 Tahun	139	39	178	145	33	178
>45-50 Tahun	225	69	294	222	65	287
>40-45 Tahun	482	168	650	394	125	519
>35-40 Tahun	1.198	491	1.689	1.066	471	1.537
>30-35 Tahun	2.009	1.339	3.348	2.073	1.199	3.272
>25-30 Tahun	775	927	1.702	1.097	1.273	2.370
≤25 Tahun	206	485	691	177	370	547
Jumlah	**5.034**	**3.518**	**8.552**	**5.174**	**3.536**	**8.710**

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

(dalam satuan Orang)

Tahun	Pria	Wanita	Jumlah
2019	**5.034**	**3.518**	**8.552**
2018	5.174	3.536	8.710

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN SEGMEN

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Segmen

Rentang Usia	2019			2018		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
All Segment	2.215	2.109	4.324	2.217	2.217	2.217
Funding	152	338	490	68	178	246
General Retail	786	189	975	765	194	959
Retail - Business Banking	192	52	244	246	77	323
Retail - Consumer	672	372	1.044	725	503	1.228
Retail - Micro	504	48	552	727	72	799
Retail - Pawning	326	323	649	235	255	490
Wholesale	187	87	274	191	86	277
Jumlah	**5.034**	**3.518**	**8.552**	**5.174**	**3.536**	**8.710**

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dilakukan dengan mengacu kepada kerangka pelatihan dan pengembangan yang mencakup seluruh aspek dan metode pengembangan bagi seluruh Sumber Daya Manusia, dengan mengedepankan adanya kesempatan yang sama bagi seluruh pegawai Mandiri Syariah tanpa memandang *gender*. Pelatihan dan Pengembangan mencakup pengenalan organisasi, visi dan misi, budaya kerja perusahaan, kompetensi teknis yang diperlukan, serta kemampuan memimpin. Kerangka pelatihan dan pengembangan disusun berdasarkan kebutuhan bisnis dan diselaraskan dengan strategi *Human Capital*.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BERDASARKAN LEVEL JABATAN

Adapun pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan oleh Mandiri Syariah berdasarkan level jabatan dapat dijelaskan di bawah ini.

Tabel Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2019

No.	Level Jabatan	Program Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Jumlah Peserta	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap level jabatan
1	Direksi	*Leadership*	Untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan keahlian pemimpin Bank.	12	
		Teknikal Skill - Support	Untuk mengembangan kompetensi segmen *Finance and Accounting, Procurement, Fixed Asset, Change Management Office*, IT, *Wholesale and Retail Risk, Risk Management (Enterprise), Audit, Compliance* dan *Legal* serta bidang Teknologi Informasi dan *Support*.	2	
	Jumlah			**14**	**280,00%**
2	SEVP	*Leadership*	Untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan keahlian pemimpin Bank.	7	
		Teknikal Skill - Support	Untuk mengembangan kompetensi segmen *Finance and Accounting, Procurement, Fixed Asset, Change Management Office*, IT, *Wholesale and Retail Risk, Risk Management (Enterprise), Audit, Compliance* dan *Legal* serta bidang Teknologi Informasi dan *Support*.	16	
	Jumlah			**23**	**460,00%**

No.	Level Jabatan	Program Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Jumlah Peserta	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap level jabatan
3	Senior Manager	*Leadership*	Untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan keahlian pemimpin Bank.	963	
		Teknikal Skill - Retail Banking	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen *Small Medium Enterprise, Pawning, Consumer*, dan Mikro.	231	
		Teknikal Skill - Wholesale Banking	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen *Wholesale Banking* (*corporate* dan *commercial*), *Government, Special Asset Management, Treasury, and International Banking.*	163	
		Teknikal Skill - Support	Untuk mengembangan kompetensi segmen *Finance and Accounting, Procurement, Fixed Asset, Change Management Office,* IT, *Wholesale and Retail Risk, Risk Management (Enterprise), Audit, Compliance* dan *Legal* serta bidang Teknologi Informasi dan *Support.*	96	
		Teknikal Skill - Operations	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai segmen *Marketing and Sales, Services, Branch Operation, Wholesale and Transaction Banking,* dan *Banking Operation.*	24	
		Certification & Socialization	Untuk memastikan kompetensi pegawai sesuai dengan standar kompetensi kinerja pada jabatannya dan untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai terkait ketentuan/peraturan baru terkait regulasi yang ada.	334	
		Change & Culture Development (inc. Learning Solutions)	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai pada implementasi budaya perusahaan sesuai dengan nilai-nilai dalam ETHIC (*Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity & Customer Focus*) dan 10 perilaku utama.	53	
	Jumlah			**1.864**	**205,97%**
4	Manajer-Asisten Manajer	*Leadership*	Untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan keahlian pemimpin Bank.	1.327	
		Teknikal Skill - Retail Banking	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen *Small Medium Enterprise, Pawning, Consumer*, dan Mikro.	1.281	
		Teknikal Skill - Wholesale Banking	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen *Wholesale Banking* (*corporate* dan *commercial*), *Government, Special Asset Management, Treasury, and International Banking.*	968	
		Teknikal Skill - Support	Untuk mengembangan kompetensi segmen *Finance and Accounting, Procurement, Fixed Asset, Change Management Office,* IT, *Wholesale and Retail Risk, Risk Management (Enterprise), Audit, Compliance* dan *Legal* serta bidang Teknologi Informasi dan *Support.*	1.261	
		Teknikal Skill - Operations	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai segmen *Marketing and Sales, Services, Branch Operation, Wholesale and Transaction Banking,* dan *Banking Operation.*	230	
		Certification & Socialization	Untuk memastikan kompetensi pegawai sesuai dengan standar kompetensi kinerja pada jabatannya dan untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai terkait ketentuan/peraturan baru terkait regulasi yang ada.	2.300	
		Change & Culture Development (inc. Learning Solutions)	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai pada implementasi budaya perusahaan sesuai dengan nilai-nilai dalam ETHIC (*Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity & Customer Focus*) dan 10 perilaku utama.	1.346	
	Jumlah			**8.713**	**187,86%**

No.	Level Jabatan	Program Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Jumlah Peserta	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap level jabatan
5	Pelaksana	*Leadership*	Untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan keahlian pemimpin Bank.	801	
		Teknikal Skill - Retail Banking	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen *Small Medium Enterprise, Pawning, Consumer*, dan Mikro.	382	
		Teknikal Skill - Wholesale Banking	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen *Wholesale Banking* (*corporate* dan *commercial*), *Government, Special Asset Management, Treasury, and International Banking.*	61	
		Teknikal Skill - Support	Untuk mengembangan kompetensi segmen *Finance and Accounting, Procurement, Fixed Asset, Change Management Office,* IT, *Wholesale and Retail Risk, Risk Management (Enterprise), Audit, Compliance* dan *Legal* serta bidang Teknologi Informasi dan *Support.*	282	
		Teknikal Skill - Operations	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai segmen *Marketing and Sales, Services, Branch Operation, Wholesale and Transaction Banking,* dan *Banking Operation.*	649	
		Certification & Socialization	Untuk memastikan kompetensi pegawai sesuai dengan standar kompetensi kinerja pada jabatannya dan untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai terkait ketentuan/peraturan baru terkait regulasi yang ada.	171	
		Change & Culture Development (inc. Learning Solutions)	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai pada implementasi budaya perusahaan sesuai dengan nilai-nilai dalam ETHIC (*Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity & Customer Focus*) dan 10 perilaku utama.	799	
	Jumlah			**3.145**	**104,04%**
6	Lainnya	*Leadership*	Untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan keahlian pemimpin Bank.	9	
		Teknikal Skill - Retail Banking	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen *Small Medium Enterprise, Pawning, Consumer*, dan Mikro.	12	
		Teknikal Skill - Wholesale Banking	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen *Wholesale Banking* (*corporate* dan *commercial*), *Government, Special Asset Management, Treasury, and International Banking.*	11	
		Teknikal Skill - Support	Untuk mengembangan kompetensi segmen *Finance and Accounting, Procurement, Fixed Asset, Change Management Office,* IT, *Wholesale and Retail Risk, Risk Management (Enterprise), Audit, Compliance* dan *Legal* serta bidang Teknologi Informasi dan *Support.*	10	
		Change & Culture Development (inc. Learning Solutions)	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai pada implementasi budaya perusahaan sesuai dengan nilai-nilai dalam ETHIC (*Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity & Customer Focus*) dan 10 perilaku utama.	15	
	Jumlah			**57**	**475,00%**
			Jumlah	**13.816**	**160,43%**

Tabel Persentase Yang Telah Mengikuti Pelatihan Untuk Setiap Jenis Pelatihan

Program Pelatihan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan	Persentase
General & Leadership	1.520	160,00%
Operation	1.346	174,13%
Retail Banking	2.142	160,43%
Support	2.242	149,47%
Wholesale Banking	1.304	192,61%
Certification & Public Training	1.167	136,81%
Knowledge Sharing	2.505	153,40%
Learning Club	1.590	178,45%

Total Pegawai (orang)	Jumlah Jam Training (dalam jam)	*Training Hours per Employee*	Jumlah Partisipan *Training*	Jumlah Pegawai yang Teriatih (orang)
8.552	288.432	20,88	13.816	6.773

EVALUASI PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pengembangan kompetensi pegawai Mandiri Syariah merupakan salah satu strategi manajemen, dimana hal tersebut menjadi target manajemen berupa *coverage development* pegawai Bank. Pengembangan kompetensi ditujukan untuk pegawai di seluruh level, baik unit bisnis maupun *supporting*. Selain *classroom training* dan *experiential learning*, Mandiri Syariah juga menyediakan fasilitas *self learning* bagi pegawai melalui dua portal *online* yaitu BSM *E-learning* dan BSM *Known*. BSM *E-learning* memuat informasi mengenai *training e-learning* yang bisa diakses dari seluruh Indonesia, pendaftaran *training* dan *assessment tools*. BSM *Known* memuat *system knowledge management* untuk mengelola pengetahuan dan sarana kolaborasi bagi pegawai Mandiri Syariah.

Evaluasi terhadap program pengembangan dan pelatihan dilaksanakan pula sebagai bahan masukan untuk pengembangan modul serta rencana pengembangan pegawai selanjutnya. Evaluasi ini terbagi menjadi 4 level evaluasi, yaitu:

- **Level 1 (L1)** adalah evaluasi untuk menilai reaksi peserta terhadap penyelenggaraan *training*. Hal ini mencakup kesesuaian materi, kemampuan pengajar dalam menyampaikan materi dan ketersediaan fasilitas *training*.
- **Level 2 (L2)** adalah evaluasi untuk menilai tingkat pemahaman peserta selama menjalani *training*. Evaluasi ini dapat berupa ujian teori ataupun praktek yang terkait dengan materi *training*.
- **Level 3 (L3)** adalah evaluasi untuk menilai implementasi materi *training* dan perubahan perilaku peserta *training* sebelum dan setelah *training* berlangsung. Evaluasi ini dilaksanakan min 3 bulan setelah *training* dilaksanakan. Proses penilaiannya dilakukan dengan metode multirater yaitu meminta penilaian/pendapat dari pegawai, atasan, rekan kerja, bawahan dari pegawai tersebut.
- **Level 4 (L4)** adalah evaluasi untuk menilai dampak *training* yang telah diikuti pegawai terhadap peningkatan kinerjanya. Evaluasi ini dilakukan setelah 3 bulan sejak berlangsungnya *training*.

Hasil dari evaluasi tersebut kemudian akan dikaji ulang oleh Mandiri Syariah untuk melakukan perbaikan terhadap penyelenggaraan *training* baik dari segi pembaharuan materi, metode penyampaian *training*, kualitas pengajar maupun fasilitas *training*. Hasil evaluasi pelatihan dan pengembangan pegawai di Mandiri Syariah adalah sebagai berikut:

Evaluasi L1: 4,37 dari standar min 4,00 (skala 1-6). Hal ini menunjukkan bahwa para peserta menilai penyelenggaraan training telah dilaksanakan dengan baik.
Evaluasi L2: 77,81 dari standar min 70,00 (skala 1-100). Hal ini menunjukkan bahwa peserta telah memiliki pemahaman yang cukup terhadap materi training yang diikuti.
Evaluasi L3: Belum masuk waktu penilaian sampai dengan periode pelaporan.
Evaluasi L4: Belum masuk waktu penilaian sampai pada periode 2020.

BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Realisasi Biaya Pendidikan dan Pelatihan 2019 adalah sebesar Rp78.940 miliar, dan mengalami kenaikan sebesar 49,19% dibanding 2018. Indikator kenaikan didukung dengan angka jumlah partisipasi pelatihan sebanyak 13.816 pegawai atau rata-rata setiap pegawai mendapatkan pelatihan sebanyak 1,62 kali dengan biaya investasi pembelajaran selama 2019 mencapai Rp9,23 juta per pegawai.

Uraian	2019 (Juta Rp)	2018 (Juta Rp)	Peningkatan/ Penurunan (Juta Rp)	Peningkatan/ Penurunan (%)
Pendidikan dan Pelatihan	78.940	52.912	26.028	49,19%

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM MANDIRI SYARIAH PER DESEMBER 2019

Tabel Komposisi Pemegang Saham Mandiri Syariah Per 31 Desember 2019

No.	Kepemilikan Saham	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	597.804.386	2.989.021.930.000	99,99999983
2	PT Mandiri Sekuritas	1	5.000	0,00000017
Jumlah		**597.804.387**	**2.989.021.935.000**	**100**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan Pemegang Saham mayoritas dan memiliki 597.804.386 lembar saham dengan nilai nominal Rp5.000 per saham atau seluruhnya sebesar Rp2.989.021.930.000, yang merupakan keseluruhan saham yang dikeluarkan dan ditempatkan serta disetor penuh dalam Mandiri Syariah hingga saat ini.

KOMPOSISI 20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR MANDIRI SYARIAH

Sampai dengan 31 Desember 2019 Mandiri Syariah belum menjadi perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Saham. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai komposisi 20 pemegang saham terbesar.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM 5% ATAU LEBIH

Tabel Komposisi Pemegang Saham 5% atau lebih Mandiri Syariah

Nama	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	597.804.386	99,99999983

Sampai dengan 31 Desember 2019, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan Pemegang Saham mayoritas dengan kepemilikan saham di Mandiri Syariah sebesar 99,99%. Informasi mengenai komposisi pemegang saham 5% atau lebih telah dijelaskan pada uraian komposisi Pemegang Saham.

KOMPOSISI KELOMPOK PEMEGANG SAHAM MASYARAKAT KURANG DARI 5%

Tabel Komposisi Pemegang Saham Kurang dari 5%

Nama	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
PT Mandiri Sekuritas	1	0,00000017

Sampai dengan 31 Desember 2019, PT Mandiri Sekuritas merupakan kelompok Pemegang Saham kurang dari 5%.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Per 31 Desember 2019 tidak terdapat kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi secara langsung dan tidak langsung.

DAFTAR ENTITAS ANAK DAN/ATAU ENTITAS ASOSIASI

Per 31 Desember 2019, Mandiri Syariah tidak memiliki Entitas Anak/Entitas Asosiasi sehingga tidak tersedia informasi mengenai: Nama entitas anak dan/atau asosiasi; Persentase kepemilikan saham; Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

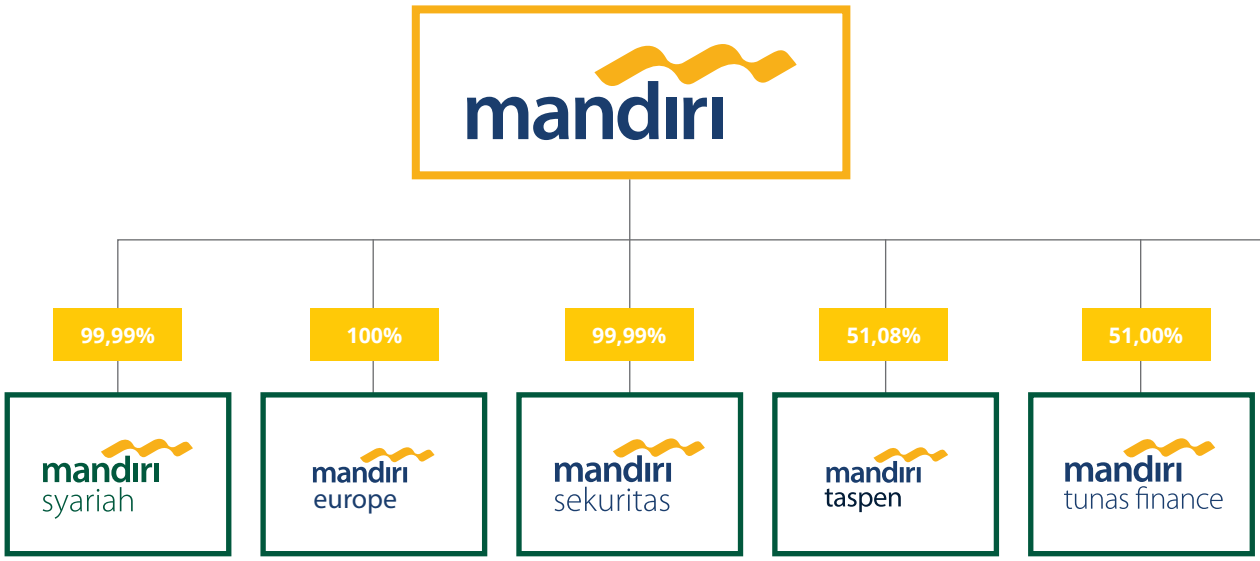

Mandiri Syariah merupakan salah satu Entitas Anak dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang beralamat di Plaza Mandiri Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta. Saat ini, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memiliki 10 (sepuluh) Entitas Anak.

Adapun Anak Perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai berikut:

Nama	Bidang Usaha	Kepemilikan Saham	Tanggal dan Tahun Pendirian	Status Operasi	Jumlah Aset (Miliar Rupiah)	Domisili
PT Bank Syariah Mandiri (“BSM”)	Jasa Perbankan Syariah	99,99%	1999	Beroperasi	112.298	Jakarta
Bank Mandiri (Europe) Limited (“BMEL”)	Jasa Perbankan	100,00%	1999	Beroperasi	2.585	London
PT Mandiri Sekuritas	Jasa *Investment* Banking	99,99%	2000	Beroperasi	2.074	Jakarta
PT Bank Mandiri Taspen	Jasa Perbankan	51,08%	1970	Beroperasi	26.948	Denpasar
PT Mandiri Tunas Finance (“MTF”)	Jasa Pembiayaan Kendaraan Bermotor dan Multiguna	51,00%	1989	Beroperasi	18.337	Jakarta
Mandiri International Remittance Sdn. Bhd. (“MIR”)	Jasa Pengiriman Uang	100,00%	2009	Beroperasi	18	Kuala Lumpur

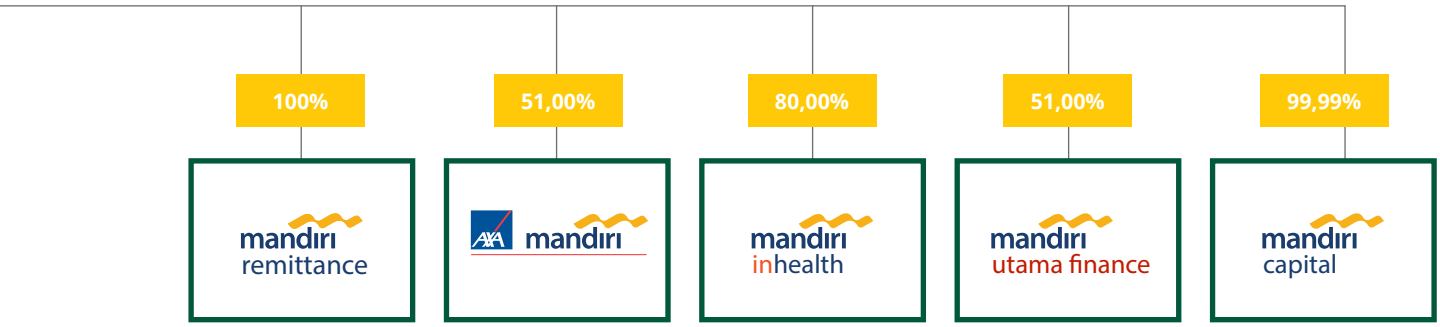

Nama	Bidang Usaha	Kepemilikan Saham	Tanggal dan Tahun Pendirian	Status Operasi	Jumlah Aset (Miliar Rupiah)	Domisili
PT AXA Mandiri Financial Services ("AXA Mandiri")	Jasa Perencanaan Keuangan Melalui Produk Asuransi	51,00%	2003	Beroperasi	32.753	Jakarta
PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia ("Mandiri Inhealth")	Jasa Asuransi Kesehatan dan Asuransi Jiwa	80,00%	2008	Beroperasi	2.217	Jakarta
PT Mandiri Utama Finance ("MUF")	Jasa Pembiayaan Konsumen Khususnya Kendaraan Bermotor	51,00%	2015	Beroperasi	5.132	Jakarta
PT Mandiri Capital Indonesia ("MCI")	Jasa Modal Ventura	99,99%	2015	Beroperasi	1.462	Jakarta

Per 31 Desember 2019, Mandiri Syariah tidak memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi, *Joint Venture* dan *Special Purpose Vehicle* (SPV).

KRONOLOGI PENERBITAN SAHAM

Saat ini PT Bank Syariah Mandiri 99,99% dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp2.989.022.000.000 dengan total saham sebanyak 597.804.386 saham.

Kronologis pendirian perusahaan dan penerbitan saham Mandiri Syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tanggal Penerbitan	Jumlah Saham/ Lembar	Nominal/ Lembar (Rp)	Total (Rp)	Akta
8 September 1999	109.503.999	5.000	547.519.995.000	Akta No. 23 tanggal 8 September 1999
19 Juni 2008	91.674.512	5.000	458.372.560.000	Akta No. 10 tanggal 19 Juni 2008
31 Desember 2008	131.648.712	5.000	658.243.560.000	Akta No. 211 tanggal 31 Desember 2008
23 Maret 2001	171.648.712	5.000	858.243.560.000	Akta No. 19 tanggal 23 Maret 2011
29 Maret 2011	231.648.712	5.000	1.158.243.560.000	Akta No. 42 tanggal 29 Desember 2011
28 Desember 2012	291.648.712	5.000	1.458.243.560.000	Akta No. 38 tanggal 28 Desember 2012
22 Januari 2014	297.804.386	5.000	1.489.021.930.000	RUPS Sirkuler 27 Des 2013 (Akta No. 20 tanggal 22 Januari 2014)
25 November 2015	397.804.386	5.000	1.989.021.930.000	Akta No. 33 tanggal 25 November 2015
7 Desember 2016	497.804.386	5.000	2.489.021.930.000	RUPS Sirkuler 25 Nov 2016 (Akta No. 09 tanggal 7 Desember 2016)
12 Desember 2017	597.804.386	5.000	2.989.021.930.000	RUPS Sirkuler 11 Des 2017 (Akta No. 22 tanggal 12 Desember 2017)

PT Bank Syariah Mandiri per 31 Desember 2019, belum melakukan pencatatan saham di Bursa Efek. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai tindakan korporasi (*corporate action*), harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi, jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi dan nama bursa tempat saham perusahaan dicatatkan.

KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ATAU PENCATATAN OBLIGASI/SUKUK

Subordinated Notes Mudharabah Mandiri Syariah tahun 2016 sebesar Rp375.000.000.000 merupakan surat berharga yang diterbitkan Bank pada tanggal 22 Desember 2016 dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2023.

Syarat dan ketentuan:
- Pendapatan bagi hasil dihitung berdasarkan perkalian antara *nisbah* pemegang *subnotes* Bank dengan pendapatan yang dibagihasilkan yang jumlahnya tercantum dalam laporan keuangan Bank triwulan terakhir yang belum diaudit yang tersedia dan disahkan oleh Direksi Bank selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil yang bersangkutan.
- Pendapatan yang dibagihasilkan diperoleh dari pendapatan portofolio pembiayaan Rupiah (*blended*) Bank senilai 7 (tujuh) kali Dana Sukuk *Mudharabah* Subordinasi dalam mata uang Rupiah yang dimiliki Penerbit, yang diperoleh selama 1 (satu) triwulan sebagaimana dicantumkan dalam setiap laporan keuangan Bank yang belum diaudit.
- *Nisbah* yang diberikan kepada pemegang *subnotes* adalah sebesar 27,07% dari pendapatan yang dibagihasilkan yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.

Subordinated Notes ini tidak dijamin dengan jaminan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga. Termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan ke dalam Program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf f Peraturan OJK No. 21/POJK.03/2014. *Subnotes* merupakan kewajiban Bank yang disubordinasi.

Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Mudharabah Subordinasi Mandiri Syariah Tahun 2016 dan sebelum dilunasinya semua pokok dan bagi hasil, Bank berkewajiban untuk:

1. Menjaga rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) tidak kurang dari 12% (dua belas persen);
2. Memastikan bahwa Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2016 ini tidak akan dimiliki oleh lebih dari 50 (lima puluh) investor;
3. Menyerahkan kepada agen pemantau sebagai berikut: laporan keuangan tahunan (*audited*) selambat-lambatnya akhir bulan ke-4 setelah tanggal buku laporan, laporan keuangan (*unaudited*) triwulan selambat-lambatnya akhir bulan ke-1 setelah tanggal buku laporan, laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pendapatan Bagi Hasil, dan laporan penilaian tingkat kesehatan bank dan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada OJK.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank telah mengeluarkan opini melalui suratnya nomor 18/13/DPS/X/2016 tanggal 1 November 2016 menyatakan bahwa *subordinated notes* syariah *mudharabah* telah sesuai dengan fatwa DSN mengenai obligasi syariah dan obligasi syariah *mudharabah* (Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002 dan No.33/DSN-MUI/IX/2002). Bagi hasil yang diberikan kepada pemegang *subordinated notes* diambil dari porsi Bank.

Nama Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Mandiri Syariah telah dicatatkan di OJK dan tidak dicatatkan di Bursa Efek.

Tabel Kronologis Penerbitan Efek Lainnya Mandiri Syariah

Uraian	Jumlah Sukuk (jutaan Rupiah)	Nilai Penawaran (jutaan Rupiah)	Nisbah sebelum tanggal jatuh tempo	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat		Wali Amanat
						2019	2018	
Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BSM Tahun 2016	375.000	375.000 (100%)	Nisbah 27,07%	22 Desember 2016	22 Desember 2023	PT Pefindo $_{id}$AA (*Double* A *Minus Sharia*)	PT Pefindo $_{id}$AA (*Double* A *Minus Sharia*)	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Tabel Kronologis Pembayaran *Nisbah Subordinated Notes Mudharabah* Mandiri Syariah Tahun 2019

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran *Nisbah*	Status Pembayaran *Nisbah*
1.	22 Maret 2017	Sudah Dibayar
2.	22 Juni 2017	Sudah Dibayar
3.	22 September 2017	Sudah Dibayar
4.	22 Desember 2017	Sudah Dibayar
5.	22 Maret 2018	Sudah Dibayar
6.	22 Juni 2018	Sudah Dibayar
7.	22 September 2018	Sudah Dibayar
8.	22 Desember 2018	Sudah Dibayar
9.	22 Maret 2019	Sudah DIbayar
10.	22 Juni 2019	Sudah Dibayar
11.	22 September 2019	Sudah Dibayar
12.	22 Desember 2019	Sudah Dibayar
13.	22 Maret 2020	Belum Dibayar
14.	22 Juni 2020	Belum Dibayar
15.	22 September 2020	Belum Dibayar
16.	22 Desember 2020	Belum Dibayar
17.	22 Maret 2021	Belum Dibayar
18.	22 Juni 2021	Belum Dibayar
19.	22 September 2021	Belum Dibayar
20.	22 Desember 2021	Belum Dibayar
21.	22 Maret 2022	Belum Dibayar
22.	22 Juni 2022	Belum Dibayar
23.	22 September 2022	Belum Dibayar

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran *Nisbah*	Status Pembayaran *Nisbah*
24.	22 Desember 2022	Belum Dibayar
25.	22 Maret 2023	Belum Dibayar
26.	22 Juni 2023	Belum Dibayar
27.	22 September 2023	Belum Dibayar
28.	22 Desember 2023	Belum Dibayar

Adapun Daftar Pemegang Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Mandiri Syariah per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Tabel Daftar Pemegang Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Mandiri Syariah Per 31 Desember 2019

No.	Investor	Nominal (Rp)	%
1.	Bank Kalbar Syariah	55.000.000.000	14,67%
2.	Bank Pembangunan Daerah Aceh	50.000.000.000	13,33%
3.	Bank Negara Indonesia Syariah	50.000.000.000	13,33%
4.	Bank Pembangunan Daerah Kaltim	100.000.000.000	26,67%
5.	YK Bumi Daya	50.000.000.000	13,33%
6.	YPK Bapindo	20.000.000.000	5,33%
7.	YPK Bank Exim	4.000.000.000	1,07%
8.	Reasuransi Nasional Indonesia	5.000.000.000	1,33%
9.	Asuransi Jasindo Syariah	3.000.000.000	0,80%
10.	Asuransi Binagriya Upakara	1.000.000.000	0,27%
11.	Asuransi Jiwa Reliance	10.000.000.000	2,67%
12.	Cipta Obligasi Optimal	3.000.000.000	0,80%
13.	Cipta Obligasi Rupiah	5.000.000.000	1,33%
14.	BNI-AM Terproteksi	10.000.000.000	2,67%
15.	Khaerunisah	3.000.000.000	0,80%
16.	Dapen Pelindo Purnakarya	2.000.000.000	0,53%
17.	Herman Susanto	1.000.000.000	0,27%
18.	Faty Khusumo	1.000.000.000	0,27%
19.	Jusran Sutjahja Kusumadjaja	1.000.000.000	0,27%
20.	Anggia Paraati	1.000.000.000	0,27%

Sampai dengan 31 Desember 2019, Mandiri Syariah tidak memiliki obligasi, sehingga tidak terdapat kronologi penerbitan dan/atau pencatatan obligasi.

KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ATAU PENCATATAN EFEK LAINNYA

Sampai dengan 31 Desember 2019, Mandiri Syariah tidak melakukan penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya selain Sukuk.

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG

KANTOR AKUNTAN PUBLIK	**Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan** Gedung Plaza 89 Lt. 11 – 12 Jln. HR Rasuna Said Kav. X-7 No.6 Karet Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan Periode Penugasan : Januari – Desember 2018 Fee : Rp2.575.000.000,-
KONSULTAN HUKUM	**Sentot, SH & Associates Law Firm** Jalan Galur Sari Timur No. 81 Kelurahan Utan Kayu Selatan Kecamatan Matraman Jakarta Timur 13120 - Indonesia Tel: (021) 8194 301 Periode Penugasan: Januari - Desember 2019 Fee : Rp1.200.000.000 **Radjiman Bilitea & Partners** The H Tower, 19th Floor, Suite E JL. H.R Rasuna Said Kav. C. 20 – 21, Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 Tel: (021) 29516868 Fax: (021) 29516869 Periode Penugasan: Januari - Desember 2019 Fee: Rp75.000.000
PEMERINGKAT EFEK	**PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)** Panin Tower Senayan City, 17th Floor Jl. Asia Afrika Lot.19, RT.1/RW.3 Gelora, Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12220 Periode Penugasan : Januari – Desember 2018
NOTARIS	**Ashoya Ratam, S.H., MKn.** Jl. Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12180 Tel: (021) 29236060 Fax: (021) 29236070 *Email*: notaris@ashoyaratam.co.id Periode Penugasan : Januari – Desember 2018 Fee : Rp37.950.000,-
WALI AMANAT	**PT Bank Mandiri (Persero), Tbk** FI Coverage & Solutions Group Capital Market Services Department Plaza Mandiri Lantai 22 Jl. Jend Gator Subroto Kav.36-38 Jakarta 12190 Periode Penugasan : Januari – Desember 2018

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Penghargaan Mandiri Syariah

Nama Penghargaan:
Innovative Company in Providing Customer Center Sharia Virtual and Mobile Banking Category: Islamic Banking

Acara:
Indonesia Digital Innovation Award

Penyelenggara:
Warta Ekonomi

Tanggal:
22 Februari 2019

Nama Penghargaan:
Peringkat III Engagement kategori Bank Umum Syariah

Acara:
Satisfaction Loyalty Engagement Awards

Penyelenggara:
Majalah Infobank bekerjasama dengan Marketing Research Indonesia

Tanggal:
14 Maret 2019

Nama Penghargaan:
Peringkat II Satisfaction (Satpam) kategori Bank Umum Syariah

Acara:
Satisfaction Loyalty Engagement Awards

Penyelenggara:
Majalah Infobank bekerjasama dengan Marketing Research Indonesia

Tanggal:
14 Maret 2019

Nama Penghargaan:
Peringkat I Satisfaction (Teller) kategori Bank Umum Syariah

Acara:
Satisfaction Loyalty Engagement Awards

Penyelenggara:
Majalah Infobank bekerjasama dengan Marketing Research Indonesia

Tanggal:
14 Maret 2019

Nama Penghargaan:
Peringkat I Satisfaction (Customer Service) kategori Bank Umum Syariah

Acara:
Satisfaction Loyalty Engagement Awards

Penyelenggara:
Majalah Infobank bekerjasama dengan Marketing Research Indonesia

Tanggal:
14 Maret 2019

Nama Penghargaan:
Peringkat I Satisfaction
kategori Bank Umum Syariah

Acara:
Satisfaction Loyalty Engagement Awards

Penyelenggara:
Majalah Infobank bekerjasama dengan
Marketing Research Indonesia

Tanggal:
14 Maret 2019

Nama Penghargaan:
Peringkat I NPS (Net Promotor Score)
kategori Bank Umum Syariah

Acara:
Satisfaction Loyalty Engagement Awards

Penyelenggara:
Majalah Infobank bekerjasama
dengan Marketing Research Indonesia

Tanggal:
14 Maret 2019

Nama Penghargaan:
Peringkat I KPR - Bank Umum Syariah

Acara:
8th Digital Brand Awards 2019

Penyelenggara:
Majalah Infobank bekerjasama dengan
Isentia Research

Tanggal:
16 Mei 2019

Nama Penghargaan:
The Best Digital Brand 2014-2018
kategori Tabungan Bank Umum Syariah

Acara:
Infobank Digital Brand Award 2019

Penyelenggara:
Majalah Infobank bekerjasama dengan
Isentia Research

Tanggal:
16 Mei 2019

Nama Penghargaan:
Special Awards "Golden Trophy"
(Selama Enam Tahun Berturut-Turut
Berhasil Mempertahankan
Tingkat *Service Excellence*)

Acara:
Banking Service Excellence Award 2019

Penyelenggara:
Majalah Infobank bekerjasama dengan
Marketing Research Indonesia (MRI)

Tanggal:
27 Juni 2019

Nama Penghargaan:
1st Best Overall Performance

Acara:
Banking Service Excellence Award 2019

Penyelenggara:
Majalah Infobank bekerjasama dengan Marketing Research Indonesia (MRI)

Tanggal:
27 Juni 2019

Nama Penghargaan:
1st Best Overall Minus E-Banking

Acara:
Banking Service Excellence Award 2019

Penyelenggara:
Majalah Infobank bekerjasama dengan Marketing Research Indonesia (MRI)

Tanggal:
27 Juni 2019

Nama Penghargaan:
1st Best Teller

Acara:
Banking Service Excellence Award 2019

Penyelenggara:
Majalah Infobank bekerjasama dengan Marketing Research Indonesia (MRI)

Tanggal:
27 Juni 2019

Nama Penghargaan:
1st Best Telepon

Acara:
Banking Service Excellence Award 2019

Penyelenggara:
Majalah Infobank bekerjasama dengan Marketing Research Indonesia (MRI)

Tanggal:
27 Juni 2019

Nama Penghargaan:
1st Best Customer Service

Acara:
Banking Service Excellence Award 2019

Penyelenggara:
Majalah Infobank bekerjasama dengan Marketing Research Indonesia (MRI)

Tanggal:
27 Juni 2019

Nama Penghargaan:
1st Best Opening Account Website Application

Acara:
Banking Service Excellence Award 2019

Penyelenggara:
Majalah Infobank bekerjasama dengan Marketing Research Indonesia (MRI)

Tanggal:
27 Juni 2019

Nama Penghargaan:
2nd Best Satpam

Acara:
Banking Service Excellence Award 2019

Penyelenggara:
Majalah Infobank bekerjasama dengan Marketing Research Indonesia (MRI)

Tanggal:
27 Juni 2019

Nama Penghargaan:
3rd Best Chatbot

Acara:
Banking Service Excellence Award 2019

Penyelenggara:
Majalah Infobank bekerjasama dengan Marketing Research Indonesia (MRI)

Tanggal:
27 Juni 2019

Nama Penghargaan:
Islamic Bank of The Year Indonesia - Bank Syariah di Indonesia yang berpredikat Sangat Bagus atas kinerja keuangan tahun 2018

Acara:
The Asset Asian Awards

Penyelenggara:
The Asset

Tanggal:
4 Juli 2019

Nama Penghargaan:
Best Islamic Retail Bank Indonesia - Bank Syariah di Indonesia yang berpredikat Sangat Bagus atas kinerja keuangan tahun 2018

Acara:
The Asset Asian Awards

Penyelenggara:
The Asset

Tanggal:
4 Juli 2019

Nama Penghargaan:
Best Islamic Trade Finance Bank Indonesia - Bank Syariah di Indonesia yang berpredikat Sangat Bagus atas kinerja keuangan tahun 2018

Acara:
The Asset Asian Awards

Penyelenggara:
The Asset

Tanggal:
4 Juli 2019

Nama Penghargaan:
The Best in Growth Sharia Bank Asset > 20 Triliun

Acara:
Karim Award

Penyelenggara:
Karim Consulting Indonesia

Tanggal:
4 Juli 2019

Nama Penghargaan:
The 1st Champion of Indonesia Original Brand 2019 Product
Category: Sharia Banking

Acara:
Champion Indonesia Original Brand 2019

Penyelenggara:
Majalah SWA

Tanggal:
31 Juli 2019

Nama Penghargaan:
Aset Terbesar Bank Umum Syariah

Acara:
IAEI Awards

Penyelenggara:
Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)

Tanggal:
23 Agustus 2019

Nama Penghargaan:
Bank yang berpredikat "Sangat Bagus" atas Kinerja Keuangan Selama Tahun 2018

Acara:
Infobank Awards

Penyelenggara:
Majalah Infobank

Tanggal:
29 Agustus 2019

Nama Penghargaan:
Best Islamic Finance Retail Bank dan Best FX Bank for Corporate Islamic Treasury in South East Asia

Acara:
Best Islamic Finance Awards 2019

Penyelenggara:
Alpha Southeast Asia

Tanggal:
26 September 2019

Nama Penghargaan:
Sharia Commercial Bank with predicate "Excellent" in Financial Performance throughout 2018

Acara:
Sharia Awards

Penyelenggara:
Majalah Infobank

Tanggal:
25 Oktober 2019

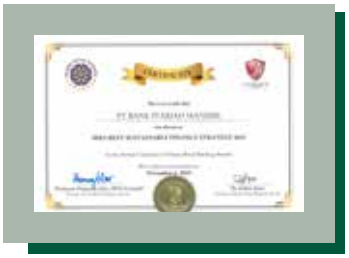

Nama Penghargaan:
Best Sustainable Finance Strategy 2019

Acara:
Islamic Retail Banking Awards 2019

Penyelenggara:
Cambridge International Financial Advisory (IFA)

Tanggal:
4 November 2019

Nama Penghargaan:
Most Innovative Islamic Retail Bank in Indonesia 2019

Acara:
Islamic Retail Banking Awards 2019

Penyelenggara:
Cambridge International Financial Advisory (IFA)

Tanggal:
4 November 2019

Nama Penghargaan:
Strongest Islamic Retail Bank in Indonesia 2019

Acara:
Islamic Retail Banking Awards 2019

Penyelenggara:
Cambridge International Financial Advisory (IFA)

Tanggal:
4 November 2019

Nama Penghargaan:
Juara I ARA 2018 untuk kategori Private Keuangan Non Listed

Acara:
Annual Report Award (ARA) 2018

Penyelenggara:
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, BEI, Kementerian BUMN, Ditjen Pajak, dan Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggal:
14 November 2019

Nama Penghargaan:
The Most Valuable Brand in Indonesia

Acara:
Indonesia Best Brand Award (IBBA)

Penyelenggara:
Majalah SWA bekerja sama dengan Lembaga Survey MARS

Tanggal:
27 November 2019

Nama Penghargaan:
The Best in Retail Service Banking kategori Bank Syariah

Acara:
Tempo Financial Award

Penyelenggara:
Majalah Tempo

Tanggal:
27 November 2018

Nama Penghargaan:
Bank Pendukung Pengendalian Moneter Syariah Terbaik

Acara:
BI Awards 2019

Penyelenggara:
Bank Indonesia

Tanggal:
28 November 2019

Nama Penghargaan:
Brand Awareness, Brand Image – Category Millennial's Admirable Brand in Bank BUKU 3

Acara:
Financial Award 2019

Penyelenggara:
Radio Republik Indonesia (RRI) bekerja sama dengan ICONOMICS

Tanggal:
5 Desember 2019

Nama Penghargaan:
Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI)

Acara:
Good Corporate Governance Award 2019

Penyelenggara:
Majalah SWA dan The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)

Tanggal:
11 Desember 2019

Nama Penghargaan:
The Best Performing Bank 2019, Based on Financial Performance 2017-2019 category Core Capital Rp5 Trilion to under Rp30 Trilion (Buku 3)

Acara:
Top 20 Financial Intitutions

Penyelenggara:
The Finance

Tanggal:
11 Desember 2019

Nama Penghargaan:
The Best And Biggest Islamic Bank in Indonesia

Acara:
Moeslim Choice Award

Penyelenggara:
Intitusi Ekonomi Syariah

Tanggal:
12 Desember 2019

Nama Penghargaan:
Peserta Lelang SBSN Terbaik Tahun 2019 Kategori Bank Syariah

Acara:
Penghargaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Penyelenggara:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Tanggal:
16 Desember 2019

Nama Penghargaan:
Mitra Distribusi SBSN Ritel Terbaik Pertama Kategori Bank Syariah

Acara:
Penghargaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Penyelenggara:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Tanggal:
16 Desember 2019

Sertifikasi Mandiri Syariah

Selama tahun 2019, Mandiri Syariah belum memiliki sertifikasi sehingga tidak terdapat informasi mengenai nama sertifikasi, tahun perolehan sertifikasi, badan pemberi sertifikasi maupun masa berlaku.

NAMA DAN ALAMAT ENTITAS ANAK DAN/ATAU KANTOR CABANG ATAU KANTOR PERWAKILAN

KANTOR CABANG

Kantor Cabang		
KC MEDAN Jl. Jenderal Achmad Yani No. 100, Medan, Sumatera Utara. Telp: (061) 4153866, 4151466 Fax : (061) 4511867	KC ACEH Jl. Diponegoro No. 6, Banda Aceh, Aceh. Telp: (0651) 22010 Fax : (0651) 33945	KC PEKANBARU Jl. Jend. Sudirman No. 450, Pekanbaru, Riau. Telp: (0761) 849191, 849192, 849193, 849194 Fax : (0761) 849190, 31668
KC RANTAU PRAPAT Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 4, Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara. Telp: (0624) 24880, 24205, 25186 Fax : (0624) 24653	KC SIMEULUE Pertokoan Suak Tungkul Kavling 1 No. 5/6, Jl. Tgk. Diujung Sinabang, Simeuleu, Aceh. Telp: (0650) 21547 Fax : (0650) 21556	KC BATAM Komplek Graha Sulaeman Blok B No. 2, Jl. Sultan Abdul Rahman, Lubuk Baja, Batam, Kep. Riau. Telp: (0778) 431331 Fax : (0778) 432727
KC PADANGSIDEMPUAN Jl. Sudirman No. 130 A, Kel. Wek I, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara. Telp: (0634) 28200 Fax : (0634) 28103	KC DUMAI Jl. Jenderal Sudirman No. 162, Dumai, Riau. Telp: (0765) 33555 Fax : (0765) 32379	KC BINJAI Jl. Sukarno Hatta No. 22-23, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara. Telp: (061) 8826396 Fax : (061) 8826138
KC PEMATANGSIANTAR Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1, Pematangsiantar, Sumatera Utara. Telp: (0622) 435858, 435857, 435861 Fax : (0622) 435848	KC LANGSA Jl. Ahmad Yani No. 20-22, Kel. Gampong Jawa, Kec. Langsa Kota Langsa, Aceh. Telp: (0641) 426135, 21357, 426451 Fax : (0641) 426051	KC TANJUNG PINANG Jl. Basuki Rahmat No. 1-3, Kel. Tanjungpinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kep. Riau. Telp: (0771) 313788 Fax : (0771) 313995
KC MEDAN KAMPUNG BARU Jl. Brigjen Katamso No. 717 B, Medan, Sumatera Utara. Telp: (061) 7878383 Fax : (061) 7872323	KC MEDAN AKSARA Jl. Letda Sujono No. 110, Kel. Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara. Telp: (061) 7325939, 7325957 Fax : (061) 7332936	KC MEULABOH Jl. Nasional No. 107, Gampong Ujong Baroh, Kec. Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Telp: (0655) 7551109, 7551558 Fax : (0655) 7551184
KC PEKANBARU HARAPAN RAYA Jl. Haji Imam Munandar No. 8, Kel. Tangkerang Utara, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Telp: (0761) 862222 Fax : (0761) 849799	KC DURI Jl. Hangtuah, Kel. Balai Makam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, Riau. Telp: (0765) 598990 Fax : (0765) 598993	KC MEDAN GAJAH MADA Jl. Gajah Mada No. 7, Kel. Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara. Telp: (061) 4550755 Fax : (061) 4550766, 4537627

Kantor Cabang

KC SIBOLGA Jl. Sutoyo Siswomiharjo No. 22, Sibolga Utara, Sibolga, Sumatera Utara. Telp: (0631) 24555 Fax : (0631) 26722	KC LUBUK PAKAM Jl, Diponegoro No, 45-46 Pasar I, Kel. Lubuk Pakam, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdan, Sumatera Utara Telp: (061) 7952555 Fax : (061) 7950419	KC LHOKSEUMAWE Jl. Merdeka No. 24-25, Desa Simpang Empat, Kec. Banda Sakti, Kotif Lhokseumawe, Aceh. Telp: (0645) 631146, 631147, 631148 Fax : (0645) 41555
KC KABANJAHE Komplek Raja Lahir Munte Blok E No. 1-2, Jl. Selamat Ketaren, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo, Sumatera Utara. Telp: (0628) 21999 Fax : (0628) 21859	KC PALEMBANG Jl. Demang Lebar Daun No. 2311, Kel. Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Telp: (0711) 421919 Fax : (0711) 419952	KC PADANG Jl. Belakang Olo No. 47, Kel. Kampung Jawa, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Telp: (0751) 21113, 20765 Fax : (0751) 24768
KC JAMBI Jl. Jend. Gatot Subroto No. 127 A-B, Kel. Sungai Asam, Kec. Pasar Jambi, Kota Jambi, Jambi. Telp: (0741) 27730, 27726 Fax : (0741) 27733	KC BANDAR LAMPUNG Jl. Diponegoro No. 189, Kel. Gotong Royong, Kec. Gotong Royong, Kota Bandarlampung, Lampung. Telp: (0721) 258952, 258960 Fax : (0721) 263588	KC BUKITTINGGI Jl. Jenderal Sudirman No. 73, Bukittinggi, Sumatera Barat. Telp: (0752) 627633 Fax : (0752) 627637
KC BENGKULU Jl. S. Parman No. 15, Kel. Padang Jati, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu, Bengkulu. Telp: (0736) 342007 Fax : (0736) 346707	KC PANGKAL PINANG Jl. Masjid Jamik No. 123, Pangkal Pinang, Kep. Bangka Belitung. Telp: (0717) 432229 Fax : (0717) 431445	KC PRABUMULIH JL. Jend. Sudirman No. 7-8 Rt 01/10, Kel. Muara dua, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan. Telp: (0713) 322888 Fax : (0713) 322565
KC BATURAJA Jl. Slamet Riadi No. 231, RT. 02/02, Kel. Kemalaraja, Kec. Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Telp: (0735) 325111 Fax : (0735) 322552	KC PALEMBANG PASAR 16 ILIR Pasar 16 Ilir, Jl. Masjid Lama No. 30-31, Palembang, Sumatera Selatan. Telp: (0711) 377322 Fax : (0711) 353594	KC PALEMBANG SIMPANG PATAL Jl. R. Soekamto No. 6A, Kel. 8 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Telp: (0711) 819850 Fax : (0711) 811078
KC BANDAR JAYA Komp. Pertokoan Central Niaga Bandar Jaya No. 1-3, Jl. Proklamator Raya, Yukum Jaya, Lampung Tengah, Lampung. Telp: (0725) 529825, 529826 Fax : (0725) 529831	KC METRO Jl. Jend. Sudirman No. 43 E-F, Kel. Imopura, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, Lampung. Telp: (0725) 7851606 Fax : (0725) 7851605	KC PAYAKUMBUH Jl. Ade Irma Suryani No. 3 D-E, Payakumbuh, Sumatera Barat. Telp: (0752) 796640 Fax : (0752) 93167

Kantor Cabang

KC JAKARTA THAMRIN Jl. M. H. Thamrin No. 5, Jakarta Pusat. Telp: (021) 2300509, 39839000 Fax : (021) 39832939	KC JAKARTA HASANUDIN Jl. S. Hasanudin No. 57, Jakarta Selatan. Telp: (021) 2701515, 2701505 Fax : (021) 7220362	KC JAKARTA MAYESTIK Jl. Kyai Maja Blok D/1 Persil No. 6-6A, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Telp: (021) 7202451, 7202728, 7202509, 7394952 Fax : (021) 7220822
KC JAKARTA WARUNG BUNCIT Mampang Square Blok A5-6, Jl. Mampang Prapatan No. A6, Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Telp: (021) 27534514, 27534515 Fax : (021) 27534505	KC JAKARTA PONDOK INDAH Komp. Ruko Pondok Indah Kav. II No.11 Blok UA, Jl.Taman Duta I Sektor II, Jakarta Selatan. Telp: (021) 7662029, 7662030 Fax : (021) 7662028, 7665391	KC BEKASI Komplek Pertokoan Kalimalang Comm Center, Jl. A Yani A5 No. 6-7, Bekasi, Jawa Barat. Telp: (021) 8853990, 8856368, 8840355, 8853991, 88855418 Fax : (021) 8856406
KC BOGOR Jl. Pajajaran No. 8, Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Telp: (0251) 8350562, 8350563, 8350564 Fax : (0251) 835056	KC TANGERANG Ruko Business Park Tangerang City Blok A No. 12, Jl. Jend. Sudirman, Tangerang, Banten Telp: (021) 55781230, 55781231, 55781232 Fax : (021) 55781233	KC CILEGON Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No. 115 A, Cilegon, Banten. Telp: (0254) 399444, 375648 Fax : (0254) 375645
KC JAKARTA TANJUNG PRIOK Jl. Enggano No. 42B - 42, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Telp: (021) 43906060, 43906055 Fax : (021) 43906058, 43906059	KC JAKARTA SAHARJO Jl. Minangkabau No. 39, Pasar Manggis Setiabudi, Jakarta Selatan. Telp: (021) 8308768, 8292824, 8357309 Fax : (021) 8308769, 8357310	KC JAKARTA RAWAMANGUN Jl. Paus Raya No. 86, Rawamangun, Jakarta Timur. Telp: (021) 4711987 Fax : (021) 4711963
KC JAKARTA KEBON JERUK Jl. Panjang Arteri Kelapa Dua No. 54 D (Jl. Raya Kelapa Dua No. 1) RT. 004 RW. 003, Kel. Kelapa Dua, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 53662464, 53662465, 53662467 Fax : (021) 53662471, 53662472	KC JAKARTA KELAPA GADING Komplek Graha Bulevar Blok KGC No. A-02 dan A-03, Jl. Boulevard Kelapa Gading, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara. Telp: (021) 29375262, 29375261 Fax : (021) 29375197, 29375198	KC JAKARTA CIBUBUR Ruko Citra Gran Blok R-2 No. 8-9, Jl. Raya Alternatif, Cibubur, Jakarta Timur. Telp: (021) 84300107, 84300108, 8449778 Fax : (021) 84590918
KC JAKARTA PONDOK KELAPA Ruko Komplek Billy & Moon Blok E No. 5A-5B, Jl. Raya Kalimalang, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Telp: (021) 86903501 Fax : (021) 86903502	KC JAKARTA CIPULIR Jl. Ciledug Raya Cipuliur No. 123E, Jakarta Selatan. Telp: (021) 7244664, 72786414, 72786361 Fax : (021) 72786360	KC DEPOK Ruko Depok Mas Blok A1-2, Jl. Margonda Raya No. 42, Depok, Jawa Barat. Telp: (021) 7765231, 7765251, 7765289, 77213804 Fax : (021) 77202905, 77203598
KC TANGERANG BINTARO Bintaro Trade Center, Jl. Jend. Sudirman Blok A1 No. 7-8, Bintaro Sektor 7, Pondok Aren, Tangerang, Banten. Telp: (021) 7450120, 7453301, 7450296, 7450297 Fax : (021) 7450116	KC BEKASI CIKARANG Ruko Sentra Cikarang, Jl. Cikarang Cibarusan Bl. B No. 2, Cikarang, Kab. Bekasi, Jawa Barat. Telp: ((021) 89902076, 89902077 Fax : (021) 89906765	KC TANGERANG CIPUTAT Jl. Ir. H. Juanda No. 111, RT 006/001, Kel. Cempaka Putih, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. Telp: (021) 7425267 Fax : (021) 7423018

Kantor Cabang

KC CIBINONG Ruko Graha Cibinong Blok D No. 2, Jl. Raya Bogor KM 43, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Telp: (021) 87915703, 87915704 Fax : (021) 87919008	KC TANGERANG CILEDUG Jl. HOS Cokroaminoto No. 69, Ciledug, Tangerang, Banten. Telp: (021) 73458147, 73458148, 73458149 Fax : (021) 73458150	KC BEKASI PONDOK GEDE Jl. Jatiwaringin Raya No. 110 D-E, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Telp: (021) 84970255, 84900806, 84900810 Fax : (021) 84970265
KC SERANG Jl. Ahmad Yani No. 175 C-D, Kel. Sumur Pecung, Kec. Serang, Kab. Serang, Banten. Telp: (0254) 222984, 210191 Fax : (0254) 222985	KC JAKARTA JATINEGARA Perkantoran Mitra Matraman Blok A1 No. 8-9, Jl. Matraman Raya No. 148, Jakarta Timur. Telp: (021) 85904866 Fax : (021) 85905634	KC JAKARTA MANGGA DUA Komplek Ruko Harco Blok C No. 11, Jl. Mangga Dua Raya, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Telp: (021) 6128715 Fax : (021) 6120065
KC JAKARTA KALIBATA Jl. Raya Pasar Minggu No. 75, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan. Telp: (021) 7940323, 7940341, 7940353 Fax : (021) 7940420	KC JAKARTA HAYAM WURUK Jl. Hayam Wuruk No. 101, Kec. Tamansari, Jakarta Barat. Telp: (021) 6259000 Fax : (021) 6297427	KC JAKARTA CENGKARENG Ruko Mutiara Taman Palem Blok A2 No. 9-10, Jl. Kamal Raya Outering Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat. Telp: (021) 54353515, 54353540 Fax : (021) 54353155
KC JAKARTA PLUIT Jl. Pangeran Tubagus Angke, Perum Taman Duta Mas Blok D/9 B, Kav. No. 1, Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Telp: (021) 29388018, 22563967 Fax : (021) 29388019	KC SOLO Jl. Slamet Riyadi No. 388, Solo, Jawa Tengah. Telp: (0271) 710820 Fax : (0271) 742085, 742086	KC JAKARTA SUDIRMAN Mayapada Tower II Lantai GF, Jl. Jend. Sudirman Kav. 27, Jakarta Selatan. Telp: (021)-2500511, 2500533 Fax : (021)-2500422
KC BANDUNG Jl. Ir. H. Juanda No. 24, Kel. Citarum, Kec. Cibeunying, Bandung, Jawa Barat. Telp: (022) 84469443 Fax : (022) 4200011	KC BANDUNG AHMAD YANI Jl. Jendral Ahmad Yani No. 252, Kel. Kacapiring, Kec. Batununggal, Bandung, Jawa Barat. Telp: (022) 7202688, 7231090, Fax : (022) 7271334	KC CIMAHI Jl. Jend, Amir Machmud No. 118, Cibabat, Cimahi, Jawa Barat Telp: (022) 6632228 Fax : (022) 6632212
KC CIREBON Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 89, Cirebon, Jawa Barat. Telp: (0231) 202760, 202092, 202093, 200423 Fax : (0231) 202067	KC PURWAKARTA Jl. Raden Edi Martadinata, RT 25 RW 05, Kel. Nagri Tengah, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Jawa Barat. Telp: (0264) 231760 Fax : (0264) 231761	KC CIANJUR Jl. Siliwangi No. 6, Kel. Pamoyanan, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur, Jawa Barat. Telp: (0263) 284648 Fax : (0263) 284677
KC SUKABUMI Jl. Jend. Sudirman Blok 112 RT 05 RW 001, Kel. Benteng, Kec. Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Telp: (0266) 243888, 243897 Fax : (0266) 243898	KC GARUT Jl. Ciledug No. 148-149, Kel. Kota Kulon, Kec. Garut Kota, Kab. Garut, Jawa Barat. Telp: (0262) 243689, 243692 Fax : (0262) 233137	KC TASIKMALAYA Jl. Sutisna Senjaya No. 74-78, Kel. Empangsari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Telp: (0265) 312995, 312999 Fax : (0265) 311199

Kantor Cabang

KC SEMARANG Jl. Pandanaran No. 90, Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Telp: (024) 3568891, 3568894 Fax : (024) 3568890	KC PURWOKERTO Jl. Jend. Sudirman No. 433, Purwokerto, Jawa Tengah. Telp: (0281) 641108, 641685 Fax : (0281) 625955	KC YOGYAKARTA Jl. Jend. Sudirman No. 42, Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Yogyakarta. Telp: (0274) 555022 Fax : (0274) 555021
KC PEKALONGAN Jl. KH. Wahid Hasyim No. 11A, Kel. Kauman, Kec. Kota Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Telp: (0285) 434911, 434912 Fax : (0285) 434894	KC KUDUS Ruko Ahmad Yani No. 9, Jl. Ahmad Yani, Kab. Kudus, Jawa Tengah. Telp: (0291) 439272 Fax : (0291) 439274	KC TEGAL Jl. Gajahmada No. 90, Tegal, Jawa Tengah. Telp: (0283) 325300, 325301 Fax : (0283) 351460
KC CILACAP Jl. A. Yani No. 97, Cilacap, Jawa Tengah. Telp: (0282) 531015, 531038 Fax : (0282) 535870	KC JEMBER Jl. P. B. Sudirman No. 41-43, Jember, Jawa Timur. Telp: (0331) 411522 Fax : (0331) 411525	KC PATI Jl. P. Sudirman No. 207, Plaza Pati Blok A1-A2, Kel. Pati Lor, Kab. Pati, Jawa Tengah. Telp: (0295) 386699 Fax : (0295) 387799
KC SALATIGA Jl. Diponegoro Ruko Salatiga Square No. 77-A6 dan 77-A7, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Telp: (0298) 328558, 328885 Fax : (0298) 314407	KC KENDAL Jl. Raya Soekarno Hatta No. 325, Kel. Pegulon, Kec. Kendal, Kab. Kendal, Jawa Tengah. Telp: (0294) 388173, 388175 Fax : (0294) 388172	KC SURABAYA Jl. Raya Darmo No. 17, Surabaya, Jawa Timur. Telp: (031) 5674848, 5679842, 5677062 Fax : (031) 5679841
KC PAMEKASAN Jl. KH. Agus Salim No. 3A, Pamekasan, Jawa Timur. Telp: (0324) 331223, 331224, 331225 Fax : (0324) 331218	KC MALANG Jl. Letjen Sutoyo No. 77B, Kel. Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Telp: (0341) 402290 Fax : (0341) 495311	KC MATARAM Jl. Hasanudin No. 40, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Telp: (0370) 644888, 622300, 622700 Fax : (0370) 634999
KC KEDIRI Jl. Hayam Wuruk No. 49, Kediri, Jawa Timur. Telp: (0354) 672000 Fax : (0354) 672105	KC BANYUWANGI Jl. Basuki Rakhmat No. 30, Kel. Singotrunan, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur. Telp: (0333) 418624, 418625, 418626, 418627 Fax : (0333) 418628	KC MADIUN Jl. Agus Salim No. 120, Kel. Nambangan Lor, Kec. Mangunharjo, Kota Madiun, Jawa Timur. Telp: (0351) 454000 Fax : (0351) 458300
KC SIDOARJO Komplek Ruko Sentral Jenggolo A3, Jl. Jenggolo No. 9, Pucang, Sidoarjo, Jawa Timur. Telp: (031) 8946449, 8947231, 8921033, 8922129 Fax : (031) 8957429	KC GRESIK JL. RA. Kartini No. 180, Gresik, Jawa Timur. Telp: (031) 3972053 Fax : (031) 3972065, 3979791	KC BOJONEGORO Jl. Panglima Sudirman No. 99A, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur. Telp: (0353) 892124, 892125 Fax : (0353) 892123

Kantor Cabang

KC BLITAR Jl. Tanjung No. A4-A5, Kel. Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur. Telp: (0342) 816999 Fax : (0342) 816777	KC SURABAYA JEMUR HANDAYANI Jl. Jemur Handayani No. 3, Kel. Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur. Telp: (031) 8411230, 8411250 Fax : (031) 8411260	KC DENPASAR Jl. By Pass Ngurah Rai No. 27 A, Sanur Kaja, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Telp: (0361) 231999 Fax :(0361) 237100
KC KUPANG Jl. Sudirman No. 33, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Telp: (0380) 834100, 823466, 828617 Fax : (0380) 826150	KC BANJARMASIN Jl. Lambung Mangkurat No. 16, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Telp: (0511) 3366408, 3366409 Fax : (0511) 3366426	KC BALIKPAPAN Jl. Jend. Sudirman No. 330, Balikpapan, Kalimantan Timur. Telp: (0542) 413382, 414630 Fax : (0542) 412109
KC PONTIANAK Jl. Sultan Abdurrachman No. 23, Kel. Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Telp: (0561) 745004 Fax : (0561) 744774	KC SAMARINDA Jl. Antasari No. 33 RT 02, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Telp: (0541) 7271271, 7271272, 7271273, 7271274 Fax : (0541) 7271276, 7271277, 7271278	KC KUTAI KARTANEGARA Jl. KH. Akhmad Muksin RT. 01, Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Telp: (0541) 665362, 665365 Fax : (0541) 665017
KC PALANGKARAYA Jl. Ahmad Yani No. 75, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Telp: (0536) 3222223 Fax : (0536) 3227000	KC MARTAPURA Jl. A. Yani KM 40 No. 5, Martapura, Kalimantan Selatan. Telp: (0511) 4722713, 4722755 Fax : (0511) 4722714	KC KETAPANG Jl. R. Soeprapto No. 88, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat. Telp: (0534) 34600 Fax : (0534) 34395
KC BONTANG Jl. MT. Haryono No. 53, Kel. Gunung Elai (d/h Desa Bontang Baru), Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur. Telp: (0548) 20007 Fax : (0548) 25005	KC PANGKALAN BUN Jl. Sukma Arianingrat No. 14, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Telp: (0532) 25624, 25625 Fax : (0532) 25636	KC SAMBAS Jl. Gusti Hamzah No. 41, Dusun Kubu, Desa Durian, Kec. Sambas, Kab. Sambas, Kalimantan Barat. Telp: (0562) 391900 Fax : (0562) 392200
KC TANJUNG Jl. Ir. Pangeran Haji Muhammad Noor No. 12, Desa Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan. Telp: (0526) 2024484 Fax :(0526) 2024494	KC SAMPIT Jl. M. T. Haryono No. 6, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Telp: (0531) 24222 Fax : (0531) 24400	KC SINGKAWANG Jl. Alianyang No. 16 C-D, Kel. Melayu, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Telp: (0562) 639866 Fax : (0562) 639865
KC MAKASSAR Jl. Dr. Ratulangi No. 88 B-C-D, Makassar, Sulawesi Selatan. Telp: (0411) 833070 Fax : (0411) 833069	KC PALU Jl. Wolter Monginsidi No. 77, Palu, Sulawesi Tengah. Telp: (0451) 426222 Fax : (0451) 452108	KC MANADO Kawasan Mega Mas, Jl. Piere Tendean Boulevard Blok I D-1 No. 28, Manado, Sulawesi Utara. Telp: (0431) 879444 Fax : (0431) 879492

Kantor Cabang		
KC GORONTALO Jl. Ahmad Yani No. 127, Gorontalo. Telp: (0435) 828666 Fax : (0435) 830056	KC TERNATE Ruko Jatiland Business Center No. 19-20, Ternate, Maluku Utara. Telp: (0921) 3127220 Fax : (0921) 3127336	KC JAYAPURA Komplek Perniagaan Kelapa Dua - Entrop Jl. Raya Kelapa Dua No. 1-2, Entrop, Jayapura, Papua. Telp: (0967) 550965, 550966 Fax : (0967) 550968
KC BONE Jl. Jend. Ahmad Yani No. 48, Watampone, Kel. Macanang, Kec. Tanette Riattang Barat, Kab. Bone, Sulawesi Selatan. Telp: (0481) 28774 Fax : (0481) 28775	KC LUWUK Jl. Urip Sumoharjo No. 18C dan 18D, Kel. Simpong, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah. Telp: (0461) 21214, 22779 Fax : (0461) 325456	KC MAMUJU Jl. Urip Sumoharjo No. 44, Mamuju, Sulawesi Barat. Telp: (0426) 22651, 2703380 Fax : (0426) 21922
KC AMBON Jl. Pala No. 2, Kel. Uritetu, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Telp: (0911) 344572, 344337 Fax : (0911) 344582	KC KENDARI Jl. Abdullah Silondae No. 137, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Telp: (0401) 3128822, 3128245, 3128897 Fax : (0401) 3127478	KC SORONG Jl. Ahmad Yani No. 21, Sorong, Papua Barat. Telp: (0951) 323366 Fax : (0951) 323360

KANTOR PERWAKILAN

KANTOR PERWAKILAN	
REGION I/ SUMATERA 1 Gedung BSM Lt. 4, Jl. A.Yani No. 100, Medan, Sumatera Utara. Telp: (061) 4534466 Fax : (061) 4534456	REGION II/ SUMATERA 2 Jl. Kapten A. Rivai No. 39, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Telp: (0711) 318902, 318903 Fax :-
REGION III/ JAKARTA Gedung Graha Mandiri Lantai 22, Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat. Telp: (021) 3156369, 2301477, 2302308 Fax : (021) 3904395	REGION IV/ JAWA 1 Jl. Sukajadi No. 215, Kel. Gegerkalong, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Telp: (022) 2038754 Fax : (022) 2041439
REGION V/ JAWA 2 Gedung Bumi Mandiri Tower I Lt. 3, Jl. Jendral Basuki Rahmat No. 129-137, Surabaya, Jawa Timur. Telp: (031) 5610554, 5632255 Fax : (031) 5610556	REGION VI/ KALIMANTAN Jl. Lambung Mangkurat, Kel. Kertak Baru Ulu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Telp: (0511) 3366408, 3366409 Fax : -
REGION VII/ INDONESIA TIMUR Jl. Haji Bau No. 7 E-G, Kel. Losari, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Telp: (0411) 835065 Fax : (0411) 835068	

Keterangan:
Sampai dengan 31 Desember 2019, Mandiri Syariah tidak memiliki Entitas Anak.

INFORMASI YANG TERSEDIA PADA *WEBSITE*

Situs resmi perusahaan yaitu http https://www.mandirisyariah.co.id/. Mandiri Syariah telah melengkapi *website* perusahaan dengan memuat berbagai informasi terkini Perseroan. Selain informasi yang bersifat umum, *website* Perseroan juga memberikan informasi yang lebih spesifik diantaranya sebagai berikut:

1. Struktur korporasi grup Mandiri Syariah.
2. Informasi kepemilikan saham Mandiri Syariah.
3. Profil Direksi dan Dewan Komisaris Mandiri Syariah.
4. Analisa kinerja keuangan.
5. Laporan keuangan tahunan dan triwulanan lebih dari 5(lima) tahun terakhir.
6. Laporan tahunan lebih dari 5 tahun terakhir (yang dapat diunduh).
7. Undangan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa.
8. Keputusan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa.
9. Materi yang disediakan dalam kegiatan briefing dengan Media maupun Analis.
10. Isi Kode Etik

Di tahun 2019, *website* Mandiri Syariah dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat terkait beberapa informasi mengenai BSM. Adapun tampilan menu dikelompokkan menjadi seperti berikut:

Home
Dalam tampilan awal laman *website* Mandiri Syariah, terdapat beberapa menu seperti Mandiri Syariah *Highlight*, Mandiri Syariah *Links*, Solusi Anda *News and Release*, informasi mengenai Kurs Mata Uang Asing yang berlaku dan kalkulator serta menu Mandiri Syariah *Chat*.

Tentang Kami
Menu yang memuat Informasi tentang: Profil Perusahaan, Sejarah, Visi dan Misi, Budaya Perusahaan, *Board* Manajemen, Dewan Pengawas Syariah, Struktur Organisasi, Penghargaan, CSR, GCG, dan *Company Report*. Dalam sub menu GCG menyediakan informasi bagi investor antara lain mengenai GCG Report, Hasil RUPS dan Anggaran Dasar. Sedangkan dalam sub menu *Company Report*, Perseroan telah memuat informasi mengenai Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, *Sustainability Report*, GCG *Report*, Presentasi Perusahaan dan Informasi Kuantitatif Eksposur Risiko.

Consumer
Menu yang memuat Informasi tentang layanan perbankan Mandiri Syariah yang dikhususkan bagi nasabah perorangan seperti:Tabungan, Giro, Deposito, Mandiri Syariah Priority, Pembiayaan Konsumen, Investasi, Emas, Haji dan Umroh, Jasa Produk dan Jasa Operasional.

Bisnis
Menu yang memuat Informasi tentang layanan perbankan Bank Mandiri yang dikhususkan bagi nasabah pelaku bisnis seperti: *Corporate, Commercial, Small Banking,* dan *Micro Banking.*

News* dan *Update
Menu yang memuat Informasi tentang Berita, Siaran Pers dan Edukasi Syariah.

Layanan Nasabah
Menu yang memuat Informasi tentang Laku Pandai Mandiri Syariah, Syarat dan Ketentuan Aisyah, Layanan 24 Jam, Mandiri Syariah Registrasi *Online*, Simulasi, Jaringan, Informasi Kurs, Info Harga Emas, Tips Aman Berinteraksi dan Pengaduan Nasabah.

Promo
Menu yang memuat Informasi tentang Produk dan Video.

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN UNIT AUDIT INTERNAL

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2019, anggota Dewan Komisaris Mandiri Syariah telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama	Pembaruan Sertifikat manajemen Risiko	10 Juni 2019, Jakarta	*Risk Management*, LSPP
		Leadership Forum 2019	10 - 12 Oktober 2019, Magelang	*Leadership*, BSM MSU
		Executive risk management refresher program Batch 3	29 Oktober -7 November 2019, Oslo dan Stockholm	*Leaderrship*, LPPI
Bambang Widianto	Komisaris Independen	Sampai dengan 31 Desember 2019, Beliau tidak mengikuti pengembangan kompetensi/pelatihan.		
Dimas Oky Nugroho*	Komisaris	*Leadership Forum* 2019	10 - 12 Oktober 2019, Magelang	*Leadership*, BSM MSU
Muhammad Kapitra Ampera**	Komisaris Independen	Training for Banking Proffesion - Level 1 Commissioner	7 - 9 November 2019, Jakarta	*Risk Management*, PT Peak Pratama Indonesia
		Ujian Manajemen Risiko Perbankan Level 1 Komisaris	11 November 2019, Jakarta	*Risk Management*, LSPP
		Sertifikasi Perbankan Syariah	18 November 2019, Jakarta	Karim Business Consulting
		Pembekalan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2	19 - 20 November 2019, Jakarta	*Risk Management*, PT Peak Pratama Indonesia
		Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2	23 November 2019, Jakarta	*Risk Management*, BSMR
Dikdik Yustandi***	Komisaris	*Leadership Forum* 2019	10 - 12 Oktober 2019, Magelang	*Leadership*, BSM MSU
Agus Sudiarto****	Komisaris	Sampai dengan 31 Desember 2019, Beliau tidak mengikuti pengembangan kompetensi/pelatihan.		

*Berhenti menjabat sejak tanggal 14 Oktober 2019.
**Berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas fit & proper test.
***Berhenti menjabat sejak tanggal 15 April 2019.
****Berhenti menjabat sejak 1 Oktober 2019.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sepanjang tahun 2019, anggota Dewan Pengawas Syariah Mandiri Syariah tidak mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal. Namun demikian, Dewan Pengawas Syariah Mandiri Syariah telah melakukan kegiatan seminar dengan menjadi Narasumber di berbagai tempat.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Sepanjang tahun 2019, anggota Direksi Mandiri Syariah telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pengembangan Kompetensi Direksi

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
Toni E. B. Subari	Direktur Utama	*Leadership Forum* 2019	10 - 12 Oktober 2019, Magelang	*Leadership*, BSM MSU
Putu Rahwidhiyasa	Direktur Risk Management & Compliance	Pembaruan Sertifikat Manajemen Risiko	10 Juni 2019, Jakarta	*Risk Management,* LSPP
		Online Program *Digital Marketing Strategies*: Data, *Automation*, *Ai & Analytics*	25 Juni 2019, Jakarta	*Information Technology,* BSM MSU
		Leadership Forum 2019	10 - 12 Oktober 2019, Magelang	*Leadership*, BSM MSU
Kusman Yandi	Direktur Whosale Banking	FGD Jasa Kesehatan	27 – 28 Februari 2019, Jakarta	*Finance*, BSM MSU
		Pembaruan Sertifikat Manajemen Risiko	10 Juni 2019, Jakarta	*Risk Management,* LSPP
		Leadership Forum 2019	10 - 12 Oktober 2019, Magelang	*Leadership*, BSM MSU
		London school of management & Leadership	2 – 6 Desember 2019, London	*Leadership*, Euromoney
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance, Strategy & Treasury	*Refreshment* Manajemen Risiko Level 5	18 Juni 2019, Bali	*Leadership*, BSM MSU
		Leadership Forum 2019	10 - 12 Oktober 2019, Magelang	*Leadership*, BSM MSU
Achmad Syafii	Direktur IT, Operation & Digital Banking	Seminar Nasional Teknologi dan Inovasi Untuk Masa Depan Keuangan Islam	..., 2019 Jakarta	Fintech Syariah Indonesia & Komunitas Profesional Peduli Teknologi Keuangan
		International Seminar On Encountering Digital Era of Banking Operation: Challenges and Opportunities	..., 2019 The Mulia Bali, Nusa Dua Bali	OJK
		Business Model Innovation in The Digital Age	..., 2019 Wharton University Philladelphia, USA	University Of Pennsylvania The Wharton School Executive Education
		Executive Development " Business Model Innovation in Digital Era"	30 September - 4 Oktober 2019, Jakarta	*Leadership*, BSM MSU
		Leadership Forum 2019	10 - 12 Oktober 2019, Magelang	*Leadership*, BSM MSU

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
Rosma Handayani*	Direktur Human Capital	English Course for Director	16 Januari – 10 Mei 2019, Jakarta	*General,* BSM MSU
		FGD Jasa Kesehatan	27 – 28 Februari 2019, Jakarta	*Finance*, BSM MSU
		Meet Michigan Ross Alumni Networking, Visit Google HQ, *Apple* HQ	10 - 12 April 2019, San Fransisco dan Las Vegas USA	*Leadership, Michigan Ross*
		Pembekalan Manajemen Risiko level 5	28 Juni 2019, Jakarta	Peak Pratama
		Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Direksi	31 Agustus 2019, Jakarta	*Risk Management,* LPPI
		Refreshment Manajemen Risiko	5 September 2019, Jakarta	*Risk Management,* BSM MSU
		Ujian Manajemen Risiko Level 4	14 September 2019, Jakarta	*Risk Management,* LSPP
		Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3	19 Oktober 2019, Jakarta	*Risk Management,* LSPP
		Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	23 November 2019, Jakarta	*Risk Management,* LSPP
Karya Prasetya Budi	SEVP Wholesale Financing Risk Restructuring & Recovery	English Course for Director	16 Januari – 10 Mei 2019, Jakarta	*General,* BSM MSU
		FGD Jasa Kesehatan	27 – 28 Februari 2019, Jakarta	*Finance*, BSM MSU
		Pembekalan Manajemen Risiko Level 5	28 Juni 2019, Jakarta	*Risk Management,* LSPP
		Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Direksi	31 Agustus 2019, Jakarta	*Risk Management,* LPPI
		Ujian Manajemen Risiko Level 5	7 September 2019, Jakarta	*Risk Management,* LSPP
		Leadership Forum 2019	10 - 12 Oktober 2019, Magelang	*Leadership*, BSM MSU
		London school of management & Leadership	2 – 6 Desember, London	*Leadership*, Euromoney
Niken Andonowarih	SEVP	English Course for Director	16 Januari – 10 Mei 2019, Jakarta	*General,* BSM MSU
		FGD Jasa Kesehatan	27 – 28 Februari 2019, Jakarta	*Finance*, BSM MSU
		Pembaruan Sertifikat Manajemen Risiko	10 Juni 2019, Jakarta	*Risk Management,* LSPP
		Leadership Forum 2019	10 - 12 Oktober 2019, Magelang	*Leadership*, BSM MSU
Nury Sriandajani	SEVP Retail Financing Risk Restructuring & Recovery	English Course for Director	16 Januari – 10 Mei 2019, Jakarta	*General,* BSM MSU
		FGD Jasa Kesehatan	27 – 28 Februari 2019, Jakarta	*Finance*, BSM MSU
		Leadership Forum 2019	10 - 12 Oktober 2019, Magelang	*Leadership*, BSM MSU

* Berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas *fit & proper test*

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2019, anggota Komite Audit Mandiri Syariah yang telah mengikuti berbagai program kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
Mulya Effendi Siregar	Ketua	Pengembangan Kompetensi dapat dilihat di Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris		
Bambang Widianto	Anggota	Pengembangan Kompetensi dapat dilihat di Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris		
Dimas Oky Nugroho*	Anggota	Pengembangan Kompetensi dapat dilihat di Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris		
Dikdik Yustandi**	Anggota	Pengembangan Kompetensi dapat dilihat di Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris		
Agus Sudiarto***	Anggota	Pengembangan Kompetensi dapat dilihat di Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris		
Djoko Seno Adji	Anggota	*Leadership Forum* 2019	10 - 12 Oktober 2019, Magelang	*Leadership*, BSM MSU
Kayim Hanuri****	Anggota	*Leadership Forum* 2019	10 - 12 Oktober 2019, Magelang	*Leadership*, BSM MSU
Saifuddin Latief*****	Anggota	*Leadership Forum* 2019	10 - 12 Oktober 2019, Magelang	*Leadership*, BSM MSU

*) Masa tugas sebagai Komisaris Independen Mandiri Syariah berakhir sejak tanggal 14 Oktober 2019.
**)Masa tugas sebagai Komisaris Mandiri Syariah berakhir sejak tanggal 15 April 2019.
***)Masa tugas sebagai Komisaris Mandiri Syariah berakhir sejak tanggal 1 Oktober 2019.
****)Berakhir masa kerjanya sebagai anggota Komite Audit dari Pihak Independen pada tanggal 15 Februari 2019.
*****)Memulai masa kerjanya sebagai anggota Komite Audit dari Pihak Independen sejak tanggal 15 Februari 2019.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Sepanjang tahun 2019, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Mandiri Syariah telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
Bambang Widianto	Ketua	Pengembangan Kompetensi dapat dilihat di Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris		
Mulya Effendi Siregar	Anggota	Pengembangan Kompetensi dapat dilihat di Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris		
Dikdik Yustandi*	Anggota	Pengembangan Kompetensi dapat dilihat di Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris		
Dimas Oky Nugroho**	Anggota	Pengembangan Kompetensi dapat dilihat di Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris		
Agus Sudiarto***	Anggota	Pengembangan Kompetensi dapat dilihat di Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris		
Andang Lukitomo	Sekretaris	Sampai dengan 31 Desember 2019, Beliau tidak mengikuti pengembangan kompetensi/pelatihan.		

*Berakhir masa jabatan sebagai Komisaris Mandiri Syariah pada tanggal 15 April 2019.
**Berakhir masa jabatan sebagai Komisaris Independen Mandiri Syariah pada tanggal 14 Oktober 2019.
***Berakhir masa jabatan sebagai Komisaris Mandiri Syariah pada tanggal 1 Oktober 2019.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Sepanjang tahun 2019, anggota Komite Pemantau Risiko Mandiri Syariah telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
Mulya Effendi Siregar	Ketua	Pengembangan Kompetensi dapat dilihat di Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris		
Bambang Widianto	Anggota	Pengembangan Kompetensi dapat dilihat di Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris		
Dimas Oky Nugroho*	Anggota	Pengembangan Kompetensi dapat dilihat di Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris		
Dikdik Yustandi**	Anggota	Pengembangan Kompetensi dapat dilihat di Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris		
Agus Sudiarto***	Anggota	Pengembangan Kompetensi dapat dilihat di Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris		
Hari Dewanto****	Anggota	Sampai dengan 31 Desember 2019, Beliau tidak mengikuti pengembangan kompetensi/pelatihan.		
Kayim Hanuri	Anggota	Pengembangan Kompetensi dapat dilihat di Pengembangan Kompetensi Komite Audit		

*) Masa tugas sebagai Komisaris Independen berakhir sejak tanggal 22 Oktober 2019.
**) Masa tugas sebagai Komisaris berakhir sejak tanggal 15 April 2019.
***) Masa tugas sebagai Komisaris berakhir sejak tanggal 1 Oktober 2019.
****) Berakhir masa kerjanya sebagai anggota Komite Pemantau dari Pihak Independen pada tanggal 30 Juni 2019.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2019, Sekretaris Perusahaan Mandiri Syariah telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Nama	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
Ahmad Reza	*Certificate 4th Annual Islamic Finance Conference*	24 – 25 Juli 2019, Surabaya	Kementerian Keuangan Republik Indonesia
	Influential Communication and Professional Total Look (Grooming)	4 Oktober, Bogor	Talk Inc

PENGEMBANGAN KOMPETENSI UNIT INTERNAL AUDIT

Sepanjang tahun 2019, Unit Internal Audit Mandiri Syariah telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pengembangan Kompetensi Unit Internal Audit

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
Cipto Mugiharjo	Special Audit Department Head	*Workshop* Teknik Investigasi (Lanjutan)	Januari, Jakarta	*Management,* Bank Mandiri
Agus Setiyo Budi	Wholesale Audit Department Head	*English Course*	Januari, Jakarta	*General,* MSU & English Today
Suharto	Internal Audit Group Head	Design Thinking for Internal Auditor	Februari, Bogor	*Management,* MSU & BINUS
Donny Eko Nugroho	Consumer & Distribution Audit Department Head	*Design Thinking for Internal Auditor*	Februari, Bogor	*Management,* MSU & BINUS
Agus Setiyo Budi	Wholesale Audit Department Head	*Design Thinking for Internal Auditor*	Februari, Bogor	*Management,* MSU & BINUS
Cipto Mugiharjo	Special Audit Department Head	*Design Thinking for Internal Auditor*	Februari, Bogor	*Management,* MSU & BINUS
Amri Bustami	Retail & Distribution Audit Department Head	*Design Thinking for Internal Auditor*	Februari, Bogor	*Management,* MSU & BINUS
Widya Setyadi	Head Office Audit Department Head	*Design Thinking for Internal Auditor*	Februari, Bogor	*Management,* MSU & BINUS
Asep Nana Heryana	Audit Development & Counterpart Relation Department Head	*Design Thinking for Internal Auditor*	Februari, Bogor	*Management,* MSU & BINUS
Suharto	Internal Audit Group Head	*Workshop* Teknikal Kompetensi	Februari, Jakarta	*Management,* MSU
Agus Setiyo Budi	Wholesale Audit Department Head	*Workshop* Teknikal Kompetensi	Februari, Jakarta	*Management,* MSU
Agus Setiyo Budi	Wholesale Audit Department Head	*Change Agent Empowerment*	November, Jakarta	*General,* MSU
Cipto Mugiharjo	Special Audit Department Head	*Workshop* Penyusunan PTO Investigasi	April, Bogor	*Operations,* DCOR
Cipto Mugiharjo	Special Audit Department Head	*Workshop Control Testing*	April, Bogor	*Operations,* DCOR
Donny Eko Nugroho	Consumer & Distribution Audit Department Head	*Workshop Control Testing*	April, Bogor	*Operations,* DCOR
Suharto	Internal Audit Group Head	IT *Audit For Banking & Financial Institution*	Maret, Jakarta	*Information Technology,* Infobank
Agus Setiyo Budi	Wholesale Audit Department Head	*Leadership Development Program*	Maret, Jakarta	*Leadership,* CCL
Asep Nana Heryana	Audit Development & Counterpart Relation Department Head	*Fraud Risk Assessment*	Maret, Jakarta	*Operations,* Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)
Suharto	Internal Audit Group Head	KSF Wakalah Bil Istismar	Mei, Jakarta	*Credit,* MSU
Suharto	Internal Audit Group Head	*Refreshment* PMP *Batch* 1	Juli, Jakarta	*Leadership,* MSU
Suharto	Internal Audit Group Head	*Highlight Issues* Implementasi GCG di Indonesia	Agustus, Bali	*Operations,* Eksternal
Agus Setiyo Budi	Wholesale Audit Department Head	*Sharing Session Suistanable Finanace*	Agustus, Jakarta	*General,* MSU

Nama	Jabatan	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
Suharto	Internal Audit Group Head	Masa Persiapan Pensiun	Agustus,Yogyakarta	*Leadership,* MSU
Asep Nana Heryana	Audit Development & Counterpart Relation Department Head	*Learning Need Analysist* (LNA) 2020	Oktober, Jakarta	*General,* MSU
Suharto	Internal Audit Group Head	Tindak Lanjut *Coaching Leadership Style*	Oktober, Jakarta	*Leadership,* MSU
Suharto	Internal Audit Group Head	*Coaching Style Leadership Online*	November, *Online*	*Leadership,* MSU
Widya Setyadi	Head Office Audit Department Head	*Workshop* SPOHC	November, Jakarta	*General,* MSU dan HCP
Amri Bustami	Retail & Distribution Audit Department , Jakarta Head	*Workshop* Revitalisasi MP Griya	November, Jakarta	*Operations,* MSU
Suharto	Internal Audit Group Head	*Workshop* Program Pembelajaran Mandiri Syariah University Tahun 2020	Desember, Jakarta	*General,* MSU
Asep Nana Heryana	Audit Development & Counterpart Relation Department Head	Forum DH	September, Jakarta	*General,* MSU
Widya Setyadi	Head Office Audit Department Head	Forum DH	September, Jakarta	*General,* MSU
Amri Bustami	Retail & Distribution Audit Department Head	Forum DH	September, Jakarta	*General,* MSU
Cipto Mugiharjo	Special Audit Department Head	Forum DH	September, Jakarta	*General,* MSU
Agus Setiyo Budi	Wholesale Audit Department Head	Forum DH	September, Jakarta	*General,* MSU
Donny Eko Nugroho	Consumer & Distribution Audit Department Head	Forum DH	September, Jakarta	*General,* MSU
Agus Setiyo Budi	Wholesale Audit Department Head	*Knowledge Sharing Executive Islamic Economic Updates*	September, Jakarta	*General,* MSU
Widya Setyadi	Head Office Audit Department Head	*Knowledge Sharing Executive Islamic Economic Updates*	September, Jakarta	*General,* MSU
Asep Nana Heryana	Audit Development & Counterpart Relation Department Head	*Knowledge Sharing Executive Islamic Economic Updates*	September, Jakarta	*General,* MSU

mandiri
syariah

mandiri
syariah

mandiri syariah

ANALISIS DAN
PEMBAHASAN MANAJEMEN

TINJUAN PEREKONOMIAN

Analisis Perekonomian Global

Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan turun dari 3,6% pada 2018 menjadi hanya 3,0% pada 2019. Perang dagang telah menurunkan pertumbuhan ekonomi AS dari 2,9% pada tahun 2018 menjadi 2,3% pada tahun 2019. Ekspor AS mengalami tekanan sehingga berdampak pada permintaan domestik, terutama investasi nonresidensial dan konsumsi rumah tangga. Demikian halnya dengan Tiongkok, ekspor dan investasi berdampak pada pertumbuhan ekonomi Tiongkok diperkirakan menurun dari 6,6% pada tahun 2018 menjadi 6,2% pada 2019. Pertumbuhan ekonomi di Eropa, Jepang, India, dan banyak negara juga mengalami tekanan. Pelonggaran kebijakan moneter berupa penurunan suku bunga dan ekspansi neraca bank sentral di berbagai negara belum mampu mencegah perlambatan ekonomi dunia. Sementara itu perkembangan pasar keuangan global mengindikasikan ketidakpastian mereda sehingga aliran masuk modal asing ke negara berkembang berlanjut. Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi dunia berpotensi membaik, meskipun risiko ketegangan hubungan dagang AS-Tiongkok dan kondisi geopolitik perlu terus dicermati karena dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik dan arus masuk modal asing.

Sumber: Tinjauan Kebijakan Moneter Desember 2019, Bank Indonesia (BI); World Economic Outlook (WEO) Oktober 2019, International Monetary Fund (IMF).

Analisis Perekonomian Nasional

Di tengah melemahnya perekonomian global, pertumbuhan ekonomi domestik tercatat sebesar 5,1% (YoY). Konsumsi rumah tangga menopang daya tahan pertumbuhan ekonomi domestik. Investasi bangunan tumbuh sejalan dengan pembangunan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional. Sementara itu, ekspor masih belum kuat akibat permintaan dan harga komoditas global yang menurun, yang berpengaruh pada menurunnya impor dan melemahnya investasi non bangunan. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat di berbagai wilayah dan pertumbuhan investasi yang tetap baik terkait proyek strategis nasional di Sulawesi, Kalimantan, dan Jawa. Kinerja ekspor di beberapa daerah juga membaik, antara lain ekspor manufaktur seperti otomotif dari Jawa dan besi baja dari Sulawesi.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) 2019 diperkirakan *surplus* dipengaruhi aliran masuk modal asing dan defisit transaksi berjalan yang menurun. Nilai tukar Rupiah menguat 2,03% (YtD), didukung oleh pasokan valas dari eksportir dan aliran masuk modal asing. Inflasi tahun 2019 terkendali pada level yang rendah sebesar 2,72% (YoY), lebih rendah dari 2018, sebesar 3,13% (YoY). Inflasi yang rendah didorong oleh menurunnya inflasi inti, permintaan agregat yang terkelola baik, nilai tukar yang bergerak sesuai dengan fundamentalnya, serta pengaruh harga global yang minimal.

Sumber: Tinjauan Kebijakan Moneter Desember 2019, Bank Indonesia (BI)

Analisis Industri Perbankan Nasional

Stabilitas industri perbankan tetap terjaga disertai risiko kredit yang terkendali. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) tetap tinggi mencapai 23,4% dan rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*/NPL) tetap rendah yaitu sebesar 2,73% (*gross*) atau 1,25% (*net*). Likuiditas perbankan juga tetap baik, tercermin dari rasio likuiditas (Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga - AL/DPK) masih aman yakni sebesar 18,44% pada Oktober 2019. Dari fungsi intermediasi perbankan, pertumbuhan kredit 2019 sebesar 6,5% (YoY), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2018 sebesar 13,4% (YoY). Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) 2019 tumbuh sebesar 6,3% (YoY), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan 2018 sebesar 7,6% (YoY).

Sumber: Tinjauan Kebijakan Moneter Desember 2019, Bank Indonesia (BI); Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Analisis Industri Perbankan Syariah

Aset perbankan syariah 2019 mencapai Rp499,98 triliun, tumbuh 10,07% (YoY). Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, pangsa pasar aset perbankan syariah terhadap perbankan nasional mencapai 5,99%. Penghimpunan DPK perbankan syariah 2019 mencapai Rp402,36 triliun, tumbuh 13,05% (YoY). Pangsa pasar DPK perbankan syariah terhadap DPK perbankan nasional sebesar 6,81%. Dari sisi pembiayaan, pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah telah mencapai

Rp345,28 triliun, tumbuh 10,36% (YoY). Pangsa pasar pembiayaan perbankan syariah terhadap perbankan nasional sebesar 6,27%. Sementara itu, kualitas pembiayaan perbankan syariah yang tercermin dari rasio *Non Performing Financing* (NPF) *gross* meningkat dari 2,85% di akhir tahun 2018 menjadi 3,18% di 2019.

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Oktober 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Analisis Posisi Mandiri Syariah Dalam Industri Perbankan

Perbandingan kinerja Mandiri Syariah terhadap perbankan syariah dan perbankan umum disajikan sebagai berikut.

Tabel Kinerja Pertumbuhan Perbankan Syariah, Perbakan Umum dan Mandiri Syariah Per Oktober 2019

(dalam %)

Indikator	Industri Perbankan	Perbankan Syariah	Mandiri Syariah
Aset	5,93	10,07	11,61
Pembiayaan	6,53	10,36	10,77
Dana Pihak Ketiga	6,29	13,05	11,42
Ekuitas	11,40	9,98	31,33
Laba Bersih	6,05	23,89	99,67

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (SPS OJK), Oktober 2019

Pertumbuhan aset Mandiri Syariah mencapai 11,61% (YoY), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset perbankan umum sebesar 5,93% (YoY). Di sisi lain, pembiayaan Mandiri Syariah tumbuh 10,77% (YoY) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan perbankan syariah dan perbankan umum masing-masing sebesar 10,36% (YoY) dan 6,53% (YoY). Sedangkan pendanaan/dana pihak ketiga Mandiri Syariah tumbuh mencapai 11,42% (YoY), lebih tinggi dibandingkan perbankan umum sebesar 6,29%. Namun, pertumbuhan dana pihak ketiga Mandiri Syariah masih lebih rendah dibandingkan perbankan syariah sebesar 13,05% (YoY). Laba bersih Mandiri Syariah tumbuh 99,67% (YoY) jauh lebih tinggi dibandingkan perbankan syariah sebesar 23,89% (YoY) dan perbankan umum sebesar 6,05% (YoY).

Grafik Pertumbuhan Kinerja Industri Perbankan, Perbankan Syariah dan Mandiri Syariah Per Oktober 2019

(dalam %)

Aset

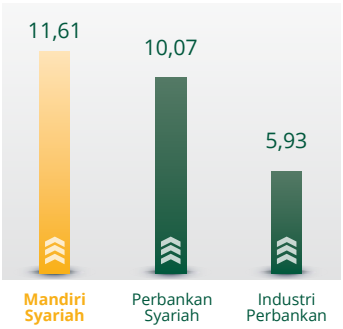

Pembiayaan

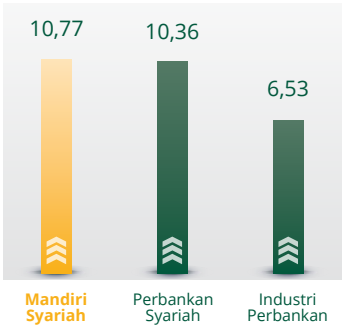

Dana Pihak Ketiga

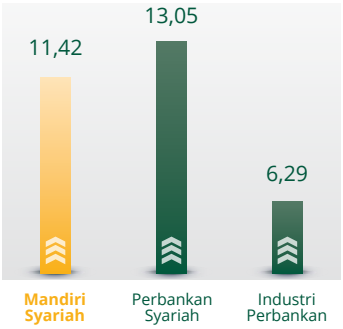

Ekuitas

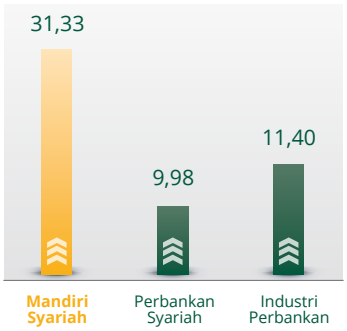

Laba bersih

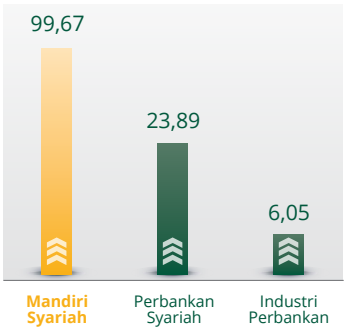

TINJAUAN OPERASIONAL

Kegiatan usaha yang dilakukan Mandiri Syariah adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan serta memberikan layanan jasa perbankan lainnya. Mandiri Syariah telah menetapkan strategi yang tepat sehingga kinerja Bank mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Strategi Bank Tahun 2019

Mandiri Syariah memiliki strategi jangka pendek, jangka panjang dan strategi utama yang bertujuan untuk mencapai target bisnis sesuai dengan komitmen dan pertumbuhan bisnis yang sustain dalam jangka panjang, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengembangan strategi bisnis menyesuaikan dengan potensi dan prospek bisnis pada tahun 2019, serta mempertimbangkan kemampuan internal Mandiri Syariah.

Arah Kebijakan Jangka Pendek

Arah kebijakan jangka pendek tahun 2019 Mandiri Syariah adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan 5 (lima) fokus strategi Mandiri Syariah, yaitu:
   - Pertumbuhan Bisnis yang Sehat dan Sustain
   - Kualitas Pembiayaan
   - *Fee Based Income*
   - Produktivitas dan Efisiensi
   - *Contribution Margin*
2. Melakukan perbaikan fundamental melalui penajaman struktur organisasi, penguatan budaya (*culture*) dan penajaman target segmen termasuk *business model*.
3. Peningkatan sistem dan infrastuktur IT untuk mendukung pertumbuhan bisnis.
4. Memperkuat *positioning* Mandiri Syariah untuk dana murah terutama tabungan.
5. Mencapai NPF *gross* di bawah 3,2% melalui penyaluran pembiayaan sesuai *target market*, implementasi *watchlist*, *vintage analysis*, *early restructuring*.
6. Peningkatan *Fee Based Income* melalui produk-produk yang memiliki potensi besar seperti umroh, gadai, *e-channel*, Forex Saudi Arabian Riyal (SAR).
7. Optimalisasi sinergi jaringan dan bisnis dengan Mandiri *Group*.

Strategi bisnis tersebut kemudian dijabarkan dalam program kerja utama di tahun 2019. Adapun program kerja adalah untuk mendukung pengembangan bisnis di tahun 2019 yang memiliki fokus pada pembiayaan dan dana murah segmen retail. Program kerja tahun 2019 Mandiri Syariah adalah sebagai berikut:

1. Fokus pada pertumbuhan segmen *Retail* dengan target pertumbuhan sebesar 11,41% dan *Wholesale* sebesar 9,7%.
2. Fokus pada pertumbuhan tabungan sebesar 10% dengan porsi *low cost fund* sebesar 52,95%.
3. Memperbaiki kualitas pembiayaan dengan *Non Performing Financing* (NPF) <3,2% melalui upaya restrukturisasi, optimalisasi *collection* nasabah NPF dan *recovery* nasabah *ex write Off* (WO).
4. Memperkuat fungsi tiga pilar (bisnis, *risk* dan operasional) dalam penyaluran pembiayaan termasuk disiplin *monitoring* terhadap nasabah *watchlist*.
5. Meningkatkan *fee based income* melalui layanan berbasis transaksi dan teknologi (ATM, *e-Channel* dan *cash management*) dan fokus pada produk yang berbasis *fee* (gadai, penjualan Saudi Arabian Riyal, *trade* dan bank garansi).
6. Menerapkan *integrated sales* untuk segmen *retail*.
7. Memperbaiki sistem IT untuk mendukung pertumbuhan bisnis.
8. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM serta memperkuat *culture* di seluruh jajaran organisasi.
9. Meningkatkan penerapan *contribution margin* dalam rangka efektivitas penilaian kinerja.
10. Menurunkan *cost of credit* dan pengendalian biaya (*cost control*).

Arah Kebijakan Jangka Menengah

Arah kebijakan jangka menengah yang dilakukan oleh Mandiri Syariah pada tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut.

1. Fokus bisnis ke arah pengembangan bisnis *retail* yaitu *Consumer*, Gadai dan UMKM serta bisnis *Wholesale* pada segmen Korporasi khususnya BUMN dan swasta besar yang *bonafide*, dengan komposisi portofolio *Retail* 65% dan *Wholesale* 35%.
2. Mempertahankan posisi sebagai *market leader* di perbankan syariah melalui pertumbuhan yang sehat dan berkesinambungan.
3. Menyiapkan permodalan yang kuat antara lain melalui *strategic partner*, *strategic investor* dan/atau pasar modal.
4. Meningkatkan produktivitas pegawai melalui peningkatan kompetensi dan meningkatkan efisiensi melalui perubahan bisnis proses.
5. Mengakselerasi implementasi sistem IT untuk mengantisipasi perkembangan *financial technology*.

Strategi Utama Bank

Strategi yang akan dijalankan untuk mencapai aspirasi bank tersebut terdiri dari 3 (tiga) strategi utama, yaitu:

1. ***Business Refocusing***
   Pada pilar *business refocusing*, Bank menentukan Segmen *Consumer* menjadi *main core* perusahaan, Segmen *Corporate* menjadi *second core* yang pada akhirnya tetap mendukung pertumbuhan *Retail Banking*.

2. ***Fixing the Fundamental***
   Pada pilar *fixing the fundamental*, hal yang Mandiri Syariah lakukan yaitu:
   1. Penyesuaian struktur organisasi baik kantor pusat, kanwil maupun area.
   2. Implementasi: *Refining Business Process* dan *Business Model*, *Simplification Product*, Perbaikan Nota Analisa Pembiayaan dan *Customer Base Information* (*Big Data*).
   3. Program efisiensi dan peningkatan produktivitas.

3. ***Strengthen Enablers***
   Pada Pilar *Strengthen Enablers*, Bank melakukan peningkatan *capability* dan kompetensi sumber daya manusia, penguatan *culture*, peningkatan informasi dan teknologi dan terus memperkuat sinergi antar Perusahaan *Group* Bank Mandiri.

Bank telah memperkuat budaya kerja (*culture*) di seluruh jajaran organisasi termasuk budaya *anti fraud* serta penguatan *internal control*. Langkah yang telah dilakukan antara lain melakukan penajaman kembali nilai-nilai *ethic* sesuai dengan kondisi industri perbankan saat ini, agar Mandiri Syariah makin kompetitif dan mampu mencapai aspirasi visi Mandiri *Group* yang menghasilkan *shared values* dengan definisi operasional yang mudah untuk diimplementasikan. Selanjutnya *shared values* tersebut diimplemetasikan pada perilaku utama, berupa perilaku *do and don't* dan *action plan* dalam implementasi budaya kerja (*culture*).

Adapun *detail* masing-masing strategi utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

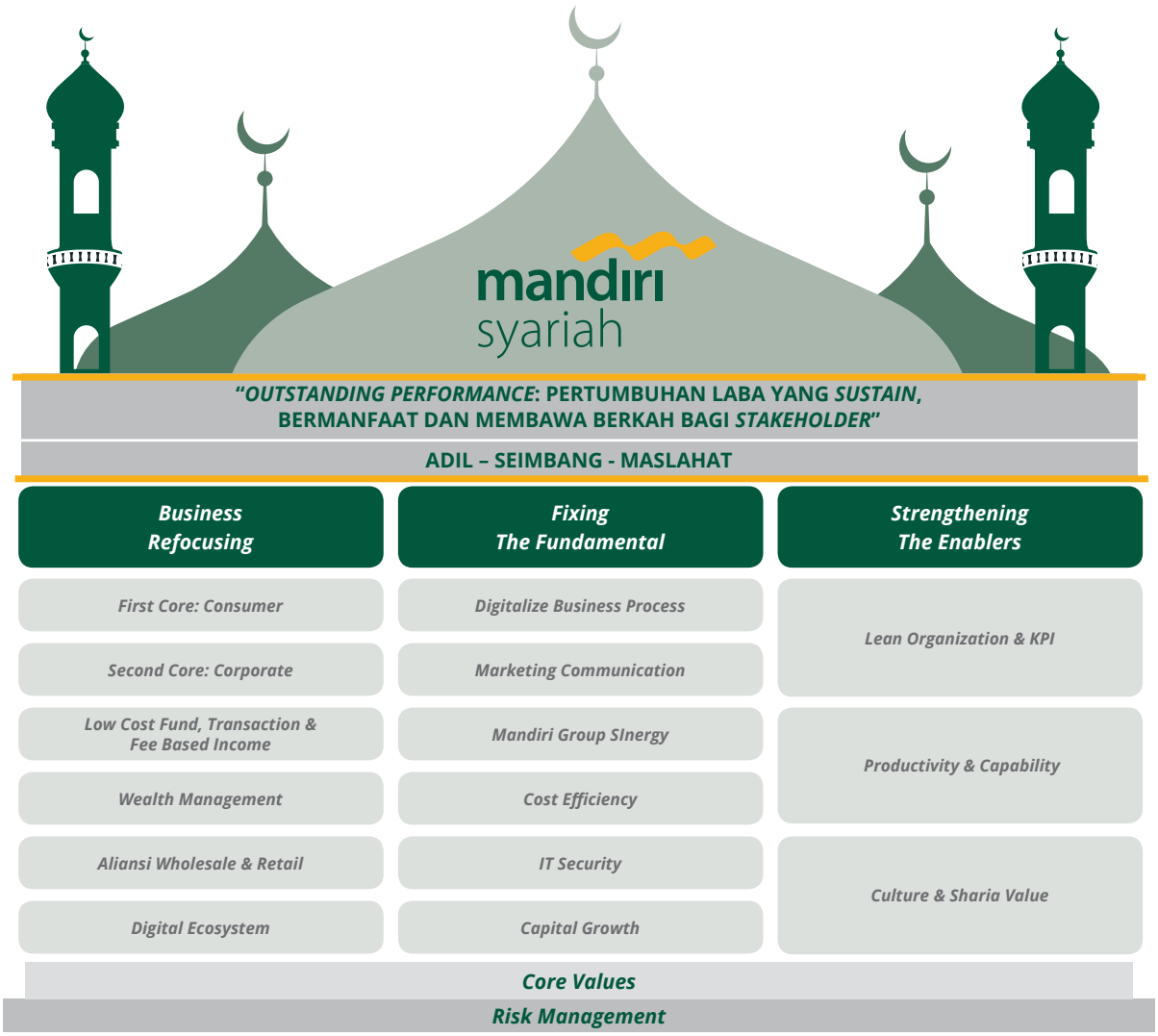

Pada tahun 2019, Mandiri Syariah telah mengimplementasikan 10 (sepuluh) inisiatif strategis sebagai berikut:

Tabel 10 (sepuluh) Inisiatif Strategis

No.	*Programs*	Keterangan
1	*Retail Business Strategy*	Mengimplementasikan akusisi nasabah melalui strategi komunitas.
2	*Stramline Business Process*	Mengimplementasikan *Retail Financing Process.*
3	*Capital Strategy*	Menyusun persiapan untuk melaksanakan *Initial Public Offering.*
4	*Branch Operational Strategy*	Membuat model layanan cabang dengan konsep *digital branch.*
5	*Human Capital Strategy*	Memberikan *reward* kepada karyawan yang memiliki kontribusi optimal dan memberikan pelatihan serta *refreshment* secara rutin kepada karyawan di Mandiri Syariah University ataupun tempat lainnya.
6	*Integrate With Mandiri Group*	Bekerjasama dengan Mandiri Utama Finance untuk pembiayaan segmen retail konsumer.
7	*Wholesale Banking Strategy*	Mengembangkan *New Cash Management System* dan *Trade Service System.*
8	*Digital Banking Strategy*	Mengimplementasikan *digital* wakaf.
9	*Sharia Sustainable Finance*	Membuat rencana aksi keuangan berkelanjutan (RAKB).
10	*Operational Risk*	Melakukan penguatan bisnis proses melalui revitalisasi proses bisnis ritel dan *enhance financing originating system.*

Aspek Pemasaran

Sebagai entitas bisnis, aspek pemasaran merupakan faktor penting yang dapat menjadi kunci keberhasilan bagi Mandiri Syariah dalam memetakan pangsa pasar. Selain itu, dengan mengenali aspek tersebut Mandiri Syariah juga dapat menganalisa dan menyusun strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan pasar agar hal tersebut dapat berjalan sukses. Berikut penjelasan mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar yang dilakukan oleh Mandiri Syariah.

Strategi Pemasaran

Pada tahun 2019 Mandiri Syariah menetapkan dua bentuk strategi yaitu strategi fokus segmen dan memperluas sinergi Mandiri *Group* yang disajikan sebagai berikut:

a. Strategi Fokus Segmen
   Sesuai SPO segmentasi nasabah yang berlaku sejak tahun 2017 Mandiri Syariah menetapkan dua segmen yakni *Retail* dan *Wholesale* dari sisi pembiayaan maupun pendanaan. Untuk segmen Pembiayaan terdiri atas: Retail (*Micro Business, Business Banking,* dan *Consumer*), *Commercial*, serta *Corporate*. Adapun dari sisi pendanaan maka segmentasi dibedakan atas *Retail* (*Micro Business*, *Business Banking*, dan *Retail* Perorangan), *Commercial*, serta *Corporate*.

b. Memperluas Sinergi Mandiri Group
   Sebagai bagian dari Mandiri *Group*, Bank menjalin sinergi dengan Mandiri *Group* untuk perluasan pasar di antaranya:
   - Mandiri Tunas Finance: Pembiayaan Kendaraan Syariah
   - Mandiri AXA: Produk *Bancassurance* Syariah
   - Bank Mantap: Produk Gadai dan Cicil Emas
   - Bank Mandiri: Pembiayaan *Wholesale*, Layanan Syariah Bank
   - Mandiri Sekuritas: Tabungan Saham Syariah
   - Mandiri Investasi: Produk Reksadana Syariah
   - Mandiri Inhealth: Produk Asuransi Kesehatan

PANGSA PASAR

Mandiri Syariah sebagai Bank Syariah, secara khusus menghadapi persaingan dengan seluruh Perbankan Syariah dan Industri Perbankan di Indonesia dalam menentukan penguasaan pasar. Persaingan usaha tersebut antara lain dapat dilihat berdasarkan aset, pembiayaan, pendanaan/dana pihak ketiga (DPK).

Tabel Pangsa Pasar Mandiri Syariah dibandingkan dengan Perbankan Syariah

(dalam miliar Rupiah)

Pangsa Pasar Perbankan Syariah	Uraian	2019	2018	Pertumbuhan
ASET	Bank Syariah Mandiri	104.583	93.701	11,61%
	Perbankan Syariah	499.981	454.249	10,07%
	Pangsa Pasar	20,92%	20,63%	1,40%
PEMBIAYAAN	Bank Syariah Mandiri	73.300	66.172	10,77%
	Perbankan Syariah	345.284	312.879	10,36%
	Pangsa Pasar	21,23%	21,15%	0,38%
PENDANAAN/DPK	Bank Syariah Mandiri	92.290	82.834	11,42%
	Perbankan Syariah	402.356	355.919	13,05%
	Pangsa Pasar	22,94%	23,27%	(1,44%)

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (SPS OJK), Oktober 2019

Berdasarkan jumlah aset yang dimiliki penguasaan pangsa pasar Mandiri Syariah Oktober 2019 mencapai 20,92% mengalami peningkatan sebesar 1,40% dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 20,63%. Dari sisi pembiayaan pangsa pasar Mandiri Syariah Oktober 2019 naik tipis dari 21,15% di Oktober 2018 ke 21,23%. Sedangkan untuk pangsa pasar pendanaan/dana pihak ketiga pada Oktober 2019 mencapai 23,94% turun dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 23,27%, meskipun sedikit mengalami penurunan namun total pendanaan Mandiri Syariah mengalami peningkatan sebesar 11,42%. Kenaikan pangsa pasar merupakan penerapan dari strategi yang efektif yang dilakukan oleh Mandiri Syariah.

Diagram Pangsa Pasar Mandiri Syariah dibandingkan dengan Perbankan Syariah Oktober 2019

(dalam %)

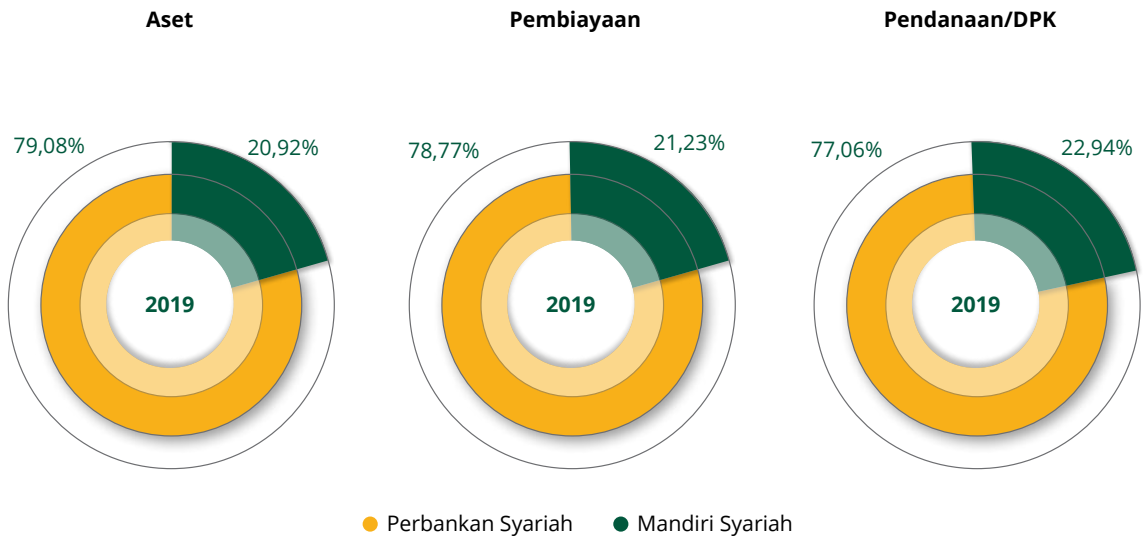

Diagram Pangsa Pasar Mandiri Syariah dibandingkan dengan Perbankan Syariah Oktober 2018

(dalam %)

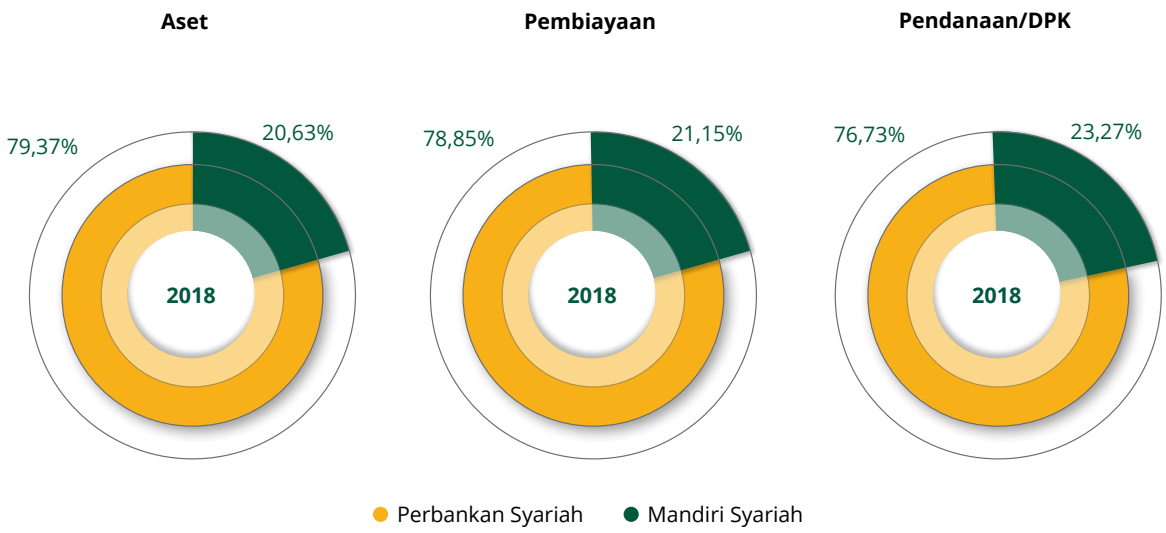

Tabel Pangsa Pasar Mandiri Syariah dibandingkan dengan Industri Perbankan

(dalam miliar Rupiah)

Pangsa Pasar Industri Perbankan	Uraian	2019	2018	Pertumbuhan
ASET	Bank Syariah Mandiri	104.583	93.701	11,61%
	Industri Perbankan	8.344.887	7.877.830	5,93%
	Pangsa Pasar	1,25%	1,19%	5,37%
PEMBIAYAAN	Bank Syariah Mandiri	73.300	66.172	10,77%
	Industri Perbankan	5.506.161	5.168.778	6,53%
	Pangsa Pasar	1,33%	1,28%	3,98%
PENDANAAN/DPK	Bank Syariah Mandiri	92.290	82.834	11,42%
	Industri Perbankan	5.904.118	5.554.526	6,29%
	Pangsa Pasar	1,56%	1,49%	4,82%

Di tengah ketatnya persaingan di industri perbankan, Mandiri Syariah juga menghadapi persaingan dengan seluruh Bank Konvensional (Industri Perbankan) di Indonesia. Berdasarkan jumlah aset, pembiayaan, dan jumlah pendanaan/dana pihak ketiga pangsa pasar pada Oktober 2019 masing-masing sebesar 1,25%, 1,33% dan 1,56% mengalami pertumbuhan dibandingkan periode sebelumya sebesar 1,19%, 1,28%, dan 1,49%. Pencapaian tersebut menunjukkan keberhasilan Mandiri Syariah dalam menjaga kinerja operasional.

Diagram Pangsa Pasar Mandiri Syariah dibandingkan dengan Industri Perbankan Oktober 2019

(dalam %)

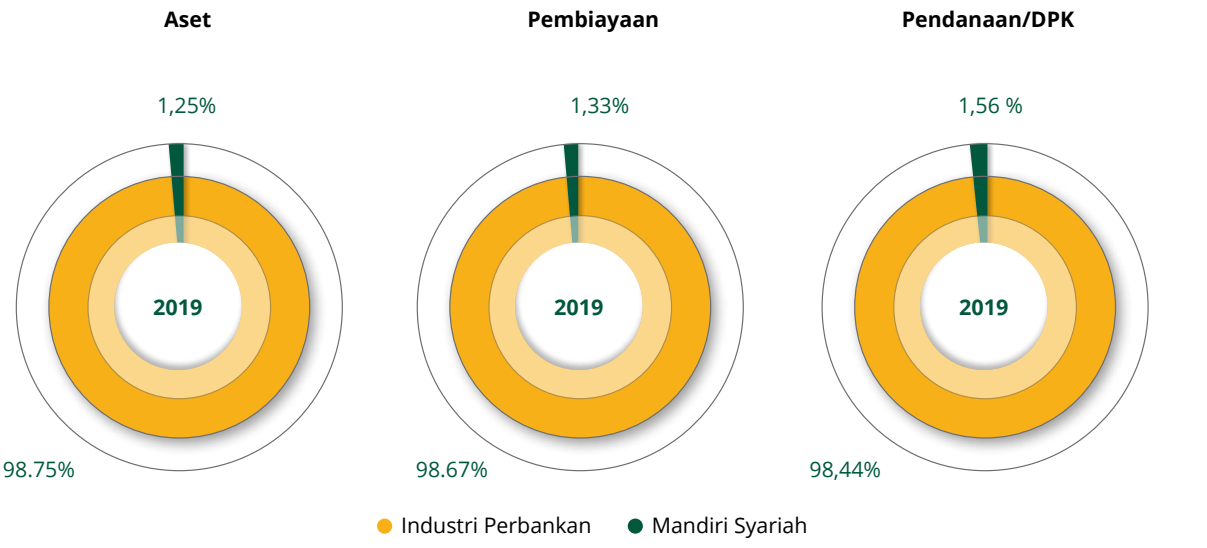

Diagram Pangsa Pasar Mandiri Syariah dibandingkan dengan Industri Perbankan Oktober 2018

(dalam %)

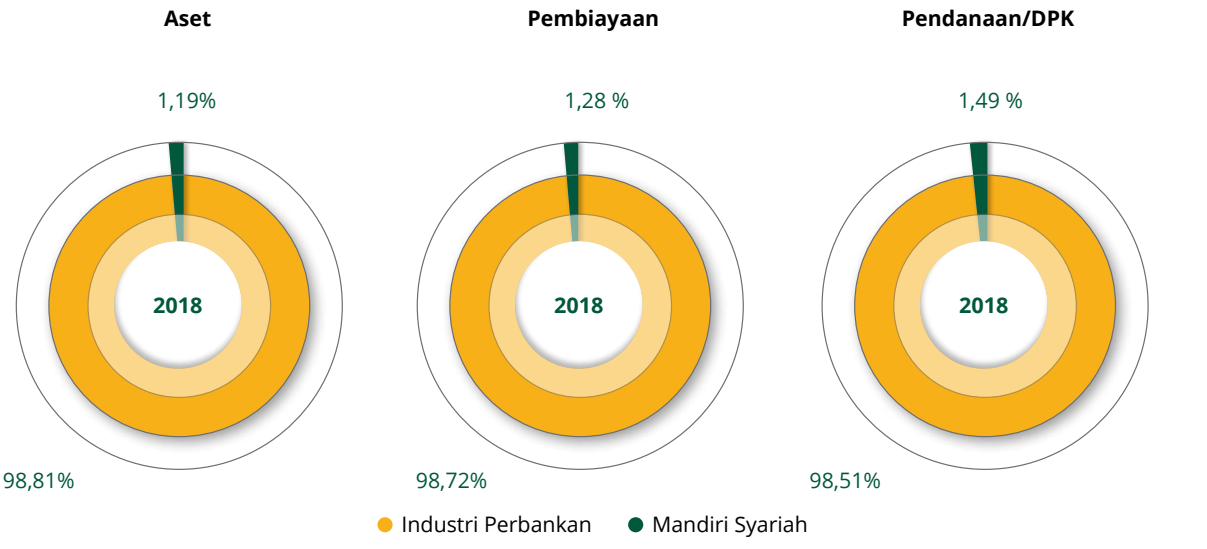

Grafik Pangsa Pasar Mandiri Syariah dibandingkan dengan Perbankan Syariah

dalam %

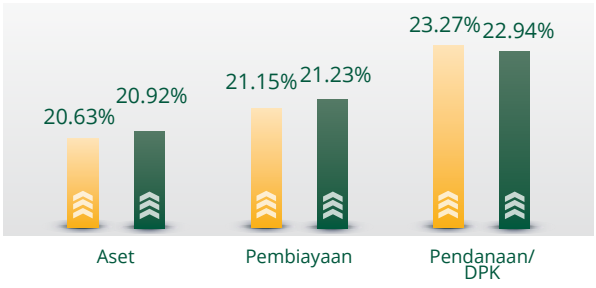

Grafik Pangsa Pasar Mandiri Syariah dibandingkan dengan Industri Perbankan

dalam %

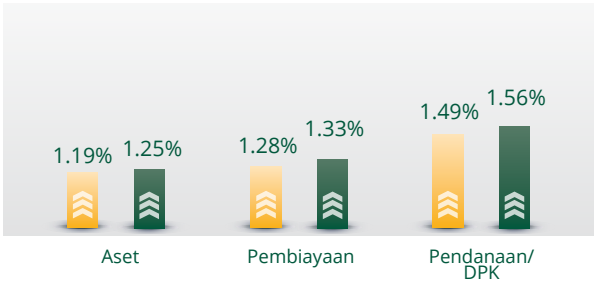

Oktober 2018 Oktober 2019

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

Saat ini, Mandiri Syariah belum memiliki segmen usaha yang sesuai dengan kriteria dalam pernyataan standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Segmen usaha dalam pembahasan ini adalah berupa produk Mandiri Syariah. Segmen usaha Mandiri Syariah terdiri atas *Retail Banking* dan *Wholesale Banking*. Berikut pembahasan mengenai penjelasan, produktivitas, pendapatan, dan profitabilitas masing-masing segmen usaha.

RETAIL BANKING

PENJELASAN *RETAIL BANKING*

Segmen *Retail Banking* adalah prioritas dan fokus bisnis Bank yang meliputi segmentasi *micro*, *bussiness banking*, *consumer* dan *pawning*. Adapun penjelasan segmentasi *Retail Banking* adalah sebagai berikut.

1. ***Bussiness Banking***
   Business Banking menyediakan layanan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi. Pembiayaan diberikan guna mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah baik pelaku usaha *Business to Business* (*Linkage-Two Step Financing*) maupun *Business to Customer* (perorangan dan lembaga usaha berbadan hukum).

2. ***Micro Banking***
   Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan membantu program pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja, Mandiri Syariah memiliki komitmen untuk menyalurkan pembiayaan bagi usaha mikro. Layanan Bank pada segmentasi *micro banking* meliputi pembiayaan dan dana retail. Jumlah pembiayaan untuk segmen *micro banking* sampai dengan Rp200 juta.

3. ***Consumer Banking***
   Segmen *consumer* ditujukan untuk memenuhi kebutuhan non produktif nasabah atau masyarakat. Segmen ini juga merupakan fokus bisnis Bank dikarenakan potensi pasar atas segmen ini cukup besar, antara lain pemenuhan kebutuhan pokok melalui pembiayaan perumahan/griya dan kebutuhan multiguna seperti pembiayaan implan, kendaraan/oto dan sebagainya. Selain itu *consumer banking* di Bank syariah ini juga melayani layanan umrah dan haji. Layanan Bank pada segmentasi *consumer banking* meliputi pembiayaan non produktif dan dana retail.

4. ***Pawning***
   Bisnis *pawning* berfokus kepada produk berbasis emas dengan 2 (dua) produk yang ditawarkan yaitu gadai emas dan cicil emas. Untuk gadai emas, nasabah dapat memenuhi keperluan jangka pendeknya secara cepat dengan agunan berupa emas lantakan dan emas perhiasan. Di sisi lain nasabah dapat menggunakan produk cicil emas untuk kepemilikan emas melalui cicilan ringan dengan persyaratan yang mudah. Total pembiayaan segmen *pawning* yang dapat diperoleh per nasabah adalah sampai dengan Rp250 juta.

PRODUKTIVITAS *RETAIL BANKING*

Produktivitas *Retail Banking* meliputi pembiayaan, pendanaan dan *fee based income* yang disajikan sebagai berikut.

Tabel Pembiayaan *Retail Banking*

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Business Banking (BBG)	7.979.607	8.595.213	(615.606)	(7,16%)
Micro Banking (MBG)	3.796.198	4.344.973	(548.775)	(12,63%)
Consumer Banking (CFG)	30.204.558	24.310.583	5.893.974	24,24%
Pawning (PWG)	2.985.861	2.708.697	277.164	10,23%
Total* Pembiayaan *Retail Banking	**44.966.223**	**39.959.466**	**5.006.758**	**12,53%**

Tahun 2019, kinerja pembiayaan *Retail Banking* mencapai sebesar Rp44,97 triliun, tumbuh sebesar Rp5,01 triliun atau 12,53% dibandingkan kinerja pembiayaan *Retail Banking* pada tahun 2018 sebesar Rp39,96 triliun. Peningkatan tersebut khususnya berasal dari pertumbuhan *Consumer Banking* sebesar 24,24% atau Rp5,89 triliun.

Secara komposisi, pencapaian *Retail Banking* dikontribusi oleh pembiayaan *Consumer Banking* sebesar Rp30,20 triliun, pembiayaan *Pawning* sebesar Rp2,99 triliun, pembiayaan *Micro Banking* sebesar Rp3,80 triliun, dan pembiayaan *Business Banking* sebesar Rp7,98 triliun.

Tabel Pendanaan *Retail Banking*

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Business Banking (BBG)	**1.734.624**	**1.715.028**	**19.596**	**1,14%**
Giro	501.179	570.123	(68.944)	(12,09%)
Tabungan	659.754	635.865	23.889	3,76%
Deposito	573.691	509.041	64.650	12,70%
Micro Banking (MBG)	365.472	377.502	(12.030)	(3,19%)
Giro	2.725	3.418	(693)	(20,28%)
Tabungan	315.735	338.859	(23.124)	(6,82%)
Deposito	47.012	35.225	11.787	33,46%
Funding, Hajj & Umra (FHU) & Wealth Management Group (WMG)	**66.860.814**	**57.012.177**	**9.848.637**	**17,27%**
Giro	4.876.758	4.319.668	557.090	12,90%
Tabungan	37.877.879	32.785.521	5.092.358	15,53%
Deposito	24.106.176	19.906.988	4.199.188	21,09%
Total	**68.960.909**	**59.104.708**	**9.856.201**	**16,68%**
Giro	5.380.662	4.893.209	487.453	9,96%
Tabungan	38.853.368	33.760.246	5.093.122	15,09%
Deposito	24.726.879	20.451.254	4.275.625	20,91%

Total Pendanaan *Retail Banking* tahun 2019 mencapai Rp68,96 triliun, meningkat 16,68% atau Rp9,86 triliun dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp59,10 triliun. Pertumbuhan total Pendanaan *Retail Banking* berasal dari kontribusi pertumbuhan FHU dan WMG (*Priority*) sebesar Rp9,85 triliun.

Tabel *Fee Based Income Retail Banking*

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Business Banking (BBG)	16,25	20,74	(4,49)	(21,63%)
Consumer Banking (CFG)	34,15	22,80	11,35	49,76%
Pawning (PWG)	393,04	324,00	69,04	21,31%
Funding, Hajj & Umra (FHU)	251,51	249,97	1,54	0,62%
Digital Banking (DBG)	207,86	166,47	41,38	24,86%
Total Fee Based Income Retail Banking	**902,81**	**783,99**	**118,82**	**15,16%**

Fee based income Retail Banking tahun 2019 mencapai Rp902,81 miliar, meningkat 15,16% dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp783,99 miliar. Kenaikan *fee based* tersebut berasal dari pertumbuhan *fee based Pawning* sebesar Rp69,04 miliar.

PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS *RETAIL BANKING*

Pendapatan bagi hasil *Retail Banking* pada tahun 2019 mencapai Rp5,30 triliun tumbuh 10,29% dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp4,81 triliun. Kenaikan pendapatan bagi hasil *Retail Banking* terutama berasal dari pertumbuhan *Consumer Banking* sebesar 21,78% menjadi Rp3,20 triliun di tahun 2018.

Tabel Pendapatan *Retail Banking*

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019		2018		Pertumbuhan	
	Pendapatan Bagi Hasil	Pendapatan Margin Bersih	Pendapatan Bagi Hasil	Pendapatan Margin Bersih	Pendapatan Bagi Hasil	Pendapatan Margin Bersih
Business Banking (BBG)	871.763	304.019	960.043	366.557	(9,20%)	(17,06%)
Consumer Banking (CFG)	3.202.166	1.161.483	2.629.413	1.036.317	21,78%	12,08%
Micro Banking (MBG)	761.072	462.117	823.321	505.520	(7,56%)	(8,59%)
Pawning (PWG)	464.818	290.142	392.761	234.730	18,35%	23,61%
Retail Deposit (RDG)	-	1.525.499	-	1.234.952	-	23,53%
Total	**5.299.819**	**3.743.260**	**4.805.539**	**3.011.885**	**10,29%**	**24,28%**

Pendapatan margin bersih *Retail Banking* pada tahun 2019 mencapai Rp3,74 triliun mengalami kenaikan sebesar 24,28% dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp3,01 triliun. Kenaikan pendapatan margin bersih *Retail Banking* terutama berasal dari *Retail Deposit* yang mengalami pertumbuhan sebesar 24,28% atau Rp290,55 miliar menjadi Rp1,53 triliun di tahun 2019.

Tabel Profitabilitas *Retail Banking* Tahun 2019

(dalam jutaan Rupiah)

	Uraian	2019					
		***Business Banking* (BBG)**	***Consumer Banking* (CFG)**	***Micro Banking* (MBG)**	***Pawning* (PWG)**	***Retail Deposit* (RDG)**	**Jumlah**
A	***Spread* Pembiayaan**	**262.959**	**1.161.483**	**449.919**	**290.142**	**-**	**2.164.503**
	Pendapatan Bagi Hasil	871.763	3.202.166	761.072	464.818	-	5.299.819
	Beban FTP	(608.803)	(2.040.683)	(311.153)	(174.676)	-	(3.135.316)
B	**Pendapatan Surat Berhaga**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
	Beban FTP	-	-	-	-	-	-
C	**Pendapatan Penempatan Bank Lain**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
	Beban FTP	-	-	-	-	-	-
D	***Spread* Pendanaan**	**41.060**	**-**	**12.198**	**-**	**1.525.499**	**1.578.757**
	Pendapatan FTP	84.927	-	18.789	-	3.386.112	3.489.827
	Biaya Bagi Hasil	(37.134)	-	(4.972)	-	(1.585.436)	(1.627.542)
	Biaya Premi Penjaminan	(2.751)	-	(684)	-	(111.693)	(115.128)
	Beban GWM	(3.981)	-	(935)	-	(163.483)	(168.399)
E	**Beban Surat Berharga**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Subdebt	-	-	-	-	-	-
F	**Pendapatan Margin Bersih**	**304.019**	**1.161.483**	**462.117**	**290.142**	**1.525.499**	**3.743.260**
G	**Pendapatan *Fee Based***	**22.177**	**20.840**	**43**	**1.036**	**279.640**	**323.736**
H	**Pendapatan Operasional Sebelum *Overhead***	**326.196**	**1.182.323**	**462.160**	**291.178**	**1.805.139**	**4.066.996**
I	**Biaya *Overhead***	**(170.493)**	**(366.695)**	**(329.937)**	**(165.731)**	**(1.195.335)**	**(2.228.191)**
J	**Laba/Rugi Operasional Sebelum PPAP/CKPN**	**155.703**	**815.629**	**132.223**	**125.447**	**609.804**	**1.838.805**
K	**Pendapatan/(Beban) CKPN:**	**29.612**	**(79.863)**	**4.200**	**902**	**-**	**(45.149)**
L	**Laba/Rugi Operasional**	**185.315**	**735.765**	**136.423**	**126.348**	**609.804**	**1.793.656**
M	**Pendapatan/Biaya Non Operasional**						
N	**Laba Sebelum Zakat dan Pajak**	**185.315**	**735.765**	**136.423**	**126.348**	**609.804**	**1.793.656**
O	**Zakat dan Pajak**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
P	**Laba Bersih**	**185.315**	**735.765**	**136.423**	**126.348**	**609.804**	**1.793.656**

Tabel Profitabilitas *Retail Banking* Tahun 2018

(dalam jutaan Rupiah)

	Uraian	2018					
		Business Banking (BBG)	*Consumer Banking* (CFG)	*Micro Banking* (MBG)	*Pawning* (PWG)	*Retail Deposit* (RDG)	Jumlah
A	***Spread* Pembiayaan**	**322.137**	**1.036.317**	**493.295**	**234.730**	**-**	**2.086.478**
	Pendapatan Bagi Hasil	960.043	2.629.413	823.321	392.761	-	4.805.539
	Beban FTP	(637.907)	(1.593.096)	(330.027)	(158.032)	-	(2.719.061)
B	**Pendapatan Surat Berhaga**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
	Beban FTP	-	-	-	-	-	-
C	**Pendapatan Penempatan Bank Lain**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
	Beban FTP	-	-	-	-	-	-
D	***Spread* Pendanaan**	**44.420**	**-**	**12.226**	**-**	**1.234.952**	**1.291.598**
	Pendapatan FTP	87.363	-	19.171	-	2.822.360	2.928.894
	Biaya Bagi Hasil	(36.131)	-	(5.264)	-	(1.352.397)	(1.393.792)
	Biaya Premi Penjaminan	(2.951)	-	(724)	-	(96.541)	(100.216)
	Beban GWM	(3.861)	-	(957)	-	(138.470)	(143.288)
E	**Beban Surat Berharga**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Subdebt	-	-	-	-	-	-
F	**Pendapatan Margin Bersih**	**366.557**	**1.036.317**	**505.520**	**234.730**	**1.234.952**	**3.378.075**
G	**Pendapatan *Fee Based***	**18.889**	**13.447**	**4**	**28**	**280.222**	**312.590**
H	**Pendapatan Operasional Sebelum *Overhead***	**385.446**	**1.049.763**	**505.524**	**234.758**	**1.515.174**	**3.690.665**
I	**Biaya *Overhead***	**(237.555)**	**(522.501)**	**(351.844)**	**(146.507)**	**(1.079.572)**	**(2.337.979)**
J	**Laba/Rugi Operasional Sebelum PPAP/CKPN**	**147.891**	**527.262**	**153.680**	**88.251**	**435.602**	**1.352.686**
K	**Pendapatan/(Beban) CKPN:**	**(41.227)**	**(81.007)**	**(99.512)**	**(2.226)**	**-**	**(223.972)**
L	**Laba/Rugi Operasional**	**106.663**	**446.255**	**54.169**	**86.025**	**435.602**	**1.128.714**
M	**Pendapatan/Biaya Non Operasional**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
N	**Laba Sebelum Zakat dan Pajak**	**106.663**	**446.255**	**54.169**	**86.025**	**435.602**	**1.128.714**
O	**Zakat dan Pajak**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
P	**Laba Bersih**	**106.663**	**446.255**	**54.169**	**86.025**	**435.602**	**1.128.714**

Tabel Pertumbuhan Profitabilitas *Retail Banking* Tahun 2018-2019

(dalam %)

	Uraian	Pertumbuhan					
		Business Banking (BBG)	*Consumer Banking* (CFG)	*Micro Banking* (MBG)	*Pawning* (PWG)	*Retail Deposit* (RDG)	Jumlah
A	***Spread* Pembiayaan**	**(18,37%)**	**12,08%**	**(8,79%)**	**23,61%**	**-**	**3,74%**
	Pendapatan Bagi Hasil	(9,20%)	21,78%	(7,56%)	18,35%	-	10,29%
	Beban FTP	(4,56%)	28,10%	(5,72%)	10,53%	-	15,31%
B	**Pendapatan Surat Berhaga**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
	Beban FTP	-	-	-	-	-	-
C	**Pendapatan Penempatan Bank Lain**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
	Beban FTP	-	-	-	-	-	-
D	***Spread* Pendanaan**	**(7,56%)**		**(0,23%)**		**23,53%**	**22,23%**
	Pendapatan FTP	(2,79%)		(1,99%)		19,97%	19,15%
	Biaya Bagi Hasil	2,78%		(5,55%)		17,23%	16,77%
	Biaya Premi Penjaminan	(6,78%)		(5,52%)		15,69%	14,88%
	Beban GWM	3,11%		(2,30%)		18,06%	17,52%
E	**Beban Surat Berharga**	**-**	-	-	-	-	-
	Subdebt	-	-	-	-	-	-
F	**Pendapatan Margin Bersih**	**(17,06%)**	**12,08%**	**(8,59%)**	**23,61%**	**23,53%**	**10,81%**
G	**Pendapatan *Fee Based***	**17,41%**	**54,98%**	**975,00%**	**3600,00%**	**(0,21%)**	**3,57%**
H	**Pendapatan Operasional Sebelum *Overhead***	**(15,37%)**	**12,63%**	**(8,58%)**	**24,03%**	**19,14%**	**10,20%**
I	**Biaya *Overhead***	**(28,23%)**	**(29,82%)**	**(6,23%)**	**13,12%**	**10,72%**	**(4,70%)**
J	**Laba/Rugi Operasional Sebelum PPAP/CKPN**	**5,28%**	**54,69%**	**(13,96%)**	**42,15%**	**39,99%**	**35,94%**
K	**Pendapatan/(Beban) CKPN:**	**(171,83%)**	**(1,41%)**	**(104,22%)**	**(140,52%)**		**(79,84%)**
L	**Laba/Rugi Operasional**	**73,74%**	**64,88%**	**151,85%**	**46,87%**	**39,99%**	**58,91%**
M	**Pendapatan/Biaya Non Operasional**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
N	**Laba Sebelum Zakat dan Pajak**	**73,74%**	**64,88%**	**151,85%**	**46,87%**	**39,99%**	**58,91%**
O	**Zakat dan Pajak**	**-**	-	-	-	-	**-**
P	**Laba Bersih**	**73,74%**	**64,88%**	**151,85%**	**46,87%**	**39,99%**	**58,91%**

Laba bersih segmen *Retail Banking* pada tahun 2019 mencapai Rp1,79 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 58,91% dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencapai Rp1,13 triliun. Pertumbuhan laba terjadi pada semua segmen *Retail Banking*. Kontribusi pertumbuhan paling besar secara nominal berasal dari *Consumer Banking* sebesar Rp289,51 miliar atau 64,88%, selanjutnya diikuti oleh pertumbuhan *Retail Deposit* yang sebesar Rp174,20 miliar atau 39,99%. Jika dilihat dari pertumbuhan secara persentase, pertumbuhan paling tinggi berasal dari *Micro Banking* sebesar 151,85%, *Business Banking* sebesar 73,74% dan *Pawning* sebesar 46,87%.

Wholesale Banking

PENJELASAN *WHOLESALE BANKING*

Segmentasi *Wholesale Banking* ditujukan kepada nasabah yang memiliki kebutuhan transaksi keuangan yang cukup besar dan rata-rata nasabah tersebut adalah dalam bentuk badan usaha atau perusahaan. Pengelompokan pada segmen ini ditujukan untuk memperjelas dan mengukur pencapaian nasabah-nasabah dengan nilai/jumlah nominal transaksi yang besar.

Wholesale Banking merupakan produk dan jasa yang terdapat pada Unit *Commercial Banking* dan *Corporate Banking*. Fokus pengelolaan segmen usaha *Wholesale Banking* adalah penyaluran pembiayaan dan dana pihak ketiga kepada badan usaha, serta transaksi pembayaran dan transaksi lainnya yang dimiliki oleh nasabah *Wholesale* (*Letter of Credit*, Bank Garansi dan *Cash Management*).

Adapun penjelasan segmentasi *Wholesale Banking* adalah sebagai berikut:

1. ***Commercial Banking***
   Bank dalam rangka meningkatkan pencapaian target bisnis juga ditunjang oleh nasabah *commercial*, yaitu melalui penyaluran pembiayaan modal kerja dan investasi. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk pembelian barang-barang modal, proyek infrastruktur dan pendirian usaha baru. Selain penyaluran pembiayaan, *Commercial Banking* juga melakukan aktifitas penghimpunan dana pihak ketiga serta meningkatkan *fee based* melalui transaksi *trade finance*. Jumlah pembiayaan untuk sub segmen *Commercial Banking* dengan limit di atas Rp5 miliar sampai dengan Rp50 miliar.

2. ***Corporate Banking***
   Selain ditunjang oleh segmentasi *Commercial*, Bank juga memberikan layanan pada segmentasi *Corporate* yang ditujukan kepada nasabah-nasabah besar atau inti Bank untuk investasi, modal kerja dan penghimpunan dana pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pencapaian target bisnis. Selain penyaluran pembiayaan dan dana pihak ketiga, *Corporate Banking* juga melakukan aktivitas bisnis untuk meningkatkan *fee based* melalui transaksi *trade finance*.

PRODUKTIVITAS *WHOLESALE BANKING*

Produktivitas *Wholesale Banking* meliputi pembiayaan, pendanaan dan *fee based income* yang disajikan sebagai berikut.

Tabel Pembiayaan *Wholesale Banking*

(dalam jutaan Rupiah)

Unit Kerja	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Corporate Banking (CB)	22.353.676	21.122.561	1.231.115	5,83%
Commercial Banking (CMG)	8.222.959	6.670.770	1.552.189	23,27%
Total Pembiayaan *Wholesale Banking*	**30.576.635**	**27.793.331**	**2.783.304**	**10,01%**

Tahun 2019, kinerja pembiayaan *Wholesale Banking* mencapai Rp30,58 triliun, tumbuh sebesar Rp2,78 triliun atau 10,01% dibandingkan kinerja pembiayaan *Wholesale Banking* pada tahun 2018 sebesar Rp27,79 triliun. Pertumbuhan pembiayaan *Wholesale Banking* terutama berasal dari meningkatnya pembiayaan *Commercial Banking* sebesar 23,27% dari Rp6,67 triliun di tahun 2018 menjadi Rp8,22 triliun di tahun 2019.

Secara komposisi, pencapaian *Wholesale Banking* dikontribusi oleh pembiayaan *Corporate Banking* sebesar Rp22,35 triliun atau 73,11% dan pembiayaan *Commercial Banking* sebesar Rp8,22 triliun atau 26,89%.

Tabel Pendanaan *Wholesale Banking*

(dalam jutaan Rupiah)

Unit Kerja	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Corporate Banking (CBG)	3.104.142	1.832.900	1.271.242	69,36%
Giro	2.241.378	1.148.938	1.092.441	95,08%
Tabungan	113.720	386.799	(273.079)	(70,60%)
Deposito	749.044	297.163	451.881	152,06%
Commercial Banking (CMG)	2.217.292	674.271	1.543.021	228,84%
Giro	954.557	449.579	504.978	112,32%
Tabungan	251.078	130.240	120.838	92,78%
Deposito	1.011.657	94.452	917.204	971,08%
Institutional Banking (IBG)	26.040.547	25.923.413	117.134	0,45%
Giro	5.970.588	2.917.801	3.052.788	104,63%
Tabungan	925.154	818.470	106.684	13,03%
Deposito	19.144.805	22.187.142	(3.042.337)	(13,71%)
Total Pendanaan *Wholesale Banking*	**31.361.982**	**28.430.584**	**2.931.398**	**10,31%**

Sedangkan kinerja pendanaan 2019 pada segmen *Wholesale Banking* mencapai sebesar Rp31,36 triliun meningkat sebesar 10,31% atau Rp2,93 triliun dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp28,43 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan pendanaan *Commercial Banking* sebesar Rp1,54 triliun.

Tabel *Fee Based Wholesale Banking*

(dalam ribuan Rupiah)

Unit Kerja	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Corporate Banking (CBG)	106.154	63.992	42.162	65,89%
Commercial Banking (CMG)	135.490	49.088	86.402	176,01%
Treasury and International Banking (TIG)	104.989	59.297	45.691	77,05%
Total *Fee Based Income Wholesale Banking*	**339.803**	**187.533**	**152.270**	**81,20%**

Untuk *kinerja fee based* tahun 2019 pada segmen *Wholesale Banking* mencapai sebesar Rp339,80 miliar mengalami pertumbuhan sebesar Rp152,27 miliar atau 81,20% dibandingkan kinerja *fee based Wholesale Banking* pada tahun 2018 sebesar Rp187,53 miliar. Pertumbuhan tersebut karena pertumbuhan fee based dari *Commercial Banking* sebesar 176,01% atau Rp86,40 miliar.

PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS *WHOLESALE BANKING*

Pendapatan dan profitabilitas *Wholesale Banking* disajikan sebagai berikut.

Tabel Kinerja Pendapatan *Wholesale Banking*

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019		2018		Pertumbuhan	
	Pendapatan Bagi Hasil	Pendapatan Margin Bersih	Pendapatan Bagi Hasil	Pendapatan Margin Bersih	Pendapatan Bagi Hasil	Pendapatan Margin Bersih
Corporate Banking (CBG)	1.740.038	345.450	1.630.536	306.250	6,72%	12,80%
Commercial Banking (CMG)	659.245	190.082	571.904	170.095	15,27%	11,75%
Institutional Banking (IBG)	-	-	-	61.723	-	(100,00%)
Total Pendapatan *Wholesale Banking*	**2.399.283**	**535.531**	**2.202.441**	**538.068**	**8,94%**	**(0,47%)**

Tahun 2019, kinerja pendapatan bagi hasil *Wholesale Banking* mencapai Rp2,40 triliun mengalami pertumbuhan 8,94% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,20 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari kontribusi pertumbuhan pendapatan bagi hasil *Corporate Banking* sebesar Rp109,50 milar atau 6,72%, pertumbuhan pendapatan bagi hasil tersebut sejalan dengan kenaikan pendapatan margin bersih *Corporate Banking* yang mencapai 12,80%. Total pendapatan margin bersih *Wholesale Banking* secara total sedikit mengalami penurunan sebesar 0,47% hal tersebut karena Bank lebih berhati-hati membidik sektor yang prudent untuk diberikan pembiayaan dikarenakan kondisi makro ekonomi yang belum kondusif, selain itu tidak adanya pendapatan dari Institutional Banking di tahun 2019.

Tabel Profitabilitas *Wholesale Banking* Tahun 2019

(dalam jutaan Rupiah)

	Uraian	2019			
		***Corporate Banking* (CBG)**	***Institutional Banking* (IBG)**	***Commercial Banking* (CMG)**	**Jumlah**
A	***Spread* Pembiayaan**	**304.147**	**-**	**161.617**	**465.764**
	Pendapatan Bagi Hasil	1.740.038	-	659.245	2.399.313
	Beban FTP	(1.435.891)	-	(497.628)	(1.933.519)
B	**Pendapatan Surat Berhaga**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	-	-
	Beban FTP	-	-	-	-
C	**Pendapatan Penempatan Bank Lain**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	-	-
	Beban FTP	-	-	-	-
D	**Spread Pendanaan**	**37.575**	**96.844**	**28.465**	**163.884**
	Pendapatan FTP	97.797	1.524.795	59.026	1.681.618
	Biaya Bagi Hasil	(55.292)	(1.322.723)	(26.034)	(1.404.049)
	Biaya Premi Penjaminan	(2.041)	(39.919)	(1.812)	(43.772)
	Beban GWM	(2.891)	(65.309)	(2.715)	(70.915)
E	**Beban Surat Berharga**	-	-	-	-
	Subdebt	-	-	-	-
F	**Pendapatan Margin Bersih**	**345.450**	**96.844**	**190.082**	**632.376**
G	**Pendapatan *Fee Based***	**96.503**	**-**	**21.777**	**118.280**
H	**Pendapatan Operasional Sebelum *Overhead***	**441.953**	**96.844**	**211.859**	**750.656**
I	**Biaya *Overhead***	**(87.013)**	**(14.442)**	**(50.696)**	**(152.151)**
J	**Laba/Rugi Operasional Sebelum PPAP/CKPN**	**354.940**	**82.402**	**161.163**	**598.505**
K	**Pendapatan/(Beban) CKPN:**	**(485.579)**	**-**	**(190.295)**	**(675.874)**
L	**Laba/Rugi Operasional**	**(130.639)**	**82.402**	**(29.132)**	**(77.369)**
M	**Pendapatan/Biaya Non Operasional**	**-**	**-**	**-**	**-**
N	**Laba Sebelum Zakat dan Pajak**	**(130.639)**	**82.402**	**(29.132)**	**(77.369)**
O	**Zakat dan Pajak**	**-**	**-**	**-**	**-**
P	**Laba Bersih**	**(130.639)**	**82.402**	**(29.132)**	**(77.369)**

Tabel Profitabilitas *Wholesale Banking* Tahun 2018

(dalam jutaan Rupiah)

	Uraian	2018			
		Corporate Banking (CBG)	*Institutional Banking* (IBG)	*Commercial Banking* (CMG)	Jumlah
A	***Spread* Pembiayaan**	**270.023**	**-**	**150.855**	**420.878**
	Pendapatan Bagi Hasil	1.630.537	-	571.904	2.202.441
	Beban FTP	(1.360.513)	-	(421.050)	(1.781.563)
B	**Pendapatan Surat Berhaga**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	-	-
	Beban FTP	-	-	-	-
C	**Pendapatan Penempatan Bank Lain**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	-	-
	Beban FTP	-	-	-	-
D	**Spread Pendanaan**	**36.226**	**61.723**	**19.240**	**117.190**
	Pendapatan FTP	96.229	1.429.015	36.265	1.561.508
	Biaya Bagi Hasil	(55.487)	(1.251.612)	(14.188)	(1.321.287)
	Biaya Premi Penjaminan	(1.915)	(43.717)	(1.197)	(46.829)
	Beban GWM	(2.600)	(71.962)	(1.641)	(76.203)
E	**Beban Surat Berharga**				
	Subdebt	-	-	-	-
F	**Pendapatan Margin Bersih**	**306.250**	**61.723**	**170.095**	**538.068**
G	**Pendapatan *Fee Based***	**84.912**	**-**	**20.477**	**105.389**
H	**Pendapatan Operasional Sebelum *Overhead***	**391.162**	**61.723**	**190.571**	**643.457**
I	**Biaya *Overhead***	**(92.159)**	**(12.039)**	**(46.575)**	**(150.773)**
J	**Laba/Rugi Operasional Sebelum PPAP/CKPN**	**299.003**	**49.684**	**143.997**	**492.684**
K	**Pendapatan/(Beban) CKPN:**	**(998.653)**		**(247.323)**	**(1.245.976)**
L	**Laba/Rugi Operasional**	**(699.650)**	**49.684**	**(103.326)**	**(753.292)**
M	**Pendapatan/Biaya Non Operasional**	**-**	**-**	**-**	**-**
N	**Laba Sebelum Zakat dan Pajak**	**(699.650)**	**49.684**	**(103.326)**	**(753.292)**
O	**Zakat dan Pajak**	**-**	**-**	**-**	**-**
P	**Laba Bersih**	**(699.650)**	**49.684**	**(103.326)**	**(753.292)**

Tabel Pertumbuhan Profitabilitas *Wholesale Banking* Tahun 2018-2019

(dalam %)

	Uraian	Pertumbuhan			
		Corporate Banking (CBG)	*Institutional Banking* (IBG)	*Commercial Banking* (CMG)	Jumlah
A	***Spread* Pembiayaan**	**12,64%**	**-**	**7,13%**	**10,66%**
	Pendapatan Bagi Hasil	6,72%	-	15,27%	8,94%
	Beban FTP	5,54%	-	18,19%	8,53%
B	**Pendapatan Surat Berhaga**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	-	-
	Beban FTP	-	-	-	-
C	**Pendapatan Penempatan Bank Lain**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	-	-
	Beban FTP	-	-	-	-
D	**Spread Pendanaan**	**3,72%**	**56,90%**	**47,95%**	**39,84%**
	Pendapatan FTP	1,63%	6,70%	62,76%	7,69%
	Biaya Bagi Hasil	(0,35%)	5,68%	83,49%	6,26%
	Biaya Premi Penjaminan	6,58%	(8,69%)	51,38%	(6,53%)
	Beban GWM	11,19%	(9,25%)	65,45%	(6,94%)
E	**Beban Surat Berharga**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Subdebt	-	-	-	-
F	**Pendapatan Margin Bersih**	**12,80%**	**56,90%**	**11,75%**	**17,53%**
G	**Pendapatan *Fee Based***	**13,65%**	**-**	**6,35%**	**12,23%**
H	**Pendapatan Operasional Sebelum *Overhead***	**12,98%**	**56,90%**	**11,17%**	**16,66%**
I	**Biaya *Overhead***	**(5,58%)**	**19,96%**	**8,85%**	**0,91%**
J	**Laba/Rugi Operasional Sebelum PPAP/CKPN**	**18,71%**	**65,85%**	**11,92%**	**21,48%**
K	**Pendapatan/(Beban) CKPN:**	**(51,38%)**	**-**	**(23,06%)**	**(45,76%)**
L	**Laba/Rugi Operasional**	**(81,33%)**	**65,85%**	**(71,81%)**	**(89,73%)**
M	**Pendapatan/Biaya Non Operasional**	**-**	**-**	**-**	**-**
N	**Laba Sebelum Zakat dan Pajak**	**(81,33%)**	**65,85%**	**(71,81%)**	**(89,73%)**
O	**Zakat dan Pajak**	**-**	**-**	**-**	**-**
P	**Laba Bersih**	**(81,33%)**	**65,85%**	**(71,81%)**	**(89,73%)**

Laba bersih segmen *Wholesale Banking* tahun 2019 mencapai (Rp77,369) juta, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai (Rp753.292) juta. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya laba operasional serta naiknya *spread* pendanaan dari *Institutional Banking*.

Prospek Usaha dan Strategi Ke Depan

Proyeksi keuangan Bank untuk 3 (tiga) tahun ke depan yakni 2020-2022 serta asumsi-asumsi yang mendasarinya disajikan sebagai berikut.

Tabel Indikator Ekonomi dan Keuangan

(dalam %)

Indikator Ekonomi Keuangan	2020	2021	2022
Pertumbuhan ekonomi	5,20%	5,40%	5,27%
Tingkat inflasi	4,00%	3,90%	3,38%
Nilai tukar Rp/USD	15.427	15.300	14.158
7-*Day Reverse Repo Rate*	6,50%	6,25%	4,75%

Sumber: *Office of Chief Economist* Bank Mandiri

Asumsi tersebut disusun berdasarkan analisa kondisi makro ekonomi dan industri perbankan**.** Pertumbuhan ekonomi dunia 3,0% pada 2019, menurun dari 3,6% pada 2018, dan kemudian pulih terbatas menjadi 3,1% pada 2020. Ke depan, prospek ekonomi global dipengaruhi kemajuan *trade deal* AS-Tiongkok, pemanfaatan *trade diversion* negara berkembang, efektivitas stimulus fiskal dan pelonggaran kebijakan moneter, serta kondisi geopolitik. Prospek pemulihan global tersebut menjadi perhatian karena dapat memengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi domestik dan arus masuk modal asing. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan diprakirakan membaik sehingga secara keseluruhan dalam kisaran 5,1-5,5% pada tahun 2020. Inflasi tetap terkendali pada level yang rendah dan stabil. Bank Indonesia memprakirakan inflasi yang rendah akan berlanjut sehingga inflasi IHK tetap terkendali. Ke depan, Bank Indonesia tetap konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna memastikan inflasi terjaga dalam kisaran sasaran. Pada tahun 2020, pertumbuhan kredit dan pertumbuhan DPK diprakirakan membaik masing-masing dalam kisaran 10-12% dan 8-10% sejalan dengan prospek peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ke depan, Bank Indonesia tetap menempuh kebijakan makroprudensial yang akomodatif dan memperkuat koordinasi dengan otoritas terkait sehingga dapat tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong fungsi intermediasi perbankan.

(sumber: Tinjauan Kebijakan Moneter Desember 2019, Bank Indonesia)

Di tengah ketidakpastian yang ada dalam dunia Perbankan, Mandiri Syariah memiliki peluang untuk tumbuh. Peluang yang dimiliki Mandiri Syariah antara lain sebagai berikut:

1. Semakin baiknya pemahaman masyarakat atas prisip ekonomi syariah dan manfaatnya bagi kehidupan.
2. Dukungan pemerintah dan Regulator antara lain melalui pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).
3. Memanfaatkan sinergi dengan Mandiri Group dalam meningkatkan bisnis bank.
4. Indonesia sebagai pusat Industri Halal Global (ekonomi syariah, *fashion*, *food*, pariwisata dan hotel)
5. Fokus Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang memberikan peluang bagi Mandiri Syariah untuk menyalurkan pembiayaan pada proyek-proyek infrastruktur Pemerintah.
6. Masyarakat muslim ekonomi menengah atas yang semakin meningkat jumlahnya menjadi potensi bisnis bagi perbankan Syariah.
7. Pemegang saham telah memberikan kesempatan untuk melakukan *Initial Public Offering* (IPO) dalam rangka mencari tambahan Modal.

Berdasarkan asumsi yang telah dijabarkan di atas disertai adanya berbagai peluang, Mandiri Syariah optimis untuk dapat senantiasa meningkatkan kinerjanya dalam jangka panjang. Dengan kata lain, Mandiri Syariah memiliki prospek usaha yang sangat baik. Hal ini di dasarkan pada kekuatan yang dimiliki oleh Mandiri Syariah yaitu:

1. Dukungan kuat dari pemegang saham (Bank Mandiri) dan sinergi dengan Mandiri Group.

2. Posisi sebagai bank syariah terbesar (aset, pembiayaan dan dana) serta menempati posisi sebagai 18 terbesar perbankan nasional dari sisi aset.
3. Posisi likuiditas dan kecukupan modal yang terjaga baik.
4. Struktur demografi kepegawaian yang didominasi pegawai berusia muda dan memiliki potensi untuk dikembangkan.
5. Mandiri Syariah memiliki pengalaman bisnis di industri syariah yang relatif lama sehingga telah memiliki *brand positioning* di masyarakat terutama di industri syariah.
6. Mandiri Syariah merupakan satu-satunya Bank Syariah yang masuk dalam kategori BUKU III.

Mandiri Syariah sebagai Bank Syariah terbesar di Indonesia memiliki nilai jual dan reputasi yang baik di masyarakat. Oleh karenanya prospek bisnis terkait dengan program pemerintah yang fokus terhadap perkembangan industri keuangan syariah dan ekosistem bisnis halal kami antisipasi dengan penguatan diseluruh lini bisnis bank yang meliputi:

1. Fokus pada penghimpunan dana murah dengan mengembangkan *digital banking ecosystem platform*.
2. Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dengan melakukan *enhancement business process* dan meningkatkan *Service Level Agreement* (SLA) yang optimal.
3. Memiliki komitmen untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalisme seluruh pegawai.

Strategi bisnis Mandiri Syariah pada tahun 2020 merupakan strategi bisnis yang berkelanjutan dan berkesinambungan dalam rangka menjaga pertumbuhan bisnis yang berkualitas, sehat dan sustain. Adapun strategi tersebut mencakup:

1. Mengimplementasikan strategi untuk mendapatkan *low cost fund*.
2. Fokus pada segmen *retail* terutama segmen *consumer*, dan segmen *wholesale* sebagai *second core business*.
3. Fokus pada peningkatan *fee based income* dengan menyempurnakan layanan *transaction banking*.

Dalam mencapai fokus bisnis tahun 2020 Bank masih konsisten menerapkan tiga pilar strategi, dengan lebih menajamkan untuk pertumbuhan CASA dan transaksi, untuk lebih meningkatkan daya saing *cost of fund* dan memperbesar *fee based income*.

TINJAUAN KEUANGAN

Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan dan mendapat opini menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Syariah Mandiri tanggal 31 Desember 2019 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan Mandiri Syariah terdiri atas kinerja Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Arus Kas, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil, Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat, serta Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan yang disajikan sebagai berikut.

Laporan Posisi Keuangan

Tabel Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018 *)	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
ASET				
KAS	1.591.962	1.324.081	267.881	20,23%
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	11.010.935	9.658.298	1.352.637	14,00%
GIRO PADA BANK LAIN - BERSIH	2.259.529	1.452.103	807.426	55,60%
INVESTASI PADA SURAT BERHARGA - BERSIH	21.088.128	17.475.441	3.612.687	20,67%
PIUTANG				
Murabahah	40.170.279	38.355.135	1.815.144	4,73%
Istishna	262	359	(97)	(27,02%)
Piutang Ijarah	1.567	1.264	303	23,97%
JUMLAH PIUTANG - BERSIH	39.102.924	37.007.475	2.095.449	5,66%
PINJAMAN QARDH - BERSIH	6.441.269	4.044.308	2.396.961	59,27%
PEMBIAYAAN				
Mudharabah - bersih	1.706.416	3.226.605	(1.520.189)	(47,11%)
Musyarakah - bersih	25.956.876	20.622.671	5.334.205	25,87%
PEMBIAYAAN - BERSIH	27.663.292	23.849.276	3.814.016	15,99%
TAGIHAN AKSEPTASI - BERSIH	233.513	246.316	(12.802)	(5,20%)
ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH - BERSIH	367.516	607.100	(239.584)	(39,46%)
PENYERTAAN MODAL SEMENTARA - BERSIH	-	25.166	(25.166)	(100,00%)
ASET TETAP – NILAI BUKU	1.121.079	984.630	136.449	13,86%
ASET LAIN - BERSIH	1.411.720	1.666.922	(255.202)	(15,31%)
JUMLAH ASET	**112.291.867**	**98.341.116**	**13.950.751**	**14,19%**

Uraian	2019	2018 *)	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, SURAT BERHARGA SUBORDINASI YANG DITERBITKAN DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS SEGERA	312.026	226.274	85.752	37,90%
BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER DAN BONUS WADIAH PIHAK KETIGA YANG BELUM DIBAGIKAN	97.155	79.117	18.038	22,80%
SIMPANAN WADIAH	16.637.027	12.455.764	4.181.263	33,57%
SIMPANAN DARI BANK LAIN	67.135	78.245	(11.110)	(14,20%)
LIABILITAS AKSEPTASI	235.872	248.804	(12.932)	(5,20%)
UTANG PAJAK	187.853	115.419	72.434	62,76%
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	16.740	12.493	4.247	34,00%
LIABILITAS LAIN-LAIN	1.498.495	1.261.146	237.349	18,82%
JUMLAH LIABILITAS	**19.052.303**	**14.477.262**	**4.575.041**	**31,60%**
DANA SYIRKAH TEMPORER				
Dana Syirkah Temporer Bukan Bank				
Investasi Terikat	3.751.037	1.582.935	2.168.102	136,97%
Investasi Tidak Terikat Tabungan Mudharabah	33.886.002	30.410.408	3.475.594	11,43%
Investasi Tidak Terikat Deposito	45.529.456	43.015.417	2.514.039	5,84%
Jumlah Dana Syirkah Temporer Bukan Bank	83.166.495	75.008.760	8.157.735	10,88%
Dana Syirkah Temporer Bank				
Investasi Tidak Terikat Tabungan Mudharabah	343.098	277.312	65.786	23,72%
Investasi Tidak Terikat Deposito Mudharabah	102.929	156.298	(53.369)	(34,15%)
Jumlah Dana Syirkah Temporer Bank	446.027	433.610	12.417	2,86%
Musyarakah - Giro Mudharabah Musytarakah	6.207	7.319	(1.112)	(15,19%)
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	**83.618.729**	**75.449.689**	**8.169.040**	**10,83%**
SURAT BERHARGA SUBORDINASI YANG DITERBITKAN	375.000	375.000	-	-

Uraian	2019	2018 *)	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
EKUITAS				
Modal ditempatkan dan disetor penuh 597.804.387 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018	2.989.022	2.989.022	-	-
Dana setoran modal	-	-		-
Surplus revaluasi aset tetap, setelah pajak	395.725	395.725	-	-
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	47.049	53.944	(6.895)	(12,78%)
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	710	62.179	(61.469)	(98,86%)
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	597.804	597.804	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	5.215.525	3.940.491	1.275.034	32,36%
JUMLAH EKUITAS	**9.245.835**	**8.039.165**	**1.206.670**	**15,01%**
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, SURAT BERHARGA SUBORDINASI YANG DITERBITKAN DAN EKUITAS	**112.291.867**	**98.341.116**	**13.950.751**	**14,19%**

*) Direklasifikasi

Grafik Laporan Posisi Keuangan
Dalam triliun rupiah

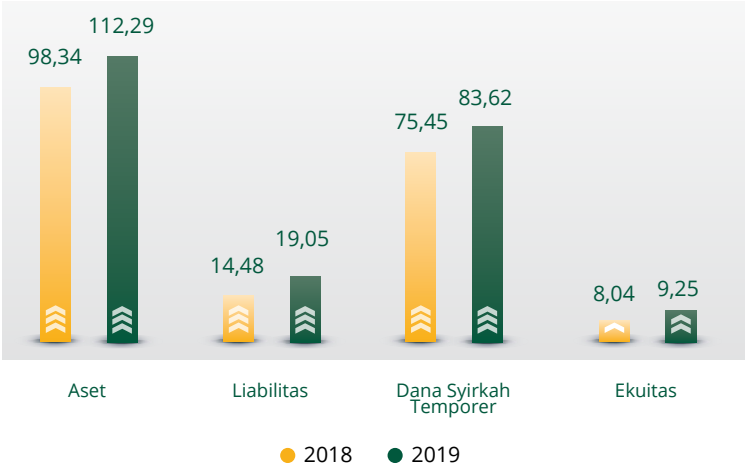

Aset

Aset tahun 2019 mencapai Rp112,29 triliun, meningkat 14,19% atau Rp13,95 triliun dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp98,34 triliun. Peningkatan tersebut karena kenaikan Dana syirkah temporer 10,83% atau Rp8,17 triliun.

Tabel Aset

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Kas	1.591.962	1.324.081	267.881	20,23%
Giro dan penempatan pada Bank indonesia	11.010.935	9.658.298	1.352.637	14,00%
Giro pada bank lain - bersih	2.259.529	1.452.103	807.426	55,60%
Investasi pada surat berharga - bersih	21.088.128	17.475.441	3.612.687	20,67%
Piutang				
Murabahah	40.170.279	38.355.135	1.815.144	4,73%
Istishna	262	359	(97)	(27,02%)
Piutang ijarah	1.567	1.264	303	23,97%
Jumlah piutang - bersih	39.102.924	37.007.475	2.095.449	5,66%
Pinjaman qardh - bersih	6.441.269	4.044.308	2.396.961	59,27%
Pembiayaan				
Mudharabah - bersih	1.706.416	3.226.605	(1.520.189)	(47,11%)
Musyarakah - bersih	25.956.876	20.622.671	5.334.205	25,87%
Pembiayaan - bersih	27.663.292	23.849.276	3.814.016	15,99%
Tagihan akseptasi - bersih	233.513	246.316	(12.803)	(5,20%)
Aset yang diperoleh untuk ijarah - bersih	367.516	607.100	(239.584)	(39,46%)
Penyertaan modal sementara - bersih	-	25.166	(25.166)	-
Aset tetap – nilai buku	1.121.079	984.630	136.449	13,86%
Aset lain - bersih	1.411.720	1.666.922	(255.202)	(15,31%)
JUMLAH ASET	**112.291.867**	**98.341.116**	**13.950.751**	**14,19%**

Kas

Kas tahun 2019 mencapai Rp1,59 triliun, meningkat 20,23% atau Rp267,88 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp1,32 triliun.

Giro Dan Penempatan Pada Bank Indonesia

Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia tahun 2019 mencapai Rp11,01 triliun, naik 14,00% atau Rp1,35 triliun dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp9,66 triliun.

Tabel Giro dan Penempatan Pada Bank Indonesia

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Giro wadiah	4.357.735	3.984.698	373.037	9,36%
Penempatan pada Bank Indonesia	6.653.200	5.673.600	979.600	17,27%
Jumlah	**11.010.935**	**9.658.298**	**1.352.637**	**14,00%**

Giro Pada Bank Lain

Giro dan penempatan pada Bank Lain tahun 2019 mencapai Rp2,26 triliun, meningkat 55,60% atau Rp807,43 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp1,45 triliun. Peningkatan tersebut khususnya berasal dari kenaikan giro pihak ketiga sebesar Rp593,80 miliar.

Tabel Giro Pada Bank Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Pihak ketiga	1.826.882	1.233.079	593.803	48,16%
Pihak berelasi	434.550	220.739	213.811	96,86%
Jumlah giro pada bank lain	2.261.432	1.453.818	807.614	55,55%
Penyisihan kerugian	(1.903)	(1.715)	(188)	10,96%
Bersih	**2.259.529**	**1.452.103**	**807.426**	**55,60%**

Investasi Pada Surat Berharga

Investasi pada Surat Berharga tahun 2019 mencapai Rp21,12 triliun, meningkat 20,67% atau Rp3,62 triliun dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp17,50 triliun. Hal tersebut karena jumlah investasi surat berharga dari pihak berelasi mengalami kenaikan menjadi Rp20,47 triliun di tahun 2019 dari sebelumnya sebesar Rp17,00 triliun.

Tabel Investasi Pada Surat Berharga

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Pihak ketiga	652.934	508.115	144.819	28,50%
Pihak berelasi	20.468.247	16.995.205	3.473.042	20,44%
Jumlah investasi pada surat berharga	**21.121.181**	**17.503.320**	**3.617.861**	**20,67%**

Piutang

Piutang tahun 2019 mencapai Rp40,17 triliun, meningkat 4,73% atau Rp1,82 triliun dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp38,36 triliun. Peningkatan Piutang terutama berasal dari kenaikan piutang murabahah sebesar 4,73% atau Rp1,82 triliun.

Tabel Piutang

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Murabahah	40.170.279	38.355.135	1.815.144	4,73%
Istishna	262	359	(97)	(27,02%)
Piutang Ijarah	1.567	1.264	303	23,97%
Jumlah	**40.172.108**	**38.356.758**	**1.815.350**	**4,73%**

Pinjaman Qardh

Pinjaman qardh tahun 2019 mencapai Rp6,44 triliun, meningkat 59,27% atau Rp2,40 triliun dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp4,04 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan pinjaman qardh dari pihak ketiga dan berelasi sebesar Rp2,43 triliun.

Tabel Pinjaman Qardh

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Total pinjaman qardh	6.502.660	4.066.831	2.435.829	59,90%
Penyisihan kerugian	(61.391)	(22.523)	(38.868)	172,57%
Bersih	**6.441.269**	**4.044.308**	**2.396.961**	**59,27%**

Pembiayaan

Pembiayaan tahun 2019 mencapai Rp27,66 triliun, meningkat 15,99% atau Rp3,81 triliun dibandingkan dengan tahun tahun 2018 mencapai Rp23,85 triliun. Peningkatan pembiayaan karena meningkatnya pembiayaan musyarakah – bersih sebesar 25,87% atau Rp5,33 triliun.

Tabel Pembiayaan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Mudharabah - bersih	1.706.416	3.226.605	(1.520.189)	(47,11%)
Musyarakah - bersih	25.956.876	20.622.671	5.334.205	25,87%
Pembiayaan - Bersih	**27.663.292**	**23.849.276**	**3.814.016**	**15,99%**

Tagihan Akseptasi

Tagihan akseptasi tahun 2019 mencapai Rp233,51 miliar, menurun 5,20% atau Rp12,80 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp246,32 miliar. Penurunan tersebut berasal dari menurunnya tagihan akseptasi dari pihak ketiga sebesar Rp54,28 miliar.

Tabel Tagihan Akseptasi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Pihak ketiga	20.549	74.826	(54.277)	(72,54%)
Pihak berelasi	215.323	173.978	41.345	23,76%
Jumlah tagihan akseptasi	235.872	248.804	(12.932)	(5,20%)
Penyisihan kerugian	(2.359)	(2.488)	129	(5,18%)
Tagihan Akseptasi - Bersih	**233.513**	**246.316**	**(12.803)**	**(5,20%)**

Aset yang Diperoleh untuk Ijarah - Bersih

Aset yang diperoleh untuk ijarah – bersih mencapai Rp367,51 miliar, menurun 39,46% atau Rp239,58 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp607,10 miliar. Penurunan tersebut karena berkurangnya mesin dan instalasi dari Rp427,72 miliar di tahun 2018 menjadi Rp296,52 miliar di tahun 2019.

Tabel Aset yang Diperoleh untuk Ijarah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Kendaraan	41.359	78.468	(37.109)	(47,29%)
Multijasa *)	64.056	56.980	7.076	12,42%
Mesin dan instalasi	296.524	427.724	(131.200)	(30,67%)
Lainnya	527.717	607.951	(80.234)	(13,20%)
Jumlah	929.656	1.171.123	(241.467)	(20,62%)
Akumulasi penyusutan, amortisasi dan pemeliharaan	(562.140)	(564.023)	1.883	(0,33%)
Nilai bersih	**367.516**	**607.100**	**(239.584)**	**(39,46%)**

*) Ijarah multijasa sebagian besar terdiri dari pembiayaan ijarah untuk tujuan pendidikan

Penyertaan Modal Sementara - Bersih

Pada tahun 2019 tidak terdapat penyertaan modal sementara - bersih, atau menurun 100%, dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp25,16 miliar. Penurunan tersebut karena peningkatan penyisihan kerugian menjadi Rp50,33 miliar di tahun 2019 dari Rp25,16 miliar di tahun 2018.

Tabel Penyertaan Modal Sementara

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Pihak berelasi	50.332	50.332	0	0,00%
Penyisihan kerugian	(50.332)	(25.166)	(25.166)	100,00%
Bersih	**0**	**25.166**	**(25.166)**	**(100,00%)**

Aset Tetap – Nilai Buku

Aset tetap – nilai buku tahun 2019 mencapai Rp1,12 triliun, meningkat 13,86% atau Rp136,45 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp984,63 miliar. Kenaikan terbebut karena peningkatan nilai perolehan sebesar 10,03% yang menjadi Rp2,70 triliun di tahun 2019

Tabel Aset Tetap

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Nilai perolehan	2.701.573	2.455.368	246.205	10,03%
Akumulasi penyusutan	(1.580.494)	(1.470.738)	(109.756)	7,46%
Nilai buku	**1.121.079**	**984.630**	**136.449**	**13,86%**

Aset Lain - Bersih

Aset lain tahun 2019 mencapai Rp1,41 triliun, menurun 15,31% atau Rp255,20 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp1,67 triliun. Penurunan tersebut karena Aset lainnya-bersih menurun sebesar 27,18% atau Rp382,61 miliar.

Tabel Aset Lain-Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Aset pajak tangguhan - bersih	386.500	259.084	127.416	49,18%
Agunan yang diambil alih	939	939	0	0,00%
Penyisihan kerugian	(939)	(939)	0	0,00%
Bersih	-	-		
Lainnya - bersih	1.025.220	1.407.838	(382.618)	(27,18%)
Jumlah	**1.411.720**	**1.666.922**	**(255.202)**	**(15,31%)**

Liabilitas

Liabilitas tahun 2019 mencapai Rp19,05 triliun, meningkat 31,60% atau Rp4,58 trilitun dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp14,48 triliun. Hal ini diakibatkan karena peningkatan simpanan wadiah sebesar Rp4,18 triliun.

Tabel Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018 *)	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Liabilitas segera	312.026	226.274	85.752	37,90%
Bagi hasil dana syirkah temporer dan bonus wadiah pihak ketiga yang belum dibagikan	97.155	79.117	18.038	22,80%
Simpanan wadiah	16.637.027	12.455.764	4.181.263	33,57%
Simpanan dari bank lain	67.135	78.245	(11.110)	(14,20%)
Liabilitas akseptasi	235.872	248.804	(12.932)	(5,20%)
Utang pajak	187.853	115.419	72.434	62,76%
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	16.740	12.493	4.247	34,00%
Liabilitas lain-lain	1.498.495	1.261.146	237.349	18,82%
Jumlah liabilitas	**19.052.303**	**14.477.262**	**4.575.041**	**31,60%**

*) Direklasifikasi

Liabilitas Segera

Liabilitas segera tahun 2019 mencapai Rp312,06 miliar, meningkat 37,90% atau Rp85,75 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp226,27 miliar. Peningkatan tersebut karena kenaikan liabilitas segera dari pihak ketiga sebesar 44,18% atau Rp80,60 miliar.

Tabel Liabilitas Segera

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018*)	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Pihak ketiga	263.038	182.442	80.596	44,18%
Pihak berelasi	48.988	43.832	5.156	11,76%
Jumlah	**312.026**	**226.274**	**85.752**	**37,90%**

*) Direklasifikasi

Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer dan Bonus Wadiah Pihak Ketiga yang Belum Dibagikan

Bagi hasil dana syirkah temporer dan bonus wadiah pihak ketiga yang belum dibagikan tahun 2019 mencapai Rp97,16 miliar, meningkat 22,80% atau Rp18,04 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp79,12 miliar. Peningkatan tersebut karena naiknyanya bagi hasil dana syirkah temporer dan bonus wadiah pihak ketiga yang belum dibagikan dari bukan Bank dari Rp78,88 miliar di tahun 2018 menjadi Rp97,07 miliar di tahun 2019.

Tabel Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer Dan Bonus Wadiah Pihak Ketiga Yang Belum Dibagikan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Bukan Bank	97.070	78.879	18.191	23,06%
Bank	85	238	(153)	(64,29%)
Jumlah	**97.155**	**79.117**	**18.038**	**22,80%**

Simpanan Wadiah

Simpanan wadiah tahun 2019 mencapai Rp16,64 triliun, meningkat 33,57% atau Rp4,18 triliun dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp12,46 triliun. Kenaikan simpanan wadiah khususnya berasal dari tabungan wadiah dari pihak ketiga sebesar Rp1,37 triliun.

Tabel Simpanan Wadiah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Giro wadiah				
Pihak ketiga	10.761.875	8.050.127	2.711.748	33,69%
Pihak Berelasi	748.426	654.046	94.380	14,43%
Tabungan wadiah				
Pihak ketiga	5.126.388	3.751.449	1.374.939	36,65%
Pihak Berelasi	338	142	196	138,03%
Jumlah	**16.637.027**	**12.455.764**	**4.181.263**	**33,57%**

Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain tahun 2019 mencapai Rp67,13 miliar, menurun 14,20% atau Rp11,11 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp78,25 miliar. Hal tersebut berasal dari penurunan giro wadiah pihak ketiga sebesar 57,59%.

Tabel Simpanan dari Bank Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Giro wadiah				
Pihak ketiga	30.633	72.227	(41.594)	(57,59%)
Pihak Berelasi	36.502	6.018	30.484	506,55%
Jumlah	**67.135**	**78.245**	**(11.110)**	**(14,20%)**

Liabilitas Akseptasi

Liabilitas akseptasi tahun 2019 mencapai Rp235,87 miliar, menurun 5,20% atau Rp12,93 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp248,80 miliar. Penurunan liabilitas akseptasi berasal dari turunnya liabilitas akseptasi pihak ketiga sebesar 22,76%.

Tabel Liabilitas Akseptasi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Pihak ketiga	190.272	246.335	(56.063)	(22,76%)
Pihak berelasi	45.600	2.469	43.131	1746,90%
Jumlah tagihan akseptasi	**235.872**	**248.804**	**(12.932)**	**(5,20%)**

Utang Pajak

Utang pajak tahun 2019 mencapai Rp187,85 triliun, meningkat 62,76% atau Rp72,43 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp115,42 miliar. Peningkatan utang pajak terutama berasal kenaikan utang pajak penghasilan sebesar Rp84,69 miliar.

Tabel Utang Pajak

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Utang pajak penghasilan				
Pajak Penghasilan pasal 29	-	25.318	(25.318)	(100,00%)
Pajak Penghasilan pasal 25	84.693	-	84.693	-
Utang pajak lainnya				
Pajak Penghasilan pasal 4 (2)	49.424	52.738	(3.314)	(6,28%)
Pajak Penghasilan pasal 21	47.278	30.687	16.591	54,07%
Pajak Penghasilan pasal 22	183	315	(132)	(41,90%)
Pajak Penghasilan pasal 23	1.284	1.350	(66)	(4,89%)
Pajak Penghasilan pasal 26	50	6	44	733,33%
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	4.941	5.005	(64)	(1,28%)
Jumlah	**187.853**	**115.419**	**72.434**	**62,76%**

Estimasi Kerugian Komitmen Dan Kontinjensi

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi tahun 2019 mencapai Rp16,74 miliar, mengalami kenaikan 34,00% atau Rp4,25 miliar dibandingkan dengan tahun tahun 2018 mencapai Rp12,49 miliar. Kenaikan tersebut karena naiknya Bank garansi yang diterbitkan dan SBLC sebesar Rp4,69 miliar.

Tabel Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Bank garansi yang diterbitkan dan SBLC	16.430	11.740	4.690	39,95%
L/C yang tidak dapat dibatalkan	310	753	(443)	(58,83%)
Jumlah	**16.740**	**12.493**	**4.247**	**34,00%**

Liabilitas Lain-Lain

Liabilitas lain-lain tahun 2019 mencapai Rp1,47 triliun, meningkat 19,22% atau Rp237,09 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp1,23 triliun. Peningkatan tersebut khususnya berasal dari peningkatan cadangan Bonus dalam mata uang Rupiah sebesar Rp138,84 miliar atau 58,69%.

Tabel Liabilitas Lain-Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018*)	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Rupiah				
Cadangan bonus	375.416	236.570	138.846	58,69%
Cadangan imbalan pasca-kerja karyawan dan imbalan jangka panjang karyawan	394.546	337.031	57.515	17,07%
Biaya yang masih harus dibayar	127.817	152.485	(24.668)	(16,18%)
Rekening perantara	124.618	105.375	19.243	18,26%
Pendapatan administrasi pembiayaan yang ditangguhkan	104.235	48.017	56.218	117,08%
Liabilitas pada notaris	74.483	84.937	(10.454)	(12,31%)
Liabilitas terkait pembiayaan	70.315	71.614	(1.299)	(1,81%)
Dana kebajikan	26.476	71.778	(45.302)	(63,11%)
Penyisihan atas estimasi kerugian yang timbul karena kasus hukum	18.199	23.448	(5.249)	(22,39%)
Setoran jaminan	13.644	10.435	3.209	30,75%
Lainnya	110.336	61.887	48.449	78,29%
Mata Uang Asing				
Setoran jaminan	9.690	10.663	(973)	(9,13%)
Dana kebajikan	6.665	6.579	86	1,31%
Rekening Perantara	4.511	2.553	1.958	76,69%
Liabilitas terkait pembiayaan	2.066	2.271	(205)	(9,03%)
Lainnya	7.791	8.073	(282)	(3,49%)
Jumlah	**1.470.808**	**1.233.716**	**237.092**	**19,22%**

*) Direklasifikasi

Dana Syirkah Temporer

Dana syirkah temporer tahun 2019 mencapai Rp83,62 triliun, meningkat 10,83% atau Rp8,17 triliun dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp75,45 triliun. Peningkatan tersebut karena kenaikan investasi tidak terikat tabungan mudharabah yang mencapai Rp3,48 triliun.

Tabel Dana Syirkah Temporer

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Dana syirkah temporer bukan bank				
Investasi terikat	3.751.037	1.582.935	2.168.102	136,97%
Investasi tidak terikat tabungan mudharabah	33.886.002	30.410.408	3.475.594	11,43%
Investasi tidak terikat deposito	45.529.456	43.015.417	2.514.039	5,84%
Jumlah dana syirkah temporer bukan bank	83.166.495	75.008.760	8.157.735	10,88%
Dana syirkah temporer bank				
Investasi tidak terikat tabungan mudharabah	343.098	277.312	65.786	23,72%
Investasi tidak terikat deposito mudharabah	102.929	156.298	(53.369)	(34,15%)
Jumlah dana syirkah temporer bank	446.027	433.610	12.417	2,86%
Musyarakah - giro mudharabah musytarakah	6.207	7.319	(1.112)	(15,19%)
Jumlah dana syirkah temporer	**83.618.729**	**75.449.689**	**8.169.040**	**10,83%**

Dana Syirkah Temporer Bukan Bank

Dana syirkah temporer bukan bank tahun 2019 mencapai Rp83,17 triliun, meningkat 10,88% atau Rp8,16 triliun dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp75,01 triliun. Peningkatan tersebut karena kenaikan investasi tidak terikat tabungan sebesar Rp3,48 triliun.

Tabel Dana Syirkah Temporer Bukan Bank

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Investasi Terikat	3.751.037	1.582.935	2.168.102	136,97%
Investasi Tidak Terikat Tabungan Mudharabah	33.886.002	30.410.408	3.475.594	11,43%
Investasi Tidak Terikat Deposito	45.529.456	43.015.417	2.514.039	5,84%
Jumlah Dana Syirkah Temporer Bukan Bank	**83.166.495**	**75.008.760**	**8.157.735**	**10,88%**

Dana Syirkah Temporer Bank

Dana syirkah temporer bank tahun 2019 mencapai Rp446,03 miliar, meningkat 2,86% atau Rp12,42 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp433,61 miliar. Peningkatan tersebut karena naiknya investasi tidak terikat tabungan mudharabah sebesar Rp65,79 miliar.

Tabel Dana Syirkah Temporer Bank

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Investasi Tidak Terikat Tabungan Mudharabah	343.098	277.312	65.786	23,72%
Investasi Tidak Terikat Deposito Mudharabah	102.929	156.298	(53.369)	(34,15%)
Jumlah Dana Syirkah Temporer Bank	**446.027**	**433.610**	**12.417**	**2,86%**

Musyarakah - Giro Mudharabah Musytarakah

Musyarakah - giro mudharabah musytarakah tahun 2019 mencapai Rp6,21 miliar, menurun 15,19% atau Rp1,11 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp7,32 miliar. Peningkatan tersebut karena kenaikan giro mudharabah musytarakah dari pihak ketiga.

Tabel Musyarakah - Giro Mudharabah Musytarakah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Pihak ketiga	**6.207**	**7.319**	**(1.112)**	**(15,19%)**

Ekuitas

Ekuitas tahun 2019 mencapai Rp9,25 triliun, meningkat 15,01% atau Rp1,21 triliun dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp8,04 triliun. Peningkatan tersebut karena kenaikan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar 32,36%.

Tabel Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Modal ditempatkan dan disetor penuh 597.804.387 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018	2.989.022	2.989.022	-	-
Dana setoran modal	-	-		-
Surplus revaluasi aset tetap, setelah pajak	395.725	395.725	-	-
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	47.049	53.944	(6.895)	(12,78%)
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	710	62.179	(61.469)	(98,86%)
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	597.804	597.804	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	5.215.525	3.940.491	1.275.034	32,36%
Jumlah Ekuitas	**9.245.835**	**8.039.165**	**1.206.670**	**15,01%**

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Modal ditempatkan dan disetor penuh tahun 2019 mencapai Rp2,99 triliun, sama dengan tahun 2018 mencapai Rp2,99 triliun. Karena tidak ada tambahan modal saham dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Tabel Modal Saham

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.989.022	2.989.022	-	-
PT Mandiri Sekuritas	-	-	-	-
Jumlah	**2.989.022**	**2.989.022**	**-**	**-**

Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja, Setelah Pajak

Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak tahun 2019 mencapai Rp47,05 miliar, menurun 12,78% atau Rp6,90 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp53,94.

Tabel Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja, Setelah Pajak

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	**47.049**	53.944	(6.895)	(12,78%)

Keuntungan Yang Belum Direalisasi Atas Surat Berharga Yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak

Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah pajak tahun 2019 mencapai Rp710 juta, menurun 98,86% atau Rp61,47 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp62,18 miliar.

Tabel Keuntungan yang Belum Direalisasi atas Surat Berharga yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	**710**	62.179	(61.469)	(98,86%)

Saldo Laba

Saldo laba tahun 2019 mencapai Rp5,81 triliun, meningkat 28,10% atau Rp1,28 triliun dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp4,54 triliun. Peningkatan tersebut karena saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya mengalami peningkatan sebesar Rp1,28 triliun.

Tabel Saldo Laba

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Telah ditentukan penggunaannya	597.804	597.804	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	5.215.525	3.940.491	1.275.034	32,36%
Jumlah	**5.813.329**	**4.538.295**	**1.275.034**	**28,10%**

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB				
Pendapatan dari jual beli	4.776.751	4.565.821	210.930	4,62%
Pendapatan dari sewa	53.504	25.361	28.143	110,97%
Pendapatan dari bagi hasil	2.263.661	1.947.006	316.655	16,26%
Pendapatan usaha utama lainnya	1.323.834	1.150.605	173.229	15,06%
Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai Mudharib	8.417.750	7.688.793	728.957	9,48%
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER	(3.014.676)	(2.659.310)	(355.366)	13,36%
HAK BAGI HASIL MILIK BANK	5.403.074	5.029.483	373.591	7,43%
PENDAPATAN USAHA LAINNYA	1.866.238	1.605.055	261.183	16,27%
BEBAN USAHA	(5.460.048)	(5.794.548)	334.500	(5,77%)
LABA USAHA	1.809.264	839.990	969.274	115,39%
PENDAPATAN DAN BEBAN NON-USAHA	(50.284)	(3.341)	(46.943)	1405,06%
LABA SEBELUM ZAKAT DAN PAJAK PENGHASILAN	1.758.980	836.649	922.331	110,24%
ZAKAT	(43.974)	(20.916)	(23.058)	110,24%
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.715.006	815.733	899.273	110,24%
(BEBAN)/MANFAAT PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(439.972)	(210.520)	(229.452)	108,99%
LABA BERSIH	1.275.034	605.213	669.821	110,68%
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA	(68.364)	119.711	(188.075)	(157,11%)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	**1.206.670**	**724.924**	**481.746**	**66,45%**
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR *)	**2.133**	**1.012**	**1.121**	**110,77%**

*) Dinyatakan dalam Rupiah penuh

Grafik Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam triliun Rupiah)

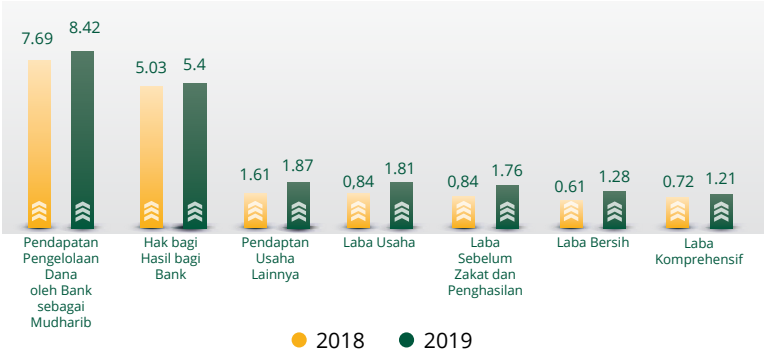

Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai Mudharib

Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib tahun 2019 mencapai Rp8,42 triliun, meningkat 9,48% atau Rp728,96 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp7,69 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari meningkatnya pendapatan dari bagi hasil sebesar Rp316,66 miliar.

Tabel Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai Mudharib

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Pendapatan dari jual beli	4.776.751	4.565.821	210.930	4,62%
Pendapatan dari sewa	53.504	25.361	28.143	110,97%
Pendapatan dari bagi hasil	2.263.661	1.947.006	316.655	16,26%
Pendapatan usaha utama lainnya	1.323.834	1.150.605	173.229	15,06%
Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai Mudharib	**8.417.750**	**7.688.793**	**728.957**	**9,48%**

Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer tahun 2019 mencapai Rp3,01 triliun, meningkat 13,36% atau Rp355,37 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp2,66 triliun. Hal ini karena meningkatnya deposito mudharabah serta tabungan mudharabah.

Tabel Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Deposito mudharabah	2.402.722	2.079.279	323.443	15,56%
Tabungan mudharabah	532.066	505.173	26.893	5,32%
Investasi terikat	68.446	74.779	(6.333)	(8,47%)
Sertifikat investasi mudharabah antarbank	11.419	44	11.375	25.852,27%
Musyarakah – mudharabah musytarakah	23	35	(12)	(34,29%)
Jumlah	**3.014.676**	**2.659.310**	**355.366**	**13,36%**

Hak Bagi Hasil Milik Bank

Hak bagi hasil milik bank tahun 2019 mencapai Rp5,40 triliun, meningkat 7,43% atau Rp373,59 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp5,03 triliun. Peningkatan tersebut karena kenaikan pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib sebesar Rp728,96 miliar.

Tabel Hak Bagi Hasil Milik Bank

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib	8.417.750	7.688.793	728.957	9,48%
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	(3.014.676)	(2.659.310)	(355.366)	13,36%
Hak bagi hasil milik bank	**5.403.074**	**5.029.483**	**373.591**	**7,43%**

Pendapatan Usaha Lainnya

Pendapatan usaha lainnya tahun 2019 mencapai Rp1,87 triliun, meningkat 16,27% atau Rp261,18 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp1,61 triliun. Hal tersebut karena meningkatnya pendapatan administrasi pembiayaan dan pendapatan rahn di tahun 2019.

Tabel Pendapatan Usaha Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018*)	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Pendapatan rahn	393.041	324.003	69.038	21,31%
Pendapatan administrasi pembiayaan	213.871	117.451	96.420	82,09%
Pendapatan administrasi tabungan	213.665	219.747	(6.082)	(2,77%)
Pendapatan transaksi mata uang asing - bersih	82.257	57.683	24.574	42,60%
Pendapatan jasa transaksi ATM lain	67.675	58.404	9.271	15,87%
Pendapatan layanan internet banking	60.861	39.142	21.719	55,49%
Pendapatan ganti rugi restrukturisasi (ta'widh)	55.686	75.279	(19.593)	(26,03%)
Pendapatan asuransi	34.158	22.796	11.362	49,84%
Pendapatan administrasi dan komisi selain pembiayaan	33.546	32.931	615	1,87%
Pendapatan pembiayaan sindikasi	25.544	30.126	(4.582)	(15,21%)
Pendapatan jasa pembayaran	18.079	12.334	5.745	46,58%
Pendapatan jasa ekspor impor	17.117	11.861	5.256	44,31%
Pendapatan komisi bancassurance	15.558	16.327	(769)	(4,71%)
Pendapatan transaksi remittance	14.981	14.856	125	0,84%
Pendapatan jasa dokumen dalam negeri	14.798	10.072	4.726	46,92%
Pendapatan referral paket umrah	12.641	8.230	4.411	53,60%
Pendapatan administrasi giro	9.571	9.483	88	0,93%
Pendapatan jasa transaksi ATM Mandiri	9.347	10.654	(1.307)	(12,27%)
Pendapatan ujroh dana talangan haji	4.443	6.043	(1.600)	(26,48%)
Pendapatan imbalan jasa perbankan lainnya	37.294	49.029	(11.735)	(23,93%)
Penerimaan kembali atas piutang dan pembiayaan yang telah dihapusbukukan	532.105	478.604	53.501	11,18%
Jumlah	**1.866.238**	**1.605.055**	**261.183**	**16,27%**

*) Direklasifikasi

Beban Usaha

Beban usaha tahun 2019 mencapai Rp5,46 triliun, turun sebesar 5,77% atau Rp334,5 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp5,79 triliun. Hal tersebut karena penurunan beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan penyisihan aset produktif.

Tabel Beban Usaha

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018*)	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Beban kepegawaian	(2.084.091)	(1.805.975)	(278.116)	15,40%
Beban administrasi	(1.507.041)	(1.375.739)	(131.302)	9,54%
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan penyisihan kerugian aset produktif	(1.376.790)	(2.127.057)	750.267	(35,27%)
Beban penyusutan aset tetap	(136.188)	(144.648)	8.460	(5,85%)
Beban bagi hasil surat berharga subordinasi yang diterbitkan	(37.500)	(37.500)	0	0,00%
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset non-produktif	(27.366)	(57.522)	30.156	(52,43%)
Pembalikan/(pembentukan) estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	(4.432)	21.652	(26.084)	(120,47%)
Beban usaha lain				
Beban bonus simpanan wadiah	(72.454)	(64.652)	(7.802)	12,07%
Beban lainnya	(214.186)	(203.107)	(11.079)	5,45%
Jumlah beban usaha	**(5.460.048)**	**(5.794.548)**	**334.500**	**(5,77%)**

*) Direklasifikasi

Laba Usaha

Laba usaha tahun 2019 mencapai Rp1.809,26 miliar, meningkat 115,39% atau Rp969,27 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp839,99 miliar. Peningkatan laba khususnya berasal dari kenaikan pendapatan pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib dan pendapatan usaha lainnya.

Tabel Laba Usaha

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Hak bagi hasil milik bank	5.403.074	5.029.483	373.591	7,43%
Pendapatan Usaha Lainnya	1.866.238	1.605.055	261.183	16,27%
Jumlah beban usaha	**(5.460.048)**	**(5.794.548)**	**334.500**	**(5,77%)**
Laba Usaha	1.809.264	839.990	969.274	115,39%

Pendapatan dan Beban Non-Usaha

Pendapatan dan beban non-usaha tahun 2019 mencapai Rp50,28 miliar, meningkat 1.405,06% atau Rp46,94 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp3,34 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan kerugian selisih kurs dan penurunan pendapatan non usaha lainnya.

Tabel Pendapatan dan Beban Non Usaha

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Laba penjualan aset tetap	12.400	21.732	(9.332)	(42,94%)
Lainnya	5.985	16.183	(10.198)	(63,02%)
Jumlah pendapatan non-usaha	**18.385**	**37.915**	**(19.530)**	**(51,51%)**
Denda dan sanksi	(144)	(680)	536	(78,82%)
Kerugian selisih kurs	(68.423)	(40.576)	(27.847)	68,63%
Jumlah beban non-usaha	**(68.669)**	**(41.256)**	**(27.413)**	**66,45%**
Jumlah pendapatan dan beban non-usaha - bersih	**(50.284)**	**(3.341)**	**(46.943)**	**1405,06%**

Laba Sebelum Zakat Dan Pajak Penghasilan

Laba sebelum zakat dan pajak penghasilan tahun 2019 mencapai Rp1.758,98 miliar, meningkat 110,24% atau Rp922,33 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp836,65 miliar. Peningkatan tersebut karena peningkatan laba usaha sebesar Rp969,27 miliar atau 115,39% dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel Laba Sebelum Zakat dan Pajak Penghasilan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Laba Usaha	1.809.264	839.990	969.274	115,39%
Pendapatan dan beban non-usaha	(50.284)	(3.341)	(46.943)	1.405,06%
Laba sebelum zakat dan pajak penghasilan	**1.758.980**	**836.649**	**922.331**	**110,24%**

Zakat

Zakat tahun 2019 mencapai Rp43,97 miliar, meningkat 110,24% atau Rp23,06 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp20,92 miliar.

Tabel Zakat

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Zakat dari Bank	**(43.974)**	**(20.916)**	**(23.058)**	**110,24%**

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Laba sebelum pajak penghasilan tahun 2019 mencapai Rp1.715,01 miliar, meningkat 110,24% atau Rp899,27 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp815,73 miliar. Peningkatan laba sebelum penghasilan sejalan dengan kenaikan laba sebelum zakat dan pajak penghasilan.

Tabel Laba Sebelum Pajak Penghasilan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Laba sebelum zakat dan pajak penghasilan	1.758.980	836.649	922.331	110,24%
Zakat dari Bank	(43.974)	(20.916)	(23.058)	110,24%
Laba sebelum pajak penghasilan	**1.715.006**	**815.733**	**899.273**	**110,24%**

(Beban)/Manfaat Pajak Penghasilan - Bersih

Beban pajak penghasilan bersih tahun 2019 mencapai Rp439,97 miliar, meningkat 108,99% atau Rp229,45 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp210,52 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan beban pajak kini sebesar Rp324,56 miliar atau 147,54% dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel (Beban)/Manfaat Pajak Penghasilan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Kini	(544.540)	(219.980)	(324.560)	147,54%
Tangguhan	104.568	9.460	95.108	1.005,37%
Beban pajak penghasilan - bersih	**(439.972)**	**(210.520)**	**(229.452)**	**108,99%**

Laba Bersih

Laba bersih tahun 2019 mencapai Rp1.275,03 miliar, meningkat 110,68% atau Rp669,82 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp605,21 miliar. Peningkatan laba bersih dikarenakan adanya peningkatan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp899,27 miliar atau 110,24%.

Tabel Laba Bersih

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Laba sebelum pajak penghasilan	1.715.006	815.733	899.273	110,24%
(Beban)/Manfaat Pajak Penghasilan	(439.972)	(210.520)	(229.452)	108,99%
Laba Bersih	**1.275.034**	**605.213**	**669.821**	**110,68%**

Pendapatan Komprehensif Lainnya

Rugi Komprehensif Lainnya tahun 2019 mencapai Rp68,36 miliar, menurun sebesar 157,11% atau Rp118,08 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai Rp119,71 miliar. Penurunan tersebut berasal dari adanya kerugian yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual sebesar Rp82,02 miliar dan pada tahun 2018 perusahaan melakukan revaluasi atas aset tetap sebesar Rp51,69 milyar.

Tabel Pendapatan Komprehensif Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(9.193)	10.139	(19.332)	(190,67%)
Pajak penghasilan terkait	2.298	(2.535)	4.833	(190,65%)
Surplus revaluasi aset tetap	0	51.687	(51.687)	(100,00%)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual	(82.019)	80.970	(162.989)	(201,30%)
Pajak penghasilan terkait	20.550	(20.550)	41.100	(200,00%)
Jumlah penghasilan komprehensif lain	**(68.364)**	**119.711**	**(188.075)**	**(157,11%)**

Laba Komprehensif

Laba komprehensif tahun 2019 mencapai Rp1.206,67 miliar, meningkat 66,45% atau Rp481,75 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp724,92 miliar.

Tabel Laba Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Laba Bersih	1.275.034	605.213	669.821	110,68%
Jumlah penghasilan komprehensif lain	**(68.364)**	**119.711**	**(188.075)**	**(157,11%)**
Laba Komprehensif	1.206.670	724.924	481.746	66,45%

Laba Bersih per Saham Dasar

Laba bersih per saham dasar dihitung berdasarkan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun berjalan. Laba bersih per saham dasar tahun 2019 mencapai Rp2.133 meningkat 110,77% atau Rp1.121 dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp1.012. Peningkatan tersebut karena kenaikan Laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan sebesar Rp669,82 miliar atau 110,68%.

Laba Bersih Per Saham Dasar

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan (dalam jutaan Rupiah)	1.275.034	605.213	669.821	110,68%
Rata-rata tertimbang jumlah lembar yang beredar (satuan penuh)	597.804.387	597.804.387	-	0,00%
Laba bersih per saham dasar (Rupiah penuh)	**2.133**	**1.012**	**1.121**	**110,77%**

Laporan Arus Kas

Dengan arus kas operasi yang kuat, Mandiri Syariah memiliki posisi solid untuk tumbuh di masa depan. Hal tersebut tercermin dalam pengungkapan dalam arus kas sebagai berikut:

Tabel Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	8.304.311	4.699.431	3.604.880	76,71%
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(6.686.179)	(5.521.495)	(1.164.684)	21,09%
KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	1.618.132	(822.064)	2.440.196	(296,84%)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	13.296.197	14.118.261	(822.064)	(5,82%)
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**14.914.329**	**13.296.197**	**1.618.132**	**12,17%**

Grafik Arus Kas

(dalam triliunan Rupiah)

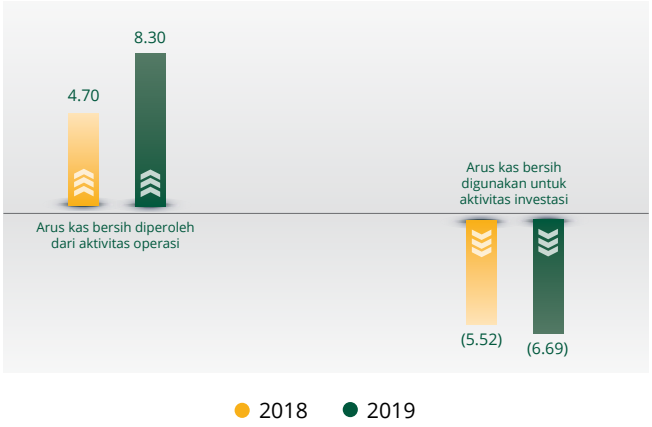

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2019 mencapai Rp8,30 triliun, meningkat sebesar Rp3,60 triliun atau 76,71% dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp4,70 triliun. Kenaikan arus kas diperoleh dari aktivitas operasi berasal dari penjualan surat berharga jangka pendek lainnya, peningkatan simpanan wadiah dan peningkatan investasi terikat dana *syirkah* temporer.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2019 mencapai Rp6,69 triliun, naik sebesar Rp1,16 triliun atau 21,09% dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai Rp5,52 triliun. Kenaikan penggunaan aktivitas investasi tersebut dikarenakan adanya pembelian surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan diukur pada harga perolehan.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Selama tahun 2019 tidak terdapat arus kas dari aktivitas pendanaan.

Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

Tabel Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Pendapatan usaha utama (akrual)	8.417.750	7.688.793	728.957	9,48%
Pengurang	(506.578)	(592.140)	85.562	(14,45%)
Penambah	592.140	552.823	39.317	7,11%
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil	8.503.312	7.649.476	853.836	11,16%
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil terdiri dari:				
Bagi hasil yang menjadi hak Bank	5.488.636	4.990.166	498.470	9,99%
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana				
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan	2.917.521	2.580.193	337.328	13,07%
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	97.155	79.117	18.038	22,80%

Grafik Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

(dalam triliunan Rupiah)

Pendapatan yang Tersedia untuk Bagi Hasil

Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil meningkat sebesar 11,16% atau Rp853,84 miliar dari Rp7,65 triliun di 2018 menjadi Rp8,50 triliun di 2019. Peningkatan tersebut karena adanya peningkatan pendapatan jual beli dan pendapatan bagi hasil.

Bagi Hasil yang Menjadi Hak Bank

Bagi hasil yang menjadi hak bank meningkat sebesar 9,99% atau Rp498,47 miliar dari Rp4,99 triliun di 2018 menjadi Rp5,49 triliun di 2019. Hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatan usaha utama akrual.

Bagi Hasil yang Menjadi Hak Pemilik Dana atas Bagi Hasil yang Sudah Didistribusikan

Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan meningkat sebesar 13,07% atau Rp337,33 miliar dari Rp2,58 triliun di 2018 menjadi Rp2,92 triliun di 2019. Hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatan usaha utama akrual.

Bagi Hasil yang Menjadi Hak Pemilik Dana atas Bagi Hasil yang Belum Didistribusikan

Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan naik sebesar 22,80% atau Rp18,04 miliar dari Rp79,12 miliar di 2018 menjadi Rp97,16 miliar di 2019.

Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Laporan Sumber dan Penyaluran dana Zakat

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Sumber dana zakat				
Zakat dari Bank	43.974	20.916	23.058	110,24%
Zakat dari nasabah dan umum	5.296	3.181	2.115	66,49%
Zakat dari pegawai Bank	12.245	11.229	1.016	9,05%
Jumlah sumber dana zakat	61.515	35.326	26.189	74,14%
Penyaluran dana zakat	(36.850)	(27.751)	9.099	32,79%
Kenaikan dana zakat	24.665	7.575	17.090	225,61%
Saldo awal dana zakat	22.263	14.688	7.575	51,57%
Saldo akhir dana zakat	46.928	22.263	24.665	110,79%

Grafik Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

(dalam miliar Rupiah)

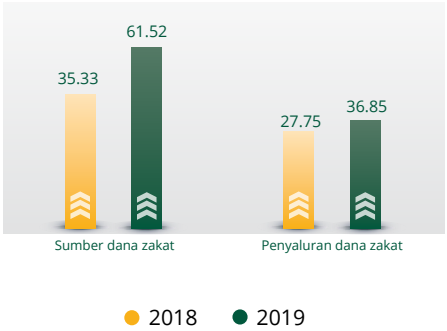

Sumber dana zakat tahun 2019 mencapai Rp61,52 miliar, meningkat sebesar Rp26,19 miliar atau 74,14% dari tahun 2018 mencapai Rp35,33 miliar. Peningkatan tersebut khususnya berasal dari kenaikan zakat dari bank sebesar 110,24%

Bank telah menghitung besarnya biaya zakat sebesar 2,5% dari laba sebelum zakat dan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp43,97 miliar dan Rp20,92 miliar yang telah dibukukan sebagai biaya zakat pada tahun 2019 dan 2018. Penyaluran dana zakat tahun 2019 mencapai Rp36,85 miliar, meningkat sebesar Rp9,09 miliar atau 32,79% dari tahun 2018 yang sebesar Rp27,75 miliar.

Sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2019, RUPS menyetujui pembayaran zakat Bank sebesar 2,5% dari laba sebelum pajak dan zakat untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp20,92 miliar yang dibukukan sebagai biaya tahun 2018. Bank telah menyalurkan dana zakat sebesar Rp36,85 miliar dan Rp27,75 miliar untuk tahun berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 melalui lembaga zakat.

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Sumber dana kebajikan				
Denda	15.667	22.809	(7.142)	(31,31%)
Penerimaan non-halal	139	628	(489)	(77,87%)
Dana sosial lainnya	903	536	367	68,47%
Jumlah sumber dana kebajikan	16.709	23.973	(7.264)	(30,30%)
Penggunaan dana kebajikan				
Disalurkan melalui LAZNAS BSM	(61.699)	(85.894)	(24.195)	(28,17%)
(Kerugian)/Keuntungan Selisih Kurs	(227)	686	(913)	(133,09%)
Penurunan dana kebajikan	(45.216)	(61.235)	16.019	(26,16%)
Saldo awal dana kebajikan	78.357	139.592	(61.235)	(43,87%)
Saldo akhir dana kebajikan	33.141	78.357	(45.216)	(57,71%)

*) Direklasifikasi

Grafik Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

(dalam jutaan Rupiah)

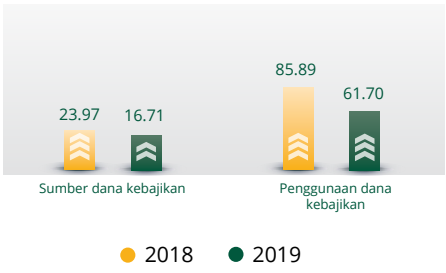

Sumber dana kebajikan tahun 2019 mencapai Rp16,71 miliar, menurun Rp7,26 miliar atau 30,30% dari tahun 2018 mencapai Rp23,97 miliar. Penurunan tersebut khususnya berasal dari denda sebesar Rp7,14 miliar. Denda dibebankan kepada debitur sebagai biaya tunggakan. Biaya tunggakan adalah biaya yang dikenakan kepada debitur karena kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank. Besarnya denda ditetapkan berdasarkan ketentuan internal. Bank tidak mengakui pendapatan atas biaya tunggakan tersebut, namun dialokasikan sebagai dana kebajikan (qardhul hasan). Bank menerima biaya tunggakan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp15,67 miliar dan sebesar Rp22,81 miliar. Penggunaan dana sosial disalurkan melalui lembaga zakat.

Rasio-Rasio Keuangan Utama

Rasio keuangan Mandiri Syariah yang meliputi rasio kinerja dan rasio kepatuhan secara umum mencatatkan kinerja yang baik di tahun 2019. Perbandingan rasio Mandiri Syariah tahun 2018 dan 2019 disajikan sebagai berikut.

Tabel Rasio

(dalam %)

Rasio	2019	2018
Rasio Kinerja		
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	16,15%	16,26%
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	1,71%	2,41%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1,74%	2,45%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	1,89%	2,48%
NPF *gross*	2,44%	3,28%
NPF *net*	1,00%	1,56%
Return on Assets (ROA)	1,69%	0,88%
Return on Equity (ROE)	15,65%	8,21%
Net Imbalan (NI)	6,02%	6,18%
Net Operating Margin (NOM)	1,85%	0,96%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	82,89%	91,16%
Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan	37,60%	36,32%
Financing to Deposit Ratio (FDR)	75,54%	77,25%
Kepatuhan (*Compliance*)		
Persentase Pelanggaran BMPD		
Pihak Terkait	0,00%	0,00%
Pihak Tidak Terkait	0,00%	0,00%
Persentase Pelampauan BMPD		
Pihak Terkait	0,00%	0,00%
Pihak Tidak Terkait	0,00%	0,00%
Giro Wajib Minimum (GWM)		
GWM Rupiah	4,88%	5,05%
GWM Valuta Asing	1,13%	1,13%
Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	4,41%	2,55%

Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang

Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan Mandiri Syariah dalam memenuhi seluruh kewajiban baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek, diukur melalui beberapa rasio, antara lain rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas. Berikut ini adalah rasio keuangan perbankan untuk mengukur likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas Bank.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek (Likuiditas Bank)

Likuiditas Bank dipengaruhi oleh struktur pembiayaan, likuiditas aset, kewajiban dengan pihak ketiga, dan komitmen pembiayaan kepada debitur. Rasio Pembiayaan terhadap Pendanaan (*Financing to Deposit Ratio* - FDR) Bank tahun 2019 mencapai 75,54% mengalami penurunan 1,71% jika dibandingkan dengan FDR tahun 2018 mencapai 77,25%, Rasio FDR Mandiri Syariah sedikit di bawah dari yang ditetapkan regulator yaitu batas bawah target LFR Syariah sebesar 80% dan batas atas sebesar 92%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun likuiditas Bank tinggi namun hal tersebut menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas penyaluran pembiayaan.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang (Solvabilitas Bank)

Bank mengukur solvabilitas melalui rasio permodalan bank. Bank memastikan kecukupan modal Bank untuk dapat memenuhi risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional yang tercermin dari Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio* - CAR). Pada tahun 2019, Rasio Kecukupan Modal Bank mencapai 16,15%, mengalami penurunan 0,11% jika dibandingkan dengan Rasio Kecukupan Modal tahun 2018 sebesar 16,26%.

Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014, Rasio Kecukupan Modal minimum dikaitkan dengan profil risiko Bank yang ditetapkan OJK adalah sebesar 9,99%. Dengan rasio kecukupan Mandiri Syariah berada pada tingkat 16,15%, struktur permodalan Bank memiliki kapabilitas untuk mengimbangi risiko pasar, risiko kredit dan risiko operasional dimana rasio tersebut lebih tinggi dari rasio kecukupan minimum OJK dan struktur modal Bank sudah memenuhi Peraturan OJK. Hal ini berarti bahwa Mandiri Syariah telah mengelola dengan baik modal Bank dan memiliki kecukupan modal untuk melindungi dari risiko solvabilitas.

Kemampuan Membayar Hutang dari Efek-Efek yang Diterbitkan

Kemampuan membayar utang juga dapat tercermin berdasarkan peringkat dari efek yang diterbitkan Mandiri Syariah yaitu Sukuk Subordinated Mudharabah 2016. Efek yang diterbitkan secara rutin dinilai oleh lembaga pemeringkatan guna mendukung kelayakan efek. Kualitas efek sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan penerbit efek dalam membayar efek nya pada saat jatuh tempo dan kemampuannya membayar bunga atau kupon selama jangka waktu penerbitan efek tersebut. Sukuk Subordinated Mudharabah yang diterbitkan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, Mandiri Syariah menggunakan Pefindo sebagai lembaga pemeringkat.

Tabel Kemampuan Membayar Hutang dari Efek-Efek yang Diterbitkan

Keterangan	Peringkat	
	2018	2017
Sukuk Subordinated Mudharabah 2016	$_{id}$AA-$_{(sy)}$	$_{id}$AA-$_{(sy)}$

Tabel Arti Peringkat

Lembaga Pemeringkat		Arti Peringkat
PEFINDO CREDIT RATING AGENCY	$_{id}$AA	Merupakan peringkat yang menggambarkan obligor memiliki kapasitas yang sangat kuat untuk memenuhi komitmen finansial jangka panjang dalam pembayaran hutangnya relatif terhadap obligor Indonesia lainnya.
	Tanda tambah (+)	Pada peringkat tertentu menunjukkan bahwa peringkat tersebut relatif kuat dalam masing-masing kategori peringkat.
	Tanda minus (-)	Pada peringkat tertentu menunjukkan bahwa peringkat tersebut relatif lemah dalam masing-masing kategori peringkat.
	(sy)	Berarti peringkat mengamanatkan prinsip-prinsip Islam.

Rentabilitas Bank

Rentabilitas Mandiri Syariah diukur melalui rasio-rasio berikut.

Tabel Rasio Rentabilitas Bank

(dalam %)

Uraian	2019	2018
Return on Assets (ROA)	1,69%	0,88%
Return on Equity (ROE)	15,65%	8,21%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	82,89%	90,68%

Pada tahun 2019, Mandiri Syariah membukukan *Return on Asset* sebesar 1,69%, meningkat 0,81% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,88%. Di sisi lain *Return on Equity* sebesar 15,65%, meningkat 7,44% dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 8,21%. Sedangkan, rasio BOPO mengalami penurunan 7,79% dari 90,68% di tahun 2018 menjadi sebesar 82,89% per 31 Desember 2019.

Kolektibilitas Piutang Bank

Perhitungan rasio pembiayaan bermasalah Bank pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/SEOJK.03/2015 tanggal 8 Juni 2015 tentang transparansi dan publikasi laporan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Rasio pembiayaan bermasalah Bank secara *gross* (*Non Performing Financing gross* – NPF *gross*) pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 2,44% dan 3,28%, sedangkan rasio pembiayaan bermasalah secara neto (*Non Performing Financing* neto - NPF neto) pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 1,00% dan 1,56%

Kolektibilitas piutang dapat dilihat dari kelancaran pembayaran kredit yang disalurkan. Kredit yang telah disalurkan beserta klasifikasi kolektibilitasnya disajikan sebagai berikut.

Tabel Kolektabilitas Piutang Berdasarkan Sektor Ekonomi, mata uang dan kolektabilitas Tahun 2019

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Rupiah						
Murabahah	38.234.783	800.009	597.499	90.502	217.148	39.939.941
Istishna	-	-	-	29	233	262
Ijarah	-	487	687	29	364	1.567
	38.234.783	800.496	598.186	90.560	217.745	39.941.770
Mata Uang Asing						
Murabahah	225.637	4.701	-	-	-	230.338
Ijarah	-	-	-	-	-	-
	225.637	4.701				230.338
Jumlah piutang	38.460.420	805.197	598.186	90.560	217.745	40.172.108
Cadangan kerugian penurunan nilai dan penyisihan kerugian	(429.360)	(123.753)	(305.382)	(40.816)	(169.873)	(1.069.184)
Bersih	38.031.060	681.444	292.804	49.744	47.872	39.102.924

Tabel Kolektabilitas Piutang Berdasarkan Sektor Ekonomi, mata uang dan kolektabilitas Tahun 2018

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2018					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Rupiah						
Murabahah	35.154.191	1.397.415	244.179	94.410	437.399	37.327.594
Istishna	359	-	-	-	-	359
Ijarah	-	360	122	119	663	1.264
	35.154.550	1.397.775	244.301	94.529	438.062	37.329.217
Mata Uang Asing						
Murabahah	591.556	14.130	38.260	148.457	235.138	1.027.541
Ijarah	-	-	-	-	-	-
	591.556	14.130	38.260	148.457	235.138	1.027.541
Jumlah piutang	35.746.106	1.411.905	282.561	242.986	673.200	38.356.758
Cadangan kerugian penurunan nilai dan penyisihan kerugian	(490.478)	(256.984)	(76.345)	(141.765)	(383.711)	(1.349.283)
Bersih	35.255.628	1.154.921	206.216	101.221	289.489	37.007.475

Tabel Pertumbuhan Kolektabilitas Piutang Berdasarkan Sektor Ekonomi, mata uang dan kolektabilitas

(dalam %)

Uraian	Pertumbuhan					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Rupiah						
Murabahah	8,76%	(42,75%)	144,70%	(4,14%)	(50,35%)	7,00%
Istishna	(100,00%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(27,02%)
Ijarah	0,00%	35,28%	463,11%	(75,63%)	(45,10%)	23,97%
	8,76%	(42,73%)	144,86%	(4,20%)	(50,29%)	7,00%
Mata Uang Asing						
Murabahah	(61,86%)	(66,73%)	(100,00%)	(100,00%)	(100,00%)	(77,58%)
Ijarah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	(61,86%)	(66,73%)	(100,00%)	(100,00%)	(100,00%)	(77,58%)
Jumlah piutang	7,59%	(42,97%)	111,70%	(62,73%)	(67,66%)	4,73%
Cadangan kerugian penurunan nilai dan penyisihan kerugian	(12,46%)	(51,84%)	300,00%	(71,21%)	(55,73%)	(20,76%)
Bersih	7,87%	(41,00%)	41,99%	(50,86%)	(83,46%)	5,66%

Piutang bersih berdasarkan jenis, mata uang dan kolektabilitas pada tahun 2019 mencapai Rp39,10 naik 5,66% dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai Rp37,01 triliun. Kontribusi terbesar kolektabilitas masih didominasi oleh Murabahah Rupiah sebesar Rp39,94 triliun di tahun 2019 yang mengalami peningkatan 7,00% dibandingkan tahun sebelumnya mencapai Rp37,33 triliun.

Sebagai upaya meminimalkan pembiayaan bermasalah, Mandiri Syariah akan melakukan beberapa aktivitas dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM pembiayaan dengan tujuan akhir adalah untuk menjaga kualitas pembiayaan yang di proses dapat termitigasi sejak awal pembiayaan.
2. Meningkatkan kualitas SDM *recovery* dengan tujuan agar dapat melakukan upaya-upaya perbaikan NPF dengan baik dan komprehensif.

3. Menerapkan *early restructuring* untuk nasabah yang terindikasi akan *downgrade*, namun masih memiliki prospek membaik dengan bekerjasama dengan tim *Financing at Risk* (FAR) bisnis unit.
4. Melanjutkan upaya-upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui program sebagai berikut:
   a. Percepatan proses lelang dan pra lelang.
   b. Program insentif penagihan.
   c. Program keringanan diskon *margin*.
5. Bekerjasama dengan pihak ketiga baik balai lelang swasta, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), *property agent*, *asset management company*, maupun kantor konsultan hukum dalam rangka penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara-cara non *generic*.

Struktur Permodalan dan Praktik Manajemen Risiko

Struktur Permodalan

Tujuan Mandiri Syariah dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuannya dalam mempertahankan kelangsungan usaha sehingga Mandiri Syariah dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan mempertahankan struktur permodalan yang optimal untuk mengurangi biaya modal. Struktur modal merupakan perimbangan antara penggunaan modal sendiri dengan pinjaman/liabilitas yang terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.

Rasio Kecukupan Modal – Risiko Kredit mencapai 19,66% meningkat 0,12% di bandingkan tahun 2018 yang mencapai 19,54% sedangkan Rasio Kecukupan Modal – Risiko Kredit, Operasional dan Pasar mencapai 16,15% menurun 0,11% dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencapai 16,26%

Rasio kecukupan modal Bank pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 9,99% sesuai dengan ketentuan dari peraturan No.21/POJK.03/2014 dengan Rasio Kecukupan Modal Minimum dikaitkan dengan profil risiko Bank.

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal dan Dasar Pemilihannya

Kebijakan pengelolaan modal Mandiri Syariah bertujuan untuk memastikan bahwa Mandiri Syariah memiliki struktur permodalan yang efisien, memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan usaha Bank saat ini dan untuk mempertahankan kelangsungan usaha Bank di masa yang akan datang serta untuk memenuhi kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator.

Rencana Permodalan disusun oleh Direksi sebagai bagian dalam Rencana Bisnis Bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Rencana permodalan Bank disusun berdasarkan penilaian atas kecukupan kebutuhan permodalan yang dipersyaratkan, rencana pengembangan usaha, dan kebutuhan likuiditas Bank.

Rincian Struktur Modal

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Struktur permodalan Mandiri Syariah terdiri dari Modal Inti (Tier 1) dan Modal Pelengkap (Tier 2).

Tabel Rasio Kecukupan modal Bank

(dalam jutaan Rupiah)

	Uraian	2019	2018
I	**Komponen Modal**		
A	Modal Inti	8.705.292	7.648.915
	Modal disetor	2.989.022	2.989.022
	Cadangan umum	597.804	597.804
	Laba ditahan awal tahun setelah pajak	3.553.989	3.076.194
	Laba tahun berjalan setelah pajak (100%)	1.275.034	605.213
	Dana setoran modal	-	-
	Pendapatan komprehensif lainnya: potensi keuntungan	710	62.179
	Hak milik intelektual lainnya (termasuk aplikasi piranti lunak (*software*)	(106.992)	(77.222)
	Selisih penilaian kembali aktiva tetap*)	395.725	395.725
B	Modal Pelengkap	906.242	917.856
	Cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif (maksimum 1,25% dari ATMR)	612.492	549.106
	Investasi Subordinasi (maksimum 50% dari jumlah modal inti)	293.750	368.750
II	**Jumlah Modal Inti, Pelengkap dan Modal Pelengkap Tambahan**	9.611.534	8.566.771
III	**Aset Tertimbang Menurut Risiko Kredit**	48.882.605	43.843.607
IV	**Aset Tertimbang Menurut Risiko Operasional**	10.207.271	8.607.703
V	**Aset Tertimbang Menurut Risiko Pasar**	424.641	219.683

	Uraian	2019	2018
VI	**Jumlah Risiko - Aset Tertimbang**	59.514.517	52.670.993
VII	**Rasio Kecukupan Modal - Risiko Kredit**	19,66%	19,54%
VIII	**Rasio Kecukupan Modal - Risiko Kredit dan Pasar**	16,15%	16,26%
IX	**Rasio Kecukupan Modal Minimum**	9,99%**)	9,99%**)

*) Bank melakukan revaluasi terhadap nilai aset tetap dalam kelompok "tanah". Bank telah menerima persetujuan dari kantor pajak atas revaluasi tersebut di tanggal 8 Januari 2016.
**) Sesuai dengan ketentuan dari peraturan No.21/POJK.03/2014 dimana Rasio Kecukupan Modal Minimum dikaitkan dengan profil risiko Bank.

Tabel Pengungkapan Kuantitatif Struktur Permodalan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Bank	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
KOMPONEN MODAL		
I Modal Inti (Tier 1)	8.705.292	7.648.915
1 Modal Inti Utama (CET 1)	8.705.292	7.648.915
1.1 Modal disetor (setelah dikurangi saham *treasury*)	2.989.022	2.989.022
1.2 Cadangan Tambahan Modal	6.209.763	4.996.199
1.2.1 Agio (disagio) saham biasa	-	-
1.2.2 Modal sumbangan	-	-
1.2.3 Cadangan umum	597.804	597.804
1.2.4 Laba (rugi) tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan	3.940.490	3.335.278
1.2.5 Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diperhitungkan	1.275.034	605.213
1.2.6 Selisih karena penjabaran laporan keuangan	-	-
1.2.7 Dana setoran modal	-	-
1.2.8 Waran yang diterbitkan	-	-
1.2.9 Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka program kompensasi berbasis saham	-	-
1.2.10 Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	710	62.179
1.2.11 Saldo *surplus* revaluasi aset tetap	395.725	395.725
1.2.12 Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif	-	-
1.2.13 PPA atas aset non produktif yang wajib dihitung	-	-
1.2.14 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam *trading book*	-	-
1.3 Kepentingan non pengendali yang dapat diperhitungkan	-	-
1.4 Faktor Pengurang Modal Inti Utama	(493.493)	(336.306)
1.4.1 Perhitungan pajak tangguhan	(386.501)	(259.084)
1.4.2 *Goodwill*		-
1.4.3 Aset tidak berwujud lainnya	(106.992)	(77.222)
1.4.4 Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang	-	-
1.4.5 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	-	-
1.4.6 Eksposur sekuritisasi	-	-
1.4.7 Faktor Pengurang modal inti lainnya	-	-
1.4.8 Investasi pada instrumen AT1 dan Tier 2 pada bank lain	-	-
2 Modal Inti Tambahan (AT-1)	-	-
2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT-1	-	-
2.2 Agio (disagio) (+/-)	-	-
2.3 Faktor Pengurang: Investasi pada instrumen AT1 dan Tier 2 pada bank lain	-	-

Uraian			Bank	
			31 Desember 2019	31 Desember 2018
II	Modal Pelengkap (Tier 2)		906.242	917.856
	1 Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan		293.750	368.750
	2 Agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrumen modal pelengkap		-	-
	3 Cadangan umum aset produktif PPA yang wajib dibentuk (maksimal 1,25% ATMR Risiko Kredit)		612.492	549.106
	4 Cadangan tujuan		-	-
	5 Faktor Pengurang Modal Pelengkap		-	-
	5.1	*Sinking Fund*	-	-
	5.2	Investasi pada instrumen Tier 2 pada bank lain	-	-
Total Modal			9.611.534	**8.566.771**

Tabel Pengungkapan Kuantitatif Struktur Permodalan

Uraian	Bank		Uraian	Bank	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018		31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO			**RASIO KPMM**		
ATMR RISIKO KREDIT	48.882.605	43.843.607	Rasio CET1	14,63%	14,52%
ATMR RISIKO PASAR	424.641	219.683	Rasio Tier 1	14,63%	14,52%
ATMR RISIKO OPERASIONAL	10.207.271	8.607.703	Rasio Tier 2	1,52%	1,74%
TOTAL ATMR	59.514.518	52.670.993	Rasio total	16,15%	16,26%
RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO	9,99%	9,99%	CET 1 UNTUK BUFFER	6,16%	6,27%
ALOKASI PEMENUHAN KPMM			**PROSENTASE *BUFFER* YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BANK**		
Dari CET1	4,50%	4,50%	*Capital Conservation Buffer*	2,500%	1,875%
Dari AT1	0,00%	0,00%	*Countercyclical Buffer*	0,000%	0,000%
Dari Tier 2	1,52%	1,74%	*Capital Surcharge* untuk D-SIB	0,000%	0,000%

Praktik Manajemen Risiko

Bagian ini menjelaskan tentang praktik manajemen risiko, untuk penjelasan terkait dengan jenis-jenis risiko disajikan dalam bagian Profil Risiko dan Pengelolaannya pada *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan ini.

Pengungkapan Eksposure Risiko

Risiko Kredit

Berdasarkan Pendekatan Standar, Bank memiliki ATMR risiko kredit sebagai berikut:

Tabel 1. Eksposur Aset di Neraca

(dalam miliar Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2019			31 Desember 2018		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
A	**Eksposur Aset di Neraca yang dibiayai dengan sumber dana *non profit sharing*, kecuali Pembiayaan Bagi Untung (*Profit Sharing*)**	112.678	49.466	47.962	97.607	44.098	43.176
1	Tagihan Kepada Pemerintah	29.121			23.407	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	11.721	4.101	3.961	9.453	3.317	3.167

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2019			31 Desember 2018		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional				-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	3.624	797	784	2.940	686	677
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	10.604	2.866	2.865	9.290	2.540	2.525
6	Pembiayaan Beragun Proporti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	13.619	6.810	6.809	10.557	5.278	5.278
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	12.908	9.681	7.364	11.188	8.391	6.683
9	Tagihan Kepada Korporasi	26.427	24.548	23.118	26.127	23.230	21.524
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	663	663	662	656	656	654
11	Aset Lainnya	3.991		2.399	3.990	-	2.666
B	**Pembiayaan Bagi Untung (*Profit Sharing*) yang dibiayai dengan sumber dana non *profit sharing***	-	-	-	-	-	-
C	**Eksposur Aset di Neraca yang dibiayai dengan sumber dana *profit sharing.***	-	-	-	-	-	-
	Total	**112.678**	**49.466**	**47.962**	**97.607**	**44.098**	**43.176**

Keterangan: MRK (Mitigasi Risiko Kredit) merupakan teknik mitigasi risiko yang dapat digunakan sebagai pengurang ATMR yaitu agunan, garansi, dan/atau penjaminan atau asuransi pembiayaan UMKM sesuai regulasi mengenai perhitungan ATMR Risiko Kredit untuk bank syariah.

Tabel 2. Eksposur Tagihan Komitmen/Kontijensi pada Transaksi Rekening Administratif

(dalam miliar Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2019			31 Desember 2018		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
A	**Eksposur Aset di Neraca yang dibiayai dengan sumber dana *non profit sharing*, kecuali Pembiayaan Bagi Untung (*Profit Sharing*)**	-	-	-	849	754	752
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Korporasi	849	849	848	615	578	577
6	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	253	190	189	234	176	175
7	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
8	Pembiayaan Beragun Proporti Komersial	-	-	-	-	-	-
9	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
B	**Pembiayaan Bagi Untung (*Profit Sharing*) yang dibiayai dengan sumber dana non *profit sharing***	-	-	-	-	-	-
C	**Eksposur Aset di Neraca yang dibiayai dengan sumber dana *profit sharing.***	-	-	-	-	-	-
	Total	**1.102**	**1.039**	**1.037**	**849**	**754**	**752**

Tabel 3. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan *(Counterparty Credit Risk)*

(dalam miliar Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2019			31 Desember 2018		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	1.242	-	-
2	Tagihan kepada Bank Pembangunan *Multilateral* dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**1.242**	**-**	**-**

Tabel 4. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (*settlement risk*)

(dalam miliar Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2019			31 Desember 2018		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
1	*Delivery versus payment*	-	-	-	-	-	-
2	*Non delivery versus payment*	-	-	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Tabel 5. Eksposur Sekuritisasi Aset

(dalam miliar Rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
1	Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
2	Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
3	Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
4	Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
5	Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
6	Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
7	Eksposure Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**

Tabel 6. Total ATMR Risiko Kredit

(dalam miliar Rupiah)

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Total ATMR Risiko Kredit	**48.999**	**43.929**
Total Faktor Pengurang Modal	**-**	**-**

Risiko Pasar

Berdasarkan Pendekatan Standar, Bank memiliki ATMR risiko pasar sebagai berikut:

Tabel 7. Eksposur Risiko Pasar per 31 Desember 2019

(dalam miliar Rupiah)

No	Risiko Pasar	Beban Modal	ATMR
1	Risiko *Benchmark* Suku Bunga	0,07	0,90
	a. Risiko Spesifik	-	-
	b. Risiko Umum	0,07	0,90
2	Risiko Nilai Tukar	17,50	218,78
3	Risiko Ekuitas	-	-
4	Risiko Komoditas	-	-
	Total	**17,57**	**219,68**

Tabel 8. Eksposur Risiko Pasar per 31 Desember 2018

(dalam miliar Rupiah)

No	Risiko Pasar	Beban Modal	ATMR
1	Risiko *Benchmark* Suku Bunga		
	a. Risiko Spesifik		
	b. Risiko Umum	0,06	0,79
2	Risiko Nilai Tukar	33,91	423,85
3	Risiko Ekuitas		
4	Risiko Komoditas		
	Total	**33,97**	**424,64**

Risiko Operasional

Berdasarkan Pendekatan Indikator Dasar, Bank memiliki ATMR risiko operasional sebagai berikut:

Tabel 9. ATMR Risiko Operasional

(dalam miliar Rupiah)

Tahun	Pendapatan Bruto (rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
2019	5.444	817	10.207
2018	4.591	689	8.608

Pengungkapan Kuantitatif Praktik Manajemen Risiko

Risiko Kredit

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah
PT Bank Syariah Mandiri Tgl 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019			
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah			
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	29.119.882	-	1.492
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	1.762	10.573.715	1.076.908	28.551
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	9.676	3.472.999	115.564	-
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	1.185.365	921.101	7.590.611	392.573
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	6.048.252	357.163	2.460.320	1.357.418
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	2.972.332	1.644.450	6.105.245	821.005
9.	Tagihan kepada Korporasi	4.311.895	8.401.090	8.249.833	5.336.931
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	154.806	48.512	392.899	21.255
11.	Aset Lainnya	30.316	3.905.613	31.803	11.495
	Total	**14.714.404**	**58.444.525**	**26.023.183**	**7.970.720**

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2018			
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah			
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	24.648.594	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	663.030	6.795.742	1.718.700	216.861
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	16.541	2.774.035	124.725	-
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	1.093.643	2.074.682	5.064.901	416.658
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	4.794.239	271.693	1.866.277	968.414
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	2.863.245	1.558.595	4.835.050	816.075
9.	Tagihan kepada Korporasi	3.741.432	13.300.242	5.828.248	3.178.127
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	155.275	230.357	141.722	85.016
11.	Aset Lainnya	21.068	3.925.605	25.858	9.832
	Total	**13.348.473**	**55.579.545**	**19.605.481**	**5.690.983**

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2019					
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah					
Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Irian Jaya & Papua	Lain-Lain	Overseas	Total
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
-	-	-	-	-	29.121.374
39.598	-	-	-	-	11.720.534
-	-	-	-	-	-
25.892	-	-	-	-	3.624.131
279.093	198.187	36.570	-	-	10.603.500
-	-	-	-	-	-
2.710.597	485.065	200.523	-	-	13.619.338
967.083	558.693	92.127	-	-	13.160.935
695.282	143.627	137.997	-	-	27.276.655
30.361	12.206	2.857	-	-	662.896
6.958	2.743	1.741	-	-	3.990.669
4.754.864	**1.400.521**	**471.815**	**-**	**-**	**113.780.032**

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2018					
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah					
Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Irian Jaya & Papua	Lain-Lain	Overseas	Total
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
-	-	-	-	-	29.121.374
39.598	-	-	-	-	11.720.534
-	-	-	-	-	-
25.892	-	-	-	-	3.624.131
279.093	198.187	36.570	-	-	10.603.500
-	-	-	-	-	-
2.710.597	485.065	200.523	-	-	13.619.338
967.083	558.693	92.127	-	-	13.160.935
695.282	143.627	137.997	-	-	27.276.655
30.361	12.206	2.857	-	-	662.896
6.958	2.743	1.741	-	-	3.990.669
4.754.864	**1.400.521**	**471.815**	**-**	**-**	**113.780.032**

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak
PT Bank Syariah Mandiri Tgl 31 Desember 2019 dan 2018

No.	KATEGORI PORTOFOLIO	≤ 1 tahun
(1)	(2)	(3)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	25.069.458
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	5.595.309
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-
4.	Tagihan Kepada Bank	3.347.210
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	98.454
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	40.600
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	3.540.256
9.	Tagihan kepada Korporasi	9.210.365
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	174.206
11.	Aset Lainnya	1.397.355
	Total	**48.473.213**

No.	KATEGORI PORTOFOLIO	≤ 1 tahun
(1)	(2)	(3)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	18.427.004
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	5.302.730
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-
4.	Tagihan Kepada Bank	2.588.884
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	55.678
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	48.119
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	2.766.257
9.	Tagihan kepada Korporasi	6.801.573
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	208.094
11.	Aset Lainnya	1.688.608
	Total	**37.886.947**

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2019				
TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SISA JANGKA WAKTU KONTRAK				
> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non- Kontraktual	Total
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.051.916	-	-	-	29.121.374
2.175.744	1.070.815	2.878.666	-	11.720.534
-	-	-	-	-
182.399	44.992	49.530	-	3.624.131
761.705	1.519.526	8.223.815	-	10.603.500
-	-	-	-	-
514.814	1.204.997	11.858.927	-	13.619.338
3.203.088	3.487.562	2.930.029	-	13.160.935
3.719.953	3.599.761	10.746.576	-	27.276.655
121.803	106.836	260.051	-	662.896
-	-	-	2.593.314	3.990.669
14.731.422	**11.034.489**	**36.947.594**	**2.593.314**	**113.780.032**

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2019				
TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SISA JANGKA WAKTU KONTRAK				
> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non- Kontraktual	Total
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.023.831	197.759	-	-	24.648.594
1.639.567	1.249.294	1.261.513	-	9.453.104
-	-	-	-	-
221.182	64.657	65.288	-	2.940.011
429.810	1.000.898	7.803.209	-	9.289.595
-	-	-	-	-
535.768	1.160.816	8.812.256	-	10.556.959
3.049.934	3.347.495	2.258.766	-	11.422.452
5.389.119	5.516.293	9.034.193	-	26.741.178
169.011	77.840	200.611	-	655.556
-	-	-	2.301.566	3.990.174
17.458.222	**12.615.052**	**29.435.836**	**2.301.566**	**99.697.623**

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi
PT Bank Syariah Mandiri Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

NO	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	31 Desember 2019				
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	-	-	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
4	Industri Pengolahan	-	935.244	-	-
5	Listrik, Gas, dan Air	-	1.700.000	-	-
6	Konstruksi	-	3.200.194	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	-	-	-
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	348.841	-	-
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	-	1.226.325	-	-
10	Perantara Keuangan	-	1.410.424	-	151.133
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	915.006	-	-
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.492	281.047	-	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	-	1.769	-	-
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-
17	Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-
20	Lainnya	29.119.882	1.701.684	-	3.472.998
Total		**29.121.374**	**11.720.534**	**-**	**3.624.131**
	31 Desember 2018				
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	-	210.043	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	36.581	-	-
4	Industri Pengolahan	-	223.337	-	-
5	Listrik, Gas, dan Air	-	1.700.665	-	-
6	Konstruksi	-	3.464.699	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	33.765	-	-
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	303.244	-	-

(dalam jutaan Rupiah)

Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
-	-	41	478.051	3.319.798	73.280	-
-	-	-	19.475	4.077	767	-
-	-	-	4.061	961.298	6.949	-
-	-	-	140.624	2.015.246	166.398	-
-	-	-	14.491	826.593	145.172	-
-	-	-	257.489	3.898.164	13.836	-
-	-	12	1.072.764	1.627.734	53.203	-
-	-	44	140.652	506.369	3.922	-
-	-	-	53.166	1.085.661	13.944	-
-	-	-	25.282	4.270.229	12.768	-
-	-	-	49.779	952.547	7.492	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	81.474	1.915.892	3.208	-
-	-	-	50.356	3.783.363	325	-
-	-	-	609.690	205.754	18.710	-
-	-	-	9.057	1.789	513	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
10.603.500	-	13.619.241	9.901.837	716.565	142.409	-
-	-	-	252.687	1.185.576	-	3.990.669
10.603.500	**-**	**13.619.338**	**13.160.935**	**27.276.655**	**662.896**	**3.990.669**
-	-	-	576.737	2.631.261	30.549	-
-	-	-	30.166	18.299	902	-
-	-	-	4.815	1.134.540	551	-
-	-	-	193.443	2.448.017	12.945	-
-	-	-	21.464	1.895.922	259.948	-
-	-	-	119.909	1.840.344	5.715	-
-	-	-	1.359.795	1.902.932	54.699	-
-	-	-	169.034	353.098	5.189	-

NO	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	-	5.090	-	-
10	Perantara Keuangan	-	1.017.412	-	177.109
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	991.286	-	-
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	-	109	-	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	253.274	-	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	-	4.408	-	-
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-
17	Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-
20	Lainnya	24.648.594	1.209.191	-	2.762.902
Total		**24.648.594**	**9.453.104**	**-**	**2.940.011**

Pengungkapan Tagihan Dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah
PT Bank Syariah Mandiri Tgl 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Kategori Portofolio	Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tagihan	14.876.263	59.439.674	26.916.488	8.047.660
2.	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired)	-	-	-	-
	a. Belum jatuh tempo	648.297	388.087	1.482.849	317.886
	b. Telah jatuh tempo	22.808	3.075	240.259	2.128
3.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	14.001	209.174	343.709	52.101
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	256.605	291.255	666.214	99.743
5.	Tagihan yang dihapus buku	1.341.087	5.675.511	1.948.078	324.633

Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
-	-	-	66.063	2.214.127	6.761	-
-	-	-	35.018	5.050.172	15.469	-
-	-	-	87.484	1.170.903	6.257	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	84.735	1.742.052	2.434	-
-	-	-	71.713	2.016.101	51.956	-
-	-	-	910.848	322.713	17.947	-
-	-	-	17.036	5.669	1.426	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
9.289.595	-	10.556.959	7.439.328	1.135.977	182.808	-
-	-	-	234.864	859.051	-	3.990.174
9.289.595	**-**	**10.556.959**	**11.422.452**	**26.741.178**	**655.556**	**3.990.174**

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2019					
TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN WILAYAH					
Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Irian Jaya & Papua	Lain-Lain	Overseas	Total
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.788.017	1.410.535	476.257	-	-	115.954.894
-	-	-	-	-	-
225.960	86.483	9.684	-	-	3.159.246
2.340	1.538	58	-	-	272.206
-	-	5.476	-	-	624.461
59.546	16.652	7.435	-	-	1.397.450
261.406	72.612	48.087	-	-	9.671.414

No.	Kategori Portofolio	Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tagihan	13.478.714	57.145.198	20.292.284	5.793.839
2.	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired)	-	-	-	-
	a. Belum jatuh tempo	470.851	1.769.725	905.248	390.061
	b. Telah jatuh tempo	40.526	55.999	344.731	3.638
3.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	3.300	451.598	524.046	65.660
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	276.214	383.636	373.996	131.524
5.	Tagihan yang dihapus buku	1.428.645	4.124.782	1.985.251	330.392

Pengungkapan Tagihan dan Pencadagan Berdasarkan Sektor Ekonomi
PT Bank Syariah Mandiri Tgl 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Belum jatuh tempo
(1)	(2)	(3)	(4)
	31 Desember 2019		
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	3.901.087	224.333
2	Perikanan	34.185	15.821
3	Pertambangan dan Penggalian	1.006.821	39.994
4	Industri Pengolahan	3.728.531	545.360
5	Listrik, Gas, dan Air	3.073.932	533.492
6	Konstruksi	7.391.648	60.934
7	Perdagangan Besar dan Eceran	2.871.516	385.642
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1.009.987	37.851
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	2.440.505	201.106
10	Perantara Keuangan	6.101.890	77.841
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1.992.479	54.541
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-
13	Jasa Pendidikan	2.004.898	62.305
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.133.435	115.843
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	863.104	114.045
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	11.820	2.540
19	Bukan Lapangan Usaha	35.143.405	687.598
20	Lainnya	40.245.652	-
	Total	**115.954.895**	**3.159.246**

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2019					
TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN WILAYAH					
Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Irian Jaya & Papua	Lain-Lain	Overseas	Total
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.805.682	1.238.762	488.154	-	-	102.242.633
-	-	-	-	-	-
255.884	89.188	24.408	-	-	3.905.365
4.919	4.009	3.932	-	-	457.754
-	-	1.159	-	-	1.045.763
66.488	22.897	13.860	-	-	1.268.615
268.426	73.904	53.257	-	-	8.264.657

(dalam jutaan Rupiah)

Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)-Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)-Kolektif	Tagihan yang dihapus buku
Telah jatuh tempo				
(5)		(6)	(7)	(8)
6.751		-	88.137	155.101
470		9.042	1.101	2.593
-		12.745	10.808	122.261
211.214		425.381	70.277	101.305
69		96.755	317.503	392.120
6.825		-	97.936	201.836
27.029		19.477	84.136	359.377
1.450		-	21.431	13.822
159		50.931	55.368	100.651
645		-	79.726	260.128
2.423		10.130	32.919	18.410
-		-	-	51
-		-	25.727	914
133		-	52.661	5.580
3.025		-	31.895	156.179
119		-	578	1.670
11.894		-	373.192	7.779.416
-		-	54.055	-
272.206		**624.461**	**1.397.450**	**9.671.414**

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Belum jatuh tempo
(1)	(2)	(3)	(4)
	31 Desember 2018		
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	3.472.146	85.262
2	Perikanan	50.772	18.480
3	Pertambangan dan Penggalian	1.185.959	72.110
4	Industri Pengolahan	3.395.671	456.737
5	Listrik, Gas, dan Air	4.307.719	1.147.391
6	Konstruksi	5.443.546	81.279
7	Perdagangan Besar dan Eceran	3.448.088	376.972
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	838.899	34.340
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	2.445.439	453.942
10	Perantara Keuangan	6.936.997	161.574
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	2.280.177	90.124
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-
13	Jasa Pendidikan	1.832.795	39.832
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.400.758	84.278
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	1.284.564	101.375
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	25.474	5.469
19	Bukan Lapangan Usaha	28.772.806	696.200
20	Lainnya	34.120.823	-
	Total	**102.242.633**	**3.905.365**

Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

No.	KETERANGAN	31 Desember 2019	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Saldo awal CKPN	1.045.763	1.268.613
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	-	-
	a Pembentukan CKPN pada periode berjalan	-	1.212.749
	b Pemulihan CKPN pada periode berjalan	(411.728)	-
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	-	(1.081.252)
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	(9.574)	(2.660)
Saldo akhir CKPN		624.461	1.397.450

Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)-Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)-Kolektif	Tagihan yang dihapus buku
Telah jatuh tempo			
(5)	(6)	(7)	(8)
13.414	-	69.359	163.332
1.031	-	2.392	2.673
987	16.340	13.601	124.515
271.075	506.653	47.526	101.480
96	377.152	85.886	397.350
7.247	2.654	66.593	209.180
39.653	4.459	145.691	376.984
3.385	-	19.869	15.258
18.838	135.998	47.288	100.658
1.801	-	141.707	261.619
12.739	2.507	40.048	19.273
-	-	-	51
13	-	28.624	995
679	-	35.557	7.445
11.783	-	56.888	166.132
371	-	1.789	1.918
24.311	-	396.057	6.315.794
50.331	-	69.740	-
457.754	**1.045.763**	**1.268.615**	**8.264.657**

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2018	
CKPN Individual	CKPN Kolektif
(5)	**(6)**
759.399	1.231.130
-	-
274.455	1.353.214
-	-
-	(1.319.960)
11.909	4.231
1.045.763	1.268.615

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat
PT Bank Syariah Mandiri Tgl 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019				
		Tagihan Bersih				
		Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka Panjang			
		Standard and Poor's	AAA	AA+s.dAA-	A+s.dA-	BBB+ s.d BBB-
		Fitch Rating	AAA	AA+s.dAA-	A+s.dA-	BBB+ s.d BBB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB- (idn)
		PT. Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d idA-	idBBB+ s.d idBBB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan Kepada Pemerintah		201.042	-	92.000	8.384.176
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		3.015.000	2.849.529	1.928.000	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		984.290	102	77.000	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal		-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial		-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan		-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Retail		-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi		932.885	-	2.265.546	44.870
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo		-	-	-	-
11	Aset Lainnya		-	-	-	-
Total			**5.133.217**	**2.849.631**	**4.362.546**	**8.429.046**

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2019								
Tagihan Bersih								
Peringkat Jangka Panjang							Tanpa Peringkat	Total
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
BB+(idn) s.d	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
id BB+ s.d idBB-	id B+ s.d idB-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA4	Kurang dari idA4		
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
-	-	-	-	-	-	-	20.444.156	29.121.374
-	-	-	-	-	-	-	3.928.005	11.720.534
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2.562.739	3.624.131
-	-	-	-				-	
-	-	-	-				-	
-	-	-	-				-	
-	-	-	-				-	
45.989	-	-	-	-	-	-	23.138.098	26.427.388
-	-	-	-				-	
-	-	-	-				-	
45.989	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50.072.998**	**70.893.427**

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2018				
		Tagihan Bersih				
		Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka Panjang			
		Standard and Poor's	AAA	AA+s.dAA-	A+s.dA-	BBB+ s.d BBB-
		Fitch Rating	AAA	AA+s.dAA-	A+s.dA-	BBB+ s.d BBB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB- (idn)
		PT. Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d idA-	idBBB+ s.d idBBB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan Kepada Pemerintah		182.910	-	92.000	12.473.694
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		2.800.000	1.899.067	1.314.000	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		488.356	3.614	77.000	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal		-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial		-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan		-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Retail		-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi		1.596.101	-	3.312.241	110.846
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo		-	-	-	-
11	Aset Lainnya		-	-	-	-
Total			**5.067.367**	**1.902.681**	**4.795.241**	**12.584.540**

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2018								
Tagihan Bersih								
Peringkat Jangka Panjang							Tanpa Peringkat	Total
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
BB+(idn) s.d	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
id BB+ s.d idBB-	id B+ s.d idB-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA4	Kurang dari idA4		
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
-	-	-	-	-	-	-	11.899.991	24.648.595
-	-	-	-	-	-	-	3.440.037	9.453.104
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2.371.041	2.940.011
-	-						-	
-	-						-	
-	-						-	
-	-						-	
137.229	-	-	-	-	-	-	21.584.761	26.741.178
-	-						-	
-	-						-	
137.229	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39.295.830**	**63.782.888**

Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)
PT Bank Syariah Mandiri Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

(1) Transaksi Lindung Nilai Syariah Over the Counter

No	Variabel yang Mendasari	31 Desember 2019			
		Nilai Notional			Tagihan Lindung Nilai Syariah
		≤ 1 Tahun	> 1 Tahun - ≤ 5 Tahun	> 5 Tahun	
1	Shariah Compliant Profit Rate Swap	-	-	-	-
2	Shariah Compliant Foreign Currency Swap	-	-	-	-
3	Lainnya	-	-	-	-
Total		**-**	**-**	**-**	**-**

(2) Transaksi *Repo*

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2019			
		Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multi lateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Keci l dan Portofolio Retail	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**

(3) Transaksi *Reverse Repo*

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2019			
		Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multi lateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Keci l dan Portofolio Retail	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2019			
Tagihan Bersih setelah MRK	MRK	Tagihan Bersih sebelum MRK	Kewajiban Lindung
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2018			
	Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
	(7)	(8)	(9)	(10)
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	**-**	**-**	**-**

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2018			
	Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK	ATMR Setelah MRK
	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.241.693	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	1.241.693	**-**	**-**	**-**

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit PT Bank Syariah Mandiri Tgl 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019					
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Mitigasi Resiko Kredit					
		(0%)	(20%)	(25%)	(35%)	(40%)	(45%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Eksposur Neraca						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	1.172.906	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	676.694	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	723.891	756.490	1.384.763	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Retail	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	186.577	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Neraca	-	2.760.068	756.490	1.384.763	-	-
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Retail	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA	-	-	-	-	-	-
C	Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Retail	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2019						
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Mitigasi Resiko Kredit						
(50%)	(75%)	(100%)	(150%)	(Lainnya)	ATMR	Beban Modal
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
-	-	-	-	-	-	-
2.788.036	-	-	-	-	3.960.942	395.698
-	-	-	-	-	-	-
107.711	-	-	-	-	784.405	78.362
-	-	-	-	-	2.865.144	286.228
-	-	-	-	-	-	-
6.809.467	-	-	-	-	6.809.467	680.266
-	7.363.918	-	-	-	7.363.918	735.655
1.132.773	-	21.798.783	-	-	23.118.133	2.309.501
-	-	662.040	-	-	662.040	66.138
-	-	2.398.707	-	-	2.398.707	239.631
10.837.987	7.363.918	24.859.530	-	-	47.962.756	4.791.479
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	188.681	-	-	-	188.681	18.849
-	-	847.907	-	-	847.907	84.706
-	-	-	-	-	-	-
-	188.681	847.907	-	-	1.036.588	103.555
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2018					
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Mitigasi Resiko Kredit					
		(0%)	(20%)	(25%)	(35%)	(40%)	(45%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Eksposur Neraca						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	939.813	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	522.725	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	546.948	753.044	1.225.092	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Retail	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	319.220	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Neraca	-	2.328.706	753.044	1.225.092	-	-
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Retail	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA	-	-	-	-	-	-
C	Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Retail	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	-	-	-	-	-	-

31 Desember 2018						
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Mitigasi Resiko Kredit						
(50%)	(75%)	(100%)	(150%)	(Lainnya)	ATMR	Beban Modal
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
-	-	-	-	-	-	-
2.227.036	-	-	-	-	3.166.849	316.368
-	-	-	-	-	-	-
154.698	-	-	-	-	677.423	67.675
-	-	-	-	-	2.525.084	252.256
-	-	-	-	-	-	-
5.278.325	-	-	-	-	5.278.325	527.305
-	6.683.438	-	-	-	6.683.438	667.675
1.594.379	-	19.610.837	-	-	21.524.436	2.150.291
-	-	654.388	-	-	654.388	65.373
-	-	2.666.093	-	-	2.666.093	266.343
9.254.438	6.683.438	22.931.318	-	-	43.176.036	4.313.286
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	175.189	-	-	-	175.189	17.501
36.741	-	540.563	-	-	577.304	57.673
-	-	-	-	-	-	-
36.741	175.189	540.563	-	-	752.493	75.174
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit
PT Bank Syariah Mandiri Tgl 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019		
		Bagian Yang Dijamin Dengan		
		Tagihan Bersih	Agunan	Garansi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	**Exposur Neraca**			
1	Tagihan Kepada Pemerintah	29.121.374	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	11.720.534	279.933	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	3.624.131	25.240	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	10.603.500	1.620	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	13.619.338	405	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Retail	12.908.248	3.089.691	-
9	Tagihan kepada Korporasi	26.427.388	1.430.174	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	662.896	856	-
11	Aset Lainnya	3.990.669	-	-
	Total Eksposur Neraca	112.678.078	4.827.919	-
B	**Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif**			
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Retail	252.687	1.112	-
9	Tagihan kepada Korporasi	849.267	1.360	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-
	Total Eksposur TRA	1.101.954	2.472	-
C	**Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)**			
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Retail	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-
Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*		**-**	**-**	**-**

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2019		
Bagian Yang Dijamin Dengan		Bagian Yang Tidak Dijamin
Asuransi Pembiayaan	Lainnya	
(6)	(7)	(8)
-	-	29.121.374
-	-	11.440.602
-	-	-
-	-	3.598.891
-	-	10.601.880
-	-	-
-	-	13.618.933
-	-	9.818.557
-	-	24.997.214
-	-	662.040
-	-	-
-	-	103.859.491
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	251.575
-	-	847.907
-	-	1.887
-	-	1.101.369
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2018		
		Bagian Yang Dijamin Dengan		
		Tagihan Bersih	Agunan	Garansi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	**Exposur Neraca**			
1	Tagihan Kepada Pemerintah	23.406.901	0	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	9.453.104	299.965	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	2.940.011	16.989	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	9.289.595	42.417	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	10.556.959	309	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Retail	11.188.129	2.276.878	-
9	Tagihan kepada Korporasi	26.126.611	1.730.915	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	655.556	1.168	-
11	Aset Lainnya	3.990.174	-	-
	Total Eksposur Neraca	97.607.040	4.368.641	-
B	**Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif**			
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Retail	234.323	738	-
9	Tagihan kepada Korporasi	614.567	521	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-
	Total Eksposur TRA	848.890	1.259	-
C	**Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)**			
1	Tagihan Kepada Pemerintah	1.241.693	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Retail	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-
Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*		**1.241.693**	**-**	**-**

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2018		
Bagian Yang Dijamin Dengan		Bagian Yang Tidak Dijamin
Asuransi Pembiayaan	Lainnya	
(6)	(7)	(8)
-	-	23.406.901
-	-	9.153.138
-	-	-
-	-	2.923.021
-	-	9.247.177
-	-	-
-	-	10.556.650
-	-	8.911.251
-	-	24.395.696
-	-	654.388
-	-	-
-	-	89.248.222
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	233.885
-	-	614.045
-	-	-
-	-	847.930
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	**-**	**-**

Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi Aset
PT Bank Syariah Mandiri Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Eksposur Sekuritisasi	31 Desember 2019			
		Nilai Aset yang Disekuritisasi	Nilai Aset yang Disekuritisasi yang Mengalami Penurunan Nilai		Laba/Rugi dari Aktivitas Sekuritisasi
			Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bank bertindak sebagai Kreditur Asal - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-
2.	Bank bertindak sebagai Penyedia Kredit Pendukung	-	-	-	-
	a. Fasilitas penanggung risiko pertama - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-
	b. Fasilitas penanggung risiko kedua - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-
3.	Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-
4.	Bank bertindak sebagai Penyedia Jasa - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-
5.	Bank bertindak sebagai Bank Kustodian - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-
6.	Bank bertindak sebagai Pemodal	-	-	-	-
	a. Senior trache - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-
	b. Junior trache - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-

Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Aset Dalam Hal Bus Bertindak sebagai Kreditur Asal
PT Bank Syariah Mandiri Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Underlying Asset
(1)	(2)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah
2.	Tagihan Kedapa Entitas Sektor Publik
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4.	Tagihan Kepada Bank
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Retail
9.	Tagihan kepada Korporasi
10.	Aset Lainnya
Total	

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2019		31 Desember 2019					
ATMR	Pengurang Modal	Nilai Aset yang Disekuritisasi	Nilai Aset yang Disekuritisasi yang Mengalami Penurunan Nilai		Laba/Rugi dari Aktivitas Sekuritisasi	ATMR	Pengurang Modal
			Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo			
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2019		31 Desember 2018	
Nilai Aset Yang Disekuritisasi	Keuntungan (Kerugian) Penjualan	Nilai Aset Yang Disekuritisasi	Keuntungan (Kerugian) Penjualan
(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Pengungkapan Perhitungan ATMR Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar

(1) Eksposur Aset di Neraca **(dalam jutaan Rupiah)**

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019			31 Desember 2018		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	29.121.374	-	-	23.406.901	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	11.720.534	4.100.908	3.960.942	9.453.104	3.316.832	3.166.849
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	3.624.131	797.025	784.405	2.940.011	685.917	677.423
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	10.603.500	2.865.567	2.865.144	9.289.595	2.539.633	2.525.084
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	13.619.338	6.809.669	6.809.467	10.556.959	5.278.480	5.278.325
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro. Usaha Kecil dan Portofolio Retail	12.908.248	9.681.186	7.363.918	11.188.129	8.391.097	6.683.438
9	Tagihan kepada Korporasi	26.427.388	24.548.308	23.118.133	26.126.611	23.230.352	21.524.437
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	662.896	662.896	662.040	655.556	655.556	654.388
11	Aset Lainnya	3.990.669	-	2.398.707	3.990.174	-	2.666.093
Total		**112.678.078**	**49.465.559**	**47.962.756**	**97.607.040**	**44.097.867**	**43.176.037**

(2) Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif **(dalam jutaan Rupiah)**

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019			31 Desember 2018		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	252.687	189.515	188.681	234.323	175.742	175.189
9	Tagihan kepada Korporasi	849.267	849.267	847.907	614.567	577.825	577.304
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
Total		**1.101.954**	**1.038.782**	**1.036.588**	**848.890**	**753.567**	**752.493**

(3) Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) **(dalam jutaan Rupiah)**

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019			31 Desember 2018		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	1.241.693	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
Total		**-**	**-**	**-**	**1.241.693**	**-**	**-**

(4) Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (*settlement risk*) **(dalam jutaan Rupiah)**

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019			31 Desember 2018		
		Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK	Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Delivery versus payment	-	-	-	-	-	-
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari)	-	-	-	-	-	-
	b. Beban Modal 50% (16-30 hari)	-	-	-	-	-	-
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari)	-	-	-	-	-	-
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)	-	-	-	-	-	-
2	Non-delivery versus payment	-	-	-	-	-	-
Total		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(5) Eksposur Sekuritisasi **(dalam jutaan Rupiah)**

No.	Jenis Transaksi	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR Seteleh MRK	Faktor Pengurang Modal	ATMR Seteleh MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fasilitas Pembiayaan Pendukung yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
2	Fasilitas PembiayaanPendukung yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
3	Fasilitas Pembiayaan yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
4	Fasilitas Pembiayaan yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
5	Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
6	Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
7	Eksposur Sekuritisasi yang tidak mencakup dalam ketentuan yang mengatur mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian dalam aktivitas	-	-	-	-
Total		**-**	**-**	**-**	**-**

(6) Total Pengukuran Risiko Kredit

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Total ATMR Risiko Kredit	48.999.344	43.928.530
Total Faktor Pengurang Modal		

Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah dan Valuta Asing
PT BANK SYARIAH MANDIRI Tgl 31 Desember 2019 dan 2018

a) Profil Maturitas Rupiah

No.	POS-POS	Saldo		
			≤ 1 Bulan	>1 s.d.3 Bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Neraca			
	A. Aset			
	1. Kas	1.296.861	1.296.861	-
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	8.735.316	8.185.316	150.000
	3. Penempatan pada bank lain	310.791	243.019	67.772
	4. Surat Berharga yang Dimiliki	21.121.179	9.744.183	3.900.045
	5. Piutang Murabahah (*gross*)	62.783.247	331.634	758.149
	6. Piutang Salam	-	-	-
	7. Piutang Istishna	262	233	-
	8. Piutang Qardh	6.025.921	756.228	2.865.438
	9. Pembiayaan Mudharabah	1.728.150	1.668	23.558
	10. Pembiayaan Musyarakah	24.882.929	1.884.940	2.746.298
	11. Ijarah	296.406	5	381
	12. Aset lainnya	205.495	205.495	-
	B. Liabilitas			
	1. DPK			
	a. Giro Wadiah	10.573.021	10.573.021	-
	b. Deposito Mudharabah	43.070.887	30.739.819	8.374.140
	c. Tabungan Wadiah	5.126.726	5.126.726	-
	d. Tabungan Mudharabah	34.643.648	34.116.874	21.043
	e. Lainnya	-	-	-
	2. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-
	3. Liabilitas kepada bank lain	567.977	537.937	11.525
	4. Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-
	5. Pembiayaan yang Diterima	-	-	-
	6. Liabilitas lainnya	-	-	-
	C. REK. ADMINISTRATIF			
	1. Kewajiban Komitmen	20.192	20.192	-
	2. Kewajiban Kontinjensi	1.128.612	1.128.612	-
	D. SELISIH (A-B)	33.404.298	(58.444.795)	2.104.933

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2019		
Jatuh Tempo		
>3 s.d.6 Bulan	**>6 s.d.12 Bulan**	**>12 bulan**
(6)	(7)	(8)
-	-	-
400.000	-	-
-	-	-
129.212	1.711.223	5.636.516
447.681	868.409	60.377.374
-	-	-
-	-	29
1.918.984	317.758	167.513
144.539	222.364	1.336.021
1.881.737	1.401.559	16.968.395
1.127	19.125	275.768
-	-	-
-	-	-
1.935.471	1.746.783	274.674
-	-	-
33.451	65.876	406.404
-	-	-
-	-	-
5.263	6.952	6.300
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
2.949.095	2.720.827	84.074.238

No.	POS-POS	Saldo		
			≤ 1 Bulan	>1 s.d.3 Bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Neraca			
	A. Aset			
	1. Kas	1.128.010	1.128.010	-
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	8.593.890	8.593.890	-
	3. Penempatan pada bank lain	151.269	122.073	29.196
	4. Surat Berharga yang Dimiliki	16.117.013	4.175.215	1.224.294
	5. Piutang Murabahah (*gross*)	58.295.427	290.682	1.132.943
	6. Piutang Salam	-	-	-
	7. Piutang Istishna	359	-	-
	8. Piutang Qardh	4.058.088	926.402	1.928.862
	9. Pembiayaan Mudharabah	3.273.030	929	14.864
	10. Pembiayaan Musyarakah	19.316.753	1.114.294	2.230.317
	11. Ijarah	498.709	3	97
	12. Aset lainnya	56.948	56.948	-
	B. Liabilitas			
	1. DPK			
	a. Giro Wadiah	7.495.828	7.495.828	-
	b. Deposito Mudharabah	39.208.126	31.110.101	4.888.780
	c. Tabungan Wadiah	3.751.591	3.751.591	-
	d. Tabungan Mudharabah	31.318.420	30.812.565	20.728
	e. Lainnya	-	-	-
	2. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-
	3. Liabilitas kepada bank lain	555.931	528.123	13.140
	4. Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-
	5. Pembiayaan yang Diterima	-	-	-
	6. Liabilitas lainnya	-	-	-
	C. REK. ADMINISTRATIF			
	1. Kewajiban Komitmen	6.969	6.969	-
	2. Kewajiban Kontinjensi	698.343	698.343	-
	D. SELISIH (A-B)	29.159.600	(57.289.762)	1.637.925

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2018		
Jatuh Tempo		
>3 s.d.6 Bulan	>6 s.d.12 Bulan	>12 bulan
(6)	(7)	(8)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
2.978.436	341.477	7.397.590
675.979	701.989	55.493.834
-	-	-
287	5	68
1.034.788	3.617	164.419
140.994	331.104	2.785.139
1.910.213	1.541.561	12.520.367
2.346	5.856	490.407
-	-	-
-	-	-
1.527.037	1.610.071	72.138
-	-	-
30.128	55.235	399.765
-	-	-
-	-	-
4.815	9.852	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
5.181.063	1.250.451	78.379.921

b) Profil Maturitas Valas

No.	POS-POS	Saldo	≤ 1 Bulan	>1 s.d.3 Bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Neraca			
	A. Aset			
	1. Kas	21.257	21.257	-
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	163.920	163.920	-
	3. Penempatan pada bank lain	140.511	140.511	-
	4. Surat Berharga yang Dimiliki	-	-	-
	5. Piutang Murabahah (gross)	17.587	-	121
	6. Piutang Salam	-	-	-
	7. Piutang Istishna	-	-	-
	8. Piutang Qardh	34.341	14.680	11.495
	9. Pembiayaan Mudharabah	-	-	-
	10. Pembiayaan Musyarakah	136.106	-	-
	11. Ijarah	5.122	-	-
	12. Aset lainnya	6.414	6.414	-
	B. Liabilitas			
	1. DPK			
	a. Giro Wadiah	281.441	281.441	-
	b. Deposito Mudharabah	177.098	125.006	24.309
	c. Tabungan Wadiah	-	-	-
	d. Tabungan Mudharabah	2.145	2.145	-
	e. Lainnya	-	-	-
	2. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-
	3. Liabilitas kepada bank lain	-	-	-
	4. Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-
	5. Pembiayaan yang Diterima	-	-	-
	6. Liabilitas lainnya	-	-	-
	C. REK. ADMINISTRATIF			
	1. Kewajiban Komitmen	779	779	-
	2. Kewajiban Kontinjensi	33.565	33.565	-
	D. SELISIH (A-B)	64.574	(61.810)	(12.693)

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2019		
Jatuh Tempo		
>3 s.d.6 Bulan	>6 s.d.12 Bulan	>12 bulan
(6)	(7)	(8)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	14.709	2.757
-	-	-
-	-	-
8.096	13	56
-	-	-
20.000	-	116.106
-	1.875	3.248
-	-	-
-	-	-
4.718	22.926	140
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
23.378	(6.329)	122.027

No.	POS-POS	Saldo	≤ 1 Bulan	>1 s.d.3 Bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Neraca			
	A. Aset			
	1. Kas	13.635	13.635	-
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	74.020	74.020	-
	3. Penempatan pada bank lain	124.312	124.312	-
	4. Surat Berharga yang Dimiliki	10.057	-	10.057
	5. Piutang Murabahah (gross)	76.335	-	55
	6. Piutang Salam	-	-	-
	7. Piutang Istishna	-	-	-
	8. Piutang Qardh	608	608	-
	9. Pembiayaan Mudharabah	-	-	-
	10. Pembiayaan Musyarakah	148.284	-	-
	11. Ijarah	7.538	-	-
	12. Aset lainnya	2.469	2.469	-
	B. Liabilitas			
	1. DPK			
	a. Giro Wadiah	164.810	164.810	-
	b. Deposito Mudharabah	264.763	244.968	9.139
	c. Tabungan Wadiah	-	-	-
	d. Tabungan Mudharabah	-	-	-
	e. Lainnya	-	-	-
	2. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-
	3. Liabilitas kepada bank lain	-	-	-
	4. Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-
	5. Pembiayaan yang Diterima	-	-	-
	6. Liabilitas lainnya	-	-	-
	C. REK. ADMINISTRATIF	-	-	-
	1. Kewajiban Komitmen	4.754	4.754	-
	2. Kewajiban Kontinjensi	32.347	32.347	-
	D. SELISIH (A-B)	27.685	(194.734)	973

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2018		
Jatuh Tempo		
>3 s.d.6 Bulan	>6 s.d.12 Bulan	>12 bulan
(6)	(7)	(8)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	19.428	56.852
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
21.903	616	125.765
-	2.355	5.182
-	-	-
-	-	-
2.716	7.848	92
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
19.187	14.551	187.707

Risiko Operasional

Pengungkapan Risiko Operasional Menggunakan Metode Standar
PT Bank Syariah Mandiri Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Pendekatan Yang Digunakan	31 Desember 2019		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendekatan Indikator Standar	5.443.878	816.582	10.207.271
TOTAL		5.443.878	816.582	10.207.271

Risiko Pasar

Pengungkapan Risiko Pasar Menggunakan Metode Standar
PT Bank Syariah Mandiri Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Jenis Risiko	31 Desember 2019			
		Bank		Konsolidasi	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Risiko Benchmark Suku Bunga				
	a. Risiko Spesifik				
	b. Risiko Umum	63	788		
2	Risiko Nilai Tukar	33.908	423.854		
3	Risiko Ekuitas *)				
4	Risiko Komoditas *)				
TOTAL		33.971	424.641		

*) Untuk BUS yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud

Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal

Sampai dengan akhir tahun 2019, tidak terdapat ikatan material untuk investasi barang modal sehingga Mandiri Syariah tidak menyajikan informasi mengenai nama pihak yang melakukan ikatan, tujuan ikatan, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan, mata uang yang menjadi denominasi dan langkah-langkah yang direncanakan Mandiri Syariah untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing.

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2018		
Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
(6)	(7)	(8)
4.590.775	688.616	8.607.703
4.590.775	688.616	8.607.703

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2018			
Bank		Konsolidasi	
Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(7)	(8)	(9)	(10)
72	904		
17.502	218.778		
17.575	219.683		

Investasi Barang Modal

Investasi berupa Barang Modal (*Capital Expenditure*) merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah aset tetap atau menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan.

Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal

Jenis dan investasi barang modal disajikan dalam tabel berikut.

Tabel Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal – Aset Tetap

(dalam Jutaan Rupiah)

Jenis	Nilai
Tanah	-
Bangunan	94
Instalasi	12.428
Kendaraan Bermotor	324
Inventaris Kantor	130.686
Renovasi atas Aset Sewa	2.740
Aset Dalam Penyelesaian	127.466
Jumlah	**273.738**

Tujuan Investasi Barang Modal

Pembelian barang modal tersebut bertujuan mendukung dan menunjang aktivitas operasional kegiatan Bank secara menyeluruh.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, dan Restrukturisasi Hutang dan Modal

Investasi

Mandiri Syariah memiliki investasi pada surat berharga yang mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Nilai Investasi pada surat berharga disajikan sebagai berikut.

Tabel Investasi pada Surat Berharga Berdasarkan Pihak

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018
Pihak ketiga		
Diukur pada biaya perolehan	**652.934**	472.777
Diukur pada nilai wajar melaluipenghasilan komprehensif lain	**-**	35.338
Jumlah pihak ketiga	**652.934**	508.115
Pihak berelasi		
Diukur pada biaya perolehan	**20.452.206**	15.663.433
Diukur pada nilai wajar melaluipenghasilan komprehensif lain	**10.710**	1.326.884
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	**5.331**	4.888
Jumlah pihak berelasi	**20.468.247**	16.995.205
Jumlah investasi pada surat berharga	**21.121.181**	**17.503.320**

Ekspansi

Sampai dengan akhir tahun 2019, Mandiri Syariah tidak melakukan kegiatan ekspansi.

Divestasi

Sampai dengan akhir tahun 2019, Mandiri Syariah tidak melakukan kegiatan divestasi.

Akuisisi

Sampai dengan akhir tahun 2019, Mandiri Syariah tidak melakukan kegiatan akuisisi.

Restrukturisasi Hutang dan Modal

Sampai dengan akhir tahun 2019, Mandiri Syariah tidak melakukan transaksi restrukturisasi utang dan/atau restrukturisasi modal.

Komitmen dan Kontinjensi

Mandiri Syariah memiliki komitmen dan kontinjensi. Ikhtisar komitmen dan kontinjensi Bank sebagai berikut.

Tabel Komitmen dan Kontinjensi

(dalam Jutaan Rupiah)

No.	Pos - Pos	31 Desember 2019	31 Desember 2018
I	TAGIHAN KOMITMEN		
	1. Fasilitas Pembiayaan Yang Belum Ditarik		
	a. Rupiah	-	-
	b. Valuta Asing	-	-
	2. Posisi Pembelian Spot dan Forward Yang Masih Berjalan	-	44.709
	3. Lainnya		
II	KEWAJIBAN KOMITMEN		
	1. Fasilitas Pembiayaan Kepada Nasabah Yang Belum Ditarik		
	a. Commited		
	i. Rupiah	-	-
	ii. Valuta Asing	-	-
	b. Uncommitted		
	i. Rupiah	420.248	618.944
	ii. Valuta Asing	-	-
	2. Fasilitas Pembiayaan Kepada Bank Lain Yang Belum Ditarik		
	a. Commited		
	i. Rupiah	-	-
	ii. Valuta Asing	-	-
	b. Uncommitted		
	i. Rupiah	-	-
	ii. Valuta Asing	-	-
	3. Irrevocable L/C Yang Masih Berjalan		
	a. L/C Luar Negeri	10.815	68.364
	b. L/C Dalam Negeri	20.192	6.969
	4. Posisi Penjualan Spot dan Forward Yang Masih Berjalan	-	44.578

No.	Pos - Pos	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	5. Lainnya	-	-
III	TAGIHAN KONTINJENSI		
	1. Garansi Yang Diterima		
	a. Rupiah	-	2.170
	b. Valuta Asing	196.784	204.599
	2. Pendapatan Dalam Penyelesaian		
	a. Murabahah	66.399	207.688
	b. Istishna'	125	-
	c. Sewa	240	8.625
	d. Bagi Hasil	17.853	99.304
	e. Lainnya	1.027	935
	3. Lainnya	-	-
IV	KEWAJIBAN KONTINJENSI		
	1. Garansi Yang Diberikan		
	a. Rupiah	1.128.611	698.343
	b. Valuta Asing	465.970	465.155
	2. Lainnya	-	-

Pencapaian Target dan Target ke Depan

Pencapaian Target

Pencapaian target di 2019 menunjukkan hasil yang baik. Bank Syariah Mandiri juga berhasil melampaui target laba bersih di tahun 2019 yaitu sebesar 163,08%. Meskipun pencapaian target pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib sedikit di bawah target yaitu masing-masing sebesar 98,09% akan tetapi pencapaian target aset sebesar 107,47%, pembiayaan yang diberikan sebesar 100,43% dan pencapaian dana pihak ketiga telah melebihi yang ditargetkan yaitu sebesar 108,37%. Kedepannya, Bank Syariah Mandiri akan senantiasa melakukan evaluasi pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan, sehingga kinerja Bank Syariah Mandiri di masa yang akan datang akan senantiasa mengalami peningkatan secara berkelanjutan.

Tabel Perbandingan Rencana Bisnis Bank dan Realisasi 2019

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2019	RBB 2019	Pencapaian
1	2	3	4=2/3
Posisi Keuangan			
Aset	112.291.867	104.424.189	107,53%
Pembiayaan yang Diberikan	75.542.858	75.216.432	100,43%
Dana Pihak Ketiga	99.809.730	92.098.439	108,37%
Laba Rugi Komprehensif			
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	8.417.750	8.581.337	98,09%
Laba Bersih	1.275.034	781.850	163,08%
Rasio Keuangan (%)			
Pemenuhan Modal Minimum (CAR)	16,15%	16,31%	99,02%
Imbal Hasil Rata-Rata Aset (ROA)	1,69%	1,11%	152,25%
Imbal Hasil Rata-Rata Ekuitas (ROE)	15,65%	10,10%	154,95%
Pembiayaan Bermasalah terhadap Total Pembiayaan (NPF *nett*)	1,00%	1,05%	95,24%
Pembiayaan Bermasalah terhadap Total Pembiayaan (NPF *gross*)	2,44%	2,49%	97,99%

Pada tahun 2019, rasio ROA dan ROE telah mencapai capaian yang sangat baik, yaitu masing-masing 152,25% dan 154,95%. Disamping itu, realisasi rasio CAR Bank Syariah Mandiri masih sedikit di bawah target yaitu 16,15% dari target 16,31%, hal ini akan menjadi acuan agar ke depannya rasio CAR dapat mencapai angka yang lebih baik lagi. Dari sisi kualitas, terdapat rasio NPF yang pencapaiannya berada pada posisi di bawah target, hal ini menunjukkan kualitas pembiayaan yang diberikan sudah baik dan Bank Syariah Mandiri akan terus fokus pada kualitas pembiayaan hingga rasio NPF dapat terus turun ke depannya.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pengembangan SDM Tahun 2019

dalam (orang)

Uraian	Realisasi 2019	Rencana 2019	Pencapaian
Pegawai Organik	8.552	8.722	98,05%
Tenaga Ahli Daya (TAD)	5.473	6.297	86,91%

Capaian target pegawai organik dan tenaga ahli daya tahun 2019 masing-masing mencapai 98,05% dan 86,91%, sedikit berada di bawah target. Hal tersebut karena Mandiri Syariah fokus pada optimalisasi sumber daya eksisting yang sejalan dengan kebutuhan Mandiri Syariah.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran Tahun 2019

No.	Produk	Deskripsi	Realisasi
Rencana Produk Baru			
1	Syariah Pay	Layanan debit *online* yang dapat melayani pembayaran *e-commerce* dari nasabah Mandiri Syariah ataupun nasabah Bank Syariah lainnya.	Terealisasi di tahun 2019
2	Standarisasi QR Mandiri Syariah	Melakukan standarisasi spesifikasi *payment* QR sesuai dengan ketentuan BI.	Terealisasi di tahun 2019
3	API Bisnis Mandiri Syariah	Pengembangan dari layanan *web service* Mandiri Syariah telah digunakan untuk kebutuhan *remittance.*	Terealisasi di tahun 2019
4	*Cash Recycle Machine*	Layanan *Cash Recycle Machine* yang dapat melayani penarikan tunai dan setor tunai melalui *Cash Recycle Machine*.	Terealisasi di tahun 2019
5	*Cardless Withdrawal*	Transaksi penarikan tunai di ATM tanpa kartu. Nasabah dapat melakukan penarikan tunai dari *mobile banking* Mandiri Syariah, nasabah akan mendapatkan *keycode* yang dapat digunakan di ATM Mandiri Syariah/*Agent* untuk penarikan tunai	Terealisasi di tahun 2019
6	Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar-Sederhana	Kegiatan yang dilakukan untuk memitigasi risiko atau melindungi nilai aset atau kewajiban yang mendasarinya terhadap risiko fluktuasi nilai mata uang di masa yang akan datang secara syariah.	Terealisasi di tahun 2019
Rencana Aktivitas Baru			
1	Agen Penjual Surat Berharga Syariah Negara untuk Investor Ritel	Merupakan layanan jasa untuk penjualan instrumen Sukuk Negara Ritel Kementrian Keuangan Republik Indonesia.	Terealisasi di tahun 2019
2	Penambahan produk Reksa Dana yang akan di jual melalui Mandiri Syariah	Memberikan varian investasi kepada nasabah.	Terealisasi di tahun 2019
3	Penambahan cabang agen penjual efek Reksa Dana	Semakin banyak cabang yang dapat memasarkan reksa dana.	Terealisasi di tahun 2019
4	Bank Kustodian	1. Pemenuhan kebutuhan investor dan manajer investasi akan jasa kustodian syariah untuk penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. 2. Potensi Pasar Modal Syariah yang terus berkembang membutuhkan jasa Bank Kustodian yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah dan sampai saat ini belum terdapat Bank Umum Syariah di Indonesia yang memiliki layanan Kustodian	Terealisasi di tahun 2019
5	Agen Pemantau	Memantau kewajiban penerbit surat utang sesuai Perjanjian penerbitan	Terealisasi di tahun 2019
6	Agen Jaminan	Menyimpan, mengadministrasikan dan mendistribusikan jaminan sesuai Perjanjian Agen Jaminan	Terealisasi di tahun 2019

Target ke Depan

Adapun uraian terkait proyeksi Mandiri Syariah tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel Proyeksi Keuangan 2020

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Proyeksi 2020
1	2
Posisi Keuangan	
Aset	116.721.477
Pembiayaan yang Diberikan	55.121.614
Dana Pihak Ketiga	99.842.299
Laba Rugi Komprehensif	
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	9.222.901
Laba Bersih	1.500.482
Rasio Keuangan (%)	
Pemenuhan Modal Minimum (CAR)	20,26%
Imbal Hasil Rata-Rata Aset (ROA)	1,92%
Imbal Hasil Rata-Rata Ekuitas (ROE)	15,02%
Pembiayaan Bermasalah terhadap Total Pembiayaan (NPF *nett*)	0,98%
Pembiayaan Bermasalah terhadap Total Pembiayaan (NPF *gross*)	2,25%

Tabel Proyeksi Pengembangan SDM

dalam (orang)

Uraian	Proyeksi 2020
Pegawai Organik	8.050
Tenaga Ahli Daya (TAD)	5.000

Rencana Permodalan

Modal per Desember 2020 diproyeksikan Rp13,17 triliun atau *Capital Adequacy* Ratio (CAR) 20,03% terdiri atas Modal Inti Rp12,12 triliun dan Modal Pelengkap sebesar Rp1,05 triliun dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sebesar Rp65,75 triliun. Dalam 3 (tiga) tahun ke depan yakni tahun 2020, 2021 dan 2022, rencana penambahan komponen modal dapat berasal dari setoran pemegang saham/investor strategis, penerbitan sukuk/instrumen lainnya, inbreng serta dari laba perusahaan. Sesuai arahan dari regulator rasio KPMM/CAR bank agar dijaga 15%-17%. Adapun proyeksi modal bank dan CAR adalah sebagai berikut.

Tabel Rencana Struktur Permodalan Bank

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	2020	2021	2022
Modal Bank	13.171	14.184	18.11
Modal Inti	12.124	13.160	16.93
Modal Pelengkap	1.047	1.024	1.19
ATMR	65.745	69.902	88.83
CAR	20,03%	20,29%	20,39%

Rencana Perubahan Modal

Dalam rangka menjaga kelangsungan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi maka kecukupan modal minimum bank harus terpenuhi. Penguatan permodalan, direncanakan akan dipenuhi dari *retained earning* tahun 2020, 2021, 2022 dapat berasal dari tambahan setoran modal/*inbreng* dari Bank Mandiri sebagai Pemegang Saham Pengendali serta melalui *corporate action*/sumber permodalan lain seperti penerbitan sukuk dan *strategic partner/investor* dan atau IPO. Berdasarkan hal tersebut kepemilikan bank menjadi sebagai berikut.

Tabel Rencana Perubahan Modal

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	2020	2021	2022
Pemegang Saham	2.989	2.989	2.989
Bank Mandiri	2.989	2.989	2.989
Mandiri Sekuritas	0,005	0,005	2.989
Aksi Korporasi misal: IPO/*Strategic Partner*/Penerbitan Sukuk, dan lainnya	2.376	2.376	2.700

Asumsi yang Digunakan Dalam Menyusun Proyeksi

Dalam penyusunan proyeksi tahun 2020, Mandiri Syariah menggunakan beberapa asumsi makro ekonomi sebagai berikut:

a. Proyeksi keuangan atas dasar realisasi Desember 2019 sebagai *based figure.*
b. Indikator ekonomi dan keuangan.

Tabel Indikator Ekonomi dan Keuangan

(dalam %)

Uraian	2020	2021	2022
Pertumbuhan ekonomi	5,20%	5,40%	5,27%
Tingkat inflasi	4,00%	3,90%	3,38%
Nilai tukar Rp/USD	15.427	15.300	14.158
7-Day Reverse Repo Rate	6,50%	6,25%	4,75%

Sumber: *Office of Chief Economist* Bank Mandiri

Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Mandiri Syariah tidak memiliki informasi dan fakta material setelah tanggal laporan akuntan yang secara signifikan mempengaruhi kinerja Bank dan risiko usaha di masa yang akan datang.

Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Kebijakan Dividen

Dalam pembayaran dividen, Mandiri Syariah menerapkan kebijakan keputusan untuk membayar dividen tergantung pada laba, kondisi keuangan dan likuiditas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Mandiri Syariah setelah memperoleh persetujuan RUPS.

Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Pembagian Dividen dilaksanakan berdasarkan Keputusan RUPS sebagaimana diuraikan sebagai berikut

Tabel Pengumuman dan Pembayaran Dividen Tahun Buku 2016-2018

Uraian	Tahun Buku 2019	Tahun Buku 2018	Tahun Buku 2017
Laba Bersih (miliar Rp)	1.275,03	605,21	365,17
Dividen (miliar Rp)	-	-	-
Jumlah Saham	597.804.387	597.804.387	497.804.387
Dividen Per Saham (Rp)	-	-	-
Dividend *Pay Out Ratio* (%)	-	-	-
Tanggal Pengumuman	-	27 Maret 2019	12 Maret 2018
Tanggal Pembayaran	-	-	-

Penggunaan Laba Bersih Mandiri Syariah Tahun Buku 2017 dan 2018 sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham bahwa Mandiri Syariah tidak mendistribusikan dividen kepada para pemegang saham. Hal tersebut dalam rangka meningkatkan struktur permodalan bank. Sedangkan penggunaan Laba Bersih Mandiri Syariah Tahun Buku 2019 akan diputuskan dalam RUPS pada tahun 2020.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)

Sampai dengan akhir tahun 2019, Mandiri Syariah belum melakukan (IPO) atau penerbitan saham, sehingga tidak terdapat informasi mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP).

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Sampai dengan akhir tahun 2019, Mandiri Syariah belum melakukan penerbitan saham, hutang atau obligasi, sehingga tidak terdapat informasi mengenai perolehan dana hasil penawaran umum melalui penerbitan saham, surat hutang atau obligasi.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Sampai dengan akhir tahun 2019, Mandiri Syariah tidak memiliki transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi.

Transaksi Pihak Berelasi

Pihak-Pihak Berelasi yang mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan. Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank jika:

a. Perusahaan di bawah pengendalian Bank;
b. Perusahaan asosiasi;
c. Investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan;
d. Perusahaan di bawah pengendalian investor yang dijelaskan dalam butir c di atas;
e. Karyawan kunci dan anggota keluarganya; dan;
f. Entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

Nama dan Sifat Hubungan Berelasi

Nama dan sifat hubungan berelasi disajikan sebagai berikut.

Tabel Pihak Berelasi

Pihak Berelasi	Sifat dan Hubungan
Pemerintah Negara Republik Indonesia	Pemegang saham utama
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Pemegang saham
PT Mandiri Sekuritas	Pemegang saham
PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth)	Mempunyai induk yang sama
PT AXA Mandiri Financial Services	Mempunyai induk yang sama
PT Bank Mandiri Taspen	Mempunyai induk yang sama
PT Mandiri AXA General Insurance	Mempunyai induk yang sama
PT Mandiri Capital Indonesia	Mempunyai induk yang sama
PT Mandiri Manajemen Investasi	Mempunyai induk yang sama
PT Mandiri Utama Finance	Mempunyai induk yang sama
PT Usaha Gedung Mandiri	Mempunyai induk yang sama
Kementerian Keuangan RI	Pemerintah Pusat
Perum BULOG	Perusahaan BUMN
Perum Jaminan Kredit Indonesia	Perusahaan BUMN
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	Perusahaan BUMN
Perum Perhutanan Indonesia	Perusahaan BUMN
Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas)	Perusahaan BUMN
Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri)	Perusahaan BUMN
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia	Perusahaan BUMN
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	Perusahaan BUMN
PT Amarta Karya (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Aneka Tambang	Perusahaan BUMN
PT Angkasa Pura I (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Asuransi Asei Indonesia	Perusahaan BUMN
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Asuransi Kredit Indonesia	Perusahaan BUMN
PT Bank Ekspor Impor Indonesia	Perusahaan BUMN
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Perusahaan BUMN
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Perusahaan BUMN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	Perusahaan BUMN
PT Barata Indonesia (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Bio Farma (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Brantas Abipraya (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Bukit Asam Tbk.	Perusahaan BUMN
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.	Perusahaan BUMN
PT Hutama Karya (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Indra Karya (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Industri Kapal Indonesia	Perusahaan BUMN
PT Inka (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Istaka Karya (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Jamsostek (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Jasa Marga (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Jasa Raharja (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Kimia Farma (Persero) Tbk.	Perusahaan BUMN
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.	Perusahaan BUMN
PT Nindya Karya (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Pegadaian (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	Perusahaan BUMN
PT Penjamin Infrastruktur Indonesia	Perusahaan BUMN
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Perusahaan BUMN

Pihak Berelasi	Sifat dan Hubungan
PT Pertamina (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Perusahaan Gas Negara (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Pindad (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Pos Indonesia (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Sang Hyang Seri (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Surveyor Indonesia (Persero)	Perusahaan BUMN
PT TASPEN (Persero)	Perusahaan BUMN
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	Perusahaan BUMN
PT Timah (Persero) Tbk.	Perusahaan BUMN
PT Waskita Karya	Perusahaan BUMN
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Perusahaan BUMN
PT Aero Globe Indonesia (Aerotravel)	Anak Perusahaan BUMN
PT Angkasa Pura Solusi	Anak Perusahaan BUMN
PT Angkasa Pura Support	Anak Perusahaan BUMN
PT Asuransi Jiwa Bringin Life Sejahtera	Anak Perusahaan BUMN
PT Asuransi Jiwa Bringin Sejahtera Artamakmur	Anak Perusahaan BUMN
PT Asuransi Jasindo Syariah	Anak Perusahaan BUMN
PT Bahana Artha Ventura	Anak Perusahaan BUMN
PT Bahana TCW Investment Management	Anak Perusahaan BUMN
PT BNI Asset Management	Anak Perusahaan BUMN
PT BNI Syariah	Anak Perusahaan BUMN
PT BRI Syariah	Anak Perusahaan BUMN
PT Gapura Angkasa	Anak Perusahaan BUMN
PT Garuda Maintenance Facility Aero	Anak Perusahaan BUMN
PT Infomedia Nusantara	Anak Perusahaan BUMN

Pihak Berelasi	Sifat dan Hubungan
PT Inka Multi Solusi	Anak Perusahaan BUMN
PT Inka Multi Solusi Service	Anak Perusahaan BUMN
PT Inka Multi Solusi Trading	Anak Perusahaan BUMN
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah	Anak Perusahaan BUMN
PT Jamkrindo Syariah	Anak Perusahaan BUMN
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	Anak Perusahaan BUMN
PT Kereta Api Logistik	Anak Perusahaan BUMN
PT Krakatau Bandar Samudera	Anak Perusahaan BUMN
PT Krakatau Industrial Estate Cilegon	Anak Perusahaan BUMN
PT Krakatau National Resources	Anak Perusahaan BUMN
PT Krakatau Tirta Industri	Anak Perusahaan BUMN
PT Krakatau Wajatama	Anak Perusahaan BUMN
PT Pegadaian Galeri Dua Empat	Anak Perusahaan BUMN
PT Pegadaian Syariah	Anak Perusahaan BUMN
PT Pertamina Internasional Shipping	Anak Perusahaan BUMN
PT Pertamina Trans Kontinental	Anak Perusahaan BUMN
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia	Anak Perusahaan BUMN
PT Pindad Enjiniring Indonesia	Anak Perusahaan BUMN
PT Pos Logistik Indonesia	Anak Perusahaan BUMN
PT PNM Investment Management	Anak Perusahaan BUMN
PT PNM Venture Capital	Anak Perusahaan BUMN
PT PP Presisi Tbk.	Anak Perusahaan BUMN
PT PP Urban	Anak Perusahaan BUMN
PT Pupuk Kalimantan Timur	Anak Perusahaan BUMN
PT Pupuk Kujang	Anak Perusahaan BUMN

Pihak Berelasi	Sifat dan Hubungan
PT Reasuransi Nasional Indonesia	Anak Perusahaan BUMN
PT Rumah Sakit PELNI	Anak Perusahaan BUMN
PT Semen Baturaja (Persero)	Anak Perusahaan BUMN
PT Semen Indonesia Beton	Anak Perusahaan BUMN
PT Semen Padang	Anak Perusahaan BUMN
PT Sucofindo Episi	Anak Perusahaan BUMN
PT Tugu Pratama Indonesia	Anak Perusahaan BUMN
PT Wijaya Karya Industri Energi	Anak Perusahaan BUMN
PT Wijaya Karya Realty	Anak Perusahaan BUMN
PT Yasa Industri Nusantara	Anak Perusahaan BUMN
Pemerintah Daerah Kabupaten Abes	Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue	Pemerintah Daerah
Perusahaan Daerah Air Minum	Perusahaan BUMD
Perusda Ketenagalistrikan Kalimantan Timur	Perusahaan BUMD
PT Asuransi Askrida Syariah	Perusahaan BUMD
PT Bank Aceh Syariah	Perusahaan BUMD
PT Bank BJB Syariah	Perusahaan BUMD
PT Bank DKI	Perusahaan BUMD
PT BPD Jambi	Perusahaan BUMD
PT BPD Jambi Syariah	Perusahaan BUMD
PT BPD Jawa Barat dan Banten	Perusahaan BUMD

Pihak Berelasi	Sifat dan Hubungan
PT BPD Jawa Tengah	Perusahaan BUMD
PT BPD Jawa Tengah UUS	Perusahaan BUMD
PT BPD Kalimantan Barat	Perusahaan BUMD
PT BPD Kalimantan Barat UUS	Perusahaan BUMD
PT BPD Kalimantan Selatan	Perusahaan BUMD
PT BPD Kalimantan Selatan UUS	Perusahaan BUMD
PT BPD Kalimantan Tengah	Perusahaan BUMD
PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Perusahaan BUMD
PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara UUS	Perusahaan BUMD
PT BPD Maluku	Perusahaan BUMD
PT BPD Nusa Tenggara Barat	Perusahaan BUMD
PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	Perusahaan BUMD
PT BPD Riau	Perusahaan BUMD
PT BPD Riau UUS	Perusahaan BUMD
PT BPD Sulawesi Selatan	Perusahaan BUMD
PT BPD Sulawesi Tengah	Perusahaan BUMD
PT BPD Sumatera Barat (Bank Nagari)	Perusahaan BUMD
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Perusahaan BUMD
PT BPD Sumatera Utara	Perusahaan BUMD
PT BPD Sumatera Utara UUS	Perusahaan BUMD
PT BPD Yogyakarta	Perusahaan BUMD
PT BPRS Bhakti Sumekar	Perusahaan BUMD
PT Jamkrida Jabar	Perusahaan BUMD
PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya	Perusahaan BUMD
Karyawan Kunci	Karyawan Kunci

Kewajaran dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Seluruh transaksi yang dilakukan pada tahun 2019 dilakukan secara wajar *(Arm's Length)* dan sesuai dengan persyaratan komersial normal. Kewajaran transaksi dengan pihak berelasi telah dilakukan secara wajar sesuai peraturan perundang-undangan. Transaksi dilakukan atas dasar alasan kebutuhan Mandiri Syariah dan bebas dari konflik kepentingan.

Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

Sifat dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi entitas pemerintah antara lain adalah giro pada bank lain, liabilitas segera, simpanan dari bank lain, investasi pada surat berharga, surat berharga subordinasi yang diterbitkan, penempatan pada bank lain, simpanan nasabah, surat berharga, piutang dan pembiayaan.

Saldo aset, liabilitas, investasi tidak terikat, pendapatan usaha lainnya, beban administrasi, beban usaha lain, dan beban kepegawaian dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Tabel Transaksi Pihak Berelasi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018
Aset	29.681.538	24.658.312
Persentase terhadap jumlah aset	26,43%	25,07%
Liabilitas	907.541	733.937
Persentase terhadap jumlah liabilitas	4,76%	5,07%
Surat berharga subordinasi yang diterbitkan	263.000	263.000
Persentase terhadap jumlah subnotes	70,13%	70,13%
Investasi Tidak Terikat	1.890.421	2.388.156
Persentase terhadap jumlah dana syirkah temporer	2,26%	3,17%
Pendapatan Usaha Utama Lainnya dan Usaha Lainnya	1.320.060	1.169.319
Persentase terhadap jumlah pendapatan usaha utama lainnya dan usaha lainnya	41,38%	42,43%
Beban Usaha	26.300	26.300
Persentase terhadap jumlah beban usaha	0.48%	0,45%
Beban kepegawaian	99.778	94.627
Persentase terhadap jumlah beban kepegawaian	4,79%	5,24%

Kebijakan Mekanisme *Review* atas Transaksi dan Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Mandiri Syariah memiliki kebijakan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak berelasi. Transaksi material diputuskan oleh Dewan Komisaris dan senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Selain itu, transaksi material juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara Independen.

Selama tahun 2019 tidak terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait dengan transaksi dengan pihak berelasi serta tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Dampak Perubahan Suku Bunga Terhadap Kinerja Bank

Di tahun 2019, indikator suku bungan utama *Fed Fund Rate* telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan dengan total 75 bps, BI-7 *Days Repo Rate* mengalami 4 (empat) kali perubahan dengan total 100 bps dan LPS *rate* mengalami 3 (tiga) kali perubahan dengan total 75 bps.

Grafik Trend Suku Bunga

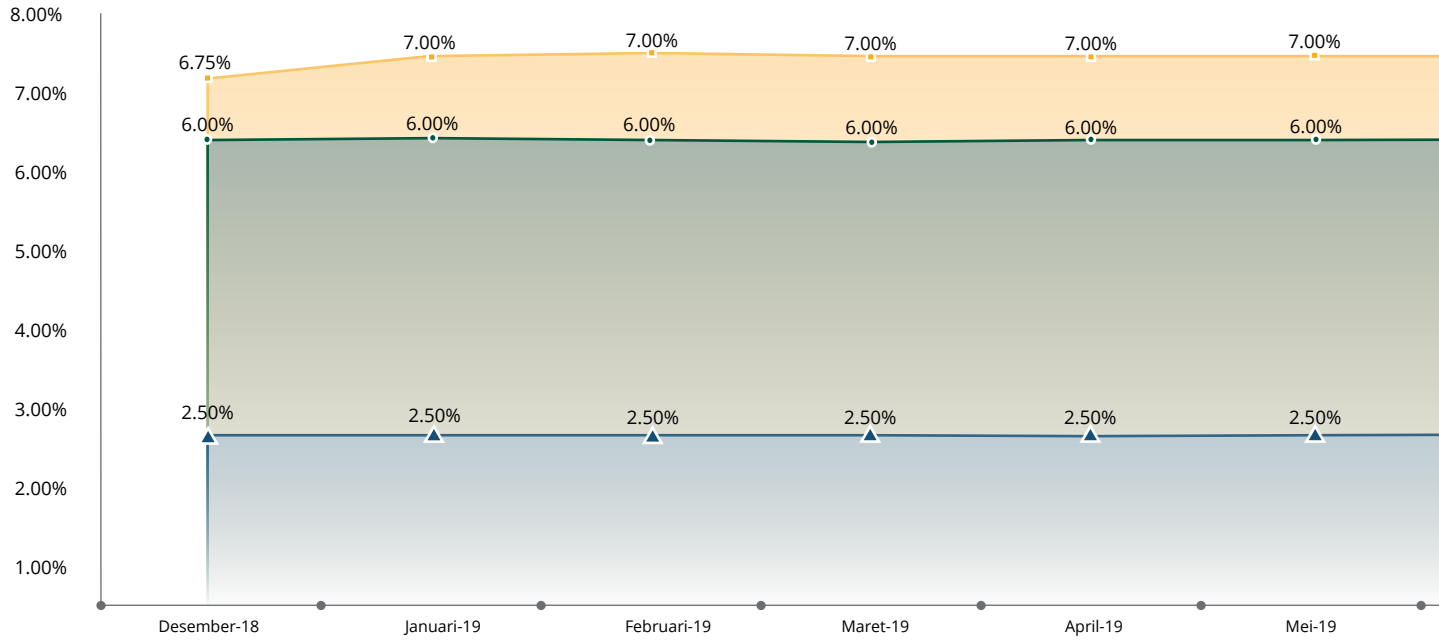

Sumber: Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bloomberg Tahun 2019

■ : LPS Rate
● : BI Rate/ BI 7 Days RR
▲ : FED Rate

Memanfaatkan Perubahan Suku Bunga Dengan Meningkatkan *Yield* Penempatan Ekses Likuiditas

Dengan adanya perubahan tingkat suku bunga acuan di pasar keuangan, Mandiri Syariah mengoptimalkan penempatan kelebihan likuiditasnya dalam bentuk instrumen keuangan syariah baik di pasar uang syariah maupun di pasar modal syariah. Pendapatan dari optimalisasi tersebut meningkat 26% dibandingkan Desember 2018 sebesar Rp1,01 triliun menjadi sebesar Rp1,27 triliun per 31 Desember 2019.

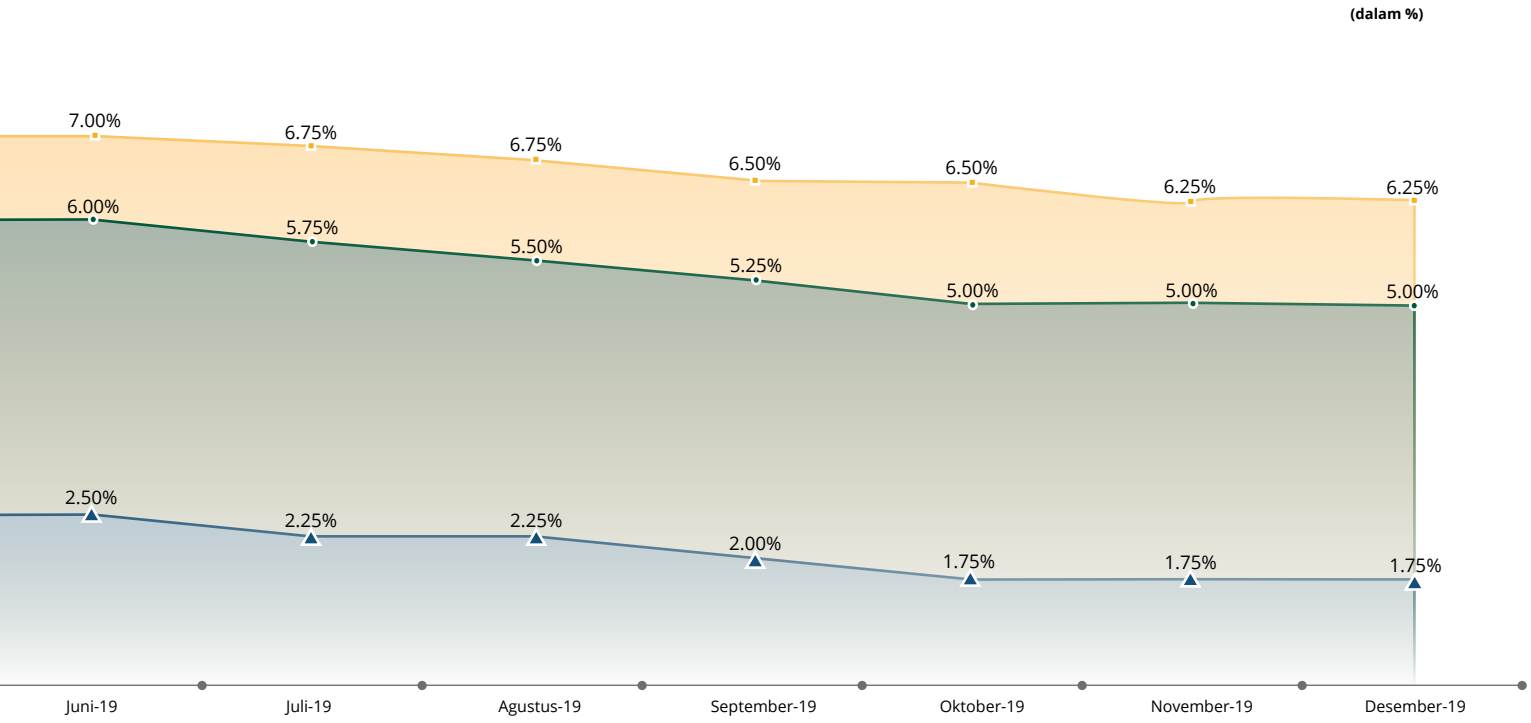
(dalam %)
7.00%
6.75%
6.75%
6.50%
6.50%
6.25%
6.25%
6.00%
5.75%
5.50%
5.25%
5.00%
5.00%
5.00%
2.50%
2.25%
2.25%
2.00%
1.75%
1.75%
1.75%
Juni-19
Juli-19
Agustus-19
September-19
Oktober-19
November-19
Desember-19

Aspek Perpajakan

Total Pembayaran Pajak periode Januari sampai dengan Desember 2019, sebagai berikut.

Tabel Pembayaran Pajak

(dalam Rupiah penuh)

Uraian Pajak	Tahun 2019
PPh Pasal 25	544.539.879.500
PPh Pasal 4 ayat (2)	600.028.603.874
PPh Pasal 21	152.707.422.781
PPh Pasal 22	2.094.271.053
PPh Pasal 23	11.259.460.908
PPh Pasal 26	649.136.889
PPN	5.930.247.450
PPN WAPU	66.511.356.279
PPN Luar Negeri	90.507.883
Pajak Daerah	8.502.855.558
PBB	1.444.903.017
Total	**1.393.758.645.192**

Ketidakpatuhan Dalam Pembayaran Pajak

Pada periode 2019, tidak terdapat ketidakpatuhan Perseroan dalam kewajiban membayar pajak.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya Terhadap Bank

Perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap Mandiri Syariah beserta dampak perubahan dan informasi penyesuaian yang dilakukan Mandiri Syariah terhadap perubahan tersebut selama tahun 2019 disajikan sebagai berikut.

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-Undangan

	Peraturan Perundang-Undangan	Pokok Pengaturan	Dampak Terhadap Mandiri Syariah	Informasi Penyesuaian Yang Dilakukan Mandiri Syariah
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)				
1	POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.	1. Bank wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan fungsi audit intern 2. Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). 3. Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. 4. Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang independen. 5. Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern.	1. Mandiri Syariah perlu menyusun Kode Etik profesional SKAI yang meliputi independensi, objektivitas, kompetensi, dan integritas. 2. Penggunaan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan fungsi audit intern yang memerlukan keahlian khusus, maka pihak ekstern tersebut tidak diperbolehkan menjadi ketua tim dalam pelaksanaan audit intern dimaksud. 3. Bank harus melakukan penyesuaian atas piagam audit intern yang dimiliki paling lambat tanggal 1 Juni 2019.	Penyesuaian dalam standar prosedur internal terkait Fungsi Audit Internal Mandiri Syariah.

	Peraturan Perundang-Undangan	Pokok Pengaturan	Dampak Terhadap Mandiri Syariah	Informasi Penyesuaian Yang Dilakukan Mandiri Syariah
3	POJK No. 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah.	Sinergi Perbankan berupa kerja sama antara BUS dan Bank Umum dalam satu kepemilikan yang dilakukan melalui pengoptimalan sumber daya Bank Umum.	Mandiri Syariah dapat menjalin kerjasama sinergi dengan Bank Mandiri sebagai induk perusahaan.	Mandiri Syariah menyusun draft Perjanjian Kerjasama dan dokumen perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan
3	POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum.	Pengaturan tentang akurasi data serta percepatan penyampaian pelaporan terkait penerapan strategi anti *Fraud* di Bank.	Mandiri Syariah perlu penyesuaian kebijakan anti *fraud*.	Mandiri Syariah menyusun draft perubahan kebijakan anti fraud dan pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Bank Indonesia (PBI)				
1	PBI No. 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi.	Laporan Bank Umum Terintegrasi.	Mandiri Syariah perlu mempersiapkan sistem dan infrastruktur untuk mendukung implementasi pelaporan Bank Umum terintegrasi, termasuk penyampaian laporan selama periode *pararel run*.	Penyesuaian sistem, format dan data pelaporan sesuai *field data* Laporan Bank Umum Terintegrasi
Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG)				
1	PADG No. 21/ 27 / PADG/2019 tentang Perubahan Ketiga atas PADG Nomor 20/10/PADG/2018 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.	Perubahan Giro Wajib Harian dari 1,5% menjadi 1%.	Mandiri Syariah wajib memelihara saldo Rekening Giro Rupiah Bank dalam rangka pemenuhan giro wajib minimum dalam Rupiah secara harian sesuai ketentuan dalam PADG ini.	Penyesuaian dalam standar prosedur internal terkait Tresuri.
2	PADG No. 21/10 /PADG/2019 tentang Standar Layanan dalam Pelaksanaan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia	Standar Layanan dalam Pelaksanaan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).	Mandiri Syariah sebagai peserta kliring wajib memenuhi standar layanan SKNBI sesuai ketentuan dalam PADG ini.	Penyesuaian dalam standar prosedur internal terkait penyelenggaraan SKN BI.
3	PADG No. 21/12/PADG/2019	Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia.	Mandiri Syariah sebagai peserta kliring wajib memenuhi ketentuan biaya dalam layanan SKNBI sesuai ketentuan dalam PADG ini.	Penyesuaian dalam standar prosedur internal terkait penyelenggaraan SKN BI.
4	PADG No. 21/11/PADG/2019 tentang Batas Nilai Nominal Maksimal Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.	Batas Nilai Nominal Maksimal Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.	Mandiri Syariah sebagai peserta kliring wajib memenuhi ketentuan biaya dalam layanan SKNBI sesuai ketentuan dalam PADG ini.	Penyesuaian dalam standar prosedur internal terkait penyelenggaraan SKN BI.
5	PADG No. 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.	Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.	Mandiri Syariah perlu menyusun standar prosedur penggunaan QRIS ini dan mengajukan izin persetujuan kepada Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) Bank Indonesia.	Pengajuan perizinan penyelenggaraan QRIS kepada Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) Bank Indonesia.

	Peraturan Perundang-Undangan	Pokok Pengaturan	Dampak Terhadap Mandiri Syariah	Informasi Penyesuaian Yang Dilakukan Mandiri Syariah
6	PADG No. 21/21/PADG/2019 tentang Perubahan atas PADG No.19/5/PADG/2017 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar.	1. Penambahan pedoman Direksi dan pegawai dari pelaku pasar yaitu terkait pencegahan persaingan usaha tidak sehat yang diterbitkan oleh *Global Foreign Exchange Committee* (GFXC), untuk direksi dan pegawai dari pelaku pasar yang berdasarkan prinsip konvensional dan prinsip syariah. 2. Penambahan pengaturan penyampaian prosedur internal untuk memastikan direksi dan pegawai dari pelaku pasar memahami Kode Etik Pasar kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 14 April 2020.	Mandiri Syariah perlu melaksanakan Sertifikasi Tresuri bagi pejabat dan pegawai yang menjalankan Fungsi Tresuri sesuai PADG ini.	Mandiri Syariah menyusun *draft* perubahan kebijakan Tresuri dan pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Perubahan peraturan perundang-undangan POJK, PBI, dan PADG yang telah dijabarkan di atas tidak memiliki dampak kuantitatif yang signifikan terhadap kegiatan operasional Mandiri Syariah.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Baru

Alasan Penerapan

Penerapan standar akutansi keuangan dilakukan untuk mematuhi PSAK yang berlaku dalam tahun berjalan, Bank telah menerapkan sejumlah amandemen dan interpretasi PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019.

Perubahan Standar Akuntansi Keuangan Baru

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”) telah melakukan revisi atas beberapa standar akuntansi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2019, sebagai berikut:

- ISAK 33: “Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka”
- ISAK 34: “Ketidakpastian Dalam Perlakuan Pajak Penghasilan”
- Penyesuaian Tahunan 2018: “PSAK 22: Kombinasi Bisnis”
- Penyesuaian Tahunan 2018: “PSAK 26: Biaya Pinjaman”
- Penyesuaian Tahunan 2018: “PSAK 46: Pajak Penghasilan”
- Penyesuaian Tahunan 2018: “PSAK 66: Pengendalian Bersama”
- Amandemen PSAK 24: “Imbalan Kerja tentang Amandemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program”.

Dampak Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Baru

Penerapan PSAK tersebut di atas tidak memiliki dampak kuantitatif yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan periode berjalan atau periode tahun sebelumnya

Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya

Selama tahun 2019, tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi sehingga tidak terdapat dampak atas perubahan kebijakan akuntansi.

Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan berdasarkan risiko termasuk risiko terkait penerapan prinsip syariah dan kinerja Bank atau disebut dengan *Risk-based Bank Rating*. Pada Tahun 2019, peringkat tingkat kesehatan Mandiri Syariah yang dinilai secara *self assessment* tidak mengalami perubahan dengan Peringkat Komposit 2 (PK-2). Hal tersebut mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Informasi Kelangsungan Usaha

Hal-Hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Sampai dengan akhir tahun 2019, Mandiri Syariah tidak memiliki hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha.

Assessment Manajemen atas Hal-Hal yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Manajemen Mandiri Syariah senantiasa melakukan evaluasi dan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Mandiri Syariah memilki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. *Asessment* dilakukan dengan berdasarkan berbagai faktor seperti analisis kekuatan kondisi keuangan maupun non keuangan serta pencapaian kinerja dan *history* Bank. Berdasarkan hasil *assesment*, Manajemen Mandiri Syariah tidak melihat adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Mandiri Syariah untuk melanjutkan usahanya.

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan *Assessment*

Asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha adalah sebagai berikut:
- Kondisi perekonomian global, nasional dan industri perbankan, khususnya perbankan syariah.
- Analisis *Strength Weakness Opportunity Threats* (SWOT) dalam menentukan posisi Mandiri Syariah pada industri perbankan syariah.
- Penerapan *Good Corporate Governace* (GCG).
- Kekuatan permodalan Mandiri Syariah.
- Kinerja keuangan Mandiri Syariah selama 5 (lima) tahun terakhir.

mandiri
syariah

mandiri syariah

HUMAN CAPITAL

KERANGKA STRATEGI MANAJEMEN *HUMAN CAPITAL*

Strategi yang dapat mendukung peningkatan kinerja pegawai secara khusus, adalah strategi *human capital*. Strategi *Human Capital* berfokus pada investasi jangka panjang yaitu investasi sumber daya manusia berupa peningkatan kualitas dan kapabilitas yang akan menjadi keunggulan kompetitif Bank.

Oleh karenanya, dalam melakukan transformasi organisasi, *human capital* merupakan salah satu aspek strategis yang harus menjadi perhatian organisasi. *human capital* menjadi salah satu pilar dalam 3 (tiga) pilar yang dicanangkan dalam melakukan transformasi bisnis Mandiri Syariah, baik dari sisi strategi, organisasi, maupun peningkatan kapabiliti sumber daya manusia. Strategi *Human Capital* juga menjadi salah satu dari 5 strategi utama fokus Strategi Bank.

Strategi *Human Capital* merupakan strategi yang berkelanjutan, oleh karenanya disusun dalam suatu kerangka yang dilandaskan pada visi Mandiri Syariah sebagai bank Syariah terdepan dan modern. Kerangka strategi didasarkan pada siklus kepegawaian, mulai dari proses pengembangan organisasi, pemenuhan pegawai, lingkungan kerja yang nyaman dan produktif, pelatihan dan peningkatan kapabilitas pegawai, sistem penilaian kinerja, sistem imbalan pegawai yang kompetitif dan tepat sasaran, sistem manajemen talenta dan suksesi yang berkualitas dan tepat waktu, dan sistem pengakhiran hubungan kerja yang kondusif, baik karena memasuki usia purna bakti mau pun yang mengundurkan diri, atau berakhir kontrak kerjanya.

Kerangka strategi dimaksud diturunkan dalam *Human Capital Strategic* Plan 5 (lima) tahunan dengan tujuan utama kepuasan pelanggan, pelayanan yang unggul, pegawai yang sangat produktif dan kompetitif, sehingga Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah pilihan para *talent* di industri, dimana insan Mandiri Syariah dikenal sebagai bankir Syariah yang professional dan unggul dalam pengembangan inklusi keuangan *Islam (Islamic Financial Inclusion).*

Adapun inisiatif strategis human capital tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. *Succession & Talent Development.*
2. *Employer Branding*.
3. HCMS *Integrated Learning Management System.*
4. *Total Rewards Strategy*.
5. *Corporate University.*
6. *Employee Productivity Improvement*.

PROFIL DIREKTORAT HUMAN CAPITAL

Bagan Struktur Direktorat *Human Capital*

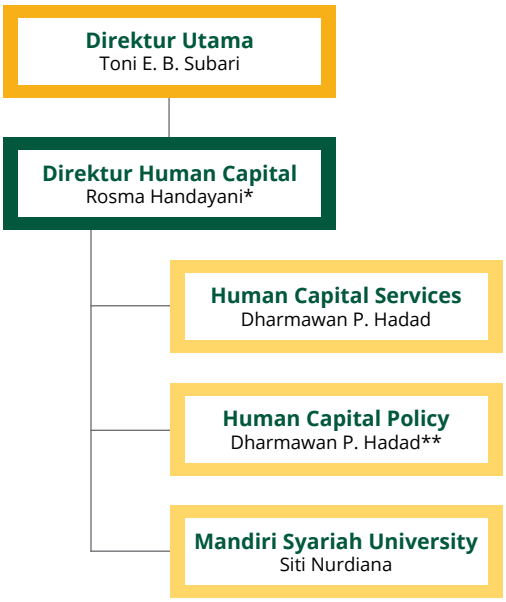

Keterangan:
* Berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas *Fit & Proper Test*
** Pejabat Sementara (Pjs.)

PROFIL RINGKAS HUMAN CAPITAL GROUP HEAD

Human Capital Services Group Head
Dharmawan P. Hadad, bergabung di Mandiri Syariah sejak tahun 2015 sebagai Learning Center Group Head, selanjutnya tahun 2016 menjabat Corporate Secretary Group Head dan sejak 2018 sebagai Human Capital Services Group Head. Berpendidikan S2 Magister Manajemen STIE IPWI, bersertifikasi CHRP dan memiliki pengalaman pengelolaan SDM dibeberapa perusahaan sebelumnya sebagai Division Head. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Human Capital Policy Group Head (Pjs.).

Mandiri Syariah University Group Head
Siti Nurdiana, bergabung di Mandiri Syariah sejak tahun 1999 sebagai Kepala Bagian Korporasi, dilanjutkan hingga Kepala Divisi Corporate Banking dan kemudian tahun 2016 menjabat Commercial Banking Group Head dan sejak 2018 bergabung sebagai Dean Wholesale Banking hingga kini sebagai Group Head Mandiri Syariah University. Berpendidikan S1 Ekonomi Universitas Padjajaran dan bersertifikasi CHRP.

ORGANISASI *HUMAN CAPITAL*

Direktorat Human Capital memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab strategis untuk memimpin dan mengarahkan perumusan, pemutakhiran strategi dan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya manusia di Bank. Selain itu juga memimpin dan mengarahkan penyusunan *business plan* serta *action* plan Direktorat Human Capital untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang agar sejalan dengan strategi dan rencana korporasi Mandiri Syariah.
Direktorat Human Capital memiliki tanggung jawab operasional meliputi:

a. Memimpin serta melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang di bidang *human capital* sesuai dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
b. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan sistem perekrutan, penempatan, mutasi dan pengembangan pegawai untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang secara komprehensif.

c. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan melakukan evaluasi atas kebijakan hubungan kerja yang produktif antara Bank dengan Pegawai termasuk Pegawai secara individu serta hubungan antar pegawai (*employee relations*) dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang harmonis.
d. Menyusun dan memastikan pelaksanaan fungsi operasional unit kerja yang efektif dan responsif, serta Pengembangan sistem informasi *Human Capital* yang mutakhir, terintegrasi dan mudah digunakan oleh seluruh unit kerja.
e. Menyusun, mengkoordinasikan serta melakukan evaluasi pelaksanaan *incentive system, benefits* dan *compensation* sesuai dengan *reward philosophy*, strategi serta kemampuan Bank.
f. Pengembangan Pegawai:
    1) Menyusun, mengkoordinasikan serta melakukan evaluasi penyusunan strategi pengembangan human capital yang efektif melalui implementasi sistem pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara efektif.
    2) Mengkoordinir perumusan kebijakan dan strategi pengembangan pegawai untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, serta pelaksanaan sistem *training* sesuai kebutuhan Bank.
    3) Mengkoordinasikan pengembangan strategi operasional yang mendukung akademi.
    4) Mengkoordinasikan dan melakukan evaluasi atas implementasi strategi *learning and development.*
    5) Mengarahkan, mengkoordinasikan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem *training* sesuai kebutuhan Bank disajikan dengan produktifitas dan kualitas yang tinggi.
g. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan *corporate culture*, sehingga senantiasa dapat mendukung pencapaian tujuan Bank.
h. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan unit kerja bidang human capital yang berada di bawah supervisinya.
i. Memonitor pelaksanaan kepatuhan dan pengawasan melekat pada unit kerja di bawah supervisinya.
j. Menjaga citra Bank dan turut membina hubungan baik dengan regulator dan *stakeholder*.

Dengan Tugas dan tanggung jawab diatas, manajemen *human capital* memiliki kewenangan sebagai berikut:

a. Memberikan persetujuan atas usulan:
    1) Pengembangan organisasi;
    2) Transaksi kepegawaian;
    3) Alokasi Biaya Tenaga Kerja (BTK) dan anggaran lain terkait biaya pegawai; dan
    4) Peraturan Perusahaan.
b. Menjadi *permanent member* untuk:
    1) Komite Human Capital (termasuk sebagai ketua);
    2) Komite Manajemen Risiko; dan
    3) Komite lainnya yang berada di bawah koordinasi Direksi yang dibentuk kemudian sesuai dengan kebutuhan Bank.
c. Memberikan persetujuan penggunaan biaya pelatihan dan pengembangan pegawai, biaya pengadaan barang dan jasa, penetapan beban kerugian operasional, pengelolaan aset Bank, serta biaya-biaya penunjang aktivitas di Direktorat Human Capital sesuai kebijakan dan prosedur Bank yang berlaku.
d. Mewakili Direksi dalam berhubungan dengan organisasi di luar Bank dalam lingkup tugas bidang Direktorat Human Capital dan di luar ruang lingkup tugasnya berdasarkan penugasan dari Direksi.
e. Memberikan penilaian atas kinerja Grup/Unit Kerja/ pegawai yang berada di bawah koordinasinya serta mengarahkan kebijakan SDM termasuk promosi jabatan, rekrutmen dan rotasi/mutasi di lingkungan Direktorat Human Capital sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank yang berlaku.
f. Mengajukan permohonan persetujuan atas usulan yang terkait dengan pengelolaan aktivitas Direktorat Human Capital yang memerlukan keputusan Rapat Direksi atau Komite Bank yang berwenang sesuai kebijakan dan prosedur Bank.
g. Mengajukan permohonan persetujuan atas usulan yang terkait dengan pengelolaan aktivitas Direktorat Human Capital yang memerlukan keputusan Rapat Direksi atau Komite Bank yang berwenang sesuai kebijakan dan prosedur Bank.
h. Menetapkan dan/atau merekomendasikan kewenangan kepada pegawai yang berada di bawah koordinasi Direktorat Human Capital atau ruang lingkup fungsi lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank.

FUNGSI-FUNGSI DI BAWAH DIREKTORAT HUMAN CAPITAL

- **Human Capital Policy**

  Mengelola dan mengarahkan proses dan produk kebijakan terkait sumber daya manusia serta pengelolaan pengembangan pegawai searah dengan bisnis Mandiri Syariah, meliputi: pengembangan dan pengkinian kebijakan SDM dalam setiap aspek, *talent management, organization development, performance management and reward.*

- **Human Capital Services**

  Mengelola dan mengarahkan kegiatan administrasi sumber daya manusia yang mengacu kepada peraturan pemerintah, peraturan perusahaan dan kebijakan sumber daya manusia yang berlaku dengan tujuan untuk memastikan proses administratif dan layanan berjalan efektif dan efisien searah dengan bisnis Mandiri Syariah, meliputi proses rekrutmen dan menjaga hubungan industrial yang harmonis, pengelolaan Tenaga Alih Daya (TAD) *non-sales* dan magang, HC *information system* dan HC *Business Partner*.

- **Mandiri Syariah University**

  Menyediakan layanan pembelajaran dalam rangka pengembangan dan pelatihan untuk peningkatan kapabilitas pegawai guna mendukung pencapaian bisnis Mandiri Syariah, pengelolaan *knowledge management* serta penyusunan kebijakan dan program internalisasi budaya yang berkesinambungan yang dilaksanakan melalui fungsi *Culture* dan *Change Academy*.

STRATEGI *HUMAN CAPITAL*

Strategi *Human Capital* meliputi tahapan/siklus pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi, yaitu dimulai dengan pengembangan organisasi yang didalamnya mengatur pula mengenai jalur karir dan kebutuhan pegawai, pemenuhan kebutuhan pegawai (rekrutmen), penciptaan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif, pelaksanaan pelatihan dan peningkatan kapabilitas pegawai, proses sistem penilaian kinerja, penerapan sistem imbalan pegawai yang kompetitif dan tepat sasaran, pengelolaan manajemen talenta dan suksesi yang berkualitas dan tepat waktu, serta penanganan pengakhiran hubungan kerja.

PENGEMBANGAN ORGANISASI

Pengembangan organisasi dievaluasi dari waktu ke waktu, meliputi desain struktur organisasi, evaluasi jabatan, pengembangan karir, serta perencanaan kebutuhan pegawai (*capacity planning*) yang produktif, efektif dan efisien sesuai dengan fungsi dalam struktur organisasi dimaksud.

Sepanjang tahun 2019, Mandiri Syariah telah melakukan penyempurnaan terhadap pengembangan organisasi, sesuai dengan fokus strategi Mandiri Syariah, khususnya organisasi di jaringan, yaitu organisasi area dan cabang dengan prioritas pada bisnis *consumer, low cost fund* dan *transaction banking*. Bersamaan dengan penyesuaian dalam struktur organisasi tersebut, dilakukan pula evaluasi jabatan dan mengidentifikasi kompetensi teknis yang dibutuhkan, sehingga menjadi dasar dalam melakukan pengembangan kompetensi dan kapabilitas pegawai. Adapun pemenuhan kebutuhan pegawai, dilakukan baik melalui sumber internal maupun eksternal, termasuk menetapkan strategi yang dapat menarik minat *talent* terbaik di industri.

MANAJEMEN *HUMAN CAPITAL*

Mandiri Syariah berkomitmen untuk mendukung pengembangan karir pegawainya dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, objektivitas, dan kesempatan yang sama untuk semua pegawai.

Secara garis besar pengembangan karir pegawai terdiri dari 2 jenjang, yaitu pengembangan karir jalur pelaksana dan jalur pimpinan. Karir pegawai pelaksana untuk menjadi pegawai pimpinan melalui proses seleksi program *Staff Development Program* (SDP). Selama tahun 2019, Bank telah melaksanakan SDP untuk 202 orang dengan tingkat kelulusan 95%.

Ada pun pengembangan karir pegawai pimpinan dapat dilakukan melalui mutasi/rotasi/promosi, penugasan pegawai (*Project Assignment*), dan penugasan pegawai dari/ke induk/grup Mandiri. Untuk mempersiapkan pegawai pimpinan ke level berikutnya dari manajer level menjadi *middle manager* dan dari *middle manager* menjadi *senior manager*, pegawai terbaik dipersiapkan melalui program pengembangan kepemimpinan untuk memastikan kesiapan menjadi suksesor di jenjang yang lebih tinggi, yaitu:

1. *Middle Management Development Program* (MMDP), program pengembangan kepemimpinan yang ditujukan bagi para suksesor level *middle manager*.
2. *Senior Management Development Program* (SMDP), program pengembangan kepemimpinan yang ditujukan bagi para suksesor level senior manager.

Selama tahun 2019, terdapat 150 pegawai yang mendapatkan promosi jabatan, baik pelaksana menjadi Officer, maupun Officer menjadi Manager dan Manager ke jenjang Senior Manager.

PEMENUHAN KEBUTUHAN PEGAWAI

Sistem pemenuhan kebutuhan pegawai yang handal adalah salah satu proses kritikal, yang dimulai dari proses identifikasi kebutuhan, kualifikasi yang dibutuhkan, mencari hingga menarik minat *talent* terbaik di industri. Proses perencanaan pemenuhan kebutuhan pegawai dilakukan bersamaan dengan rencana strategis tahunan dimana

pemenuhan dilakukan melalui sumber internal maupun eksternal, dengan tetap mengutamakan sumber internal.

Ada pun tahapan pemenuhan dilakukan sebagai berikut:

1. Prioritas pemenuhan pegawai melalui *internal recruitment* (sumber internal).
2. Jika pemenuhan jabatan memerlukan spesifikasi/ kemampuan khusus yang tidak dapat dipenuhi dari sumber internal, pemenuhan jabatan dipenuhi melalui *external recruitment* (sumber eksternal).
3. Jalur pemenuhan pegawai melalui *external recruitment* menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi.

REKRUTMEN REGULER

Rekrutmen reguler dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan Bank yang telah direncanakan dalam tahun berjalan. Ada beberapa proses seleksi yang harus diikuti oleh kandidat baik internal maupun eksternal, untuk meyakini bahwa kandidat terpilih adalah kandidat yang memenuhi kualifikasi baik secara kualitas mau pun kapabilitas.

Sepanjang tahun 2019, telah dilakukan pemenuhan sebanyak 408 pegawai yang terdiri dari 369 pegawai level *staff*, 25 pegawai level *officer* dan 14 pegawai dari sumber eksternal untuk posisi kritikal, struktural yang sudah memiliki pengalaman di bidangnya dan sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan Bank.

REKRUTMEN KHUSUS

Rekrutmen khusus dilakukan dalam rangka mempersiapkan keterampilan dan keahlian khusus yang dibutuhkan Mandiri Syariah dari lulusan perguruan tinggi dengan Pendidikan khusus. Rekrutmen khusus yang dilakukan di tahun 2019 adalah melalui jalur *Officer Development Program* (ODP) bidang IT dan bidang *Legal*, masing-masing sebanyak 20 orang. Peserta akan diberikan pendidikan selama 6 (enam) bulan bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan yang memiliki pengalaman dan keahlian sesuai dengan bidang yang dipersiapkan untuk para peserta.

Proses pencarian kandidat dari sumber eksternal baik rekrutmen reguler maupun rekrutmen khusus, Bank menggunakan sarana-sarana sebagai berikut:

No.	Program	Jenis Kegiatan	Deskripsi
1.	Sinergi Mandiri	*Recruitment* Mandiri Group	Memperkuat sinergi Mandiri Group dan memperluas branding sebagai bagian dari Group Mandiri.
2.	*E*-Rekrut	*E–Recruitment and Selection E-Rekrut*	Mempercepat dan mempermudah proses pencarian kandidat, mengurangi proses administrasi, lebih effisien.
3.	*Dedicate Graduate Campus*	*Recruitment Fresh Graduate melalui campus hiring (talent scouting)*	Akuisisi talent (mahasiswa dengan lulusan terbaik) melalui kerjasama dengan 20 Universitas terbaik di Indonesia.

PROGRAM KRIYA

Salah satu sumber pencarian kandidat pegawai dalam rangka pemenuhan kebutuhan juga dapat dilakukan dari peserta program Kriya yang sudah menyelesaikan programnya dengan baik. Program Kriya adalah program untuk memberikan kesempatan kepada kepada masyarakat luas khususnya para lulusan baru dari SMA/sederajat, Diploma 1,2,3 dan sederajat, mau pun Strata 1 untuk belajar bekerja dengan mengikuti program pemagangan terpadu untuk mengenal dunia kerja dan melengkapi keterampilannya sebagai persiapan menjadi profesional di dunia kerja secara luas, sebagai bentuk pelatihan Vokasi.
Pelaksanaan program Kriya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagian dari bentuk kepedulian Mandiri Syariah untuk mengimplementasikan program revitalisasi Pendidikan vokasi, dengan mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan industri sehingga mempercepat penyerapan pengganggguran untuk masuk ke dunia kerja, sebagai bentuk pelatihan vokasi.
2. Bentuk pelatihan vokasi sebagaimana butir 1 (satu) adalah dengan menyelenggarakan program pemagangan sekaligus mendukung program pemagangan nasional yang akan memperkuat sistem perekrutan tenaga kerja dalam upaya peningkatan kompetensi dan skill tenaga kerja Indonesia, yang telah diluncurkan oleh Presiden RI pada tanggal 23 Desember 2016.

3. Mandiri Syariah menyelenggarakan program belajar bekerja terpadu (pemagangan) yang diatur secara komprehensif dengan pertimbangan sebagai berikut:
   a. Memberi kesempatan kepada lulusan SMA/SLTA/MA Sederajat, Diploma dan Strata 1 untuk mengenal dunia kerja dan memperoleh keterampilan sehingga dapat menjadi calon tenaga kerja yang terampil dan siap di dunia kerja di perbankan syariah.
   b. Mengimplementasikan sinergi antara Mandiri Syariah dan Bank Mandiri dalam lingkup *human capital.*
4. Pelaksanaannya, memperhatikan pula ketentuan-ketentuan dalam Pemenakertrans No. 22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri.
5. Ikut serta memfasilitasi program pemerintah dalam penyetaraan Hak penyandang disabilitas yang diatur oleh pemerintah pada Undang-Undang No. 19 tahun 2011 tentang konversi hak-hak penyandang disabilitas, Peppres No. 75 tahun 2005 yang mengatur mandat pelaksanaan aksi-aksi di bidang penyandang disabilitas. Serta UU No. 18 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
6. Ketentuan program Kriya BSM:
   a. Induk regulasi Kriya BSM adalah permenakertrans No. 22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri.
   b. Jangka Waktu Program maksimal 2 tahun, dengan tingkatan:
      1. Kriya BSM Junior (tahun pertama).
      2. Kriya BSM Senior (tahun Kedua).
7. Kurikulum Kriya BSM merupakan hasil penerapan standar kurikulum SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) yang dituangkan dalam buku kurikulum Pemagangan Kriya BSM.
8. Pemberian Sertifikat dan Tunjangan Pendidikan, Pada akhir program, peserta Kriya BSM yang memenuhi persyaratan akan mendapatkan sertifikat dan Beasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. Peserta Kriya BSM yang berhasil menyelesaikan program Kriya BSM dengan hasil evaluasi kinerja baik.
   2. Sertifikat akan diterbitkan dan diberikan oleh Human Capital Services Group.
   3. Beasiswa prestasi diberikan di akhir program.

Ada pun jumlah peserta program Kriya sepanjang tahun 2019, adalah sebagai berikut:

a. Kriya BSM (jenis kelamin)/regional

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Region I	11	15	26
2	Region II	10	27	37
3	Region III	25	91	116
4	Region IV	24	44	68
5	Region V	15	33	48
6	Region VI	7	16	23
7	Region VII	6	16	22
8	Kantor Pusat	33	45	78
	Jumlah	**131**	**287**	**418**

b. Kriya BSM (jenis kelamin)/jabatan

No.	Unit Kerja	Back Office		Teller		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1	Region I	0	0	11	15	26
2	Region II	0	0	10	27	37
3	Region III	6	23	19	68	116
4	Region IV	4	2	20	42	68
5	Region V	1	3	14	31	48
6	Region VI	0	1	7	15	23
7	Region VII	0	0	6	16	22
8	Kantor Pusat	33	45	0	0	78
	Jumlah	**44**	**74**	**87**	**213**	**418**

Terdapat 103 peserta program Kriya yang berasal dari Pendidikan Pesantren sebagai Kriya Santri dan sebanyak 8 peserta program Kriya Disabilitas dan terdapat 149 peserta program Kriya telah diserap menjadi pegawai Mandiri Syariah, sesuai dengan prosedur dan proses seleksi rekrutmen reguler.

LINGKUNGAN KERJA YANG NYAMAN DAN PRODUKTIF

Budaya kerja yang menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif berdasarkan nilai-nilai inti Mandiri Syariah dibangun dengan program-program yang melibatkan pegawai berdasarkan perilaku budaya kerja "ETHIC" sebagai nilai inti Bank, yaitu: *Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity* dan *Customer Focus.* Keterlibatan seluruh pegawai dari semua level sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Peran pimpinan sebagai *Role Model* dalam menjalankan *leadership actions* untuk menjaga konsistensi penerapan ETHIC sangat kritikal. Oleh karenanya harus didukung dengan sistem sumber daya manusia dan organisasi yang dapat menjadi media *continuous learning* bagi pegawai, termasuk proses pemberian *feedback* dan *coaching* untuk perbaikan secara terus menerus. Pada akhirnya budaya kerja ETHIC akan menjadi *character* yang dijiwai dan melekat pada setiap pegawai.

Untuk itu kerangka internalisasi budaya melibatkan level manajerial atas sebagai *Change Leader*, kemudian level manajerial menengah sebagai *Change Champion* dan level Officer dan Pelaksana sebagai *Change Agent*, dengan tugas yang berbeda. Para *Change Agent* mempunyai tugas utama dalam membantu implementasi aktivitas internalisasi budaya yang disepakati oleh *Change Leader* dan *Change Champion* di masing-masing unit kerja.

Selanjutnya dalam upaya menjadikan Mandiri Syariah tempat bekerja yang terbaik dan menyenangkan, maka Mandiri Syariah menyediakan berbagai kegiatan, yaitu bidang seni, olahraga, pengetahuan maupun keagamaan dalam wadah Mandiri Syariah Club sehingga pegawai dapat menyalurkan juga minat dan bakatnya di tempat kerja. Selain itu, pada periode tertentu, seperti hari raya Idul Fitri, Bank pun menyediakan layanan *Day Care* untuk pegawai yang mengalami kesulitan pengasuhan anak menjelang hari Raya dan setelah hari raya. Ruang *laktasi* pun tersedia bagi para pegawai wanita yang baru kembali dari cuti bersalin.

Tahun 2019, Mandiri Syariah menginisiasi diterapkannya *flexitime*, yang diharapkan tidak saja hanya dapat meningkatkan *engagement*, namun juga produktifitas pegawai dengan pengaturan jam kerja yang fleksibel. Lingkungan kerja yang nyaman dan produktif, terus menerus kami tingkatkan dan umpan balik pegawai kami lakukan dengan pengukuran dalam survei keterlibatan pegawai yang dilakukan oleh pihak ketiga yang *independent*.

PELATIHAN DAN PENINGKATAN KAPABILITAS PEGAWAI

Rencana pengembangan bisnis secara strategis berdampak pula pada rencana pelatihan dan pengembangan kapabilitas pegawai untuk mendukung kebutuhan bisnis. Menggunakan pendekatan yang terstruktur dan terintegrasi dalam kerangka pengembangan pegawai, diyakini kapabilitas pegawai dapat cepat ditingkatkan, baik dari kapabilitas teknikal maupun kepemimpinan dengan dilandasi penerapan nilai-nilai inti perusahaan dalam bertindak dan berperilaku sehari-hari.

Ada pun proses penetapan program dan metode pengembangan pegawai melalui tahapan sebagai berikut:

1. Analisa, mengacu kepada rencana korporasi dengan menentukan sasaran inti dan posisi kunci.
2. Desain, menentukan fungsi inti
3. Penyampaian program pengembangan (*delivery*), menentukan kebutuhan dan permasalahan unit kerja
4. Rencana Pengembangan Individu (*Individual Development Plan*), dilakukan dengan berdiskusi dengan atasannya mengenai kapabilitas yang akan ditingkatkan.

Dalam proses tersebut sudah direncanakan mengenai materi, proses pembelajaran, pengajar dan pengukurannya. Tidak hanya pelatihan klasikal, pembelajaran dengan langsung ke lapangan lebih banyak dilakukan secara berkala melakukan *coaching* dan *mentoring*. Selain itu, Bank juga menyediakan fasilitas *self learning* bagi pegawai melalui *learning management system* yang memuat *system knowledge management* untuk mengelola pengetahuan dan sarana kolaborasi bagi pegawai, sekaligus sebagai sarana pelatihan dan pengembangan pegawai yang dapat dijangkau oleh pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pegawai diwajibkan untuk meningkatkan kapabilitasnya dan merencanakan dalam rencana pengembangan individu setiap tahunnya. Sepanjang tahun 2019, Bank telah menyelenggarakan 320 program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan yang diikuti oleh 13.816 peserta.

Untuk mewujudkan SDM Syariah yang unggul dan kompeten, maka proses pengembangan dan peningkatan kapabilitas dilaksanakan lebih spesifik dan terarah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di setiap fungsi. Oleh karenanya, Mandiri Syariah melakukan transformasi fungsi *Learning Center* menjadi *Corporate University* dengan membentuk akademi-akademi yang mengacu pada segmentasi bisnis Mandiri Syariah secara keseluruhan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Dekan (*Dean*), yaitu:

1. Wholesale Banking Academy.
2. Retail Banking Academy.
3. Banking Operations, Service and Suppoprt Academy.
4. Culture and Change Academy.

Evaluasi terhadap program pengembangan dan pelatihan dilaksanakan pula sebagai bahan masukan untuk pengembangan modul serta rencana pengembangan pegawai selanjutnya. Evaluasi ini terbagi menjadi 4 level evaluasi, yaitu:

- Level 1 (L1) adalah evaluasi untuk menilai reaksi peserta terhadap penyelenggaraan *training*. Hal ini mencakup kesesuaian materi, kemampuan pengajar dalam menyampaikan materi dan ketersediaan fasilitas *training*.
- Level 2 (L2) adalah evaluasi untuk menilai tingkat pemahaman peserta selama menjalani *training*. Evaluasi ini dapat berupa ujian teori ataupun praktek yang terkait dengan materi *training*.
- Level 3 (L3) adalah evaluasi untuk menilai implementasi materi *training* dan perubahan perilaku peserta *training* sebelum dan setelah *training* berlangsung. Evaluasi ini dilaksanakan min 3 bulan setelah *training* dilaksanakan. Proses penilaiannya dilakukan dengan metode multirater yaitu meminta penilaian/pendapat dari pegawai, atasan, rekan kerja, bawahan dari pegawai tersebut.
- Level 4 (L4) adalah evaluasi untuk menilai dampak *training* yang telah diikuti pegawai terhadap peningkatan kinerjanya. Evaluasi ini dilakukan setelah 3 bulan sejak berlangsungnya *training*.

Pada tahun 2019, Bank mencatat rasio biaya pelatihan dan *training* dengan BTK sebesar 4,27% atau mengalami pertumbuhan sebesar 49,19% dibandingkan tahun 2018. Hal ini sejalan dengan komitmen Mandiri Syariah untuk terus meningkatkan kapabilitas pegawai untuk menjadi bankir Syariah yang unggul dan kompeten.

PENILAIAN KINERJA

Sistem penilaian kinerja pegawai dilakukan secara transparan, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mendukung pencapaian sasaran organisasi melalui pencapaian kinerja pegawai.
2. Mengembangkan Budaya kerja perusahaan yang positif dan berorientasi kepada pencapaian kinerja.
3. Meningkatkan *engagement* pegawai.

Proses pengelolaan kinerja dilakukan secara berkesinambungan dengan memastikan adanya keselarasan dari sejak penetapan *Corporate Goals* diturunkan menjadi target dan sasaran Unit Kerja hingga level individu. Sehingga keselarasan strategi dari korporat ke individu terjaga dan memastikan adanya keterkaitan antara kinerja individu terhadap kinerja Bank.

Siklus pengelolaan kinerja secara tahunan dimulai dari perencanaan kinerja (*performance planning*) untuk menyusun KPI (*key performance indicator*) pegawai, dilanjutkan dengan evaluasi yang dilakukan di tengah tahun (*mid year review*) untuk melihat *progress* pencapaian KPI pegawai di tengah tahun, dan diakhiri dengan evaluasi akhir tahun (*performance evaluation*) untuk menilai kinerja pegawai sejak awal hingga akhir tahun periode.

Dalam proses pengelolaan kinerja pegawai, Bank mengutamakan adanya komunikasi dua arah antara pegawai dan managernya agar tercipta hubungan yang harmonis dengan pemberian saran perbaikan/umpan balik yang dapat diberikan oleh manager untuk peningkatan kinerja pegawai, apabila diperlukan. Seluruh proses pengelolaan kinerja dilakukan secara *online* melalui sistem kepegawaian (Sistem Informasi Pegawai/SIP) sehingga pegawai dapat dengan mudah mengakses maupun memudahkan penyimpanan seluruh informasi tentang kinerja pegawai. Umpan balik pada penilaian kinerja akhir tahun akan dijadikan rencana pengembangan pegawai di tahun berikutnya.

SISTEM IMBALAN

Pengelolaan sistem imbalan adalah salah satu strategi Bank dalam memberikan imbalan kepada pegawai yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial yang kompetitif namun tetap sesuai dengan kemampuan Bank.

Reward diberikan oleh Mandiri Syariah dengan mengedepankan prinsip *competitiveness* dan *fairness* yang berbasis kinerja dan risiko dengan mempertimbangkan pelaksanaan *best practice* dalam industri perbankan. Untuk dapat mempertahankan posisi kompetitif di pasar, secara reguler Bank berpartisipasi dalam Survei Gaji Tahunan (*Annual Salary Survey*) di industri perbankan di Indonesia yang dilaksanakan oleh lembaga Survei independen yang kompeten. Tujuan pemberian *reward* adalah untuk mempertahankan posisi kompetitif di pasar, *retention* dan memotivasi pegawai terutama pegawai talent, serta menarik talent terbaik di industri yang dibutuhkan Bank untuk mencapai tujuan bisnis dan menjaga sustainabilitas bisnis.

Salah satu bentuk *financial reward* yang diberikan oleh Mandiri Syariah kepada pegawai adalah bonus tahunan yang diberikan berdasarkan kinerja Bank, kinerja unit kerja dan kinerja pegawai. Mandiri Syariah juga memberikan penyesuaian gaji tahunan yang berpedoman pada peraturan pemerintah yang berlaku, Tunjangan Hari Raya (THR), Uang Pelaksanaan Cuti Tahunan, dan Uang Cuti Besar yang diberikan setiap periode masa kerja 3 tahunan. Untuk terus dapat memotivasi pegawai dalam mencapai target bisnis, bank juga dapat memberikan program insentif khusus dengan mempertimbangkan nominal yang kompetitif serta menjaga *internal equity* dan risiko.

Mandiri Syariah selalu melakukan evaluasi secara berkala untuk fasilitas dan *benefit* pegawai. Tahun 2019 Mandiri Syariah memperbaharui tunjangan lokasi berdasarkan zonasi yang ditetapkan dengan mempertimbangkan indeks *Quality of Living* dan *Cost of Living* serta meningkatkan besaran tunjangan tersebut bagi daerah pada zonasi tertentu.

Reward yang bersifat *non-financial* diberikan melalui program pengembangan serta apresiasi umroh atas pencapaian kinerja Mandiri Syariah. Sepanjang tahun 2019, berdasarkan kinerja Mandiri Syariah tahun 2018, telah diberikan apresiasi umroh kepada 605 orang pegawai. Jumlah pegawai yang mendapatkan program ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dan diprioritaskan kepada pegawai yang akan memasuki masa purna bakti. Mandiri Syariah juga telah menambahkan fasilitas bantuan yaitu beasiswa bagi anak pegawai yang meninggal dunia serta bantuan untuk pegawai yang mengalami musibah bencana alam dan kerusuhan.

Apresiasi lain yang berbentuk *non-financial* juga diberikan Mandiri Syariah kepada unit kerja dan individu juga inovasi-inovasi terbaik yang berdampak kepada kinerja Mandiri Syariah, termasuk pencapaian khusus unit atau individu yang memberikan dampak yang signifikan terhadap bisnis, kinerja mau pun reputasi Mandiri Syariah. Apresiasi tersebut diberikan pada acara *Mandiri Syariah Excellence Award* sebagai bentuk apresiasi tertinggi dari Bank.

Selain *financial* dan *non-financial reward*, Bank juga memberikan *benefit* lain kepada pegawai berupa fasilitas kesehatan, hari cuti, pembiayaan pegawai, dan fasilitas lainnya sesuai lokasi kerja dan jabatan. Fasilitas kesehatan melalui pemberian asuransi kesehatan dengan cakupan yang luas dan *benefit* yang terus ditingkatkan hingga kebutuhan layanan khusus termasuk penyakit kritis dan tindakan yang memerlukan alat canggih.

Benefit lain berupa skema pembiayaan pegawai yang diberikan dengan *margin* rendah dan jangka waktu yang panjang disediakan guna membantu pegawai dan keluarganya agar dapat memiliki rumah serta kepemilikan kendaraan pada jabatan tertentu.

MANAJEMEN TALENTA DAN SUKSESI

Untuk memastikan ketersediaan dan kesiapan pegawai untuk menduduki posisi-posisi kritikal, maka Mandiri Syariah merencanakan pengembangan pegawai umumnya dan mereka yang terbaik (*talent*) pada program-program pengembangan yang spesifik baik bersifat klasikal, *attachment*, maupun *project assignment* untuk mempercepat kesiapan para suksesor yang masuk dalam *pool talent* Bank.

Dengan proses *talent management* yang disiplin, pegawai dan suksesor akan mendapatkan gambaran mengenai rencana pengembangan, termasuk bentuk dan pola pengembangan yang dipersiapkan. Melalui *talent management*, Bank memiliki *pool* pegawai terbaik yang akan menjadi prioritas kandidat sebagai pimpinan Bank di masa depan. Di tahun 2019, Bank memiliki 577 orang atau 6,74% pegawai terbaik yang masuk dalam *talent pool*.

Para *talent* tersebut selanjutnya akan disiapkan sebagai suksesor pada jabatan-jabatan strategis Mandiri Syariah. Tahun 2019, Mandiri Syariah memiliki 332 orang yang diproyeksikan menjadi suksesor. Para suksesor inilah yang akan mendapatkan prioritas pengembangan untuk disiapkan kompetensi dan kapasitas kepemimpinannya. Sementara, bagi pegawai lain, Mandiri Syariah telah menyusun program-program pendidikan terstruktur di setiap akademi sesuai dengan fungsi kerjanya masing-masing. Pegawai akan memiliki keleluasaan untuk mengakses dan memilih modul pengembangan sesuai jalurnya masing-masing. Tahun 2019, Bank telah menyiapkan infrastruktur *Individual Development Plan* (IDP) untuk mengakomodir pelaksanaannya.

PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA

Hubungan industrial yang harmonis dan kondusif senantiasa dijaga. Oleh karenanya sistem pengakhiran hubungan kerja baik yang bersifat natural mau pun tidak diyakini tidak bertentangan dengan ketentuan Ketenagakerjaan yang berlaku.

Pengakhiran hubungan kerja yang alami adalah terhadap pegawai yang memasuki masa purna bakti. Selain kompensasi sesuai regulasi, setiap pegawai diberangkatkan untuk menunaikan ibadah umrah. Mandiri Syariah pun memberikan pelatihan khusus terkait program persiapan pensiun pegawai yaitu Pra-Purna Bhakti kepada pegawai yang akan memasuki masa purna bhakti sebagai bekal persiapan ketika memasuki usia purna bakti. Selain itu, Mandiri Syariah juga memberikan memberikan apresiasi dan pelepasan ketika pegawai memasuki usia purna bakti dengan memberikan plakat dan logam mulia.

Ada pun pengakhiran hubungan kerja di luar yang alami, baik karena mengundurkan diri, mau pun mereka yang terkena sanksi hukuman disiplin atau berakhir masa kontrak kerjanya, dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Sehingga prosesnya dapat terjaga agar tercipta hubungan industrial yang harmonis dan kondusif.

PROFIL PEGAWAI

Pada tahun 2019, Mandiri Syariah fokus pada peningkatan produktivitas, sehingga mengalami penurunan terhadap jumlah pegawai sebesar 6,92% menjadi 14.025 pegawai dari sebanyak 15.068 pegawai yang tercatat di tahun sebelumnya. Penurunan ini dilakukan dengan cara alami, seiring dengan upaya peningkatan produktivitas pegawai.

INTERNALISASI BUDAYA PERUSAHAAN

Menyadari sepenuhnya bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset penting dalam menjaga keberlangsungan perusahaan, maka pengelolaan SDM menjadi salah satu fokus utama Mandiri Syariah. Program penyempurnaan kebijakan pengelolaan SDM senantiasa dilakukan secara berkesinambungan, dimana Mandiri Syariah juga telah menetapkan budaya perusahaan yang ditanamkan melalui serangkaian program internalisasi visi, misi dan nilai-nilai Mandiri Syariah. Penerapan budaya kerja adalah suatu hal penting bagi Mandiri Syariah untuk memastikan setiap pegawai mampu menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaan, menjalankan secara penuh implementasi *good corporate governance* serta berjalan selaras dengan strategi dan kegiatan usaha Bank secara keseluruhan. Hal ini dilakukan demi menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan harmonis agar loyalitas pegawai dapat meningkat sehingga dalam jangka panjang akan berpengaruh positif terhadap keberlangsungan usaha Mandiri Syariah.

Dalam menjalankan internalisasi budaya perusahaan, Mandiri Syariah melibatkan seluruh pegawai mulai dari level yang tertinggi sampai terendah, dibantu oleh tim khusus yang bertanggung jawab untuk melakukan internalisasi budaya di setiap Unit Kerja sebagai Agen Perubahan (*Change Agent*). Para Agen perubahan membantu Mandiri Syariah dalam mengimplemtasikan *values* dan mendorong pegawai untuk melakukan hal-hal sesuai *values*. Para agen perubahan terpilih diberikan pembekalan terlebih dahulu, sehingga dapat lebih memahami dalam melaksanakan fungsinya sebagai agen perubahan.

RENCANA KE DEPAN

Rencana inisiatif strategis Human Capital di tahun 2020 sebagaimana yang telah dituangkan dalam *Human Capital Strategic* Plan 5 (lima) tahunan, dengan fokus kepada peningkatan produktifitas, kapabilitas dengan memperkuat fungsi Mandiri Syariah University untuk menjadikan pegawai Mandiri Syariah sebagai Bankir Syariah yang unggul dan kompeten.

Selain itu, fokus strategi lainnya adalah memperkuat penerapan budaya *risk*, budaya *digital*, budaya *sales* dan mengimplementasikan *employee value proposition* Mandiri Syariah yang membedakan Mandiri Syariah dengan Bank Syariah atau pun bank lainnya, sehingga dapat menjadi Bank Syariah pilihan talent terbaik dan tempat kerja yang menyenangkan dan produktif bagi pegawai.

mandiri
syariah

mandiri syariah

TEKNOLOGI INFORMASI

MASTER PLAN TEKNOLOGI INFORMASI

Sebagai Bank Umum Syariah terbesar di Indonesia berdasarkan aset dan penyaluran kredit, PT Bank Syariah Mandiri menyadari meningkatnya jumlah nasabah juga harus diikuti dengan meningkatnya pelayanan. Salah satu cara meningkatkan pelayanan adalah dengan terus meningkatkan kehandalan teknologi informasi dalam setiap layanan dan produk-produk perbankan. Penerapan Teknologi Informasi (TI) terkini serta melakukan inovasi-inovasi secara berkesinambungan dilakukan untuk meningkatkan daya saing BSM dalam industri perbankan.

Dengan dibentuknya IT *Strategic Plan* (ITSP) 2018 – 2022 yang digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan Teknologi Informasi (TI) Mandiri Syariah dengan menyelelaraskan strategi korporat (BSM *Strategy* 2020). Berdasarkan pemahaman pada hal tersebut, disusunlah Visi dan Misi TI yang menjadi acuan dalam merancang kondisi TI dimasa depan serta *roadmap* implementasi.

Visi:

Mengukuhkan Bank Syariah Mandiri sebagai *market leader* dengan teknologi informasi terkini dan inovatif

Misi:

1. Memfasilitasi kebutuhan akan teknologi yang dapat mendukung aktivitas pengguna untuk meningkatkan efektivitas dan *performa*.
2. Mewujudkan sistem yang mendukung diversifikasi produk untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang berkelanjutan dengan risiko yang terukur.
3. Berfokus sebagai Bank pilihan nasabah dengan akselerasi infrastruktur strategis dan teknologi yang *agile* yang mendorong strategi dan digitalisasi.
4. Memastikan stabilitas, keandalan dan keamanan sistem untuk mendukung aktivitas operasional Bank sehingga meningkatkan *user experience* dan kepercayaan *stakeholder*.
5. Memutakhirkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi, baik secara internal maupun eksternal untuk meningkatkan kerjasama antar *stakeholder.*

Mandiri Syariah senantiasa mendukung sinergi dan integrasi dengan Mandiri Group sehingga dapat memanfaatkan dan memaksimalkan *channel* dan infrastruktur yang sudah ada.

PROFIL DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI

Organisasi TI Mandiri Syariah saat ini terdiri dari IT Operation Group (IOG), IT Architecture & Strategy Group (ISG) dan IT Development Group (IDG) yang berada di bawah Direktorat Teknologi & Operation. Operasional TI dijalankan oleh IOG, sedangkan untuk aktivitas perencanaan strategi dilakukan oleh ISG dan pengembangan TI dilakukan oleh IDG.

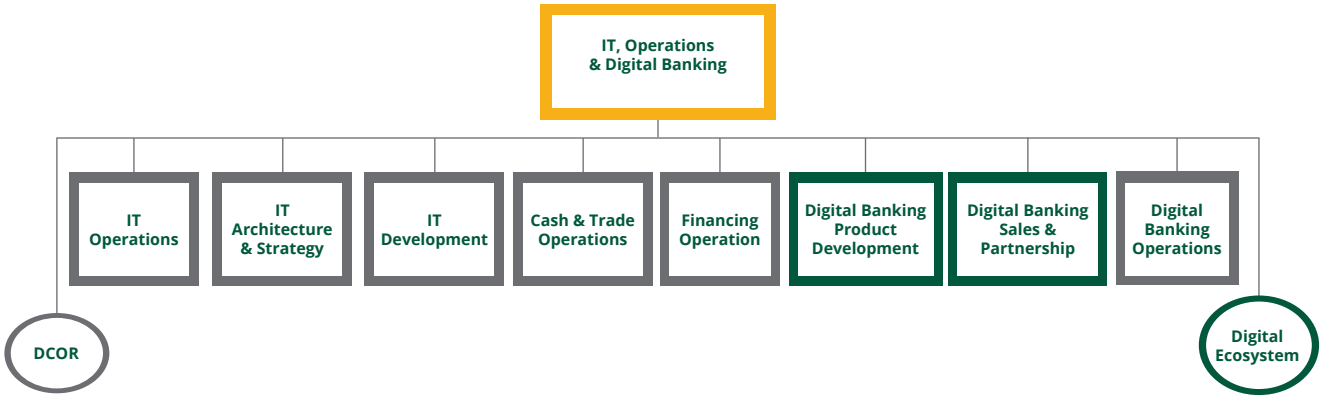

Unit kerja Central Operations, Financing Operations, dan Digital Channel Operations menjalankan penerapan operasional perbankan *day to day*. Namun demikian, unit kerja IT Architecture, Strategy & Development, IT Operations dan Digital Banking menjalankan penerapan operasional IT dimulai dari perencanaan, pengembangan dan penanganan permasalahan, sehingga untuk peran dan tanggung jawab pada bidang Teknologi Informasi (TI) disampaikan di bawah ini:

Unit Kerja	Peran dan Tanggung Jawab
IT Operation Group	Menjalankan aktivitas operasional TI dengan menyelesaikan permasalahan operasional.
IT Architecture & Strategy Group	Menjalankan aktivitas Tata Kelola dan perencanaan dengan menyusun kerangka Tata Kelola IT, perencanaan strategis TI, menjalankan proyek TI.
IT Development Group	Menjalankan aktivitas Pengembangan dan Implementasi aplikasi.

MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI

STRATEGI TEKNOLOGI INFORMASI

PENGEMBANGAN APLIKASI PENDUKUNG OPERASIONAL UNTUK MENDUKUNG VISI DAN MISI MANDIRI SYARIAH

Dalam upaya mewujudkan visi Mandiri Syariah yaitu menjadi "Bank Syariah Terdepan dan Modern", Mandiri Syariah berusaha untuk meningkatkan *service excellent* kepada nasabah dengan dukungan Teknologi Informasi.

Untuk meningkatkan *service quality* dan mendukung strategi perusahaan melalui program strategi korporat (Mandiri Syariah *Strategy* 2020), maka Mandiri Syariah melakukan tiga besaran *initiative* antara lain:

A. Truly 24 Hours Services

1. Melakukan pengembangan *monitoring tools* yang digunakan sebagai *tools report* terkait *performance server critical* melalui aplikasi Whatsapp (WA).
2. Melakukan *healtcheck* atau pemeriksaan rutin atas kondisi utilisasi dan kepatuhan teknis serta keamanan sistem aplikasi perangkat TI.
3. Menambah kapasitas infrastuktur *Data Center.*
4. Melakukan *Capacity Upgrade* yaitu *upgrade* mesin T24 dan *upgrade* mesin *Non Core*.
5. Mengembangkan Aplikasi *Performance Management* yang bertujuan untuk dapat memonitor *performance* secara *end to end*.
6. Implementasi *Daily end of day (*EOD*)/no holiday* untuk *availability* layanan operasional cabang.
7. Melakukan *bandwidth management* di seluruh *outlet* sebagai prioritisasi komunikasi data seluruh *outlet* yang dipergunakan untuk layanan transaksi.

B. IT *Enabler*

1. ***Project Management***, yaitu dengan melakukan prioritisasi *Project* antara lain:
   a. *Islamic Sector Solution*
   b. *Hospital Sector Solution*
   c. QR *Pay*
   d. *Multi Payment*
2. ***Development Method***, yaitu dengan mengaplikasikan beberapa metode pengembangan aplikasi antara lain:
   a. *Waterfall*, *Agile*, *Scrum*
   b. *Lean* IT *Process*
   c. *Testing Management Tools*
3. ***Governance* IT**
   a. Melakukan pengkinian IT *Strategic Plan (*ITSP*)*
   b. Melakukan pengkinian pada petunjuk teknis operasional IT

C. *Digital Banking*

1. **Modernisasi *e-Channel***
   a. Kelengkapan pembayaran *bills* pada *e-channel*, top 20 billers.
   b. *Availability channel* 24/7.
   c. *Basic function channels; transfer, pay bills*.
   d. Implementasi *new mobile* dan *internet banking*.
   e. *On Us transaction* pada ATM Mandiri.
   f. *Capability Omni Channel* pada *across channel*.
   g. *Focus on mobile and web application with covered full customer journey: on boarding, transaction, service.*
   h. *Payment QR Code physical dan non physical merchant.*
   i. *Integration with external channel seperti social media, retailer,* dan *agent aggregator*
2. ***E-commerce Business***
   a. Implementasi koneksi dengan salah satu *payment gateway ecommerce.*
   b. Implementasi koneksi dengan salah satu *Multi Payment gateway*.
   c. *Realtime reconciliation* untuk *market place* dan *seller*.
   d. Terhubung dengan *product* pinjaman, dan simulator.
   e. QR *code payment* dan *authorization via mobile*.
   f. *Acquiring platform* untuk bank syariah lainnya.

RE-ENGINEERING IT ENVIRONMENT SECARA BERTAHAP

Selain mengembangkan aplikasi, Mandiri Syariah juga melaksanakan *re-engineering* perangkat IT, antara lain:

1. *Collocation Data Center* dan integrasi dengan *Data Center* eksisting yang ada di Mandiri Syariah.
2. Meningkatkan fungsi jaringan komunikasi data (transformasi infrastruktur) melalui *availabililty jaringan internet*, *availability bandwith manager*, *upgrade* dan standarisasi *bandwith*. Hal tersebut dilakukan untuk:
   a. Memberikan dukungan optimal pada sistem CBS.
   b. Memastikan tersedianya jaringan data 24x7 sehingga dapat memberikan layanan operasional yang memadai.
3. Meningkatkan keamanan perangkat IT untuk mendukung operasional seperti penerapan *Firewall* dan IPS *server Farm* data center, *proxy gateway* dan SIEM. Ketiga hal tersebut diterapkan secara menyeluruh sebagai daya dukung terhadap penerapan IT *Security*.

4. Melakukan standardisasi jaringan komunikasi dan penataan perangkat, di seluruh *outlet* untuk memberikan *performance* dan layanan kepada nasabah stabil dan optimal.

ARSITEKTUR TEKNOLOGI INFORMASI

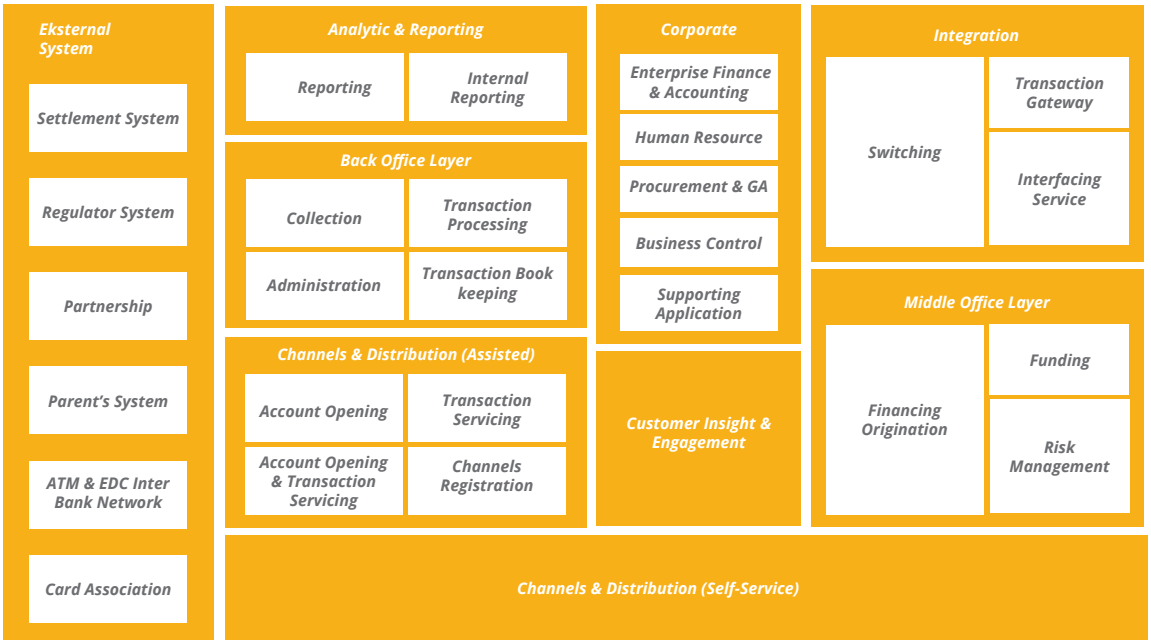

Sistem Teknologi Informasi Mandiri Syariah terdiri dari 4 (empat) blok besar yaitu:

1. **Sistem Kendali Eksternal Yang Menggunakan Media Kartu Sebagai Sarana Akses**
   Seluruh kegiatan pengelolaan transaksi yang berasal dari luar dilakukan melalui satu '*gateway*' untuk memudahkan pengendalian dan pengamanan, baik dari pembangunan infrastruktur maupun dari pengembangan sistem dan aplikasi. *Gateway* yang dimaksud berfungsi sebagai *switching* yang tersambung dengan terminal-terminal seperti ATM, EDC, *Telephone system*, jaringan ATM dan EDC, perangkat dan jaringan GSM, internet dan sebagainya. Institusi lain yang bekerjasama secara *host-to-host* menggunakan sistem *'interface*' standar seperti ISO 8583, *Service Oriented Archtecture*, *Extensible* XML dan sebagainya. Umumnya kerjasama yang ada berupa kerjasama pembayaran, tagihan kepada '*billing provider*'. Institusi yang tersambung bersifat domestik maupun internasional seperti jaringan visa internasional.
   Layanan *mobil banking* dan *internet banking* dibangun melalui sistem berbasis kartu maupun rekening. Kartu tersebut berperan sebagai media untuk mengakses semua fasilitas layanan bank dan rekening milik nasabah. Rekening menjadi basis pengembangan *mobile banking* dan internet banking umumnya digunakan untuk melengkapi layanan bank agar dapat diakses oleh nasabah tanpa perlu mendatangi bank.

2. **Sistem Kendali Eksternal Berbasis Rekening**
   Semua layanan perbankan dapat diakses nasabah melalui rekening saja. Layanan ini umumnya untuk transaksi yang bersifat '*closed transaction in bank*' yaitu Mandiri Syariah. Beberapa layanan yang digunakan menggunakan basis rekening antara lain '*Financing Origination System', 'Cash management', Mobile banking* dan Internet banking'. Layanan lainnya yang dapat diberikan oleh bank menggunakan basis rekening dan terkadang dilengkapi juga dengan kartu adalah '*remmittance*'.

3. **Sistem pemrosesan utama**
   Sistem pemrosesan utama merupakan induk dari semua kegiatan perbankan termasuk di dalamnya adalah transaksi. Hal penting yang menajadi tugas utama sistem pemrosesan utama adalah memposting, menjurnal dan melaporkan dalam bentuk laporan-laporan seperti laporan neraca, laporan rugi laba, laporan kinerja perusahaan dan sebagainya. Sistem pemrosesan utama harus diisolasi dari pihak eksternal. Tidak ada satupun akses ke dalam sistem pemrosesan utama secara langsung melainkan harus melalui sistem '*gateway*' yaitu melalui sistem berbasis kartu maupun sistem berbasis rekening dan juga oleh data *warehouse* untuk keperluan *management information system*.

4. **Sistem pengelolaan data dan informasi**
   Hal lain yang utama pada semua kegiatan perbankan adalah keakuratan data. Pengelolaan data dan informasi di Mandiri Syariah dibangun dengan prinsip *'single entry'* yaitu semua informasi yang masuk hanya dilakukan pada sisi '*customer contact point*' dan berakhir pada sistem *'core banking'* untuk diolah menjadi laporan pada sistem *'Management Information System'* atau MIS melalui perangkat 'data *warehouse'*. Tidak ada akses ke dalam sistem *core banking* untuk memperoleh data secara langsung guna keperluan pengolahan informasi selain oleh sistem MIS.

INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI

Infratruktur TI Mandiri Syariah didukung oleh fasilitas *Data Center* (DC) dengan konsep "*Two site DC Topology*" yang terdiri dari DC di Sentra Rempoa mandiri dan *Disaster Recovery Center* (DRC) di Sigma Surabaya. Prinsip-prinsip utama dalam mengelola infrastruktur TI yaitu sebagai berikut:

UPDATED

Mandiri Syariah secara bertahap melakukan pengikinian infrastruktur TI untuk dapat menyesuaikan dengan rencana pengembangan dan pertumbuhan bisnis serta perkembangan TI. Pada Tahun 2019 telah dilakukan *upgrade capacity* mesin *core banking system* dan mesin ATM *Switching* baru.

TESTED

Mandiri Syariah secara rutin melakukan pengujian IT *Disaster Recovery Plan* (DRP) untuk memastikan prosedur, perangkat TI dan SDM dalam menghadapi kondisi darurat yang dapat mengganggu operasional bank. Selama tahun 2019 telah dilakukan 6 (enam) kali *switch-over* (pengujian) untuk mendukung kontinuitas bisnis saat kondisi darurat, Mandiri Syariah juga memiliki fasilitas *Business Continuity Plan* (BCP) sebagai lokasi darurat bagi unit kerja kritikal saat lokasi utama tidak memungkinkan untuk di akses.

AVAILABILITY

Availability layanan IT untuk menjaga keandalan operasional, percepatan penyelasaian permasalahan yang terukur dan termonitor serta sebagai komitmen dalam memberikan dukungan optimal kepada bisnis dan operasional.

IT *GOVERNANCE*

PENERAPAN KETENTUAN BANK INDONESIA

Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dapat meningkatkan risiko yang dihadapi perbankan termasuk Mandiri Syariah. Dalam rangka untuk dapat meminimalisir risiko tersebut, Mandiri Syariah meresponnya dengan menerapkan manajemen risiko secara efektif dan bertahap sesuai ketentuan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum; dan
2. Surat Edaran OJK (SE OJK) No. 21/SEOJK.03/2017 tertanggal 6 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

Dalam penerapan manajemen risiko tersebut, BSM senantiasa melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi atas pelaksanaan proyek TI.
2. Melengkapi, mengembangkan dan menyempurnakan kebijakan dan prosedur penggunaan TI.
3. Menyempurnakan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko penggunaan TI.
4. Melakukan uji coba atas *Disaster Recovery Plan* (DRP) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengharuskan Bank untuk melakukan uji coba DRP paling kurang sekali dalam satu tahun dengan melibatkan *end user.*
5. Melaksanakan sistem pengendalian intern atas penggunaan TI.
6. Membangun dan mengembangkan aplikasi pendukung manajemen risiko.
7. Melakukan evaluasi profil risiko teknologi informasi secara berkala paling kurang sekali dalam satu tahun yang kemudian dilaporkan kepada Direktur Bidang.
8. Penerapan program IT *Risk & Security Awareness*, yaitu suatu program peningkatan kesadaran *stakeholder* akan keamanan informasi. Metode yang digunakan yaitu dengan cara sosialisasi melalui media *desktop wallpaper*, *intranet wallpaper* dan *upload* materi pembelajaran *e-learning* mengenai *Information Security.*

KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA (*GOVERNANCE*) TEKNOLOGI INFORMASI

Adapun ketentuan terkait Pengelolaan TI di Mandiri Syariah dituangkan dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang secara umum mengatur hal-hal sebagai berikut:

a. Standar Prosedur Operasional TI (SPO TI)

Merupakan Pedoman Tata Kelola TI mulai dari tahap perencanaan, pengembangan, pengelolaan operasional sampai dengan pengamanan TI secara *end-to-end* yang berlaku di Mandiri Syariah. Penerapan Tata Kelola TI dilakukan dengan memerhatikan prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), ketersediaan (*availabillity*), kehandalan (*reliability*), keberlangsungan (*continuity*), dan kepatuhan (*compliancy*) dengan memerhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

SPO TI merupakan aturan yang berisikan ketentuan dan/atau prosedur sebagai penjabaran dari Kebijakan Operasional Bank Mandiri Syariah. SPO TI tersebut mengacu pada ketentuan Regulator maupun ketentuan Internal Bank. Ketentuan Regulator yang menjadi landasan adalah:

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 terkait Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/ POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 21/ SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 perihal Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

b. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) terkait dengan TI

Merupakan ketentuan yang mengatur tahapan proses atau teknis pelaksanaan yang berlandaskan pada SPO TI. Adapun PTO terkait dengan TI adalah sebagai berikut:

Petunjuk Teknis Operasional (PTO)	Deskripsi
Helpdesk	Penanganan masalah aplikasi *end to end*, eskalasi dan SLA.
Disaster Recovery Plan (DRP)	Pedoman tindakan penanganan atau *recovery* apabila terjadi bencana yang mengakibatkan operasional sistem tidak berfungsi.
Pengelolaan kapasitas	Perencanaan dan pelaksanaan kapasitas *server* dan jaringan.
Pengelolaan Operasional *Data Center*	Pelaksanaan proses EOD, pengelolaan media *tape backup*, dan proses *backup* dan *restore.*
End User Computing (EUC)	Pengendalian pengembangan sistem aplikasi yang dikembangkan oleh unit kerja *non* IT.
Pengamanan Sistem Aplikasi	Pengamanan sistem aplikasi terkait *user* akses aplikasi.
Pengelolaan Infrastruktur	Pengelolaan aset TI dan *Collocation Data Center.*
Pemantauan dan Pemeliharaan Sistem	Pemantauan dan pemeliharaan sistem yang beroprasional 7x24 jam dan *very critical*.
System Development Life Cycle (SDLC)	Pedoman proses pembuatan, pengembangan dan perbaikan sistem/aplikasi.
Klasifikasi Kerahasiaan Dokumen TI	Klasifikasi jenis dan kerahasiaan dokumen TI.
Change Management	Pengelolaan perubahan terhadap *hardware/software server* operasional dan perangkat jaringan serta perangkat *security.*
Pengelolaan Jaringan	Pengelolaan pemantauan dan pemeliharaan jaringan serta penanganan gangguan jaringan.
Perbaikan Data/*Patching*	Pedoman untuk melakukan perbaikan data sesuai prinsip kehati-hatian.
Standardisasi Perangkat Lunak	Pedoman dalam penggunaan perangkat lunak khususnya perangkat lunak pada *personal Computer* (PC) *Desktop*.
Security Coding	Pedoman pengamanan sistem aplikasi pada saat pengembangan aplikasi.
Hardening	Pedoman pengamanan sistem perangkat keras, perangkat lunak, dan *database*.
Non Disclosure Agreement (NDA)	Pedoman pengamanan kerahasiaan data dan informasi nasabah dalam rangka kerjasama bisnis berbasis TI dengan pihak ketiga.

RENCANA KE DEPAN

Strategi pengembangan TI mengacu pada ITSP 2018 – 2020 yang dikelompokan menjadi 4 (empat) tema yaitu: Fundamental, *Run the Bank, Change the Bank* dan *Transform the Bank*.

1. **Fundamental**
   Inisiatif ITSP yang merupakan inisiatif *backbone*/dasar yang menjamin inisiatif lainnya dapat berjalan;
2. ***Run the Bank***
   Inisiatif ITSP untuk menjamin operasional bank dapat berjalan dengan baik;
3. ***Change the Bank***
   Inisiatif ITSP yang ditujukan untuk meningkatkan/menumbuhkan bisnis bank; dan
4. ***Transform the Bank***
   Inisiatif ITSP yang memberikan peningkatan secara major terhadap internal maupun bisnis bank.

Fundamental	*Run the Bank*	*Change the Bank*	*Transform the Bank*
Big Data, Visualization and Analytics, Infrastructure, Enterprise Application Integration	IT *policy and procedure,* pengembangan CBS, *collaborative work environment, Enterprise application software*	*Governance, Risk and Compliance, Process Automation System,* FBI *Focus*	*Human Centricity, Customer Experience*

Adapun deskripsi IT *Strategic Plan* (ITSP) antara lain:

1. ***Core Banking System* (CBS)**
   Pengembangan sistem *core banking* (BSM) pada prinsipnya yaitu mengoptimalkan penggunaan dan apabila terdapat kebutuhan baru maka dibangun di atas aplikasi baru.

2. ***Big Data* (BGD)**
   Kajian dan implementasi tata kelola dan manajemen untuk memastikan terjaminnya kualitas data yang menjadi *single source of truth*. Implementasi sistem untuk pengumpulan, integrasi dan presentasi dari data/ informasi bisnis dengan tingkat *granularity* yang sesuai dengan kebutuhan yang dilengkapi dengan *descriptive analytics, predictive analytics and prescriptive analytics*.

3. **FBI *Focus* (FBI)**
   Implementasi sistem yang dapat mengotomasikan pengelolaan layanan *trade finance, treasury bank, Cash management* baru dan inisiatif *digital* baik pengembangan platform yang telah ada maupun baru.

4. ***Enterprise Application Integration* (EAI)**
   Implementasi sistem yang dapat mengelola integrasi proses antar aplikasi, mendukung arsitektur SOA (*Service Oriented Architecture*) agar terstandarisasi dan mengelola API (untuk integrasi dengan pihak eksternal).

5. **Process *Automation System* (PAS)**
   Implementasi sistem ini, untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas pegawai serta *tools* yang memungkinkan otomasi dari *testing* yang men-simulasikan interaksi *user* dengan aplikasi.

6. ***Customer Experience* (CEX)**
   Implementasi sistem yang dapat membantu Bank dalam memahami kebutuhan nasabah, melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut serta meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah.

7. ***Governance, Risk and Compliance* (GRC)**
   Implementasi sistem mengakomodasi fungsi AML, pengembangan *fraud management*, analisis risiko, management audit, keamanan nasabah serta perusahaan dan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan kepada regulator. Selain itu, di tahun 2020 Mandiri Syariah akan meningkatkan standar layanan TI dan *Information Security* berbasis ISO.

8. ***Human Centricity* (HCC)**
   Pengembangan sistem *Human Resource* (HR) dan pengelolaan pegawai terkait peningkatan *knowledge* hingga perencanaan jenjang karir.

9. ***Financing Management* (FIM)**
   Implementasi sistem yang dapat mengotomasikan aktivitas *marketing, single Finance Origination system* (FOS), lelang agunan, *collection system* dan ketepatan serta kecepatan proses pengambilan keputusan.

10. ***Enterprise Application Software* (EAS)**
    Implementasi sistem untuk monitoring performa perusahaan dan pemantauan penyerapan anggaran, manajemen aset dan sentralisasi pembayaran.

11. ***Infrastructure* (IFR)**
    Pengembangan dan peremajaan infrastruktur IT mencakup *network*, *security*, *hardware*, di kantor pusat dan cabang, *system switching, tools monitoring* ATM untuk memantau aktivitas jaringan dan menjaga layanan tetap *online*.

12. **IT *Policy and Procedure* (ITP)**
    Kajian dan pembaharuan dari prosedur TI dari segi pengembangan aplikasi, keamanan *cyber* dan pembentukan kapabilitas *digital*.

PENGELOLAAN *DIGITAL BANKING*

Pengelolaan *Digital Banking* di Mandiri Syariah dilakukan oleh 5 (lima) unit kerja yang secara garis besarnya memiliki fungsi dan tujuan sebagai berikut:

1. *Digital Banking* memiliki tugas untuk meningkatkan penghimpunan dana murah, *fee based income*, dan pengalihan transaksi ke transaksi digital/*e-channel* yang lebih murah dan cepat melalui pengembangan strategi dan kebijakan digital banking yang tepat.
2. Melakukan *review performance analysis* terhadap *fee based income*, penetrasi kartu, penetrasi *user* Mandiri Syariah *Mobile* dan yang Aktif, Penetrasi *Internet Banking*, *Internet Banking* Aktif, Data Transaksi per *channel*, *mapping quadran* ATM agar bisa mengupayakan strategi-strategi yang tepat sasaran.
3. Memastikan strategi dan pengembangan produk *digital banking* dapat mendukung strategi Mandiri Syariah yang dapat diimplementasikan tepat waktu dan diupayakan untuk terus berinovasi berkembang mengikuti tren kebutuhan masyarakat Indonesia**.**

Adapun unit-unit yang berada di bawah Digital Banking Group adalah:
1. Digital Channel Product Development.
2. Physical Channel Product Development.
3. Customer Experience dan Business Process Reengineering.
4. Digital Data Management.
5. Digital Ecosystem Partnership.

Seluruh unit kerja Digital Banking Group menghasilkan produk dan solusi yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah sehingga diharapkan nasabah Mandiri Syariah yang loyal akan semakin meningkat. Digital Banking sedang mengembangkan *Digital Data Management* yang dapat membantu Mandiri Syariah untuk membuat keputusan Bisnis Mandiri Syariah yang lebih baik.

Terkait hal kemudahan bertransaksi, di tahun 2019 Digital Banking Group berhasil mengalami peningkatan pada transaksi Digital Banking Mandiri Syariah sebesar 23% lebih tinggi dibandingkan tahun 2018.

Pada akhir tahun 2019 Digital Banking Group telah mengalami pengembangan organisasi menjadi 4 group. Adapun Group-group tersebut adalah:
1. Digital Banking Sales and Partnersip Group.
2. Digital Banking Product Development Group.
3. Digital Banking Operation Group.
4. Digital Banking Ecosystem Group.

JARINGAN ATM

Digital Banking Group bertanggung jawab terhadap pencapaian *Fee Based Income* dari seluruh ATM Mandiri Syariah.

BSM Card dapat digunakan di lebih dari 100.000 jaringan ATM meliputi:
- ATM Syariah Mandiri, 1.043 unit
- ATM Mandiri, 17.708 unit
- ATM BERSAMA, 77.401 unit
- ATM Prima, > 120.000 unit dan
- Malaysia Electronic Payment System (MEPS), 9.722 unit.

PRODUK DIGITAL BANKING MANDIRI SYARIAH

PENGEMBANGAN TAHUN 2019

Mandiri Syariah Mobile

Di tahun 2019, aplikasi Mandiri Syariah Mobile (MSM) hadir dengan tampilan baru yang lebih *modern* dan *fresh* yang dapat digunakan pada *device* berbasis android maupun iOS.

Tidak hanya sisi tampilan, pengembangan aplikasi Mandiri Syariah Mobile juga terdapat pada segi keamanan dan juga kelengkapan fitur. Berikut adalah fitur-fitur Mandiri Syariah Mobile yang telah dikembangkan:

Fitur	Keterangan
Lokasi Masjid	Fitur untuk mengetahui lokasi masjid terdekat berdasarkan *geotagging*.
Hewan Kurban	Fitur pembayaran transaksi pada merchant menggunakan scan QR code.
Juz Amma	Fitur untuk membaca Al Quran juz 30 (Juz Amma) beserta terjemahannya.
Tarik Tunai Tanpa Kartu	Fitur untuk melakukan tarik tunai tanpa kartu di mesin ATM dengan melakukan permintaan kode tarik tunai terlebih dahulu melalui MSM.
Aktivasi Melalui SMS	Metode aktivasi MSM dengan melakukan pengiriman sms untuk verifikasi.
Login aplikasi	Fitur keamanan untuk masuk ke aplikasi MSM dengan menggunakan input kata sandi, sidik jari, dan pemindai wajah.
Indikator Koneksi	Fitur sebagai informasi kepada nasabah bahwa koneksi saat menggunakan aplikasi MSM tersebut sedang bagus, lemah, atau tidak ada koneksi.
Pembukaan rekening *mudharabah* dan wadiah	Fitur pembukaan rekening *wadiah* dan *mudharabah* bagi nasabah eksisting.
Blokir Kartu	Fitur untuk memblokir kartu ATM apabila kartu ATM nasabah hilang atau terselip. Blokir bersifat sementara dan dapat diaktifkan kembali melalui CS di cabang.
MSM *Keyboard*	Fitur *keyboard* dan dapat melakukan transaksi saat sedang *chat* atau SMS.
Online Onboarding	Fitur buka rekening bagi nasabah baru, dengan metode verifikasi *video call* sehingga nasabah tidak perlu datang ke cabang.
Registrasi MSM via ATM	Fitur pendaftaran MSM yang dapat dilakukan melalui mesin ATM (tanpa perlu datang ke CS Cabang).
QRIS	Fitur untuk transaksi belanja/infaq dengan metode scan QR *Code* milik Mandiri Syariah ataupun bank lain yang sudah standar Bank Indonesia.
Top Up E-Wallet	Fitur untuk melakukan transaksi *top up* ke dompet *digital* seperti LinkAja, Gopay, Ovo, Paytren, dan lainnya.
Push Notification	Fitur untuk menginformasikan kepada nasabah berupa promo atau *event* yang sedang berjalan dari Mandiri Syariah.

AISYAH

Saat ini perbankan sudah mencoba layanan mesin *chatbot* berbasis kecerdasan buatan untuk meningkatkan pelayanan dan efisiensi perusahaan. Merespon perubahan, Mandiri Syariah mengembangkan layanan *chatbot* Aisyah (Asisten Interaktif Mandiri Syariah) yang bertugas untuk menjadi asisten *digital* bagi nasabah Mandiri Syariah yang telah di-*launching* pada tanggal 26 November 2018.

Aisyah akan menjawab pertanyaan dan keluhan nasabah melalui telegram, Facebook Messenger dan *live chat* di situs *web*. Layanan ini akan melengkapi layanan *digital* lainnya untuk memudahkan nasabah Mandiri Syariah. Pengembangan Aisyah menggunakan teknologi 3 Dholphin berbasis kecerdasan buatan (AI, *Artificial Intelligence*) yang membuat Aisyah dapat berbicara lebih luwes layaknya manusia ketika melakukan *chatting* dengan nasabah.

Aisyah diharapkan mampu meningkatkan efisiensi perbankan karena *chatbot* mampu bekerja selama 24 jam dan menangani beberapa pertanyaan yang sederhana atau standar seperti cara membuka rekening bank syariah, produk pendanaan lain, fasilitas pembiayaan, info layanan Mandiri Syariah, dan juga lokasi kantor cabang terdekat.

Strategi Pemasaran Produk

Digital Banking telah melakukan pemasaran produk untuk membentuk *brand image* Mandiri Syariah. Adapun program yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. **Program Digi 100**
   merupakan Program bisnis yang mengajak nasabah *Payroll* untuk bertransaksi menggunakan *Mobile Banking* dan Kartu Debit untuk kebutuhan pembayaran pribadi. Program ini bertujuan antara lain, untuk mengenalkan fitur *Mobile Banking* dan fungsi kartu debit kepada Pegawai *payroll*, mendukung Program Bank Indonesia Tentang *Cashless Payment*, serta Meningkatkan *Transaction Habit* Pegawai *payroll* untuk menggunakan *Mobile Banking* dan kartu debit.

2. **Program ATM Kuat**
   merupakan program bisnis yang memberitahukan kepada nasabah bank lain tentang keberadaan mesin ATM Mandiri Syariah dan mengajak nasabah bank lain untuk bertransaksi di ATM Mandiri Syariah. Tujuan dari diadakannya program ini adalah meningkatkan *awareness* keberadaan ATM, meningkatkan kinerja ATM serta meningkatkan *fee based income* ATM.
3. **Program Merchant Diskon**
   merupakan suatu bentuk program kerjasama antara Bank dan penjual barang atau jasa dalam hal promosi pemasaran. Adapun program ini bertujuan untuk meningkatkan transaksi penjualan kepada *merchant* dan meningkatkan *fee based income* kepada Bank.
4. **Pembukaan gerai-gerai di berbagai event**
   merupakan Program untuk mempromosikan Mandiri Syariah ke masyarakat dengan beberapa *event* seperti: *car free day*, periksa kesehatan gratis, senam bersama serta membuka gerai yang berlokasi di tempat pusat keramaian.

Sedangkan, Program *Digital Marketing* yang dilakukan adalah:
1. *Online creative technical concept*.
2. *Social media and content product*.
3. *Search Engine Optimization* (SEO).
4. *Email marketing program*.
5. *Video content production*.
6. *Banner* Mandiri Syariah Mobile.
7. *Push notification* Mandiri Syariah Mobile.
8. SMS *blast*.

KERJASAMA SINERGI MANDIRI SYARIAH DENGAN LINGKUNGAN MANDIRI *GROUP*

a) Mandiri Syariah *Debit Card* dapat digunakan pada seluruh Jaringan ATM Mandiri, dengan fitur yang bisa digunakan adalah:
   1. Tarik tunai
   2. Transfer ke rekening Mandiri
   3. Transfer antar rekening Mandiri Syariah
   4. Transfer ke rekening baik ke anggota Bersama dan Prima
   5. Pembayaran tagihan rutin
   6. Isi ulang pulsa dan e money Mandiri
   7. Cek Saldo
   8. Ganti PIN ATM

b) Mandiri Syariah *Debit Card* dapat digunakan pada mesin Jaringan EDC Mandiri. Dengan kelebihannya Mandiri Syariah Card, dapat digunakan untuk bertransaksi belanja diseluruh *Merchant* Bank Mandiri.

c) BSM *E-Money*
   E-Money adalah uang yang digunakan untuk pembayaran elektronik. Penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
   1. Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai.
   2. Tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang apapun.
   3. Sangat *applicable* untuk transaksi masal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi, seperti: transportasi, parkir, tol, *fast food*, dan lain sebagainya.
   4. Tersedia sinergi *top up* e-money melalui Mandiri Syariah *Mobile* untuk memudahkan nasabah *top up* dan *update* saldo e-money.

d) Sinergi Pembayaran *bill payment* kepada *biller-biller* Bank Mandiri melalui *channel* Mandiri Syariah seperti pembayaran BPJS, sehingga memudahkan nasabah Mandiri Syariah dan meningkatkan transaksi *bill payment* baik di Mandiri Syariah dan Bank Mandiri.

e) *Alignment roadmap digital banking* Mandiri Syariah dengan *roadmap digital banking* Bank Mandiri melalui *benchmarking team digital banking* antara lain dengan melakukan terkait *sharing knowledge User Experience*/UX dan *Big Data*.

mandiri
syariah

mandiri syariah

TATA KELOLA
PERUSAHAAN

PENCAPAIAN DALAM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pada semester I dan II 2019 hasil penilaian *self assessment* pelaksanaan GCG adalah 1 atau masuk dalam kategori **"Sangat Baik"**	Pengukuran Pelaksanan Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan oleh Bank dan mendapatkan CGPI *Award* Mandiri Syariah sebagai *The Most Trusted Company* 8 (delapan) kali berturut-turut (CGPI 2011 – 2018).

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Berlandaskan prinsip-prinsip GCG memacu Mandiri Syariah terus menjalankan sistem perbankan yang sehat, *sustain* dan memenuhi prinsip syariah. Implementasi GCG bagi Mandiri Syariah merupakan sebuah kebutuhan dalam menghadapi era kompetisi global saat ini. Mandiri Syariah sangat merasakan manfaat dari implementasi GCG, karena dengan menerapkan GCG maka keselarasan tujuan Bank dengan tujuan para *stakeholders*-nya akan terjalin dengan baik. Dengan adanya keselarasan tujuan maka akan tercipta iklim bisnis yang kondusif yang pada akhirnya membantu perusahaan dalam mencapai kinerja yang ditetapkan. Implementasi GCG harus dilakukan secara terarah, terencana, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berkesinambungan dan melibatkan seluruh elemen perusahaan.

Implementasi pelaksanaan GCG di Mandiri Syariah mengacu pada ketentuan antara lain:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi BUS dan UUS yaitu penerapan 5 prinsip dasar Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*) dan Kewajaran (*Fairness*).
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tanggal 11 Juni 2014.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

STRUKTUR ORGAN PERUSAHAAN

Mandiri Syariah telah memiliki struktur Tata Kelola Perusahaan Mandiri Syariah yang merujuk pada Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Struktur *Good Corporate Governance*

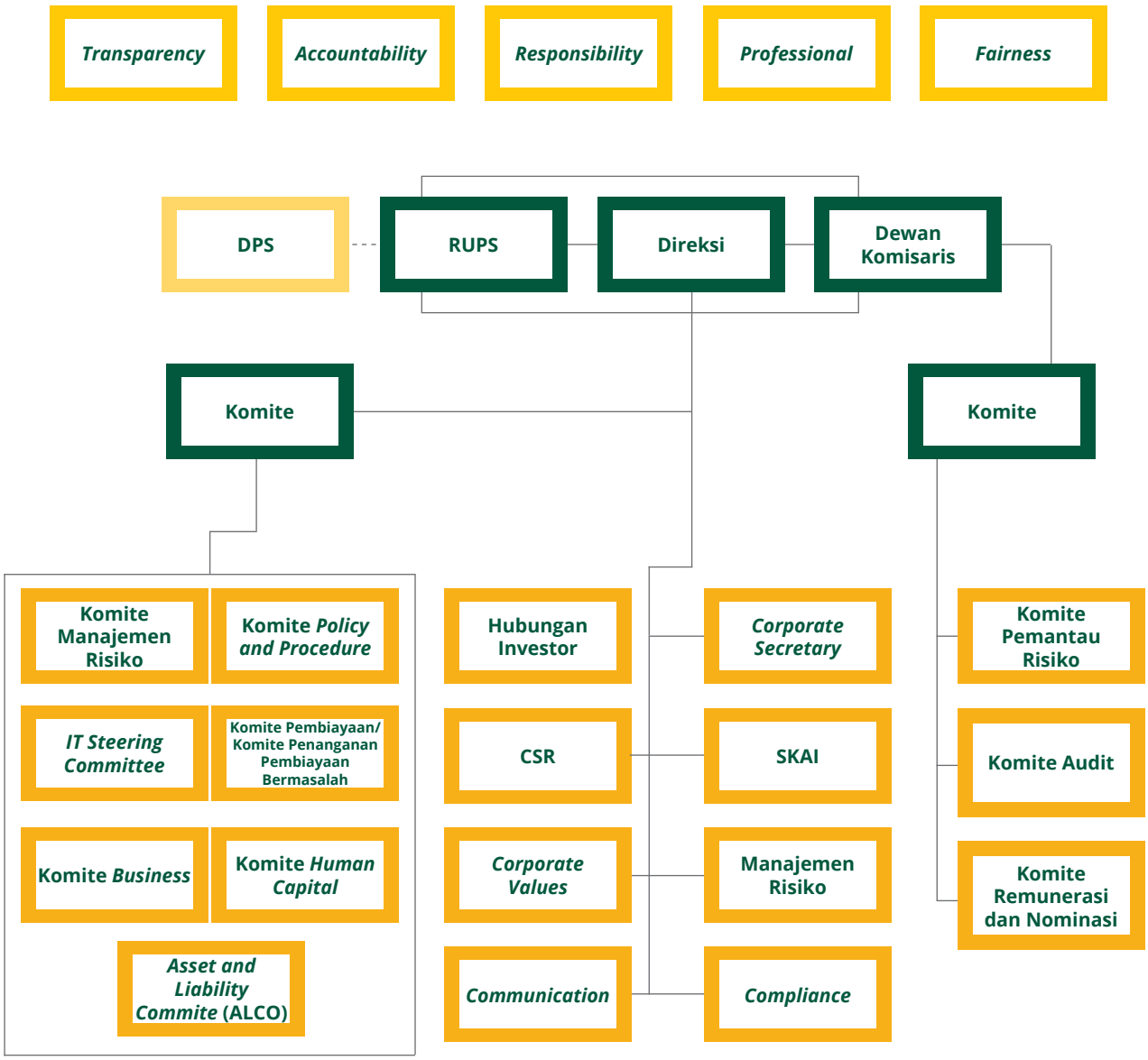

GOVERNANCE SOFT STRUCTURE

Bank memiliki Arsitektur Kebijakan dan Prosedur yang merupakan tatanan ketentuan yang menggambarkan Hirarki/Tata Urutan dan Pengelompokan Kebijakan dan Prosedur. Hirarki/Tata Urutan Kebijakan dan Prosedur Bank adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar Bank
2. Ketentuan Level Kebijakan
3. Ketentuan Level Prosedur
4. *Fundamental Values*

Kerangka Arsitektur Kebijakan dan Prosedur Mandiri Syariah adalah sebagai berikut:

Anggaran Dasar

Pilar Kebijakan:
- Kebijakan Manajemen Risiko Mandiri Syariah
- Kebijakan Pengendalian Intern Mandiri Syariah

Kebijakan:
- Kebijakan Bisnis
- Kebijakan Operasional
- Kebijakan Pengendalian

Prosedur:
- Standar Prosedur
- Memorandum Prosedur Operasional
- Manual Produk

Fundamental *Values*

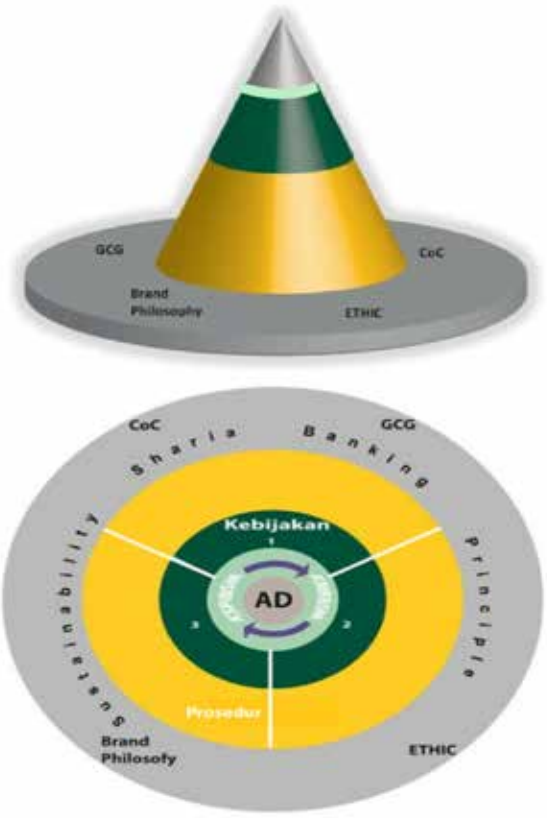

Adapun *soft structure* yang dimiliki Mandiri Syariah antara lain:
1. Anggaran Dasar
2. Tata Tertib Dewan Komisaris
3. Tata Tertib Direksi
4. *Charter* Komite Audit
5. *Charter* Komite Remunerasi dan Nominasi
6. *Charter* Komite Pemantau Risiko
7. Piagam Internal Audit
8. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan
9. Kebijakan Prosedur Pengendalian (SPP) Kepatuhan
10. Kebijakan Sistem Pengendalian Internal
11. Kebijakan Pengendalian (KBP) Hukum, Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)

MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

PEMEGANG SAHAM

Hak Pemegang Saham

Pemegang Saham memiliki hak untuk:
1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.
2. Menerima pembayaran Dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi.
3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-undang.
4. Pemindahan hak atas saham sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Mandiri Syariah merupakan salah satu Entitas Anak dari Bank Mandiri dalam hal ini merupakan badan hukum yang dimiliki oleh negara (BUMN). Kepemilikan saham mayoritas Mandiri Syariah dimiliki oleh Bank Mandiri. Dengan demikian, Pemegang Saham Utama dan Pengendali Mandiri Syariah adalah Bank Mandiri sehingga tidak terdapat Pemegang Saham Utama dan Pengendali secara tidak langsung, sampai kepada pemiliki individu.

Perlakuan Yang Sama Terhadap Pemegang Saham

Seluruh Pemegang Saham memiliki hak yang sama dalam memperoleh informasi terkait Perseroan.
Mandiri Syariah memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh Pemegang Saham dalam memberikan informasi yang diperlukan oleh investor atau Pemegang Saham agar tidak terdapat informasi pihak dalam (inside information) yang hanya diketahui oleh Pemegang Saham Mayoritas.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Bank. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

Proses Penyelenggaraan RUPS

RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan usaha. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan atau melalui iklan dalam surat kabar paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS.

RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul di tolak.

Pelaksanaan Rups Tahunan 2019 Dan Realisasinya

Tahapan pelaksanaan RUPS Tahunan 2019 tergambar dalam tabel berikut.

Tabel Pelaksanaan RUPS Tahunan 2019

Undangan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Undangan RUPS Tahunan 2019 telah disampaikan kepada para pemegang saham pada tanggal 8 Market 2019 dengan surat tercatat: No. 21/141-3/DIR-CSG kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Dan No. 21/142-3/DIR-CSG kepada PT Mandiri Sekuritas.	Dilaksanakan pada hari Senin 27 Maret 2019 bertempat di Ruang Belitung Lantai 2 Plaza Mandiri, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 10110.	Hasil keputusan RUPS Tahunan 2019 telah disampaikan kepada Pemegang Saham serta telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan tanggal 2 April 2019 dengan surat No. 21/185-3/DIR-CSG perihal Laporan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 PT Bank Syariah Mandiri Tanggal 27 Maret 2019 Khusus Perubahan Dewan Pengawas Syariah dan Pengurus

Rekapitulasi Kehadiran pada Rups Tahunan 2019

RUPS Tahunan 2019 yang dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2019

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Hadir
2.	Bambang Widianto	Komisaris Independen	Hadir
3.	Dimas Oky Nugroho	Komisaris Independen	Hadir
4.	Dikdik Yustandi	Komisaris	Hadir
5.	Toni Eko Boy Subari	Direktur Utama	Hadir
6.	Putu Rahwidhiyasa	Direktur Kepatuhan	Hadir
7.	Ade Cahyo Nugroho	Direktur	Hadir
8.	Achmad Syafii	Direktur	Hadir
9.	Mohamad Hidayat	Dewan Pengawas Syariah	Hadir
10.	Muhammad Syafii Antonio	Dewan Pengawas Syariah	Hadir

Agenda Pertama
Persetujuan laporan tahunan dan laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (Tiga puluh satu desember 2018) termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan Pengurus dan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (Tiga puluh satu desember dua ribu delapan belas), sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.
Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.

Keputusan
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (Tiga puluh satu desember dua ribu delapan belas) dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (Tiga puluh satu desember dua ribu delapan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS, & Rekan (*a mamber firm of pricewaterhouseCoopers*), dengan opini "menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporan nomor : -00009/2.1025/AU.1/07/0229-1/1/1/2019 tanggal 21-1-2019 (dua puluh satu januari dua ribu sembilan belas).
2. Atas disetujuinya Laporan Tahunan Peseroran termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (Tiga puluh satu desember dua ribu delapan belas) serta disahkannya laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (Tiga puluh satu desember dua ribu delapan belas), maka rapat memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (Tiga puluh satu desember dua ribu delapan belas), sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercemin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (Tiga puluh satu desember dua ribu delapan belas).
3. Pembebasan dan Pelunasan Tanggung Jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) juga diberikan kepada:
   a. Bapak RAMZI AHMAD ZUHDI yang menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tanggal 1-1-2018 (satu januari dua ribu delapan belas) sampai dengan tanggal 12-3-2018 (dua belas maret dua ribu delapan belas).
   b. Bapak EDWIN DWIJAJANTO yang menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 1-1-2018 (satu januari dua ribu delapan belas) sampai dengan tanggal 12-3-2018 (dua belas maret dua ribu delapan belas).
   c. Bapak CHOIRUL ANWAR yang menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 1-1-2018 (satu januari dua ribu delapan belas) sampai dengan tanggal 12-3-2018 (dua belas maret dua ribu delapan belas).

Status : Terealisasi

Agenda Kedua

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (Tiga puluh satu desember dua ribu delapan belas).

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.

Keputusan
Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp605.212.143.435,- (enam ratus lima miliar dua ratus dua belas juta empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) yaitu sejumlah 100% (seratus persen) dari laba bersih Perseroan dialokasikan sebagai laba ditahan.

Status : Terealisasi

Agenda Ketiga

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu desember dua ribu sembilan belas) dan penetapan biaya/honorariumnya.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.

Keputusan
1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik TANUDIREJA, WIBISANA, RINTIS & Rekan *(a member firm of pricewaterhouseCoopers)* dan Akuntan Publik LUCY LUCIANA SUHENDA, SE., AK.CPA untuk mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu desember dua ribu sembilan belas).
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komaris untuk menetapkan Honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS & Rekan *(a member firm of pricewaterhouseCoopers)* dan/atau Akuntan Publik LUCY LUCIANA SUHENDA, SE., AK.CPA karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu desember dua ribu sembilan belas).

Status : Terealisasi

Agenda Keempat

Penetapan gaji Anggota Direksi dan Honorarium Anggota Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas, benefit dan/ atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2019 serta penetapan Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2018 (Tiga puluh satu desember dua ribu delapan belas).

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.

Keputusan
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas Perseroan untuk menetapkan:
1. Gaji anggota Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).
2. Tantiem atas kinerja Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu desember dua ribu sembilan belas).

Status : Terealisasi

Agenda Kelima

Penetapan honorariumnya dan bonus bagi Dewan Pengawas Syariah Perseroan

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.

Keputusan
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan:
1. Honorarium bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).
2. Bonus bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas).

Status : Terealisasi

Agenda Keenam

Persetujuan perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.

Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat tuan Doktor Kiyai MA'RUF AMIN sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan; tuan Doktor Haji MOHAMAD HIDAYAT sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta tugas Doktor Haji MUHAMMAD SYAFII ANTONIO, M.Ec sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya sejak penutupan RUPS Tahunan tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
2. Mengangkat kembali tuan Doktor Kiyai MA,RUF AMIN sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan tuan Doktor Haji MOHAMD HIDAYAT sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
3. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menindaklanjuti keputusan Rapat terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya.

Terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas), susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Ketua : tuan Doktor Kiyai Haji MA'RUF AMIN
Anggota : tuan Doktor Haji MOHAMAD HIDAYAT

Status : Terealisasi

Agenda Ketujuh

Persetujuan perubahan Pengurus Perseroan.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat.

Keputusan
1. Mengangkat tuan AGUS SUDIARTO sebagai Komisaris Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan. Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif sejak mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).
2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menindaklajuti keputusan Rapat terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya.

Terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas), susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama dan Komisaris Independen : tuan MULYA EFFENDI SIREGAR
Komisaris Independen : tuan BAMBANG WIDIANTO
Komisaris Independen : tuan DIMAS OKY NUGROHO
Komisaris : tuan DIKDIK YUSTANDI
Komisaris : tuan AGUS SUDIARTO

DIREKSI
Direktur Utama : tuan TONI EKO BOY SUBARI
Direktur Kepatuhan : tuan PUTU RAHWIDHIYASA
Direktur : tuan ACHMAD SYAFII
Direktur : tuan ADE CAHYO NUGROHO
Direktur : tuan KUSMAN YANDI

Status : Terealisasi

Pelaksanaan Rups Tahunan 2018 dan Realisasinya

Tahapan pelaksanaan RUPS Tahunan 2018 tergambar dalam tabel berikut.

Tabel Pelaksanaan RUPS Tahunan 2018

Undangan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Undangan RUPS Tahunan 2018 (Tahun Buku 2017) telah disampaikan kepada para pemegang saham pada tanggal 21 Februari 2018 dengan surat tercatat No. 20/122-3/DIR-CSG.	Dilaksanakan pada hari Senin 12 Maret 2018 bertempat di Ruang Belitung Lantai 2 Plaza Mandiri, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 10110.	Hasil keputusan RUPS Tahunan 2018 (Tahun Buku 2017) telah disampaikan kepada Pemegang Saham serta telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan tanggal 13 Maret 2018 dengan surat No. 20/174-3/DIR-CSG perihal Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 PT Bank Mandiri Syariah tanggal 12 Maret 2018

Rekapitulasi Kehadiran pada Rups Tahunan 2018

RUPS Tahunan 2018 yang dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2018

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama	Hadir
2.	Ramzi Ahmad Zuhdi	Komisaris Independen	Hadir
3.	Bambang Widianto	Komisaris Independen	Hadir
4.	Dikdik Yustandi	Komisaris	Hadir
5.	Toni Eko Boy Subari	Direktur Utama	Hadir
6.	Putu Rahwidhiyasa	Direktur	Hadir
7.	Kusman Yandi	Direktur	Hadir
8.	Edwin Dwidjajanto	Direktur	Hadir
9.	Choirul Anwar	Direktur	Hadir
10.	Ade Cahyo Nugroho	Direktur	Hadir
11.	Achmad Syafii	Direktur	Hadir
12.	Niken Andonowarih	Senior Executive Vice President (SEVP)	Hadir
13.	Rosma Handayani	Senior Executive Vice President (SEVP)	Hadir
14.	K.H Ma'ruf Amin	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Hadir
15.	Mohamad Hidayat	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Hadir
16.	Muhammas Syafi'i Antonio	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Hadir

Keputusan Rups Tahunan 2018 dan Realisasinya

Agenda Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, serta Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas).

Keputusan

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS & Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers*) dengan opini "menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang meterial".
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) sejauh tindakan tersebut bukan merupakan merupakan tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas).

Status : Terealisasi

Agenda Kedua

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas).

Keputusan
Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) sebesar Rp365.166.467.488,- (tiga ratus enam puluh lima miliar seratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan Rupiah), sebagai berikut:
1. Sebesar 27,4% (dua puluh tujuh koma empat persen) dari laba bersih Perseroan ditetapkan sebagai cadangan umum sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).
2. Sebesar 72,6% (tujuh puluh dua koma enam persen) dari laba bersih Perseroan ditetapkan sebagai laba ditahan sebesar Rp265.166.467.488,- (dua ratus enam puluh lima miliar seratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan Rupiah).

Status : Terealisasi

Agenda Ketiga

Persetujuan Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas).

Keputusan
1. Menyetujui penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS & Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers*) sebagai Auditor Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas).
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS & Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers*), karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas).

Status : Terealisasi

Agenda Keempat

Persetujuan Penetapan Gaji Anggota Direksi, Honorarium Anggota Dewan Komisaris, Tantieme serta Penetapan Tunjangan, Fasilitas dan *Benefit* Lainnya bagi Segenap Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Keputusan
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas Perseroan untuk menetapkan:
1. Gaji anggota Direksi dan honorarium Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas *benefit* dan atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas).
2. Tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas).

Status : Terealisasi

Agenda Kelima

Persetujuan Penetapan Honorarium dan Bonus bagi Dewan Pengawas Syariah.

Keputusan
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas Perseroan untuk menetapkan:
1. Honorarium bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas).
2. Bonus bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga satu Desember dua ribu tujuh belas).

Status : Terealisasi

Agenda Keenam

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Keputusan

1. Menyetujui perubahan Pasal 16 ayat 6 butir b Anggaran Dasar Perseroan.

   Dari:
   "Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Wakil Direktur Utama berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan".
   Menjadi:
   a. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal tersebut tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan.
   b. Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang mewakili Perseroan.
   c. Apabil RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal tersebut tidak perlu dibutikan kepada pihak ketiga maka Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan".

2. Menyetujui perubahan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
   Dari:
   "Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai".
   Menjadi:
   "Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat Persetujuan sebelum tahun buku dimulai. Persetujuan Dewan Komisaris dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas".
3. Memberikan Kewenangan dan kuasa kepada Direksi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri, mengenai hasil Agenda Keenam Rapat ini melakukan segala tindakan yang diperlukan, untuk memastikan bahwa perubahan Anggaran Dasar tersebut dapat dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Status : Terealisasi

Agenda Ketujuh

Penetapan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat:
   a. Tuan **BAMBANG WIDIANTO** sebagai Komisaris Independen Perseroan.
   b. Tuan **RAMZI AHMAD ZUHDI** sebagai Komisaris Independen Perseroan.
   c. Tuan Insinyur Haji **EDWIN DWIDJAJANTO** (dalam surat pemegang saham tertulis **EDWIN DWIJAYANTO**) sebagai Direktur Perseroan.
   d. Tuan **KUSMAN YANDI** sebagai Direktur Perseroan, serta
   e. Tuan **CHOIRUL ANWAR** sebagai Diretur Perseroan yang telah berakhir masa jabatnnya sejak pernutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat menjadi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

2. Mengangkat tuan DIMAS OKY NUGROHO, sebagai Komisaris Independen Perseroan tehitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
   – Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK dan Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "OJK") atas penilaian kelayakan dan kepatuhan (*fit and proper test*).

3. Mengangkat kembali:
   a. Tuan **BAMBANG WIDIANTO** sebagai Komisaris Independen Perseroan.
   b. Tuan **KUSMAN YANDI** sebagai Direktur Perseroan.
   c. Tuan **CHOIRUL ANWAR** sebagai Direktur Perseroan.

   Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
   – Penetapan pengangkatan kembali tersebut di atas berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.

4. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menindak lanjuti keputusan Rapat terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya.

Status : Terealisasi

DEWAN KOMISARIS

Sesuai Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Komisaris telah senantiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan independen dengan berpedoman pada Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dengan terlebih dahulu mengikuti tahap *fit and proper test* (uji kepatutan dan kelayakan) sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan Bank melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG) pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.

Dewan Komisaris memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai, sehingga dapat menghadapi permasalahan yang timbul dalam kegiatan usaha Bank, membuat keputusan secara independen, mendorong peningkatan kinerja Bank, serta dapat secara efektif melakukan penelaahan dan memberikan masukan konstruktif terhadap kinerja Direksi.

Dewan Komisaris memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris juga telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Tata Tertib Dewan Komisaris serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris bertugas, antara lain:

1. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Bank yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana kerja, pengembangan Bank, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan atau RPUS Luar Biasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS dan RUPS Luar Biasa secara efektif dan efisien serta terpeliharanya efektivitas komunikasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Pengawas Bank atau Pasar Modal.
3. Menjaga kepentingan Bank dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.
4. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
5. Memberikan pendapat dan saran atas Rencana Bisnis Bank tahunan yang diusulkan Direksi dan mengesahkan sesuai ketentuan pada Anggaran Dasar.
6. Memonitor perkembangan kegiatan Bank.
7. Memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham mengenai masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Bank.
8. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Bank dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
9. Memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya (a) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan (b) suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
10. Mengusulkan kepada RUPS penunjukkan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas pembukuan Bank.
11. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditetapkan oleh RUPS.
12. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi.
13. Wajib membentuk Komite-komite dan memastikan bahwa Komite tersebut telah menjalankan tugasnya secara efektif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
14. Mengkaji dan menyetujui kebijakan-kebijakan yang menurut peraturan perundangan yang berlaku wajib memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki hak dan wewenang, antara lain:

1. Dewan Komisaris berwenang memberikan persetujuan tertulis atas Keputusan Direksi untuk tindakan-tindakan sebagai berikut:
   a. Membeli, menjual, menyewakan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak, termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah serta perusahaan-perusahaan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris.
   b. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan yang melampaui pembatasan nilai rupiah dari waktu ke waktu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa mengambil uang dari rekening pinjaman atau hutang yang telah dibuat tidak dianggap sebagai pinjaman untuk maksud ketentuan ini.
   c. Menggadaikan, menjaminkan atau dengan cara lain mempertanggungjawabkan kekayaan Perseroan yang melampaui pembatasan nilai rupiah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris.
   d. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) yang melampaui pembatasan nilai rupiah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris.

e. Mencatatkan saham-saham Perseroan di Pasar Modal.
f. Tidak menagih lagi, mangalihkan atau melepaskan hak untuk menagih atas piutang pokok macet yang telah dihapusbukukan, dengan ketentuan dari waktu ke waktu RUPS menetapkan jumlah hapus tagih yang dapat dipergunakan, baik untuk hapus tagih piutang pokok macet yang telah dihapus buku maupun hapus tagih atas selisih antara nilai pokok dengan nilai pengalihan atau pelepasan hak atas piutang pokok macet yang telah dihapus buku.

2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Bank dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Tindakan dalam hal sebagaimana tersebut pada ayat 2, harus dijalankan dalam kapasitas sebagai Dewan Komisaris dan wajib dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris tentang tindakan-tindakan tersebut.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas dengan beban Bank.
5. Setiap Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal dari Direksi maupun dari seluruh jajaran di bawahnya dan Direksi wajib memberikan penjelasan.
6. Setiap Komisaris berhak untuk menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Direksi atau unit-unit di bawahanya tanpa ikut memberikan keputusan.
7. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, apabila mereka terbukti bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terbukti melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Bank.
8. Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu.
9. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk memanggil RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya, di mana yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebut alasannnya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Berdasarkan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, Kriteria Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

1. Calon anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan:
   a. integritas;
   b. kompetensi; dan
   c. reputasi keuangan.
2. Calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Regulator Perbankan sebelum bertindak mewakili Bank dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat Bank dan/atau mengambil keputusan penting yang memengaruhi kondisi keuangan Bank.
3. Calon anggota Dewan Komisaris yang belum mendapat persetujuan Regulator Perbankan (dalam hal ini, belum memperoleh predikat Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan) dilarang melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.

Selain itu, sesuai Anggaran Dasar Dewan Komisaris yang dapat diangkat adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum dan sebelum pengangkatannya tidak pernah:

1. Dinyatakan pailit.
2. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjala 5 (lima) tahun atau lebih.
4. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Proses Nominasi dan Pemilihan Dewan Komisaris

Proses nominasi dan pemilihan Dewan Komisaris dilakukan melalui usulan anggota Direksi kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Sebelum dilakukan pembahasan tentang pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dalam RUPS telah disediakan informasi tentang profil calon Dewan Komisaris yang baru maupun yang diangkat kembali. Dewan Komisaris yang telah mendapatkan persetujuan melalui RUPS selanjutnya mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan yang diadakan oleh OJK.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib kerja sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan telah dilakukan pengkinian secara berkala, di mana penyempurnaan yang terakhir yaitu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dewan Komisaris Mandiri Syariah No. KEP.KOM/001/2014 tanggal 24 Desember 2014 mengenai Tata Tertib Dewan Komisaris Mandiri Syariah.

Dengan adanya Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini, diharapkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris akan lebih terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja Dewan Komisaris. Pedoman tersebut mengatur berbagai aspek mengenai Dewan Komisaris antara lain mencakup ketentuan mengenai:

BAB I Ketentuan Umum

BAB II Struktur, Tugas, Kewajiban, Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Struktur Dewan Komisaris
2. Tugas Dewan Komisaris
3. Kewajiban Dewan Komisaris
4. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris
5. Informasi, Kerahasiaan Bank, dan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)

BAB III Lembaga Penunjang

Komite-Komite dan Lembaga Penunjang Lainnya

BAB IV Rapat Dewan Komisaris

1. Jenis dan Kuorum Rapat
2. Peserta Tamu Rapat Dewan Komisaris
3. Pimpinan Rapat
4. Bahan Rapat
5. Keputusan Rapat
6. Risalah Rapat
7. Penyelenggaraan Rapat
8. Sekretaris Dewan Komisaris

BAB V Pembagian Tugas

1. Pembidangan Tugas Rutin
2. Waktu Kerja Komisaris
3. Penandatanganan Dokumen
4. Perjalanan Dinas
5. Pendidikan Berkelanjutan
6. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

BAB VI Perubahan

Bab VII Penutup

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dengan terlebih dahulu mengikuti tahap *fit and proper tes*t (uji kepatutan dan kelayakan) sesuai perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. Dewan Komisaris memiliki keahlian untuk dapat melaksanakan tanggung jawab yang diamanahkan. Dewan Komisaris memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai, sehingga dapat menghadapi permasalahan yang timbul dalam kegiatan usaha Bank, membuat keputusan secara independen, mendorong peningkatan kinerja Bank, serta dapat secara efektif melakukan penelaahan dan memberikan masukan konstruktif terhadap kinerja Direksi.

Selama tahun 2019, Komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana penjelasan berikut.

Komposisi Dewan Komisaris Periode 1 Januari– 15 Januari 2019

Komposisi Dewan Komisaris periode 1 Januari – 15 Januari 2019 sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Komisaris Independen, dan 2 (dua) orang Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Mandiri Syariah. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017	18 September 2017
Bambang Widianto	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 29 Mei 2013	25 Agustus 2014
Dimas Oky Nugroho	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 12 Maret 2018	Masih dalam *fit and proper test*.

Komposisi Dewan Komisaris Periode 15 Januari– 27 Maret 2019

Melalui RUPS Sirkuler tanggal 15 Januari 2019, RUPS memutuskan mengangkat Bapak Dikdik Yustandi sebagai Komisaris Perseroan. Sehingga Komposisi Dewan Komisaris periode 15 Januari – 27 Maret 2019 sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Komisaris Independen, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Mandiri Syariah. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017	18 September 2017
Bambang Widianto	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 29 Mei 2013	25 Agustus 2014
Dimas Oky Nugroho	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 12 Maret 2018	Masih dalam *fit and proper test*.
Dikdik Yustandi	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Sirkuler tanggal 15 Januari 2019	13 Desember 2018

Komposisi Dewan Komisaris Periode 27 Maret 2019 – 15 April 2019

RUPS Tahunan 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2019 memutuskan mengangkat Bapak Agus Sudiarto sebagai Komisaris Perseroan. Sehingga Komposisi Dewan Komisaris periode 27 Maret – 15 April 2019 sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Komisaris Independen, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Mandiri Syariah. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017	18 September 2017
Bambang Widianto	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 29 Mei 2013	25 Agustus 2014
Dimas Oky Nugroho	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 12 Maret 2018	Masih dalam *fit and proper test*.
Dikdik Yustandi	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Sirkuler tanggal 15 Januari 2019	Masih dalam *fit and proper test*.
Agus Sudiarto	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 27 Maret 2019	Masih dalam *fit and proper test*.

Komposisi Dewan Komisaris Periode 15 April – 1 Oktober 2019

Pada RUPS Sirkuler tanggal 15 April 2019, menyetujui pengunduran diri Bapak Dikdik Yustandi dikarenakan beliau diangkat sebagai Direktur Pelaksana di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Dengan demikian, Komposisi Dewan Komisaris periode 15 April – 1 Oktober 2019 sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Komisaris Independen, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Mandiri Syariah. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017	18 September 2017
Bambang Widianto	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 29 Mei 2013	25 Agustus 2014
Dimas Oky Nugroho	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 12 Maret 2018	Masih dalam *fit and proper test*.
Agus Sudiarto	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 27 Maret 2019	Masih dalam *fit and proper test*.

Komposisi Dewan Komisaris Periode 1 Oktober– 14 Oktober 2019

Pada RUPS Sirkuler tanggal 1 Oktober 2019, menyetujui pengunduran diri Bapak Agus Sudiarto dikarenakan beliau diangkat sebagai Direktur di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sehingga komposisi Dewan Komisaris periode 1 Oktober – 14 Oktober 2019 sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Komisaris Independen dan 2 (dua)

orang Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Mandiri Syariah. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017	18 September 2017
Bambang Widianto	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 29 Mei 2013	25 Agustus 2014
Dimas Oky Nugroho	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 12 Maret 2018	Masih dalam *fit and proper test*.

Komposisi Dewan Komisaris Periode 14 Oktober – 31 Desember 2019

Melalui RUPS Sirkuler tanggal 14 Oktober 2019, memutuskan untuk memberhentikan Bapak Dimas Oky Nugroho sebagai Komisaris Independen dan mengangkat Bapak Muhammad Kapitra Ampera sebagai Komisaris Independen Perseroan. Sehingga Komposisi Dewan Komisaris periode 14 Oktober – 31 Desember 2019 sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Mandiri Syariah. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017	18 September 2017
Bambang Widianto	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 29 Mei 2013	25 Agustus 2014
M. Kapitra Ampera	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Sirkuler tanggal 14 Oktober 2019	Masih dalam *fit and proper test*.

Program Orientasi Bagi Komisaris Baru

Dikarenakan latar belakang Anggota Dewan Komisaris yang berbeda-beda, Mandiri Syariah selalu mengadakan Program Pengenalan anggota Dewan Komisaris baru dengan harapan para anggota Dewan Komisaris dapat saling mengenal dan menjalin kerjasama sebagai satu tim yang solid, komprehensif dan efektif sebagai ajang memberikan pengenalan mengenai kondisi Mandiri Syariah secara umum.

Sejalan dengan Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), Program pengenalan Dewan Komisaris meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan *Business Ethics* di Perseroan.
2. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal lain yang tidak diperbolehkan.
3. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan Perseroan, kinerja keuangan, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang Perseroan, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya.
4. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit.

Program orientasi Komisaris Baru di tahun 2019 diselenggarakan melalui rapat-rapat bersama Direksi dan unit-unit yang terkait.

Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Untuk mengefektifkan peran Dewan Komisaris, dilakukan pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan pembagian tugas Direksi. Pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris ditujukan agar pelaksanaan tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris secara teknis pada aspek yang dibidangi dapat berjalan lancar, efektif dan efisien, sesuai tanggung jawab dan wewenang masing-masing sehingga terdapat kejelasan tentang peran anggota Dewan Komisaris, baik secara kolektif maupun individual.

Adapun pembagian fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagai berikut.

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Periode	Bidang Tugas
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama/Komisaris Independen	1 Januari – 31 Desember 2019	– Ketua Komite Audit – Ketua Komite Pemantau Risiko – Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Bambang Widianto	Komisaris Independen	1 Januari – 31 Desember 2019	– Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi – Anggota Komite Audit – Anggota Komite Pemantau Risiko
Dimas Oky Nugroho	Komisaris Independen	1 Januari – 14 Oktober 2019	– Anggota Komite Audit – Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi – Anggota Komite Pemantau Risiko
Dikdik Yustandi	Komisaris	15 Januari– 15 April 2019	– Anggota Komite Audit – Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi – Anggota Komite Pemantau Risiko
Agus Sudiarto	Komisaris	27 Maret – 1 Oktober 2019	– Anggota Komite Audit – Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi – Anggota Komite Pemantau Risiko
M. Kapitra Ampera*	Komisaris Independen	14 Oktober 2019 – 31 Desember 2019	– Anggota Komite Audit – Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi – Anggota Komite Pemantau Risiko

* Saat ini masih dalam proses pengajuan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada OJK.

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Kriteria hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali meliputi:
1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Periode	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris													
			Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan	
			Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	1 Januari – 31 Desember 2019		√		√		√		√		√		√		√
Bambang Widianto	Komisaris Independen	1 Januari – 31 Desember 2019		√		√		√		√		√		√		√
Dimas Oky Nugroho	Komisaris Independen	1 Januari – 14 Oktober 2019		√		√		√		√		√		√		√

Nama	Jabatan	Periode	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris													
			Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan	
			Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Dikdik Yustandi	Komisaris	15 Januari–15 April 2019		√		√		√		√		√		√		√
Agus Sudiarto	Komisaris	27 Maret – 1 Oktober 2019		√		√		√		√		√		√		√
M. Kapitra Ampera*	Komisaris Independen	14 Oktober 2019 – 31 Desember 2019		√		√		√		√		√		√		√

* Saat ini masih dalam proses pengajuan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada OJK

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Bank telah mengatur Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris pada Kebijakan Tata kelola Bab III. Struktur Tata Kelola Perusahaan Artikel 320. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan;
2. Anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga keuangan bukan Bank yang dimiliki oleh Bank;
3. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan yang merupakan pemegang saham Bank;
4. Pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba; atau
5. Perangkapan jabatan Dewan Komisaris lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu.

Setiap anggota Dewan Komisaris tidak ada yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan rangkap jabatan. Rangkap Jabatan oleh anggota Dewan Komisaris saat ini masih diperbolehkan oleh ketentuan rangkap jabatan. Rangkap jabatan yang dimiliki Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Periode	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	1 Januari – 31 Desember 2019	Direktur Bidang I	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
Bambang Widianto	Komisaris Independen	1 Januari – 31 Desember 2019	Anggota Tim Ahli	Wakil Presiden Republik Indonesia
Dimas Oky Nugroho	Komisaris Independen	1 Januari – 14 Oktober 2019	-	-
Dikdik Yustandi	Komisaris	15 Januari– 15 April 2019	SEVP Large Corporate	Bank Mandiri
Agus Sudiarto	Komisaris	27 Maret – 1 Oktober 2019	SEVP Special Asset Management	Bank Mandiri
M. Kapitra Ampera*	Komisaris Independen	14 Oktober 2019 – 31 Desember 2019	Staf Khusus	Kepala Badan Intelejen Negara (BIN)

* Saat ini masih dalam proses pengajuan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada OJK.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

1. Setiap Komisaris berkewajiban menjaga dan melindungi segala informasi yang menjadi kerahasiaan Bank dan tidak mengungkapkannya kepada pihak ketiga tanpa kuasa dari Dewan Komisaris, demikian pula hasil kebijakan/keputusan rapat Internal Dewan Komisaris dan Komite di bawah Dewan Komisaris dan hal-hal lain yang patut dirahasiakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Atas informasi-informasi yang di maksud, selama belum ditetapkan sebagai informasi/fakta yang terbuka atau selama belum diumumkan oleh Dewan Komisaris, semua pihak yang terlibat wajib untuk merahasiakan informasi tersebut.
3. Setiap Komisaris dilarang menggunakan informasi Bank untuk kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Setiap Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional atau melakukan intervensi terhadap transaksi-transaksi operasional perbankan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
5. Setiap Komisaris dilarang menjadi sponsor rekanan bank, calon nasabah, atau nasabah bank yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
6. Setiap Komisaris dilarang merekomendasikan seseorang untuk menjadi pejabat bank, di luar ketentuan atau peraturan yang berlaku.
7. Setiap Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok usahanya dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kewajiban di bidang perbankan.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Dewan komisaris telah mengungkapkan kepemilikan saham baik pada Mandiri Syariah maupun perusahaan lainnya. Untuk kepemilikan saham sampai dengan 31 Desember 2019 Dewan Komisaris tidak memiliki saham dengan jumlah kepemilikan mencapai 5% atau lebih, baik pada Bank maupun Perusahaan lainnya.

Nama	Jabatan	Periode	Saham Pada Mandiri Syariah	Saham Pada Perusahaan Lain
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama/Komisaris Independen	1 Januari – 31 Desember 2019	Nihil	Nihil
Bambang Widianto	Komisaris Independen	1 Januari – 31 Desember 2019	Nihil	Nihil
Dimas Oky Nugroho	Komisaris Independen	1 Januari – 14 Oktober 2019	Nihil	Nihil
Dikdik Yustandi	Komisaris	15 Januari– 15 April 2019	Nihil	Nihil
Agus Sudiarto	Komisaris	27 Maret – 1 Oktober 2019	Nihil	Nihil
M. Kapitra Ampera*	Komisaris Independen	14 Oktober 2019 – 31 Desember 2019	Nihil	Nihil

* Saat ini masih dalam proses pengajuan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada OJK.

Komisaris Independen

Komposisi Dewan Komisaris Mandiri Syariah Per 31 Desember 2019 berjumlah 3 (tiga) orang anggota dengan semua anggota Dewan Komisaris sebagai Komisaris Independen yang berarti bahwa 100% (seratus persen) dari Komisaris yang ada. Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mengatur bahwa paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 kriteria tentang Komisaris Independen yang juga digunakan Perseroan adalah sebagai berikut:

Kriteria Komisaris Independen	Komisaris Independen			
	Mulya Effendi Siregar	Bambang Widianto	Dimas Oky Nugroho	M. Kapitra Ampera*
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.	√	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupung tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan	√	√	√	√

* Saat ini masih dalam proses pengajuan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada OJK.

Pernyataan Komisaris Independen

Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris berfungsi sebagai forum bagi para anggota untuk mengambil keputusan secara kolektif. Rapat ini juga dapat berfungsi sebagai suatu mekanisme untuk membahas pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kinerja Direksi dalam menangani perusahaan. Seluruh keputusan dalam rapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapat musyawarah untuk mufakat, maka keputusan rapat diambil dengan suara terbanyak Dalam penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris,maka dibuat Risalah Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan diketahui oleh Dewan komisaris yang berhalangan hadir. Dewan Komisaris berkomitmen untuk proaktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan Bank, baik pada proses perumusan rencana strategis, penyusunan dan implementasi rencana bisnis, pemantauan kinerja, penerapan manajemen risiko, *Good Corporate Governance*, Sistem Pengendalian Internal dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Rapat-rapat yang diselenggarakan antara lain Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (Rakomdir), Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (Ragab), dan Rapat Komite-Komite. Sepanjang tahun 2019, pelaksanaan rapat-rapat tersebut dilakukan sebanyak 88 (delapan puluh delapan) kali atau sebesar >100% jika dibandingkan kewajiban penyelenggaraan rapat dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah. Adapun pembahasan rapat antara lain mengenai evaluasi berkala terhadap realisasi pencapaian target RBB Tahun 2019, pembahasan terkait isu-isu yang berkembang, tantangan yang dihadapi, strategi/*action plan* yang akan dilakukan, dan sebagainya.

1. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi (Rakomdir)
   Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi atau Direktur Bidang, dengan agenda realisasi pencapaian rencana bisnis bank bulanan, *issue-issue* terkini Bank, inisiatif strategis Bank seperti *corporate plan, core banking system,* dan lainnya.
2. Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (Ragab)
   Rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dengan agenda kinerja Bank, *issue-issue* terkini Bank, inisiatif strategis Bank, kepatuhan pelaksanaan prinsip syariah pada kegiatan usaha Bank, dsb.
3. Rapat Komite-Komite
   Rapat yang dilaksanakan Komite-Komite (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi) sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing guna mendukung Dewan Komisaris untuk melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Dewan Komisaris

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2019, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Dewan Komisaris

No	Tanggal	Agenda	Peserta	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
1.	24 Januari 2019	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 31 Desember 2019	Mulya E. Siregar	Hadir	
			Bambang Widianto	Hadir	
			Agus Sudiarto	Hadir	
			Dimas Oky Nugroho	Tidak Hadir	Dinas
2.	14 Februari 2019	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 31 Januari 2019	Mulya E. Siregar	Hadir	
			Bambang Widianto	Hadir	
			Dikdik Yustandi	Hadir	
			Dimas Oky Nugroho	Tidak Hadir	Dinas
3.	21 Maret 2019	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 28 Februari 2019	Mulya E. Siregar	Hadir	
			Bambang Widianto	Hadir	
			Dikdik Yustandi	Hadir	
			Dimas Oky Nugroho	Tidak Hadir	Dinas

No	Tanggal	Agenda	Peserta	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
4.	24 April 2019	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 31 Maret 2019	Mulya E. Siregar	Hadir	
			Bambang Widianto	Hadir	
			Dikdik Yustandi	Tidak Hadir	Dinas
			Dimas Oky Nugroho	Hadir	
5.	24 April 2019	Perubahan Susunan Keanggotaan Komite-Komite Penunjang Dewan Komaris	Mulya E. Siregar	Hadir	
			Bambang Widianto	Hadir	
			Dimas Oky Nugroho	Hadir	
			Agus Sudiarto	Hadir	
6.	16 Mei 2019	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 30 April 2019	Mulya E. Siregar	Hadir	
			Bambang Widianto	Tidak Hadir	Dinas
			Dimas Oky Nugroho	Hadir	
			Agus Sudiarto	Hadir	
7.	26 Juni 2019	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 31 Mei 2019 dan Revisi RBB tahun 2019	Mulya E. Siregar	Hadir	
			Bambang Widianto	Tidak Hadir	Dinas
			Dimas Oky Nugroho	Tidak Hadir	Dinas
			Agus Sudiarto	Hadir	
8.	18 Juli 2019	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 30 Juni 2019	Mulya E. Siregar	Hadir	
			Bambang Widianto	Hadir	
			Dimas Oky Nugroho	Hadir	
			Agus Sudiarto	Hadir	
9.	15 Agustus 2019	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 30 Juli 2019	Mulya E. Siregar	Hadir	
			Bambang Widianto	Hadir	
			Dimas Oky Nugroho	Tidak Hadir	Dinas
			Agus Sudiarto	Tidak Hadir	Dinas
10.	19 September 2019	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 31 Agustus 2019	Mulya E. Siregar	Hadir	
			Bambang Widianto	Hadir	
			Dimas Oky Nugroho	Tidak Hadir	Dinas
			Agus Sudiarto	Tidak Hadir	Dinas
11.	16 Oktober 2019	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 30 September 2019	Mulya E. Siregar	Hadir	
			Bambang Widianto	Hadir	
12.	13 November 2019	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 31 Oktober 2019 & RKAP tahun 2020-2022	Mulya E. Siregar	Hadir	
			Bambang Widianto	Hadir	
			M. Kapitra Ampera	Hadir	
13.	19 Desember 2019	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 30 November 2019 dan Proyeksi Kinerja s.d 31 Desember 2019	Mulya E. Siregar	Hadir	
			Bambang Widianto	Hadir	
			3. M. Kapitra Ampera	Hadir	
14.	19 Desember 2019	Perubahan Susunan Keanggotan Komite-Komite Penunjangan Dewan Komisaris	Mulya E. Siregar	Hadir	
			Bambang Widianto	Hadir	
			M. Kapitra Ampera	Hadir	

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2019, agenda, tanggal dan peserta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris deng an Direksi

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Kehadiran	Keterangan	Peserta Rapat Direksi	Kehadiran	Keterangan
1.	24 Januari 2019	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 31 Desember 2019	Mulya Effendi Siregar	Hadir		Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Bambang Widianto	Hadir		Achmad Syafii	Hadir	
			Dimas Oky Nugroho	Tidak Hadir	Izin	Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Dikdik Yustandi	Tidak Hadir	Izin	Kusman Yandi	Tidak Hadir	Dinas Luar
						Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
2.	14 Februari 2019	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 31 Januari 2019	Mulya Effendi Siregar	Hadir		Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Bambang Widianto	Hadir		Achmad Syafii	Tidak Hadir	Dinas Luar
			Dimas Oky Nugroho	Tidak Hadir	Izin	Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Dikdik Yustandi	Tidak Hadir	Izin	Kusman Yandi	Tidak Hadir	Cuti
						Ade Cahyo Nugroho	Tidak Hadir	Dinas Luar
3.	21 Maret 2019	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 28 Februari 2019	Mulya Effendi Siregar	Hadir		Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Bambang Widianto	Hadir		Achmad Syafii	Hadir	
			Dimas Oky Nugroho	Tidak Hadir	Izin	Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Dikdik Yustandi	Hadir		Kusman Yandi	Hadir	
						Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
4.	24 April 2019	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 31 Maret 2019	Mulya Effendi Siregar	Hadir		Toni Eko Boy Subari	Tidak Hadir	Cuti Umroh
			Bambang Widianto	Hadir		Achmad Syafii	Hadir	
			Dimas Oky Nugroho	Tidak Hadir	Izin	Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Dikdik Yustandi	Tidak Hadir	Izin	Kusman Yandi	Hadir	
			Agus Sudiarto	Hadir		Ade Cahyo Nugroho	Tidak Hadir	Dinas Luar
5.	16 Mei 2019	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 30 April 2019	Mulya Effendi Siregar	Hadir		Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Bambang Widianto	Tidak Hadir	Izin	Achmad Syafii	Hadir	
			Dimas Oky Nugroho	Hadir		Putu Rahwidhiyasa	Tidak Hadir	Dinas Luar
			Agus Sudiarto	Hadir		Kusman Yandi	Hadir	
						Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
6.	29 Mei 2019	Perubahan Struktur Organisasi PT Bank Syariah Mandiri	Mulya Effendi Siregar	Hadir		Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Bambang Widianto	Hadir		Achmad Syafii	Hadir	
			Dimas Oky Nugroho	Hadir		Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Agus Sudiarto	Hadir		Kusman Yandi	Hadir	
						Ade Cahyo Nugroho	Hadir	

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Kehadiran	Keterangan	Peserta Rapat Direksi	Kehadiran	Keterangan
7.	26 Juni 2019	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 31 Mei 2019 dan Revisi RBB Tahun 2019	Mulya Effendi Siregar	Hadir		Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Bambang Widianto	Hadir		Achmad Syafii	Hadir	
			Dimas Oky Nugroho	Hadir		Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Agus Sudiarto	Hadir		Achmad Syafii	Hadir	
						Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
8.	18 Juli 2019	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 31 Mei 2019	Mulya Effendi Siregar	Hadir		Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Bambang Widianto	Hadir		Achmad Syafii	Hadir	
			Dimas Oky Nugroho	Tidak Hadir	Izin	Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Agus Sudiarto	Hadir		Kusman Yandi	Tidak Hadir	Dinas Luar
						Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
9.	15 September 2019	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 30 Juli 2019	Mulya Effendi Siregar	Hadir		Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Bambang Widianto	Hadir		Achmad Syafii	Hadir	
			Dimas Oky Nugroho	Tidak Hadir	Izin	Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Agus Sudiarto	Hadir		Kusman Yandi	Hadir	
						Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
10.	19 September 2019	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 30 Juli 2019	Mulya Effendi Siregar	Hadir		Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Bambang Widianto	Hadir		Achmad Syafii	Hadir	
			Dimas Oky Nugroho	Tidak Hadir	Izin	Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Agus Sudiarto	Tidak Hadir	Izin	Kusman Yandi	Hadir	
						Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
11.	16 Oktober 2019	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 30 September 2019	Mulya Effendi Siregar	Hadir		Toni Eko Boy Subari	Hadir	
						Achmad Syafii	Hadir	
			Bambang Widianto	Hadir		Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
						Kusman Yandi	Hadir	
			M. Kapitra Ampera	Tidak Hadir	Izin	Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
						Rosma Handayani	Hadir	

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Kehadiran	Keterangan	Peserta Rapat Direksi	Kehadiran	Keterangan
12.	13 November 2019	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 30 September 2019 dan RKAP Tahun 2020-2022	Mulya Effendi Siregar	Hadir		Toni Eko Boy Subari	Hadir	
						Achmad Syafii	Hadir	
			Bambang Widianto	Hadir		Putu Rahwidhiyasa	Tidak Hadir	Dinas Luar
						Kusman Yandi	Hadir	
			M. Kapitra Ampera	Hadir		Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
						Rosma Handayani	Hadir	
13.	19 Desember 2019	Evaluasi Kinerja Mandiri Syariah periode 30 November 2019 dan Proyeksi Kinerja s.d. 31 Desember 2019	Mulya Effendi Siregar	Hadir		Toni Eko Boy Subari	Hadir	
						Achmad Syafii	Hadir	
			Bambang Widianto	Hadir		Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
						Kusman Yandi	Hadir	
			M. Kapitra Ampera	Hadir		Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
						Rosma Handayani	Hadir	

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2019, agenda, tanggal dan peserta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Dewan Pengawas Syariah dan Direksi

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Kehadiran	Keterangan	Peserta Rapat DPS	Kehadiran	Keterangan
1.	28 November 2019	*Update* Kinerja Mandiri Syariah dan Lain-Lain.	Mulya Effendi Siregar	Hadir		Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Hadir	
			Bambang Widianto	Hadir		Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir	
			M. Kapitra Ampera	Hadir		Dra. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH, MA	Hadir	

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah mengikuti rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 14 (empat belas) kali, rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi 13 (tiga belas) kali serta 1 (satu) kali rapat bersama Dewan Pengawas Syariah. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat masing-masing Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Periode	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi		
			Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran		
			Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	1 Januari – 31 Desember 2019	14	14	100%	14	14	100%
Bambang Widianto	Komisaris Independen	1 Januari – 31 Desember 2019	14	12	86%	14	12	86%
Dimas Oky Nugroho	Komisaris Independen	1 Januari – 14 Oktober 2019	10	3	30%	10	2	20%
Dikdik Yustandi	Komisaris	15 Januari– 15 April 2019	3	3	100%	3	1	10%
Agus Sudiarto	Komisaris	27 Maret – 1 Oktober 2019	7	5	71%	7	2	29%
M. Kapitra Ampera*	Komisaris Independen	14 Oktober 2019 – 31 Desember 2019	3	3	100%	3	3	100%

* Saat ini masih dalam proses pengajuan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada OJK.

Sertifikasi Manajemen Risiko

Dewan Komisaris yang telah lulus sertifikasi manajemen risiko sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Periode	Sertifikasi Manajemen RIsiko
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama/Komisaris Independen	1 Januari – 31 Desember 2019	a. USMR Level 5, BSMR, 6 Oktober 2016 b. *Refreshment*, BSMR, 1 Juli 2014 c. USMR Program Eksekutif Direksi, BSMR, 30 November 2007
Bambang Widianto	Komisaris Independen	1 Januari – 31 Desember 2019	a. *Refreshment* Level 2, BARA, 24 Maret 2017 b. USMR Level 2, LSPP, 21 Desember 2013 c. USMR Level 1, LSPP, 14 Desember 2013
Dimas Oky Nugroho	Komisaris Independen	1 Januari – 14 Oktober 2019	a. Sertifikasi Perbankan Syariah b. Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko.
Dikdik Yustandi	Komisaris	15 Januari– 15 April 2019	a. *Refreshment* USMR Level 4, Mandiri University, 23 September 2016 b. *Refreshment* USMR Level 4, BARA, 28 Februari 2014 c. USMR Level 4, LSPP, 28 Juli 2012 d. USMR Level 1, BSMR, 18 Februari 2006
Agus Sudiarto	Komisaris	27 Maret – 1 Oktober 2019	Sertifikasi Manajemen Risiko Level V
M. Kapitra Ampera*	Komisaris Independen	14 Oktober 2019 – 31 Desember 2019	a. *Risk Management Competency for Banking Profession*, Level 1 b. *Risk Management Competency for Banking Profession*, Level 2 c. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 d. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 e. Sertifikasi Perbankan Syariah

* Saat ini masih dalam proses pengajuan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada OJK.

Keputusan, Rekomendasi, dan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Keputusan Dewan Komisaris

Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2019, antara lain:

1. Persetujuan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Revisi RBB Tahun 2019-2021.
2. Persetujuan Honorarium Jasa Audit Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri Tahun Buku 2019.
3. Persetujuan Pengangkatan Anggota Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris.
4. Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi.
5. Persetujuan Pemberian Pembiayaan Kepada Penjabat Terkait Bank.

Rekomendasi dan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

1. Laporan Kinerja Mandiri Syariah.
   Pada tahun 2019, Mandiri Syariah fokus pertumbuhan yang sehat dan berkualitas serta penguatan berbagai aspek antara lain *business refocusing (first core: consumer, the second core: corporate, low cost fund, wealth management, transaction banking, dan digital ecosystem), fixing the fundamental* (*lean organization* & KPI, *digitalization business process,* dan *marketing communication*), dan *strengthening enablers* (aliansi wholesale & retail, *people (capability & productivity)*, *cost efficiency*, dan sinergi Mandiri *Group*).
   Mandiri Syariah menghadapi tantangan yang cukup *challenging* baik dari internal maupun eksternal. Tantangan dari sisi internal antara lain yaitu perbaikan kualitas portofolio pembiayaan, penguatan proses bisnis, pertumbuhan pembiayaan yang sehat dan *sustain*, pemenuhan kapabilitas dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta implementasi budaya perusahaan, pengembangan proyek Teknologi Informasi (termasuk *digital banking*), peningkatan pemahaman ketentuan dan penguatan *internal control* (1st, 2nd, and 3rd *lines of defense*) untuk memitigasi risiko kepatuhan dan menciptakan *zero fraud*, dan lainnya.
   Memperhatikan tantangan sebagaimana di maksud di atas dan memastikan pertumbuhan dapat terealisasi sesuai target RBB tahun 2019 serta dilakukan secara *prudent* dan *sustainable,* Dewan Komisaris secara aktif memberikan saran kepada Direksi dan SEVP agar, antara lain sebagai berikut:
   a. Memastikan strategi pertumbuhan bisnis dilakukan, antara lain dengan:
      1) Mengembangkan dan/atau menerbitkan produk-produk yang khas syariah dengan optimalisasi akad-akad syariah.
      2) Memastikan organisasi bersifat *agile* dan proses bisnis penyaluran pembiayaan agar lebih kompetitif dalam persaingan pasar.
      3) Memastikan sinergi 3 (tiga) pilar unit kerja penyalur pembiayaan (unit bisnis, unit *financing risk*, dan unit *financing operation*) terjalin dengan sangat kuat dengan memperhatikan independensi masing-masing unit kerja sehingga mampu tumbuh sesuai target yang ditetapkan dan berkualitas.
      4) Menetapkan fokus pertumbuhan *retail banking* melalui produk-produk prioritas (tabungan dan giro, pembiayaan *consumer*, dan lainnya).
      5) Menyalurkan pembiayaan segmen *wholesale banking* dengan fokus kepada *targeted market dan targeted customer* baik dilakukan oleh Mandiri Syariah maupun melalui kerja sama (sinergi) dengan Perusahaan Induk, antara lain *project-project* BUMN dan Pemerintah (seperti infrastruktur, dsb.) dan *Islamic Sector Solution* (seperti rumah sakit Islam, universitas Islam, Umroh, dan lainnya), namun tetap menganalisa potensi bisnis pada sektor lainnya untuk melakukan diversifikasi dan memitigasi terjadinya *concentration risk*.
      6) Melakukan *monitoring* secara intensif terhadap kinerja nasabah-nasabah pembiayaan khususnya nasabah kategori *wacthlist* dan kolektibilitas 2.
      7) Meningkatkan pertumbuhan *fee based income*, melalui peningkatan bisnis gadai emas, jual beli mata uang (dalam hal ini. Saudi Arabia Riyal/ SAR), peningkatan transaksi pada *electronic banking, cash management*, dan lainnya.
      8) Meningkatkan *recovery* atas nasabah-nasabah bermasalah (*non performing financing*/NPF dan *write off*/WO*).*
      9) Memastikan terwujudnya Mandiri Syariah sebagai *custodian bank*.
   b. Memastikan kematangan dan kesiapan infrastruktur Mandiri Syariah, antara lain:
      1) Memenuhi kapabilitas sumber daya manusia yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan terus mencetak calon *leader* Mandiri Syariah masa yang akan datang dari lingkungan internal Mandiri Syariah.
      2) Menciptakan proses bisnis yang *simple*, cepat, dan bersaing, namun tetap memperhatikan aspek *prudential banking* dan *sharia compliance*;
      3) Memastikan proyek-proyek teknologi informasi diselesaikan sesuai *timeline* yang telah ditetapkan dan secara cepat melakukan pengembangan layanan *digital banking*.
      4) Mengembangkan dan menginternalisasikan *corporate culture* kepada seluruh jajaran pegawai.
2. Teknologi Informasi (TI)
   Dewan Komisaris menyadari bahwa teknologi informasi merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung terselenggaranya seluruh kegiatan usaha Mandiri Syariah. Oleh karena itu, Dewan Komisaris secara berkala (triwulanan) melakukan rapat dengan Direksi guna memonitor progres penyelesaian *project-project* pengembangan TI (termasuk pengembangan *digital*

banking) dan meminta kepada Direksi, antara lain untuk memastikan seluruh inisiatif strategis *project* IT tahun 2019 selesai dilaksanakan sesuai *timeline* yang telah ditetapkan, menetapkan *project charter* untuk setiap *project*, mengoptimalisasi *project committee* sampai dengan level Direksi.

3. Sinergi Mandiri *Group*.
   Dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis Mandiri Syariah, Dewan Komisaris telah meminta Direksi dan SEVP untuk mengoptimalkan kekuatan dan keunggulan yang dimiliki Bank Mandiri dan anak perusahaannya (Mandiri *Group),* yaitu dengan melaksanakan sinergi. Dewan Komisaris juga meminta Direksi dan SEVP agar sinergi dengan Mandiri *Group* dilakukan dalam aspek yang lebih luas antara lain pertumbuhan bisnis, pengembangan SDM (dengan tetap mengedepankan perkembangan karir pegawai yang berasal dari internal Mandiri Syariah), pengembangan teknologi informasi, dan lainnya. Dewan Komisaris secara intensif melakukan pengawasan dan pemberian nasihat agar pelaksanaan inisiatif strategis sinergi dengan Mandiri *Group* dapat terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan.

4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
   Dewan Komisaris *concern* terhadap pengelolaan SDM sebagai faktor yang sangat penting dalam mengembangkan perusahaan sesuai *corporate plan* Mandiri Syariah. Oleh karena itu, Dewan Komisaris meminta kepada Direksi dan SEVP untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran pengembangan SDM yang meliputi pendidikan dan pelatihan sebesar 5% dari biaya tenaga kerja guna meningkatkan kapabilitas SDM dan mempersiapkan calon *leader* Mandiri Syariah masa depan dari lingkungan internal Mandiri Syariah, meningkatkan efisiensi dan produktivitas pegawai, melakukan rotasi dan mutasi, memberikan *reward* dan *punishment* yang cepat dan tepat, dan lainnya.

5. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.
   Dewan Komisaris *concern* terhadap kepatuhan Mandiri Syariah terhadap implementasi prinsip-prinsip syariah, antara lain dengan meminta Direksi dan SEVP agar memastikan penggunaan akad-akad telah sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, Dewan Komisaris juga meminta Direksi dan SEVP agar meningkatkan penyaluran pembiayaan yang menggunakan skema akad-akad selain murabahah, melakukan komunikasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menciptakan terobosan/ inovasi produk dan aktivitas baru yang unik dan khas syariah, serta memastikan produk dan aktivitas baru Mandiri Syariah mendapatkan opini syariah terlebih dahulu sebelum diimplementasikan.

6. Laporan Kinerja Kepatuhan.
   Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan *monitoring* secara berkala terhadap fungsi kepatuhan Mandiri Syariah antara Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan *monitoring* secara berkala terhadap fungsi kepatuhan Mandiri Syariah antara lain melalui penyelenggaraan rapat dan laporan kepatuhan yang disampaikan unit kerja kepatuhan. Dewan Komisaris memberikan saran kepada Direksi dan SEVP agar meningkatkan kapabilitas jajaran pegawai Mandiri Syariah serta meningkatkan fungsi kontrol yang kuat sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan *Regulator (zero tolerance)*, memastikan dilakukan pengkinian terhadap ketentuan-ketentuan internal Mandiri Syariah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh *Regulator* dan/atau Pemerintah, melakukan otomasi dan/atau menetapkan *workflow* disertai pengendalian intern yang kuat terkait kewajiban penyampaian laporan Mandiri Syariah khususnya kepada *Regulator* guna memastikan laporan yang disampaikan benar, valid, dan tepat waktu.

7. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG).
   Dewan Komisaris senantiasa memberikan saran kepada Direksi dan SEVP untuk terus melakukan evaluasi dan penguatan terhadap praktek-praktek GCG dalam menjalankan kegiatan usaha Mandiri Syariah, sehingga diharapkan Mandiri Syariah dapat tumbuh secara cepat, sehat, dan *sustainable.* Dewan Komisaris juga *concern* terhadap pelaksanaan *fit and proper test* oleh OJK terhadap 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang Direktur, serta persetujuan OJK terhadap 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas Syariah, sehingga diharapkan dapat segera efektif melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
   Berdasarkan *self assessment* terhadap implementasi GCG Mandiri Syariah per 31 Desember 2019 berada pada peringkat 1. Hal ini tercermin dari penerapan prinsip-prinsip GCG yang sangat memadai.

8. *Sustainable Finance* (SF)
   Dalam rangka mengimplementasikan POJK No.51/ POJK.3/2017 dan Pedoman Teknis mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Dewan Komisaris meminta kepada Direksi dan SEVP agar menjadikan SF sebagai pedoman dalam menyalurkan pembiayaan mengingat 3Ps (*Planet, People*, dan *Profit*) yang merupakan Pilar SF dari *sustainable development goals* (SDGs) *in line* dengan *Maqashid Sharia* yang merupakan ruh Perbankan Syariah.

9. Pemenuhan Komitmen Hasil Pemeriksaan OJK dan *Auditor* Ekstern Lainnya.
   Dalam rangka penguatan sistem pengendalian intern

Mandiri Syariah, Dewan Komisaris memberikan saran kepada Direksi untuk menganalisa *rootcause* kelemahan-kelemahan yang terjadi, melakukan perbaikan secara cepat dan sistematis, meningkatkan implementasi sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh unit-unit yang termasuk *lines of defense* dan menguatkan implementasi strategi anti *fraud*.
Dewan Komisaris secara berkala dan intensif melakukan rapat dengan Direksi dan SEVP guna membahas mengenai progres penyelesaian temuan hasil pemeriksaan *external auditor* Mandiri Syariah.

10. *Milestones* Pencapaian Mandiri Syariah
    Selama tahun 2019, terdapat *milestones* yang telah dicapai Mandiri Syariah untuk dapat tumbuh berkembang secara sehat dan *sustainable.*

11. Tingkat Kesehatan Mandiri Syariah
    Dalam rangka meningkatkan kinerja Mandiri Syariah dan memitigasi risiko, Dewan Komisaris telah meminta Direksi untuk segera melakukan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, meningkatkan penyaluran pembiayaan segmen *retail banking* dan menetapkan fokus penyaluran pembiayaan segmen *wholesale banking* kepada *targeted market dan targeted customer* baik dilakukan oleh Mandiri Syariah maupun melalui kerja sama dengan Perusahaan Induk.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Berdasarkan RUPS

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui *self assessment* atas kinerja Dewan Komisaris dan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh RUPS.

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Prosedur penilaian kinerja Dewan Komisaris yang dilaksanakan melalui RUPS adalah sebagai berikut:
1. Dewan Komisaris menyampaikan laporan kinerja Dewan Komisaris untuk dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS.
2. Kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan indicator yang telah ditetapkan yang sesuai dengan tugas serta kewajiban Dewan Komisaris.
3. Hasil evaluasi kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris secara *self assessment* menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Dewan Komisaris.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Kriteria evaluasi yang digunakan untuk menilai kinerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

No.	Indikator	Bobot Penilaian
1	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.	12,5%
2	Dewan Komisaris melaksanakan peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan melalui keikutsertaan dalam seminar/pelatihan yang sesuai dengan bidang tugasnya minimal 1 (satu) kali dalam setahun.	12,5%
3	Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kinerja Mandiri Syariah terhadap pencapaian rencana bisnis bank.	12,5%
4	Dewan Komisaris menyusun dan menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank kepada Regulator secara berkala 2 (dua) kali dalam setahun.	12,5%
5	Dewan Komisaris me-review, mengevaluasi, dan memberikan persetujuan terhadap hal-hal yang wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Mandiri Syariah, antara lain: a. Rencana Bisnis Bank (RBB) b. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Mandiri Syariah dengan terlebih dahulu meminta persetujuan RUPS. c. Pemberian pembiayaan kepada Pihak Terkait. d. Perubahan Struktur Organisasi Mandiri Syariah.	12,5%
6	Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya prinsip dan praktik Good Corporate Governance pada seluruh jenjang organisasi.	12,5%
7	Dewan Komisaris memastikan tingkat kesehatan Bank memiliki predikat komposit 2 (memadai).	12,5%
8	Dewan Komisaris memastikan Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi) telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	12,5%

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2019 secara mandiri (*self assessment*).

HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

No.	Indikator	Bobot Penilaian	Pencapaian
1	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.	12,5%	100%
2	Dewan Komisaris melaksanakan peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan melalui keikutsertaan dalam seminar/pelatihan yang sesuai dengan bidang tugasnya minimal 1 (satu) kali dalam setahun.	12,5%	100%
3	Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kinerja Mandiri Syariah terhadap pencapaian rencana bisnis bank.	12,5%	100%
4	Dewan Komisaris menyusun dan menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank kepada *Regulator* secara berkala 2 (dua) kali dalam setahun.	12,5%	100%
5	Dewan Komisaris me-*review*, mengevaluasi, dan memberikan persetujuan terhadap hal-hal yang wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Mandiri Syariah, antara lain: a. Rencana Bisnis Bank (RBB) b. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Mandiri Syariah dengan terlebih dahulu meminta persetujuan RUPS. c. Pemberian pembiayaan kepada Pihak Terkait. d. Perubahan Struktur Organisasi Mandiri Syariah.	12,5%	100%
6	Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya prinsip dan praktik *good corporate governance* pada seluruh jenjang organisasi.	12,5%	100%
7	Dewan Komisaris memastikan tingkat kesehatan Bank memiliki predikat komposit 2 (memadai).	12,5%	100%
8	Dewan Komisaris memastikan Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi) telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	12,5%	100%

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Melalui *Self Assessment* GCG Sesuai Ketentuan OJK

Penilaian kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan melalui *Self Assesment* GCG yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Pelaksanaan *Self Assessment* GCG ini dilaksanakan secara periodik setiap semester yang dilaporkan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan.

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Pelaksanaan *assessment* kinerja Dewan Komisaris termasuk di dalam pelaksanaan *self assessment* GCG Bank yang dilakukan secara berkala setiap semester.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Kriteria *Self Assessment* Dewan Komisaris terkait pelaksanaan GCG dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*. *Governance structure* terdiri dari 14 (empat belas) indikator, *Governance Process* terdiri dari 17 (tujuh belas) indikator sedangkan *governance outcome* terdiri dari 6 (enam) indikator.

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Pihak yang melakukan *Self Assessment* GCG adalah Direksi dan Dewan Komisaris yang harus mendapatkan persetujuan dan pengawasan dari OJK.

HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Hasil penilaian *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2019 Mandiri Syariah, untuk aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris mendapat peringkat 1.

Penilaian Kinerja Komite Di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Dalam rangka meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah membentuk 3 (tiga) komite yaitu:
1. Komite Audit
2. Komite Remunerasi dan Nominasi
3. Komite Pemantau Risiko

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Bank, terutama dalam menjalankan tugas dan

fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal (*Internal Control System*), serta efektivitas pemeriksaan oleh internal dan auditor eksternal. Sepanjang tahun 2019, Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Kajian atas Hasil Penelaahan Realisasi Audit *Top Letters* Internal Audit Group.
2. *Review* Usulan Penunjukkan Kembali Kantor Akuntan Publik Tanuredja, Wibisono, Rintis & Rekan untuk Melakukan Audit Laporan KeuanganTahunan Mandiri Syariah Tahun Buku 2019.
3. Hasil Penelaahan atas Laporan Keuangan Publikasi Mandiri Syariah.
4. *Review* atas Nilai Rasio PDN pada Laporan Pos-Pos Tertentu Mandiri Syariah.

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2019, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Pengusulan Remunerasi Pengurus Perseroan.
2. Usulan Perubahan Pengurus Mandiri Syariah.
3. Menindaklanjuti temuan OJK serta Implementasi Material Risk Taker (MRT).

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab jawab melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait manajemen risiko Bank. Sepanjang tahun 2019, Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 40 (empat puluh) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Kajian (*Review*) atas Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Mandiri Syariah (*Risk Based Bank Rating*).
2. *Review draft* RKAP 2020 dan RBB 2020-2022.
3. *Review* Implementasi Jasa Kustodial Mandiri Syariah

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar Mandiri Syariah, Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekuranganya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

1. Jangka waktu jabatannya berakhir.
2. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
3. Mengundurkan diri.
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
5. Meninggal dunia.
6. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai badan independen yang direkomendasikan DSN-MUI yang berada di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), bertugas mengawasi agar produk dan jasa yang ditawarkan serta kegiatan operasional berjalan sesuai dengan ketentuan syariah serta memastikan implementasi pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional di Lembaga Keuangan Syariah.

Dalam hal pelaksanaan tugas pengawasan, DPS bekerja sama dengan Satuan Kerja Kepatuhan (SKKP) dan Satuan Kerja Audit Intenal (SKAI) untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Secara garis besar Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan disahkan melalui RUPS sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

1. Mengawasi dan memastikan kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.
2. Menilai dan memastikan pemenuhan aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan Bank.
3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank.
4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional –Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) produk baru bank yang belum ada fatwanya.
5. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan Bank.
6. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
8. Meminta data dan informasi terkait aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugas DPS.

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah

Komposisi Dewan Pengawas Syariah Periode 1 Januari – 27 Maret 2019

Komposisi Dewan Pengawas Syariah periode 1 Januari – 27 Maret 2019 sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas Syariah, 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas Syariah. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Mandiri Syariah.

Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin	Ketua	Otoritas Jasa Keuangan	Akta No. 07 tanggal 5 April 2016	5 April 2017
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Anggota	Otoritas Jasa Keuangan	– Akta No. 24, tanggal 8 September 1999 – Akta No. 10 tanggal. 19 Juni 2008 – Akta No. 19 tanggal 28 Juni 2011 – Akta No. 07 tanggal 5 April 2016	5 April 2017
Dr. H. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec	Anggota	Otoritas Jasa Keuangan	– Akta No. 10 tanggal 3 Juli 2001 – Akta No. 10 tanggal 19 Juni 2008 – Akta No. 19 tanggal 28 Juni 2011 – Akta No. 07 tanggal 5 April 2016	5 April 2017

Komposisi Dewan Pengawas Syariah Periode 27 Maret – 14 Oktober 2019

Pada RUPS Tahunan 2019 tanggal 27 Maret 2019, menyatakan pemberhentian dan pengangkatan kembali Bapak Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah dan Bapak Dr. H. Mohamad Hidayat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta memberhentikan Bapak Dr. H. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah. Sehingga komposisi Dewan Pengawas Syariah periode 27 Maret – 14 Oktober 2019 sebanyak 2 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas Syariah, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas Syariah. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Mandiri Syariah.

Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin	Ketua	Otoritas Jasa Keuangan	– Akta No. 07 tanggal 5 April 2016 – Akta No. 86 tanggal 27 Maret 2019	5 April 2017
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Anggota	Otoritas Jasa Keuangan	– Akta No. 24, tanggal 8 September 1999 – Akta No. 10 tanggal. 19 Juni 2008 – Akta No. 19 tanggal 28 Juni 2011 – Akta No. 07 tanggal 5 April 2016 – Akta No. 86 tanggal 27 Maret 2019.	5 April 2017

Komposisi Dewan Pengawas Syariah Periode 14 Oktober – 13 November 2019

Melalui RUPS Sirkuler tanggal 14 Oktober 2019, menyatakan menerima dan menyetuji pengunduran diri Bapak Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah, mengangkat Bapak Dr. H. Oni Sahron, MA sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah serta menetapak bapak Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah. Sehingga komposisi Dewan Pengawas Syariah periode 14 Oktober – 13 November 2019 sebanyak 2 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas Syariah, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas Syariah. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Mandiri Syariah.

Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Ketua	Otoritas Jasa Keuangan	– Akta No. 55 tanggal 14 Oktober 2019	22 Oktober 2019
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota	Otoritas Jasa Keuangan	– Akta No. 5 tanggal 14 Oktober 2019	Masih dalam Proses Persetujuan OJK

Komposisi Dewan Pengawas Syariah Periode 13 November – 31 Desember 2019

Berdasarkan surat rekomendasi dari Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. U-676/DSN-MUI/IX/2019 tanggal 23 September 2019 menyampaikan bahwa DSN MUI merekomendasi dan menetapkan Ibu Dra. H. Siti Ma'rifah, MM, MH, MA sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang disetujui melalui RUPS Sirkuler tanggal 13 November 2019. Sehingga Komposisi Dewan Pengawas Syariah periode 13 November – 31 Desember 2019 sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas Syariah, 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas Syariah. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Mandiri Syariah.

Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Ketua	Otoritas Jasa Keuangan	– Akta No. 5 tanggal 14 Oktober 2019	22 Oktober 2019
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota	Otoritas Jasa Keuangan	– Akta No. 5 tanggal 14 Oktober 2019	Masih dalam Proses Persetujuan OJK
Dra. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH, MA	Anggota	Otoritas Jasa Keuangan	– Akta No. 24 tanggal 13 November 2019	Masih dalam Proses Persetujuan OJK

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain atau jumlah lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Periode	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin	Ketua	1 Januari – 14 Oktober 2019	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Bank Muamalat
			Ketua Dewan Pengawas Syariah	BNI Syariah
			Ketua Dewan Pengawas Syariah	Bank Mega Syariah
			Ketua Dewan Pengawas Syariah	BNI Life
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Anggota	1 Januari – 14 Oktober 2019	Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT BRIngin Life Syariah
			Anggota Dewan Pengawas Syariah	PT Asuransi Manulife Syariah
	Ketua	14 Oktober – 31 Desember 2019	Anggota Dewan Pengawas Syariah	PT Asuransi Allianz Syariah
			Anggota Dewan Pengawas Syariah	UUS BTN Syariah
Dr. H. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec	Anggota	1 Januari – 27 Maret 2019	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Schroders Investment Management
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota	14 Oktober – 31 Desember 2019	Anggota Dewan Pengawas Syariah	PT Bank Maybank Indonesia (TBK) UUS
			Anggota Dewan Pengawas Syariah	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (UUS)
			Anggota Dewan Pengawas Syariah	PT BNP Paribas Investment Partners
Dra. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH, MA	Anggota	13 November – 31 Desember 2019	Anggota Dewan Pengawas Syariah	PT Panin Dai-ichi Life
			Anggota Dewan Pengawas Syariah	PT Jiwa Central Asia Raya
			Anggota Dewan Pengawas Syariah	PT Reasuransi Nasional Indonesia

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Dewan Pengawas Syariah

Tabel Rapat Dewan Pengawas Syariah

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
1	20 Februari 2019	1. Pembukuan IMBT Nasabah dan Bank 2. *Sharia Compliance Function*	Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin	Hadir	
			Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Hadir	
			Dr. H. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec	Tidak Hadir	Izin
2	15 Mei 2019	1. Rekomendasi Uji Petik DPS Semester I Tahun 2019 2. Permohonan Opini DPS tentang: a. Layanan Acquirer EDC Mandiri Syariah b. Layanan *Customer Online Boarding* c. Pengawasan usaha Pembiayaan berakad Musyarakah oleh pihak Bank	Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin	Hadir	
			Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Hadir	
3	17 Juni 2019	1. Penyampaian laporan terkait penggunaan Dana Sosial untuk Program Souvenir Haji dan Sahabat Haji 2. Permohonan Opini DPS tentang: a. Layanan *Application Programming Interface* (API) b. Transaksi Primary Dealer Syariah c. Kegiatan Impor Uang Kerta Asing (UKA)	Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin	Hadir	
			Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Hadir	
4	16 Agustus 2019	Permohonan Opini DPS tentang Layanan E-Money Server Based LinkAja Syariah	Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin	Tidak Hadir	Izin
			Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Hadir	
5	26 Agustus 2019	Permohonan Opini DPS tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP)	Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin	Tidak Hadir	Izin
			Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Hadir	
6	12 September 2019	Permohonan Opini DPS tentang: a. Kerjasama JALIN (Himbara – Link) b. Layanan Digital Akad	Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin	Tidak Hadir	Izin
			Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Hadir	
7	18 Oktober 2019	1. Penyampaian Rekomendasi Uji Petik DPS periode Januari sampai dengan September 2019 2. Penyampaian hasil Audit Internal Semester I Tahun 2019 3. Konsultasi tentang IB Supplier Financing (SF)	Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin	Tidak Hadir	Izin
			Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Hadir	
8	13 November 2019	1. Koordinasi Kerja DPS 2. Penjelasan Tupoksi DPS 3. Agenda Pengawasan Syariah (Uji Petik) dan kelengkapannya 4. Program Mandiri Syariah NGOPI (Ngobrol Pengetahuan Islam)	Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Hadir	
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir	
			Dra. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH, MA	Hadir	
9	13 November 2019	1. Penyampaian rencana paket Pengawasan Syariah (Uji Petik) DPS 2. Permohonan Opini DPS tentang: a. Proses konversi portofolio Bank Mandiri ke Mandiri Syariah sebagai implikasi Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah b. Penerapan Layanan QR Code Indonesian Standar (QRIS) di BSM	Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Hadir	
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir	
			Dra. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH, MA	Hadir	

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
10	28 November 2019	Rapat Gabung Dewan Komisaris, DPS dan Direksi tentang *Update* Realisasi Kinerja Mandiri Syariah	Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Hadir	
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir	
			Dra. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH, MA	Hadir	
11	4 Desember 2019	Permohonan Opini DPS tentang: a. Fasilitas layanan *Cash Recycle Machine* (CRM) dan PAB ATM b. Usulan Akad Skema *Joint Financing* (JF)	Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Hadir	
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir	
			Dra. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH, MA	Hadir	
12	27 Desember 2012	Permohonan Opini DPS tentang: a. Beasiswa anak yatim/piatu dari pegawai atau pensiunan BSM yang sudah meninggal b. Arahan DPS terkait Pengelolaan Laznas BSM Umat	Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Hadir	
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir	
			Dra. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH, MA	Tidak Hadir	Izin

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Selama tahun 2019, Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali. Adapun frekuensi kehadiran masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Periode	Rapat Dewan Pengawas Syariah		
			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
			Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin	Ketua	1 Januari – 14 Oktober 2019	6	2	33%
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Anggota	1 Januari – 14 Oktober 2019	12	12	100%
	Ketua	14 Oktober – 31 Desember 2019			
Dr. H. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec	Anggota	1 Januari – 27 Maret 2019	1	-	-
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota	14 Oktober – 31 Desember 2019	6	6	100%
Dra. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH, MA	Anggota	13 November – 31 Desember 2019	5	4	80%

Keputusan, Rekomendasi dan Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan PBI No. 11/33/PBI/2009 dan SE BI No. 12/13/DPbS. Dewan Pengawas Syariah melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Bank dengan melakukan:

1. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. Pada 13 (tiga belas) kali pelaksanaan uji petik selama tahun 2019, DPS Mandiri Syariah melakukan koordinasi dengan unit kerja Internal Audit dan *Shariah Compliance* untuk mengumpulkan data dan informasi terhadap cabang tertentu, sebelum uji petik itu sendiri dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar DPS sudah memiliki informasi yang utuh atas suatu cabang, sehingga lebih fokus pada saat pelaksanaan uji petik.

2. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan. Pada setiap awal tahun, DPS Mandiri Syariah melakukan rapat internal DPS untuk menentukan beberapa cabang yang akan diuji petik.

3. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan internal Bank yang berlaku. Fokus pemeriksaan DPS Mandiri Syariah adalah terhadap pemenuhan aspek-aspek syariah/*sharia compliance*. Antara lain:
   a. kesesuaian akad yang digunakan,
   b. terpenuhinya unsur-unsur akad dimaksud pada suatu skim pembiayaan,
   c. pemeriksaan terhadap Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan (SP3), Nota Analisa Pembiayaan (NAP), Akad dan Akta Notariel.

4. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen;

5. Melakukan *review* terhadap ketentuan internal yang berlaku terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah;

6. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. Opini Syariah DPS khusus untuk hal ini menjadi suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Mandiri Syariah dalam rangka pemenuhan persyaratan proses audit laporan keuangan tahunan Mandiri Syariah oleh KAP.

7. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Laporan ini memuat dokumentasi kegiatan DPS yang disusun setiap semester yang memuat, antara lain:
   a. Hasil pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank meliputi tujuan, karakteristik, akad dalam produk, kesesuaiannya dengan Fatwa DSN - MUI, *review system* dan prosedur produk baru.
   b. Hasil pengawasan terhadap kegiatan bank meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa Bank. Bentuk pengawasan berupa; analisis Laporan Hasil Audit Intern, penetapan dan pemeriksaan jumlah uji petik transaksi, *review* terhadap SOP terkait aspek Syariah.
   c. Opini Umum DPS terhadap operasional Bank per periode. Periode I yaitu 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 dan periode II yaitu 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
   d. Opini DPS terhadap kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa Bank. Dengan menyajikan data berupa jumlah SE (Surat Edaran), data pembiayaan serta opini DPS atas produk baru Bank. Pada tahun 2019 DPS telah mengeluarkan 16 opini Syariah, adapun Opini yang dikeluarkan DPS adalah sebagai berikut:

- Opini DPS Mandiri Syariah No. 21/02/DPS/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Produk Layanan *Acquirer* EDC PT BSM
- Opini DPS Mandiri Syariah No. 21/03/DPS/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Layanan *Customer Online Boarding*
- Opini DPS Mandiri Syariah No. 21/04/DPS/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Temuan Audit OJK Perihal Pembiayaan Akad Musyarakah nasabah atas nama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)
- Opini DPS Mandiri Syariah No. 21/05/DPS/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang Penggunaan dan Distribusi Dana Sosial No. 21/06/DPS/VI/ tanggal 27 Juni 2019 tentang Layanan *Application Programming Interface* (API)
- Opini DPS Mandiri Syariah No. 21/07/DPS/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang Transaksi *Primary Dealer Syariah*
- Opini DPS Mandiri Syariah No. 21/08/DPS/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang Kegiatan Impor Uang Kertas Asing (UKA)
- Opini DPS Mandiri Syariah No. 21/09/DPS/VIII/2019 tanggal 25 Agustus 2019 tentang *Electronic Money Server Based* LinkAja Syariah
- Opini DPS Mandiri Syariah No. 21/10/DPS/IX/2019 tanggal 13 September 2019 tentang Layanan Himbara-Link
- Opini DPS Mandiri Syariah No. 21/11/DPS/IX/2019 tanggal 13 September 2019 tentang Akad Pembiayaan Digital
- Opini DPS Mandiri Syariah No. 21/12/DPS/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Produk dan Operasional PT Bank Syariah Mandiri Periode 1 Januari 2019 s.d. 31 Juli 2019
- Opini DPS Mandiri Syariah No. 21/13/DPS/XI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang Penggunaan *Negative Confirmation* dan Asuransi Konvensional dalam Proses Konversi Portofolio Bank Mandiri ke Bank Syariah Mandiri dalam Implementasi Qanun Aceh
- Opini DPS Mandiri Syariah No. 21/14/DPS/XI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang Layanan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di PT Bank Syariah Mandiri
- Opini DPS Mandiri Syariah No. 21/15/DPS/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Skema Joint Financing antara PT Bank Syariah Mandiri dan PT Mandiri Utama Finance (MUF) Syariah
- DPS Mandiri Syariah No. 21/16/DPS/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Layanan *Cash Recycle Machine* (CRM)
- DPS Mandiri Syariah No. 21/17/DPS/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Produk dan Operasional Bank Syariah Mandiri Periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

e. Metodologi dan teknik pengambilan uji sampel pemeriksaan

Pada tahun 2019 DPS telah melakukan uji petik/ pengawasan langsung ke 16 (enam belas) lokasi yaitu:

Semester I Tahun 2019
1) Area Padang
2) KC Buah Batu Bandung
3) Area Bandar Lampung
4) KCP Cipanas
5) KCP Mojokerto
6) KCP Kuningan
7) KC Yogyakarta

Semester II Tahun 2019
8) KC Pekanbaru
9) Area Solo
10) Area Semarang
11) Area Bogor
12) Area Surabaya Darmo
13) Area Banjarmasin
14) KC Pamekasan
15) Area Balikpapan
16) KC Samarinda

Dengan konsentrasi uji petik yaitu dokumen transaksi pendanaan, pembiayaan dengan basis akad:
a) Wadiah
b) Murabahah
c) Mudharabah
d) Musyarakah
e) Musyarakah Mutanaqisah
f) Ijarah
g) Ijarah Muntahiya Bittamlik
h) Line Facility
i) Pembiayaan *Take Over*, baik dari Lembaga Keuangan Konvensional maupun Lembaga Keuangan Syariah
j) Pembiayaan dengan tujuan *Refinancing*
k) Pembiayaan kepada koperasi
l) Formulir Pembukaan Rekening Tabungan, Giro dan Deposito

Guna melengkapi proses pemeriksaan, DPS juga meminta dan mempelajari hasil temuan Internal Audit (IAG) dari masing-masing Kantor Cabang yang diuji petik.

8. Meningkatkan Pemahaman Praktek Perbankan Syariah
Hal penting lainnya adalah pada saat melakukan Uji Petik DPS Mandiri Syariah melakukan dialog dengan pimpinan dan pegawai cabang, untuk menganilsa lebih dalam kendala-kendala bisnis dan operasional cabang yang berkaitan dengan aspek syariah sehinggan dapat dipastikan kesesuain dengan prinsip syariah.

Selain itu DPS juga memberikan arahan dan penguatan materi "Akad dan Produk Perbankan Syariah" kepada para Manajer yang berada di Area, Cabang/*Branch* dan semua pegawai Cabang/*Branch*, dengan mengadakan Forum Klinik Syariah untuk menjawab keluhan sekaligus menerima masukan yang dapat memperbaiki kualitas pemenuhan aspek syariah.
Hal ini dimaksudkan agar semua pejabat Area dan Cabang/*Branch* memahami dan mengenali kembali skema produk dan jasa perbankan syariah. Termasuk akad-akad standar yang digunakan dalam produk pendanaan, pembiayaan dan jasa. Sehingga harapannya dari sisi bisnis tetap tumbuh dan dari aspek syariah terpenuhi (*shariah compliance*).

Untuk menunjang semua pencapaian di atas, DPS secara moral spiritual memiliki kewajiban untuk menyampaikan motivasi dan arahan kepada semua pejabat Area, Cabang/*Branch* dan semua pegawai cabang agar senantiasa mengedepankan akhlak/etika islami dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang menjadi amanah Perusahaan. Karena hal inilah yang menjadi nilai tambah sekaligus kekuatan yang sangat fundamental bagi Bank Syariah Mandiri.

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Penilaian kinerja Dewan Pengawas Syariah dilakukan melalui *Self Assesment* GCG yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pada Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan *Self Assessment* GCG ini dilaksanakan secara periodik setiap semester yang dilaporkan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan.

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pelaksanaan *assessment* kinerja Dewan Pengawas Syariah termasuk di dalam pelaksanaan *self assessment* GCG Bank yang dilakukan secara berkala setiap semester.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Kriteria *Self Assessment* Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan GCG dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*.

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pihak yang melakukan *Self Assessment* GCG adalah Direksi dan Dewan Komisaris yang harus mendapatkan persetujuan dan pengawasan dari OJK.

HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Hasil penilaian *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2019 Mandiri Syariah mendapat peringkat 1.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Dewan Pengawas Syariah

Jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah berakhir apabila:
1. Jangka waktu jabatannya berakhir.
2. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
3. Mengundurkan diri.
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
5. Meninggal dunia.
6. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Direksi

Direksi adalah Organ Utama yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Mandiri Syariah, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili Mandiri Syariah, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi secara umum bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS serta mempertanggungjawabkannya kepada RUPS.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar adalah sebagai berikut:
1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan pebuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak dan Wewenang Direksi

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan.

2. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.

3. Direksi mempunyai wewenang untuk menghapusbukukan piutang pokok macet, tidak menagih lagi piutang berupa margin, denda dan/atau ongkos-ongkos dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian pembiayaan yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
4. Direksi mempunyai wewenang untuk mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun, atau jaminan hari tua dan penghasilan pegawai Perseroan.

Masa Jabatan Direksi

Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebut alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut kecuali apabila ditentutkan lain oleh RUPS. Setelah masa jabatannya berakhir anggota Direksi dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, namun RUPS dapat menetapkan lebih dari 2 (dua) periode masa jabatan.

Kriteria Direksi

1. Calon anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan:
   a. Integritas;
   b. Kompetensi; dan
   c. reputasi keuangan.

2. Calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Regulator Perbankan sebelum bertindak mewakili Bank dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat Bank dan/atau mengambil keputusan penting yang memengaruhi kondisi keuangan Bank.

3. Calon anggota Direksi yang belum mendapat persetujuan Regulator Perbankan (dalam hal ini belum memperoleh predikat Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan) dilarang melakukan tindakan sebagai anggota Direksi walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum dan sebelum pengangkatannya tidak pernah:

1. Dinyatakan pailit.

2. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

4. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi telah memiliki Tata Tertib Kerja Direksi yang telah dimutakhirkan pada tanggal 21 Maret 2018 sesuai Surat Keputusan Direksi No. 20/104-KEP/DIR tentang Tata Tertib Direksi PT Bank Syariah Mandiri. Pedoman dan Tata Terbit Kerja tersebut mengatur mengenai tugas pokok, struktur organisasi, etika kerja, waktu kerja, dan penyelenggaraan rapat Direksi. Pedoman tersebut mengatur Etika Kerja Direksi, Pengaturan Rapat, Penggantian Direksi dan Ketentuan lain yang telah memenuhi prinsip-prinsip GCG. Hal-hal yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Direksi tersebut antara lain:

Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kewenangan Bertindak
Bab III Organisasi dan Pembidangan Tugas
Bab IV Kebijakan Umum
Bab V Etika dan Waktu Kerja
Bab VI Pengaturan Rapat
Bab VII Komite
Bab VIII Senior Exeutive Vice President (SEVP)
Bab IX Korespondensi
BAB X Lain-lain
Bab XI Perubahan
Bab XII Penutup

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi

Pengurus Bank wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Guna memenuhi persyaratan integritas, calon anggota Direksi Bank harus memiliki akhlak dan moral yang baik, komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank. Untuk memenuhi persyaratan kompetensi anggota Direksi wajib memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perbankan dan relevan dengan jabatannya, memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat.

Komposisi Direksi Periode 1 Januari – 14 Oktober 2019

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Toni Eko Boy Subari	Direktur Utama	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017	15 Februari 2018
Achmad Syafii	Direktur	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017	15 Februari 2018
Putu Rahwidhiyasa	Direktur	Otoritas Jasa Keuangan	– RUPS Tahunan tanggal 7 Mei 2014 – RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017	10 Oktober 2014
Kusman Yandi	Direktur	Otoritas Jasa Keuangan	– RUPS Tahunan tanggal 1 April 2015 – RUPS Tahunan tanggal 12 Maret 2018	24 Agustus 2015
Ade Cahyo Nugroho	Direktur	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017	4 Januari 2018

Komposisi Direksi Periode 14 Oktober – 31 Desember 2019

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Toni Eko Boy Subari	Direktur Utama	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017	15 Februari 2018
Achmad Syafii	Direktur	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017	15 Februari 2018
Putu Rahwidhiyasa	Direktur	Otoritas Jasa Keuangan	– RUPS Tahunan tanggal 7 Mei 2014 – RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017	10 Oktober 2014

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Kusman Yandi	Direktur	Otoritas Jasa Keuangan	– RUPS Tahunan tanggal 1 April 2015 – RUPS Tahunan tanggal 12 Maret 2018	24 Agustus 2015
Ade Cahyo Nugroho	Direktur	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 10 April 2017	4 Januari 2018
Rosma Handayani	Direktur	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Sirkuler tanggal 14 Oktober 2019	Masih dalam *fit and proper test*.

Program Orientasi Bagi Direksi Baru

Dikarenakan latar belakang Anggota Direksi yang berbeda-beda, Mandiri Syariah selalu mengadakan Program Pengenalan anggota Direksi baru dengan harapan para anggota Direksi dapat saling mengenal dan menjalin kerjasama sebagai satu tim yang solid, komprehensif dan efektif sebagai ajang memberikan pengenalan mengenai kondisi Mandiri Syariah secara umum.

Sejalan dengan Panduan Tata Kerja Direksi (*Board Manual*), Program pengenalan Direksi meliputi:
1. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan *Business Ethics* di Perseroan.
2. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal lain yang tidak diperbolehkan.
3. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan Perseroan, kinerja keuangan, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang Perseroan, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya.
4. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, serta sistem dan kebijakan pengendalian internal.

Program orientasi bagi Direksi Baru di tahun 2019 diselenggarakan melalui rapat Direksi bersama dengan unit-unit yang terkait.

Pembidangan Tugas Pengawasan Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dibagi atas bidang tugas sebagai berikut.

Tabel Pembidangan Tugas Direksi

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Toni Eko Boy Subari	Direktur Utama	– Internal Audit Group
Achmad Syafii	Direktur Information Technology, Operation & Digital	– IT Architecture & Strategy Group – IT Development Group – IT Operation Group – Financing Operation Group – Cash & Trade Operation Group – Digital Banking Product Development Group – Digital Banking Sales & Partnership Group – Digital Banking Operation Group – Digital Bankin Ecosystem
Putu Rahwidhiyasa	Direktur Risk Management & Compliance	– Enterprise Risk Management Group – Compliance Group – Policy & Procedure Group – Legal Group – Corporate Secretary Group – Corporate Action
Kusman Yandi	Direktur Wholesale Banking	– Corporate Banking 1 Group – Corporate Banking 2 Group – Commercial Banking Group – Product & Transactional Banking Group

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance, Strategy & Treasury	– Strategy & Performance Management Group – Accounting Group – Corporate Transformation Group – Strategic Procurement Group – Treasury & International Banking Group
Rosma Handayani*	Direktur Human Capital	– Human Capital Services Group – Human Capital Policy Group – Mandiri Syariah University

*Diangkat melalui RUPS Sirkuler tanggal 14 Oktober 2019 dan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas *fit and proper test*.

Hubungan Afiliasi Direksi

Direksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun keuangan baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi													
		Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan Dengan Perusahaan Lain	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Toni Eko Boy Subari	Direktur Utama		√		√		√		√		√		√		√
Achmad Syafii	Direktur Information Technology, Operation & Digital		√		√		√		√		√		√		√
Putu Rahwidhiyasa	Direktur Risk Management & Compliance		√		√		√		√		√		√		√
Kusman Yandi	Direktur Wholesale Banking		√		√		√		√		√		√		√
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance, Strategy & Treasury		√		√		√		√		√		√		√
Rosma Handayani*	Direktur Human Capital		√		√		√		√		√		√		√

*Diangkat melalui RUPS Sirkuler tanggal 14 Oktober 2019 dan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas *fit and proper test*.

Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi

Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi telah diatur pada Kebijakan Tata kelola Bab III. Struktur Tata Kelola Perusahaan Artikel 330. Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, kecuali:

1. Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
2. Direksi menduduki jabatan pada 2 (dua) lembaga nirlaba; dan/atau
3. Perangkapan jabatan Direksi lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu.

Selama tahun 2019 tidak ada anggota Direksi yang memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Toni Eko Boy Subari	Direktur Utama	-	-
Achmad Syafii	Direktur Information Technology, Operation & Digital	-	-
Putu Rahwidhiyasa	Direktur Risk Management & Compliance	-	-
Kusman Yandi	Direktur Wholesale Banking	-	-
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance, Strategy & Treasury	-	-
Rosma Handayani*	Direktur Human Capital	-	-

*Diangkat melalui RUPS Sirkuler tanggal 14 Oktober 2019 dan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas *fit and proper test*.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Mandiri Syariah telah mengatur pengelolaan benturan kepentingan pada Kebijakan Tata kelola Bab III serta Tata Tertib Direksi. Pengelolaan Benturan kepentingan Direksi adalah sebagai berikut

1. Wajib menghindarkan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
2. Bertindak terhormat dan bertanggung jawab serta bebas dari pengaruh yang memungkinkan hilangnya obyektivitas dalam pelaksanaan tugas atau mengakibatkan Bank kehilangan bisnis dan/atau reputasi.
3. Dilarang menyalahgunakan *corporate identity* Bank. *Corporate identity* hanya dapat digunakan untuk kepentingan Bank dan dengan seizin Bank.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan peribadi anggota Direksi dengan kepentingan Bank, anggota Direksi yang mempunyai benturan kepentingan tersebut tidak diperkenankan ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Kepemilikan Saham Direksi

Direksi tidak memiliki saham di Mandiri Syariah, Bank Lain dan pada Perusahaan lain.

Tabel Kepemilikan Saham Direksi

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			
		Mandiri Syariah	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Toni Eko Boy Subari	Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Achmad Syafii	Direktur Information Technology, Operation & Digital	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Putu Rahwidhiyasa	Direktur Risk Management & Compliance	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Kusman Yandi	Direktur Wholesale Banking	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance, Strategy & Treasury	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Rosma Handayani*	Direktur Human Capital	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

*Diangkat melalui RUPS Sirkuler tanggal 14 Oktober 2019 dan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas *fit and proper test*.

Rapat Direksi

Rapat Direksi merupakan forum Bank untuk membahas, mengkoordinasikan dan menyelesaikan agenda-agenda Bank. Rapat Direksi dihadiri oleh Direksi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sebulan atau setiap waktu bilamana diperlukan oleh seorang atau atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang Bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Rapat Direksi dapat dihadiri oleh peserta lainnya sesuai kebutuhan Bank.
Setiap rapat dianggap memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh ½ (satu per dua) dan 1 (satu) dari seluruh jumlah peserta rapat yang diundang. Khusus untuk rapat Direksi dianggap sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat jika lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang hadir atau diwakilik dalam rapat.

Setiap anggota Direksi dapat diwakili dalam setiap Rapat hanya oleh 1 (satu) anggota Direksi yang berdasarkan Surat Kuasa atau berlaku penggantian otomatis sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi tentang *Alternate* Direksi yang berlaku.

Keputusan rapat diusahakan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Keputusan rapat di luar musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutann suara (*voting*) berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan. Jika suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka keputusan akhir diserahkan kepada Pimpinan Rapat.

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2019, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Direksi

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
1	8 Januari 2019	– *Sharing* Direksi & SEVP – Konsep Desain *Facade* Gedung Mandiri Syariah – *Sharing* dan Diskusi Penajaman Bisnis Corporate Banking oleh Group Head- Large Corporate BM – *Kick Off Project* Kompetensi Teknis BSM oleh Konsultan LM-UI – *Strategic Marketing Survey Priority* BSM oleh Frontier Consulting – Rakernas 2019 – Promosi SPC & Alokasi Apresiasi Umrah – Pedoman Publikasi & Pembatasan untuk Presentasi/Rapat dan Telepon dengan Calon Investor dalam *Non-Deal Roadshow*	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
2	15 Januari 2019	– *Sharing* Direksi & SEVP – Usulan Pelaksanaan dan Agenda RUPST Tahun Buku 2018 – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2019 – Strategi Digital Banking 2019 – ALCO: *Update Market* & *Review* Kebijakan ALCO – Mandiri Syariah *Excellence Award* (MSEA) 2018	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
3	22 Januari 2019	– *Sharing* Direksi & SEVP – Pelaksanaan Mandiri Syariah *Excellence Award* (MSEA) 2018 – Penamaan Produk oleh konsultan Dentsu – Hasil Penilaian KPI 2018 & Penetapan Predikat Kinerja Group KP – KPI Area 2019 – Tingkat Kesehatan Bank SM II 2018 – Rakerwil Tahun 2019 – Kinerja dan Program Kerja Wholesale & Retail Collection dan Recovery	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
4	29 Januari 2019	– *Sharing* Direksi & SEVP – KPI Wilayah & Area – Struktur Organisasi Region, Area, dan Branch – Promosi Pegawai – *Entrance Meeting* Audit OJK – Usulan *Industry Class* 2019	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
5	6 Februari 2019	– *Sharing* Direksi & SEVP – Kinerja 31 Januari 2019 – *Board Forum* – Komite PL Untuk L2, L3, dan Area Manager – *Kick Off Incentive and Total Reward Project* oleh konsultan Mercer	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Tidak Hadir	Izin
			Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
6	12 Februari 2019	– *Sharing* Direksi & SEVP – RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 – ALCO: *Update* Likuiditas Valas *& Special Price* Pembiayaan Consumer – *Update* Kepegawaian	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Kusman Yandi	Tidak Hadir	Izin
			Ade Cahyo Nugroho	Tidak Hadir	Izin
7	19 Februari 2019	– *Sharing* Direksi & SEVP – Revisi RBB 2019 – 2021 & Strategi Permodalan – ALCO: Usulan Penambahan *Plafond* Penempatan Dana Bank pada SBSN & Sukuk Korporasi Tahun 2019	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Tidak Hadir	Izin
			Kusman Yandi	Tidak Hadir	Izin
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
8	26 Februari 2019	– *Sharing* Direksi & SEVP – Revisi RBB 2019 – 2021 Bank Syariah Mandiri – Program *Shifting* Transaksi 2019 – Pemanfaatan Ruangan dan Progres Pembangunan Gedung – Agenda Kepegawaian	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
9	5 Maret 2019	– *Sharing* Direksi & SEVP – Program *Shifting* Transaksi 2019 & *Branch Digital* – *Quick Report* Kinerja Mandiri Syariah 28 Februari 2019 – Simulasi Bagi Hasil *Cost of fund* – Kegiatan Laznas BSM Umat 2018 – Persiapan *Press Conference* (Paparan Kinerja FY 2018 PT Bank Syariah Mandiri) – *Event* Tahunan Mandiri Syariah – Hasil *Pilot Project Control Testing*	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
10	12 Maret 2019	– *Sharing* Direksi & SEVP – *Strategic Marketing Survey* Produk Tabungan Segmen Pegawai dan Pengusaha oleh konsultan Markplus Indonesia – Pengajuan *Special Margin* Mitraguna Berkah & Griya Berkah 2019 (ALCO) – Strategi *Funding* dan Kebun Institusi (BO 2) – *Excelence Colaboration* Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Retail dari Nasabah Wholesale	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
11	19 Maret 2019	– *Sharing* Direksi & SEVP – Kerjasama Pengelolaan Dana Pensiun Bank Syariah Mandiri dengan Mandiri DPLK – Program Apresiasi Umrah	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
12	26 Maret 2019	– *Sharing* Direksi & SEVP – Rencana *Plafond* RDPU (Reksa Dana Pasar Uang) Syariah; Strategi – *Switching* Dana BPKH 2019 (ALCO) – Program *Time Signal* Ramadhan, oleh konsultan Dentsu – *Update* Optimalisasi Jaringan *System* Cabang – Kartu Kredit Pemerintah dan Kartu Pembayaran Perusahaan – *Update* Kegiatan Acara *Management Muhasabah* 8	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
13	2 April 2019	– *Sharing* Direksi & SEVP – *Update* Progres *Branch Operations Improvement* – Program Ramadhan Mandiri Syariah 2019 – Penempatan ODP	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
14	9 April 2019	– *Sharing* Direksi & SEVP – Konsep TVC Corporate untuk program Ramadhan oleh Vendor AV Comm – *Quick Report* Kinerja 31 Maret 2019 – *Profile* Nasabah Griya & Kendaraan – Rencana Pembelian Gedung Graha Mandiri	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
15	7 Mei 2019	– *Sharing* Direksi & SEVP – *Update* Kinerja April 2019 – *Culture Theme* 2019 and Program – Strategi Transaction Banking dalam Meningkatkan CASA	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
16	14 Mei 2019	– *Sharing* Direksi & SEVP – *Remapping* Kantor Area – *Inisiatif Strategis Financing Operations Group* – Operasional Laznas	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Tidak Hadir	Izin
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
17	21 Mei 2019	– *Sharing* Direksi & SEVP – *Culture Theme and Program* – *Lean Organization Head Office* – *Review* Portofolio dan Kualitas Pembiayaan Segmen *Business Banking*	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
18	11 Juni 2019	– Sharing Direksi dan SEVP – *Talent Classifications* – *Update Kinerja Mei 2019*	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
19	18 Juni 2019	– *Sharing* Direksi & SEVP – SO Kantor Pusat – Revisi RBB 2019 – *Update* Sosmed dan Digital Marketing BSM – *ALCO* – *Program KKP*	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
20	25 Juni 2019	– *Sharing* Direksi & SEVP – Proyeksi Kinerja Juni 2019 – Perkembangan *Transaction Banking* Semester I – *Update Digital Branch* (PT Nielsen) – Perkembangan dan Strategi Bisnis PWG – Komite Bisnis (KKP) – Komite Human Capital (Promosi Pegawai)	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Tidak Hadir	Izin
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Tidak Hadir	Izin
21	2 Juli 2019	– *Sharing* Direksi & SEVP – Program *Culture* dan Tema Budaya 2019 – *Update* WAIS – *Update* POJK No.1/POJK.03/2019 – *Update* Progres Marcom – Perbaikan *Business Process* Griya – *Update* HC	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Tidak Hadir	Izin
22	9 Juli 2019	– *Sharing* Direksi & SEVP – Kinerja Juni *2019* – Progres Efisiensi Biaya BSM – *Update* pembukaan rekening *online*	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Tidak Hadir	Izin
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
23	16 Juli 2019	– *Sharing* Direksi & SEVP – *Employee Value Proposition* (EVP) – *Technical Competencies* – Sistem Informasi Kepatuhan (Compas)	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
24	23 Juli 2019	– *Sharing* Direksi & SEVP – Progres Aksi Korporasi – *Update* Pemilihan *Lead Agency* – Hasil Audit OJK – *Update* HC Initiatives Strategies – Tingkat Kesehatan Bank	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
25	30 Juli 2019	– *Update* Materi *Board Forum* – Proyeksi Kinerja Juli 2019 – *Update* rencana Kurban BSM	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
26	6 Agustus 2019	– *Sharing* Direksi & SEVP – Kinerja Juli 2019 – *Update* Ketentuan Baru OJK – *Update* Rencana TVC *Online Onboarding* – Komite Bisnis (KKP) – Komite Human Capital	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
27	13 Agustus 2019	– *Sharing* Direksi & SEVP – Perkembangan Ekosistem Umrah – IT Steering Committee – *Update* Muhasabah – Rencana Kinerja Retail Collection – Komite Human Capital.	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
28	3 September 2019	– *Sharing* Direksi & SEVP – *Update* Markom – *Legal Updates* – *Update* Project CAT	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Kusman Yandi	Tidak Hadir	Izin
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
29	10 September 2019	– *Update* Project Burj – Laporan Kinerja Agustus 2019 – Desain Kalender 2020 – *Update* Milad 2019 – Agenda HC	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Kusman Yandi	Tidak Hadir	Izin
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
30	17 September 2019	– *Sharing Session Direksi* – Entrance Meeting KAP PWC – *Update* Implementasi Financing Factory – Penurunan Nisbah Tabungan BSM Mudharabah – Agenda HC	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Tidak Hadir	Izin
31	24 September 2019	– *Sharing Session Direksi* – *Update* Project Andalusia (Qanun Aceh) – Proyeksi Kinerja September 19 & Keuangan RBB 2020-2022 – *Update* Kalender 2020 – *Update* MER, *Sanction Screening* & CGPI – Agenda Laznas: Rencana Pemanfaatan Mobil Musholla, Ambulance & Mobil Jenazah – Agenda HC: Program Beasiswa Anak Pegawai	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
32	1 Oktober 2019	– *Sharing Session Direksi* – *Business Plan* IBG – Perkembangan Bisnis Segmen Mikro – Sanksi Denda Regulator – *Update* logo Milad BSM, kalender 2020 prioritas dan *Gift Box* – *Update* Milad BSM	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Tidak Hadir	Izin
			Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
33	8 Oktober 2019	– *Sharing Session Direksi* – Laporan Kinerja September 2019 & *Update* RBB 2020 – *Update ERM & Control Testing*	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
34	15 Oktober 2019	– *Sharing Session* Direksi – *Review* BPJS Kesehatan – *Clearance* Audit 31 Juli 2019 – *Update* Milad 2019 & Peresmian Masjid Cipali – Agenda HC	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Tidak Hadir	Izin
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
35	22 Oktober 2019	– *Sharing Session* Direksi – Profil Risiko BSM – *Update* CGPI – *Update* Retail Collection & Recovery	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
36	29 Oktober 2019	– Proyeksi Kinerja Oktober 2019 – Materi Observasi CGPI – *Update* TVC – *Update* Project Qanun Aceh – Agenda HC	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
37	5 November 2019	– *Sharing Session* Direksi – Persetujuan RBB 2020-2022 – Presentasi *Stakeholder* & Rencana Unit Kerja Direktorat Wholesale Banking – Agenda ALCO	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Tidak Hadir	Izin
			Putu Rahwidhiyasa	Tidak Hadir	Izin
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
38	12 November 2019	– *Sharing Session* Direksi – Presentasi *Stakeholder* & Rencana Unit Kerja Direktorat Wholesale Financing Risk, Restructuring & Recovery – Agenda HC	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
39	19 November 2019	– *Sharing Session* Direksi – Presentasi *Stakeholder* & Rencana Unit Kerja Direktorat Management Risk & Compliance – *Update* Performance Media & Rencana RAKB 2020 – Prognosa Bisnis 2019 – Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor Saharjo – *Perform* Direksi di Acara *Family Gathering*	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
40	26 November 2019	– *Sharing Session* Direksi – Rencana RAKB 2020 & *Video Company Profile* – *Update* Target Segmen Mikro – *Update Progress Financing Factor* – Laporan Kinerja November 2019	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
41	3 Desember 2019	– *Sharing Session* Direksi – *Sponsorship Event* BOGI – *Update Project* Burj & Pertumbuhan Anorganik – *Review* PSAK 71, 72 & 73 – Presentasi *Stakeholder* & Rencana Unit Kerja Direktorat Retail banking – Presentasi *Stakeholder* & Rencana Unit Kerja Direktorat Retail Financing Risk, Restructuring & Recovery	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Kusman Yandi	Tidak Hadir	Izin
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
42	10 Desember 2019	– Presentasi *Stakeholder* & Rencana Unit Kerja Direktorat Distribution & Sales – Presentasi *Stakeholder* & Rencana Unit Kerja Direktorat Information Technology, Operations & Digital – *Exit Meeting* Penyampaian Hasil Audit Bank Syariah Mandiri Tahun 2019 – Laporan Kinerja November 2019 – Agenda ALCO – Agenda HC	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	
43	17 Desember 2019	– Presentasi Hasil Riset *Survey* Nasabah Bank Syariah 2019 – *Sharing Session* – Laporan *Hardclose* PWC November 2019 – IT Steering Committee – Persiapan Operasional Akhir Tahun 2019 – Usulan Agenda RUPS – Parameter MSEA – *Project Charter* Wealth Management & Struktur Organisasi	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran	Keterangan
44	31 Desember 2019	– *Sharing Session* – Mandiri Syariah *Excellence Award* (MSEA) – Tutup Buku Laporan Keuangan 31 Desember 2019	Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Achmad Syafii	Hadir	
			Putu Rahwidhiyasa	Hadir	
			Kusman Yandi	Hadir	
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir	
			Rosma Handayani	Hadir	

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Selama tahun 2019, Direksi telah melaksanakan rapat internal sebanyak 44 (empat puluh empat) kali dan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi sebanyak 13 (tiga belas) kali. Frekuensi dan kehadiran rapat masing-masing Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Nama	Jabatan	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris		
		Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Toni Eko Boy Subari	Direktur Utama	44	44	100%	13	12	92%
Achmad Syafii	Direktur Information Technology, Operation & Digital	44	41	93%	13	11	85%
Putu Rahwidhiyasa	Direktur Risk Management & Compliance	44	38	86%	13	10	77%
Kusman Yandi	Direktur Wholesale Banking	44	39	89%	13	9	69%
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance, Strategy & Treasury	44	40	91%	13	11	84,62%
Rosma Handayani*	Direktur Human Capital	11	11	100%	3	3	100%

*Diangkat melalui RUPS Sirkuler tanggal 14 Oktober 2019, dan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas *fit and proper test*.

Sertifikasi Manajemen Risiko

Nama	Jabatan	Sertifikasi Manajemen Risiko
Toni Eko Boy Subari	Direktur Utama	Level V
Achmad Syafii	Direktur *Information Technology, Operation & Digital*	Level V
Putu Rahwidhiyasa	Direktur *Risk Management & Compliance*	Level V
Kusman Yandi	Direktur *Wholesale Banking*	Level V
Ade Cahyo Nugroho	Direktur *Finance, Strategy & Treasury*	Level V
Rosma Handayani*	Direktur *Human Capital*	Level IV

*Diangkat melalui RUPS Sirkuler tanggal 14 Oktober 2019, dan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas *fit and proper test*.

Pelaksanaan Tugas dan Keputusan Direksi

Selama tahun 2019, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain:
1. Menyusun dan mengimplementasikan *Corporate Plan.*
2. Menggelar Rapat Direksi.
3. Menggelar Rapat persetujuan Komite Pembiayaan, memberikan pembiayaan kepada pihak terkait sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang.
4. Menyusun RAKP Bisnis Perseoran tahun 2020.
5. Menyusun RAKP *Sustainablity* Perseoran tahun buku 2020.
6. Mengelar Rapat dengan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
7. Melakukan hapus buku piutang pokok yang macet, tidak menagih lagi piutang berupa margin, denda dana atau ongkos dalam rangka restrukturisasi dan atau penyelesaian pembiayaan atas persetujuan Komisaris.
8. Mewakili bank melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam berbagai bidang mencakup bisnis dan *support*.
9. Melaksanakan kegiatan edukasi, literasi, dan inklusi dalam rangka peningkatan pemahaman produk dan layanan bank syariah (literasi syariah).
10. Mewakili Perseroan di dalam dan luar pengadilan yang mengingat perseorang dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan.
11. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian perseroan termasuk gaji, pensiun, promosi, pelatihan, jaminan hari tua, jaminan kesehatan dll.

Keputusan Direksi

Adapun keputusan yang telah dikeluarkan oleh Direksi selama tahun 2019, antara lain:
1. Penempatan dan Penetapan Jabatan Pegawai.
2. Penugasan Sebagai Pejabat Sementara Kepala Unit Kerja.
3. Pemberian Limit Wewenang Memutus Pembiayaan.
4. Struktur Organisasi Regional, Area dan Cabang.
5. Pemberian Limit Wewenang Memutus Restrukturisasi/ Penanganan Pembiayaan Bermasalah.
6. Pengangkatan dan Penetapan Pegawai.
7. Penugasan Sebagai Subjek Meter Expert Teknicla Kompetensi.
8. Struktur Organisasi Internal Audit Group.
9. Business Committee
10. Policy and Procedure Committee
11. Penyelarasan Struktur Organisasi Retail Banking Direktorat.
12. Pemberhentian Pegawai.

Penilaian Kinerja Direksi

Evaluasi kinerja Direksi yang dilakukan oleh Pemegang Saham diselenggarakan di dalam proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penilaian yang dilakukan berdasarkan pencapaian indikator kinerja kunci (KPI) yang telah disetujui sebelumnya oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.

Prosedur Pelaksanaan *Assessment* Kinerja Direksi

Pencapaian kinerja Direksi dilaporkan kepada pemegang saham melalui RUPS.

Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi

Kriteria evaluasi kinerja Direksi berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI)*,* yaitu*:*
1. Laba
2. Kualitas Pembiayaan yang diukur dari NPF *Gross* dan Kol. 2
3. *Recovery ex WO*
4. *Fee Based Income*
5. Posisi Pembiayaan
6. Posisi CASA
7. Posisi DPK
8. *Customer Satisfaction Indeks*
9. Pelaksanaan Inisiatif Strategis
10. *Employee Productivity*

Pihak Yang Melakukan *Assessment*

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris serta RUPS. Dasar penilaian kinerja Direksi mengacu kepada indikator kinerja kunci (KPI). Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta pencapaian kinerja pada periode 2019 akan disampaikan dan dipertanggungjawabkan di dalam RUPS yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi

SASARAN STRATEGIS	BOBOT (%)	KPI	BOBOT (%)	TARGET	NILAI
F	50	Laba	15	Rp782 miliar	19,50
		Kualitas Pembiayaan:	10		13,0
		NPF *Gross*		2,49%	
		Kol. 2		3,71%	
		Recovery ex WO	10	Rp600 miliar	11,05
C	35	*Fee Based Income*	15	Rp1.783miliar	15,89
		Posisi Pembiayaan	15	Rp75.216 triliun	15,07
		Posisi CASA	10	Rp48.767 triliun	11,13
		Posisi DPK	5	Rp90.098 triliun	5,42
I	5	*Customer Satisfaction Indeks*	5	Nomor 1 MRI	5,00
PD	10	Pelaksanaan Inisiatif Strategis	5	100%	5,00
		Employee Productivity	10	Rp85,7juta per pegawai	13,00
TOTAL	**100**				**114,05**

Penilaian Kinerja Direksi Melalui *Self Assessment* GCG Sesuai Ketentuan OJK

Penilaian kinerja Direksi juga dilakukan melalui *Self Assesment* GCG yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Pelaksanaan *Self Assessment* GCG ini dilaksanakan secara periodik setiap semester yang dilaporkan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan.

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Pelaksanaan *assessment* kinerja Direksi termasuk di dalam pelaksanaan *self assessment* GCG Bank yang dilakukan secara berkala setiap semester.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Kriteria *Self Assessment* Direksi terkait pelaksanaan GCG dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*. *Governance structure* terdiri dari 14 (empat belas) indikator, *Governance Process* terdiri dari 17 (tujuh belas) indikator sedangkan *governance outcome* terdiri dari 6 (enam) indikator.

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Pihak yang melakukan *Self Assessment* GCG adalah Direksi dan Dewan Komisaris yang harus mendapatkan persetujuan dan pengawasan dari OJK.

HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Hasil penilaian *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2019 Mandiri Syariah, untuk aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi mendapat peringkat 1.

Penilaian Kinerja Komite Di Bawah Direksi dan Dasar Penilaiannya

Dalam melaksanaan tugas kepengurusannya, Direksi juga dibantu oleh Komite di bawah Direksi atau disebut juga Komite Eksekutif sebanyak 7 (tujuh) Komite, yaitu:

1. Komite Manajemen Risiko
2. *IT Steering Committee*
3. Komite *Policy and Procedure*
4. Komite Bisnis
5. Komite Pembiayaan/Penanganan Pembiayaan Bermasalah
6. Komite Sumber Daya Manusia
7. Komite Asset dan Liabilities/*Asset and Liability Committee* (ALCo)

Selama tahun 2019, Direksi menilai bahwa komite-komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Komite Manajemen Risiko merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi penerapan manajemen risiko secara berkala/insidentil karena perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko. Selama tahun 2019, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan 7 (tujuh) kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

IT Steering Committee (ISC) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam penetapan *IT strategic plan* dan *IT budgeting*, penetapan proyek *IT strategic* dan pengamanan IT, dengan susunan keanggotaan, tugas, kewenangan dan tanggung jawab serta untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku. Selama tahun 2019, *IT Steering Committee* telah melaksanakan 2 (dua) kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Komite *Policy and Procedure* merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam merekomendasikan/menetapkan kebijakan dan prosedur di luar kebijakan manajemen risiko dan pemutahirannya yang akan diterbitkan. Selama tahun 2019, Komite Kebijakan dan Prosedur telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Komite Bisnis merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam fungsi bisnis termasuk *marketing, relationship management* berdasarkan target *market/targeted customer* yang telah ditetapkan dan melakukan analisa serta pemutusan. Selama tahun 2019, telah melaksanakan 7 (tujuh) kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Komite Kebijakan Pembiayaan/Penanganan Pembiayaan Bermasalah merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam membahas penyusunan Kebijakan Pembiayaan, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan Selama tahun 2019, Komite Kebijakan Pembiayaan/Penanganan Pembiayaan Bermasalah telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Human Capital Policy Committee merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam memastikan penerapan Kebijakan *Human Capital* dilaksanakan secara optimal serta sesuai dengan arah dan strategi perusahaan. Selama tahun 2019, *Human Capital Policy Committee* telah melaksanakan 21 (dua puluh satu) kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Asset and Libility Committee (ALCO) merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam memastikan pencapaian tingkat profitabilitas yang optimum serta risiko likuiditas yang terkendali, melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas (*assets and liabilities management*). Selama tahun 2019, *Asset and Libility Committee* (ALCO) telah melaksanakan 18 (delapan belas) kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangan 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
pengunduran dirinya.
Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

1. Jangka waktu jabatannya berakhir.
2. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
3. Mengundurkan diri.
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
5. Meninggal dunia.
6. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Organ dan Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Dalam melakukan pengawasannya Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Pemantau Risiko.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Mandiri Syariah memiliki Sekretaris Dewan Komisaris (Sekdekom) yang diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris Mandiri Syariah bertugas untuk melaksanakan tugas kesekretariatan dari Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

1. Sekretaris Dewan Komisaris berkewajiban untuk:
   a. Membantu Dewan Komisaris dalam menjaga agar pelaksanaan tata tertib Komisaris secara teknis dapat dilakukan secara tertib.
   b. Menyiapkan risalah rapat untuk disahkan dalam rapat berikutnya.
   c. Menyiapkan Laporan tentang pelaksanaan keputusan rapat untuk dikaji dalam rapat berikutnya.
2. Sekretaris Dewan Komisaris berkewajiban untuk:
   a. Menyiapkan undangan rapat kepada selurh peserta untuk ditandatangani oleh Komisaris Utama atau salah seorang Komisaris lainnya.
   b. Menyiapkan sarana prasarana yang dibuthkn dalam rapat.
   c. Mendistribusikan bahan rapat kepada selurh peserta rapat.
   d. Mencatat dan mengadministrasikan keputusan rapat.

e. Menyimpan konsep risalah rapat.
f. Menjaga kerahasiaan keputusan rapat sampai dengan keputusan diumumkan.
g. Menyampaikan risalah rapat kepada seluruh anggota rapat dan pejabat lain yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris.
h. Membuat catatan dan memonitor tindak lanjut perkembangan pelaksanaan keputusan-keputusan rapat serta melaporkan tindak lanjut tersebut kepada Dewan Komisaris.

3. Sekretaris Dewan Komisaris berkewajiban menjaga keamanan seluruh dokumen rapat, terutama yang bersifat rahasia.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris saat ini dijabat oleh Bapak Nana Suryana.

Nana Suryana
Sekretaris Dewan Komisaris

Domisili
Jakarta

Usia
35 tahun

Tempat, Tanggal Lahir
Jakarta, 6 Mei 1984

Riwayat Pendidikan
S1 Akuntansi, Universitas Nasional, 2005

Riwayat Jabatan
- Officer Kajian Kepatuhan Unit kerja Compliance periode 2011-2012.
- Officer Kepatuhan Kantor Pusat periode 2010-2011.
- Officer Kepatuhan Kantor Cabang periode 2009-2010.
- Unit kerja SKAI sebagai Auditor periode 2007-2009.

Dasar Pengangkatan
Surat Penugasan Tanggal 1 Desember 2012

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Sekretaris Dewan Komisaris selama tahun 2019, sebagai berikut:

Tabel Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

No	Tanggal	Tempat	Acara/Kegiatan	Tema/Topik	Penyelenggara/ PIC
1	27 April 2019	Student Lounge Pascasarjana UMY Lt. 3. Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta	UMY Business Summit 2019	Strategi Harmonisasi Idealisme Usaha dan Nilai-Nilai Spiritual Perbankan Syariah	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)
2	24 Juli 2019	Teater 2 Lt. 2 Gd. 1 FEB UIN, Jl. Ir. H. DJuanda, Tangsel, Banten	Seminar Nasional UIN	Mencari Alternatif Baru Strategi Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia dalam Menghadapi Persaingan Global	Universitas Islam Negeri (UIN)
3	27 Agustus 2019	Shangri-La Hotel, Jakarta	IFN Indonesia Forum 2019	Unlocking the Future of Islamic Finance	RedMoney

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas Sekretaris Dewan Komisaris di tahun 2019, adalah sebagai berikut:

1. Mengusulkan materi pembahasan rapat-rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan SEVP;
2. Memastikan tersedianya materi rapat Dewan Komisaris;
3. Membuat notulensi rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan SEVP;
4. Menindaklanjuti hasil rapat dan disposisi Dewan Komisaris atas dokumen-dokumen masuk yang ditujukan kepada Dewan Komisaris;
5. Membuat materi presentasi Dewan Komisaris baik untuk disampaikan kepada internal maupun external Mandiri Syariah;
6. Membuat laporan-laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain Laporan pengawasan rencana bisnis bank oleh Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun dan Laporan Implementasi GCG;
7. Membuat surat-surat Dewan Komisaris yang ditujukan baik kepada Direksi maupun kepada Pemegang Saham, dan sebagainya.

Komite Audit

Komite Audit membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Bank, terutama dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal (*Internal Control System*), serta efektivitas pemeriksaan oleh internal dan auditor eksternal.

Dasar Pembentukan Komite Audit

Dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank Umum Syariah sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tanggal 9 Desember 2009, Dewan Komisaris Mandiri Syariah telah membentuk Komite Audit untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

a. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dan ekstern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern (*internal control system*) termasuk kecukupan dalam proses pembuatan laporan keuangan.
   Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Komite melakukan evaluasi terhadap:
   - Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi/ unit audit intern.
   - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Pengawas Syariah, Auditor intern dan/atau Auditor ekstern.
b. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan audit oleh fungsi/unit audit intern terhadap penerapan sistem pengendalian intern pada setiap jenjang, unit kerja, produk, aktivitas dan/atau transaksi sesuai *best practices* dan/atau ketentuan yang berlaku.
c. Mempelajari dan memastikan bahwa proses pemilihan Kantor Akuntan Publik telah dilaksanakan sesuai prosedur dan/atau ketentuan yang berlaku.
d. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
e. Melakukan koordinasi dengan pihak intern Bank dan ekstern, termasuk Kantor Akuntan Publik dalam rangka mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit ekstern.

Piagam Komite Audit

Komite Audit memiliki Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Mandiri Syariah No.18/002-SKB/KOM.DIR tanggal 1 November 2016. Piagam Komite Audit menjadi acuan Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya secara efektif. Piagam Komite Audit merupakan pedoman dan tata tertib kerja bagi Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif atas penerapan pengendalian internal dan manajemen risiko sesuai prinsip GCG dan prinsip Syariah di Bank.

Isi Piagam Komite Audit antara lain:

I Pendahuluan
II Definisi, Maksud dan Tujuan
III Struktur dan Keanggotaan Komite
IV Benturan Kepentingan
V Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Komite
VI Rapat Komite
VII Masa Tugas dan Remunerasi Anggota Komite
VIII Kerahasiaan
IX Perubahan
X Penutup

Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit berwenang untuk:
1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai efektivitas pengendalian internal, laporan keuangan dan hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian dan/atau disampaikan kepada Direksi.
2. Meminta laporan hasil pemeriksaan oleh Internal Auditor, Eksternal Auditor dan institusi pengawas/ pemeriksa lainnya.
3. Meminta kepada Internal Auditor dan/atau Eksternal Auditor untuk melakukan pemeriksaan/investigasi khusus, apabila terdapat dugaan kuat adanya kecurangan, pelanggaran hukum dan/atau peraturan/ ketentuan yang berlaku.
4. Mengakses data, catatan dan informasi tentang Bank dan/atau karyawan Bank termasuk dana, asset serta sumber daya lainnya yang berkaitan dengan Bank dan/ atau karyawan.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Susunan dan Persyaratan keanggotaan Komite Audit, paling kurang terdiri dari:
- Seorang Komisaris Independen.
- Seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan.
- Seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan Syariah.

PERIODE 1 JANUARI - 14 JANUARI 2019

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Mulya Siregar	Ketua	Komisaris Utama/Komisaris Independen	– Ekonomi – Perbankan
Bambang Widianto	Anggota	Komisaris Independen	– Ekonomi – Perbankan – SDM
Dimas Oky Nugroho*	Anggota	Komisaris Independen	– Ilmu Politik – Perbankan
Djoko Seno Adji	Anggota	Pihak Independen	– Akuntansi – Perbankan
Kayim Hanuri****	Anggota	Pihak Independen	Perbankan

PERIODE 15 JANUARI - 15 FEBRUARI 2019

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Mulya Siregar	Ketua	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	– Ekonomi – Perbankan
Bambang Widianto	Anggota	Komisaris Independen	– Ekonomi – Perbankan – SDM
Dimas Oky Nugroho*	Anggota	Komisaris Independen	– Ilmu Politik – Perbankan
Dikdik Yustandi**	Anggota	Komisaris	– Manajemen – Perbankan
Djoko Seno Adji	Anggota	Pihak Independen	– Akuntansi – Perbankan
Kayim Hanuri****	Anggota	Pihak Independen	Perbankan

PERIODE 15 FEBRUARI - 15 APRIL 2019

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Mulya Siregar	Ketua	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	– Ekonomi – Perbankan
Bambang Widianto	Anggota	Komisaris Independen	– Ekonomi – Perbankan – SDM
Dimas Oky Nugroho*	Anggota	Komisaris Independen	– Ilmu Politik – Perbankan
Dikdik Yustandi**	Anggota	Komisaris	– Manajemen – Perbankan
Agus Sudiarto***	Anggota	Komisaris	– Hukum – Manajemen
Djoko Seno Adji	Anggota	Pihak Independen	– Akuntansi – Perbankan
Saifuddin Latief*****	Anggota	Pihak Independen	– Perbankan – Manajemen

PERIODE 16 APRIL - 1 OKTOBER 2019

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Mulya Siregar	Ketua	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	– Ekonomi – Perbankan
Bambang Widianto	Anggota	Komisaris Independen	– Ekonomi – Perbankan – SDM
Dimas Oky Nugroho*	Anggota	Komisaris Independen	– Ilmu Politik – Perbankan
Agus Sudiarto***	Anggota	Komisaris	– Hukum – Manajemen
Djoko Seno Adji	Anggota	Pihak Independen	– Akuntansi – Perbankan
Saifuddin Latief*****	Anggota	Pihak Independen	– Perbankan – Manajemen

PERIODE 2 OKTOBER - 14 OKTOBER 2019

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Mulya Siregar	Ketua	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	– Ekonomi – Perbankan
Bambang Widianto	Anggota	Komisaris Independen	– Ekonomi – Perbankan – SDM
Dimas Oky Nugroho*	Anggota	Komisaris Independen	– Ilmu Politik – Perbankan

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Djoko Seno Adji	Anggota	Pihak Independen	– Akuntansi – Perbankan
Saifuddin Latief*****	Anggota	Pihak Independen	– Perbankan – Manajemen

PERIODE 14 OKTOBER - 31 DESEMBER 2019

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Mulya Siregar	Ketua	Komisaris Utama/Komisaris Independen	– Ekonomi – Perbankan
Bambang Widianto	Anggota	Komisaris Independen	– Ekonomi – Perbankan – SDM
Djoko Seno Adji	Anggota	Pihak Independen	– Akuntansi – Perbankan
Saifuddin Latief	Anggota	Pihak Independen	– Perbankan – Manajemen

Terdapat perubahan susunan keanggotaan Komite Audit pada tahun 2019, disebabkan sebagai berikut:

*) Dimas Oky Nugroho, masa tugas sebagai Komisaris Independen Mandiri Syariah yaitu sejak 12 Maret 2018 sampai dengan 14 Oktober 2019. Berakhir masa jabatannya sebagai Komisaris Independen sebagaimana tercantum dalam Akta No. 55 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri.

**) Dikdik Yustandi, masa tugas sebagai Komisaris Mandiri Syariah yaitu sejak 15 Januari 2019 sampai dengan 15 April 2019. Berakhir masa jabatannya sebagai Komisaris dikarenakan beliau diangkat sebagai Direktur Pelaksana di Lembaga Pembiayaan Export Indonesia (LPEI).

***) Agus Sudiarto, masa tugas sebagai Komisaris Mandiri Syariah yaitu sejak 27 Maret 2019 sampai dengan 1 Oktober 2019. Berakhir masa jabatannya sebagai Komisaris dikarenakan beliau diangkat sebagai Direktur di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

****) Kayim Hanuri, berakhir masa kerjanya sebagai anggota Komite Audit dari Pihak Independen pada tanggal 15 Februari 2019.

*****) Saifuddin Latief, memulai masa kerjanya sebagai anggota Komite Audit dari Pihak Independen sejak tanggal 15 Februari 2019

Profil Komite Audit

Profil Komite Audit per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

Mulya Effendi Siregar
Ketua Komite Audit

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris

Bambang Widianto
Anggota Komite Audit

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris

Djoko Seno Adji
Anggota Komite Audit

Domisili
Bogor

Usia
60 tahun

Tempat, Tanggal Lahir
Bogor, 27 Mei 1959

Riwayat Pendidikan
Akademi Akuntansi Indonesia Jakarta (D3), Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Muhammadiyah Jakarta (S1), Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta (S1 - *Extention*). Sertifikasi yang dimiliki: *Qualified Internal Auditor* (QIA), Sertifikasi Kompentensi Level I pada Bidang Manajemen Risiko Perbankan, Sertifikasi Kompentensi *Auditor* (*Level Senior Auditor*)

Riwayat Jabatan
- Pegawai Bank Exim Cabang Jakarta Gambir (1981-1988).
- *Internal Auditor* Bank Exim (1989-1999).
- *Internal Auditor* Bank Mandiri (2000-2015).

Periode Jabatan
- Periode I : 1 Juli 2016 - 1 Juli 2017
- Periode II : 1 Juli 2017 - 1 Juli 2018
- Periode III : 1 Juli 2018 - 1 Juli 2019
- Periode IV : 1 Juli 2019 - 1 Juli 2020

Saifuddin Latief
Anggota Komite Audit

Domisili
Jakarta

Usia
61 tahun

Tempat, Tanggal Lahir
Kudus, 17 Maret 1958

Riwayat Pendidikan
Sarjana Kehutanan, dari Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (1981). Magister Management dari STIE – IPWI, Jakarta (1997).

Riwayat Jabatan
- Staf Direktorat Perlindungan dan Pelestarian Alam (PPA), Direktorat Jendral Kehutanan, Departemen Pertanian (1981-1982).
- Staf Biro Pemasaran PT Inhutani I (Persero), (1982-1983).
- *Account Manager/Senior Account Manager* di Urusan Kredit Perkebunan dan Kehutanan, Bank Bumi Daya Kantor Pusat, (1983-1990).
- *Loan Administration Supervisor, Accounting & Information Processing Supervisor dan Loan Recovery Supervisor*, Bank Bumi Daya Cabang Jakarta Kebayoran Falatehan (1991-1995).
- Wakil Pemimpin Bagian/Pemimpin Bagian, Kredit Perkebunan & Kehutanan, Urusan Korporasi,Bank Bumi Daya Kantor Pusat (1996-1999).
- *Senior Manager* di *Department Management & Administration, Directorate Corporate Banking*, PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Pusat (1999-2003).
- *Department Head Credit Analys* dan *Department Head Relationship Management*, di *Directorate Corporate Banking*, PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Pusat (2003-2009).
- *Department Head Wholesale & Treasury Banking School, Learning Center Group, Directorate Compliance & Human Capital*, PT Bank Mandiri (Persero), Kantor Pusat (2009-2014).
- Konsultan PT Primakelola Agrobisnis Agroindustri, Bogor (2014).
- Sekretaris merangkap sebagai Mediator Tetap di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), (2015-2019).
- Komisaris PT Estika Yasakelola (2015 – sekarang).

Periode Jabatan
Periode I : 15 Februari 2019 -15 Februari 2020

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Per 31 Desember 2019, kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Mulya Siregar	Ketua	- Sarjana bidang Sosial Ekonomi Pertanian - *Magister of Science-Agricultural Economics* - *Doctor of Philosophy*	Memiliki pengalaman kerja di perbankan syariah.
Bambang Widianto	Anggota	- Sarjana bidang Teknik Industri - *Master of Art* (MA) bidang *Computer Science* - Ilmu Ekonomi - Philosophiae Doctor (Ph.D) bidang Ilmu Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan dan pendidikan.
Djoko Seno Adji	Anggota	- DIII Akuntansi - Sarjana di bidang Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan audit internal.
Saifuddin Latief	Anggota	- Sarjana di bidang Kehutanan - Magister bidang Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.

Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

Tabel Independensi Komite Audit

Aspek Independensi	Mulya Effendi Siregar	Bambang Widianto	Dikdik Yustandi	Dimas Oky Nugroho	Agus Sudiarto	Djoko Seno Adji	Kayim Hanuri	Safiuddin Latief
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√	√

Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit diselenggarakan sekurang-kuranganya 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun. Rapat Komite dianggap sah apabila dihadiri paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota trmasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan secara *voting* berdasarkan suara terbanyak.

AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2019, tanggal pelaksanaan, Agenda rapat dan Peserta rapat Komite Audit, sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Audit

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	10 Januari 2019	Progres Pengembangan *Information Technology* (termasuk *Digital Banking*).	Mulya Siregar Bambang Widianto Djoko Seno Adji Kayim Hanur
2	10 Januari 2019	Hasil Audit Laporan Keuangan PT Bank Syariah Mandiri.	Mulya Siregar Bambang Widianto Djoko Seno Adji Kayim Hanur
3	24 Januari 2019	Realisasi Hasil Pemeriksaan Internal Audit (IAG) periode November sampai dengan Desember 2018.	Mulya Siregar Djoko Seno Adji Kayim Hanuri
4	28 Maret 2019	Laporan Realisasi Hasil Audit dan *Top Letters* IAG Periode Januari sampai dengan Februari 2019.	Mulya Siregar Bambang Widianto Dimas Oky Nugroho Dikdik Yustandi Djoko Seno Adji Saifuddin Latief
5	28 Maret 2019	*Annual Audit Plan* Tahun 2019	Mulya Siregar Bambang Widianto Dimas Oky Nugroho Dikdik Yustandi Djoko Seno Adji Saifuddin Latief
6	25 April 2019	Progres Pengembangan *Information Technology*/IT (termasuk *Digital Banking*).	Mulya Siregar Bambang Widianto Djoko Seno Adji Saifuddin Latief
7	1 Agustus 2019	Progres Pengembangan *Information Technology*/IT (termasuk *Digital Banking* dan Mitigasi *Operational Risk* terkait IT).	Mulya Siregar Djoko Seno Adji Saifuddin Latief
8	8 Agustus 2019	Realisasi Hasil Pemeriksaan Internal Audit Group (IAG) Periode Maret sampai dengan Juni 2019.	Mulya Siregar Agus Sudiarto Djoko Seno Adji Saifuddin Latief
9	26 September 2019	*Entrance Meeting* Audit Laporan Keuangan PT BSM Posisi 31 Juli 2019 dan 31 Desember 2019 oleh PWC.	Mulya Siregar Djoko Seno Adji Saifuddin Latief
10	3 Oktober 2019	Realisasi Hasil Pemeriksaan Internal Audit *Group* (IAG) Periode Juli sampai dengan Agustus 2019.	Mulya Siregar Bambang Widianto Djoko Seno Adji Saifuddin Latief
11	9 Oktober 2019	Progres Pengembangan *Information Technology*/IT (termasuk *Digital Banking*).	Mulya Siregar Djoko Seno Adji Saifuddin Latief
12	15 Oktober 2019	Presentasi Hasil Audit Laporan Keuangan PT BSM Posisi 31 Juli 2019 oleh PwC.	Mulya Siregar Bambang Widianto Djoko Seno Adji
13	19 Desember 2019	*Hard Close* Audit Laporan Keuangan BSM posisi 30 November 2019.	Mulya Siregar Bambang Widianto Djoko Seno Adji Saifuddin Latief

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT

Selama tahun 2019, Komite Audit telah menyelenggarakan rapat Komite Audit sebanyak 13 (tiga belas) kali. Adapun frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Audit adalah sebagai berikut.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Rapat	Persentase
Mulya Siregar	Ketua	13	13	100%
Bambang Widianto	Anggota	13	8	62%
Dimas Oky Nugroho*	Anggota	11	2	18%
Dikdik Yustandi**	Anggota	3	2	67%
Agus Sudiarto***	Anggota	6	1	17%
Djoko Seno Adji	Anggota	13	13	100%
Kayim Hanuri****	Anggota	3	3	100%
Saifuddin Latief*****	Anggota	10	9	90%

*) Masa tugas sebagai Komisaris Independen Mandiri Syariah berakhir sejak tanggal 14 Oktober 2019.
**) Masa tugas sebagai Komisaris Mandiri Syariah berakhir sejak tanggal 15 April 2019.
***) Masa tugas sebagai Komisaris Mandiri Syariah berakhir sejak tanggal 1 Oktober 2019.
****)Berakhir masa kerjanya sebagai anggota Komite Audit dari Pihak Independen pada tanggal 15 Februari 2019.
*****)Memulai masa kerjanya sebagai anggota Komite Audit dari Pihak Independen sejak tanggal 15 Februari 2019.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2019

Selama tahun 2019, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku, mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Pelaksanaan Kajian (*Review)*
Selama tahun 2019, Komite Pemantau Risiko telah membuat sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kertas kerja berupa Kajian, Laporan, dan Usulan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Agenda Pembahasan	Jumlah
1.	*Review* atas Laporan Pos-Pos Tertentu PT Bank Syariah Mandiri periode 31 Desember 2018 s.d. 30 November 2019	12
2.	Hasil Penelaahan Realisasi Audit *Top Letters* IAG Periode November 2018 s.d. 30 November 2019	11
3.	Hasil Penelaahan atas Laporan Keuangan Publikasi PT Bank Syariah Mandiri posisi 31 Desember 2018; 31 Maret 2019; 30 Juni 2019 dan 30 September 2019	4
4.	Laporan Kegiatan Komite Audit Periode Januari s.d. Desember 2018.	1
5.	Rekomendasi Usulan Penunjukan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri Tahun Buku 2019	1
6.	*Review* atas Nilai Rasio PDN pada Laporan Keuangan Publikasi PT Bank Syariah Mandiri posisi 31 Maret 2019	1
7.	*Review* Hasil Negosiasi Honorarium Jasa Audit Laporan Keuangan Publikasi PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2019	1
8.	*Review* Permohonan Persetujuan Revisi Kebijakan Intern Audit PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2019	1
9.	Usulan atas permohonan masukan dan ekspektasi Dewan Komisaris dalam rangka penyusunan *Annual Audit Plan* (AAP) Tahun 2020	1
10.	Laporan Perselisihan antara PT Bank Syariah Mandiri dengan pegawai atas nama Agus Bintoro	1
11.	*Review* terhadap Permohonan Persetujuan atas Tindak Lanjut Proses Balik Nama Sertifikat Tanah BSM Pekalongan karena Inbreng	1
12.	Laporan Seminar Penerbitan Buku Syariah di Surabaya	1
13.	Masukan kepada Dewan Komisaris terhadap penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan KAP PWC untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018	1
14.	Usulan atas permohonan masukan dan ekseptasi Dewan Komisaris untuk menjadi masukan Ruang Lingkup Audit SKAI Bank Mandiri Tahun 2020	1
	Total	**38**

Komite Remunerasi dan Nominasi

Dasar Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Dewan Komisaris Mandiri Syariah telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pembentukan tersebut berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan Direksi serta ditetapkan oleh Direksi dengan menerbitkan Surat Keputusan Direksi No 20/41-KEP/DIR tanggal 30 Januari 2018 tentang Penetapan Susuan Keanggotaan Komite-Komite PT Bank Syariah Mandiri.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Remunerasi dan Nominasi Mandiri Syariah telah mengacu pada pedoman dan tata tertib kerja berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No.16/002-SKB/KOM-DIR tanggal 08 Desember 2014 tentang Penetapan Revisi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Syariah Mandiri.
Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi berisi:

I Latar Belakang
II Definisi
III Tujuan
IV Fungsi, Wewenang, Tugas dan tanggung Jawab
V Keanggotaan dan Tata Tertib
VI Sistem Nominasi dan Remunerasi
VII Penutup

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan kebijakan nominasi:
   a. Terkait dengan kebijakan remunerasi:
      - Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
      - Melakukan evaluasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
      - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
   b. Terkait dengan kebijakan nominasi:
      - Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.
      - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.
      - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
2. Menyusun konsep dan Analisa yang berhubungan dengan fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi.
3. Membantu Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
4. Membantu Dewan Komisaris dalam penetapan kebijakan umum Sumber Daya Insani.
5. Merekomendasikan persetujuan perubahan struktur organisasi sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi.
6. Membantu Dewan Komisaris memperoleh dan menganalisa data bakal calon Direksi dari *talent pool* pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
7. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang opsi kepada Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai, antara lain opsi saham serta pengawasan pelaksanaannya.
8. Memiliki *database* dan *talent pool* calon-calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki wewenang untuk:

1. Meminta Mandiri Syariah untuk melakukan *survey* sesuai kebutuhan Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Meminta informasi hal-hal yang diperlukan dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal Mandiri Syariah.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi Mandiri Syariah telah memenuhi susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi yang diwajibkan oleh Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 yaitu paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif Bank yang membawahi sumber daya manusia.

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut:

PERIODE 1 JANUARI - 30 APRIL 2019

No	Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
1	Bambang Widianto	Ketua	Komisaris Independen	– Ekonomi – Perbankan – SDM
2	Mulya Effendi Siregar	Anggota	Komisaris Utama/Komisaris Independen	– Ekonomi – Perbankan
3	Dimas Oky Nugroho	Anggota	Komisaris	– Ilmu Politik – Perbankan
4	Dikdik Yustandi*	Anggota	Komisaris	– Manajemen – Perbankan
5	Adam Armansyah	Sekretaris dan *Non Voting Member*	Group Head Human Capital Policy	– Manajemen – Human Capital

*) Berakhir masa jabatan sebagai Komisaris Mandiri Syariah pada tanggal 15 April 2019.

PERIODE 1 MEI - 31 DESEMBER 2019

No	Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
1	Bambang Widianto	Ketua	Komisaris Independen	– Ekonomi – Perbankan – SDM
2	Mulya Effendi Siregar	Anggota	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	– Ekonomi – Perbankan
3	Dimas Oky Nugroho*	Anggota	Komisaris	– Ilmu Politik – Perbankan
4	Agus Sudiarto**	Anggota	Komisaris	– Hukum – Manajemen
5	Adam Armansyah	Sekretaris dan *Non Voting Member*	Group Head Human Capital Policy	– Manajemen – Human Capital

*) Berakhir masa jabatan sebagai Komisaris Independen Mandiri Syariah pada tanggal 14 Oktober 2019.

**)Berakhir masa jabatan sebagai Komisaris Mandiri Syariah pada tanggal 1 Oktober 2019.

Terdapat perubahan susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 1 Mei 2019, sebagai tindak lanjut hasil keputusan RUPS Tahunan Mandiri Syariah tahun buku 2018 dan Keputusan di luar RUPS Mandiri Syariah khususnya terkait persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris.

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

Bambang Widianto
Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris

Mulya Effendi Siregar
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris

Adam Armansyah
Komite Remunerasi dan Nominasi

Domisili
Jakarta

Usia
47 tahun

Tempat, Tanggal Lahir
Jakarta, 10 November 1972

Riwayat Pendidikan
Sarjana bidang Manajemen Pemasaran, Universitas Indonesia (1996), *Master Degree* (MBA) Waseda *University* (2014)

Riwayat Jabatan
- Human Capital Policy Group Head (2019-2020)

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Per 31 Desember 2019, kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Bambang Widianto	Ketua	- Sarjana bidang Teknik Industri - *Master of Art* (MA) bidang *Computer Science* - Ilmu Ekonomi Philosophiae Doctor (Ph.D) bidang Ilmu Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan dan pendidikan.
Mulya Effendi Siregar	Anggota	- Sarjana bidang Sosial Ekonomi Pertanian - *Magister of Science-Agricultural Economics* - *Doctor of Philosophy*	Memiliki pengalaman kerja di perbankan syariah.
Adam Armansyah	Sekretaris	Sarjana bidang Manajemen Pemasaran Master Degree (MBA)	Memiliki pengalaman kerja di perbankan.

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Tabel Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Aspek Independensi	Bambang Widianto	Mulya Effendi Siregar	Dikdik Yustandi	Dimas Oky Nugroho	Agus Sudiarto	Adam Armansyah
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan sesuai kebutuhan dan penugasan dari Dewan Komisaris, sekurang-kuranganya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan pejabat Human Capital Bank Mandiri.

AGENDA RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Sepanjang tahun 2019, tanggal pelaksanaan, Agenda rapat dan Peserta rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	4 Februari 2019	Usulan Remunerasi Pengurus 2019	Mulya Effendi Siregar Bambang Widianto Dimas Oky Nugroho Dikdik Yustandi
2.	6 Februari 2019	Usulan Perubahan Susunan Pengurus PT Bank Syariah Mandiri	Mulya Effendi Siregar Bambang Widianto Dimas Oky Nugroho Dikdik Yustandi
3.	15 Februari 2019	Rekomendasi Perubahan Susunan Pengurus PT Bank Syariah Mandiri	Mulya Effendi Siregar Bambang Widianto Dimas Oky Nugroho Dikdik Yustandi
4.	21 Maret 2019	Rekomendasi Perubahan Susunan Pengurus PT Bank Syariah Mandiri	Mulya Effendi Siregar Bambang Widianto Dimas Oky Nugroho Dikdik Yustandi
5.	1 Agustus 2019	Perubahan Susunan Pengurus PT Bank Syariah Mandiri	Mulya Effendi Siregar Bambang Widianto Dimas Oky Nugroho Agus Sudiarto
6.	3 Oktober 2019	Rekomendasi Perubahan Susunan Pengurus PT Bank Syariah Mandiri	Mulya Effendi Siregar Bambang Widianto Dimas Oky Nugroho
7.	10 Oktober 2019	Usulan Penambahan Anggota Dewan Komisaris PT Bank Syariah Mandiri & Tindak Lanjut Temuan OJK serta Implementasi *Material Risk Taker*/MRT	Mulya Effendi Siregar Bambang Widianto Dimas Oky Nugroho

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Selama tahun 2019, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyelenggarakan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 7 (tujuh) kali. Adapun frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Total Rapat	Jumlah Rapat	Persentase
Bambang Widianto	Ketua	7	7	100%
Mulya Effendi Siregar	Anggota	7	7	100%
Dikdik Yustandi*	Anggota	4	4	100%
Dimas Oky Nugroho**	Anggota	3	3	100%
Agus Sudiarto***	Anggota	3	3	100%

*Berakhir masa jabatan sebagai Komisaris Mandiri Syariah pada tanggal 15 April 2019.
**Berakhir masa jabatan sebagai Komisaris Independen Mandiri Syariah pada tanggal 14 Oktober 2019.
***Berakhir masa jabatan sebagai Komisaris Mandiri Syariah pada tanggal 1 Oktober 2019.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2019

Pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi di tahun 2019, antara lain:
1. Pengusulan Remunerasi Pengurus Perseroan.
2. Usulan Perubahan Pengurus Mandiri Syariah.
3. Menindaklanjuti temuan OJK serta Implementasi Material Risk Taker (MRT).

Kebijakan Suksesi Direksi

Salah satu tugas dari Komite Remunerasi dan Nominasi adalah menyusun suatu sistem nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang akan menjadi bagian dari kebijakan GCG dari Bank serta akan menjadi pedoman Dewan Komisaris dan RUPS dalam menetapkan nominasi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas.

Prinsip Dasar
1. Persyaratan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah
   Calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencalonan dan Pengajual calon Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan pengawas Syariah
   Calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan pengawas Syariah diajukan melalui seleksi dengan memperhatikan persyaratan yang telah ditetapkan.

Prosedur Seleksi
1. Komite Remunerasi dan Nominasi mengidentifikasi calon yang memenuhi kriteria.
2. Dewan Komisaris atas dasar saran dari Komite Remunerasi dan Nominasi menyapaikan usulan calon Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan pengawas Syariah kepada RUPS.
3. Pelaksanaan seleksi dilaksanakan sebelum masa jabatan berakhir atau diminta Dewan Komisaris atau bila ada kekosongan jabatan.

Komite Pemantau Risiko

Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009, Dewan Komisaris Mandiri Syariah telah membentuk Komite Pemantau Risiko dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Pembentukan tersebut berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan Direksi serta ditetapkan oleh Direksi dengan menerbitkan Surat Keputusan Direksi No 20/41-KEP/DIR tanggal 30 Januari 2018 tentang Penetapan Susuan Keanggotaan Komite-Komite PT Bank Syariah Mandiri.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Mandiri Syariah No. 18/002-SKB/KOM.DIR tanggal 1 November 2016 telah ditetapkan Revisi Pedoman dan Tata Tertib (*Charter*) KPR, sebagai acuan KPR dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif atas penerapan Manajemen Risiko di Mandiri Syariah.

I. Pendahuluan
II. Definisi, Maksud dan Tujuanpr
III. Struktur dan Keanggotaan Komite
IV. Benturan Kepentingan
V. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Komite
VI. Rapat Komite
VII. Masa Tugas dan Remunerasi Anggota Komite
VIII. Kerahasiaan
IX. Perubahan
X. Penutup

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:
1. Secara proaktif melakukan diskusi/menyelenggarakan rapat dengan Direksi atau unit kerja terkait, untuk mengantisipasi adanya risiko atas sesuatu hal terkait kegiatan bisnis dan/atau operasional Bank yang menurut pertimbangan Dewan Komisaris perlu didiskusikan/ dirapatkan dalam Rapat Komite, terutama apabila ada peristiwa penting/*urgent* atau peraturan eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis dan/atau operasional Bank.
2. Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko Bank.
3. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko Bank dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
4. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
5. Melakukan evaluasi atas laporan-laporan internal Bank terkait pengendalian risiko.
6. Melakukan evaluasi terhadap perubahan struktur organisasi Bank sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko berwenang untuk:
1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite dalam rangka peningkatan efektivitas penerapan manajemen risiko di Bank.
2. Meminta laporan-laporan internal Bank yang terkait dengan pengendalian risiko di Bank.

3. Bekerjasama dengan Komite Audit baik secara umum maupun secara khusus, dapat meminta Internal Audit untuk melakukan pemeriksaan terhadap bidang-bidang tertentu yang eksposur risikonya memburuk.
4. Ketua dan anggota Komite dapat menghadiri rapat Komite Manajemen Risiko sebagai undangan.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

PERIODE 1 JANUARI - 14 JANUARI 2019

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Mulya E. Siregar	Ketua	Komisaris Utama/Komisaris Independen	• Ekonomi • Perbankan
Bambang Widianto	Anggota	Komisaris Independen	• Keuangan • Perbankan • SDM
Dimas Oky Nugroho	Anggota	Komisaris Independen	• Ilmu Politik • Perbankan
Hari Dewanto****	Anggota	Pihak Independen	• Ekonomi • Manajemen Risiko
Kayim Hanuri	Anggota	Pihak Independen	• Perbankan

PERIODE 15 JANUARI – 27 MARET 2019

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Mulya E. Siregar	Ketua	Komisaris Utama/Komisaris Independen	• Ekonomi • Perbankan
Bambang Widianto	Anggota	Komisaris Independen	• Keuangan • Perbankan • SDM
Dimas Oky Nugroho*	Anggota	Komisaris Independen	• Ilmu Politik • Perbankan
Dikdik Yustandi**	Anggota	Komisaris	• Manajemen • Perbankan
Hari Dewanto****	Anggota	Pihak Independen	• Ekonomi • Manajemen Risiko
Kayim Hanuri	Anggota	Pihak Independen	• Perbankan

PERIODE 27 MARET - 15 APRIL 2019

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Mulya E. Siregar	Ketua	Komisaris Utama/Komisaris Independen	• Ekonomi • Perbankan
Bambang Widianto	Anggota	Komisaris Independen	• Keuangan • Perbankan • SDM
Dimas Oky Nugroho*	Anggota	Komisaris Independen	• Ilmu Politik • Perbankan
Dikdik Yustandi**	Anggota	Komisaris	• Manajemen • Perbankan

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Agus Sudiarto***	Anggota	Komisaris	• Hukum • Manajemen
Hari Dewanto****	Anggota	Pihak Independen	• Ekonomi • Manajemen Risiko
Kayim Hanuri	Anggota	Pihak Independen	• Perbankan

PERIODE 16 APRIL 30 JUNI 2019

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Mulya E. Siregar	Ketua	Komisaris Utama/Komisaris Independen	• Ekonomi • Perbankan
Bambang Widianto	Anggota	Komisaris Inde-penden	• Keuangan • Perbankan • SDM
Dimas Oky Nugroho*	Anggota	Komisaris Inde-penden	• Ilmu Politik • Perbankan
Agus Sudiarto***	Anggota	Komisaris	• Hukum • Manajemen
Hari Dewanto****	Anggota	Pihak Independen	• Ekonomi • Manajemen Risiko
Kayim Hanuri	Anggota	Pihak Independen	• Perbankan

PERIODE 1 JULI - OKTOBER 2019

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Mulya E. Siregar	Ketua	Komisaris Utama/Komisaris Independen	• Ekonomi • Perbankan
Bambang Widianto	Anggota	Komisaris Inde-penden	• Keuangan • Perbankan • SDM
Dimas Oky Nugroho*	Anggota	Komisaris Inde-penden	• Ilmu Politik • Perbankan
Agus Sudiarto***	Anggota	Komisaris	• Hukum • Manajemen
Kayim Hanuri	Anggota	Pihak Independen	• Perbankan

PERIODE 2 OKTOBER - 14 OKTOBER 2019

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Mulya E. Siregar	Ketua	Komisaris Utama/Komisaris Independen	• Ekonomi • Perbankan
Bambang Widianto	Anggota	Komisaris Inde-penden	• Keuangan • Perbankan • SDM
Dimas Oky Nugroho*	Anggota	Komisaris Inde-penden	• Ilmu Politik • Perbankan
Kayim Hanuri	Anggota	Pihak Independen	• Perbankan

PERIODE 14 OKTOBER - 31 DESEMBER 2019

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Mulya E. Siregar	Ketua	Komisaris Utama/Komisaris Independen	• Ekonomi • Perbankan
Bambang Widianto	Anggota	Komisaris Inde-penden	• Keuangan • Perbankan • SDM
Kayim Hanuri	Anggota	Pihak Independen	• Perbankan

Terdapat perubahan susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko pada tahun 2019, disebabkan sebagai berikut:

*) Dimas Oky Nugroho, masa tugas sebagai Komisaris Independen Mandiri Syariah yaitu sejak 12 Maret 2018 s.d. 14 Oktober 2019. Berakhir masa jabatannya sebagai Komisaris Independen sebagaimana tercantum dalam Akta No. 55 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri.
**) Dikdik Yustandi, masa tugas sebagai Komisaris Mandiri Syariah yaitu sejak 15 Januari 2019 s.d. 15 April 2019. Berakhir masa jabatannya sebagai Komisaris dikarenakan ybs. diangkat sebagai Direktur Pelaksana di Lembaga Pembiayaan Export Indonesia (LPEI).
***) Agus Sudiarto, masa tugas sebagai Komisaris Mandiri Syariah yaitu sejak 27 Maret 2019 s.d. 1 Oktober 2019. Berakhir masa jabatannya sebagai Komisaris dikarenakan ybs. diangkat sebagai Direktur di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
****) Hari Dewanto, berakhir masa kerjanya sebagai anggota Komite Audit dari Pihak Independen pada tanggal 15 Februari 2019.

Profil Komite Pemantau Risiko

Profil Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

Mulya Effendi Siregar
Ketua Komite Pemantau Risiko

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris

Periode jabatan sebagai Komite Pemantau Risiko sama dengan periode jabatan sebagai Dewan Komisaris.

Bambang Widianto
Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris

Periode jabatan sebagai Komite Pemantau Risiko sama dengan periode jabatan sebagai Dewan Komisaris.

Kayim Hanuri
Anggota Komite Pemantau Risiko

Domisili
Jakarta

Tempat, Tanggal Lahir
Cirebon, 7 Desember 1958

Usia
61 tahun

Riwayat Pendidikan
Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1982 dan *Master of Science in Agricultural Economics* dari Texas A&M University, USA pada tahun 1992.

Riwayat Jabatan
- Bank Bumi Daya (BBD) sejak tahun 1983 dan ditempatkan di BBD Cabang Bandar Lampung dengan berbagai posisi s.d. tahun 1989.
- Pada tahun 1990 s.d. 1992 memperoleh beasiswa dari BBD untuk meneruskan pendidikan S2 sebagaimana tersebut di atas dan setelah menyelesaikan S2, ditugaskan *on the job training* di BBD New York Agency.
- Sejak tahun 1992 s.d. 1996, ditugaskan di Kantor Pusat Urusan Korporasi sebagai *Senior Account Manager*, selanjutnya sebagai Pemimpin Bagian Kredit Sindikasi pada Urusan yang sama sejak tahun 1997 s.d. 1998.
- Pada tahun 1998 ditugaskan sebagai anggota *Team Merger Corporate Banking* PT. Bank Mandiri (Persero) mewakili BBD.
- *Division Head of Corporate Banking-Structured Finance* pada tahun 1999-2000.
- *Division Head of Corporate Banking-Structured Finance, Trade Service & Cash Management* pada tahun 2000-2001.
- *Department Head of Syndication and Structured Finance* pada tahun 2001-2005.
- Regional *Risk Manager* – Wilayah I Medan (Aceh, Sumatera Utara, Batam) pada tahun 2006-2007.
- *Department Head of Credit Policy and Procedure* pada tahun 2007-2013,
- *Department Head of Business Process & System Reengineering* pada tahun 2013-2014.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Per 31 Desember 2019, kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Mulya Effendi Siregar	Ketua	- Sarjana bidang Sosial Ekonomi Pertanian - *Magister of Science-Agricultural Economics* - *Doctor of Philosophy*	Memiliki pengalaman kerja di perbankan syariah.
Bambang Widianto	Anggota	- Sarjana bidang Teknik Industri - *Master of Art* (MA) bidang *Computer Science* - Ilmu Ekonomi - Philosophiae Doctor (Ph.D) bidang Ilmu Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan dan pendidikan.
Kayim Hanuri	Anggota	- Sarjana Pertanian - Master of Science in Agricultural Economics	Memiliki pengalaman kerja di bidang Perbankan

Independensi Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko

Aspek Independensi	Mulya Effendi Siregar	Bambang Widianto	Dikdik Yustandi	Dimas Oky Nugroho	Agus Sudiarto	Djoko Seno Adji	Kayim Hanuri	Safiuddin Latief
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√	√

Rapat Komite Pemantau Risiko

Sebagaimana diatur dalam *Charter* Komite Pemantau Risiko, Rapat Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya 12 (dua belas) kali dalam setahun.

AGENDA RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Selama tahun 2019, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 40 (empat puluh) kali.

Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	24 Januari 2019	Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2018.	• Mulya E. Siregar • Hari Dewanto • Kayim Hanuri
2	31 Januari 2019	*Self Assesment* Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester II Tahun 2018.	• Mulya E. Siregar • Dimas Oky Nugroho • Hari Dewanto • Kayim Hanuri
3	31 Januari 2019	Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Triwulan IV Tahun 2018.	• Mulya E. Siregar • Dimas Oky Nugroho • Hari Dewanto • Kayim Hanuri
4	21 Februari 2019	Realisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Tahun 2018 dan Rencana Pengembangan SDM Tahun 2019.	• Mulya E. Siregar • Bambang Widianto • Dimas Oky Nugroho • Dikdik Yustandi • Hari Dewanto • Kayim Hanuri
5	21 Februari 2019	Mekanisme Perhitungan dan Strategi Peningkatan *Contribution Margin* dan Produktifitas SDM.	• Mulya E. Siregar • Bambang Widianto • Hari Dewanto • Kayim Hanuri

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
6	21 Februari 2019	Strategi Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Manusia.	• Mulya E. Siregar • Bambang Widianto • Hari Dewanto • Kayim Hanuri
7	28 Februari 2019	*Marketing Communication Strategy* 2019.	• Mulya E. Siregar • Bambang Widianto • Dikdik Yustandi • Hari Dewanto • Kayim Hanuri
8	28 Februari 2019	Kinerja Komite Manajemen Risiko Bank Syariah Mandiri Tahun 2018.	• Mulya E. Siregar • Bambang Widianto • Dikdik Yustandi • Hari Dewanto • Kayim Hanuri
9	28 Februari 2019	*Update* Kebijakan dan Prosedur PT Bank Syariah Mandiri.	• Mulya E. Siregar • Bambang Widianto • Dikdik Yustandi • Hari Dewanto • Kayim Hanuri
10	28 Maret 2019	Peningkatan Produktivitas *Distribution Channel*.	• Mulya E. Siregar • Bambang Widianto • Dimas Oky Nugroho • Dikdik Yustandi • Agus Sudiarto • Hari Dewanto • Kayim Hanuri
11	11 April 2019	Pembiayaan Segmen *Wholesale Banking.*	• Mulya E. Siregar • Bambang Widianto • Dimas Oky Nugroho • Dikdik Yustandi • Agus Sudiarto • Hari Dewanto • Kayim Hanuri
12	25 April 2019	*Progress* Penerbitan Produk dan Aktivitas Baru Tahun 2019.	• Mulya E. Siregar • Hari Dewanto • Kayim Hanuri
13	8 Mei 2019	Pembiayaan Segmen *Retail Banking*.	• Mulya E. Siregar • Bambang Widianto • Dimas Oky Nugroho • Agus Sudiarto • Hari Dewanto • Kayim Hanuri
14	9 Mei 2019	Laporan Kepatuhan Triwulan I Tahun 2019.	• Mulya E. Siregar • Agus Sudiarto • Hari Dewanto • Kayim Hanuri
15	9 Mei 2019	*Progress* Implementasi APU dan PPT sampai dengan 30 April 2019.	• Mulya E. Siregar • Agus Sudiarto • Hari Dewanto • Kayim Hanuri
16	29 Mei 2019	*Progress Collection & Recovery* Nasabah NPF dan *Write Off*.	• Mulya E. Siregar • Bambang Widianto • Dimas Oky Nugroho • Agus Sudiarto • Hari Dewanto • Kayim Hanuri

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
17	29 Mei 2019	*Progress* Kinerja *Institutional Banking* dan P*roduct & Transactional Banking*.	• Mulya E. Siregar • Dimas Oky Nugroho • Agus Sudiarto • Hari Dewanto • Kayim Hanuri
18	20 Juni 2019	*Progress* Implementasi *Marketing Communication* (Marcomm).	• Mulya E. Siregar • Bambang Widianto • Dimas Oky Nugroho • Hari Dewanto • Kayim Hanuri
19	20 Juni 2019	Strategi dan *Progres* Peningkatan CASA oleh Kantor Cabang Mandiri Syariah.	• Mulya E. Siregar • Bambang Widianto • Hari Dewanto • Kayim Hanuri
20	11 Juli 2019	Pembiayaan Segmen *Retail Banking*.	• Mulya E. Siregar • Bambang Widianto • Kayim Hanuri
21	11 Juli 2019	Pembiayaan Segmen *Wholesale Banking.*	• Mulya E. Siregar • Bambang Widianto • Kayim Hanuri
22	25 Juli 2019	Laporan Pelaksanaan Kepatuhan Periode Triwulan II 2019.	• Mulya E. Siregar • Bambang Widianto • Agus Sudiarto • Kayim Hanuri
23	25 Juli 2019	Laporan Tingkat Kesehatan Bank Per 30 Juni 2019.	• Mulya E. Siregar • Bambang Widianto • Agus Sudiarto • Kayim Hanuri
24	25 Juli 2019	Progres Rencana Aksi Korporasi Mandiri Syariah.	• Mulya E. Siregar • Bambang Widianto • Agus Sudiarto • Kayim Hanuri
25	1 Agustus 2019	Progres Implementasi *Human Capital Strategy.*	• Mulya E. Siregar • Kayim Hanuri
26	22 Agustus 2019	Progres Implementasi *Islamic Sector Solution*	• Mulya E. Siregar • Agus Sudiarto • Kayim Hanuri
27	29 Agustus 2019	Progres Pengelolaan *Operational Risk* (Implementasi *Control Testing* dan Perluasan Cakupan Implementasinya)	• Mulya E. Siregar • Bambang Widianto • Dimas Oky Nugroho • Agus Sudiarto • Kayim Hanuri

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
28	29 Agustus 2019	Progres Implementasi *Sustainable Finance* Mandiri Syariah.	• Mulya E. Siregar • Bambang Widianto • Kayim Hanuri
29	5 September 2019	Progres Implementasi *Corporate Plan* Mandiri Syariah.	• Mulya E. Siregar • Bambang Widianto • Dimas Oky Nugroho • Kayim Hanuri
30	12 September 2019	Pembiayaan Segmen *Retail Banking*.	• Mulya E. Siregar • Bambang Widianto • Kayim Hanuri
31	26 September 2019	Pembiayaan Segmen *Wholesale Banking*.	• Mulya E. Siregar • Kayim Hanuri
32	3 Oktober 2019	Pengelolaan Likuiditas Mandiri Syariah.	• Mulya E. Siregar • Kayim Hanuri
33	9 Oktober 2019	Progres Implementasi *Financing Factory*.	• Mulya E. Siregar • Kayim Hanuri
34	24 Oktober 2019	Progres Penerbitan Produk dan Aktivitas Baru tahun 2019.	• Mulya E. Siregar • Bambang Widianto • Kayim Hanuri
35	21 November 2019	Progres Implementasi APU dan PPT sampai dengan 31 Oktober 2019.	• Mulya E. Siregar • Bambang Widianto • Kayim Hanuri
36	21 November 2019	Laporan Kepatuhan Terintegrasi Q3 Tahun 2019	• Mulya E. Siregar • Bambang Widianto • Kayim Hanuri
37	27 November 2019	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2020	• Mulya E. Siregar • Kayim Hanuri
38	5 Desember 2019	Pembiayaan Segmen *Retail Banking*	• Mulya E. Siregar • Bambang Widianto • Kayim Hanuri
39	5 Desember 2019	Progres Implementasi Bank Kustodian dan Wali Amanat	• Mulya E. Siregar • Kayim Hanuri
40	12 Desember 2019	Pembiayaan Segmen *Wholesale Banking*	• Mulya E. Siregar • Bambang Widianto • Kayim Hanuri

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Adapun frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Total	Jumlah Rapat	Persentase
Mulya E. Siregar	Ketua	40	40	100%
Bambang Widianto	Anggota	40	26	65%
Dimas Oky Nugroho*	Anggota	33	9	28%
Dikdik Yustandi**	Anggota	11	5	45%
Agus Sudiarto***	Anggota	22	10	45%
Hari Dewanto****	Anggota	19	19	100%
Kayim Hanuri	Anggota	40	40	100%

*) Masa tugas sebagai Komisaris Independen berakhir sejak tanggal 22 Oktober 2019.
**) Masa tugas sebagai Komisaris berakhir sejak tanggal 15 April 2019.
***) Masa tugas sebagai Komisaris berakhir sejak tanggal 1 Oktober 2019.
****) Berakhir masa kerjanya sebagai anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen pada tanggal 30 Juni 2019.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2019

Selama tahun 2019, Komite Pemantau Risiko telah membuat sebanyak 21 (dua puluh satu) kertas kerja berupa Kajian, Laporan, dan Usulan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Agenda Pembahasan	Jumlah
1.	Laporan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Periode Januari – Desember 2019.	1
2.	Kajian (*Review*) atas Kinerja keuangan Mandiri Syariah Bulanan, sebagai salah satu materi yang menjadi agenda pembahasan Rapat Komisaris bulanan.	12
3.	Kajian (*Review*) atas Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Mandiri Syariah (Risk Based Bank Rating) periode 3 (tiga) tahun terakhir (tahun 2016 sampai dengan 2018).	1
4.	Laporan menghadiri *Annual Integrated Risk & Governance Conference* (AIRC) 2019 yang diselenggarakan Bank Mandiri.	1
5.	Usulan Kunjungan ke Wilayah/Area.	1
6.	Tindak Lanjut Disposisi Komisaris Utama pada Laporan Profil Risiko Mandiri Syariah periode triwulan III Tahun 2019	1
7.	Tindak Lanjut Disposisis Komisaris utama pada Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Mandiri Syariah bulan September 2019.	1
8.	Permohonan Pendampingan Kunjungan Kerja Anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris ke *Distribution Channel* Mandiri Syariah oleh Group Head terkait.	1
9.	*Review draft* RKAP 2020 dan RBB 2020-2022	1
10.	*Review* Implementasi Jasa Kustodial Mandiri Syariah	

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam menjalankan kegiatan operasional Mandiri Syariah, Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan dan Komite-komite di bawah Direksi.

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary (Sekretaris Perusahaan) memiliki peran penting dalam menjembatani kepentingan antara Perusahaan dengan pemegang saham, regulator dan pemangku kepentingan (***stakeholders***) lainnya. Terutama dalam menciptakan komunikasi yang baik, menjaga persepsi atas citra Perusahaan serta memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan perundangan perbankan.

Ada empat pilar tata kelola yang menjadi landasan Corporate Secretary dalam menjalankan aktivitas komunikasinya, yaitu:

1. **Tata kelola Kepatuhan (*compliance*)**
   Tata kelola Kepatuhan (*compliance*) berhubungan dengan regulasi, penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS, publikasi laporan keuangan bank dalam rangka transparansi, penyusunan materi internal (rapat Direksi, Komisaris) dan eksternal.

2. **Tata kelola Komunikasi**
   Corporate Secretary berperan sebagai pintu gerbang informasi bagi seluruh *stakeholders* baik internal, nasabah, pemegang saham, regulator, media, internal. Tata kelola Komunikasi ini dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan persepsi positif *stakeholders* akan citra dan reputasi positif Perusahaan. Termasuk menjalankan fungsi edukasi dan sosialiasi bank syariah kepada publik.

3. **Tata kelola Kesekretariatan**
   Tata kelola Kesekretariatan dimulai dari penciptaan, pencatatan, penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan dokumentasi. Selain itu Tata kelola Kesekretariatan juga mencakup fungsi kerumahtanggaan dan protokoler.

4. **Tata kelola Manajemen**
   Dalam hal Tata kelola Manajemen, Corporate Secretary memonitor dan mengatur *strategic project* pengurus dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar berjalan sesuai dengan harapan *stakeholders*. Fungsi Tata kelola Manajemen menitikberatkan pada dukungan terhadap implementasi pelaksanaan GCG dan asistensi terhadap seluruh kegiatan pengurus dan DPS.

Dasar Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Sekertaris Perusahaan Mandiri Syariah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Syariah Mandiri No. 20/260-KEP/DIR serta terhitung sejak 26 Juni 2018, Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Bapak Ahmad Reza.

Struktur Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 18/730-KEP/DIR tanggal 6 April 2016 tentang Penempatan dan Penugasan Pegawai PT Bank Syariah Mandiri. *Corporate Secretary* berada di bawah koordinasi *Risk Management Directorate* dengan struktur sebagai berikut:

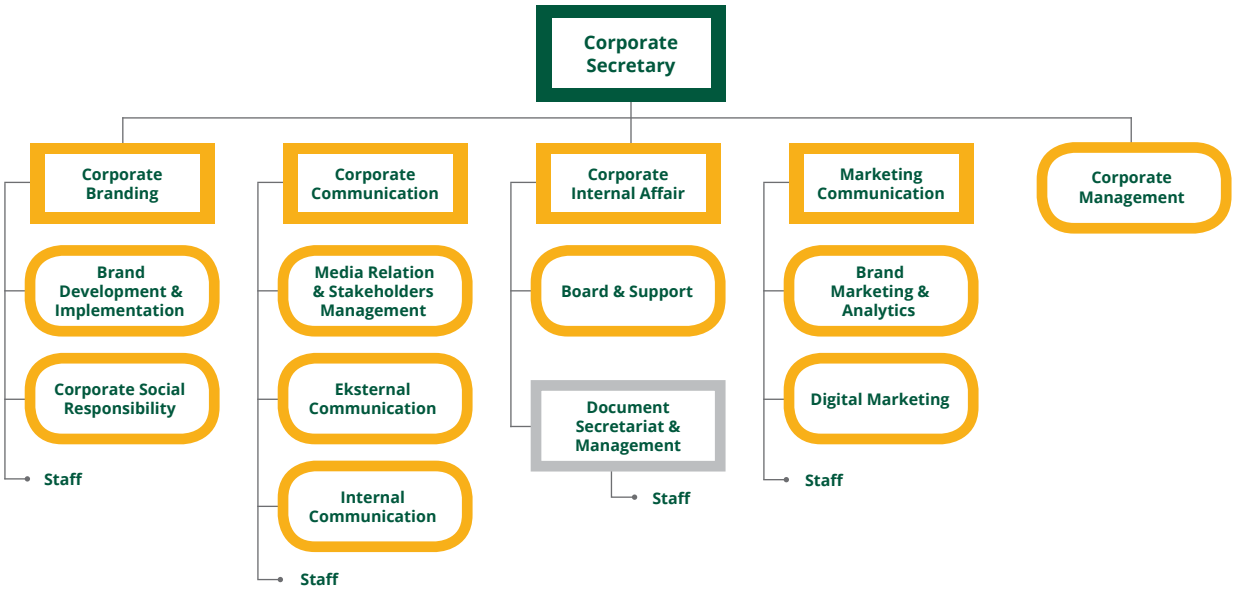

Fungsi dan Tugas Sekretaris Perusahaan

Tugas dan tanggung jawab peran *Corporate Secretary* diatur dalam Standar Prosedur Operasional *Corporate Secretary* tahun 2016 dan efektif berlaku sejak 27 Juli 2016 serta ditegaskan kembali dengan Surat Keputasan Direksi No. 20/260-KEP/DIR tanggal 26 Juni 2018 perihal Penempatan dan Penetapan Pegawai PT Bank Syariah Mandiri. Tugas dan tanggung jawab Corporate Secretary diantaranya:

A. Terkait Fungsi Tata Kelola Kepatuhan:
   1. Menjadi *host* penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
   2. Memastikan berjalannya fungsi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dan DPS serta jajaran yang mensupport di bawahnya.
   3. Mengkoordinasikan *Self Assessment* dan Pelaporan Pelaksanaan GCG Bank sesuai PBI, Ketentuan GCG dan peraturan OJK.
   4. Mengingatkan Direksi Bank tentang tanggung jawabnya untuk melaksanakan GCG yang optimal sesuai tujuan perusahaan agar tercipta citra perusahaan yang lebih baik dan meningkatkan laba perusahaan secara berkesinambungan.

5. Menyiapkan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dari anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan keluarganya dalam kepemilikan saham, hubungan bisnis, dan peran lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan (*stakeholders management*)
6. Menghadiri dan membuat risalah rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
7. Memberikan masukan kepada Direksi Bank untuk menjalankan ketentuan/undang-undang yang berlaku antara lain tentang Perseroan, Obligasi, Saham Perbankan Syariah, Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.
8. Mengarahkan pemuatan publikasi transparansi sesuai ketentuan regulasi perbankan.
9. Mengawal korespondensi Bank dengan cara:
   a. Memberikan advis kebahasaan/*review* terhadap dokumen korporat Bank.
   b. Mengelola dokumen khususnya dokumen korporat termasuk pengelolaan **Pusat Arsip**
   c. Menjaga, mengkoordinir kegiatan pengelolaan dokumen Kantor Pusat, Regional Office, Area/ *Branch Office* ataupun *outlet* lainnya dan memberikan advis terkait pengelolaan dokumen dimaksud.

B. Terkait Fungsi Tata Kelola Korporat Komunikasi:
   1. Menetapkan strategi komunikasi dalam rangka meningkatkan reputasi positif Perusahaan.
   2. Membuat strategi penyebaran informasi kepada *stakeholder*s internal dan eksternal. Termasuk menyampaikan program dan kegiatan Bank serta mengelola manajemen isu dan krisis melalui pemberitaan.
   3. Menjadi penghubung antara Bank dan pihak eksternal yang mewakili masyarakat.
   4. Mengikuti perkembangan pasar dan kondisi eksternal Bank, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang perbankan syariah ataupun isu-isu industri syariah secara umum.
   5. Mengarahkan penyusunan alat dan komunikasi media marketing yang efektif dan tepat sasaran.
   6. Mengelola *stakeholder* dan menyelenggarakan beberapa aktivitas yang bertujuan untuk keterbukaan informasi, seperti paparan publik.
   7. Menjalin hubungan baik dengan media *massa* untuk memperoleh pemahaman publik tentang perusahaan agar tercipta citra dan reputasi positif.
   8. Melakukan edukasi, sosialiasasi dan literasi perbankan syariah kepada masyarakat.

C. Terkait Fungsi Tata Kelola *Marketing* Komunikasi
   1. Menjaga dan meningkatkan citra melalui konsistensi dan standardisasi.
   2. dalam implementasi *Corporate Identity* Melakukan komunikasi status promosi produk kepada *public* melalui saluran komunikasi yang telah direncanakan termasuk *digital marketing*.
   3. Mendesain alat dan komunikasi media *marketing* yang efektif dan tepat sasaran.
   4. Melakukan analisis efektivitas komunikasi *marketing* serta material promosi dengan menyusun dan mengevaluasi strategi *marketing*.
   5. Mengadakan berbagai kegiatan *corporate event* untuk komunikasi *marketing* baik internal maupun eksternal dan meningkatkan loyalitas nasabah.
   6. Mengarahkan aktivitasi korporasi *above the line* dan *below the line* untuk mendukung bisnis perusahaan.

D. Terkait Fungsi *Corporate Branding* dan *Sustainable Finance*
   1. Menjaga dan meningkatkan citra melalui konsistensi dan standarisasi dalam implementasi *Corporate Identity* Bank.
   2. Menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan RAKB serta Laporan Keberlanjutan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Regulator untuk membangun, memelihara dan mengembangkan citra perusahaan.
   3. Mengkomunikasikan RAKB kepada Pemegang Saham dan seluruh organisasi di Bank.
   4. Menyusun *monitoring* dan mereviu pelaksanaan program Keuangan Berkelanjutan untuk dilaporkan secara berkala kepada Direksi dan SEVP.
   5. Mempublikasikan kegiatan atau aksi keuangan berkelanjutan untuk meningkatkan *awareness* dan citra positif Bank dalam berbagai saluran komunikasi, antara lain media cetak, elektronik, video, dan lainnya.
   6. Menjaga dan mengkoordinasikan kegiatan CSR agar tetap *in line* dengan program *Corporate Planning* Bank sebagai bentuk tanggung jawab sosial.
   7. Melaksanakan program RAKB terkait bisnis, yang mencakup: *Product and services, governance*, dan *capacity building.* Sektor bisnis yang diutamakan adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (khususnya pada program-program Pemerintah). Dan *Sustainable Finance* terkait aksi sosial yang dinamakan Bank Mandiri Syariah *Integrated Social Action* (BISA), meliputi 4 pilar: *socio-economic development* (berbentuk pengembangan komunitas), *spiritual development* (pengembangan mesjid sebagai penggerak ekonomi lokal), *people development* (membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan), dan *environment development (employee volunteering* dan *disaster recovery*).
   8. Mengelola proses dan kinerja *Corporate Branding* & RAKB yang efektif dalam memberikan kontribusi optimal terhadap persepsi positif *stakeholder* dan *shareholder* untuk peningkatan *brand equity,* serta berkontribusi terhadap peningkatan *awareness* dan bisnis Bank.

Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan saat ini dijabat oleh Bapak Ahmad Reza.

Ahmad Reza
Head of Corporate Secretary Group

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Usia
42 Tahun

Tempat, Tanggal Lahir
Medan, 26 April 1977

Riwayat Pendidikan
Fakultas Ekonomi dan Manajemen Jurusan Manajemen STIE IBII (Kwik Kian Gie School of Business) Jakarta Tahun 2000.

Riwayat Jabatan
- Regional Head, PT Pasar Info Indonesia tahun 2001-2002.
- Assistant General Manager Business and Development, PT Prestasi Tri Tunggal tahun 2002-2005
- National Sales Manager, PT Ria Group Indonesia tahun 2005-2006
- Assistant Vice President Marketing Communications, Consumer Loans Group, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tahun 2006-2014.
- Head of Corporate Communication, Corporate Secretary Group, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2014-februari 2018.
- Corporate Secretary & Legal Division Head, PT Mandiri Tunas Finance Periode Februari sampai dengan Juni 2018.

Sertifikasi dan Pelatihan
- *Certified Proffessional Marketer*, Asia Pacific Marketing Federation
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 2012
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 2013
- *Certified Managerial Public Relation*, by London School, 2015
- Seminar Nasional Transparansi dan *Disclosure* Sektor Jasa Keuangan di Indonesia, 2018
- *Shifting The Power of Strategic Communication, 2018 International PR Summit*, Bali
- Workshop BSM Integrated Social Actions, Jakarta, 2018
- *Certificate 4th Annual Islamic Finance Conference*, Surabaya, 2019

Dasar Hukum Pengangkatan
Keputusan Direksi PT Bank Syariah Mandiri No. 20/260-KEP/DIR tanggal 26 Juni 2018.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2019

Realisasi kinerja atau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab *Corporate Secretary* selama tahun 2019 dalam kaitan dengan hubungan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) antara lain:

a. Menyelenggarakan Korporat *event* dan atau berpartisipasi dalam *event* yang dilaksanakan pihak ketiga dalam bentuk *sponsorship,* dll antara lain:
   1. 4 Maret 2019 Mandiri Syariah mensosialisasikan produk layanan melalui *Open booth* di kementrian BUMN Jakarta.
   2. 27 Maret 2019 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018.
   3. 10 April 2019 Mandiri Syariah Turut Berperan dalam *Islamic Finance Forum* 2019 di Kuala Lumpur.
   4. 16 Mei 2019 Mandiri Syariah menggelar Safari Ramadhan di Jakarta untuk mensosialisasikan produk layanan.
   5. 24 Juli 2019 Mandiri Syariah Berpartisipasi dalam Ajang Autofiesta.
   6. 5 April 2019 Mandiri Syariah mensosialisasikan produk layanan di *event* iB Vaganza Balikpapan.
   7. 28 April 2019 Mandiri Syariah turut serta dalam acara Mandiri Jogja *Marathon* 2019.
   8. 25 Agustus 2019 Mandiri Syariah mensosialisasikan produk layanan di *event* iB Vaganza Palembang.
   9. 17 Oktober 2019 Mandiri Syariah mensosialisasikan produk layanan di *event* iB Vaganza Jakarta (Financial Expo).
   10. 7 November 2019 Mandiri Syariah Semarakkan Festival Syariah Surabaya.
   11. 12 November 2019 Mandiri Syariah mensosialisasikan produk layanan di *event* Indonesia *Sharia Economic Festival* (ISEF).
   12. 22 November 2019 Mandiri Syariah mensosialisasikan produk layanan di event iB Vaganza Solo.

b. Menyelenggarakan *event* dengan media diantaranya:
   1. 10 Januari 2019 *Visit* Nasabah Pengrajin Batik Khas Depok.
   2. 28 Januari 2019 *Visit* Peternak Ulat Hong Kong ISDP.
   3. 18 Februari 2019 Implementasi *Sustainable Finance*, Mandiri Syariah Bantu Masyarakat Lampung Panen Padi.
   4. 6 Maret 2019 *Visit* Nasabah Toko Oleh-Oleh Haji di Otista menjelang Bulan Haji.
   5. 2 April 2019 *Visit* Nasabah UMKM Pengrajin Cinderamata Bali.
   6. 7 Mei 2019 Buka Puasa Bersama Media.
   7. 4 Mei 2019 *Visit* Nasabah UMKM Pengrajin Gula Aren Purbalingga.
   8. 26 Juni 2019 *Visit* Nasabah Peternak Kambing di Bogor.
   9. 17 Juli 2019 Media *Gathering* Aceh.
   10. 21 Agustus 2019 *Visit* Nasabah Petani Bunga Mawar Cipanas.
   11. 4 September 2019 Nobar Gundala dan Bincang-bincang *Digital Banking* Mandiri Syariah.
   12. 30 September 2019 *Visit* Nasabah Pengrajin Gamelan Solo.
   13. 1 Oktober 2019 *Gathering* dengan Media Solo.
   14. 9 Oktober 2019 *Visit* Usaha Mahasiswa ISDP di Bayat Yogyakarta.
   15. 16 Oktober 2019 Media *Gathering* Medan.
   16. 24 Oktober 2019 Media *Training* Nasional di Padang.
   17. 15 November 2019 *Visit* Nasabah Nasi Jamblang Cirebon.
   18. 3 Desember 2019 Media *Visit* Makassar oleh *Region Head.*
   19. *Photo competition* untuk wartawan seluruh Indonesia dengan jumlah 900 foto terdaftar.

c. Pemberitaan
   1. Siaran pers
      Siaran pers hanya dapat diterbitkan oleh *Corporate Secretary*. Unit kerja lain yang membutuhkan siaran pers harus melakukan kordinasi dengan *Corporate Secretary*. Ketentuan mengenai siaran pers berikut narasumber diatur dalam Standar Prosedur Operasional *Corporate Secretary* Edisi 1 yang berlaku sejak tanggal 27 Juli 2016.

   2. Jumlah berita
      Selama periode tahun 2019 *performa* publikasi Mandiri Syariah adalah sebagai berikut:
      Total Berita : 3.397 berita
      PEL 2019 : 117,36%
      Total Ad *Value* : Rp82,49 miliar atau 84 kali dibandingkan dengan total anggaran *media relations* yang sebesar Rp980jt
      Total PR *Value* : Rp345 miliar

d. Menggelar kegiatan Edukasi, Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah
   Mandiri Syariah menggelar kegiatan edukasi, literasi, inklusi keuangan syariah sesuai ketentuan OJK kepada:
   - Masyarakat umum termasuk ibu rumah tangga
   - Instansi
   - Pelajar dan mahasiswa
   - Komunitas UKM

e. Menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2019 sesuai POJK No. 51 Tahun 2017 yang telah diserahkan kepada OJK pada akhir 2018. *Sustainable Finance* terkait bisnis, yang mencakup: *Product and services, governance, dan capacity building*. Sektor bisnis yang diutamakan adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (khususnya pada program-program Pemerintah).

f. *Sustainable Finance* terkait aksi sosial yang kami namakan Bank Mandiri Syariah *Integrated Social Action* (BISA), meliputi 4 pilar: *socio-economic development* (berbentuk pengembangan komunitas), *spiritual development* (pengembangan mesjid sebagai penggerak ekonomi lokal), *people development* (membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan), dan *environment development* (*employee volunteering* dan *disaster recovery*).

g. Sampai dengan tahun 2019 Mandiri Syariah telah mempunyai tiga Desa Berdaya Sejahtera sebagai implementasi program *Sustainable Finance* sebagai berikut:
   1. Desa Berdaya Sejahtera Lampung Klaster Padi Sehat Organik.
   2. 3 Mei 2019 Mandiri Syariah *Launching* Program Desa Berdaya Sejahtera Mandiri Klaster Peternakan Kambing Purbalingga.
   3. 25 Juli 2019 Mandiri Syariah *Launching* Program Desa Berdaya Sejahtera Trenggalek Klaster Sapi.

Komite Di Bawah Direksi

Untuk mendukung Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah membentuk komite-komite yang disebut dengan Komite Eksekutif adalah organ pendukung Direksi yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk membantu Direksi. Adapun komite-komite tersebut antara lain:

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko adalah komite yang beranggotakan Direksi, SEVP, dan Kepala Unit Kerja terkait yang memiliki wewenang untuk menyusun kebijakan manajemen risiko serta perubahannya termasuk strategi manajemen risiko yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi yang sejalan dengan visi, misi, strategi, *risk appetite* Bank, dan *contigency plan* yang dilakukan bersama-sama dengan Kepala Unit Kerja yang membidangi serta memutakhirkan dan menyempurnakan penerapan manajemen risiko secara berkala/insidentil karena perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 20/74E-KEP/DIR tanggal 9 Maret 2018 tentang Komite Manajemen Risiko, struktur dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Risk management dan Compliance Director
Sekretaris	:	1. Group Head Enterprise Risk Management 2. Group Head Corporate Risk
Permanent Voting Member		1. Risk Management & Compliance Director 2. Financing Risk & Recovery Director 3. Finance & Strategy Director 4. Wholesale Banking Director 5. Distribution & Service Director 6. Technology & Information Director 7. Retail Banking Director/SEVP 8. Human Capital & Culture Director/SEVP
Permanent Non Voting Member	:	Group Head Compliance atau Pejabat yang ditunjuk dari Compliance Group
Non Permanen Voting Member	:	Director/SEVP Pemateri
Contributing Non Voting Member	:	Group Head Pemateri
Invitee	:	Group Head/Pejabat Internal Audit dan/atau Group Head/Setara lainnya yang terkait materi.

PROFIL ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Profil anggota Komite Manajemen Risiko per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Putu Rahwidhiyasa	Ketua/Permanent Voting Member	Risk Management & Compliance Director	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Ade Cahyo Nugroho	Permanent Voting Member	Finance & Strategy Director	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Kusman Yandi	Permanent Voting Member	Wholesale Banking Director	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Achmad Syafii	Permanent Voting Member	Technology & Information Director	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Wawan Setiawan	Permanent Voting Member	Retail Banking Director/SEVP	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Rosma Handayani	Permanent Voting Member	Human Capital & Culture Director/SEVP	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yaitu:

1. Memantau profil risiko dan pengelolaan seluruh risiko dalam rangka menetapkan *risk appetite*, strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi serta kecukupan modal.
2. Menetapkan metodologi, skenario, evaluasi, termasuk kondisi stress dalam pengukuran risiko dan *contigency plan*.
3. Melakukan penyempurnaan penerapan manajemen risiko secara berkala maupun insidentil sebagai tindak lanjut perubahan kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank.
4. Melakukan pembahasan strategis dalam lingkup manajemen risiko termasuk memastikan integrasinya dengan perusahaan induk.
5. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang memiliki kondisi khusus (seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis bank yang ditetapkan).
6. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat operasional.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2019

Selama tahun 2019, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan tugasnya melalui rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dengan pembahasan mengenai evaluasi *portfolio guideline, control testing,* tingkat kesehatan Bank serta profil risiko.

IT Steering Committee

IT *Streering Committee* dibentuk untuk membantu Direksi dalam penetapan IT *strategic plan* dan IT *budgeting*, penetapan proyek IT *strategic* dan pengamanan IT, dengan susunan keanggotaan, tugas, kewenangan dan tanggung jawab serta untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN IT STEERING COMMITTE

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 20/74A-KEP/DIR tanggal 9 Maret 2018 tentang Penetapan Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT Steering Committee), struktur dan keanggotaan IT Steering Committee adalah sebagai berikut:

Ketua	:	President Director
Sekretaris	:	1. Group Head IT Architecture Strategy & Development 2. Group Head IT Operation
Permanent Voting Member		1. President Director 2. Technology dan Operation Director 3. Finance dan Strategy Director 4. Financing Risk dan Recovery Director
Permanent Non Voting Member	:	Compliance Director
Non Permanen Voting Member	:	Director/SEVP yang membidangi Project Owner
Contributing Non Voting Member	:	Group Head Project Owner
Invitee	:	Internal Audit Director/Group Head Internal Audit dan/atau Group Head unit kerja lain yang terkait.

PROFIL ANGGOTA IT STEERING COMMITTEE

Profil anggota IT Steering Committee per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Toni E.B Subari	Ketua/Permanent Voting Member	President Director	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Achmad Syafii	Permanent Voting Member	Technology dan Operation Director	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Ade Cahyo Nugroho	Permanent Voting Member	Finance dan Strategy Director	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Nury Sriandajani	Permanent Voting Member	Financing Risk dan Recovery Director	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB IT STEERING COMMITTE

IT *Steering Committee* adalah komite yang beranggotakan Direksi/SEVP bertugatugas dan bertanggungjawab untuk:

1. Menetapkan rencana strategis IT (IT *Strategic Plan*) yang searah dan sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha bank.
2. Menetapkan kerangka acuan strategis untuk mengelola IT *Resources*.
3. Menetapkan strategi dan rencana tindakan atas proyek-proyek beserta anggarannya.
4. Menetapkan strategi pengamanan IT dan manajemen risiko penggunaan IT.
5. Memastikan dan memonitor pelaksanaan proyek IT sesuai dengan rencana strategis IT, anggaran IT dan *delivery project* IT.
6. Menetapkan prioritas dan alokasi anggaran IT yang telah diputuskan oleh Direksi.
7. Memutus atau memberikan arahan terkait perencanaan, pengembangan dan penambahan sistem IT yang bersifat strategis.
8. Membahas dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis dalam ruang lingkup IT dan arahan investasi bidang IT.
9. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat IT operasional.

PELAKSANAAN TUGAS IT STEERING COMMITTEE TAHUN 2019

Sepanjang 2019 Komite Teknologi dan Informasi melakukan 2 (dua) kali pertemuan dengan agenda di antaranya;

1. Pembahasan *update progress* 49 inisitatif IT strategis , menyetujui dan menjalankan penambahan 18 inisiatif IT Strategis 2019 beserta nilai anggaran investasinya .
2. Membahas menerima realisasi hasil kerja pelaksanaan 41 inisiatif IT strategis 2019 , menyetujui reprioritasi inisiatif IT strategis dengan mengeluarkan 2 inisiatif, menurunkan 2 inisiatif ke Tier 2 , menyetujui dan menjalankan 22 inisiatif IT strategis 2019 (*Multi year*) untuk di*carry over* ke inisiatif IT strategis 2020 serta menyetujui dan menjalankan 18 inisiatif IT strategis 2020.

Komite Policy and Procedure

Komite yang beranggotakan Direksi/SEVP yang berwenang untuk merekomendasikan/menetapkan kebijakan dan prosedur di luar kebijakan manajemen risiko dan pemutahirannya yang akan diterbitkan.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE POLICY AND PROCEDURE

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 21/548-KEP/DIR tanggal 4 September 2019 tentang Komite Policy and Procedure, struktur dan keanggotaan Komite Policy and Procedure adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Director yang membidangi Policy and Procedure
Sekretaris	:	Group Head Policy and Procedure
Permanent Voting Member		1. Risk Management & Compliance Director 2. Direktur/SEVP Risk sesuai aktivitas dan segmen
Non Permanen Voting Member	:	Direktur/SEVP membidangi Unit Kerja *Owner*
Contributing Member	:	Group Head Pemateri
Invitee	:	Group Head terkait yang relevan dengan kebijakan dan prosedur yang sedang dibahas

PROFIL ANGGOTA KOMITE POLICY AND PROCEDURE

Profil anggota Komite Policy and Procedure per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Putu Rahwidhiyasa	Ketua/Permanent Voting Member	Risk Management & Compliance Director	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Nury Sriandajani	Permanent Voting Member	SEVP Retail Financing Risk Restructuring & Recovery	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Karya Prasetya Budi	Permanent Voting Member	SEVP Wholesale Financing Risk Restructuring & Recovery	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Kebijakan dan prosedur adalah:
1. Membahas dan merekomendasikan penyesuaian/penyempurnaan kebijakan.
2. Menetapkan penyesuaian/penyempurnaan standar prosedur Perseroan diluar kebijakan dan standar prosedur human capital dan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE KEBIJAKAN DAN PROSEDUR TAHUN 2019

Selama tahun 2019, Komite Kebijakan dan Prosedur telah melaksanakan tugasnya antara lain melakukan penyesuaian atau penyempurnaan kebijakan-kebijakan serta standar prosedur yg berlaku di Perseroan.

Komite Bisnis

Business Committee adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi/SEVP dalam menjalankan fungsi untuk menetapkan strategi dan pengembangan bisnis Bank secara terintegrasi, menetapkan produk & jasa/aktivitas andalan serta strategi dan efektifitas *marketing communication*.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE BUSSINESS

Ketua	:	President Director
Sekretaris	:	1. Group Head Corporate Transformation 2. Group Head Distribution Strategy
Permanent Voting Member	:	1. President Director 2. Wholesale banking Director/SEVP 3. Retail Banking director/SEVP 4. Risk Management Restructuring and Recovery Director/SEVP 5. Distribution and Service Director
Permanent Non Voting Member	:	Risk Management and Compliance Director
Contributing Voting Member	:	Group Head Pemateri dan Group Head lain terkait materi
Invitee	:	Group Head/Pejabat Internal Audit

PROFIL ANGGOTA KOMITE BISNIS

Profil anggota Komite Bisnis per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Toni E.B Subari	Ketua/Permanent Voting Member	President Director	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Kusman Yandi	Permanent Voting Member	Wholesale Banking Director/ SEVP	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Wawan Setiawan	Permanent Voting Member	Retail Banking Director/SEVP	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Nury Sriandajani	Permanent Voting Member	Risk Management, Restructuring and Recovery Director/SEVP	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Anton Sukarna	Permanent Voting Member	Distribution and Service Director	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE BISNIS

Business Committee bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Membahas dan menetapkan pengembangan bisnis secara terintegrasi, termasuk *business process*, infrastruktur sarana dan prasarana serta teknologi pendukung bisnis.
2. Membahas dan menyelesaikan permasalahan bisnis yang bersifat strategis termasuk aliansi antar unit kerja Perseroan dan aliansi dengan perusahaan induk serta *sister company*.
3. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat bisnis operasional.
4. Merumuskan kebijakan *alignment* strategi bisnis dengan penyelarasan proses bisnis, pendelegasian kewenangan, penyelarasan struktur organisasi, *resources alignment* dan *fulfillment* serta infrastruktur pendukung untuk implementasi strategi yang ditetapkan.
5. Menetapkan kebijakan alignment strategi bisnis dengan penyelarasan proses bisnis, pendelegasian kewenangan, penyelarasan struktur organisasi, *resources alignment & fulfillment* serta infrastruktur pendukung untuk implementasi strategi yang ditetapkan.
6. Mengevaluasi implementasi strategi dan penyelarasan struktur yang telah ditetapkan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang cepat namun terintegrasi yang bersifat *bankwide* dan *end to end*.
7. Mengkomunikasikan dan memastikan seluruh ketetapan/keputusan Komite dilaksanakan sesuai keputusan kepada seluruh jajaran internal Perseroan yang terkait

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE BISNIS TAHUN 2019

Selama tahun 2019, Komite Bisnis telah melaksanakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dengan membahas antara lain pengembangan bisnis secara terintegrasi, permasalahan bisnis yang bersifat strategis, kebijakan strategi bisnis, serta mengevaluasi implementasi atas strategi bisnis yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Komite Bisnis yang telah berlangsung selama tahun 2019 diantaranya *Servicing* Kartu Kredit Pemerintah, Perbaikan SLA Pembiayaan *Corporate Banking, Sector Refocussing Corporate Banking,* Revisi Manual Produk (Griya Berkah, Bank Garansi, Penyelesaian Piutang Wesel Ekspor) serta Kenaikan Biaya Administrasi Tabungan Pensiun.

Komite Pembiayaan/Penanganan Pembiayaan Bermasalah

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE PEMBIAYAAN/ PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

Komite Pembiayaan/Penanganan Pembiayaan Bermasalah terdiri dari pemegang kewenangan fungsi bisnis/fungsi *recovery* dan pemegang kewenangan fungsi *risk*. Jumlah kuorum didasarkan pada limit pembiayaan yang akan diputus.

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMBIAYAAN/PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

Komite Pembiayaan berwenang:
1. Merekomendasikan atau memutus pemberian pembiayaan (baru, tambahan, penurunan, perpanjangan dan/atau restrukturisasi pembiayaan) yang dikelola sesuai limit kewenangan.
2. Menetapan dan melakukan perubahan struktur pembiayaan. Struktur pembiayaan yang dimaksud, tidak terbatas pada limit, skim, tujuan/obyek, jenis, sifat, jangka waktu, *grace period*, porsi, syarat pembiayaan/ *covenant*, dan agunan pembiayaan.
3. Memutus kerjasama pembiayaan.

Komite Penanganan Pembiayaan Bermasalah berwenang:
1. Merekomendasikan atau memutus penanganan dan/ atau penyelesaian pembiayaan bermasalah termasuk pembiayaan ekstrakomtabel, sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan *write back* pembiayaan ekstrakomtabel.
3. Menghapus buku pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Menghapus tagih pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PEMBIAYAAN/ PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH TAHUN 2019

Selama tahun 2019, Komite Pembiayaan/Penanganan Pembiayaan Bermasalah telah melaksanakan tugasnya antara lain merekomendasikan serta memutus pembiayaan dan menetapkan struktur pembiayaan.

Komite Sumber Daya Manusia

Komite Sumber Daya Manusia atau *Human Capital Committee* (HCC) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan, pengembangan dan Kebijakan Sumber Daya Manusia yang sejalan dengan visi, misi dan strategi Perseroan, serta penanganan kasus kepegawaian.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 20/74D-KEP/DIR tanggal 9 Maret 2018 tentang Komite Sumber Daya Manusia (Human Capital Committee), struktur dan keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Human Capital dan Culture Director/SEVP
Sekretaris	:	1. Group Head Human Capital Services 2. Group Head Human Capital Policy
Permanent Voting Member	:	1. Human Capital dan Culture Director/SEVP 2. Finance & Strategy Director 3. Distribution & Service Director
Permanent Non Voting Member	:	Compliance/DirectorGroup Head Compliance
Non Permanent Voting Member	:	Direktur/SEVP Pemateri
Non Permanent Non Voting Member		Group Head/jabatan setara Pemateri
Invitee	:	Group Head/Pejabat Internal Audit atau Group Head/Jabatan setara lain yang terkait materi

PROFIL ANGGOTA KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Profil anggota Komite Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Rosma Handayani	Ketua/Permanent Voting Member	Human Capital dan Culture Director/SEVP	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Ade Cahyo Nugroho	Permanent Voting Member	Finance & Strategy Director	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Anton Sukarna	Permanent Voting Member	Distribution & Service Director	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Komite Sumber Daya Manusia bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yaitu:

1. Menyusun Strategi dan Kebijakan human capital termasuk budaya perusahaan, *compensation & benefit*.
2. Menetapkan alokasi anggaran pembelajaran.
3. *Allignment* strategi bank melalui penyelarasan struktur organisasi, *resources alignment & fulfillment* serta infrastruktur pendukung.
4. Membahas/merekomendasikan kebijakan dan menetapkan prosedur dan sistem operasional pengelolaan human capital.
5. Menetapkan arahan strategis dan operasional pengelolaan SDM, termasuk budaya dan nilai perusahaan.
6. Menetapkan arah strategis Pengembangan Sistem Informasi *Human Capital*.
7. Menetapkan dan mengembangkan organisasi termasuk pemenuhan, pengembangan & pelatihan SDM sesuai kebutuhan bisnis Bank.
8. Menetapkan individual *performance management & rewards, talent & succession management* serta *employee relations*.
9. Menetapkan Batas Kewenangan dalam Menjalankan Manajemen *Human Capita*l.
10. Membahas dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan *human capital* yang bersifat strategis.
11. Menetapkan kebijakan sanksi kepegawaian dan penanganan kasus kepegawaian.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2019

Selama tahun 2019, Komite Sumber Daya Manusia telah melaksanakan rapat sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dengan agenda pengambilan keputusan diantaranya terkait dengan rotasi mutasi pejabat eksekutif Bank, promosi pejabat eksekutif Bank dan pegawai secara umum, rekomendasi kandidat SEVP Bank, penetapan supervisi wilayah bagi Direksi dan SEVP, penyempurnaan framework pengembangan pegawai ODP serta fasilitasnya, penetapan *talent classification* pejabat Eksekusif Bank, pemberian apresiasi untuk RCEO RO IV-Bandung yang meninggal dunia, penempatan pegawai ODP 25, pelaksanaan *project Total Reward*, peninjauan penetapan jabatan pejabat eksekutif Bank yang baru dipromosi, penyesuaian kebijakan pemberian beasiswa anak pegawai, *pelaksanaan pilot project flexi-time,* penyusunan strategi pencegahan fraud, pembaharuan ketentuan DPLK dan BPJS.

Komite Asset dan Liabilities

Assets & Liabilities Committee (ALCO) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi pengendalian melalui penetapan strategi atas hal-hal yang terkait dengan pengelolaan *assets & libilities* Perseroan.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE ASSET DAN LIABILITIES

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 20/74B-KEP/DIR tanggal 9 Maret 2018 tentang Assets & Liabilities Committee, struktur dan keanggotaan Assets & Liabilities Committee adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Presiden Director
Sekretaris	:	1. Group Head Treasury 2. Group Head Enterprise Risk Management
Permanent Voting Member	:	1. President Director 2. Risk Management Director 3. Financing Risk & Recovery Director 4. Finance & Strategy Director 5. Wholesale Banking Director 6. Distribution & Service Director 7. Retail Banking Director/SEVP
Permanent Non Voting Member	:	Compliance Director/Group Head Compliance
Non Permanent Voting Member	:	Director/SEVP Pemateri
Contributing Voting Member	:	Group Head Pemateri
Invitee	:	Group Head/Pejabat Internal Audit dan/atau Group Head lain yang terkait materi

PROFIL ANGGOTA ASSETS & LIABILITIES COMMITTEE

Profil anggota Assets & Liabilities Committee per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Toni E.B Subari	Ketua/Permanent Voting Member	President Director	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Putu Rahwidhiyasa	Permanent Voting Member	Risk Management Director	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Nury Sriandajani	Permanent Voting Member	Financing Risk & Recovery Director	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Ade Cahyo Nugroho	Permanent Voting Member	Finance & Strategy Director	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Kusman Yandi	Permanent Voting Member	Wholesale Banking Director	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Anton Sukarna	Permanent Voting Member	Distribution & Service Director	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Wawan Setiawan	Permanent Voting Member	Retail Banking Director/SEVP	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE ASSET DAN LIABILITIES

Asset & Liabilities Commitee bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Menetapkan, mengembangkan dan mengkaji ulang strategi pengelolaan *assets* dan *liabilities*.
2. Mengevaluasi posisi *asstes & liabilities* bank sesuai dengan tujuan pengelolaan risiko likuiditas, suku bunga dan nilai tukar.
3. Melakukan evalusi posisi Bank dan strategi ALM guna memastikan bahwa hasil *risk taking* position Bank telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko pasar, risiko imbal hasil, risiko investasi, risiko nilai tukar, dan risiko likuiditas.
4. Melakukan kaji ulang *pricing* aktiva dan pasiva untuk memastikan *pricing* tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana dan memelihara struktur neraca Bank sesuai dengan strategi ALM Bank.
5. Melakukan kaji ulang deviasi antara realisasi dengan proyeksi anggaran dan rencana binis Bank.
6. Melakukan batasan *Liquidity Management, Gap Management, Pricing Management, FX Management*.
7. Menetapkan metodologi *Fund Transfer Pricing*.
8. Melakukan pembahasan bersifat lingkup ALM termasuk perusahaan anak/entitas yang berada dibawah pengendalian Perseroan.

PELAKSANAAN TUGAS ASSET AND LIABILITY COMMITTEE (ALCO) TAHUN 2019

Komite *Asset* dan *Liability* sepanjang tahun 2019 telah melaksanakan rapat sebanyak 18 (delapan belas) kali dengan agenda pengambilan keputusan terkait Kebijakan Nisbah Deposito dan Tabungan Rupiah, Kebijakan *Special Rate* Pembiayaan *Consumer* dan *Retail Banking*, Kebijakan pengelolaan investasi Bank (Surat Berharga dan Penempatan BI), Kebijakan terkait Pengelolaan Dana BPKH, Kebijakan Pendanaan tengah tahun dan menjelang akhir tahun, serta kebijakan lainnya.

Internal Audit

Unit Kerja Internal Audit (IA) adalah Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) di Bank Syariah Mandiri yang melaksanakan fungsi Internal Audit. Tanggungjawab utama Unit Kerja Internal Audit yaitu membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.

Struktur Organisasi dan Ketua Internal Audit

Internal Audit Group (IAG) dalam menjalankan tugas dan fungsinya dipimpin oleh Group Head yang membawahi 7 (tujuh) Department dan 1 (satu) Special Audit Executive Officer (SPEO). Tujuh departemen tersebut dengan spesialisasi tugas pada Bidang Retail & Distribution Audit, Consumer & Distribution Audit, Wholesale Audit, Head Office Audit, Information Technology Audit, Special Audit dan Audit Development & Counterpart Relation.

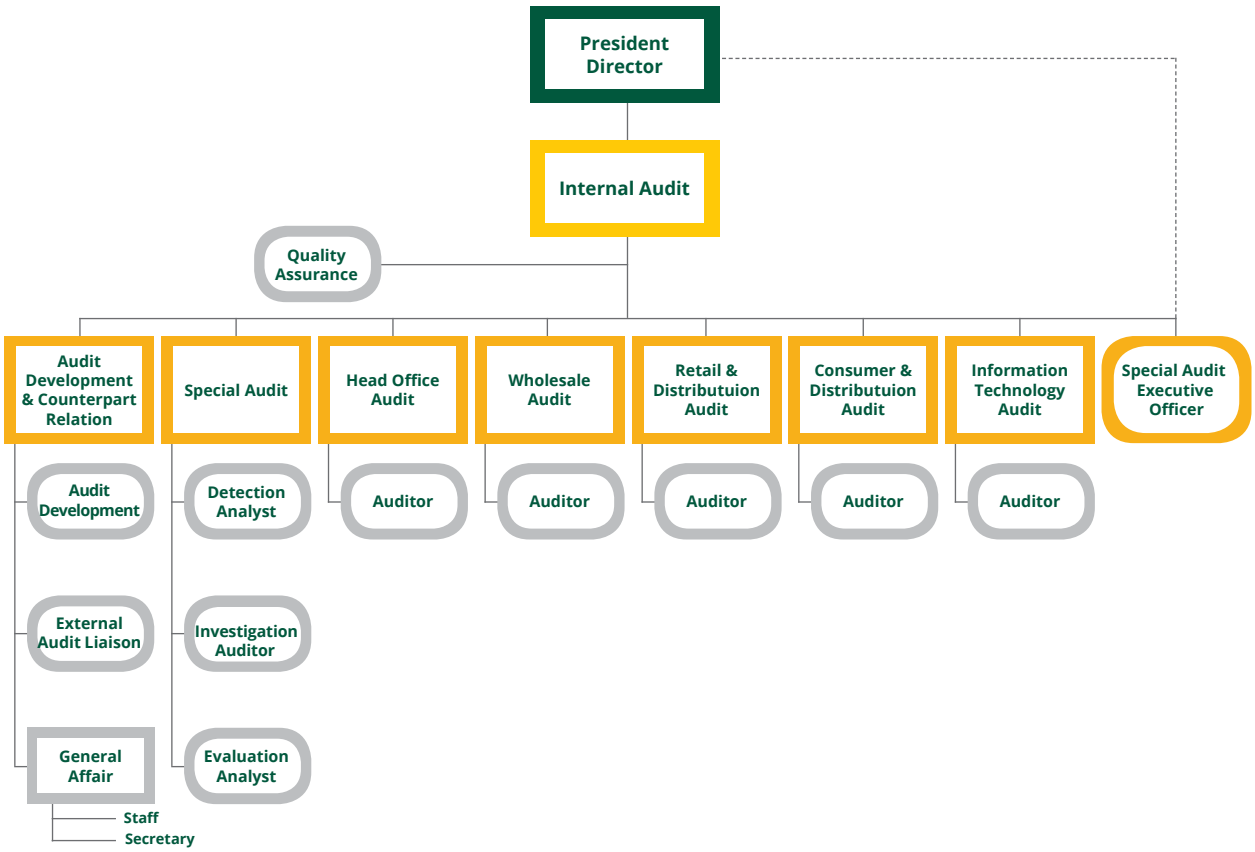

Kedudukan Internal Audit Dalam Struktur Organisasi

Kedudukan Internal Audit Group dalam struktur organisasi Bank adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
2. Memiliki hubungan fungsional dan dapat komunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris, Direksi & SEVP, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
3. Memiliki hubungan koordinasi dengan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) Bank Mandiri.

Profil Kepala Internal Audit

Suharto
Head of Internal Audit Group

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Bogor

Usia
53 tahun

Tempat, Tanggal Lahir
Indramayu, 20 Maret 1966

Riwayat Pendidikan
S2 Manajemen, Institut Pertanian Bogor (dalam masa studi), S1 Akuntansi, STIE Jagakarsa, 1996, D3 Akuntansi, Universitas Padjadjaran, 1988

Riwayat Jabatan
- *Group Head Internal Audit* (Unit Kerja Audit Intern) – PT Bank Syariah Mandiri (2017 - sekarang).
- *Audit Manager Distribution* – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2015).
- *Audit Manager Retail Product & Distribution* V Makassar – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2012).
- *Audit Manager Audit Development & Advisory* – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2010-2012).
- *Risk & Business Control Manager* Medan – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2008 - 2010).
- *Team Leader Distribution Audit* – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2003 s.d. 2008).
- *Senior Auditor* – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2004 - 2006).
- *Middle Auditor* – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (1999 - 2004).
- *Auditor Bank Exim* – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (1993 - 1999).

Sertifikasi
- Sertifikasi Manajemen Resiko Level I tahun 2007, Level II Tahun 2012, Level III Tahun 2015, Level IV tahun 2018
- *Sertifikasi Syariah For Executive*, dari Karim Consulting Indonesia , tahun 2018.
- General Banking, dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), tahun 2016
- SESPIBANK, dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) tahun 2016
- *Certified Fraud Examiner* (CFE), dari Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) tahun 2011.
- *Certified Bank Auditor* (CBA), dari Bank Administration Institute (BAI), Tahun 2003.
- *Qualified Internal Audit* (QIA), dari Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA), tahun 1999.

Dasar Pengangkatan
Keputusan Direksi PT Bank Syariah Mandiri, No. 19/007-KEP/DIR, tanggal 9 Januari 2017 tentang Penetapan Jabatan Pegawai PT Bank Syariah Mandiri.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Internal Audit Group

Group Head Internal Audit Group diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, Internal Audit secara organisasi berada langsung di bawah koordinasi Direktur Utama.

Internal Audit *Charter*

Dalam melaksanakan tugasnya, Internal Audit telah dilengkapi Pedoman Kerja yang disebut dengan Piagam Internal Audit (*Internal Audit Charter*) yang disetujui dan disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direktur Utama pada Mei 2019. Selain sebagai pedoman kerja, Internal Audit *Charter* juga berperan dalam penguatan peran dan tanggung jawab serta dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan bagi Internal Audit. Adapun isi dari Internal Audit *Charter* adalah sebagai berikut:

BAB I	Visi, Misi dan Fungsi
BAB II	Kedudukan dan Ruang Lingkup
BAB III	Kewenangan, Tugas Dan Tanggung Jawab, Serta Hubungan Internal Audit Dengan Unit Kerja Yang Melakukan Fungsi Pengendalian
BAB IV	Persyaratan Internal Auditor
BAB V	Integritas, Indepedensi, Obyektivitas, Kompetensi, dan Profesionalisme
BAB VI	Aktivitas Internal Audit
BAB VII	Pengawasan dan *Quality Assurance*
BAB VIII	Kode Etik Internal Audit
BAB IX	Definisi Internal Audit
BAB X	Lain-Lain

Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

Tugas dan tanggung jawab Internal Audit adalah sebagai berikut:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
2. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
3. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
4. Melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian intern.
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
6. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
7. Merencanakan dan melaksanakan Aktivitas Internal Audit dengan penekanan pada bidang atau aktivitas yang mempunyai risiko tinggi (*risk based*) serta mengevaluasi prosedur atau *control system* yang ada, untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan.
8. Melaksanakan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), melaporkan, dan mengusulkan sanksi atas *fraud* kepada Manajemen.
9. Melaporkan pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah kepada Dewan Pengawas Syariah.
10. Menyampaikan laporan audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
11. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil audit, baik internal dan eksternal.
12. Memberikan tanggapan/opini atas usulan kebijakan atau sistem dan prosedur agar dapat dipastikan bahwa dalam kebijakan atau sistem dan prosedur yang baru tersebut telah tercakup aspek-aspek pengendalian intern. Adanya keterlibatannya Internal Audit dalam memberikan tanggapan/opini atas usulan kebijakan atau sistem dan prosedur, tidak berarti bahwa hal-hal tersebut akan dikecualikan sebagai objek audit.
13. Melakukan pengembangan audit (*audit development*) sesuai arah kebijakan Bank.
14. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi Internal Auditor dalam melaksanakan tugasnya.
15. Memberikan konsultasi kepada pihak intern PT Bank Syariah Mandiri untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan risiko, dan tata kelola perusahaan.
16. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kompetensi auditor.
17. Melakukan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas Internal Audit.
18. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal audit dan unit/fungsi penyedia *assurance* lainnya. Koordinasi dapat dilakukan antara lain melalui pertemuan secara periodik untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penting bagi kedua belah pihak.

Kewenangan Internal Audit

Internal Audit memiliki kewenangan yaitu:

1. Melakukan aktivitas Internal Audit terhadap kegiatan semua unit kerja dalam organisasi Bank serta pihak terafiliasi sesuai *governance* yang berlaku.
2. Berkomunikasi secara langsung dengan Direksi dan SEVP, Dewan Komisaris, dan Komite Audit serta Dewan Pengawas Syariah.
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi dan SEVP, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.

4. Mengakses seluruh data dan informasi Bank yang relevan terkait dengan tugas dan fungsi Internal Audit, yaitu data cetak dan elektronik, catatan, karyawan, dana, aset, lokasi atau area, maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan sumber daya Bank. Termasuk didalamnya namun tidak terbatas pada rekening dan atau catatan karyawan dan sumber daya serta hal-hal lain yang dianggap perlu terkait dengan tugas dan fungsi Internal Audit.
5. Melakukan Aktivitas Investigasi terhadap kasus atau masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi fraud dan atau pelanggaran *Code of Conduct* (CoC).
6. Menetapkan jadwal, objek audit, personil, ruang lingkup, metodologi, teknik, perangkat, dan pendekatan audit yang terkait dengan pelaksanaan Aktivitas Internal Audit.
7. Melakukan koordinasi kegiatan dengan Eksternal Auditor.
8. Menggunakan jasa pihak eksternal atau non-Internal Audit, baik dalam lingkup Bank maupun di luar Bank, dalam pelaksanaan audit apabila dipandang perlu.
9. Mengimplementasikan pelaksanaan Aktivitas Internal Audit sesuai Kode Etik Internal Audit.
10. Memiliki hubungan koordinasi dengan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) Bank Mandiri.
11. Mengikuti rapat yang bersifat strategis.

Komposisi Personil Internal Audit

Jabatan	Jumlah
Group Head	1
Special Audit Executive Office (SPEO)	1
Department Head	6
Team Leader	18
Auditor	27
Sekretaris	1
Total	**54**

Sertifikasi Profesi Internal Audit

Pengembangan kompetensi auditor dilakukan melalui Program Sertifikasi Audit baik untuk Level Nasional maupun Level Internasional. Rincian jumlah pegawai yang telah memperoleh sertifikasi Level Nasional dan Level Internasional sampai tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Sertifikasi Risk Management (SMR)

No	Nama	Jabatan	Sertifikasi
1	Suharto	Group Head	SMR Level 4
2	Ichwan Rochmanu	Special Audit Executive Officer	SMR Level 3
3	Donny Eko Nugroho	Consumer & Distribution Audit Department Head	SMR Level 2
4	Fachri Hasan	Audit Team Leader	SMR Level 2
5	Atdi Firmansyah	Audit Team Leader	SMR Level 1
6	Yan Remirza Mahmuddin	Audit Team Leader	SMR Level 2
7	Wibowo Triadi	Auditor	SMR Level 2
8	Adi Nurhadi	Auditor	SMR Level 2
9	John Abrar	Auditor	SMR Level 1
10	Achmad Syahdan Fahmi	Auditor	SMR Level 1
11	David John Charles	Auditor	SMR Level 1
12	Hartono	Auditor	SMR Level 1
13	Amri Bustami	Retail & Distribution Audit Department Head	SMR Level 2
14	Zainal A. Muttakin Siregar	Audit Team Leader	SMR Level 2
15	Triyogi Sumali Yudo	Audit Team Leader	SMR Level 2
16	Wahyu Firmansyah	Auditor	SMR Level 1
17	Irwan Herdiawan	Auditor	SMR Level 1

No	Nama	Jabatan	Sertifikasi
18	Herris Permana	Auditor	SMR Level 1
19	Hans Hartanto	Auditor	SMR Level 1
20	Hendro Syah Putra	Auditor	SMR Level 1
21	Taufan Karya Mulyadi Laga	Auditor	SMR Level 1
22	Agus Setiyo Budi	Wholesale Audit Department Head	SMR Level 2
23	Hari Susatyo Raharjo	Audit Team Leader	SMR Level 2
24	Noercahyo Adhi Nugroho	Audit Team Leader	SMR Level 2
25	Ardiansyah .	Auditor	SMR Level 1
26	Bahrul Ulum	Auditor	SMR Level 1
27	Widya Setyadi	Head Office Audit Department Head	SMR Level 2
28	Hasyim Abdullah	Audit Team Leader	SMR Level 2
29	Mardani .	Audit Team Leader	SMR Level 2
30	Nia Handayani	Auditor	
31	Fanny Novandra	Audit Team Leader	SMR Level 2
32	Ageng Prianto	Audit Team Leader	SMR Level 2
33	Rima Yustisi Yanti	Audit Team Leader	SMR Level 2
34	Defir Ilmi Faridha	Auditor	
35	Marchtana P. Aji Nugraha	Auditor	SMR Level 2
36	Cipto Mugiharjo	Special Audit Department Head	SMR Level 2
37	Achmad Subari	Investigation Audit Team Leader	SMR Level 2
38	Muhammad Zulfany Batam	Investigation Audit Team Leader	SMR Level 2
39	Muhammad Zidni Nuri	Investigation Audit Team Leader	SMR Level 1
40	Dwiastari Adhita Putri	Evaluation Analyst Team Leader	SMR Level 2
41	Muhammad Enviardi Bahri	Evaluation Analyst Officer	SMR Level 2
42	Muhammad Fachmi	Investigator	SMR Level 1
43	Arif Pribadi	Investigator	SMR Level 1
44	Insan Agung	Investigator	SMR Level 2
45	Brantas .	Investigator	SMR Level 2
46	Asep Nana Heryana	Audit Dev. & Counterpart Rel. Dept Head	SMR Level 2
47	Dina Septiani	Audit Development Officer	SMR Level 1
48	Diah Fitri Handayani	Audit Development Officer	SMR Level 1
49	Erwin Amrullah	External Audit Liaison Officer	SMR Level 1
50	Effa Primasari	External Audit Liaison Officer	SMR Level 2
51	Deviasary Rachmawaty	External Audit Liaison Officer	SMR Level 2
52	Arie Noviarie Sumantri	Quality Assurance Officer	SMR Level 1

Certified Fraud Examiner (CFE)

No	Nama	Jabatan	Sertifikasi
1	Suharto	Group Head	Certified Fraud Examiner
2	Ichwan Rochmanu	Special Audit Executive Officer	Certified Fraud Examiner
3	Agus Setiyo Budi	Wholesale Audit Department Head	Certified Fraud Examiner
4	Cipto Mugiharjo	Special Audit Department Head	Certified Fraud Examiner

Certified Qualified Internal Auditor (QIA)

No	Nama	Jabatan	Sertifikasi
1	Suharto	Group Head	QIA
2	Ichwan Rochmanu	Special Audit Executive Officer	QIA

Certified Bank Internal Auditor (CBIA) Level Supervisor

No	Nama	Jabatan	Sertifikasi
1	Donny Eko Nugroho	Consumer & Distribution Audit Department Head	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervsior (2018)
2	Fachri Hasan	Audit Team Leader	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervsior (2018)
3	Atdi Firmansyah	Audit Team Leader	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervsior (2018)
4	Yan Remirza Mahmuddin	Audit Team Leader	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervsior (2018)
5	Amri Bustami	Retail & Distribution Audit Department Head	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervsior (2018)
6	Zainal A. Muttakin Siregar	Audit Team Leader	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervsior (2018)
7	Triyogi Sumali Yudo	Audit Team Leader	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervsior (2018)
8	Agus Setiyo Budi	Wholesale Audit Department Head	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervsior (2018)
9	Hari Susatyo Raharjo	Audit Team Leader	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervsior (2018)
10	Noercahyo Adhi Nugroho	Audit Team Leader	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervsior (2018)
11	Widya Setyadi	Head Office Audit Department Head	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervsior (2018)
12	Hasyim Abdullah	Audit Team Leader	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervsior (2018)
13	Mardani .	Audit Team Leader	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervsior (2018)
14	Fanny Novandra	Audit Team Leader	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervsior (2018)
15	Ageng Prianto	Audit Team Leader	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervsior (2018)
16	Rima Yustisi Yanti	Audit Team Leader	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervsior (2018)
17	Cipto Mugiharjo	Special Audit Department Head	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervsior (2018)
18	Achmad Subari	Investigation Audit Team Leader	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervsior (2018)
19	Muhammad Zulfany Batam	Investigation Audit Team Leader	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervsior (2018)
20	Muhammad Zidni Nuri	Investigation Audit Team Leader	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervsior (2018)
21	Dwiastari Adhita Putri	Evaluation Analyst Team Leader	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervsior (2018)
22	Asep Nana Heryana	Audit Dev. & Counterpart Rel. Dept Head	CBIA Level Auditor, CBIA Level Supervsior (2018)

Certified Bank Internal Auditor (CBIA) Level Auditor

No	Nama	Jabatan	Sertifikasi
1	Wibowo Triadi	Auditor	CBIA Level Auditor
2	Adi Nurhadi	Auditor	CBIA Level Auditor
3	John Abrar	Auditor	CBIA Level Auditor
4	Syahdan Fahmi	Auditor	CBIA Level Auditor
5	David John Charles	Auditor	CBIA Level Auditor
6	Hartono	Auditor	CBIA Level Auditor
7	Wahyu Firmansyah	Auditor	CBIA Level Auditor
8	Irwan Herdiawan	Auditor	CBIA Level Auditor
9	Herris Permana	Auditor	CBIA Level Auditor
10	Hans Hartanto	Auditor	CBIA Level Auditor
11	Hendro Syah Putra	Auditor	CBIA Level Auditor
12	Ardiansyah.	Auditor	CBIA Level Auditor
13	Bahrul Ulum	Auditor	CBIA Level Auditor
14	Nia Handayani	Auditor	CBIA Level Auditor
15	Muhammad Enviardi Bahri	Evaluation Analyst Officer	CBIA Level Auditor
16	Muhammad Fachmi	Investigator	CBIA Level Auditor
17	Arif Pribadi	Investigator	CBIA Level Auditor
18	Brantas.	Investigator	CBIA Level Auditor
19	Dina Septiani	Audit Development Officer	CBIA Level Auditor
20	Diah Fitri Handayani	Audit Development Officer	CBIA Level Auditor
21	Erwin Amrullah	External Audit Liaison Officer	CBIA Level Auditor
22	Effa Primasari	External Audit Liaison Officer	CBIA Level Auditor
23	Deviasary Rachmawaty	External Audit Liaison Officer	CBIA Level Auditor
24	Arie Noviarie Sumantri	Quality Assurance Officer	CBIA Level Auditor

Kode Etik Auditor

1. **Integritas (*Integrity*)**
   Internal Auditor memiliki integritas dengan membangun kepercayaan *(trust)* yang menjadi dasar untuk memberikan pendapat *(judgment)* yang handal.

2. **Objektivitas (*Objectivity*)**
   Internal Auditor menunjukkan objektivitas yang tinggi sesuai dengan standar profesi dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa.
   Internal Auditor melakukan penilaian secara seimbang *(balanced)* dengan memperhatikan semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau orang lain dalam membuat pendapat *(judgment)*.

3. **Kerahasiaan (*Confidentiality*)**
   Internal Auditor menghormati nilai dan kepemilikan atas informasi yang diterima, dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi pihak yang berwenang, kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesi yang mengharuskannya mengungkapkan informasi tersebut.

4. **Kompetensi (*Competency*)**
   Internal Auditor menggunakan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas audit.
   Aktivitas Internal Audit harus dilaksanakan dengan keahlian dan kemahiran profesional yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

5. **Kedisiplinan *(Discipline)***
   Internal Auditor memiliki disiplin yang baik dalam melaksanakan tugas dan profesinya. Internal Auditor menunjukan komitmen yang tinggi dalam mematuhi dan mentaati ketentuan, code of conduct, corporate value, serta norma umum. Selain itu, Internal Auditor harus bekerja dengan perencanaan yang baik dan tepat waktu.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Internal Audit Tahun 2019

PROGRAM KERJA INTERNAL AUDIT

Berdasarkan *Annual Audit Plan* tahun 2019 dengan mempertimbangkan profil risiko dan *stakeholder's concern* rencana audit tahun 2019 ditetapkan sebanyak **171** Penugasan. Dengan rincian penugasan sebagai berikut:

Jenis Audit	Unit Kerja			Total
	Kantor Pusat	RO, Area & Cabang	Aktivitas / Lainnya	
Audit Mandatory	-	-	**5** BI-ETP, RTGS, SKN, SSSS, DHN	**5**
Audit Umum	**9** CFG, CB1, CB2, WFR, PTG, ACG, HCS, HCP, CSG	**89** Regional Office = 7 Area = 28 Kantor Cabang = 50 RWB = 4	**5** ATM, Net Banking, Mobile Banking, Core Banking, Data Center	**103**
Audit Khusus	-	-	**58**	**58**
Audit Tematik			**5** Pembiayaan IMBT, Strategi peningkatan CASA, Penetapan bagi hasil musyarakah/ mudarabah, Supplier Financing, BSM Oto	**5**
Total	**9**	**89**	**73**	**171**

METODE AUDIT

Audit tahun 2019 dilakukan melalui pendekatan:

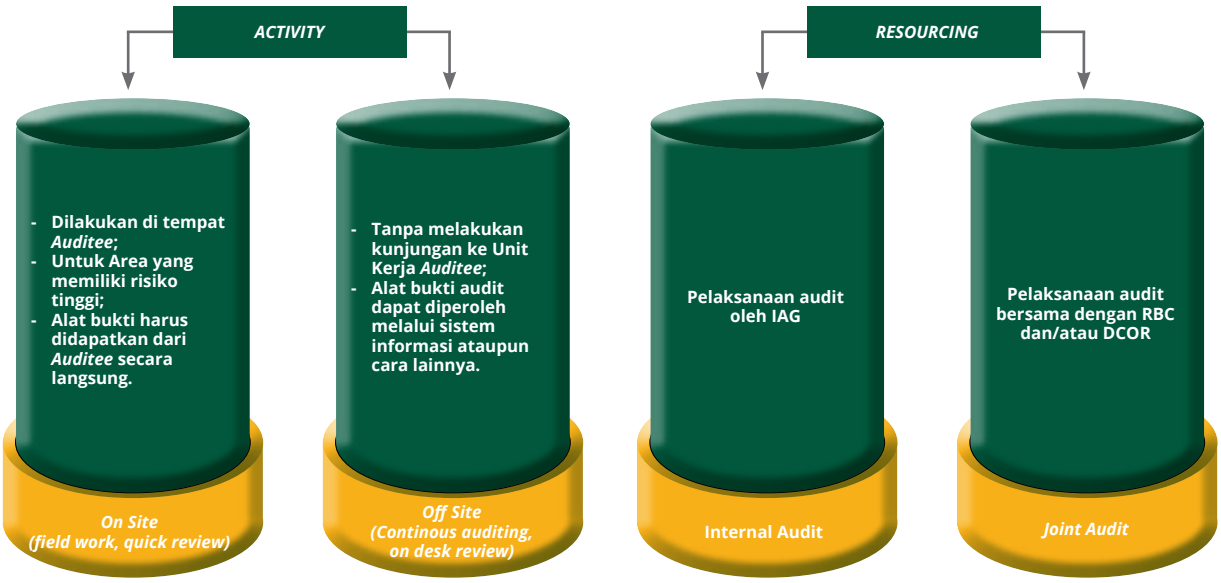
ACTIVITY
RESOURCING
- Dilakukan di tempat *Auditee*;
- Untuk Area yang memiliki risiko tinggi;
- Alat bukti harus didapatkan dari *Auditee* secara langsung.
On Site
(field work, quick review)
- Tanpa melakukan kunjungan ke Unit Kerja *Auditee*;
- Alat bukti audit dapat diperoleh melalui sistem informasi ataupun cara lainnya.
Off Site
(Continous auditing, on desk review)
Pelaksanaan audit oleh IAG
Internal Audit
Pelaksanaan audit bersama dengan RBC dan/atau DCOR
Joint Audit

PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT TAHUN 2019

Aktivitas audit dilaksanakan melalui audit umum *(general audit)* dan audit khusus dengan total pelaksanaan audit selama tahun 2019 sebanyak 182 penugasan atau mencapai 106,43% dari target 171 penugasan audit. Pencapaian *Service Level Agreement* (SLA) atas penyampaian opini kecukupan *internal control* yang mencakup opini/masukkan terhadap Kebijakan, Standar Prosedur, Manual Produk, Petunjuk Teknis, dan atau Memorandum Petunjuk Operasional sebanyak 132 opini mencapai 102,11% dari target 100%. Adapun pengembangan inisiatif strategis meliputi Implementasi *Continuous Audit*, *Integrated Fraud Information System* (IFIS), Pengembangan DMTL-*Online* (D-One), dan Implementasi *Internal Audit Competency Framework* (IACF).

Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit

Progres tindak lanjut hasil pemeriksaan Audit Internal (IAG) dan Eksternal (OJK, BPK, KAP PWC dan Bank Mandiri) selama Januari sampai dengan Desember 2019, sebagai berikut:

No	Jenis Pemeriksaan	Total DMTL Januari sampai dengan Desember 2019	Penyelesaian DMTL Januari sampai dengan Desember 2019	DMTL Pending Posisi 31 Desember 2019	Status Pending Posisi 31 Desember 2019	
					Sudah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo
1	Audit Internal					
	- Kantor Pusat	159	118	41	-	41
	- Region Office	213	187	26	-	26
Total		**372**	**305**	**67**		**67**
2	Audit Eksternal	107	94	13	-	13
Total		**107**	**94**	**13**	**-**	**13**
Grand Total		**479**	**399**	**80**	**-**	**80**

1. Progres tindaklanjut hasil pemeriksaan Internal Audit Group:
   a. Kantor Pusat dari total DMTL 159 *item* telah diselesaikan sebanyak 118 *item* atau 100% dari total DMTL Kantor Pusat yang telah jatuh tempo.
   b. Region Office dari total DMTL 213 *item* telah diselesaikan sebanyak 187 *item* atau 100% dari DMTL Region Office yang telah jatuh tempo.
2. Progres tindaklanjut hasil pemeriksaan Eksternal Audit dari total DMTL sebanyak 107 *item* telah diselesaikan sebanyak 94 *item* atau 100% dari DMTL Eksternal yang telah jatuh tempo.

Unit Manajemen Risiko

Struktur Organisasi Unit Manajemen Risiko

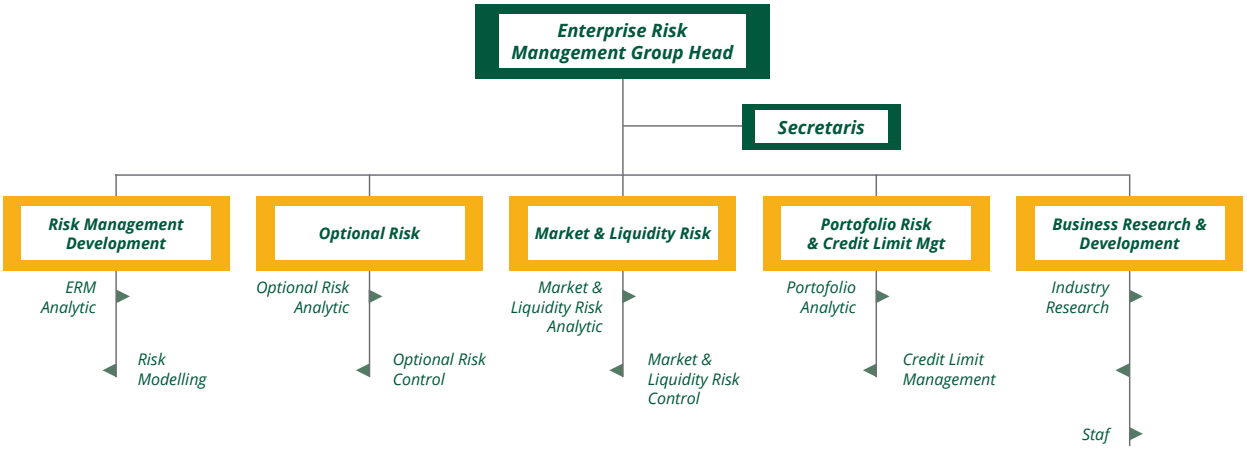

Profil Kepala Unit Manajemen Risiko

M Fanny Fansyuri
Head of Enterprise Risk Management

Riwayat Pendidikan
Pendidikan S1 Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran 1991

Riwayat Jabatan
- Group Head Enterprise Risk Management
- Group Head Strategic and Performance Management

Sertifikasi
- Design and Develop Assessment Tools, AAMC Training Group 2018.
- Credit Portfolio Management and Stress Testing, BARa 2018.
- Coaching Style Leadership, Vanaya Institute 2018.
- Future Risk Management, Indonesia Learning Center 2018.
- Upgrading Asesor Kompetensi, BNSP 2018.
- Audit Internal & Fraud Perbankan, LSPP-IBI , 2017
- People Manager Program, Experd 2017
- Training for Trainer Manajemen Risiko Perbankan Syariah, Asbisindo, 2017

Dasar Pengangkatan
SK No.18/010-KEP/DIR tanggal 12 Januari 2016.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Unit Manajemen Risiko

Group Head Enterprise Risk Group diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian tersebut sesuai Standar Prosedur Operasional Human Bank Capital Syariah Mandiri.

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Manajemen Risiko

Unit Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Merekomendasikan kepada Direksi mengenai kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko.
2. Memantau posisi eksposur risiko Bank secara keseluruhan.
3. Mengembangkan *tools* manajemen risiko.
4. Merekomendasikan penetapan limit risiko.
5. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja bisnis atau komite manajemen risiko antara lain *portfolio guideline* untuk pembiayaan.
6. Mengkaji usulan produk dan/atau aktivitas baru.
7. Melakukan *stress testing* terhadap portofolio Bank.
8. Menyusun laporan profil risiko.
9. Melakukan kaji ulang kerangka dan metodologi manajemen risiko.
10. Berperan aktif dalam komite/organ pengelolaan risiko.

Komposisi Personil Unit Manajemen Risiko

Jabatan	Jumlah
Group Head	1
Department Head	5
Officer	10
Sekretaris	1
Total	**17**

Sertifikasi Profesi Unit Manajemen Risiko

Pengembangan kompetensi pegawai unit manajemen risiko antara lain melalui Program Sertifikasi Manajemen Risiko. Sampai dengan 31 Desember 2019, terdapat 14 (empat belas) orang pegawai yang telah memperoleh sertifikasi manajemen risiko level I sampai dengan level IV, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Pengembangan Kompetensi Enterprise Risk Management Group

No	Nama Pendidikan dan Pengembangan Pegawai	Nama Penyelenggara	Tanggal Penyelenggaraan
1	*Industry Focused Mastery*: Sektor Telekomunikasi 2019	Mandiri Syariah University	17 Januari 20109
2	*Interest Rate Risk in The Banking Book*	Bankers Association For Risk Management	29 Januari 2019
3	*English Course*	Mandiri Syariah University & English today	12 November 2018 - 31 Januari 2019
4	*WORKSHOP* TEKNIKAL KOMPETENSI	Mandiri Syariah University	11-12 Februari 2019
5	*Forum Group Discussion*: Jasa Kesehatan	Mandiri Syariah University	27 Februari 2019
6	*Workshop Control Testing*	Mandiri Syariah University	23 April 2019
7	*Applied marketing Research*	PPM Management	27-29 Maret 2019
8	Uji Kompetensi Manajemen Risiko	Asbisindo	25-26 April 2019
9	*Knowledge Sharing Forum* Wakalah Bil Istimar	Mandiri Syariah University	7 Mei 2019
10	*Knowledge Sharing Forum* Sustainable Finance	Mandiri Syariah University	3 Juli 2019
11	*Knowledge Sharing Forum* Kebandarudaraan	Mandiri Syariah University	4 Juli 2019
12	*Strategic Management Program*	NUS Singapore	10-14 Juli 2019
13	*Training Microsoft Power* BI	Mandiri Syariah University	23-24 Juli 2019
14	*Sharing Session Suistainable Finance*	Mandiri Syariah University	29 Agustus 2019
15	*Refreshment Manajemen Risiko*	Bankers Association For Risk Management	5 September 2019
16	*Knowledge Sharing Executive Islamic Economic Updates*	Mandiri Syariah University	13 September 2019
17	*Workshop* Pengelolaan Kas Mata Uang Rupiah dan valuta Asing	Mandiri Syariah University	3 Oktober 2019
18	*Learning Need Analysist* (LNA) 2020	Mandiri Syariah University	8-11 Oktober 2019
19	*Workshop Business Continuity Management*	Mandiri Syariah University	21-22 Oktober 2019
20	*Workshop* PSAK 71 *Impairment Deep Dive In Risk Management Perspective*	Bankers Association For Risk Management	24-25 Oktober 2019
21	*Training & Workshop How Would You Deliver Yourself a Brand – New Person Self Development Program*	Mandiri Syariah University - MDP Consulting	8-9 November 2019
22	*Workshop* penyusunan Modul Literasi Keuangan Syaiah	Mandiri Syariah University	20 November 2019
23	*Public Preparation Class and Examination Professional Financial Modeler*	Rj Consulting	25-29 November 2019
24	*The Meeting of Minds Forum* 2019	Heritage Amanah	11-12 Desember 2019

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Unit Manajemen Risiko Tahun 2019

Pelaksanaan kegiatan Unit Kerja Manajemen Risiko selama tahun 2019 yaitu:

1. Pembuatan/Pemutakhiran Kebijakan/SPO/PTO
   a. SPB *Portfolio Guideline*
      1) *Industry class*
      2) *Industry limit*
      3) *Industry Acceptance Criteria*
   b. SPP Manajemen Risiko Operasional
2. Pengembangan/Implementasi *Tools*
   a. RCSA *end to end process* (*control testing*)
      1) *Control Testing* (CT) Pembiayaan Kendaraan berkah
      2) CT pembiayaan bisnis *banking* (Pembiayaan Koperasi Pada Anggota (PKPA) *Executing & Channeling*
      3) CT Pembiayaan Korporasi
      4) CT *Information Technology*
   b. Pengembangan *Operational Risk System* bekerjasama dengan Bank Mandiri
   c. Pemutakhiran/kaji ulang Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko
   d. *Operational Risk Awareness* (OPERA)
   e. Rating *system* pembiayaan *wholesale*
   f. Limit kapasitas Penutupan Asuransi
3. Pembuatan Kajian/*Review*
   a. Produk/ aktivitas/ prosedur
   b. Sektor industri/*industry update*
   c. ATMR Pembiayaan
   d. Profil risiko bank/region/area
   e. *Stress Test*:
      1) risiko Kredit
      2) risiko pasar dan likuiditas
   f. *Limit* wewenang Memutus Pembiayaan secara otomatis untuk pembiayaan konsumer
   g. *Portfolio alert*
   h. *Disaster Recovery Plan*
   i. *Release control board*
4. Pengelolaan *Limit*
   a. Kewenangan memutus pembiayaan
      1) pemberian baru
      2) evaluasi
   b. Transaksi operasional
      1) pencairan pembiayaan
      2) penyelesaian *complain* transaksi di ATM BSM
      3) pencetakan bilyet deposito oleh CS
      4) tresuri
      5) rekanan asuransi
5. Pemantauan/*Monitoring*
   a. *Liquidity Gap*
   b. *Repricing Gap*
   c. Risiko Pasar dan Likuiditas
   d. *Portfolio Alert*
6. Pelaporan
   a. Profil Risiko
   b. *Loss Incident and Subsidiaries Report Operational Risk Control Matrics*
   c. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
   d. Tingkat Kesehatan Bank
   e. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko
   f. *Liquidity Coverage Ratio*
   g. *Net Stable Funding Ratio*
7. Riset
   a. Riset Nasabah Bank Syariah
   b. Riset Potensi Sektor Jasa Kesehatan
   c. Riset Potensi Sektor Jasa Pendidikan
   d. Riset Kebutuhan Transaksi di Perguruan Tinggi
   e. Kajian Bank Pesaing

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI

Kebijakan Remunerasi

Prosedur penetapan remunerasi dan fasilitas lain (*remuneration package*) untuk Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Berdasarkan peraturan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menetapkan *remuneration package* melaksanakan hal berikut:

a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
b. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.

Struktur Remunerasi

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya (*remuneration package*) yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS antara lain meliputi:

a. Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan (*benefit*), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya; dan
b. Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura), antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Indikator Penetapan Remunerasi

Dalam penetapan *remuneration package* tersebut Komite Remunerasi dan Nominasi telah memperhatikan:

a. Kinerja keuangan;
b. Pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva;
c. Kewajaran dengan *peer group*; dan
d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BUS.

Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah Dan Direksi

Jumlah nominal remunerasi yang diterima Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi selama tahun 2019, adalah sebagai berikut.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah yang diterima dalam 1 (satu) tahun					
	Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah		Direksi	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lain dalam bentuk non natura	3	6.689	3	2.402	6	32.284
Fasilitas lainnya dalam bentuk natura (perumahan, tunjangan kesehatan dan sebagainya) yang*: a.Dapat dimiliki dan/ atau; Tidak dapat dimiliki.	3	80	3	42	6	347
Total	**3****	**6.786**	**3****	**2.444**	**6****	**32.631**

*) dinilai dalam ekuivalen Rupiah.
**) Di pertengahan tahun 2019, terjadi rekomposisi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi

Keterangan:

1. Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan (benefit), tantiem/bonus, THR dan bentuk remunerasi lainnya;
2. Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura), antara lain fasilitas perumahan, tunjangan kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut.

Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris

Jumlah Remunerasi	Jumlah Komisaris	Jumlah Dewan Pengawas Syariah	Jumlah Direksi
Di atas Rp2 Milyar	2	-	5
Di atas Rp1 Milyar - Rp2 Milyar	-	-	-
Di atas Rp500 juta - Rp1 Milyar	-	1	-
Rp500 juta ke bawah	1	2	-

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

AKUNTAN PUBLIK

Berdasarkan Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tentang perubahan atas No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 telah dilakukan oleh akuntan publik yang independen, kompeten, profesional dan obyektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan serta selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, maka secara rutin dilakukan pertemuan-pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan. Perseroan selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara Akuntan Publik, Komite Audit dan Manajemen Perseroan untuk dapat meminimalisir kendala-kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung.

Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Auditor Eksternal memiliki fungsi untuk melakukan audit Laporan Keuangan Bank, membentuk dan menyatakan pendapat atas kewajaran Laporan Keuangan Bank serta menguji pengendalian internal (*Internal Control Review*), termasuk pengujian kembali item yang sudah diuji oleh Internal Audit dan observasi dari prosedur yang dilakukan oleh Internal Audit.

Pertimbangan perlunya Audit Eksternal bagi sebuah Bank antara lain sebagai berikut:

a. Penerapan tata kelola yang baik membutuhkan fungsi audit internal yang independen serta memiliki kewenangan, sumber daya kompeten, dan akses informasi yang memadai.
b. Pelaksanaan audit intern yang efektif memberikan jaminan independen kepada Bank terkait kualitas dan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, serta proses dan sistem tata kelola untuk melindungi organisasi dan reputasi Bank.
c. Praktek internal audit bank mencakup penerapan standar profesional audit intern yang ditetapkan oleh asosiasi audit internal.

Tujuan audit adalah untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Audit Pihak Kedua dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (Standar Auditing Indonesia). Standar tersebut mengharuskan Pihak Kedua mematuhi ketentuan etika dan merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian terhadap risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pihak Pertama untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal Pihak Pertama.

PBI No. 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah, Pasal 3 Bank harus memiliki anggaran dasar yang selain memenuhi persyaratan anggaran dasar, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan juga harus memuat ketentuan: c. RUPS Bank yang menetapkan tugas manajemen, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, Laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia.
POJK No. 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Pasal 6: Laporan keuangan posisi akhir bulan Desember yang diumumkan secara triwulan dan tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

POJK No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan Pasal 13 ayat (1): Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

Penunjukan Akuntan Publik

a. Penunjukan KAP dan AP serta penetapan biaya/ honorariumnya untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan dilakukan berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai rekomendasi Komite Audit.
b. KAP dan/atau AP yang telah melaksanakan pekerjaan audit dengan baik, dapat diusulkan kembali guna melakukan audit laporan keuangan tahunan tahun buku berikutnya setelah mempertimbangkan persyaratan dalam ketentuan yang berlaku.

Syarat untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan evaluasi Dewan Komisaris sebagai berikut:
a. Mempunyai izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang masih berlaku.
b. Terdaftar sebagai Kantor Akuntan Publik di Otoritas Jasa Keuangan dan Akuntan Publik yang menjadi *Signing Partner* terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
c. Berafiliasi sebagai member (bukan korespondensi) dari KAP yang berskala Internasional.
d. Berpengalaman melakukan audit laporan keuangan tahunan bank umum yang beraset lebih dari Rp10 triliun.
e. Berpengalaman melakukan audit laporan keuangan tahunan bank umum syariah atau unit usaha syariah.

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan *Fee*

Berdasarkan POJK nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank pasal 6 berbunyi Laporan Keuangan posisi akhir bulan Desember yang diumumkan secara triwulanan dan tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Berikut daftar Kantor Akuntan Publik, nama akuntan, dan *fee*.

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan, dan *Fee*

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Periode KAP	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab)	Periode Akuntan	*Fee* Jasa Audit
2019	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Periode ke 5	Lucy Luciana Suhenda, S.E., AK.CPA	Periode ke 2	Rp2.950.000.000
2018	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan		Lucy Luciana Suhenda, S.E., AK.CPA		Rp2.575.000.000
2017	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan		Drs. M.Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA	Periode ke 3	Rp2.450.000.000
2016	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan		Drs. M.Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA		Rp2.100.000.000
2015	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan		Drs. M.Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA		Rp2.100.000.000
2014	Purwantono, Suherman & Surja	Periode ke 3	Benyanto Suherman	Periode ke 3	Rp1.895.000.000
2013	Purwantono, Suherman & Surja		Benyanto Suherman		Rp943.000.000
2012	Purwantono, Suherman & Surja		Benyanto Suherman		Rp856.750.000

Jasa Lain yang Diberikan Akuntan

Selama tahun 2019, tidak terdapat jasa lain yang diberikan oleh Akuntan.

Koordinasi Auditor Eksternal dan Komite Audit

Mandiri Syariah senantiasa berupaya meningkatkan komunikasi antara Kantor Akuntan Publik, Komite Audit dan Internal Audit untuk dapat meminimalisir kendala-kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung. Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan dan selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, secara rutin dilakukan pertemuan-pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan.

MANAJEMEN RISIKO

Perkembangan indutri perbankan yang semakin dinamis, antara lain ditandai oleh persaingan bank yang semakin ketat, demografis nasabah yang berkembang, perubahan dan penerapan peraturan baru perbankan dan kondisi ekonomi makro yang semakin menantang, membuat Bank perlu meningkatkan pengelolaan risiko yang efektif melalui penerapan manajemen risiko yang terintegrasi.

Pengelolaan risiko Bank dilakukan secara proaktif dan terintegrasi untuk mengelola risiko sesuai *risk appetite* dan *risk tolerance*, menjaga ketersediaan modal, mendukung strategi bisnis serta menjaga reputasi bank. Penerapan manajemen risiko menjadi salah satu pondasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan dengan *return* yang optimal.

Dasar Penerapan Manajemen Risiko

Selain mengacu pada kesepakatan Basel (Basel Accord), Bank senantiasa patuh dan taat kepada ketentuan regulator:
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65 /POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 35 /SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar bagi Bank Umum Syariah.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar bagi Bank Umum Syariah.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tangggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sesuai regulasi, Bank wajib mengelola 10 risiko meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko investasi, dan risiko imbal hasil.

Sistem Manajemen Risiko

Implementasi manajemen risiko dilaksanakan melalui empat pilar penerapan manajemen risiko sebagai berikut:

Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Organisasi manajemen risiko terdiri atas Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan risiko dibantu oleh Komite Pemantau Risiko (KPR) dan Direksi yang menjalankan fungsi kebijakan dan strategi risiko (*risk policy*) dibantu oleh Komite Manajemen Risiko.

Risk Governance Structure

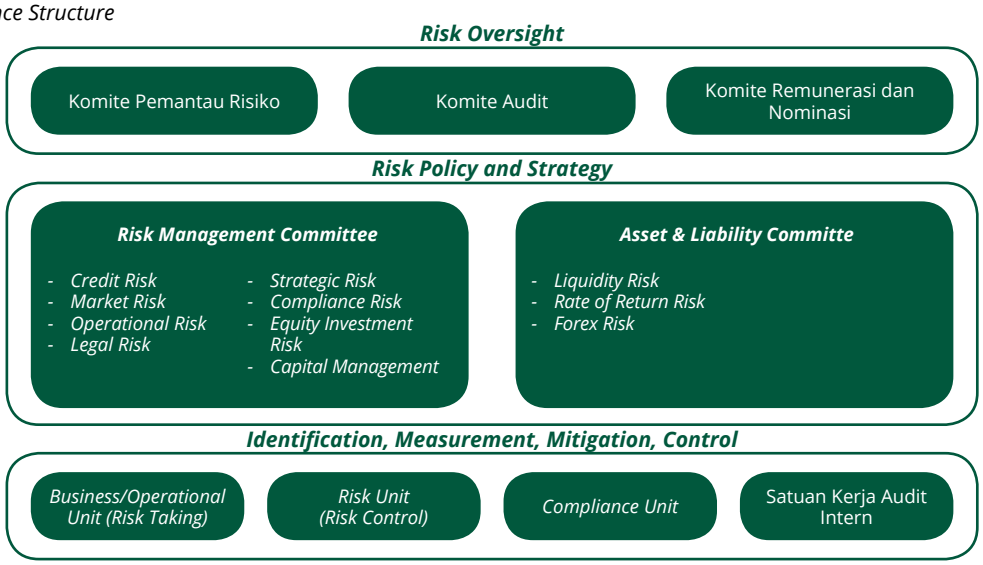

Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit xxx bagan

Bank memiliki Kebijakan Manajemen Risiko dan Standar Prosedur Manajemen Risiko sebagai pedoman utama penerapan manajemen risiko, yang merupakan landasan bagi kebijakan dan prosedur bisnis dan operasional. Pada kebijakan dan prosedur manajemen risiko diatur limit setiap aktivitas, baik pada level portofolio maupun transaksional. Kebijakan dan prosedur tersebut dievaluasi dan di-*update* minimal sekali dalam setahun. Bank menetapkan limit risiko pada setiap aktivitas, baik pada level portofolio maupun transaksional.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, dan sistem informasi manajemen risiko dengan pendekatan pengelolaan risiko melalui aktivitas operasional dan permodalan. Bank mengimplementasikan *enterprise risk management* menggunakan pendekatan *two-prong*, untuk memastikan bahwa risiko tidak hanya dimitigasi dengan baik melalui proses bisnis sehari-hari, namun juga pada kondisi yang tidak terduga (*downturn*) melalui pencadangan modal.
Bank telah menghitung kecukupan modal untuk risiko kredit, pasar, dan operasional dengan pendekatan:

a. Risiko kredit menggunakan *standardized approach.*
b. Risiko pasar menggunakan *standardized approach*. Dalam menilai kecukupan modal secara internal, bank menggunakan pendekatan *Value at Risk* (VaR).
c. Risiko operasional menggunakan *Basic Indicator Approach*.

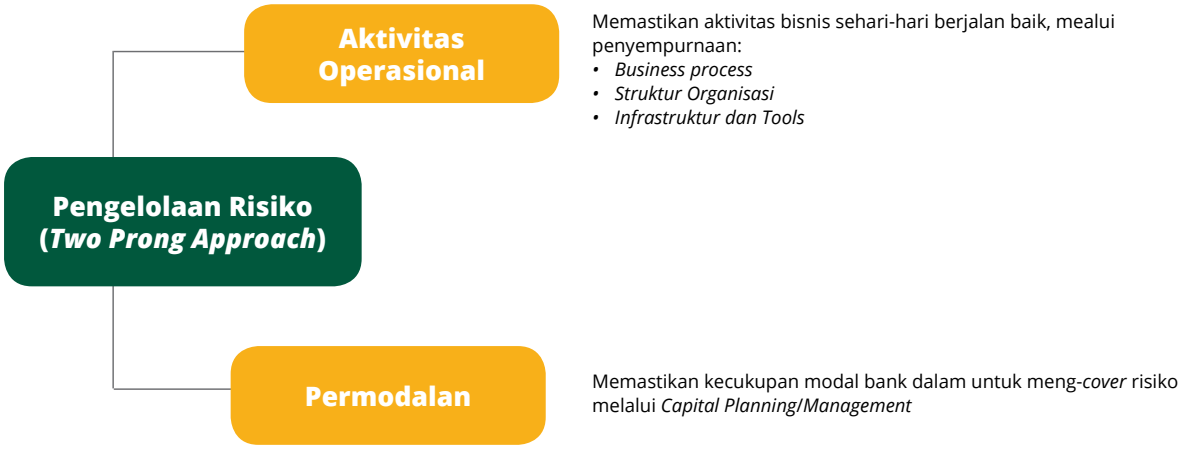
Pengelolaan Risiko (Two Prong Approach)
Aktivitas Operasional
Memastikan aktivitas bisnis sehari-hari berjalan baik, mealui penyempurnaan:
• Business process
• Struktur Organisasi
• Infrastruktur dan Tools
Permodalan
Memastikan kecukupan modal bank dalam untuk meng-cover risiko melalui Capital Planning/Management

Sistem Pengendalian Intern

Bank menjalankan praktik pengelolaan risiko yang efektif di seluruh Unit Kerja dengan menerapkan kebijakan *Three line of defense models* dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Unit Kerja sebagai *risk owner* merupakan *first line of defense* yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan risiko unit kerjanya.
2. Unit Risk Management berperan sebagai *second line of defense* yang melakukan pengawasan.
3. Unit Internal Audit sebagai *third line of defense* yang menjalankan fungsi *independent assurance*.

Pelaksanaan sistem pengendalian internal atas fungsi Manajemen Risiko merupakan tanggung jawab bersama baik *first, second* maupun *third line of defense*.

Peningkatan *Risk Awareness*

Dalam rangka meningkatkan *risk awareness* pegawai, Bank melakukan:
1. Internalisasi penerapan manajemen risiko melalui pelatihan pegawai.
   Bank secara konsisten meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan, sertifikasi, sosialisasi internalisasi, forum diskusi, magang, atau program lain terkait penerapan manajemen risiko. Bank menetapkan modul manajemen risiko sebagai kurikulum wajib pada setiap program *training*/pelatihan untuk setiap jenjang. Modul manajemen risiko dimutakhirkan secara berkala sesuai perkembangan dan perubahan kondisi internal dan eksternal Bank.

2. Sertifikasi Manajemen Risiko
   Bank mengikutsertakan pejabat-pejabat level tertentu dalam Uji Kompetensi Manajemen Risiko. Sampai dengan Desember 2019, jumlah pegawai yang telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko adalah:

Sertifikasi	2019
Tingkat 1	1655
Tingkat 2	889
Tingkat 3	76
Tingkat 4	40
Tingkat 5	8
Total	**2668**

3. *Risk Awareness Survey* (RAWS)
   Bank melaksanakan RAWS bersama Bank Mandiri sebagai perusahaan induk yang bertujuan:
   a. Mengidentifikasi tingkat kesadaran manajemen risiko pegawai di berbagai tingkat unit kerja.
   b. Memperoleh gambaran seberapa jauh pemahaman pegawai terhadap penerapan manajemen risiko.
   c. Memberikan arahan dalam meningkatkan kesadaran risiko pada periode selanjutnya.

   Hasil penilaian RAWS tahun 2018 menunjukkan bahwa tingkat kesadaran risiko berada pada tingkat Sangat Baik, sama dengan predikat hasil penilaian RAWS pada tahun 2018.

Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko

Bank menyadari bahwa proses penerapan manajemen risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian risiko yang handal. Untuk memastikan kecukupan sistem pengendalian risiko, Bank melaksanakan kaji ulang secara berkala yaitu:
1. Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan kaji ulang antara lain metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur dan menetapkan limit risiko.
2. Satuan Kerja Audit Intern melakukan kaji ulang antara lain mencakup keandalan kerangka manajemen risiko dan penerapan manajemen risiko oleh unit bisnis dan/ atau unit pendukung.

Profil Risiko dan Pengelolaannya

RISIKO KREDIT DAN RISIKO INVESTASI
Pengelolaan risiko kredit dan investasi bertujuan untuk mengarahkan ekspansi bisnis sesuai *portfolio guideline* dan *risk appetite* Bank.

Organisasi
Bank membentuk perangkat organisasi yang mendukung penerapan manajemen risiko di bidang pembiayaan melalui implementasi 3 pilar dalam proses pemberian pembiayaan yaitu unit bisnis yang melakukan inisiasi, unit *risk* yang memiliki fungsi *risk assessment* (Unit Kerja *Retail Risk Assessment* dan Unit Kerja *Wholesale Risk Assessment*), dan *unit financing operation* sebagai unit independen terhadap unit bisnis dan unit *risk* serta unit *recovery* yang berfungsi melakukan proses restrukturisasi dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Kebijakan dan Prosedur
Bank menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Kredit, Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan, Manual Produk dan Petunjuk Teknis Operasional untuk masing-masing segmen pembiayaan.

Proses*, Tools* dan Limit
Bank mengelola risiko kredit melalui:
1. Penetapan *Portfolio Guideline* yang terdiri atas:
   a. *Industry Class*
      Bank menetapkan *industry class* ke dalam 3 (tiga) klasifikasi (*industry classification*) yaitu menarik, netral, dan selektif. Penyaluran pembiayaan diutamakan untuk sektor/ bidang usaha dengan klasifikasi menarik dan netral.
   b. *Industry Limit*
      Bank menetapkan *industry limit* untuk menjaga konsentrasi portfolio Bank. Bank *menerapkan* industry limit untuk portofolio sektor industri. termasuk limit investasi surat berharga maupun

individual nasabah. Pada level transaksional, bank menetapkan limit kewenangan memutus pembiayaan bagi pejabat bank.

c. *Industry Acceptance Criteria*
Bank menetapkan industry acceptance criteria limit untuk merepresentasikan *risk appetite bank* pada sektor industri tertentu dan sebagai alat untuk menyeleksi calon debitur pada suatu sektor industri tertentu sebelum proposal calon debitur dianalisa lebih lanjut. Bank menetapkan *industry acceptance criteria* limit untuk merepresentasikan *risk appetite* bank pada sektor industri tertentu dan sebagai alat untuk menyeleksi calon debitur pada suatu sektor industri tertentu sebelum proposal calon nasabah dianalisa lebih lanjut.
d. *Implementasi scoring system* pembiayaan mikro, *small,* dan konsumer.
e. *Implementasi watch list tools* untuk memonitor kinerja debitur, dan untuk menetapkan *account srategy*.
f. *Stress test* portofolio pembiayaan secara berkala untuk mengetahui dampak perubahan kondisi ekonomi yang mungkin terjadi terhadap kualitas portofolio Bank.

RISIKO PASAR
Pengelolaan risiko pasar bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif pergerakan variabel pasar terhadap posisi portfolio bank.

Organisasi
Bank menerapkan *segregation of duty* dalam pengelolaan risiko pasar, dengan memisahkan fungsi *front office, middle office*, dan *back office* pada transaksi tresuri. Unit bisnis sebagai *front office* berfungsi untuk melaksanakan transaksi tresuri. *Front office* berfungsi sebagai *first line of defense* yang melakukan transaksi sesuai limit yang telah ditetapkan.

Unit manajemen risiko berfungsi sebagai *middle office* dan *second line of defence,* melakukan fungsi review limit risiko, pemantauan risiko pasar dan kepatuhan terhadap limit risiko. Unit kerja operasional sebagai *back office* berfungsi melakukan pembukuan dan *settlement* transaksi.

Kebijakan, Prosedur dan Kecukupan Limit
Bank menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dan Standar Prosedur Bisnis *Treasury and International Banking* serta ketentuan pengelolaan risiko pasar lainnya. Penetapan limit risiko pasar mencakup antara lain Posisi Devisa Neto (PDN), *Value at Risk* (VaR), posisi terbuka, *stop loss*, transaksi *treasury*, *cut loss* dan *bank notes.*

Pengelolaan dan Pengukuran Risiko Pasar *Trading Book*
Bank melakukan valuasi surat berharga *trading* secara harian menggunakan harga pasar dari sumber yang independen. Bank melakukan perhitungan kecukupan modal secara internal, menggunakan *Value at Risk* (VaR). VaR menggambarkan potensi maksimum atas kerugian yang dialami oleh Bank sebagai akibat pergerakan pasar yang memengaruhi eksposur risiko Bank dalam kondisi pasar yang normal.

Bank melakukan *stress testing* untuk menguji ketahanan modal terhadap pergerakan faktor pasar yang signifikan dan mempersiapkan strategi yang diperlukan jika kondisi krisis tersebut terjadi. Pemantauan risiko pasar *trading book* dilakukan secara berkala terhadap portofolio, pergerakan harga pasar surat berharga, realisasi terhadap limit dan potensi keuntungan/kerugian dari surat berharga *trading book*.

Pengelolaan dan Pengukuran Risiko Nilai Tukar
Bank senantiasa memantau realisasi Posisi Devisa Neto (PDN) terhadap limit dan pergerakan nilai tukar.

Portofolio *Trading Book* dan *Banking Book* yang diperhitungkan dalam KPMM
Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar, Bank mengacu pada SEOJK No. 35/SEOJK.03/2015 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar Bagi Bank Umum Syariah

RISIKO LIKUIDITAS
Pengelolaan risiko likuiditas bertujuan untuk memelihara kecukupan/ketersediaan sumber pendanaan arus kas untuk memenuhi kewajiban bank.

Organisasi
Pengelolaan likuiditas dilakukan oleh unit tresuri sebagai *front office*, unit manajemen risiko sebagai *middle office* dan unit *operation* sebagai *back office*.

Kebijakan, Prosedur dan Kecukupan Limit
Bank menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas dan ketentuan pengelolaan risiko likuiditas lainnya termasuk Standar Prosedur Bisnis *Tresury and International Banking.* Bank memiliki limit risiko likuiditas antara lain: Giro Wajib Minimum (GWM), saldo kas maksimal cabang, *safety level* cadangan likuiditas dan deposan terbesar.

Pengelolaan Risiko Likuiditas
Dalam mengelola likuiditas, Bank:
1. Menjaga ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi sebagai cadangan likuiditas. Pada tahun 2019, Bank telah menempatkan kelebihan likuiditas pada instrument likuiditas baru Bank Indonesia yaitu Sukuk BI.
2. Mengukur dan memantau risiko likuiditas melalui proyeksi *cashflow*, *liquidity gap*, *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), *Net Stable Funding Ratio* (NSFR).
3. *Melakukan stress testing* risiko likuiditas secara berkala.
4. Memelihara akses ke pasar uang antar bank syariah melalui perolehan dan pemberian *credit line* dari dan untuk bank lain.
5. Memiliki *Liquidity Contingency Plan* (LCP) antara lain melalui pinjaman pasar uang, repo, pinjaman bilateral, dan penjualan surat berharga.

RISIKO OPERASIONAL
Pengelolaan risiko operasional bertujuan untuk meminimalisir eksposur risiko yang disebabkan faktor manusia, prosedur internal, kegagalan sistem dan faktor eksternal.

Organisasi
1. Bank menerapkan pemisahan tugas/tanggung jawab *(segregation of duties)* yang jelas melalui pemisahan fungsi *maker, checker, approver/*otorisator dan mekanisme *dual custody* dalam setiap transaksi.
2. Bank membentuk unit kerja yang berfungsi memastikan berjalannya kontrol di setiap unit kerja yaitu:
   a. Regional *Business Control* (RBC) di *region office* untuk memantau dan memastikan penerapan kepatuhan, pengelolaan *operational risk* dan *internal control* di kantor wilayah, area dan cabang.
   b. *Desentralized Compliance & Operational Risk* (DCOR) di setiap Direktorat Kantor Pusat untuk memantau dan memastikan penerapan kepatuhan, pengelolaan *operational risk* dan *internal control* di unit kerja kantor pusat.

Kebijakan dan Prosedur
Bank menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Operasional dan Standar Prosedur Manajemen Risiko Operasional yang menjadi acuan pengelolaan risiko operasional dan menjadi landasan dalam setiap pembuatan ketentuan operasional Bank. Selain itu Bank juga telah menetapkan Petunjuk Teknis Operasional mengenai *Operational Risk Tools* yang menjadi panduan bagi Bank dalam penerapan *tools* manajemen risiko operasional.

Proses,Tools dan Kecukupan Limit
Bank mengelola risiko operasional melalui:
1. Penerapan *Risk & Control Self Assessment* (RCSA) untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan memitigasi eksposur risiko operasional yang dilakukan secara mandiri oleh seluruh unit kerja (cabang dan kantor pusat). RCSA bersifat prediktif *(forward looking)* sehingga dapat digunakan untuk mengantisipasi atau meminimalisir potensi kerugian yang disebabkan kejadian risiko operasional. Pemutakhiran RCSA dilakukan secara berkala (triwulanan).
2. Penerapan RCSA *end to end process* bisnis Bank yang dapat menggambarkan secara menyeluruh dan komprehensif mengenai profil risiko operasional berdasarkan segmen tertentu. Penerapan RCSA *end to end process* yang sudah berjalan meliputi pembiayaan gadai, pembiayaan mikro dan operasional *branch*.
3. Penerapan Control Testing (CT) untuk menguji (*testing*) atas kecukupan penerapan kontrol operasional dan melakukan perbaikan kontrol secara berkelanjutan. Penerapan CT yang sudah berjalan yaitu CT pembiayan gadai, pembiayaan mikro dan pembiayaan operasional. Penerapan CT dilakukan oleh RBC dan DCOR melalui pelaksanaan *onsite review* di unit kerja dan cabang secara berkala (triwulanan).
4. Penetapan Limit transaksi operasional Kantor Pusat, *Region*, Area dan *Branch*, Limit transaksi *electronic channel* (*Internet Banking*, ATM, *Mobile Banking*), Limit transaksi *outlet* gadai, dan limit pengadaan barang dan jasa. Limit tersebut dievaluasi secara berkala agar dapat mendukung pelaksanaan operasional bank dengan *prudent.*
5. Penggunaan aplikasi *Operational Risk Management Information System* (ORMIS) yang berfungsi sebagai *early warning signal* potensi kejadian risiko dan sekaligus sebagai *Loss Event Database* (LED).
6. Bank telah menerapkan *Business Continuity Management* dalam rangka memastikan keberlangsungan operasional bank pada saat terjadi *disaster*. Dalam rangka mengoptimalkan penerapan BCM, Bank telah melakukan kaji ulang melalui pemutakhiran ketentuan BCM, pemutakhiran *Business Impact Analysis* (BIA) dan *Risk Assessment* (RA), pembuatan *safety briefing* & infografis penanganan bencana, penyesuaian organisasi BCM, pelaksanaan uji coba *Disaster Recovery Plan* (DRP) untuk *Information Technology* (IT) secara periodik dan pelaksanaan uji coba *Emergency Response Plan* untuk bencana kebakaran.

Penerapan manajemen risiko teknologi informasi melalui:
1. Standardisasi perangkat jaringan komunikasi data dan *software*, pengelolaan kewenangan akses sistem, pengembangan layanan perbankan elektronik dari segi keamanan aksesibilitas dan *Disaster Recovery Plan.*
2. Pelaksanaan *User Acceptance Test* (UAT) atas setiap pembuatan dan pengembangan sistem aplikasi baru untuk meminimalisasi potensi kegagalan sistem aplikasi.
3. Pelaksanaan forum *Release Control Board* untuk memastikan sistem yang akan "*live*" telah memenuhi standar pengembangan IT yang memadai baik dari aspek kecukupan infrastruktur IT maupun proses internal.

Risiko Lainnya
Di samping pengelolaan terhadap risiko-risiko utama, Bank mengelola risiko lainnya yang meliputi risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan dan risiko imbal hasil.

Organisasi
1. Bank memiliki unit kerja - unit kerja independen terhadap satuan kerja operasional yang berperan mengelola risiko lainnya meliputi risiko hukum, risiko reputasi, risiko kepatuhan, dan risiko stratejik.
2. Bank menempatkan *legal officer* di seluruh *region office*. Bank membentuk *Desentralized Compliance & Operational Risk* (DCOR) di Direktorat untuk memantau dan memastikan pengelolaan risiko di unit kerja kantor pusat.

Kebijakan dan Prosedur
Bank menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko dan Standar Prosedur Manajemen Risiko untuk mengelola risiko lainnya, antara lain Standar Prosedur Pengendalian Hukum, Standar Prosedur Pengendalian Kepatuhan, Standar Prosedur Prosedur Pengendalian *Know Your Customer*, Anti Pencucian dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Standar Prosedur Operasional Perlindungan dan Pengaduan Nasabah, Standar Prosedur Operasional Rencana Korporasi (*Corporate Plan*), Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis bank (RBB).

Pemantauan Risiko
Bank melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap risiko lainnya antara lain:

1. Pemantauan penanganan perkara baik pidana maupun non pidana serta pengendalian risiko hukum melalui pencadangan untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat tuntutan hukum. Apabila diperlukan, bank menggunakan jasa *external lawyer* dalam membantu penanganan kasus-kasus hukum yang mengandung tuntutan ganti rugi.
2. Pengujian dan pemantauan kepatuhan terhadap aktivitas operasional melalui sistem informasi kepatuhan (SIK) serta pelaksanaan fungsi *internal sharia advisory* untuk mengkaji dan menganalisas kesesuaian suatu produk/aktivitas bank dengan prinsip syariah.
3. Pemantauan dan pengendalian penyelesaian pengaduan nasabah melalui *Complaint Handling Management* dan pelaksanaan pengukuran risiko reputasi melalui metodologi *Publicity Effectiveness Level* (PEL) serta implementasi *command center* untuk pengelolaan publikasi yang terkait dengan pelaporan kasus yang terjadi.
4. Pelaksanaan *performance review* periodik secara berjenjang untuk mengevaluasi kinerja dan efektivitas strategi yang dilakukan.
5. Penerapan protokol imbal hasil, review imbal hasil dana pihak ketiga dan pembiayaan.

Penilaian Risiko

Penilaian profil risiko bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh *stakeholder* mengenai kondisi risiko usaha yang dihadapi bank. Profil risiko meliputi penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko.

Berdasarkan peringkat komposit profil risiko bank per 31 Desember 2019 adalah 2 atau *low to moder*ate dengan predikat risiko inheren bank secara keseluruhan adalah *Low to Moderate*. Predikat kualitas penerapan manajemen risiko adalah *satisfactory.*

Hasil penilaian yang dilakukan secara *self assessment:*

No	Jenis Risiko	Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Risiko Komposit	Tren
1	Risiko Kredit	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2	Menurun
2	Risiko Pasar	*Low*	*Satisfactory*	1	Tetap/Stabil
3	Risiko Likuiditas	*Low*	*Satisfactory*	1	Tetap/Stabil
4	Risiko Operasional	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2	Tetap/Stabil
5	Risiko Hukum	*Low*	*Satisfactory*	1	Tetap/Stabil
6	Risiko Reputasi	*Low*	*Satisfactory*	1	Tetap/Stabil
7	Risiko Stratejik	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2	Tetap/Stabil
8	Risiko Kepatuhan	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2	Tetap/Stabil
9	Risiko Investasi	*Moderate*	*Satisfactory*	2	Tetap/Stabil
10	Risiko Imbal Hasil	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2	Tetap/Stabil
Predikat Risiko Komposit Bank secara Keseluruhan		**Low to Moderate**	**Satisfactory**	**2**	**Tetap/Stabil**

Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko

Direksi dan Dewan Komisaris maupun Komite Pemantau Risiko senantiasa melakukan evaluasi atas efetivitas pelaksanaan manajemen risiko. Salah satu bentuk evaluasi adalah melalui meeting secara berkala mengenai pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko baik terhadap risiko-risiko utama maupun risiko lainnya. Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan manajemen risiko relatif sudah baik (memadai). Hasil evaluasi digunakan untuk melakukan upaya penguatan pengelolaan risiko antara lain:

1. Risiko Kredit dan Risiko investasi
   a. Menurunkan *share* debitur inti
   b. Memperbaiki kualitas pembiayaan antara lain melalui *collection,* restrukturisasi, dan likuidasi agunan.
   c. Memperkuat monitoring debitur *watchlist* dan restrukturisasi.
   d. Mengintegrasikan *tracking process* dan *watchlist tools* di pembiayaan *wholesale* sebagai penguatan sistem informasi manajemen risiko.
   e. Meningkatkan kompetensi SDM untuk mendukung aktivitas pembiayaan melalui training internal dan eksternal serta melakukan magang di perusahaan induk.
2. Risiko Pasar
   Mengembangkan aplikasi sistem pencatatan transaksi tresuri dan monitoring risiko pasar untuk memonitor eksposur dan realisasi terhadap limit

3. Risiko Likuiditas
   a. Menurunkan porsi pendanaan non inti dengan fokus pada pertumbuhan dana murah.
   b. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan magang mengenai *Asset Liability Management* di perusahaan induk
4. Risiko Operasional
   a. Meningkatkan pengamanan IT *system* operasional
   b. Meningkatkan *risk awareness* pegawai antara lain melalui *e-learning*, *refreshment ketentuan*, dan *desktop wallpaper* komputer pegawai.
   c. Memperkuat *internal control* melalui implementasi *control testing* atas *end to end business process*.
   d. Membuat *safety briefing* & infografis penanganan bencana, menyesuaikan organisasi BCM, melaksanakan uji coba *Disaster Recovery Plan* (DRP) untuk *Information Technology* (IT) secara periodik dan melaksanakan uji coba *Emergency Response Plan* untuk bencana kebakaran.
5. Risiko Hukum
   a. Melakukan pengkinian akad/perjanjian di bidang pendanaan dan pembiayaan untuk mengurangi potensi masalah hukum.
   b. Meningkatkan legal *awareness* bagi seluruh jajaran Bank secara berkesinambungan melalui *e-learning*, *e-mail blast*, uji petik dokumen, serta *refreshment*.
   c. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan mengenai hukum perbankan syariah dan aspek legal pembiayaan.
6. Risiko Reputasi
   a. Meningkatkan penyelesaian pengaduan sesuai *level aggrement*.
   b. Meningkatkan *brand awerness* dengan mengalokasikan anggaran ke regional untuk melakukan promosi di radio lokal, online lokal, print ad lokal
7. Risiko Stratejik
   a. Meningkatkan pertumbuhan dana pihak ketiga khususnya tabungan dengan fokus kepada nasabah komunitas dan prioritas.
   b. Meningkatkan monitoring pencapaian kinerja bank dengan tetap berfokus pada 3 pilar strategi bisnis yaitu *business refocusing*, *fixing the fundamental*, dan *strengthen enablers*.
8. Risiko Kepatuhan
   a. Meningkatkan akurasi data pelaporan kepada pihak eksternal antara lain melalui otomasi form laporan bank.
   b. Meningkatkan kualitas data melalui pengkinian dan *cleansing* data nasabah.
   c. Enhancement sistem informasi kepatuhan untuk pengawalan fungsi kepatuhan.
   d. Meningkatkan pemahaman penerapan prinsip syariah kepada pegawai dan rekanan bank melalui:
      1) *sharing session* perihal pemahaman akad-akad syariah kepada pegawai *region office*/Area/ Cabang.
      2) sosialisasi akad-akad syariah kepada notaris rekanan Bank.
9. Risiko Imbal hasil
   a. Menurunkan porsi *non core* deposit melalui penumbuhan dana ritel.
   b. Meningkatkan intensitas *monitoring cost of fund* dan *gross revenue*.

Konsolidasi dan Integrasi Manajemen Risiko Dengan Perusahaan Induk

Dalam rangka mensinergikan dan mengintegrasikan penerapan manajemen risiko antara perusahaan anak dan perusahaan induk (Bank Mandiri), bank melakukan konsolidasi penerapan manajemen risiko dengan perusahaan induk. Konsolidasi dan intergrasi ditujukan selain untuk memenuhi ketentuan regulator juga untuk memenuhi kebutuhan internal.

Konsolidasi dan integrasi penerapan manajemen risiko tersebut mencakup konsolidasi sistem akuntansi dan sistem informasi manajemen risiko, penyelarasan arsitektur kebijakan dan prosedur operasional bank serta *tools* dan metodologi manajemen risiko. Selain itu secara berkala bank bersama perusahaan induk menyelenggarakan *Risk Awareness Survey, Integrated Risk Management Forum* dan *Annual Integrated Risk and Governance Conference*, serta forum konsultasi/*sharing* lainnya sesuai kebutuhan.

Regulasi dan Antisipasi Bank

Pada tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan:
1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/17/PBI/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/14/ PADG/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang "Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah"
3. POJK Nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah

Rencana Pengembangan Manajemen Risiko

Pengembangan manajemen risiko diselaraskan dengan perkembangan bisnis Bank, kondisi internal dan eksternal termasuk adanya regulasi baru. Rencana pengembangan manajemen risiko yang akan dilakukan pada tahun 2020 antara lain:
1. Implementasi aplikasi system manajemen limit
2. Implementasi *rating system* pembiayaan *wholesale*
3. Pengembangan *scoring credit line*
4. Pengembangan *system Wholesale Alliance Integrated System*
5. Implementasi *control testing*
6. Riset mobile banking, pembiayaan ritel, dan *wealth management*

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pengendalian internal merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan (*on going basis*), untuk menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank, menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan atau dampak kerugian, penyimpangan termasuk *fraud,* dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Adapun tujuan diselenggarakannya Pengendalian Internal yaitu:
1. Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan atau tujuan kepatuhan.
2. Tersedianya Informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu atau tujuan informasi.
3. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha Bank atau tujuan operasional.
4. Meningkatkan efektivitas Budaya Risiko (*Risk Culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh atau tujuan Budaya Risiko.

Pengawasan Manajemen dan Budaya Pengendalian

Pengawasan Manajemen

Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat di dalam organisasi Bank. Berdasarkan Kebijakan Sistem Pengendalian Internal Mandiri Syariah, tanggung jawab terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan oleh:
a. Dewan Komisaris;
b. Direksi/SEVP (Senior Executive Vice President);
c. Dewan Pengawas Syariah;
d. Unit Kerja Terkait (termasuk Satuan Kerja Audit Intern/ SKAI);
e. Pejabat dan Pegawai Bank;
f. Pihak-pihak Ekstern.

Penjabaran dari tanggung jawab para pihak tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris Bank bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasional Bank termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut.

DIREKSI/SEVP
Direksi/SEVP Bank bertanggung jawab menciptakan dan memelihara Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut telah berjalan secara aman dan andal sesuai dengan tujuan pengendalian intern yang ditetapkan oleh Bank. Adapun direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah berperan aktif dalam mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian termasuk prinsip syariah.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Dewan Pengawas Syariah Bank bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah, menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.

UNIT KERJA TERKAIT
Satuan Kerja Internal Audit (SKAI)
SKAI Internal Audit Group (IAG) mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Mandiri Syariah yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen Mandiri Syariah.

Unit Kerja Compliance
Berfungsi melakukan proses *monitoring* kepatuhan setiap Unit Kerja terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kebijakan intern Bank.

Unit Kerja Enterprise Risk Manajeman
Berfungsi melakukan pemantauan, pengukuran, pengendalian dan pelaporan resiko dalam rangka penyempurnaan Sistem Pengendalian Intern.

Unit Kerja Lainnya
Bertanggungjawab memelihara dan melaksanakan sistem pengendalian yang efektif di unit kerja masing-masing serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai tujuan sistem pengendalian intern yang ditetapkan Bank.

PEJABAT DAN PEGAWAI BANK
Setiap pejabat dan Pegawai Bank wajib memahami dan melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang telah ditetapkan oleh Manajemen Bank. Pengendalian intern yang efektif akan meningkatkan tanggung jawab pejabat dan pegawai, mendorong budaya risiko *(risk culture)* yang memadai, dan mempercepat proses identifikasi terhadap praktek perbankan yang tidak sehat dan terhadap organisasi melalui sistem deteksi dini yang efisien.

PIHAK-PIHAK EKSTERN
Pihak-pihak ekstern antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Auditor Ekstern, dan Nasabah yang berkepentingan terhadap terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Bank yang handal dan efektif.

Budaya Pengendalian

BUDAYA ORGANISASI
Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam

meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan suatu budaya organisasi yang menekankan kepada seluruh pegawai Bank mengenai pentingnya pengendalian intern yang berlaku di Bank.
Dalam rangka menciptakan budaya pengendalian tersebut, langkah-langkah yang menjadi perhatian dan dilakukan oleh Bank, antara lain:

1. Direksi dan Dewan Komisaris sebagai panutan (*role model*) bagi seluruh pegawai atau memiliki komitmen pribadi yang tinggi terhadap pengembangan Bank yang sehat;
2. Direksi dan Dewan Komisaris mengelola sumber daya manusia, termasuk dalam proses penempatan pegawai yang sesuai dengan keterampilan, pengetahuan, dan perilaku; dan/atau,
3. Direksi dan Dewan Komisaris meningkatkan kesadaran bagi seluruh pegawai Bank mengenai pentingnya efektivitas pelaksanaan tugas serta tanggung jawab masing-masing dan selanjutnya pegawai mengomunikasikan kepada pihak manajemen yang terkait mengenai setiap permasalahan yang terjadi dalam kegiatan operasional Bank.

KETENTUAN INTERNAL BANK SEBAGAI PENDUKUNG BUDAYA PENGENDALIAN

Untuk mendukung budaya pengendalian tersebut maka seluruh Kebijakan, Standar Prosedur, Manual Produk, dan atau Petunjuk Teknis Operasional telah didokumentasikan secara tertulis dan tersedia atau dapat diakses bagi setiap pegawai yang terkait. Berikut ini ketentuan internal yang terkait dengan sistem pengendalian intern, antara lain:

1. Kebijakan Internal Audit PT Bank Syariah Mandiri, tanggal berlaku 18 Juli 2019.
2. Kebijakan Sistem Pengendalian Internal PT Bank Syariah Mandiri, tanggal berlaku 05 April 2018.
3. Kebijakan Anti *Fraud* Mandiri Syariah, tanggal berlaku 5 April 2018.
4. Standar Prosedur Pengendalian Internal Audit, tanggal berlaku 27 Mei 2019.
5. Petunjuk Teknis Operasional DMTL Online (D-ONE), tanggal berlaku 20 Desember 2017.
6. Petunjuk Teknis Operasional Continuous Monitoring, tanggal berlaku 20 September 2019.
7. Petunjuk Teknis Operasional Audit Management System (AMS), tanggal berlaku 31 Agustus 2017.
8. Petunjuk Teknis Pengendalian Audit Investigasi, tanggal berlaku 15 Desember 2018.

PENGUATAN NILAI-NILAI ETIKA

Dalam rangka memperkuat nilai-nilai etika, Bank menghindari kebijakan dan praktik yang dapat mengakibatkan dorongan atau peluang untuk melakukan penyimpangan atau pelanggaran, seperti penekanan pada pencapaian target jangka pendek dengan mengabaikan dampak risiko yang bersifat jangka panjang, sistem kompensasi yang hanya menitikberatkan pada kinerja jangka pendek, pemisahan fungsi yang tidak efektif, dan pengenaan sanksi yang terlalu ringan atau terlalu berlebihan atas pelanggaran yang dilakukan. Hal ini diatur melalui Kebijakan Human Capital, No. KBO/02-2016 tanggal 16 November 2016, Standar Prosedur Operasional (SPO) Human Capital, No. SPO/03-2017 revisi terakhir tanggal 29 Februari 2019, dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi, No. PTO/54-2018 tanggal 31 Desember 2018.

Identifikasi dan Penilaian Risiko

Penilaian Risiko merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis, dan menilai risiko yang dihadapi oleh Bank dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan.

Risiko dapat timbul atau berubah sesuai dengan kondisi Bank, antara lain:

1. Perubahan kegiatan operasional Bank;
2. Perubahan susunan personalia;
3. Perubahan sistem informasi;
4. Pertumbuhan yang cepat pada kegiatan usaha tertentu;
5. Perkembangan teknologi;
6. Pengembangan jasa, produk atau aktivitas baru;
7. Terjadinya penggabungan usaha, peleburan usaha, pengambilalihan, dan restrukturisasi Bank;
8. Perubahan dalam sistem akuntansi;
9. Ekspansi usaha;
10. Perubahan hukum dan peraturan; dan,
11. Perubahan perilaku serta ekspektasi nasabah.

Suatu Sistem Pengendalian Internal yang efektif mengharuskan Bank secara terus-menerus mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran. Penilaian risiko dilakukan oleh Internal Auditor sehingga cakupan audit yang dilakukan lebih luas dan menyeluruh.

Penilaian Risiko ini mengidentifikasi jenis risiko yang dihadapi oleh Bank, penetapan limit risiko, dan teknik pengendalian risiko. Metodologi penilaian risiko menjadi tolok ukur untuk membuat profil risiko dalam bentuk dokumentasi data, yang dapat diperbarui secara berkala. Penilaian Risiko juga meliputi penilaian terhadap risiko yang dapat diukur (kuantitatif) dan tidak dapat diukur (kualitatif) maupun terhadap risiko yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan, dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya. Selanjutnya Bank memutuskan untuk mengambil risiko tersebut atau tidak, dengan cara mengurangi kegiatan usaha tertentu.

Penilaian Risiko mencakup semua risiko yang dihadapi, baik risiko individual maupun secara keseluruhan *(aggregate)*, yang meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil, dan Risiko Investasi.

Pengendalian intern dikaji ulang secara tepat dalam hal terdapat risiko yang belum dikendalikan, baik risiko yang sebelumnya sudah ada maupun risiko yang baru muncul. Pelaksanaan kaji ulang tersebut antara lain dengan melakukan evaluasi secara terus menerus mengenai

pengaruh dari setiap perubahan lingkungan dan kondisi, serta dampak dari pencapaian target atau efektivitas pengendalian intern dalam kegiatan operasional maupun organisasi Bank.

Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

Kegiatan pengendalian melibatkan seluruh pegawai Bank, termasuk Direksi. Oleh karena itu, kegiatan pengendalian berjalan efektif karena telah direncanakan dan diterapkan untuk mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank sehari-hari.

Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian meliputi kebijakan, prosedur, dan praktik yang memberikan keyakinan pejabat dan pegawai Bank bahwa arahan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris Bank telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian tersebut akan dapat membantu Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris Bank dalam mengelola dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian Bank. Kegiatan pengendalian diterapkan pada semua tingkatan fungsional sesuai dengan struktur organisasi Bank, yang paling sedikit meliputi:

1. Kaji Ulang Manajemen *(Top Level Reviews)*
   Direksi Bank secara berkala meminta penjelasan (informasi) dan laporan kinerja operasional dari pejabat dan pegawai sehingga memungkinkan untuk mengkaji ulang hasil kemajuan (realisasi) dibandingkan dengan target yang akan dicapai, seperti laporan keuangan dibandingkan dengan rencana anggaran yang ditetapkan. Berdasarkan kaji ulang tersebut, Direksi segera mendeteksi permasalahan seperti kelemahan pengendalian, kesalahan laporan keuangan, atau *fraud*.

2. Kaji Ulang Kinerja Operasional *(Functional Review)*
   Kaji ulang ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dengan frekuensi yang lebih tinggi, baik kaji ulang secara harian, mingguan, maupun bulanan. Dalam kaji ulang kinerja operasional, SKAI melakukan hal-hal sebagai berikut:
   a. Melakukan kaji ulang terhadap penilaian risiko (laporan profil Risiko) yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko;
   b. Menganalisis data operasional, baik data yang terkait risiko maupun data keuangan, yaitu melakukan verifikasi rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan dengan *output* (laporan) yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko;
   c. Melakukan kaji ulang terhadap realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, guna:
      - Mengidentifikasi penyebab penyimpangan yang signifikan;
      - Menetapkan persyaratan untuk tindakan perbaikan *(corrective actions).*

3. Pengendalian Sistem Informasi
   Bank melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan dari transaksi dan melaksanakan prosedur otorisasi, sesuai dengan ketentuan internal Bank. Kegiatan pengendalian sistem informasi dapat digolongkan dalam 2 (dua) kriteria, yaitu:
   a. Pengendalian umum, meliputi pengendalian terhadap operasional pusat data, sistem pengadaan dan pemeliharaan perangkat lunak, pengamanan akses, serta pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi yang ada. Pengendalian umum ini diterapkan terhadap *mainframe, server,* dan *users workstation,* serta jaringan internal-eksternal;
   b. Pengendalian aplikasi, diterapkan terhadap program yang digunakan Bank dalam mengolah transaksi dan untuk memastikan bahwa semua transaksi adalah benar, akurat, dan telah diotorisasi secara benar. Selain itu, pengendalian aplikasi harus dapat memastikan tersedianya proses audit yang efektif dan untuk mengecek kebenaran proses audit dimaksud.

4. Pengendalian Aset Fisik (*Physical Controls*)
   a. Pengendalian aset fisik dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya pengamanan fisik terhadap aset Bank.
   b. Kegiatan ini meliputi pengamanan aset, catatan, dan akses terbatas terhadap program komputer dan file data, serta membandingkan nilai aset dan liabilitas Bank dengan nilai yang tercantum pada catatan pengendali, khususnya pengecekan nilai aset secara berkala.

5. Dokumentasi
   a. Bank telah memformalkan dan mendokumentasikan kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi, serta proses audit secara memadai, antara lain Kebijakan Akuntansi tahun 2017, Standar Prosedur Operasional (SPO) Akuntansi tahun 2018, dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Rekonsiliasi dan Monitoring Akuntansi Kantor Pusat dan Outlet Bank tahun 2017.
   b. Dokumen tersebut harus diperbarui secara berkala guna menggambarkan kegiatan operasional Bank secara aktual, serta harus diinformasikan kepada pejabat dan pegawai Bank.
   c. Berdasarkan permintaan, dokumen tersebut harus senantiasa tersedia untuk kepentingan Internal Auditor, Akuntan Publik, dan Pengawasan Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
   d. Akurasi dan ketersediaan dokumen harus dinilai oleh Internal Auditor ketika melakukan audit secara rutin maupun non-rutin.

Pemisahan Fungsi

1. Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional. Bank mematuhi prinsip pemisahan fungsi tersebut, yang dikenal sebagai "*Four-Eyes Principle*".
2. Dalam hal diperlukan karena perubahan karakteristik kegiatan usaha dan transaksi serta organisasi Bank, Direksi Bank telah menetapkan prosedur (kewenangan) termasuk penetapan daftar petugas yang dapat mengakses suatu transaksi atau kegiatan usaha yang berisiko tinggi.
3. Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif mensyaratkan adanya pemisahan fungsi dan menghindari pemberian wewenang serta tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (*conflict of interest*). Seluruh aspek yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan tersebut telah diidentifikasi, diminimalisasi, dan dipantau secara hati-hati oleh pihak lain yang independen, seperti Akuntan Publik.
4. Dalam pelaksanaan pemisahan fungsi tersebut, Bank telah melakukan langkah-langkah, antara lain:
   a. Menetapkan fungsi atau tugas tertentu yang memisahkan atau mengalokasikan beberapa orang dalam rangka mengurangi risiko terjadinya manipulasi data keuangan atau penyalahgunaan aset Bank;
   b. Pemisahan fungsi tersebut tidak terbatas pada kegiatan *front* dan *back office*, tetapi juga dalam rangka pengendalian terhadap:
      - persetujuan atas pengeluaran dana dan realisasi pengeluaran;
      - rekening nasabah dan rekening pemilik Bank;
      - transaksi dalam pembukuan Bank;
      - pemberian informasi kepada nasabah Bank;
      - penilaian terhadap kecukupan dokumentasi pembiayaan dan pemantauan debitur setelah pencairan pembiayaan;
      - kegiatan usaha lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang signifikan;
      - independensi fungsi Manajemen Risiko Bank.

Sistem Akuntansi Informasi dan Komunikasi

Sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

1. Sistem Akuntansi
   a. Sistem Akuntansi meliputi metode dan catatan dalam rangka mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat atau membukukan, dan melaporkan transaksi Bank.
   b. Untuk menjamin data akuntansi yang akurat dan konsisten dengan data yang tersedia berdasarkan hasil olahan sistem, proses rekonsiliasi antara data akuntansi dan sistem informasi manajemen dilaksanakan secara berkala atau paling sedikit setiap bulan. Setiap penyimpangan yang terjadi telah diinvestigasi dan diatasi permasalahannya. Proses rekonsiliasi juga telah didokumentasikan sebagai bagian dari persyaratan proses jejak audit secara keseluruhan.

2. Sistem Informasi
   a. Sistem informasi harus dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan Manajemen Risiko, dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris.
   b. Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif paling sedikit menyediakan data atau informasi internal yang cukup dan menyeluruh mengenai keuangan, kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, informasi pasar (kondisi eksternal), dan setiap kejadian serta kondisi yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
   c. SPI telah menyediakan sistem informasi yang dapat dipercaya mengenai seluruh aktivitas fungsional Bank, terutama aktivitas fungsional yang signifikan dan memiliki potensi Risiko tinggi. Sistem informasi tersebut termasuk sistem penyimpanan dan penggunaan data elektronik dijamin keamanannya, dipantau oleh pihak yang independen (Internal Auditor), dan didukung oleh program kontinjensi yang memadai.
   d. Bank telah mengorganisasikan suatu rencana pemulihan darurat (*contingency recovery plan*) dan sistem rekam cadang (*back-up*) untuk mencegah kegagalan usaha yang berisiko tinggi. Untuk memastikan bahwa seluruh rencana dan proses pemulihan darurat (*contingency recovery plan*) serta sistem rekam cadang (*back-up*) telah bekerja secara efektif, pelaksanaan prosedur, proses, dan sistem rekam cadang (*back-up*) telah didokumentasikan dan diuji efektivitasnya secara berkala. Bank mendokumentasikan pelaksanaan pengujian secara berkala dan Direksi telah memberikan perhatian yang penuh terhadap temuan kelemahan pada prosedur, proses, dan sistem yang didasarkan atas hasil pengujian, serta selanjutnya mengambil langkah perbaikan yang diperlukan.
   e. Bank memiliki dan memelihara sistem informasi manajemen yang diselenggarakan, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik. Mengingat bahwa sistem informasi elektronik dan penggunaan teknologi informasi tersebut mempunyai dampak risiko, Bank telah mengendalikan secara efektif untuk menghindari adanya gangguan usaha dan kemungkinan timbul kerugian yang signifikan.

f. Dalam rangka pengendalian intern terhadap penyelenggaraan sistem dan teknologi informasi, Bank telah memperhatikan hal-hal berikut ini:
   - Ketersediaan bukti dan dokumen yang memadai dalam rangka mendukung proses jejak audit. Proses jejak audit dilaksanakan secara efektif dan didokumentasikan untuk memastikan bahwa proses otomasi telah bekerja secara efektif dan akurat. SKAI melakukan penilaian terhadap efektivitas dan akurasi proses jejak audit ketika melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian intern Bank.
   - Pelaksanaan pengendalian terhadap sistem komputer dan pengamanannya (*general controls*) maupun pengendalian terhadap aplikasi perangkat lunak dan prosedur manual lainnya (*application controls*).
   - Antisipasi terjadinya risiko gangguan atau kerugian yang disebabkan oleh faktor yang berada di luar jangkauan pengendalian rutin Bank sehingga Bank menyelenggarakan sistem pemulihan (*recovery*) dan rencana kontinjensi serta pengecekan secara berkala atas kemungkinan terjadinya hal-hal yang sulit diprediksi sebelumnya (*disaster and recovery plan*).
   - Sistem informasi menyediakan data dan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan disajikan dalam format yang konsisten.
   - Sebagai bagian dari proses pencatatan atau pembukuan, sistem informasi Bank didukung oleh sistem akuntansi yang baik termasuk penetapan prosedur dan jadwal retensi pencatatan transaksi.

3. Sistem Komunikasi
   a. Sistem komunikasi mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Eksternal Auditor, Pemegang Saham, dan Nasabah Bank.
   b. Sistem Pengendalian Intern (SPI) Bank telah memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif agar seluruh pejabat dan pegawai Bank sepenuhnya memahami serta mematuhi kebijakan dan prosedur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
   c. Direksi Bank menyelenggarakan saluran komunikasi yang efektif agar informasi yang diperlukan terjangkau oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini berlaku untuk setiap informasi, baik mengenai kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, eksposur risiko, dan transaksi aktual maupun mengenai kinerja operasional Bank.
   d. Struktur organisasi Bank memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah, dan lintas satuan kerja atau unit kerja, sebagai berikut:
      - Informasi ke atas untuk memastikan bahwa Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat eksekutif Bank mengetahui Risiko dan kinerja operasional Bank. Saluran informasi dapat merespon dengan baik sehingga menghasilkan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
      - Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi, dan ekspektasi Bank serta kebijakan dan prosedur telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
      - Informasi lintas satuan kerja atau unit kerja untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

Kegiatan Pemantauan

1. Bank melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern. Pemantauan terhadap risiko utama Bank diprioritaskan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan Bank sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh satuan kerja operasional (*risk taking unit*) maupun oleh SKAI.
2. Bank memantau dan mengevaluasi kecukupan Sistem Pengendalian Intern (SPI) secara terus menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi intern dan ekstern serta meningkatkan kapasitas SPI tersebut agar efektivitasnya dapat ditingkatkan.
3. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank dalam rangka terselenggaranya kegiatan pemantauan yang efektif, meliputi:
   a. memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik dalam organisasi Bank;
   b. menetapkan satuan kerja atau pegawai yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian intern;
   c. menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan yang didasarkan pada risiko yang melekat pada Bank dan sifat atau frekuensi perubahan yang terjadi dalam kegiatan operasional;
   d. mengintegrasikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan rutin seperti jurnal pembukuan, *management review*, dan laporan mengenai persetujuan atas eksepsi atau penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (justifikasi atas *irregularities*) yang selanjutnya dilakukan kaji ulang;
   e. melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari satuan kerja atau pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan; dan
   f. menetapkan informasi atau umpan balik (*feed back*) dalam suatu format dan frekuensi yang tepat.

Fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

1. Bank menyelenggarakan audit intern yang efektif dan menyeluruh terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI). Pelaksanaan audit intern yang dilaksanakan oleh SKAI didukung oleh tenaga auditor yang independen, kompeten, dan memiliki jumlah yang memadai.
2. Sebagai bagian dari SPI, SKAI melaporkan hasil temuan secara langsung kepada Dewan Komisaris atau Komite Audit, direktur utama, dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
3. SKAI melakukan penilaian yang independen mengenai kecukupan dan kepatuhan Bank terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
4. Dalam menetapkan kedudukan, wewenang, tanggung jawab, profesionalisme, organisasi, dan ruang lingkup tugas SKAI, maka Bank berpedoman pula pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum dan standar pelaksanaan fungsi audit intern.

Perbaikan Kelemahan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

1. Kelemahan dalam pengendalian intern, baik yang diidentifikasi oleh satuan kerja operasional (*risk taking unit*), SKAI, maupun pihak lainnya, dilaporkan kepada dan menjadi perhatian pejabat dan/atau Direksi yang berwenang. Kelemahan pengendalian intern yang material telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
2. Langkah-langkah perbaikan yang dilakukan Bank dalam rangka memperbaiki kelemahan pengendalian intern, antara lain:
3. Setiap laporan mengenai kelemahan dalam pengendalian intern atau tidak efektifnya pengendalian Risiko Bank telah ditindaklanjuti oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat eksekutif terkait;
    a. SKAI melakukan kaji ulang atau langkah pemantauan lainnya yang memadai terhadap kelemahan yang terjadi dan segera melaporkan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur Utama dalam hal masih terdapat kelemahan yang belum diperbaiki atau rekomendasi tindakan korektif yang belum ditindaklanjuti;
    b. Untuk memastikan bahwa seluruh kelemahan telah ditindaklanjuti, maka Direksi menciptakan suatu sistem yang dapat menelusuri kelemahan pada pengendalian intern dan mengambil langkah perbaikan;
    c. Direksi dan Dewan Komisaris menerima laporan secara berkala berupa ikhtisar mengenai hasil identifikasi seluruh permasalahan dalam pengendalian intern.

Kesesuaian Dengan COSO

Sistem Pengendalian Internal terdiri dari 8 (delapan) komponen yang saling berkaitan satu sama lain dan diterapkan secara efektif pada seluruh level organisasi Mandiri Syariah dalam rangka mengawal tercapainya tujuan perusahaan. Sistem Pengendalian Internal ini merupakan pengembangan dari 5 elemen pokok Sistem Pengendalian Internal yang diatur oleh Regulator berdasarkan POJK No. 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum.

Di Bank Syariah Mandiri, Sistem Pengendalian Intern diwujudkan dalam bentuk Kebijakan Sistem Pengendalian Intern yang merujuk pada COSO Model tahun 2008 sebagaimana telah dikembangkan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), yang terdiri dari:

1. *Internal Environment*
2. *Objective Setting*
3. *Event Identification*
4. *Risk Assessment*
5. *Risk Response*
6. *Control Activities*
7. I*nformation & Communication*
8. *Monitoring*

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern yang handal dan efektif serta memiliki kewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif dan memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap level organisasi.

Internal Audit bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan terkait dengan pelaksanaan operasional bank dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan perusahaan. Internal Audit melakukan audit secara periodik maupun insidentil terhadap seluruh aktivitas di Unit Kerja.

Hasil evaluasi Sistem Pengendalian Intern disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti dan dimonitoring pelaksanaannya secara efektif. Dalam rangka memperkuat Sistem Pengendalian Intern, khususnya untuk mengendalikan kejadian *fraud*, Mandiri Syariah telah menerapkan strategi anti *fraud* yang komprehensif dan terintegrasi sebagai bagian dari kebijakan strategis. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan selama tahun 2019, diperoleh hasil bahwa Sistem Pengendalian Intern di Mandiri Syariah secara umum telah memadai.

Fungsi Kepatuhan

Mandiri Syariah berkomitmen bahwa kepatuhan terhadap peraturan baik dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan perundangan-undangan lain, wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai dalam organisasi Bank. Karena itu, setiap

kegagalan pelaksanaan kepatuhan dapat menyebabkan risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko lainnya. Hal itu mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi juga semakin besar, maka diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut. Upaya yang harus dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan adalah bersifat *ex-ante* yang sangat diperlukan untuk mengurangi atau memperkecil potensi risiko kegiatan usaha bank yang diperkirakan akan terjadi. Untuk menerapkan fungsi kepatuhan maka perseroan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional.

Fungsi kepatuhan terdiri dari serangkaian strategi yang digunakan Bank dalam memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam penerapan fungsi Kepatuhan Bank Syariah Mandiri berlandaskan pada:

1. POJK No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
2. Kebijakan Kepatuhan KBP/01-2015 tanggal 21 September 2017 perihal Kebijakan Pengendalian (KBP) Hukum, Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Bank Syariah Mandiri.
3. SPP Kepatuhan No. 05-2016 tanggal 18 Januari 2019 perihal Standar Prosedur Kepatuhan Bank Syariah Mandiri.

Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan

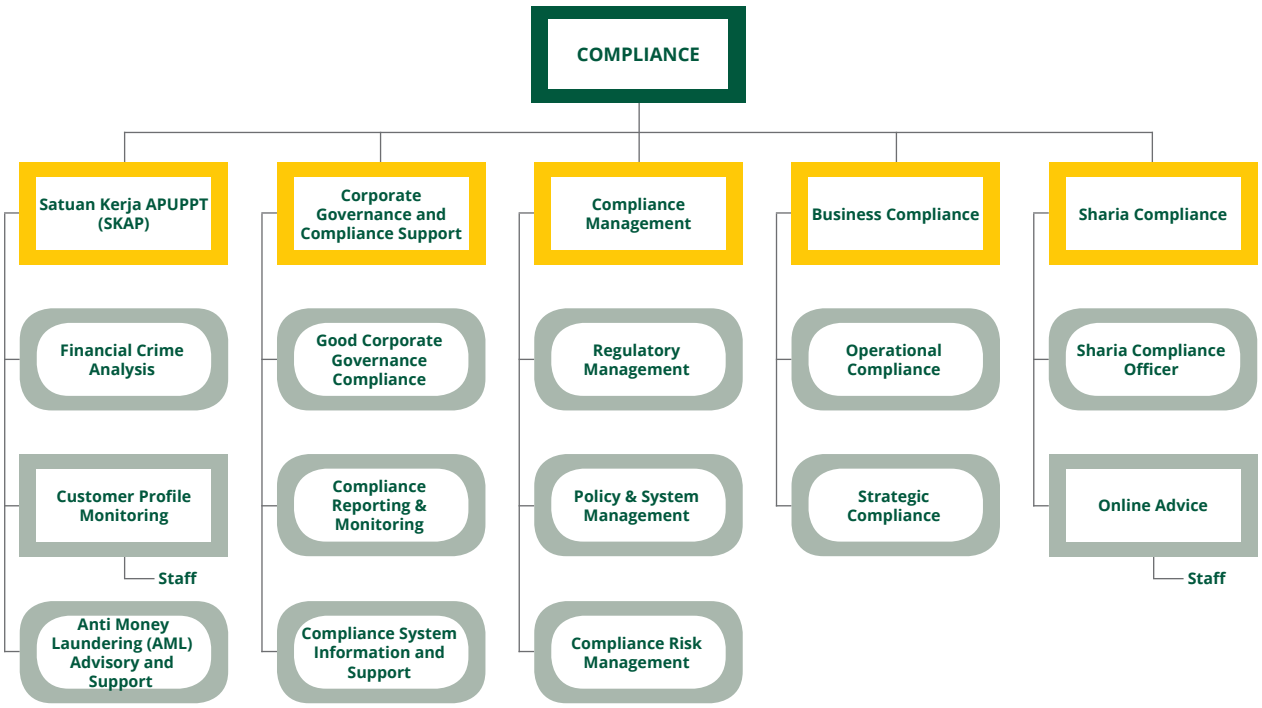

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Direktur Bank yang membawahkan fungsi kepatuhan saat ini djabat oleh Bapak Putu Rahwidhiyasa.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku maka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank meliputi:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan.
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal.
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan.
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah Bagi Bank Umum Syariah.

7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan antara lain:
   a. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
   b. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai Bank mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku.
   c. Melaksanakan sebagai *contact person* untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun ekstern.

Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank. Adapun fungsi Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yaitu:
1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Profil Kepala Fungsi Kepatuhan

Khoirul Huda S. Riyadi
Head of Compliance Group

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Jakarta

Usia
43 tahun

Tempat, Tanggal Lahir
Jakarta, 6 Oktober 1975

Riwayat Pendidikan
- S2 Magister Manajemen Universitas Budi Luhur 2014
- S1 Institut Pertanian Bogor 1999

Riwayat Jabatan
- Group Head Compliance
- Group Head IT Operation

Sertifikasi
- Choaching Style Leadership 101 – 103, 2018
- Sertifikasi Kepatuhan Level 3, 2018
- People Manager Program Experd, 2017
- Refreshment Banking Risk Management Level 4
- AML and Counter Terorism Financing 2017
- Australian Transaction Report & Analysis Center (AUSTRAC) & Bank Negara Malaysia
- 3rd Counter Terrorism Financing (CTF) Summit from PPATK

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

1. Membuat langkah-langkah untuk menciptakan Budaya Kepatuhan pada setiap jenjang organisasi.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian Risiko Kepatuhan sesuai dengan peraturan Regulator Perbankan, serta Fatwa DSN-MUI/opini DPS.
3. Melakukan tugas lainnya terkait dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan seperti memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Regulator Perbankan maupun otoritas pengawas lain yang berwenang.

4. Menyediakan *Compliance Assurance Services* (*supervisory, review/examination, consultation, regulatory services*) terhadap seluruh aktivitas Bank yang memiliki risiko baik secara langsung atau melalui DCOR.
5. Sebagai bagian DCOR *Supervisory Team*, yang meliputi:
   a. Melakukan fungsi *advisory compliance* di seluruh Unit Kerja.
   b. Membuat dan mengembangkan *compliance tools*.
   c. *Monitoring* efektivitas implementasi *operational/compliance/*internal *control tools.*
   d. Memberikan masukan atas Program Kerja Kepatuhan DCOR, me-*review* secara berkala dan memberikan masukan atas pelaksanaan program kerja dimaksud.
   e. Membina dan menyediakan pedoman serta sarana untuk DCOR termasuk melakukan komunikasi langsung dengan setiap DCOR Head terkait efektifitas pengelolaan kepatuhan di setiap Unit Kerja sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
   f. Membuat langkah-langkah perbaikan (*action plan*) serta memastikan penyelesaian tindak lanjut atas setiap *non-compliance event* yang terjadi berdasarkan rekomendasi DCOR.
6. Membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Kepatuhan serta mengelola *compliance risk profile* dan *compliance tools* lainnya.
7. Menjadi bagian RBC *Supervisory Team*, yang meliputi:
   a. Melakukan fungsi *advisory compliance risk* di seluruh *outlet*.
   b. Mengembangkan *compliance risk tools*.
   c. Memonitor efektifitas implementasi *compliance risk tools*.
8. Menjalankan fungsi kepegawaian untuk DCOR, seperti:
   a. Izin Pegawai (Cuti Tahunan, Izin Meninggalkan Pekerjaan, Izin Sakit, IDT, IPC);
   b. Pengajuan Uang Cuti, SPJ, Klaim Lembur.
9. Menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi melalui UPG.
10. Melaporkan implementasi pengendalian gratifikasi tiap semester kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Pengembangan Kompetensi Fungsi Kepatuhan

No	Nama Pendidikan dan Pengembangan Karyawan	Nama Penyelenggara	Tanggal Penyelenggara
1	*Workshop Mobile Banking*	Digital Banking Group	11-12 Januari 2019
2	*Design Thingking Product Development*	Binus Training Center	6-7 Februari 2019
3	Seminar Penegakan Hukum Tindak Pidana Korporasi - The Anvaya Beach Resort	PPATK	21-22 Maret 2019
4	*Emerging Leader* - Vietnam	Mandiri Syariah University	18-21 Maret 2019
5	Android Master	PT Webhozz	1 April 2019
6	Sertifikasi Kepatuhan Level 1, 2, 3	FKDKP	April, Oktober, November 2019
7	*Refreshment* Manajemen Risiko Level 4 - *Digital Banking and Fintech* di Bandung	Mandiri Syariah University	23 April 2019
8	*Coaching Style Leadership* Program Phase 3	Mandiri Syariah University	23 Mei 2019
9	*Workshop* Program Kartu Kredit Pemerintah	Institutional Banking Group	14 Juni 2019
10	Program *Knowledge Sharing Forum Branch Experience and Exceptional Bank Service in Digital Era*	Mandiri Syariah University	19 Juni 2019
11	*"Highlight Issues* Implementasi GCG di Indonesia"	Prospero	22-23 Agustus 2019
12	*Anti Bribery Management* - ISO 37001	Asia Anti Fraud	26 Agustus 2019
13	Knowledge Sharing Forum:Financing Problem Solving Skill	Mandiri Syariah University	12-13 September 2019
14	*Workshop* Program *Mentoring* Berbasis Risiko (Promensisko)	PPATK	29 Oktober 2019
15	*Training Financial Technology* (Fintech) *on the Perspective of Law and Syariah Economy*	Universitas Al Azhar Jakarta	7 Oktober 2019
16	Pelatihan *Integrated Risk Management*	PPM	9-11 Oktober 2019
17	Kegiatan Asistensi Sehubungan dengan Rencana Implementasi Aplikasi goAML - PPATK	PPATK	29 Oktober 2019
18	Program Pembelajaran Prosedur Ekspor Impor serta Kunjungan ke Lapangan Bea Cukai	PT IPC Terminal Petikemas / IPCTPK	4-6 November 2019

Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2019

Satuan Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

1. Efektivitas Penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enchance Due Diligence* (EDD)
   a. Efektivitas penerapan CDD terhadap nasabah berupa:
      – Pemantauan profil nasabah melalui kelengkapan data CIF.
      – Pemantauan profil nasabah pembiayaan melalui pemenuhan *Checklist* APU dan PPT Bidang Pembiayaan.
      – Pengkinian data nasabah pendanaan.
   b. Efektivitas penerapan EDD berupa pemantauan dan pemeriksaan terhadap nasabah berisiko tinggi untuk kriteria:
      – Pekerjaan berisiko tinggi (*high risk job*)
      – Bidang Usaha berisiko tinggi (*high risk business*)
      – Negara berisiko tinggi (*high risk country*)
      – Produk berisiko tinggi (*high risk product*)

2. Efektivitas penerapan APU dan PPT dan profil risiko
   a. Efektivitas penerapan APU dan PPT Mandiri Syariah didukung oleh peran pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi yang secara berkala melakukan pemantauan melalui Rapat Komite Pemantau Risiko yang khusus membahas implementasi APU dan PPT dan *progress* program APU dan PPT yang berjalan di Mandiri Syariah. Peran yang dijalankan oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang sangat penting memberikan motivasi dan semangat serta arahan untuk mewujudkan budaya kepatuhan dalam penerapan APU dan PPT diseluruh jajaran organisasi.
   b. Menguatkan fungsi APU dan PPT melalui pengembangan Sistem Informasi Kepatuhan.
   c. Profil risiko implementasi program APU dan PPT secara periodik bulanan dilaporkan oleh Satuan Kepatuhan Anti Pencucian Uang (SKAP) kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Profil risiko penerapan APU dan PPT periode Desember 2019 yaitu "sangat rendah" dengan total nilai sebesar 100%.
   d. Penerapan *Sanction Screening* untuk transaksi yang menggunakan Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT).

3. Efektivitas penerapan *Know Your Employee* (KYE)
   Penerapan KYE dilakukan Bank dalam berbagai bentuk kegiatan:
   a. Melakukan *screening* penerimaan calon pegawai terhadap profil dan *track record* kemungkinan terlibat tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
   b. Melakukan *screening* terhadap pegawai eksisting pada proses promosi jabatan, yang mencakup beberapa hal, diantaranya:
      – Tidak pernah terkait masalah hukum.
      – Tidak pernah menjadi tersangka/terdakwa.
      – Tidak memiliki hubungan/keterkaitan dengan tersangka/terdakwa.
      – Tidak pernah menerima surat pembinaan dari Mandiri Syariah.

4. Sosialisasi penerapan APU dan PPT
   Pelaksanaan sosialisasi APU dan PPT yang dilakukan oleh Bank secara kontinyu dalam berbagai bentuk kegiatan sebagai berikut:
   a. Pelatihan APU dan PPT kepada Banking Staff, Priority Banking Officer, Officer Pembiayaan Mikro, Pegawai Baru, Region bisnis control (Officer dan staff).
   b. Refreshment test APU dan PPT untuk Branch Manager, Frontliner, PIC SKAP.
   c. Sosialisasi dan Pelatihan bagi petugas SKAP dan PIC SKAP Regional Office VI Balikpapan (25 -27 April 2019), Regional Office II-Palembang (12 -14 Agustus 2019) dan Regional Office IV-Yogyakarta (19 -20 Agustus 2019)
   d. *Benchmark*/kunjungan ke BPD Jambi (25 -26 Juli 2019) dan BPD Kaltimtara (15 -16 Agustus 2019) .

5. Langkah-langkah penguatan penerapan APU dan PPT
   a. SKAP Kantor Pusat dalam menjalankan tugas telah melakukan sinergi dalam bentuk:
      – Melakukan koordinasi dan pemantauan implementasi unit kerja APU dan PPT di Kantor Pusat melalui *Decentrailize Compliance and Operation Risk* (DCOR) dan di seluruh Regional Office melalui Regional Business Control (RBC).
      – Melakukan sosialisasi, pelatihan dan *training* eksternal bagi petugas SKAP dan PIC SKAP yang ada di Regional Office II, IV, dan VI.
      – Melaksanakan *on site* ke *outlet* di masing-masing region berdasarkan RBA untuk memastikan telah diterapkannya penerapan APU dan PPT sesuai ketentuan ekternal dan internal.

Hal-hal informatif lain terkait penguatan fungsi kepatuhan dalam kaitannya dengan pelaksanaan APU dan PPT dilakukan melalui jalur komunikasi SKAP Kantor Pusat dengan seluruh *outlet* melalui media yang dimiliki bank berupa *email, lync*, telepon. Komunikasi tersebut merupakan bagian dari pemantauan dan pemberian arahan/petunjuk kepada jajaran pegawai yang terkait dengan penerapan APU dan PPT agar menjalankan tugas sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku.

Corporate Governance and Compliance Support

Memastikan pelaporan kepada pihak terkait dipenuhi secara tepat waktu, diantaranya:
1. Laporan Fungsi Kepatuhan Triwulanan kepada Direktur Utama.

2. Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada OJK.
3. Laporan Pelaksanaan Kepatuhan Terintegrasi kepada Bank Mandiri.
4. Laporan *self assessment* pelaksanaan GCG setiap semester sebagai bentuk evaluasi yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa keuangan (OJK).
5. Laporan *self assessment* pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi setiap semester sebagai bentuk evaluasi yang dilaporkan kepada Entitas Utama (Bank Mandiri).
6. Laporan Pelaksanaan GCG Tahunan kepada *stakeholders*.
7. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahunan kepada Entitas Utama.
8. Pembentukan sub-unit Unit Pengendali Gratifikasi (UPG).

Memastikan optimalisasi implementasi GCG yang dilakukan melalui:

1. Melakukan sosialisasi penerapan GCG secara *continue* kepada jajaran Bank melalui:
   a. *Email blast* kepada jajaran Bank terkait implementasi GCG
   b. Pemberian materi dasar implementasi GCG dalam kelas-kelas *training*.
   c. Melaksanakan pengkinian ketentuan internal terkait penerapan GCG dan CoC.
   d. Konsolidasi dengan perusahaan induk dalam implementasi GCG.
   e. Mengikuti program *Corporate Governance Perception Index* sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan GCG yang dilaksanakan oleh pihak independen guna memberikan masukan positif untuk peningkatan pelaksanaan GCG.
   f. Melakukan pengawalan pelaksanaan Rencana Bisnis Kepatuhan Bank tahun 2019 dan pemenuhan Daftar *Monitoring* Tindak lanjut Kepatuhan.
   g. Melakukan pengawalan terhadap proses *fit and proper test* Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah; RUPS dan penyusunan *Annual Report*.
   h. Melakukan *monitoring* dan mitigasi terhadap denda Mandiri Syariah agar jumlah denda dapat diminimalisir tiap tahunnya.
   i. *Review* pelaksanaan RUPS
   j. Penyusunan ketentuan terkait fungsi Pengendalian Gratifikasi

Compliance Risk Management

Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha telah sesuai dengan aturan regulator dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Upaya yang dilakukan diantaranya:

1. Menganalisis dan menyusun exsum atas regulasi baru yang diterbitkan oleh Regulator (BI, OJK, Peraturan ekstenal lainnya yang terkait dengan Perbankan) yang disampaikan kepada Komisaris, Direksi, SEVP serta *Group Head*.
2. Menganalisis dan membuat Nota Kajian atas regulasi baru yang berdampak langsung kepada Mandiri Syariah, yang disampaikan kepada Direksi dan SEVP yang selanjutnya disampaikan kepada Group terkait/yang berkepentingan.
3. Menyampaikan opini/*note* kepatuhan pada setiap permintaan advis/opini kepatuhan terkait *Working Group Policy & Procedure* (WPP).
4. Menganalisa dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur internal Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberi masukan, tanggapan atas ketentuan internal dalam *Working Group Policy & Procedure* (WPP).
5. Melaksanakan pengkinikan sistem *reminder* kewajiban laporan kepada pihak ketiga dan PIC laporan kepada pihak ketiga pada Sistem Informasi Kepatuhan (SIK).
6. Melaksanakan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Terintegrasi dengan Bank Mandiri terkait regulasi yang berdampak kepada bank.
7. Memberikan masukan atas pengembangan Sistem Informasi Kepatuhan (SIK).
8. Menyusun laporan Profil Risiko Kepatuhan secara bulanan, triwulanan, semesteran kepada regulator, integrasi dengan induk perusahaan (Bank Mandiri), dan kepada manajemen Bank dan laporan *support* lainnya ke Unit Kerja terkait.
9. Memastikan terlaksana proses pengelolaan (identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian) Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko.
10. Melaksanakan rapat koordinasi (*prudential meeting*) dengan unit kerja yang mendapatkan denda dari regulator untuk mencari solusi dan monitoringnya;
11. Menyampaikan dan *memonitoring action plan* atas sanksi dari regulator yang terkena denda untuk melakukan identifikasi dan mitigasi agar tidak terulang kembali.
12. Menyusun dan memantau *action plan* atas ketentuan ekternal untuk disampaikan kepada unit kerja terkait serta melaksanakan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Terintegrasi dengan Bank Mandiri terkait regulasi yang berdampak kepada Bank.
13. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur internal Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Melakukan sosialisasi atas ketentuan eksternal kepada unit kerja terkait serta koordinasi (*doted line*) atas *Regional Business Control* (RBC) dan *Decentralize Compliance & Operation Risk* (DCOR).
15. Memastikan berjalan sosialisasi kebijakan, pedoman dan ketentuan yang diterbitkan kepada unit kerja terkait dan mewakili bank atas kegiatan sosialisasi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta *liason officer* ke Bank Indonesia berikut Otoritas Jasa Keuangan.

Syariah Compliance

Memastikan dan melakukan pengawalan berjalannya prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional Bank, melalui:
1. Memastikan tersedianya kajian syariah atas permintaan unit kerja.
2. Memastikan tersedianya opini DPS atas permintaan unit kerja.
3. Memastikan tindak lanjut hasil audit syariah, baik internal maupun eksternal.
4. Memastikan tersusunnya laporan hasil pengawasan DPS dan penyampaiannya kepada OJK secara periodik (semester).
5. Memastikan terlaksananya pengawalan aspek syariah pada forum rapat teknis dan komite pembiayaan level Direksi.
6. Memastikan terlaksananya *People Development* khususnya aspek syariah.
7. Memastikan terlaksananya *coaching clinic* aspek syariah bagi unit kerja bisnis.

Business Compliance

Pelaksanaan *Compliance Review* atas aktivitas strategis Bank diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Melakukan pengujian kepatuhan (*compliance review*) terhadap usulan rencana penyaluran pembiayaan yang akan diputus oleh Komite Pembiayaan level Direksi. Pengujian melalui keikutsertaan Unit Kerja Kepatuhan dalam proses Rapat Teknis (Ratek) dan Rapat Komite Pembiayaan (RKP) dengan *tools Compliance note Independent* (CNI) yang dilakukan oleh Unit Kerja Compliance untuk memastikan proses pembiayaan telah sesuai terhadap ketentuan eksternal dan internal.
2. Memastikan kesiapan operasional atas rencana pembukaan/pemindahan alamat/perubahan status serta penataan jaringan kantor bank melalui pemenuhan daftar persyaratan yang tertuang dalam *compliance check list* yang ditetapkan oleh regulator.
3. Melaksanakan *Compliance on Visit* (CoV) di Unit Kerja, untuk memastikan proses pembiayaan serta pengembangan/ penataan jaringan kantor terlaksana sesuai dengan ketentuan eksternal dan internal Bank.
4. Melakukan *review* proses pengadaan barang dan jasa serta penyaluran dana CSR yang diputus oleh komite level Direksi guna memastikan proses pengadaan barang dan jasa serta penyaluran dana CSR telah dilakukan secara tertib, efisien, transparan dan sesuai dengan prinsip GCG yang berlaku.
5. Memberikan masukan/opini terhadap materi rencana penerbitan ketentuan internal Bank berupa *draft* Kebijakan, SE, SOP telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

PEMBERIAN DANA KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU POLITIK

Uraian terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan disampaikan pada bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan ini.

Sedangkan untuk pemberian dana kegiatan politik, selama tahun 2019 Mandiri Syariah tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik.

PERKARA PENTING

Sepanjang tahun 2019, jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) dan yang masih dalam proses penyelesaian dapat disajikan melalui tabel sebagai berikut.

Tabel Perkara Penting

No	Permasalahan Hukum	Jumlah		
		Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	216	16	7
2	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai dan/ atau *incracht*	48	9	1

Perkara Penting Yang Dihadapi Perusahaan

No	Pokok Perkara / Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusaahaan	Upaya Manajemen	Sanksi yang dikenakan
1	Peninjauan Kembali terhadap perkara No.357/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst antara PT Petro Energy dengan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Kutilang Paksi Mas. Nilai Gugatan: Materiil sebesar Rp285.106.640.460,-	**Putusan Mahkamah Agung RI** Pada tanggal 06 Desember 2018, Mandiri Syariah menerima surat pemberitahuan putusan Mahkamah Agung RI terkait dengan upaya Kasasi Mandiri Syariah dan PT Petro Energy, yang pada intinya menyatakan: MENGADILI : Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II PT Petro Energy tersebut; **Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I PT Bank Syariah Mandiri tesebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 204/PDT/2017/PT.DKI tanggal 12 Juli 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 257/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 26 April 2016.** MENGADILI SENDIRI : **Dalam Eksepsi :** Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya; **Dalam Pokok Perkara :** **Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;** Menghukum Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II untuk mebayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). **(dalam hal ini Permohonan Kasasi Mandiri Syariah dikabulkan/menang).** Terhadap putusan tersebut, PT Petro Energy telah **mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali** dan saat ini sedang dalam proses di Mahkamah Agung RI.	Risiko ganti rugi dan reputasi	Mandiri Syariah telah melakukan upaya semaksimal mungkin dengan mengajukan upaya Kasasi melalui Mahkamah Agung RI. Pada tanggal 06 Desember 2018, Mandiri Syariah menerima surat pemberitahuan putusan Mahkamah Agung RI terkait dengan upaya Kasasi Mandiri Syariah dan PT Petro Energy yang pada intinya **Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 204/PDT/2017/PT.DKI tanggal 12 Juli 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 257/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 26 April 2016 dan Mengadili Sendiri menolak gugatan Penggugat seluruhnya.** Dengan kata lain Mandiri Syariah menang. Terhadap putusan tersebut, **PT Petro Energy mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali** dan Mandiri Syariah telah menunjuk eksternal *lawyer* untuk membela kepentingan Mandiri Syariah. Mandiri Syariah telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali dan saat ini sedang dalam proses di Mahkamah Agung RI.	Tidak ada

No	Pokok Perkara / Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusaahaan	Upaya Manajemen	Sanksi yang dikenakan
2	Peninjauan Kembali terhadap perkara No.267/Pdt.G/2015/ PN.Bdg antara Monfiori (Direktur Utama PT Pos Property Indonesia dengan dan PT Bank Syariah Mandiri serta Ir. Sri Wikani dan Akhmad Rizani (mantan Direktur PT Pos Property Indonesia). Nilai Gugatan: Materiil sebesar Rp7.000.000.000,-	Putusan Mahkamah Agung RI Terinformasi dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 Januari 2018, bahwa permohonan Kasasi Monfiori ditolak oleh Mahkamah Agung RI.Putusan Mahkamah Agung RI tersebut, pada intinya menyatakan: MENGADILI : Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi: MONFIORI tersebut; Menghukum pemohon kasasi / Pengugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) Terhadap putusan tersebut, Monfiori telah **mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali** dan saat ini sedang dalam proses di Mahkamah Agung RI.	Risiko ganti rugi dan reputasi	Mandiri Syariah telah melakukan upaya semaksimal mungkin, sehingga Mandiri Syariah telah dinyatakan menang sesuai informasi pada situs resmi Mahkamah Agung RI. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan PT Pos Property Indonesia mengajukan gugatan kembali melalui Pengadilan Agama Bandung. Terhadap salinan putusan Kasasi tersebut, Mandiri Syariah belum menerima secara resmi. Terhadap putusan tersebut, **Monfiori mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali** dan Mandiri Syariah telah menunjuk eksternal *lawyer* untuk membela kepentingan Mandiri Syariah. Berdasarkan informasi dari kuasa hukum Mandiri Syariah bahwa di dalam *website* Mahkamah Agung RI perkara tersebut telah diputus yang intinya menolak permohonan Peninjauan Kembali dimaksud. Namun sampai saat ini Mandiri Syariah belum menerima relaas pemberitahuan isi putusan ataupun salinan putusan Mahkamah Agung RI dimaksud.	Tidak ada

Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat serta Entitas Anak

Selama periode tahun 2019, tidak ada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Syariah Mandiri yang sedang menjabat memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana.

Perkara Penting yang Dihadapi Anak Perusahaan

Selama tahun 2019, Bank Syariah Mandiri belum memiliki Entitas Anak, sehingga tidak terdapat informasi permasalahan hukum yang yang sedang dihadapi oleh Entitas Anak.

Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya

No.	Sanksi Administratif	Otoritas
1	Laporan Harian Bank Umum (LHBU)	Bank Indonesia
2	Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK)	Otoritas Jasa Keuangan
3	Laporan Pajak	Ditjen Pajak
4	Laporan Realisasi Produk dan Aktivitas Baru (PAB) Bank	Otoritas Jasa Keuangan

No.	Sanksi Administratif	Otoritas
5	Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU)	Bank Indonesia
6	Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK)	Bank Indonesia
7	Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBBUS)	Bank Indonesia
8	Laporan SKNBI/RTGS	Bank Indonesia
9	Laporan Realisasi Produk dan Aktivitas Baru (PAB) Bank	Otoritas Jasa Keuangan
10	Sanksi Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	Otoritas Jasa Keuangan

Sanksi administratif yang dikenakan kepada Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2019, tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Mandiri Syariah membuka akses seluas-luasnya kepada publik terhadap perolehan informasi mengenai identitas dan rekam jejak, perkembangan usaha, produk dan jasa yang ditawarkan, serta berita-berita terbaru terkait bidang usaha Mandiri Syariah melalui berbagai media sebagai berikut:

1. *Direct*, meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), *Public Expose, Press Conference, Media Briefing, Media Visit, Forum Group Discussion, Branch Visit, Event* Sosialisasi-Literasi dan Inklusi Perbankan Syariah, Forum Doa Pagi, Forum-forum Pengajian, sosialisasi ke Kantor Wilayah dan Cabang, dll.
2. *Nondirect*, meliputi *Annual Report,* Publikasi Laporan Keuangan, *Press Release, Website* www.syariahmandiri. co.id, s*osial media* (Facebook, Twitter dan Instagram), *newsletter,* media internal Bank: *intranet*, portal Bank SE, Mandiri Syariah KNOWN, ETHIC (majalah internal Mandiri Syariah).

Siaran Pers

No.	Tanggal	Siaran Pers
1	Januari 2019	Mandiri Syariah Menjadi Penjual Sukuk tabungan ST003
2	10 Januari 2019	Mandiri Syariah Dukung UMKM Pengrajin Batik Khas Depok
3	11 Januari 2019	Pertumbuhan Tabungan Mandiri Syariah
4	14 Januari 2019	Program Berkah Emas Mandiri Syariah
5	16 Januari 2019	Pertamina Gandeng 3 Bank Syariah untuk Pembayaran Gaji Karyawan
6	28 Januari 2019	Peternak Ulat Hong Kong ISDP
7	18 Februari 2019	Implementasi *Sustainable Finance*, Mandiri Syariah Bantu Masyarakat Lampung Panen Padi
8	27 Februari 2019	Mandiri Syariah Tawarkan ST003
9	6 Maret 2019	Mandiri Syariah Dukung Usaha Penyedia Kebutuhan Oleh-Oleh Haji
10	11 Maret 2019	Tumbuh Sehat Peduli, Laba Mandiri Syariah Naik 65,74%
11	19 Maret 2019	Mandiri Syariah Siap Layani Pelunasan Biaya Haji Hari ini
12	19 Maret 2019	Mandiri Syariah Siapkan Layanan Digital untuk Pelunasan Biaya Haji
13	27 Maret 2019	RUPS Mandiri Syariah 2019
14	1 April 2019	Promosi Gaya Hidup Halal melalui Fashion HIJUP
15	2 April 2019	Mandiri Syariah Dukung UMKM Pengrajin Cinderamata Bali
16	10 April 2019	Dukung Infrastruktur Negeri, Mandiri Syariah Turut Berperan dalam Pembangunan
17	10 April 2019	Mandiri Syariah Turut Berperan dalam Islamic Finance Forum 2019 di Kuala Lumpur
18	15 April 2019	90,29% Nasabah Berkah Lunas Mandiri Syariah Lunasi BPIH 2019
19	22 April 2019	Mudahkan Calon Mahasiswa Mandiri Syariah dan Muhammadiyah Buka Pendaftaran Online SBMPTMU
20	3 Mei 2019	Mandiri Syariah Launching Program Desa Berdaya Sejahtera Mandiri Klaster Peternakan Kambing Purbalingga
21	4 Mei 2019	Mandiri Syariah Dukung UMKM Penghasil Gula Aren Purbalingga
22	8 Mei 2019	Mudahkan Masyarakat Berwakaf Mandiri Syariah Launching Wakaf Digital
23	15 Mei 2019	Sambut Lebaran Mandiri Syariah Siapkan

No.	Tanggal	Siaran Pers
24	17 Mei 2019	Mandiri Syariah Tandatangani Kerjasama dengan Angkasa Pura Support
25	23 Mei 2019	Mandiri Syariah dan Asbisindo Gelar Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim
26	24 Mei 2019	Mandiri Syariah Perluas Penggunaan Data Dukcapil
27	26 Mei 2019	Mandiri Syariah Ajak 1000 Anak Yatim Belanja Pakaian Lebaran
28	29 Mei 2019	Mandiri Syariah Siapkan 242 Cabang Terbatas Jelang Idul Fitri
29	31 Mei 2019	Mandiri Syariah Distribusikan 3000 Paket Pangan Murah di Malang
30	6 Juni 2019	Mandiri Syariah Siap Tawarkan ST005
31	1 Juni 2019	Mandri Syariah Kembali Ajak Disabilitas Mudik Berasama
32	15 Juni 2019	Libur Lebaran 2019 Transaksi Electronic Channel Mandiri Syariah Naik 60%
33	23 Juni 2019	Mudahkan Jamaah Haji, Mandiri Syariah Sediakan Layanan Penukaran Riyal
34	26 Juni 2019	Mandiri Syariah Dukung UMKM Peternak Kambing
35	29 Juni 2019	Tingkatkan Layanan Digital, Mandiri Syariah Bekerjasama dengan BPJH dan Tokopedia
36	6 Agustus 2019	Mandiri Syariah Siap Tawarkan ST005
37	8 Agustus 2019	Mudahkan Masyarakat Berkurban, Mandri Syariah Sediakan Fitur Pembelian Kurban di Mobile
38	8 Agustus 2019	Aset Tembus 100 Triliun, Laba Mandiri Syariah Melonjak
39	11 Agustus 2019	Mandiri Syariah Sebar Hewan Kurban ke Pelosok Negeri
40	21 Agustus 2019	Mandiri Syariah Dukung UMKM Petani Bunga Mawar Pelaku Agribisnis
41	23 Agustus 2019	Mandiri Syariah Raih IAEI Award
42	25 Agustus 2019	Gandeng Metland Mandiri Syariah Tawarkan KPR Syariah
43	28 Agustus 2019	Mandiri Syariah Gelar Festival Muharram
44	4 September 2019	Layanan Mandiri Syariah di Hari Pelanggan
45	4 September 2019	Layanan Digital Banking Mandiri Syariah
46	16 September 2019	Mandiri Syariah Menjadi Bank Syariah Pertama Penyedia Layanan Wali Amanat
47	25 September 2019	Mandiri Syariah Bersama Nasabah Dirikan Rumah Aman Asap di Riau
48	26 September 2019	Mandiri Syariah Raih Best Forex for Corporate Islamic Treasury se-Asia Tenggara
49	30 September 2019	Mandiri Syariah MUdahkan Masyarakat Solo Berhaji dan Umroh dengan Program Abatana
50	2 Oktober 2019	Layanan Front Office Mandiri Syariah di Hari Batik
51	5 Oktober 2019	Mandiri Syariah Berikan Apresiasi Umroh untuk 600 Pegawai Berprestasi
52	9 Oktober 2019	Mandiri Syariah Tingkatkan Potensi Budaya dan Ekonomi Desa Bayat
53	16 Oktober 2019	Apresiasi Mahasiswa Berprestasi Mandiri Syariah Berikan Beasiswa Pendidikan
54	18 Oktober 2019	Akomodir Kebutuhan Nasabah, Mandiri Syariah Terus Tingkatkan Layanan Digital
55	23 Oktober 2019	Perkokoh Bisnis Ritel di Sumatera, Aset Mandiri Syariah Region 2 Tumbuh Dobel Digit
56	24 Oktober 2019	Mandiri Syariah Dukung UMKM Keripik Sanjay Padang
57	25 Oktober 2019	Mandiri Syariah Ajak Wartawan Tanam 2000 Bibit Pohon di Padang
58	25 Oktober 2019	Mandiri Syariah Umumkan Ketua DPS Baru
59	25 Oktober 2019	Mandiri Syariah Sosialisasikan Produk Layanan Bank Syariah kepada Media
60	26 Oktober 2019	Dukung Aktivitas Kampus, Mandiri Syariah Serahkan Dana CSR ke UIN Raden Intan Lampung
61	30 Oktober 2019	Mandiri Syariah Perluas Kerjasama Payroll dengan PLN
62	30 Oktober 2019	Kinerja Melesat, Laba Mandiri Syariah Kuartal III 2019 Naik 100%
63	1 November 2019	Maknai Usia ke-20 Mandiri Syariah Gelar Gerakan Donasi 20 Ribu Al Qur'an Braille
64	3 November 2019	Mandiri Syariah Ditunjuk Pemerintah Menjadi Mitra Penjualan Sukuk Tabungan ST006
65	4 November 2019	Mandiri Syariah Dinobatkan Sebagai Strongest Retail Bank
66	5 November 2019	Mandiri Syariah Luncurkan Mandiri Syariah Mobile Keyboard untuk Mempermudah Transaksi
67	7 November 2019	Mandiri Syariah Semarakkan Festival Syariah Surabaya
68	7 November 2019	Mandiri Syariah dan Nasabah Persembahkan Mobil Mushola
69	8 November 2019	Mandiri Syariah Launching Digital Branch untuk Meningkatkan Layanan Nasabah

No.	Tanggal	Siaran Pers
70	11 November 2019	Mandiri Syariah Kontributor QR Code Terbanyak di Kotak Amal
71	14 November 2019	Mandiri Syariah Tandatangani Kerjasama dengan AMPHURI untuk Tingkatkan Kemudahan Umroh
72	14 November 2019	Mandiri Syariah Meresmikan Masjid Cipali
73	14 November 2019	Bentuk Kawasan Halal, Mandiri Syariah Gandeng Modernland Realty Group
74	15 November 2019	Mandiri Syariah Dukung UMKM Industri Kuliner Khas Daerah
75	16 November 2019	Mandiri Syariah Terima Penghargaan atas Partisipasi dalam Green Sukuk Ritel
76	17 November 2019	Mandiri Syariah Jadi Juara Pertama Annual Report Award
77	22 November 2019	Mandiri Syariah Tandatangani Perjanjian Kustodian dengan Bank Aceh dan Bank Kaltim Kaltara
78	22 November 2019	Mandiri Syariah dan Muhammadiyah Mudahkan Masyarakat Raih Pendidikan Tinggi
79	22 November 2019	Mudahkan Transaksi Nasabah, Mandiri Syariah Sosialisasikan Digital Banking di Solo
80	28 November 2019	Mandiri Syariah Tingkatkan Layanan Wealth Management
81	28 November 2019	Mandiri Syariah Berikan Bantuan Renovasi Masjid dan Madrasah di Jawa Barat
81	28 November 2019	Dukung Kesehatan Masyarakat, Mandiri Syariah Tandatangani Kerjasama dengan PERSI Jawa Barat
83	28 November 2019	Mandiri Syariah Dinobatkan Menjadi Bank Pendukung Pengendalian Moneter Terbaik
84	1 Desember 2019	Mandiri Syariah dan AMPHURI Tandatangani Kerjasama Umroh Haji Aman dan Nyaman
85	3 Desember 2019	Mudahkan Transaksi Nasabah, Mandiri Syariah Sosialisasikan Digital Banking di Makassar
86	5 Desember 2019	Buka Rekening Mandiri Syariah Mudah dan Cepat Lewat Online
87	11 Desember 2019	Mandiri Syariah Raih Penghargaan Good Corporate Governance Award 2019
88	13 Desember 2019	Pertumbuhan Tabungan Mandiri Syariah
89	16 Desember 2019	Mandiri Syariah Salurkan Pembiayaan Senilai Rp1,5 Triliun untuk Muhammadiyah
90	20 Desember 2019	Mandiri Syariah Dinobatkan Menjadi Mitra Distribusi SBSN Ritel Terbaik 2019
91	30 Desember 2019	Tingkatkan Perekonomian Syariah, Mandiri Syariah Tandatangani Kerjasama dengan Indonesia Re Group

Analyst Meeting

Mandiri Syariah masih merupakan perusahaan tertutup sehingga belum melakukan *analyst meeting*. Namun melakukan paparan kinerja bersama media massa.

Transparansi Penyampaian Laporan

Sepanjang tahun 2019, Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui antara lain Media Massa, *Website,* Sistem Pelaporan Elektronik OJK, serta menyampaikan laporan secara berkala. Adapun laporan yang disampaikan antara lain:

PROGRAM ANTI KORUPSI

Mandiri Syariah telah memiliki beberapa kebijakan yang terkait dengan Pencegahan Korupsi, antara lain diatur dalam Kode Etik, Pedoman Whistleblowing System serta Pedoman Gratifikasi.

Seluruh pegawai telah diberikan edukasi agar menjauhi tindakan-tindakan yang terkait dengan praktek korupsi.

KODE ETIK

Code of Conduct (CoC) merupakan bagian dari pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik. CoC mengatur tentang perilaku secara syariah, profesional, bertanggung jawab, wajar, patut, dan dapat dipercaya bagi Jajaran Bank, dalam melakukan hubungan bisnis baik dengan nasabah/calon nasabah, rekanan/calon rekanan, rekan sekerja maupun *stakeholders* lainnya.

Pokok-Pokok Kode Etik

Jajaran Mandiri Syariah memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan Kode Eitk ke dalam setiap perilaku, sehingga tidak akan merugikan masing-masing insan yang bersangkutan ataupun Perusahaan karena tingkah laku insan mencerminkan etika bisnis Perusahaan. Konten Kode Etik Mandiri Syariah terdiri dari:

1. Benturan Kepentingan
   Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi yang anggota Jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain yang memungkinkan anggota Jajaran Bank tersebut kehilangan obyektivitasnya dalam mengambil keputusan sesuai kewenangan yang telah diberikan Bank kepadanya. Ruang lingkup terdiri dari:
   a. Jajaran Bank wajib menghindarkan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
2. Jajaran Bank harus bertindak terhormat dan bertanggung jawab serta bebas dari pengaruh yang memungkinkan hilangnya obyektivitas dalam pelaksanaan tugas atau mengakibatkan Bank kehilangan bisnis dan/atau reputasi.

3. Jajaran Bank dilarang menyalahgunakan *corporate identity* Bank. *Corporate identity* hanya dapat digunakan untuk kepentingan Bank dan dengan seizin Bank.
4. Larangan *Risywah*
5. Jajaran Bank harus dapat mengambil langkah tegas untuk tidak memberikan/menerima *risywah* kepada/dari nasabah/calon nasabah, rekanan/calon rekanan dan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara terkait jabatannya sebagai jajaran Bank.
6. Kerahasiaan
   a. Jajaran Bank wajib menjaga kerahasiaan setiap data atau informasi terkait Bank atau nasabah yang berhubungan dengan Bank dan hanya menggunakannya untuk kepentingan Bank.
   b. Penyebaran data atau informasi terkait Bank dan nasabah yang berhubungan dengan Bank hanya
7. Dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
8. Penyalahgunaan Jabatan
9. Jajaran Bank dilarang menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain, baik dilakukan sendiri maupun mempengaruhi/ memaksa jajaran Bank lain untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yang dapat menimbulkan kerugian pada Bank.
10. Perilaku *Insiders*
11. Jajaran Bank yang memiliki informasi tentang Bank dilarang memanfaatkan informasi dimaksud untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank.
12. Integritas dan Akurasi Data Bank
    a. Jajaran Bank, baik secara individu maupun Bersama-sama harus berupaya untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang dapat melemahkan atau menurunkan integritas sistem perbankan di Indonesia.
    b. Jajaran Bank harus mengambil langkah-langkah tegas untuk memastikan bahwa dirinya tidak
13. Diperalat untuk kegiatan kriminal dan/atau kegiatan tidak legal lainnya.
14. Jajaran Bank harus mawas diri dan menghindarkan keterlibatan Bank dalam kegiatan pencucian uang, termasuk secara individu tidak terlibat dalam penggunaan dan/atau perdagangan narkoba, atau kegiatan terorisme.
15. Pengelolaan Rekening Pegawai
16. Jajaran Bank harus mengelola rekening kepegawaian yang dimilikinya secara bijak dan tidak memanfaatkan rekening tersebut untuk kegiatan terlarang.
17. Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*)
18. Jajaran Bank wajib melakukan pengisian pernyataan tahunan dengan jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.
19. Sanksi Pelanggaran/Ketidakpatuhan

Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Jajaran Bank wajib mematuhi pedoman *Code of Conduct* sebagai pedoman berperilaku, baik di dalam maupun di luar lingkungan Bank yang membawa citra Bank dengan penuh tanggung jawab. Pengenaan sanksi atas pelanggaran/ ketidakpatuhan terhadap *Code of Conduct* mengacu pada peraturan kepegawaian yang berlaku.

Penyebarluasan Kode Etik

Sosialisasi *Code of Conduct* kepada seluruh jajaran manajemen dan pegawai dilakukan dengan membagikan buku pedoman *Code of Conduct*. Selain itu, juga melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Direksi dan pejabat struktural di unit kerja masing-masing. Mandiri Syariah memiliki Program Pengenalan CoC yaitu dengan menginternalisasi CoC kepada pegawai baru melalui pelatihan guna memberikan pemahaman pengertian dari benturan kepentingan dan kewajiban untuk menghindari kondisi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Upaya Penerapan Dan Penegakan Kode Etik

Upaya implementasi dan penegakkan kode etik Mandiri Syariah dilakukan secara terus-menerus dalam bentuk komitmen dengan menandatangani Pakta Integritas. Penandatanganan Pakta Integritas Tahunan dilakukan oleh seluruh Dewan Komisaris, Direksi, serta Pejabat Eksekutif Mandiri Syariah dalam upaya penerapan pengendalian gratifikasi.

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Pegawai yang melakukan pelanggaran sanksi disiplin dikenakan sanksi antara lain:
1. Sanksi jenis pelanggaran disiplin ringan:
a. Surat Teguran Satu (ST 1)
b. Surat Teguran Dua (ST 2)
2. Sanksi jenis pelanggaran disiplin sedang:
c. Surat Pelanggaran Satu (SP 1)
d. Surat Pelanggaran Dua (SP 2)
e. Surat Pelanggaran Tigas (SP 3)
3. Sanksi jenis pelanggaran disiplin berat:
Pemberhentian/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Untuk menjaga kode etik, manajemen melakukan tindak lanjut atas peristiwa terindikasi pelanggaran terhadap ketentuan perusahaan dalam bentuk *code of conduct* maupun ketentuan perundangan. Manajemen telah menindaklanjuti peristiwa terindikasi pelanggaran terhadap ketentuan *code of conduct* dengan melakukan pemeriksaan (investigasi) dan melakukan menindaklanjuti hasil investigasi tersebut.

Selama tahun 2019, terdapat 5 (lima) pelanggaran kode etik, yaitu:

Jenis Pelanggaran	Kategori Sanksi	Jumlah
Praktek Risywah	Ringan	2
Penyalahgunaan Jabatan	Sedang	3

KEBIJAKAN GRATIFIKASI

Dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari Bank perlu menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan nasabah, vendor, rekanan, mitra kerja dan seluruh *stakeholder* yang didasarkan pada etika, rasa saling percaya, dan bertanggung jawab. Bank menyadari bahwa pengendalian gratifikasi merupakan kegiatan yang penting untuk menjaga proses bisnis berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas. Oleh karena itu, Bank Syariah Mandiri telah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi yang didukung dengan terbitnya Petunjuk Teknis Operasional (PTO) No. 54/2018 tanggal 31 Desember 2018 Perihal Petunjuk Teknis Operasional Pengendali Gratifikasi.

Petunjuk Teknis Operasional Pengendalian Gratifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang gratifikasi, menguraikan proses pelaporan, aspek pencegahan dan penindakan, serta pengenalan Sistem Pengendalian Gratifikasi, sehingga kepentingan bisnis tetap berjalan dengan baik dan beretika namun tidak bertentangan dengan ketentuan larangan gratifikasi dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari dengan nasabah, vendor, rekanan dan seluruh *stakeholder.* Dengan Implementasi pengendalian gratifikasi maka diharapkan seluruh jajaran pegawai dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membangun nilai-nilai *Good Corporate Governance* dan menanamkan *value integrity*
2. Tidak menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
3. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada Unit Pengendali Gratifikasi.

Pakta Integritas

Komitmen penandatanganan atas larangan penerimaan hadiah/imbalan dan bingkisan, dalam bentuk apa pun dari pihak nasabah/rekanan/pihak ketiga lainnya disampaikan dalam bentuk Pakta Integritas Dalam rangka mendukung program pengendalian gratifikasi, maka diperlukan penandatanganan Pakta Integritas oleh:

1. Dewan Komisaris, Direksi/SEVP, dan DPS pada saat ditetapkan dan dilakukan penandatanganan ulang setiap tahun sekali.
2. Penandatanganan Pakta Integritas oleh pegawai diatur sebagai berikut:
   a. Pegawai Bank (kecuali TAD dan Kriya) setiap 2 tahun sekali.
   b. TAD dan Kriya saat penandatanganan kontrak kerja.

Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

Unit Pengendali Gratifikasi

Unit Kerja Compliance merupakan Unit Kerja yang berfungsi sebagai koordinator pengendalian gratifikasi Bank dan memiliki Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) sebagai pelaksana pengendalian gratifikasi tersebut. Adapun tugas dan tanggungjawab unit pengendali gratifikasi adalah:

1. Menyusun dan/atau mengevaluasi ketentuan terkait pengendalian gratifikasi.
2. Menerima laporan gratifikasi berikut kelengkapan dokumennya dari pelapor gratifikasi.
3. Melakukan *review* atas laporan gratifikasi untuk menentukan kategori gratifikasi yang menjadi kewenangan Bank Syariah Mandiri dan jika diperlukan, UPG dapat meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait mengenai laporan gratifikasi tersebut.
4. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal yaitu Bank Mandiri dan pihak internal yaitu DCOR dan RBC.
5. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi, secara triwulanan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
6. Melakukan penyimpanan barang gratifikasi.

Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

Secara garis besar penerimaan dan penolakan gratifikasi diatur sebagai berikut:

1. Jajaran Bank wajib melakukan penolakan atas gratifikasi pada kesempatan pertama yang terkait dengan jabatan penerima atau benturan kepentingan
2. Apabila penerimaan gratifikasi tidak dapat ditolak pada kesempatan pertama, maka penerima gratifikasi wajib mengembalikan penerimaan gratifikasi tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 24 jam sejak penerimaan.
3. Pengembalian tersebut wajib disertai dengan bukti otentik pengembalian gratifikasi, antara lain berita acara serah terima pengembalian barang gratifikasi yang ditandatangani oleh penerima dan pemberi atau bukti setoran/transfer jika penerimaan dalam bentuk uang.
4. Pelapor wajib mengisi formulir gratifikasi secara lengkap dan benar, serta melaporkan kepada UPG disertai formulir yang telah ditandatangani dan dokumen pendukung melalui *email* dengan alamat upg@bsm.co.id dan subjek “Pelaporan Gratifikasi”.
5. Penyampaian pelaporan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak penerimaan gratifikasi dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja Pelapor.
6. Formulir gratifikasi dan tata cara pengisian formulir gratifikasi.
7. UPG melakukan reviu atas pelaporan penerimaan gratifikasi dari Pelapor dan memutuskan jenis gratifikasi tersebut (menjadi kelolaan Bank atau dapat dimiliki oleh Pelapor) dengan mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Gratifikasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima laporan penerimaan gratifikasi dan dokumen pendukung lengkap diterima.

8. Pelapor wajib mengambalikan barang/uang yang menjadi milik Bank kepada UPG paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah keluarnya Surat Keputusan Penetapan Gratifikasi.

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

UPG melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi secara berkelanjutan dengan mekanisme sebagai berikut namun tidak terbatas pada:
1. Sosialisasi tatap muka dengan Jajaran Bank.
2. *Broadcast*/sosialisasi pengendalian gratifikasi melalui email blast kepada Jajaran Bank.
3. Mempersiapkan brosur/buku/*table flipchart/pamflet/ standing banner* anti gratifikasi dan menyebarkan kepada Jajaran Bank dan vendor/debitur/rekanan usaha Bank.

Laporan Gratifikasi

Selama tahun 2019, terdapat 7 (tujuh) laporan gratifikasi yang semua telah ditindaklanjuti. Adapun rincian laporan gratifikasi adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Jenis Laporan Gratifikasi
1	16 Januari 2019	Honorarium sebagai narasumber
2	28 Mei 2019	Pemberian Barang
3	17 Juli 2019	Uang Transportasi dari penyelenggara acara
4	6 Agustus 2019	Honorarium sebagai narasumber
5	26 September 2019	Honorarium sebagai narasumber
6	4 Oktober 2019	Honorarium sebagai peserta *workshop*
7	23 Oktober 2019	Honorarium sebagai peserta *workshop*

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Pengelolaan *Whistleblowing System*

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Bank melalui Internal Audit Group wajib menerima dan menindaklanjuti seluruh laporan dugaan pelanggaran/ penyimpangan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. Penyampaian laporan dugaan tindakan penyimpangan dilakukan oleh Pelapor yang berisi informasi awal atas bentuk penyimpangan, pihak yang terlibat, lokasi/unit kerja terjadinya penyimpangan, perkiraan nilai kerugian (jika ada), serta kronologis penyimpangan.
2. Membuka saluran pengaduan dari beberapa sumber (SMS, *Whatsapp*, BBM, Surat, telepon, *Email* pengaduan@bsm.co.id) atau datang langsung ke Internal Audit Group untuk melaporkan adanya indikasi penyimpangan atau *fraud*.
3. Menerima informasi dan melakukan analisis awal atas informasi adanya dugaan fraud serta mengumpulkan informasi tambahan berupa bukti tertulis, keterangan tertulis saksi dan pelaku, serta bukti petunjuk lainnya.
4. Khusus untuk informasi awal yang bersumber dari pihak selain *Decentralized Compliance* & *Operational Risk* (DCOR)/*Regional Bussiness Control* (RBC) maka Internal Audit Group menginformasikan kepada *Decentralized Compliance* & *Operational Risk* (DCOR)/*Regional Bussiness Control* (RBC) sesuai lokasi dugaan kasus. Tujuannya agar *Decentralized Compliance* & *Operational Risk* (DCOR)/*Regional Bussiness Control* (RBC) ter-*update* atas permasalahan yang ada di wilayah kerjanya dan menentukan penanganan kasus secara langsung oleh Decentralized Compliance & Operational Risk (DCOR)/ Regional Bussiness Control (RBC) atau kolaborasi dengan Unit Kerja Internal Audit. Internal Audit Group menyimpulkan hasil analisis atas informasi awal adanya dugaan *fraud*. Kesimpulan dapat berupa:
   - Layak untuk pelaksanaan investigasi oleh *Department Special Audit*; dan
   - Belum layak investigasi.
     - Apabila belum layak investigasi, Unit Kerja Internal Audit menginformasikan kepada pemberi informasi atau Bagian Non Audit Khusus Internal Audit Group untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme non-investigasi. Pemberi informasi dapat menyampaikan kembali ke Internal Audit Group apabila suatu ketika ada bukti permulaan tambahan.
     - Apabila sudah layak investigasi, Department Head Special Audit menunjuk Tim Audit untuk menyiapkan preaudit dan surat tugas yang kemudian disetujui Kepala Internal Audit Group atau 2 (dua) Pejabat *Alternate* Internal Audit Group.
5. Tim Audit memulai investigasi dan menyusun hipotesis.
6. Tim Audit mengumpulkan informasi dan bukti-bukti untuk membuktikan hipotesis.
7. Tim Audit menguji kebenaran hipotesis dengan mengevaluasi bukti-bukti yang sudah terkumpul.
8. Apabila hipotesis terbukti, Tim Audit Investigasi membuat Laporan Hasil Audit Investigasi dan *Executive Summary.*

Perlindungan Bagi *Whistleblower*

Mandiri Syariah berkomitmen untuk melindungi identitas pelapor terkait dengan laporan pelanggaran yang disampaikannya. Perlindungan ini diberikan untuk mendorong keberanian pelapor dalam melaporkan pelanggaran serta menjamin pelapor dari tindakan-tindakan yang dapat mengancam atau membahayakan diri pelapor. Perlindungan pelapor meliputi:
1. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan.
2. Jaminan keamanan bagi pelapor maupun keluarganya.
3. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikannya.
4. Mandiri Syariah memberikan jaminan kerahasiaan identitas terlapor sampai berubah menjadi status terperiksa.

Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Kategori pelanggaran yang dapat dilaporkan terdiri dari:
1. Pelanggaran *Code of Conduct* (COC Mandiri Syariah)
2. Pelanggaran Kedisiplinan
3. Pelanggaran Asusila
4. Pelanggaran di Bidang Operasional
5. Pelanggaran di Bidang Pembiayaan

Bagan Alur Penyampaian Pelaporan Pelanggaran

PENJELASAN

1. Mulai.
2. Unit Kerja Internal Audit menerima informasi awal adanya dugaan *fraud*.
3. Unit Kerja Internal Audit melakukan analisis awal atas informasi adanya dugaan *fraud* dan mengumpulkan informasi tambahan.
4. Khusus untuk informasi awal yang bersumber dari pihak selain DCOR/RBC maka Unit Kerja Internal Audit menginformasikan kepada DCOR/RBC sesuai lokasi dugaan kasus. Tujuannya agar DCOR/RBC ter-*update* atas permasalahan yang ada di wilayah kerjanya dan menentukan penanganan kasus secara langsung oleh DCOR/RBC atau kolaborasi dengan Unit Kerja Internal Audit.
5. Unit Kerja Internal Audit menyimpulkan hasil analisis atas informasi awal adanya dugaan *fraud*. Kesimpulan tersebut berupa:
   a. Layak untuk pelaksanaan investigasi oleh Bagian *Special Audit*.
   b. Belum layak investigasi.
6. Apabila belum layak investigasi, Unit Kerja Internal Audit menginformasikan kepada pemberi informasi atau Bagian *Non*-Audit Khusus Unit Kerja Internal Audit untuk ditindklanjuti melalui mekanisme *non*-investigasi. Pemberi informasi dapat menyampaikan kEmbali ke Unit Kerja Internal Audit apabila suatu ketika ada bukti permulaan tambahan.
7. Kepala Bagian *Special Audit* menunjuk Tim Audit untuk menyiapkan preaudit dan surat tugas yang kemudian disetujui Kepala Unit Kerja Internal Audit atau 2 (dua) Pejabat *Alternate* Unit Kerja Internal Audit.
8. Tim Audit memulai investigasi dan menyusun hipotesis.
9. Tim Audit mengumpulkan informasi dan bukti-bukti untuk membuktikan hipotesis.
10. Tim Audit menguji kebernaran hipotesis dengan mengevaluai bukti-bukti yang sudah terkumpul.
11. Apabila hipotesis tidak terbukti, Tim Audit menyusun hipotesis baru dan memulai kembali langkaj-langkah 9 sampai dengan 10.
12. Apabila hipotesis terbukti, Tim Audit Invetigasi membuat Laporan Hasil Audit Investigasi dan *Executive Summary.*

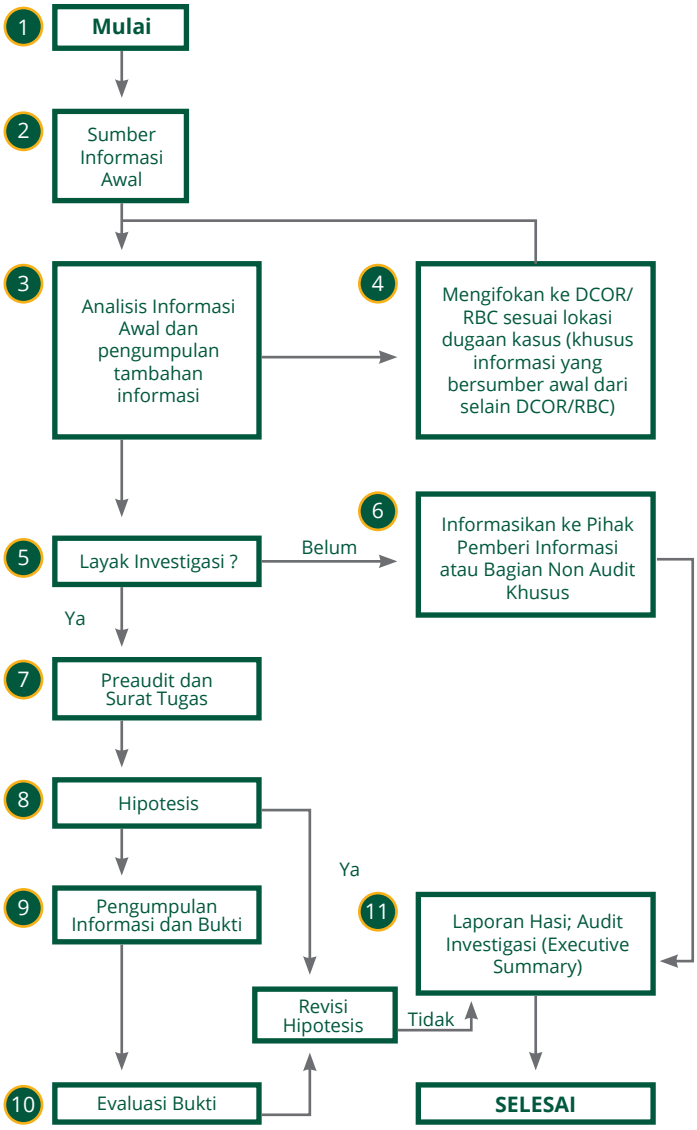

Sosialisasi *Whistleblowing System*

Sosialisasi *whistleblowing system* dilakukan melalui *training*/pelatihan yang dilaksanakan oleh Mandiri *University* dengan Internal Audit Group sebagai pemateri. *Training*/pelatihan tersebut dilaksanakan dalam proses kunjungan ke Kantor Cabang.

Jumlah Pengaduan

Sampai dengan 31 Desember 2019 terdapat 7 (tujuh) pengaduan atas melalui *whistleblowing system.* Adapun jenis pengaduan yang masuk adalah sebagai berikut.

No	Jenis Pengaduan	Jumlah
1	Pembiayaan	2
2	Operasional	1
3	Code of Conduct	4
Total		7

Sanksi/Tindak Lanjut Atas Pengaduan Di Tahun 2019

Pada tahun 2019 telah dilakukan pemeriksaan atas pengaduan dari *Whistleblowing system* yang diterima sampai dengan 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Pengaduan	Status			
	Sudah Ditindaklanjuti	Sedang Ditindaklanjuti (*On Progress*)	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Layak Ditindaklanjuti
7	3	0	2	2

Tiga kasus yang telah ditindaklanjuti melalui *whistleblowing system* telah selesai di audit dan telah dilaporkan ke Direksi. Pegawai bersangkutan yang melakukan tindakan terkait pelanggaran telah diberikan sanksi.

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Serta Penerapannya

Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah serta Direksi Mandiri Syariah diatur dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang mengatur bahwa Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah serta Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi. Dalam penetapan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah serta Direksi, Bank Mandiri Syariah senantiasa berupaya agar komposisi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi memiliki keberagaman. Keberagaman komposisi menyesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas Mandiri Syariah sehingga diharapkan dalam pengembangan maupun penyelesaian terhadap suatu permasalahan dapat dipertimbangkan dari berbagai perspektif pendidikan, kompetensi serta pengalaman yang dimiliki.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Pada periode 2019, keberagaman komposisi Dewan Komisaris yang tercermin dalam pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin, dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman kerja	Keahlian
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	62 Tahun	Laki-laki	- Sarjana bidang Sosial Ekonomi Pertanian - *Magister of Science-Agricultural Economics* - *Doctor of Philosophy*	Memiliki pengalaman kerja di perbankan syariah.	– Ekonomi – Perbankan

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman kerja	Keahlian
Bambang Widianto	Komisaris Independen	60 Tahun	Laki-laki	- Sarjana bidang Teknik Industri - *Master of Art* (MA) bidang *Computer Science* - Ilmu Ekonomi - Philosophiae Doctor (Ph.D) bidang Ilmu Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan dan pendidikan.	– Ekonomi – Perbankan – SDM
Dimas Oky Nugroho	Komisaris Independen	41 Tahun	Laki-laki	– Sarjana bidang Ilmu Politik – Master of Philosophy in International Politics – Doctor of Philoshopy (Ph.D) bidang – Politik	Memiliki pengalaman kerja di pemerintahan dan pendidikan.	– Ilmu Politik – Perbankan
Dikdik Yustandi	Komisaris	56 Tahun	Laki-laki	– Sarjana bidang Perikanan – Magister bidang Marketing	Memiliki pengalaman kerja di perbankan dan asuransi.	– Manajemen – Perbankan
Agus Sudiarto	Komisaris	55 Tahun	Laki-laki	– Sarjana Hukum – Magister Management	Memiliki pengalaman kerja di perbankan.	– Hukum – Manajemen
M. Kapitra Ampera*	Komisaris Independen	53 Tahun	Laki-laki	– Sarjana bidang Hukum Pidana – Magister Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum.	– Hukum

Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Pada periode 2019, keberagaman komposisi Dewan Pengawas Syariah yang tercermin dalam pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin, dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman kerja	Keahlian
Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin	Ketua	76 Tahun	Laki-laki	– Sarjana bidang Filsafat Islam – Doktor Honoris Causa bidang Hukum Ekonomi Syariah – Profesor bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah	Memiliki pengamalam kerja di bidang syariah dan pemerintahan.	– Syariah – Ekonomi
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Anggota Ketua	52 Tahun	Laki-laki	– Sarjana bidang Syariah – Master Business Administration – Magister Hukum – Doktor bidang Islamic Economic and Finance	Memiliki pengamalam kerja di bidang syariah dan pendidikan.	– Syariah – Hukum
Dr. H. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec	Anggota	51 Tahun	Laki-laki	– Sarjana bidang Syariah dan Hukum Islam – Magister bidang Ekonomi – Dokter bidang Micro Finance	Memiliki pengamalam kerja di bidang syariah.	– Syariah – Ekonomi
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota	44 Tahun	Laki-laki	– Sarjana bidang Syariah Islamiah – Master Fiqh Muqaran – Dokter Fiqh Muqaran	Memiliki pengalaman kerja di bidang pendidikan dan syariah	Syariah

Dra. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH, MA	Anggota	52 Tahun	Perempuan	– Sarjana Hukum – Master of Economic – Dokter Hukum	Memiliki Pengalaman Kerja di bidang asuransi dan syariah	Syariah

Keberagaman Komposisi Direksi

Pada periode 2019, keberagaman komposisi Direksi yang tercermin dalam pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin, dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman kerja	Keahlian
Toni Eko Boy Subari	Direktur Utama	55 Tahun	Laki-laki	Sarjana bidang Teknologi Industri Pertanian	Memiliki pengalaman kerja di bidang Perbankan.	Perbankan
Achmad Syafii	Direktur *Information Technology, Operation & Digital*	52 Tahun	Laki-laki	– Sarjana Bidang Teknik Informatika dan Komputer – Magister bidang Manajemen Informatik	Memiliki pengalaman kerja di bidang Perbankan.	– Perbankan – Teknologi Informasi
Putu Rahwidhiyasa	Direktur *Risk Management & Compliance*	55 Tahun	Laki-laki	– Sarjana Pertanian – Master of Business Administration bidang studi Finance and Strategy Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang Perbankan.	– Perbankan – SDM
Kusman Yandi	Direktur *Wholesale Banking*	54 Tahun	Laki-laki	– Sarjana Ekonomi bidang studi Akuntansi – Master of Business Administration	Memiliki pengalaman kerja di bidang Perbankan.	– Perbankan – Akuntansi
Ade Cahyo Nugroho	Direktur *Finance, Strategy & Treasury*	41 Tahun	Laki-laki	– Sarjana Ekonomi bidang studi Akuntansi – Master of Business Administration	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan asuransi.	– Perbankan – Akuntansi
Rosma Handayani*	Direktur *Human Capital*	50 Tahun	Perempuan	– Sarjana bidang Hukum Perdata – Magister Manajemen bidang Human Resources Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	– Hukum – Manajemen

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaian oleh Bank Syariah Mandiri

Internal *fraud* adalah tindakan fraud yang dilakukan oleh pengurus, pegawai Mandiri Syariah maupun pegawai tidak tetap (*outsourcing*) untuk kepentingan pribadi yang mempengaruhi kondisi keuangan Mandiri Syariah secara signifikan. Selama tahun 2019, jumlah *internal fraud* yang terjadi adalah sebanyak 10 kasus, dengan *progress* penyelesaian sebagai berikut:

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Dewan Komisaris dan Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Total *Fraud*	-	-	12	10	2	-
Telah diselesaikan	-	-	12	7	2	-
Dalam proses penyelesaian di internal Mandiri Syariah	-	-	-	3	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum)*	-	-	2	1*	-	-

*) Kasus yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum adalah bagian dari kasus yang telah diselesaikan atau sedang dalam proses penyelesaian di internal Mandiri Syariah.

Adapun upaya penyelesaian kejadian *fraud* dilakukan oleh Mandiri Syariah dengan segera memberikan sanksi kepada para pelaku, pegawai terlibat dan terkait. Para pelaku juga diminta untuk mengembalikan kerugian Bank sebagai bentuk *recovery*. Untuk menimbulkan efek jera, Mandiri Syariah juga telah memproses para pelaku ke jalur hukum. Mitigasi yang dilakukan Bank guna mencegah terulangnya kejadian fraud dengan perbaikan *design control* dan penguatan *internal control* di unit kerja tempat kejadian dilakukan agar kasus serupa tidak terulang dimasa mendatang.

TATA KELOLA TERINTEGRASI DENGAN ENTITAS UTAMA

Bank Syariah Mandiri sebagai Perusahaan Anak dari Mandiri Group aktif ikut serta dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT) yang dibentuk Entitas Utama (Bank Mandiri) dan ditetapkan keanggotaannya sesuai ketentuan berdasarkan SK Direksi PT Bank Mandiri No. KEP.DIR/136/2015 tentang Perubahan Keanggotaan Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah terwakili dari beberapa Perusahaan Anak sesuai kebutuhan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Mandiri Syariah sebagai perusahaan anak telah mengikuti arahan sesuai rekomendasi dari rapat Tata Kelola Terintegrasi. Komite TKT memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

1. Mengevaluasi pelaksanaan intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama

Bank Syariah Mandiri mengirimkan Perwakilan Komite TKT berdasarkan surat No. 21/442-3/DIR-CSG tanggal 15 Juli 2019 adalah sebagai berikut:

1. Bpk. Mulya E Siregar sebagai anggota Komite TKT dari Komisaris Independen
2. Bpk. Dr. H. Mohamad Hidayat sebagai sebagai anggota Komite TKT

Komite TKT telah melakukan evaluasi dengan melalui rapat yang diadakan tanggal 4 Desember 2019 dengan fokus pembahasan mengenai:

1. Tindak Lanjut Masukan Komite TKT
2. Penyesuaian Piagam TKT
3. Rencana Kerja Satuan Kerja Terintegrasi 2020

Adapun maksud dan tujuan dibentuknya Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya persamaan persepsi antara dan seluruh Perusahaan Anak dengan Bank Mandiri terkait peningkatan kualitas tata kelola yang baik dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Membangun sinergi dan aliansi bisnis yang kuat antara seluruh Perusahaan Anak dengan Bank Mandiri untuk menciptakan nilai tambah bagi Konglomerasi Keuangan secara berkesinambungan.

Hubungan Entitas Utama dengan Perusahaan Anak dilakukan melalui forum-forum diskusi melalui:

1. *Integrated Risk Committee* (IRC)
   IRC adalah Komite Eksekutif yang bertanggung jawab dalam penyusunan antara lain kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
   a. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab IRC
      Komite IRC memberikan rekomendasi kepada Direksi antara lain mengenai:
      1) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian Risiko secara terintegrasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi;
      2) Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
      3) Penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing Perusahaan Anak.
   b. Rapat IRC
      Rapat IRC diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*Voting Member*) atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite. Selama tahun 2019, Komite IRC telah melaksanakan rapat) dengan agenda fokus pembahasan sebagai berikut:
      1. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Mandiri/*Risk Based Bank Rating* (RBBR) secara Konsolidasi dan Profil Risiko Terintegrasi Posisi Desember 2018
      2. Penilaian Profil Risiko Individu dan Konsolidasi Kuartal 1 2019
      3. Tingkat Kesehatan Bank konsolidasi Semester 1 2019
      4. *Self Assessment* Profil Risiko Konsolidasi Triwulan III 2019
2. *Board Forum*
   Bank Syariah Mandiri sebagai Perusahaan Anak (PA) secara rutin mengikutsertakan Direksi ke berbagai *board forum* yang diadakan oleh Entitas Utama (Bank Mandiri) baik yang dilaksanakan secara Triwulan dan Semesteran.

Assessment Tata Kelola Terintegrasi

HASIL PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI	
Peringkat	**DEFINISI PERINGKAT**
1(1.8)	Mandiri Syariah telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik sesuai dengan POJK secara komprehensif. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Direksi telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola perusahaan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko sesuai dengan yurisdiksi otoritas/pengawas setempat. Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Mandiri Syariah.

Aspek dan hasil penilaian Tata Kelola Terintegrasi Bank Syariah Mandiri tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel Penilaian Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2019

No.	Parameter	Hasil	
		Semester I	Semester II
1.	Direksi	1,11	1,56
2.	Dewan Komisaris	1,70	1,60
3.	Dewan Pengawas Syariah	1,83	1,83
4.	Komite Tata Kelola Terintegrasi	1,43	1,29
5.	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT)	1,25	1,50
6.	Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi (SKAIT)	1,00	1,00
7.	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	1,40	1,40
8.	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	1,33	1,33
9.	Benturan Kepentingan	1,00	1,00
10.	Kebijakan Remunerasi	1,50	1,25
Nilai *Self Assessment*		**1,36**	**1,38**

Governance Structure

1. Seluruh anggota Direksi berjumlah 5 orang dan telah lulus *fit and proper test* dan memperoleh surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Memiliki pengalaman di bidang syariah (sebagai pejabat eksekutif bank syariah) lebih dari 4 (empat) tahun.
2. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada bank atau lembaga lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
3. Dewan Komisaris berjumlah 4 (empat) orang, di mana 3 (tiga) orang merupakan Komisaris Independen atau 75% dari total Dewan Komisaris. dan tidak ada yang melakukan rangkap jabatan yang dilarang oleh regulasi.
4. Satuan Kerja Kepatuhan dalam menjalankan fungsinya independen terhadap satuan kerja operasional, selama periode semester I 2019 Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) telah memberikan Opini Kepatuhan (*Compliance Opinion*) yang didukung dengan menerbitkan: *Compliance Opinion* sebanyak 36, *Compliance Note Independen* (CNI) sebanyak 36 , *Compliance Cheklist* (CCL) sebanyak 5 , Rapat Komite Pembiayaan (RKP) sebanyak 42 dan Rapat Teknis sebanyak 50 kali rapat.

Governance Process

1. Direksi telah melaksanakan rapat selama semester I 2019 sebanyak 27 kali Rapat Direksi, seluruh Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat serta telah dituangkan ke dalam risalah rapat (Notulen Rapat Direksi).
2. Dewan Komisaris tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank dan melakukan pengawasan serta pemberian nasihat secara intensif Direksi secara profesional dan independen.
3. Bank telah memiliki infrastruktur sebanyak 63 ketentuan selama semester I 2019 berupa kebijakan, prosedur, manual produk dan telah dilakukan kaji ulang secara periodik serta diselaraskan dengan MGPG (Mandiri Group *Principles Guideline*) Bank Mandiri.
4. Satuan Kerja Audit Intern memantau dan mengevaluasi penerapan fungsi kepatuhan dan telah diselaraskan dengan SKAI Entitas Utama (DIA Bank Mandiri) yang didahului dengan forum *meeting* perusahaan anak Bank Mandiri.

Governance Outcome

Faktor-faktor positif:

a. Dewan Komisaris melaksanakan rapat dalam rangka pengawasan terhadap operasional bank selama semester I 2019 sebanyak 43 kali,melebihi ketentuan regulasi yang mewajibkan paling kurang satu kali dalam dua bulan, dengan rincian sebagai berikut:
   - Rapat Komisaris, 7 kali
   - Rapat Komisaris bersama DIreksi, 7 kali
   - Komite Remunerasi dan Nominasi, 4 kali
   - Komite Pemantau Risiko, 19 kali
   - Komite Audit, 6 kali

b. Laporan Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Laporan Kepatuhan Terintegrasi kepada pihak ketiga dilakukan secara tepat waktu dan tidak pernah terkena sanksi atas keterlambatan laporan

c. Bank telah menyempurnakan ketentuan internal Bank (kebijakan, prosedur, manual produk dan petunjuk teknis) untuk meminimalisasi adanya intervensi pihak terkait/pihak lainnya terhadap operasional bank yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

d. IAG telah memberikan rekomendasi yang sesuai dengan permasalahan dalam audit *finding* sebagai acuan perbaikan oleh Unit Kerja terkait yang mengacu pada ketentuan regulator, ketentuan internal Bank, POJK, dan *best practice* yang berlaku

Penjelasan hasil Penilaian Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2019 Semester II adalah sebagai berikut.

Governance Structure

1. 5 orang Anggota Direksi telah lulus *fit and proper test* dan memperoleh surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
2. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada bank atau lembaga lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
3. Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang, di mana 3 (tiga) orang merupakan Komisaris Independen atau 100% dari total Dewan Komisaris. dan tidak ada yang melakukan rangkap jabatan yang dilarang oleh regulasi.
4. Satuan Kerja Kepatuhan dalam menjalankan fungsinya independen terhadap satuan kerja operasional, selama periode semester II 2019 Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) telah memberikan Opini Kepatuhan (Compliance Opinion) yang didukung dengan menerbitkan: Compliance Opinian sebanyak 21, Compliance Note Independen (CNI) sebanyak 51 , Compliance Checklist (CCL) sebanyak 11, Rapat Komite Pembiayaan (RKP) sebanyak 56 dan Rapat Teknis sebanyak 61 kali rapat

Governance Process

1. Direksi telah melaksanakan rapat dan pengambilan keputusan rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat serta telah dituangkan ke dalam risalah rapat (Notulen Rapat DIreksi).
2. Dewan Komisaris tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank dan melakukan pengawasan serta pemberian nasihat secara intensif Direksi secara profesional dan independen.
3. Bank telah memiliki infrastruktur sebanyak 63 ketentuan selama semester II 2019 berupa kebijakan, prosedur, manual produk dan telah dilakukan kaji ulang secara periodik.
4. Satuan Kerja Audit Intern memantau dan mengevaluasi penerapan fungsi kepatuhan dan telah diselaraskan dengan SKAI Entitas Utama (DIA Bank Mandiri) yang didahului dengan forum *meeting* perusahaan anak Bank Mandiri.

Governance Outcome

1. Direksi telah melaksanakan rapat selam semester II 2019 sebanyak 24 kali Rapat Direksi
2. Dewan Komisaris melaksanakan rapat dalam rangka pengawasan terhadap operasional bank selama semester II 2019 sebanyak 44 kali,melebihi ketentuan regulasi yang mewajibkan paling kurang satu kali dalam dua bulan, dengan rincian sebagai berikut:
   - Rapat Komisaris, 6 kali
   - Rapat Komisaris bersama Direksi, 6 kali
   - Komite Remunerasi dan Nominasi, 3 kali
   - Komite Pemantau Risiko, 21 kali
   - Komite Audit, 7 kali
   - Rapat Gabungan, 1 kali
3. Laporan Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Laporan Kepatuhan Terintegrasi kepada pihak ketiga dilakukan secara tepat waktu dan tidak pernah terkena sanksi atas keterlambatan laporan.
4. Bank telah menyempurnakan ketentuan internal Bank (kebijakan, prosedur, manual produk dan petunjuk teknis) untuk meminimalisasi adanya intervensi pihak terkait/pihak lainnya terhadap operasional bank yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
5. IAG telah memberikan rekomendasi yang sesuai dengan permasalahan dalam audit *finding* sebagai acuan perbaikan oleh Unit Kerja terkait yang mengacu pada ketentuan regulator, ketentuan internal Bank, POJK, dan *best practice* yang berlaku.

PENDAPATAN NON-HALAL DAN PENGGUNAANNYA

Pendapatan non halal dan penggunaannya dalam bank syariah harus diungkapkan dalam laporan tahunan pelaksanaan GCG, ini diatur dalam SEBI No.12/13/DPbS, tanggal 30 April 2010, perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah. Sebagai bentuk pelaksanaan GCG terkait dengan pendapatan non halal dan penggunaannya, Bank telah menginternalisasi aturan tersebut dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) *Corporate Secretary* Mandiri Syariah dengan nomor registrasi SPO/06-2016 berlaku tanggal 15

November 2018. Dalam SPO tersebut mengatur:

1. Lembaga Mitra, adalah lembaga pengelola zakat/sosial yang memiliki *track* record baik dalam penyaluran dana zakat/infaq/kebajikan/sosial, berbadan hukum yang sah, dan dijadikan sebagai mitra Bank dalam penyaluran dana zakat/infaq/kebajikan/sosial. Sebagai bentuk pelaksanaan GCG dan untuk menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*), maka pemberian atau penyaluran Dana Kebajikan (sosial) tidak diperkenankan kepada:
   a. Lembaga dimana Pengurus Bank (Dekom, Direksi), Dewan Pengawas Syariah, maupun Pejabat Eksekutif Bank menjadi pengurus lembaga tersebut.
   b. Perorangan atau lembaga yang pengurusnya memiliki hubungan keluarga dengan Pengurus Bank, Dewan pengurus Syariah maupun Pejabat Eksekutif Bank.

2. Pendapatan non halal
   Pendapatan non halal menjadi sumber dana Kebajikan Bank yang terdiri dari:
   a. Dana Kebajikan dari *Penalty,* yakni Dana yang berasal dari denda keterlambatan (*penalty*) pembayaran angsuran.
   b. Dana Kebajikan dari Jasa Giro, yakni Dana kebajikan yang berasal dari jasa giro yang diterima Bank dari penempatan pada bank konvensional.
   c. Dana Kebajikan Lainnya, yakni Dana kebajikan yang berasal dari komisi, fee, atau pendapatan dalam bentuk lainnya dari rekanan Bank selain pendapatan yang berhak diterima sesuai dengan ketentuan manajemen.

Berikut laporan peggunaan pendapatan dan penggunaan dana sosial/kebajikan Mandiri Syariah tahun 2019

Sumber Dana	2018	2019	Pertumbuhan	
			Rp	%
Sumber dana kebajikan				
Denda	22.809	15.667	(7.142)	(31.31%)
Penerimaan non-halal	628	139	489	(77.7%)
Dana sosial lainnya	536	903	367	68.47%
Jumlah sumber dana kebajikan	22.973	16.709	(7.624)	(33.30%)
Penggunaan dana kebajikan disalurkan melalui LAZNAS Bank Syariah Mandiri	(85.894)	(61.699(	(24.195)	(28.17%)
Keuntungan selisih kurs	686	(227)	(495)	(66.91%)
Kenaikan / (Penurunan) dana kebajikan	(61.235)	(45.216)	16.019	(26.16%)
Saldo awal dana kebajikan	139.592	78.357	(61.235)	(43.87%)
Saldo akhir dana kebajikan	78.357	33.141	(45.216)	(57.17%)

BUY BACK SHARE DAN *BUY BACK OBLIGATION*

Merujuk pada SEBI No. 12/13/DPbS, perihal Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, tanggal 30 April 2010 yang dimaksud dengan *Buy back shares* dan *buy back* obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah terbitkan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank Syariah Mandiri tidak melakukan *buy back shares* maupun buy back obligasi selama tahun 2019.

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Manajemen Mandiri Syariah sangat *concern* terhadap masalah benturan kepentingan. Mandiri Syariah telah memiliki Pedoman *Code of conduct* (CoC) yang termaktub dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan PT Bank Syariah Mandiri dengan No. registrasi KBP/01-2016.

Pedoman Benturan Kepentingan mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank, dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, semua kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. *Code of Conduct* adalah pedoman internal perusahaan yang berisikan sistem, nilai, etika bisnis, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan bagi individu dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan *stakeholders*. **Sepanjang tahun 2019 tidak terdapat benturan kepentingan** yang melibatkan manajemen perusahaan yang menimbulkan kerugian pada perusahaan.

Salah satu upaya perseroan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik terkait benturan kepentingan yakni anjuran tidak menerima hadiah dimasa lebaran yang disampaikan melalui media internal secara berkala kepada seluruh pegawai Mandiri Syariah. Adapun media yang digunakan diantaranya melalui:

a. Poster La risywah, *No Kick Back* dan *No Special Payment*
Merupakan bentuk komitmen pimpinan yang wajib diikuti jajaran Bank untuk bekerja dengan lurus.

mandiri syariah
Nasabah kami Yth.
Kami, Direksi dan Pegawai Bank Syariah Mandiri:
1. tidak dibolehkan menerima pemberian atau hadiah, langsung atau tidak langsung, dari nasabah/rekanan atau calon nasabah/rekanan berkenaan dengan tugas kami;
2. tidak dibolehkan melayani pengajuan pembiayaan melalui perantara, broker atau pihak ketiga lainnya yang mengenakan fee atau komisi atas beban siapa pun.
3. tidak dibolehkan menerima titipan dari nasabah seperti buku tabungan, bilyet deposito, warkat cek/BG, formulir transaksi kosong yang telah ditandatangani dan bukti kepemilikan rekening nasabah lainnya.
Terima kasih atas dukungan Anda kepada kami di dalam mewujudkan sistem pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
Atas nama Direksi dan Pegawai
PT Bank Syariah Mandiri
Toni E.B. Subari
Direktur Utama
Branch Manager

b. *Annual Disclosure* Benturan Kepentingan
Benturan Kepentingan adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan dengan cara memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) dalam perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi merugikan perusahaan. Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dikalangan pegawai maka seluruh jajaran Bank Syariah Mandiri diwajibkan untuk mengisi pernyataan tahunan (*annual disclosure*) setiap tahunnya terkait bentuan kepentingan yang muncul dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. *Annual Disclosure* berkaitan erat dengan dokumen kepegawaian, saat ini untuk penyelenggaraan *annual disclosure* dikelola oleh unit kerja Human Capital, dimana pernyataan tahunan (*annual disclosure*) tersebut telah diintegrasikan dengan aplikasi sistem kepegawaian bank.

c. *Email blast*
Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan, bank melakukan sosialisasi melalui email blast guna me*reminder* kepada jajaran Bank untuk menghindari berbagai kemungkinan munculnya benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

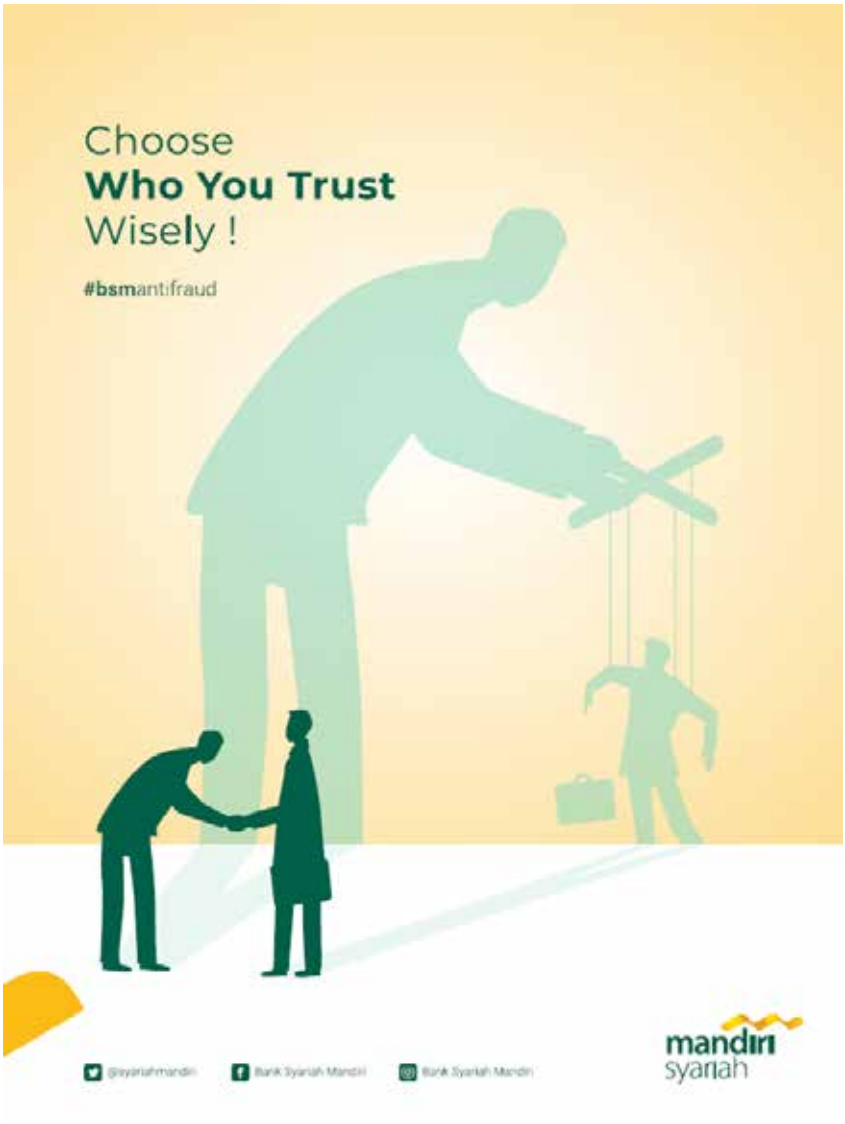
Choose
Who You Trust
Wisely !
#bsmantifraud
mandiri
syariah

ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

SELF ASSESSMENT

Bank Syariah Mandiri melakukan pengukuran Pelaksanaan Tata Kelola sebagai wujud komitmen Mandiri Syariah terhadap Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG maka Mandiri Syariah secara rutin telah melaksanakan *self assessment* Pelaksanaan GCG yang dilaksanakan secara semesteran.

KRITERIA PENILAIAN

Pelaksanaan *self assessment* Pelaksanaan GCG telah sesuai dengan SE OJK yang meliputi tiga aspek *governance*, yaitu *governance structure, governance process* dan *governance outcome.* Penilaian ketiga aspek *governance* tersebut dilakukan terhadap:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
6. Penanganan benturan kepentingan;
7. Penerapan fungsi kepatuhan;
8. Penerapan fungsi audit intern;
9. Penerapan fungsi audit ekstern;
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); dan
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta pelaporan internal.

SKOR PENILAIAN

Mandiri Syariah telah menyampaikan hasil *self assessment* pelaksanaan GCG kepada OJK setiap semester. Pada semester I tahun 2019 dengan hasil penilaian 1 atau kategori predikat "sangat baik". Kesimpulan umum hasil *self assessment* semester I 2019 adalah sebagai berikut:

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	1	Manajemen Mandiri Syariah telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **sangat baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang **sangat memadai**. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Mandiri Syariah.

Analisis

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
   a. Pada semester I 2019, telah dilaksanakan 43 kali Rapat Dewan Komisaris
   b. Dewan Komisaris berjumlah 4 (empat) orang, di mana 3 (tiga) orang merupakan Komisaris Independen atau 75% dari total Dewan Komisaris.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
   a. Seluruh anggota Direksi telah lulus *fit and proper test*.
   b. Pada semester I 2019, telah dilaksanakan 27 kali Rapat Direksi
   c. Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman di bidang syariah dari 4 (empat) tahun dan telah mengikuti berbagai pelatihan/ seminar dalam dan luar negeri.

3. Kelengkapan dan Pelaksaaan Tugas Komite
   a. Seluruh anggota Komite yang merupakan Pihak Independen tidak ada yang merangkap jabatan sebagai Pihak independen anggota Komite pada Bank yang sama maupun pada bank lain, perusahaan lain.
   b. Rapat Komite telah dilakukan padasemester I tahun 2019 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali, sbb:
      - Komite Audit, sebanyak 6 (enam) kali.
      - Komite Pemantau Risiko, sebanyak 19 (sembilan belas) kali.
      - Komite Remunerasi dan Nominasi, sebanyak 4 (empat) kali.

Peringkat	Definisi Peringkat
4.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS DPS melakukan 7 (tujuh) kali uji petik dalam rangka pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dan secara semesteran memberikan laporan hasil pengawasan kepada OJK tepat waktu
5.	Pelaksanaaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa a. Produk yang dimiliki oleh Bank telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dan telah dilengkapi dengan *Standard Operating Procedures* yang memadai. b. DPS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS kepada Direksi, sekaligus menjadi rekomendasi manajemen menjalankan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional dan produk bank
6.	Penanganan Benturan Kepentingan a. Mandiri Syariah telah memiliki Pedoman *Code of conduct* (CoC) yang termaktub dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan . b. Manajemen Mandiri Syariah tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran bank dengan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran. Tidak terdapat benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian pada perusahaan selama periode pelaporan
7.	Penerapan Fungsi Kepatuhan a. Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) memiliki infrastruktur Sumber daya dan telah mengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi untuk menjalankan pemantauan dan evaluasi fungsi kepatuahn dengan menyampaikan laporan kepatuhan secara rutin. b. SKK berperan aktif dalam memberikan opini kepatuhan pada komite pembiayaan c. GCG *Award* Mandiri Syariah sebagai *The Most Trusted Company 8* kali berturut-turut (CGPI 2011 – 2018).
8.	Penerapan Fungsi Audit Intern a. Sumber daya manusia auditor IAG sudah dipenuhi baik dari sisi kuantitas maupun kualitas b. Evaluasi rencana audit IAG telah diselaraskan dengan SKAI Entitas Utama (DIA Bank Mandiri)
9.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern a. Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP sesuai dengan aturan dan perundang undangan yang berlaku serta telah disetujui oleh RUPS. b. Hasil audit dan *management letter* telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh KAP yang ditunjuk
10.	Batas Maksimum Penyaluran Dana a. Bank secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku b. Penerapan penyaluran dana oleh Mandiri Syariah masih dalam batas yang diperbolehkan Regulator sesuai ketentuan yang mengatur mengenai BMPD.
11.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal a. Bank telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta lembaga lainnya sesuai aturan regulasi. b. Bank telah memberikan informasi mengenai karakteristik informasi Produk Bank melalui materi promosi kepada Nasabah secara akurat dan sebenar-benarnya.

Pada semester II 2019 hasil penilaian *self assessment* pelaksanaan GCG adalah 1 atau masuk dalam kategori **"sangat baik"**. Secara umum kesimpulan hasil *self assessment* semester II 2019 adalah sebagai berikut:

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	1	Manajemen Mandiri Syariah telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **sangat baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang **sangat memadai**. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Mandiri Syariah.
Analisis		

Peringkat	Definisi Peringkat

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
   a. Pada semester II 2019, telah dilaksanakan 44 kali Rapat Dewan Komisaris
   b. Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang, di mana ketiganya merupakan Komisaris Independen atau 100% dari total Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
   a. Pada semester II 2019, telah dilaksanakan 24 kali Rapat Direksi
   b. Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman di bidang syariah dari 4 (empat) tahun dan telah mengikuti berbagai pelatihan/ seminar dalam dan luar negeri.
3. Kelengkapan dan Pelaksaaan Tugas Komite
   a. Seluruh anggota Komite yang merupakan Pihak Independen tidak ada yang merangkap jabatan sebagai Pihak independen anggota Komite pada Bank yang sama maupun pada bank lain, perusahaan lain.
   b. Rapat Komite telah dilakukan pada semester II tahun 2019 sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali, sbb:
      - Komite Audit, sebanyak 7 (tujuh) kali.
      - Komite Pemantau Risiko, sebanyak 21 (dua puluh satu) kali.
      - Komite Remunerasi dan Nominasi, sebanyak 3 (tiga) kali.
4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS
   a. DPS telah melaksanakan rapat sebanyak 6 kali serta keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat
   b. DPS melakukan 9 (Sembilan) kali uji petik dalam rangka pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dan secara semesteran memberikan laporan hasil pengawasan kepada OJK tepat waktu.
5. Pelaksanaaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa
   a. DPS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS kepada Direksi, sekaligus menjadi rekomendasi manajemen menjalankan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional dan produk bank
   b. DPS telah memberikan opini terhadap kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa Bank yang didokumentasikan dengan risalah rapat.
6. Penanganan Benturan Kepentingan
   - Mandiri Syariah telah memiliki Pedoman *Code of conduct* (CoC) yang termaktub dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan .
   - Manajemen Mandiri Syariah tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran bank dengan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran. Tidak terdapat benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian pada perusahaan selama periode pelaporan
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
   - Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) memiliki infrastruktur Sumber daya dan telah mengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi untuk menjalankan pemantauan dan evaluasi fungsi kepatuhan dengan menyampaikan laporan kepatuhan secara rutin.
   - SKK berperan aktif dalam memberikan opini kepatuhan pada komite pembiayaan
   - Pengukuran Pelaksanan Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan oleh Bank dan mendapatkan CGPI *Award* Mandiri Syariah sebagai *The Most Trusted Company* 8 (delapan) kali berturut-turut (CGPI 2011 – 2018).
8. Penerapan Fungsi Audit Intern
   a. Kebutuhan sumber daya manusia auditor Internal Audit relatif sudah dipenuhi baik dari sisi kuantitas maupun kualitas
   b. IAG telah memberikan rekomendasi kepada seluruh unit untuk membuat perbaikan-perbaikan untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan mencegah terulangnya kejadian yang diakibatkan oleh kelemahan yang sama.
   c. Evaluasi rencana audit telah diselaraskan dengan SKAI Entitas Utama (DIA Bank Mandiri)
9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
   a. Bank memiliki pedoman seleksi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang mengatur tentang pemenuhan aspek-aspek tersebut
   b. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah disetujui RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
   c. KAP dan Akuntan Publik yang ditunjuk memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit.
   d. Hasil audit KAP dan *Management Letter* telah disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana
    a. Bank secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
    b. Penerapan penyaluran dana oleh Mandiri Syariah masih dalam batas yang diperbolehkan Regulator sesuai ketentuan yang mengatur mengenai BMPD.
11. Transparansi Kondisi Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal
    - Bank telah melakukan kajian secara berkala terhadap Standar Prosedur Operasional (SPO) Perlindungan dan Pengaduan Nasabah
    - Bank telah mempublikasikan laporan kepada *stakeholders* berdasarkan standar akuntansi sesuai dengan ketentuan serta dapat diakses pada *website.*
    - Bank telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta lembaga lainnya sesuai aturan regulasi.
    - Bank telah memberikan informasi mengenai karakteristik informasi Produk Bank melalui materi promosi kepada Nasabah secara akurat dan sebenar-benarnya.

REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUT

Selama tahun 2019 tidak terdapat rekomendasi dari OJK.

CORPORATE GOVERNANCE PERCEPTION INDEX (CGPI)

Mandiri Syariah secara rutin mengikuti rating dan survey *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). CGPI merupakan Program riset dan pemeringkatan GCG untuk melakukan Penilaian kualitas Corporate Governance suatu perusahaan. CGPI diikuti oleh perusahaan publik (*emiten*), BUMN, perbankan dan perusahaan swasta lainnya.

Adapun keikutsertaan Mandiri Syariah dalam program CGPI bertujuan untuk:
a. Melakukan evaluasi pelaksanaan GCG secara independen dalam rangka mencapai pelaksanaan GCG yang optimal.
b. Bentuk tanggung jawab, transparansi dan komitmen Mandiri Syariah kepada stakeholder atas pelaksanaan GCG.
c. Menilai tindaklanjut perbaikan dan meningkatkan strategi dan kebijakan dalam mengelola tata kelola sesuai dengan visi dan misi.
d. Menilai implementasi strategis dan kebijakan dalam mengelola bisnis bank
e. Sarana dalam menyusun *database* dan melakukan pemetaan implementasi GCG

Manfaat yang ingin dicapai dari pelaksanaan CGPI adalah:
a. Memperbaiki faktor internal perusahaan yang belum memadai guna meningkatkan kualitas penerapan GCG.
b. Memetakan masalah strategis perusahaan guna meningkatkan kualitas penerapan GCG.
c. Meningkatkan kesadaran dan komitmen bersama jajaran internal perusahaan dalam mengimplementasikan GCG
d. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan.
e. Menetapkan indikator atau standar kualiatas penerapan GCG yang ingin dicapai oleh bank
f. Mendorong kapabilitas organisasi dan anggota perusahaan dalam menerapkan GCG

KRITERIA PENILAIAN

Aspek dan Indikator penilaian dalam CGPI 2018 dengan tema transformasi model bisnis dalam kerangka GCG adalah sebagai berikut:
1. Stuktur Governansi (*Governance Structure*)
   Aspek struktur governansi merupakan penilaian terhadap kecukupan struktur dan infrastruktur perusahaan dalam mengelola perubahan model bisnis yang menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip governansi. Indikator penilaian dari aspek struktur governansi meliputi:
   a. Pemegang Saham
   b. Dewan Komisaris
   c. Direksi
   d. Penanggung jawab manajemen fungsional

2. Proses Governansi (Governance Process)
   Aspek proses governansi merupakan penilaian terhadap efektivitas sistem dan mekanisme dalam mengelola perubahan model bisnis yang menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip governansi. Indikator penilaian dari aspek proses governansi meliputi:
   a. Governansi pemenuhan hak Pemegang Saham dan RUPS
   b. Governansi Dewan Komisaris dan Direksi
   c. Governansi korporasi
   d. Governansi pengungkapan dan keterbukaan informasi
   e. Governansi pengawasan internal dan eksternal
   f. Governansi pengelolaan risiko dan kepatuhan
   g. Governansi modal insani (*human capital*)
   h. Governansi tanggung jawab sosial dan lingkungan
   i. Governansi pengadaan barang/jasa
   j. Governansi teknologi informasi
   k. Governansi perencanaan stratejik
   l. Governansi inovasi bisnis

3. Hasil Governansi *(Governance Outcome*)
   Aspek hasil governansi merupakan penilaian terhadap kualitas luaran, hasil, dampak dan manfaat dari mengelola perubahan model bisnis yang menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip governansi. Indikator penilaian dari aspek hasil governansi meliputi:
   a. Kinerja Keuangan
   b. Kinerja Non Keuangan

Sejak tahun 2011 sampai tahun 2018 Bank Syariah Mandiri telah mengikuti CGPI, Selama tujuh periode (periode penilaian tahun 2011-2018) keikutsertaan Mandiri Syariah dalam program CGPI, Mandiri Syariah mendapatkan predikat perusahaan "***The Most Trusted Companies*".** Dengan Pencapaian peringkat sebagai "*The Most Trusted Companies*" secara berturut-turut menunjukkan komitmen Mandiri Syariah dalam mengimplementasikan GCG secara berkelanjutan.

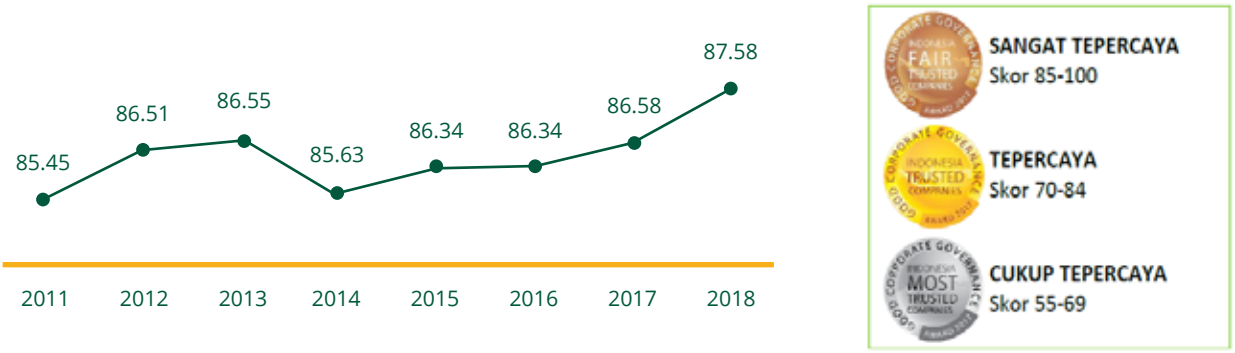

Grafik *Score* CGPI Bank Syariah Mandiri Periode Tahun 2011-2018

REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUT

Hasil CGPI 2019 pada BSM juga mengemukakan beberapa rekomendasi untuk area perbaikan penerapan aspek penilaian di masa datang antara lain:

1. Aspek Struktur Governansi (*Governance Structure*)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	BSM perlu mengakui dan menetapkan secara detail mengenai hak-hak Pemegang Saham diantaranya dalam Anggaran Dasar dan Pedoman GCG perusahaan.	BSM telah menetapkan secara detail mengenai hak hak pemegang saham dalam Anggaran Dasar dan Pedoman GCG perusahaan.
2	BSM perlu mempertimbangkan keseimbangan jumlah komposisi anggota Dewan Komisaris dengan Direksi.	Seluruh anggota Dewan Komisaris diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi kepada pemegang saham untuk disahkan melalui RUPS.
3	BSM perlu mempertimbangkan dan merespon isu keberagaman gender dalam komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.	Seluruh anggota Dewan Komisaris diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi kepada pemegang saham untuk disahkan melalui RUPS.
4	BSM perlu mempertimbangkan adanya pembatasan jumlah rangkap jabatan yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris untuk mengoptimalkan tugas pengawasan Dewan Komisaris.	Pembatasan rangkap jabatan Dewan Komisaris telah mengacu pada Board Manual Dewan Komisaris.
5	BSM perlu mempertimbangkan adanya pembatasan jumlah rangkap jabatan yang dimiliki oleh anggota Dewan Pengawas untuk mengoptimalkan tugas pengawasan.	Rangkap jabatan sudah sesuai dengan aturan Regulator yaitu PBI No. 11/33/PBI/2009
6	Perusahaan perlu mengembangkan dan memutakhirkan pedoman pelaksanaan tugas Direksi khususnya terkait evaluasi kinerja sesuai peran dan tanggung jawab Direksi.	Direksi telah menerbitkan dan menyempurnakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang telah disahkan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja tersebut mengatur mengenai tugas pokok, struktur organisasi, etika kerja, waktu kerja, dan penyelenggaraan rapat Direksi.
7	BSM perlu mengembangkan kebijakan suksesi anggota Direksi untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.	Dengan latar belakang anggota Dewan Direksi yang berbeda-beda, Mandiri Syariah selalu mengadakan Program Pengenalan anggota Direksi baru dengan harapan para anggota Direksi dapat saling mengenal dan menjalin kerjasama sebagai satu tim yang solid, komprehensif dan efektif.
8	BSM perlu menetapkan rancangan struktur organisasi disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan memenuhi kekosongan formasi struktur fungsional yang menjadi tanggung jawab Direksi	Rancangan struktur organisasi telah disesuaikan dengan kebutuhan perusahan dalam core plan tahun 2020-2024

2. Aspek Proses Governansi (*Governance Process*)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	BSM perlu mengembangkan mekanisme pendidikan dan pelatihan untuk Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala dan berkelanjutan.	BSM telah mengadakan dan mengikutsertakan pendidikan bagi Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala dan berkelanjutan.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
2	BSM perlu mengembangkan mekanisme komunikasi dan koordinasi yang intensif dan jelas antara anggota Komite Audit dan Audit Intern/SPI dengan Auditor Eksternal/KAP yang telah dipilih oleh RUPS dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, sehingga keluaran hasil audit bisa digunakan untuk optimalisasi program pengawasan oleh organ perusahaan.	Komunikasi dan Koordinasi antara Audit Internal dengan Auditor external dilakukan dengan intensif dan hasil audit eksternal menjadi dasar untuk menyusun rencana audit berikutnya.
3	BSM perlu mengembangkan dan memutakhirkan kebijakan dan pedoman pengungkapan dan keterbukaan informasi perusahaan dengan mengacu pada perkembangan regulasi dan pedoman yang berlaku.	Mandiri Syariah telah memiliki kebijakan tentang kewajiban pelaporan kepada pihak ketiga sebagai perwujudan keterbukaan informasi kepada *stakeholders.*
4	BSM perlu memperkuat dan mengoptimalkan efektivitas sistem manajemen risiko yang sinergi dengan pertumbuhan bisnis perusahaan.	BSM memiliki ketentuan dalam mengelola risiko operasional secara memadai untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian eksternal.
5	BSM perlu mengembangkan kebijakan, sistem dan program keuangan berkelanjutan *(sustainable financing).*	BSM telah melaksanakan dua program sustainable, pertama terkait bisnis yang mencakup produk dan layanan,governance dan capacity building. Kedua sustainable terkait sosial melaksanakan program yang diberi nama BISA (Bank Mandiri Syariah *Integrated Sosial Action*) yang mencakup 4 (empat) pilar yakni Pengembangan ekonomi sosial pengembangan komunitas, pengembangan spiritual, pengembangan Sumber Daya Manusia.
6	BSM perlu meningkatkan penciptaan inovasi yang bernilai tambah di semua bentuk, berupa inovasi produk/jasa, inovasi proses kerja, inovasi bisnis, dan inovasi pasar.	BSM sangat concern terhadap penciptaan inovasi baru yang berdampak terhadap peningkatan bisnis dengan didaftarkannya.
7	BSM perlu meningkatkan penciptaan inovasi yang bernilai tambah yang tidak hanya secara individual tapi juga di tingkatan perusahaan seperti inovasi yang bersifat *quantum leap*/*breakhtough* untuk perusahaan.	Bank sangat mendukung terciptanya inovasi baik dari individu dengan diselenggarakannya setiap tahun BSM *Innovation*.
8	BSM perlu memperkuat dan mengoptimalkan sistem dan mekanisme pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia perusahaan yang dapat mendukung strategi dan pertumbuhan bisnis perusahaan.	Dewan Komisaris *concern* terhadap pengelolaan *Human Capital* sebagai faktor yang sangat penting Oleh karena itu, Dewan Komisaris meminta kepada Direksi dan SEVP untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran pendidikan dan pelatihan sebesar 5% dari biaya tenaga kerja guna meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Manusia.
9	BSM perlu menjalankan master plan teknologi informasi yang sudah ditetapkan sesuai dengan peta jalan (*roadmap*), serta menjalankan program perbaikan yang dicanangkan dari tingkat maturitas yang ditetapkan sehingga mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan.	Bank telah melakukan pengkinian standar prosedur operasional dan petunjuk teknis terkait teknologi informasi mencakup perencanaan, pengembangan, pengelolaan operasional dan pengamanan Teknologi Informasi.

3. Aspek Hasil Governansi (*Governance Outcome*)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	BSM perlu meningkatkan besaran dividen secara proporsional dan konsisten bagi seluruh Pemegang Saham.	BSM telah meningkatkan kinerja pada tahun 2019 hal tersebut tercermin dari peningkatan laba sehingga berpengaruh kepada pembagian dividen bagi seluruh Pemegang Saham.
2	Dari tren kinerja keuangan BSM selama 5 tahun terakhir didapati mengalami pergerakan yang dinamis, sehingga BSM harus terus meningkatkan pertumbuhan kinerja dengan selalu menjaga prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang terstruktur dan sistematis.	BSM terus melakukan perbaikan dan *improvement* dalam meningkatkan pertumbuhan kinerja dan selalu menjaga prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang terstruktur dan sistematis.
3	BSM perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis yang mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan yang sehat dan berkelanjutan.	BSM dalam mengoptimalkan penyaluran pembiayaan yang efektif telah membentuk aturan proses 3 pilar, unit bisnis, unit operation dan unit risk.
4	BSM harus mengoptimalkan pengelolaan penyaluran pembiayaan yang efektif untuk mengendalikan permbiayaan yang bermasalah (NPF).	BSM dalam mengoptimalkan penyaluran pembiayaan yang efektif telah membentuk aturan proses 3 pilar, unit bisnis, unit operation dan unit risk.
5	BSM perlu meningkatkan budaya kepatuhan di setiap tingkatan organisasi untuk merespon dari masih adanya denda dan teguran yang diterima dari regulator.	BSM telah melakukan sentralisasi pelaporan kepada Regulator agar meminimalisir terjadinya denda dan teguran yang berulang.
6	BSM perlu mendorong dan meningkatkan literasi masyarakat mengenai perbankan syariah agar perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat tumbuh secara signifikan.	BSM melakukan Sosialisasi yakni dengan melaksanakan forum diskusi Skema Pembiayaan Syariah kepada Instansi-instansi pemerintah dan swasta.

mandiri

mandiri
syariah

mandiri syariah

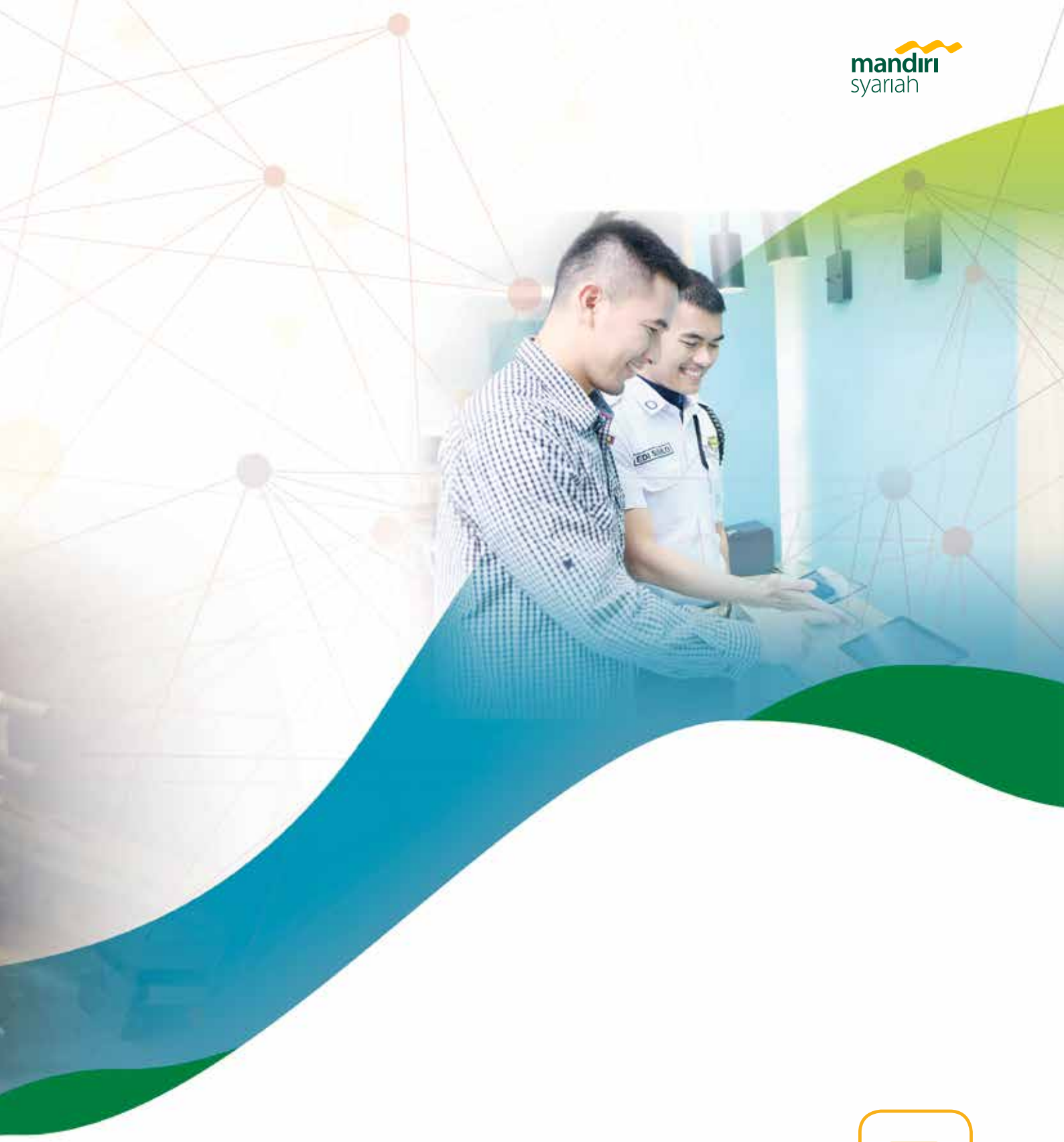

TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN

TATAKELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Mandiri Syariah meyakini bahwa perusahaan bisa tumbuh dan berkembang dengan menjalankan praktek bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, Mandiri Syariah menempatkan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/CSR) dalam kerangka upaya perusahaan untuk mencapai keberlanjutan (*sustainability*) dalam jangka panjang. Arti dari bisnis yang berkelanjutan (*sustainable business*) adalah bahwa perusahaan tidak hanya berupaya untuk memaksimalkan kinerja ekonomi untuk para pemegang saham, tetapi juga secara menyeluruh berusaha untuk memberikan kontribusi yang maksimal dalam aspek sosial dan lingkungan.

KOMITMEN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan komitmen Mandiri Syariah dengan tujuan memberikan nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan guna mendukung pertumbuhan perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut sekaligus memastikan pertumbuhan perusahaan yang berkualitas, Mandiri Syariah merancang dan menerapkan berbagai program inisiatif yang meliputi seluruh aspek operasional dan ditujukan bagi terpenuhinya harapan seluruh pemangku kepentingan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Mandiri Syariah menerapkan kegiatan tanggung jawab sosialnya dengan mengacu pada prinsip Keuangan Berkelanjutan/*Sustainable Finance* (SF), yang merupakan salah satu jalan untuk mencapai *Maqashid Asy Syariah* secara komprehensif. Dari sisi istilah, *Maqashid Asy Syariah* itu sendiri bermakna tujuan-tujuan syariat Islam yang terkandung dalam setiap aturannya. Abu Ishaq asy-Syatibi - penulis kitab *Maqashid Asy Syariah* (wafat tahun 790 H di Granada, Andalusia, Spanyol) merumuskan lima tujuan hukum Islam berdasarkan konsep hirarki kebutuhan dari Imam Al Ghazali, yakni:

1. *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama)
2. *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa)
3. *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal)
4. *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan)
5. *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta)

Terkait hal dimaksud, Mandiri Syariah dapat berperan besar dalam upaya mensinergikan peningkatan pertumbuhan bisnis, sekaligus melaksanakan tanggung jawab lingkungan dan sosial dengan penerapan *Maqashid Asy Syaria* dan model bisnis yang bertentangan dengan MAGHRIB, serta implementasi POJK No. 51/POJK.03/2017.

Mandiri Syariah meyakini bahwa perusahaan, masyarakat, dan lingkungan dapat bersinergi dan berjalan seiring dalam mencapai tujuan yang sama. Oleh karena itu, Mandiri Syariah menempatkan kegiatan sosial (bagian dari *Sustainable Finance*) sebagai strategi inti (*core strategy*) dan menjadikannya sebagai sumber inovasi dan efisiensi untuk meningkatkan keunggulan bersaing (*competitive advantage*) perusahaan.

Visi dan Misi

Mandiri Syariah berkomitmen terhadap tanggung jawab sosial, hal ini terlihat dari adanya penyesuaian terhadap visi misi Mandiri Syariah. Visi dari Mandiri Syariah yaitu Bank Syariah Terdepan dan Modern (*The Leading and Modern Sharia Bank*). Dalam mengelola operasinya, Mandiri Syariah memperhatikan aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) agar visi tersebut dapat terwujud secara sustain. Mandiri Syariah telah mencantumkan unsur LST ke dalam misi Mandiri Syariah dalam konteks berkelanjutan sebagai berikut:

- Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

METODE DAN LINGKUP *DUE DILIGENCE* TERHADAP DAMPAK SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN DARI AKTIVITAS PERUSAHAAN

Sebagai bentuk wujud keberlanjutan bisnis Mandiri Syariah, yang berorientasi pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, Mandiri Syariah terus melaksanakan aktivitas keberlanjutan sebagai tanggung jawab sosial Mandiri Syariah yang memberikan dampak positif dan mengurangi dampak negatif pada setiap kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian Mandiri Syariah telah memiliki *due diligence* dari kegiatan tanggung jawab Bank yang meliputi:

HAK AZASI MANUSIA

KEBIJAKAN DAN PENERAPANNYA

Hak asasi manusia dalam kegiatan perbankan lebih terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja serta hak-hak nasabah. Mandiri Syariah telah memiliki kebijakan untuk memberikan kondisi yang aman dan nyaman

bagi para pegawai serta kebijakan terkait kesempatan kerja bagi penyandang difabel dan masyarakat lokal. Mandiri Syariah senantiasa memperhatikan kesejahteraan pegawai yang diberikan baik secara material maupun non material. Kebijakan-kebijakan tersebut dituangkan dalam:

1. Undang-Undang No. 18 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
2. Perjanjian Kerja Bersama.
3. *Code of Conduct.*

Terkait hak azasi yang terkait dengan hak konsumen (nasabah), Mandiri Syariah memiliki kebijakan untuk memenuhi harapan para nasabah yaitu Kebijakan Jaminan Perlindungan Simpanan Nasabah. Mandiri Syariah tidak hanya menjual produk perbankan yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat namun juga memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen (*product responsibility*).

MEKANISME PEMANTAUAN

Mandiri Syariah telah melakukan survei yang relevan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, Mandiri Syariah melaksanakan survei *engagement* pegawai setiap tahun. Sedangkan terkait dengan kepuasan nasabah, Mandiri Syariah telah melaksanakan survei *Bank Service Excellence Monitor* setiap tahun.

MEKANISME PENANGANAN KELUHAN

Dalam rangka mengatasi adanya dampak negatif atas keputusan dan kegiatan operasional, Mandiri Syariah senantiasa berupaya menangani berbagai macam keluhan. Human Capital Service Mandiri Syariah menyediakan sistem *e-Care* sebagai sarana pengaduan atas keluhan Pegawai. Mandiri Syariah juga telah menyediakan saluran pengaduan bagi nasabah dengan berbagai media dan akan dijelaskan lebih rinci dalam bagian Tanggung Jawab Sosial Terkait Konsumen dalam Laporan Tahunan ini.

OPERASI YANG ADIL

KEBIJAKAN DAN PENERAPANNYA

Mandiri Syariah memiliki kebijakan yang mengatur dilaksanakan operasi yang adil diantaranya kebijakan *Code of Conduct*, dan kebijakan gratifikasi. Penerapan *Code of Conduct* di Mandiri Syariah berupa standar etika yang mengatur perilaku jajaran Bank dalam menjalankan aktivitas bisnis. Penerapan operasi yang adil dalam operasional Mandiri Syariah akan dijelaskan lebih rinci dalam bagian Tanggung Jawab Sosial Terkait Operasi yang adil.

MEKANISME PEMANTAUAN

Dalam pemantauan atas penerapan operasi yang adil, Mandiri Syariah melakukan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan GCG. Mandiri Syariah juga melakukan *self assessment* yang dilakukan pada semester I dan II di 2019. Selain itu, Mandiri Syariah juga melakukan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan GCG dengan melakukan *Assessment* yang dinilai oleh CGPI yaitu The Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG).

MEKANISME PENANGANAN KELUHAN

Mandiri Syariah telah menyediakan media pelaporan atas perbuatan atau indikasi *fraud* dan/atau *non fraud* yang dapat merugikan nasabah maupun Mandiri Syariah yaitu dapat melalui SMS, *Whatsapp*, BBM, Surat, telepon, *Email* ke pengaduan@bsm.co.id atau datang langsung ke Internal Audit Group untuk melaporkan adanya indikasi penyimpangan atau *fraud*.

LINGKUNGAN HIDUP

KEBIJAKAN DAN PENERAPANNYA

Mandiri Syariah telah memiliki beberapa kebijakan terkait dengan aspek lingkungan hidup, diantaranya Kebijakan Pembiayaan tanggal 2 April 2007, yang berisi antara lain: Ketentuan tentang kewajiban pengelolaan lingkungan untuk nasabah pembiayaan. Mandiri Syariah telah menerapkan pemberian pembiayaan/kredit kepada nasabah dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup. Sedangkan kebijakan Mandiri Syariah terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup berdasarkan pada prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan material dan energi. Dalam menunjang operasional bank, Mandiri Syariah menggunakan material ramah lingkungan. Terkait dengan energi, Mandiri Syariah menggunakan kendaraan LCGC (*low cost green car*) dengan bahan bakar yang disediakan oleh pemerintah.

MEKANISME PEMANTAUAN

Komitmen Mandiri Syariah dalam menjalankan kegiatan operasional yang ramah lingkungan diwujudkan melalui kantor hijau (*green office*). Mandiri Syariah melakukan uji kelayakan pada seluruh kendaraan operasional untuk mengoptimalkan kinerja mesin agar makin efisien dalam memakai energi dan mengeluarkan emisi yang memenuhi standar baku mutu. Selain itu, Mandiri Syariah melakukan pengecekan air limbah, uji emisi, uji kebisingan dan sebagainya.

MEKANISME PENANGANAN KELUHAN

Sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, baik dalam pengembangan produk/jasa keuangan maupun dalam pelestarian lingkungan hidup, Mandiri Syariah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan saran atau keluhan ke Divisi *Corporate Secretary Group* pada alamat email csg@bsm.co.id.

KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA

KEBIJAKAN DAN PENERAPANNYA

Mandiri Syariah senantiasa patuh pada peraturan dan regulasi yang berlaku di bidang ketenagakerjaan sebagai wujud kesadarannya bahwa keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pegawai sangat penting bagi terciptanya produktivitas kerja yang optimal. Dalam mengelola Sumber Daya Manusia (SDM), Mandiri Syariah mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan Mandiri Syariah yang selalu diperbarui sesuai ketentuan perundang-undangan. Kesejahteraan Pegawai senantiasa diperhatikan agar tercipta produktivitas kerja yang optimal. Program peningkatan kesejahteraan pegawai diberikan baik secara material maupun non-material. Mandiri Syariah memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada semua orang dalam proses perekrutan pegawai tanpa membedakan jenis kelamin, etnis, ras, status sosial, warna kulit, *gender*, ataupun kondisi fisik lainnya.

MEKANISME PEMANTAUAN

Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan, setiap tahunnya Mandiri Syariah melakukan survei keterlibatan pegawai yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independent. Dengan meningkatnya hasil survei kepuasan pegawai diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan memotivasi pegawai sehingga akan berpengaruh pada angka produktifitas pegawai.

MEKANISME PENANGANAN KELUHAN

Mandiri Syariah menyusun suatu mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan yang berkaitan dengan hubungan kerja. Human Capital Service Mandiri Syariah memiliki sistem *e-Care* yang dapat menampung semua keluh kesah Pegawai. Selain itu, dapat pula mengirimkan saran dan kritik kepada Divisi Corporate Secretary Group pada alamat emai csg@bsm.co.id.

KONSUMEN

KEBIJAKAN DAN PENERAPANNYA

Tanggung jawab sosial Mandiri Syariah terhadap konsumen mengacu pada Kebijakan Jaminan Perlindungan Simpanan Nasabah. Bentuk jaminan perlindungan simpanan nasabah yang telah dilakukan oleh Bank adalah dengan mendaftarkan sebagai peserta Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dan pembentukan cadangan kerugian pembiayaan aktiva produktif.

MEKANISME PEMANTAUAN

Untuk mengetahui sudah sejauh mana tingkat kepuasan pelanggan, Mandiri Syariah melakukan survei *Bank Service Excellence Monitor* yang diadakan oleh pihak eksternal yakni *Marketing Research Indonesia* (MRI).

MEKANISME PENANGANAN KELUHAN

Mandiri Syariah memiliki aplikasi bernama *Complaint Handling Management System* (CHMS) yang berguna untuk pencatatan pengaduan nasabah. Selain itu, nasabah dapat juga menyampaikan pengaduannya melalui Mandiri Syariah Call atau dapat langsung mendatangi Kantor Cabang Mandiri Syariah di seluruh Indonesia.

PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

KEBIJAKAN DAN PENERAPANNYA

Pelaksanaan program CSR berupa pengembangan sosial kemasyarakatan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) Mandiri Syariah dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Bangun Sejahtera Mitra (BSM) No. 21/560-PKS/DIR; 18/002/PKS/YBSMU . Terkait penyaluran Zakat mengacu kepada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Mandiri Syariah dengan Laznas BSM dan Yayasan Rumah Zakat Indonesia (Rumah Zakat) No. 21/766-PKS/DIR; 18/004/PKS/YBSMU; 324/SPJ-LEGAL/RZ/XI/2019. Sedangkan, Penyaluran Dana Sosial/TBDSP mengacu kepada Fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah. Berdasarkan kebijakan tersebut, Mandiri Syariah melakukan tanggungjawab sosial kemasyarakatannya untuk mewujudkan maqasid Syariah dan SDG's. Untuk mewujudkannya, Laznas BSM Umat membuat program-program terintegrasi dan berkelanjutan yang berbasis pada Masjid, Desa dan Pesantren (MDP). Program terintegrasi meliputi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan dakwah.

MEKANISME PEMANTAUAN

Mandiri Syariah setiap tahunnya melaksanaan Tanggungjawab sosial terkait kemasyarakatan. Pelaksanaan program tersebut dituangkan dalam laporan PKBL Mandiri Syariah. Di dalam Laporan PKBL terdapat penyusunan dan penyajian program PKBL dan juga cara pengelolaan dana kegiatan PKBL.

MEKANISME PENANGANAN KELUHAN

Dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial terkait pengembangan sosial kemasyarakatan, Mandiri Syariah senantiasa menyelaraskan kehadiran dan kegiatan usahanya di tengah masyarakat. Namun apabila terdapat kendala atau keluhan dalam kegiatan kemasyarakatan, dapat mengirimkan email ke divisi Corporate Secretary Group pada alamat email csg@bsm.co.id.

STAKEHOLDER PENTING YANG TERDAMPAK ATAU BERPENGARUH PADA DAMPAK DARI KEGIATAN PERUSAHAAN

Mandiri Syariah menyadari keberhasilan usaha dalam jangka panjang sangat erat kaitannya dengan kemampuan

perusahaan dalam berinteraksi dan menyelenggarakan hubungan positif yang memberi mutual *benefit* dengan para pemangku kepentingan. Interaksi positif dimaksud adalah dipahami dan dipenuhinya harapan pemangku kepentingan melalui pengelolaan seluruh sumber daya secara optimal dan efisien.

Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau terpengaruh oleh aktivitas dan layanan jasa perbankan serta kinerja Bank. Sesuai dengan sifat pengaruh dan dominasi pengaruh tersebut serta dampaknya terhadap aktivitas dan kinerja Bank, Mandiri Syariah kemudian menyusun kerangka hubungan dan pelibatan terbatas para pemangku kepentingan dalam kegiatan pengelolaan Mandiri Syariah. Berdasarkan kepentingan timbal balik dengan para pemangku kepentingan tersebut, Mandiri Syariah menetapkan empat jenis kegiatan pelibatan terbatas, yakni: pemberdayaan, kerjasama, konsultasi dan komunikasi. Adapun pemangku kepentingan yang signifikan terkait dengan kegiatan, strategi dan program kerja Mandiri Syariah yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan pelibatan stakeholder adalah sebagai berikut:

Pemangku Kepentingan	Basis Identifikasi	Topik Utama
Pemegang Saham dan Investor	Tanggung jawab, Pengaruh	1. Mempertahankan dan meningkatkan nilai usaha sesuai harapan pemegang saham. 2. Menghormati hak-hak dan tanggung jawab pemegang saham sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
Nasabah	Ketergantungan	1. Memberikan layanan dengan kualitas yang melebihi harapan pelanggan dan meningkatkan nilai bagi pelanggan. 2. Kerahasiaan Data. 3. Memperluas jaringan dan jenis layanan.
Pegawai	Ketergantungan	1. Kesetaraan dan perlakuan yang adil. 2. Tidak berlaku diskriminasi. 3. Menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. 4. Memberikan hak-hak sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah dan Pembuat Kebijakan	Pengaruh	1. Menjaga hubungan yang harmonis dengan regulator. 2. Seluruh insan Mandiri Syariah tunduk dan mematuhi hukum, perundangan, dan peraturan bisnis yang berlaku. 3. Mandiri Syariah melaporkan secara rutin kepada Pemerintah sebagai regulator.
Mitra Kerja	Ketergantungan	1. Mekanisme pengadaan secara adil dan transparan. 2. Sistem seleksi dan evaluasi secara obyektif dalam pemilihan mitra. 3. Tidak ada pungutan biaya apapun dalam proses pengadaan.
Industri Sejenis (Bank Syariah Lainnya)	Pengaruh	1. Terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat. 2. Kerjasama di antara sesama industri keuangan syariah. 3. Pertemuan rutin di antara sesama pelaku bisnis.
Masyarakat	Pengaruh, Tanggung Jawab	1. Menjalin hubungan yang serasi dan harmonis dengan masyarakat sekitar wilayah operasi. 2. Pemberdayaan potensi masyarakat dengan memberi *sustainable value*.
Lingkungan	Tanggung Jawab	1. Berperan aktif dalam mengurangi dampak operasional perusahaan terhadap kerusakan lingkungan. 2. Berperan aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan.

ISU-ISU PENTING SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN TERKAIT DAMPAK KEGIATAN PERUSAHAAN

Dalam menentukan isu sosial, ekonomi dan lingkungan penting yang berpengaruh signifikan bagi Mandiri Syariah, LAZNAS BSM dan Pemangku Kepentingan lainnya dilakukan forum diskusi.

Proses penentuan isu-isu penting yang menjadi perhatian Pemangku Kepentingan dilakukan sesuai dengan prinsip *stakeholders inclusiveness* (keterlibatan Pemangku Kepentingan) dengan melibatkan pegawai Mandiri Syariah melalui forum diskusi dan penyebaran kuesioner. Dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dengan mekanisme *bottom up* dan melakukan kemitraan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lain, sehingga program dapat terealisasi dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal. Berikut isu ekonomi dan sosial Mandiri Syariah, seperti disajikan:

1. Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan diatribusikan Perusahaan (pendapatan, biaya operasional, upah, tunjangan pegawai, dan sebagainya);
2. Kenyamanan bekerja dan pemenuhan hak-hak pegawai (rekrutmen, *turnover*, tunjangan, kesehatan dan keselamatan kerja, pelatihan dan pendidikan, kesetaraan peluang, kesamaan remunerasi pria dan wanita, tidak ada diskriminasi, ada

kebebasan berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama);
3. Antikorupsi dan tindakan yang diambil jika ada korupsi;
4. Informasi produk, tanggung jawab kualitas produk, perlindungan konsumen, pengaduan konsumen, dan survei kepuasan konsumen;
5. Keterlibatan masyarakat dalam proses usaha, dampak usaha terhadap masyarakat, program pemberdayaan masyarakat;
6. Dampak ekonomi tidak langsung yang dirasakan oleh masyarakat (CSR, PKBL, pembangunan infrastruktur, perbandingan pembelian dari pemasok lokal dibanding pemasok nasional/internasional, dan sebagainya);
7. Kepatuhan terhadap regulasi terutama UU Lingkungan, serta pengaduan jika ada masalah lingkungan;
8. Limbah air dan pengelolaannya, termasuk limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
9. Emisi gas rumah kaca, emisi udara, perusak ozon, dan upaya penanggulangannya; dan
10. Asesmen pemasok atas kerja paksa, melibatkan pekerja anak, dan ketidakpedulian lingkungan.

LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BAIK YANG MERUPAKAN KEWAJIBAN MAUPUN YANG MELEBIHI KEWAJIBAN

Dalam menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan, Mandiri Syariah mengacu pada ISO 26000. Lingkup tanggung jawab sosial Mandiri Syariah adalah meliputi:
1. Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial
2. Hak Azasi Manusia
3. Ketenagakerjaan
4. Lingkungan Hidup
5. Operasi Yang Adil
6. Pemenuhan Kepentingan Pelanggan

Dalam menerapkan tanggung jawab sosialnya, Mandiri Syariah telah menjalankan seluruh kewajibannya berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, antara lain:

Kegiatan	Dasar Regulasi
Hak Azasi Manusia	1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 2. Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
Operasi Yang Adil	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Lingkungan Hidup	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
Ketenagakerjaan	1. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2. Undang-Undang No. 18 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan	Undang-Undang No. 38 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Perlindungan Nasabah	Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)

STRATEGI DAN PROGRAM KERJA

Strategi dan program kerja tanggungjawab sosial untuk tiap-tiap *core subject* tanggung jawab sosial disampaikan sebagai berikut:

Core Subject	Strategi	Program Kerja
Hak Azasi Manusia	Menekankan pada pemenuhan hak azasi manusia terkait ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja serta kepuasan nasabah.	1. Penanganan keluhan Pegawai melalui sistem *e-care*. 2. Pelatihan dan pengembangan kompetensi Pegawai. 3. Penanganan keluhan nasabah. 4. Program-program lainnya yang relevan.
Operasi Yang Adil	Menekankan tidak terdapatnya konflik kepentingan dalam setiap keputusan bisnis, melakukan persaingan bisnis yang sehat dan penerapan WBS dan *Code of Conduct* secara efektif.	1. Penandatanganan pernyataan tahunan terkait kepatuhan kode etik pegawai oleh seluruh pegawai. 2. Sosialisasi berbagai pedoman pedoman GCG seperti Kebijakan Gratifikasi, WBS, dan *Code of Conduct* 3. Pengelolaan Gratifikasi, WBS, dan *Code of Conduct*. 4. Penyempurnaan Petunjuk Teknis Operasional Pengendalian Gratifikasi. 5. Penandatangan Pakta Integritas oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai. 6. Audit pengadaan barang dan jasa. 7. *Vendor Meeting* dan *Vendor Gathering*. 8. Survei Kepuasan *Vendor*. 9. Program-program lainnya yang relevan.

Core Subject	Strategi	Program Kerja
Lingkungan Hidup	Menekankan pada penerapan keuangan berkelanjutan serta penghematan penggunaan energi dan air.	1. Pemberian kredit Green Banking. 2. Penerapan kegiatan dengan prinsip 3R (reuse, reduce, and recycle). 3. Program-program lainnya yang relevan.
Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja	Menekankan pada strategi pemenuhan hak-hak pegawai, seperti kesetaraan *gender* dan kesempatan kerja, memberikan fasilitas kesehatan yang memadai.	1. Program kesejahteraan yang bersifat material yang berkaitan langsung dengan prestasi Pegawai. 2. Program kesejahteraan pegawai yang bersifat non material berupa pemberian fasilitas dan pelayanan kepada seluruh pegawai Mandiri Syariah tanpa melakukan diskriminasi. 3. Program pengangkatan pegawai berdasarkan hasil seleksi dan hasil evaluasi. 4. Program pelatihan dan pendidikan. 5. Evaluasi terhadap lingkungan kerja, khususnya mengenai kelengkapan dan kelayakan sarana dan lingkungan kerja, serta kelengkapan dan kelayakan sarana pengamanan. 6. Program pelatihan pensiun. 7. Survei Engagement Pegawai. 8. Memfasilitasi tunjangan kesehatan melalui fasilitas BPJS. 9. Program-program lainnya yang relevan.
Konsumen	Menekankan pada strategi kepuasan nasabah dan melindungi kerahasiaan data nasabah	1. Penanganan pengaduan nasabah. 2. Program peningkatan layanan konsumen. 3. Menjaga kerahasiaan data nasabah. 4. Menyelenggarakan survei kepuasan nasabah. 5. Program-program lainnya yang relevan.
Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan	Menekankan pada strategi tanggung jawab sosial dan bina lingkungan serta kegiatan edukasi dan kewirausahaan	1. Program Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) antara lain program *Green Financing*, program *Green Funding,* program *Green Campaign And Efficiency,* dan Program BSM *Integrated Social Actions (*BISA). 2. Program *Finacial Inclusion.* 3. Kegiatan Sosial Bersama Laznas BSM antara lain dan pengelolaan dana CSR, pengelolaan dana Zakat. 4. Program Mandiri Syariah Mengalirkan Berkah. 5. Program-program lainnya yang relevan.

PROGRAM YANG MELEBIHI TANGGUNG JAWAB MINIMAL PERUSAHAAN

Berdasarkan program-program kerja yang telah dijelaskan, beberapa program kerja yang melebihi tanggung jawab minimal di antaranya adalah:

- Penanganan keluhan Pegawai melalui sistem *e-care.*
- Program Mandiri Syariah Mengalirkan Berkah.
- Program Pembuatan Mobil Musholla BSM.
- Program bantuan perbaikan fisik masjid/musholla dan sarana pendukung.
- Kriya BSM.
- Program-program lainnya.

PEMBIAYAAN DAN ANGGARAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Pembiayaan dan anggaran tanggung jawab sosial melekat di setiap kegiatan-kegiatan operasional perusahaan yang relevan, seperti biaya ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, biaya umum, biaya pelayanan nasabah dan lainnya. Pada tahun 2019 Mandiri Syariah menyalurkan zakat melalui lembaga zakat BSM sebesar Rp36,850 miliar. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Rp27,751 miliar. Sedangkan Laznas BSM Umat pada tahun 2019 telah menyalurkan zakat kepada mustahik sebesar Rp22.61 miliar (belum termasuk Hak Amil). Untuk pembiayaan tanggung jawab sosial di Mandiri Syariah melekat pada tiap-tiap kegiatan operasional yang terkait.

Disamping itu, Mandiri Syariah juga menganggarkan biaya ketenagakerjaan untuk pengembangan kompetensi pegawai. Realisasi Biaya Pendidikan dan Pelatihan 2019 adalah sebesar Rp78.940 miliar, dan mengalami kenaikan sebesar 49,19% dibanding 2018. Indikator kenaikan didukung dengan angka jumlah partisipasi pelatihan sebanyak 13.816 pegawai atau rata-rata setiap pegawai mendapatkan pelatihan sebanyak 1,62 kali dengan biaya investasi pembelajaran selama 2019 mencapai Rp9,23 juta per pegawai.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN HAK ASASI MANUSIA

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG HAK ASASI MANUSIA

Mandiri Syariah memiliki komitmen penuh terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Ruang lingkup tanggung jawab sosial terkait HAM meliputi pencegahan tindakan diskriminasi, pengaturan waktu kerja, izin karena kondisi darurat, dan kesempatan untuk menjalankan ibadah. Mandiri Syariah juga telah memiliki fasilitas ruang laktasi dan sarana penanganan keluh kesah pegawai. Kebijakan tersebut tertuang dalam Standar Prosedur Operasional *Human Capital* antara Mandiri Syariah dengan Pegawainya.

LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG HAK ASASI MANUSIA

Lingkup tanggung jawab sosial Perusahaan terkait dengan Hak Asasi Manusia, yakni berkaitan dengan ketenagakerjaan meliputi hak terkait pemberian waktu kerja, cuti Pegawai, izin dalam menjalankan ibadah, izin dalam melahirkan/keguguran atau sakit serta izin untuk Laktasi pada waktu jam kerja.

PERENCANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG HAK ASASI MANUSIA

Mandiri Syariah menargetkan untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip hak azasi manusia dengan baik. Dengan demikian, akan terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif. Dengan demikian akan terciptaya lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif.

PELAKSANAAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG HAK AZASI MANUSIA

Mandiri Syariah berkomitmen penuh dalam melaksanakan tanggung jawab sosial terkait hak asasi manusia. Adapun kegiatan-kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait dengan HAM meliputi:

WAKTU KERJA

Dalam hal menjalankan kegiatan operasionalnya, Mandiri Syariah telah menetapkan hari kerja serta jam kerja pegawai. Penetapan hari kerja dan jam kerja mengacu kepada ketentuan ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai berikut:

- Jadwal kerja dengan sistem shift ditetapkan secara khusus di Unit Kerja tertentu (misalnya petugas *Data Center, Helpdesk, Call Center*, Petugas Satuan Pengamanan) guna mendukung kelangsungan operasional Bank dengan mengacu atas dasar bekerja selama 8 (delapan) jam dengan waktu istirahat selama 1 (satu) jam di tiap *shift*.
- Kelebihan waktu kerja (setelah jam kesembilan) dan bekerja dihari libur diperhitungkan sebagai melaksanakan pekerjaan diluar jam kerja normal (kerja lembur).

CUTI PEGAWAI

Mandiri Syariah memberikan cuti Pegawai dengan syarat sebagai berikut:

- Cuti tahunan diberikan secara proporsional di tahun berjalan kepada pegawai terhitung mulai tanggal pegawai bekerja sesuai tercantum pada perjanjian kerja.
- Cuti tahunan diberikan kepada Pegawai yang telah menjalani masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pegawai bekerja sesuai tercantum pada perjanjian kerja.
- Pada saat pegawai mengambil hak cuti tahunan yang pertama, maka hak cuti tahunan di tahun takwim berjalan juga muncul secara proporsional.
- Permohonan cuti tahunan disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan cuti sesuai mekanisme yang telah ditentukan Unit Kerja Human Capital melalui sistem aplikasi pegawai.

IJIN MENJALANKAN IBADAH

Mandiri Syariah senantiasa memberikan ijin kepada Pegawai untuk menjalankan ibadah yang ketentuan pelaksanaannya diatur oleh Mandiri Syariah. Dalam hal ini, Pegawai Mandiri Syariah dapat memperoleh ijin untuk menjalankan ibadah umrah/haji, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mandiri Syariah memberikan izin untuk menjalankan ibadah umrah sebanyak 1 (satu) kali selama menjadi Pegawai Bank.
- Lamanya izin ibadah umrah adalah maksimal 9 (sembilan) hari kalender.
- Pegawai wajib mengajukan permohonan izin meninggalkan perkerjaan untuk menjalankan ibadah umrah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal keberangkatan umrah dengan melampirkan bukti-bukti tertulis atas rencana ibadah umrah.
- Pegawai yang melaksanakan ibadah umrah yang ke 2 (dua) dan seterusnya, dapat menggunakan cuti tahunan atau mengajukan Izin Meninggalkan Pekerjaan Tanpa Upah (cuti diluar tanggungan).
- Bagi pegawai yang melaksanakan beribadah haji, hanya memperoleh izin sebanyak 1 (satu) kali selama menjadi Pegawai Bank.

- Lamanya izin ibadah Haji maksimal 45 (empat puluh lima) hari kalender. Hal tersebut juga tergantung dari rombongan yang diikuti Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Khusus atau biasa.

IZIN MELAHIRKAN/KEGUGURAN DAN SAKIT KARENA HAID

Mandiri Syariah memperbolehkan Pegawai untuk ijin yang disebabkan oleh sakit maupun kehamilan/keguguran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pegawai yang tidak dapat bekerja karena sakit dapat diberikan keringanan tidak masuk kerja dengan ketentuan: Pegawai dan/atau Keluarga Pegawai tersebut harus memberitahu ketidakhadiran Pegawai minimal secara lisan pada hari tidak masuk kerja kepada atasan Pegawai langsung atau kepada pejabat yang berwenang.
- Pegawai perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid dengan cara memberitahukannya secara lisan/tertulis kepada atasan langsung atau pejabat yang berwenang memberikan izin istirahat. Mandiri Syariah dapat meminta dilakukan pemeriksaan medis kepada pegawai wanita yang menggunakan izin sakit haid untuk memastikan kesehatannya.
- Mandiri Syariah juga memberikan istirahat melahirkan/keguguran kandungan diberikan bagi Pegawai wanita yang telah menikah dengan sah dan sesuai status sipil di *database* HRIS.
- Istirahat melahirkan diberikan selam 3 (tiga) bulan kalender yang pelaksanaannya dianjurkan sebaiknya diambil 1,5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudahnya atau sesuai dengan hari perkiraan lahir dari dokter atau bidan.
- Untuk istirahat keguguran diberikan maksimal selama 1,5 bulan kalender sejak peristiwa keguguran dengan rekomendasi dari dokter atau bidan.

IZIN LAKTASI/MENGELUARKAN AIR SUSU IBU (ASI)

Pegawai yang masih menyusui anaknya, diberi kesempatan sebanyak 4 (empat) kali sehari untuk melakukan laktasi pada waktu jam kerja. Waktu yang diberikan ±30 (tiga puluh) menit per laktasi.

CAPAIAN DAN PENGHARGAAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG HAK AZASI MANUSIA

Capaian dari pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial terkait HAM lebih ditekankan pada isu ketenagakerjaan yakni diperolehnya peningkatan tingkat *engagement* pegawai Mandiri Syariah . Adapun untuk tingkat *engagement* pegawai, pada tahun 2018 memperoleh skor 75,40% meningkat dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebesar 74,30%. Mandiri Syariah telah memperoleh penghargaan sebagai *Highly Engaged Organization* dalam acara Indonesia Employee Engagement Index 2017, yang diselenggarakan oleh Harian Bisnis Indonesia dan Lembaga Kinerja Leadership & Performance.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN OPERASI YANG ADIL

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG OPERASI YANG ADIL

Mandiri Syariah senantiasa melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, dengan diwujudkan dalam menjalankan praktik-praktik operasi yang adil. Mandiri Syariah telah memiliki kebijakan yang mengatur dilaksanakan operasi yang adil yang dituangkan dalam *Code of Conduct*. Yang meliputi kebijakan gratifikasi, pencegahan perilaku *insider*, kebijakan untuk pencegahan benturan kepentingan dan pelaksanaan kegiatan usaha yang sehat.

RUMUSAN PERUSAHAAN LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG OPERASI YANG ADIL

Lingkup kegiatan operasi yang adil antara lain meliputi larangan benturan kepentingan (*Conflict of Interest*), larangan *risywah* (suap), larangan perilaku *insider*, integritas system perbankan dan pencegahan korupsi.

PERENCANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG OPERASI YANG ADIL

Mandiri Syariah senantiasa menargetkan dalam perencanaan tahunannya untuk menjamin terlaksananya semua kebijakan praktik operasi yang adil. Dengan demikian, setiap adanya pelanggaran yang terjadi atas ketidakpatuhan, akan dikenakan sanksi sesuai kebijakan Mandiri Syariah dan peraturan yang berlaku.

PELAKSANAAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG OPERASI YANG ADIL

PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*)

Merupakan kondisi anggota Jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain yang memungkinkan anggota Jajaran Bank tersebut kehilangan obyektivitasnya, dengan ruang lingkup bahwa Jajaran Bank:

a. Wajib menghindarkan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
b. Bertindak terhormat dan bertanggung jawab serta bebas dari pengaruh yang memungkinkan hilangnya obyektivitas dalam pelaksanaan tugas atau mengakibatkan Bank kehilangan bisnis dan/atau reputasi.
c. Dilarang menyalahgunakan *corporate identity* Bank. *Corporate identity* hanya dapat digunakan untuk kepentingan Bank dan dengan seizin Bank.

LARANGAN *RISYWAH* (SUAP)

Jajaran Bank harus dapat mengambil langkah tegas untuk tidak memberikan/menerima *risywah* kepada/dari nasabah/calon nasabah, rekanan.

LARANGAN PERILAKU *INSIDERS*

Jajaran Bank yang memiliki informasi rahasia dilarang memanfaatkan informasi dimaksud untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank.

INTEGRITAS SISTEM PERBANKAN

Jajaran Bank harus berupaya untuk tidak terlibat dalam halhal yang dapat melemahkan atau menurunkan integritas sistem perbankan di Indonesia, memastikan bahwa dirinya tidak diperalat untuk kegiatan kriminal dan/atau kegiatan tidak legal lainnya, dan menghindarkan keterlibatan Bank serta Individu dalam kegiatan pencucian uang, narkoba, atau terorisme.

PENCEGAHAN KORUPSI

Mandiri Syariah menyadari bahwa proses pengelolaan bisnis perbankan melibatkan sejumlah transaksi keuangan dengan jumlah dana yang besar dan data yang sangat banyak. Untuk mencegah terjadinya tindakan *fraud* dan korupsi dari transaksi tersebut, Mandiri Syariah telah mengembangkan sistem transaksi dan pengelolaan keuangan yang mampu mencegah dan mendeteksi setiap penyimpangan keuangan.

CAPAIAN DAN PENGHARGAAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG OPERASI YANG ADIL

Dengan diterapkannya kegiatan tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil di Mandiri Syariah, maka kegiatan usaha Bank dapat berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan pencapaian sesuai yang diharapkan oleh para Pemangku Kepentingan. Selama tahun 2019, Mandiri Syariah telah mampu meningkatkan pendapatan usaha sebesar 13,36% dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, pada tahun 2019 Mandiri Syariah berhasil mendapatkan penghargaan Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI) yang diberikan oleh Majalah SWA dan The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dalam ajang Good Corporate Governance Award 2019.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Mandiri Syariah memiliki komitmen tinggi terhadap pelaksanaan CSR terkait lingkungan hidup, meskipun bisnis inti bergerak dalam bidang perbankan yang tidak memiliki dampak secara langsung kepada kelestarian lingkungan. Komitmen tersebut dituangkan dalam:

1. SE No. 8/001/PEM tanggal 2 Januari 2006 perihal Revisi Pedoman Pembiayaan.
2. Buku Kebijakan Pembiayaan tanggal 2 April 2007, berisi antara lain: Ketentuan tentang kewajiban pengelolaan lingkungan untuk nasabah pembiayaan diatur dalam:
   a. Bab II artikel 210 butir E Kebijakan Pembiayaan, "Bank harus menghindari pembiayaan untuk bidang usaha yang tidak/belum memenuhi ketentuan *environment*/AMDAL sehingga membahayakan lingkungan".
   b. Bab VI butir A tentang Kualitas Aktiva Produktif. Penilaian kualitas aktiva pembiayaan untuk pilar prospek usaha nasabah pembiayaan dikaitkan dengan upaya nasabah dalam pemeliharaan lingkungan hidup.
   c. Bab XI butir D Proses Pemberian Pembiayaan sub bab Analisa Pembiayaan Produktif. Dalam penilaian aspek teknis/produksi Bank dipersyaratkan untuk melakukan analisa mengenai dampak lingkungan, meliputi: Tingkat pencemaran dalam proses produksi.
      - Sarana untuk menghindari polusi/ pengolahan limbah telah sesuai dengan ketentuan atau belum.
      - Komplain dari penghuni di lingkungan tempat usaha/pabrik.
      - Harus memperhatikan peraturan/ ketentuan pemerintah yang berlaku yaitu apakah pemohon/ nasabah telah memiliki izin AMDAL dari instansi yang berwenang.
3. Surat Edaran (SE) No. 9/029-PEM tanggal 26 juli 2007 berjudul Revisi Pedomaan Kebijakan Bab VI. Tentang Kualitas Aktiva Produktif. Sub Bab A.3.b.3). Penilaian prospek usaha nasabah pembiayaan khususnya untuk komponen yang terkait dengan upaya nasabah dalam pemeliharaan lingkungan hidup.

DAMPAK DAN RISIKO LINGKUNGAN

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, risiko utama yang dihadapi oleh Mandiri Syariah adalah jika kredit disalurkan kepada institusi yang memiliki permasalahan di bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu Mandiri Syariah dalam penyaluran kreditnya telah memiliki kebijakan *Green Banking* yang telah diatur dalam kebijakan internal Mandiri Syariah.

TARGET/RENCANA KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Mandiri Syariah menyadari bahwa kelangsungan entitas bisnis juga dipengaruhi oleh keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. Upaya untuk memberikan kontribusi terhadap kelangsungan keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup terus dilakukan. Hal ini sebagai bentuk komitmen Mandiri Syariah dalam ikut serta menjaga keharmonisan alam semesta.

PELAKSANAAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

Mandiri Syariah telah mewujudkan dukungan terhadap pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup tercermin dalam setiap kegiatan Perseroan baik itu operasional di Kantor Pusat maupun kegiatan bisnisnya, antara lain sebagai berikut.

GREEN BANKING

PROSES PEMBERIAN KREDIT

Sebagaimana tertuang dalam kebijakan CSR, bahwa BSM telah menerapkan pemberian pembiayaan/kredit kepada nasabah dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup. Dalam kebijakan tersebut pada Bab XI butir D tentang Proses Pemberian Pembiayaan terkait Analisa Pembiayaan Produktif, dalam penilaian aspek teknis/produksi Bank melakukan analisis mengenai dampak lingkungan, meliputi:

1. Tingkat pencemaran dalam proses produksi.
2. Sarana untuk menghindari polusi/pengolahan limbah telah sesuai dengan ketentuan atau belum.
3. Komplain dari penghuni di lingkungan tempat usaha/ pabrik.
4. Harus memperhatikan peraturan/ketentuan pemerintah yang berlaku yaitu apakah pemohon/ nasabah telah memiliki izin AMDAL dari instansi yang berwenang.

KEGIATAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT DENGAN KEGIATAN OPERASIONAL PERSEROAN

PENERAPAN KEGIATAN PRINSIP 3R (*REUSE, REDUCE AND RECYCLE*)

Mandiri Syariah mempunyai kebijakan berdasarkan pada prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan material dan energi. Dalam menunjang operasional bank, Mandiri Syariah menggunakan material ramah lingkungan seperti kertas, tinta dan lain-lain. Terkait dengan energi, Mandiri Syariah menggunakan kendaraan LCGC (*low cost green car*) dengan bahan bakar yang disediakan oleh pemerintah. Mandiri Syariah memandang daur ulang material adalah salah satu strategi pengelolaan sampah padat sesuai prinsip 3R (*Reuse, Reduce, and Recycle*). Prinsip ini memastikan bahwa erjadi pemanfaatan sisa material dalam bentuk barang baru yang memiliki manfaat. Sebagai contoh Mandiri Syariah memanfaatkan kembali kertas bekas yang tidak terpakai untuk mencetak dokumen-dokumen internal Mandiri Syariah. Di samping hal tersebut, manajemen telah menerapkan penggunaan kertas daur ulang atau kertas ramah lingkungan.

Penghematan yang dilakukan antara lain dengan mengembangkan administrasi nir-kertas (*paperless administration*) dan *digital banking* dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti email dan berbagai aplikasi terkini. Penghematan juga dilakukan dengan tidak mencetak dokumen yang tidak terlalu penting, mengecek ulang sebelum dokumen dicetak sehingga terhindar dari kesalahaan, mencetak dengan bolak-balik, atau memanfaatkan kembali kertas yang sudah dipakai sedangkan halaman sebaliknya masih kosong untuk keperluan administrasi internal.

CAPAIAN DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Pada tahun 2018, Mandiri Syariah telah melakukan penghematan pada pemakaian listik dan air, hal ini disebabkan adanya penurunan biaya listrik, telepon, air dan gas dari sebesar Rp71,39 miliar di tahun 2017 menjadi Rp70,01 miliar di tahun 2018. Selain itu, terjadi pula penghematan pada pengeluaran perusahaan di wilayah kantor operasional, terlihat dari penurunan beban kantor dari Rp23,08 miliar di tahun 2017 menjadi Rp20,21 miliar di tahun 2018.

SERTIFIKASI DI BIDANG LINGKUNGAN

Mandiri Syariah menjalankan bisnis/usaha perbankan yang tidak berkaitan langsung dalam memanfaatkan/ menggunakan sumber daya alam dan sumber energi. Oleh karena itu, Mandiri Syariah tidak memiliki sertifikasi dalam bidang lingkungan hidup.

SALURAN PENGADUAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

Sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, baik dalam pengembangan produk/jasa keuangan maupun dalam pelestarian lingkungan hidup, Mandiri Syariah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan saran atau keluhan ke Divisi *Corporate Secretary Group* pada alamat emai csg@bsm.co.id .

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Mandiri Syariah senantiasa patuh pada peraturan dan regulasi yang berlaku di bidang ketenagakerjaan sebagai wujud kesadarannya bahwa keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pegawai sangat penting bagi terciptanya produktivitas kerja yang optimal. Oleh karena itu, Bank berkomitmen tinggi untuk memberikan perhatian dan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja seluruh pegawai tanpa adanya diskriminasi.

Menyadari bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pegawai merupakan hal utama yang perlu diperhatikan agar profesionalisme kerja dapat terlaksana, maka dalam mengelola Sumber Daya Manusia (SDM), Bank mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan Mandiri Syariah yang selalu diperbarui sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pada tahun 2019, Mandiri Syariah memiliki kebijakan terkait di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai berikut:

Praktik Ketenagakerjaan

1. Kesejahteraan Pegawai senantiasa diperhatikan agar tercipta produktivitas kerja yang optimal. Program peningkatan kesejahteraan pegawai diberikan baik secara material maupun non-material, sehingga program yang bersifat material merupakan program kesejahteraan yang berkaitan langsung dengan prestasi Pegawai dan kompensasinya dapat diberikan dalam bentuk uang pensiun, tunjangan hari raya, tunjangan posisi, bonus, biaya pengobatan, pakaian dinas, uang cuti, dan uang kematian. Penggajian dilakukan kajiannya secara berkala dengan memperhatikan hasil survei gaji secara industri oleh pihak ketiga yang ahli dibidangnya. Sedangkan program yang bersifat non-material merupakan program kesejahteraan pegawai dimana Bank memberikan fasilitas dan pelayanan kepada seluruh pegawai tanpa melakukan diskriminasi. Program kesejahteraan non-material Bank yang sudah berjalan sampai saat ini adalah menyediakan fasilitas kepada para pegawai yang sudah memiliki anak dengan membuka Tempat Penitipan Anak (TPA) yang disediakan khusus di minggu pertama menjelang dan sesudah Hari Raya Idul Fitri, sehingga pegawai tetap dapat bekerja dengan tenang.
2. Bank memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada semua orang dalam proses perekrutan pegawai tanpa membedakan jenis kelamin, etnis, ras, status sosial, warna kulit, gender, ataupun kondisi fisik lainnya. Demikian halnya dalam pengangkatan pegawai, Bank tidak melakukan diskriminasi atas alasan apapun, semua keputusan didasarkan pada hasil seleksi dan hasil evaluasi pada masa percobaan.
3. Bank secara berkesinambungan menyelenggarakan beberapa metode program Pendidikan dan pelatihan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Semua pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapabilitas pegawai sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangan perusahaan.
4. Terkait jenjang karir, Bank juga memberikan kesetraan yang sama antara pegawai laki-laki dan wanita. Sistem jenjang karir didasarkan pada kualifikasi jabatan dan kompetensi pegawai yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja dan klasifikasi *talent*. Sistem pengembangan karir merupakan hal penting yang dapat memacu produktivitas setiap pegawai, meningkatkan sikap kerja, menciptakan kepuasan kerja guna mencapai tujuan perusahaan.
5. Bank dalam hal remunerasi mengacu kepada semua aturan yang berlaku dimana besaran remunerasi telah disesuaikan berada di atas standar Upah Minimum yang berlaku di wilayah operasional Bank. Terkait dengan remunerasi, Bank melakukan kajian secara berkala agar tidak terdapat perbedaan yang terlalu tinggi dengan pasar. Bank menerapkan prinsip 3P yaitu:
    1. *Pay for Performance*, Pegawai diberikan kompensasi sesuai dengan kinerjanya
    2. *Pay for Position*, Pegawai diberikan kompensasi sesuai dengan posisi/jabatannya
    3. *Pay for Person*, Pegawai diberikan kompensasi sesuai dengan keahlian individunya.
6. Hubungan industrial yang selalu terjaga dengan baik dan suasana kerja yang kondusif dapat menekan tingkat *turnover* perusahaan. Jika terjadi pengakhiran hubungan kerja, maka pelaksanaannya didasarkan pada peraturan Ketengakerjaan yang berlaku sehingga hak dan kewajiban pegawai ketika hubungan kerjanya berakhir, dapat terjaga dengan baik.

Mandiri Syariah juga memiliki kebijakan kesehatan pegawai, dengan pokok-pokok ketentuan:

a. Ketentuan fasilitas kesehatan bagi pegawai kontrak, pegawai tetap, dan anak pegawai.
b. Fasilitas kesehatan meliputi rawat inap, persalinan, rawat jalan, *General Check Up* (GCU), dan pengobatan ke luar negeri.

Bentuk komitmen Mandiri Syariah terkait ketenagakerjaan dibuktikan dengan pemenuhan kewajiban perusahaan dalam bentuk manfaat bagi pegawai yang diakui sebagai beban operasional perusahaan sebagaimana dalam laporan keuangan Bank.

Terkait keselamatan kerja, Mandiri Syariah juga telah memiliki Pedoman tentang keselamatan kerja, dengan pokok-pokok ketentuan antara lain:

1. Melakukan evaluasi terhadap lingkungan kerja secara berkala, khususnya mengenai:
    - Kelengkapan dan kelayakan sarana dan lingkungan kerja.
    - Kebersihan lingkungan kerja.
    - Keserasian *layout* ruangan kerja. Ketepatan peletakan sarana kerja.
    - Kelengkapan dan kelayakan sarana pengamanan.
2. Manajer membuat, mencatat sarana lingkungan kerja/ kantor yang sudah tidak layak/perlu dilengkapi. Apabila ada ketidaklayakan/kekuranglengkapan sarana, maka dilakukan evaluasi dan untuk diusulkan kepada *Grup Head.*

Di samping hal tersebut, Mandiri Syariah juga telah memiliki kebijakan tentang *Contingency Plan* yang tertuang dalam SE

No. 13/009/OPS, tanggal 28 April 2011, tentang *Contingency Plan Core Banking System*, dengan pokok pikiran antara lain: Organisasi *crisis management* pusat dan cabang serta Pelaksanaan operasional pada saat *disaster*. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa operasional Mandiri Syariah tetap berjalan pada saat *disaster*.

LINGKUP DAN PERUMUSAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Lingkup CSR bidang Ketenagakerjaan meliputi kesetaraan *gender* dan kesempatan kerja, kesetaraan dalam program pendidikan dan pelatihan, kebebasan berserikat, remunerasi, pelatihan pensiun, kegiatan pemberian fasilitas kesehatan dan kegiatan keselamatan kerja.

RENCANA KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Terkait dengan praktik ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja bagi pegawai, sepanjang tahun 2019 Mandiri Syariah telah menetapkan beberapa target pencapaian antara lain:

- Terjaminnya kesejahteraan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku dan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan.
- Terjaminnya kesetaraan *gender* dalam kesempatan kerja, maupun kesetaraan dalam kesempatan memperoleh pelatihan bagi seluruh pegawai.
- Penyempurnaan skema fasilitas kesehatan bagi pegawai serta mewujudkan tempat kerja yang layak dan aman bagi seluruh pegawai Perseroan.
- Terwujudnya kegiatan operasional perseroan yang berjalan sesuai dengan prosedur dan standar keamanan kerja yang berlaku.

KEGIATAN DAN DAMPAK KUANTITATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

KEGIATAN DAN DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN KETENAGAKERJAAN

KESETARAAN *GENDER* DALAM KESEMPATAN KERJA

Mandiri Syariah senantiasa memberikan hak dan kesempatan yang sama dalam hal kesempatan bekerja tanpa memandang perbedaan agama, etnis, ras, status sosial, warna kulit, *gender*, ataupun kondisi fisik lainnya. Demikian juga dalam hal pengangkatan calon pekerja, Perusahaan tidak melakukan diskriminasi atas alasan apapun karena mendasarkan keputusannya pada hasil seleksi, hasil evaluasi pada masa percobaan dan orientasi pekerja.

Mandiri Syariah senantiasa melakukan proses rekrutmen berdasarkan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki oleh kandidat dengan memperhatikan ketersediaan tenaga kerja lokal/nasional.

Kebijakan Bank yang mendukung terhadap adanya perlakuan adil dan kesetaraan *gender* terhadap pegawai, antara lain: 1) Implementasi *Human Capital Strategy*; 2) Pemberian *reward* pegawai antara lain: Tunjangan Prestasi Unit Kerja (TPUK) triwulanan, insentif dan bonus; 3) Penerapan sanksi bagi pegawai yang melanggar disiplin berupa pembinaan, peringatan (SP1, SP2, SP3) dan PHK bagi pegawai bermasalah (*fraud*); 4) Mutasi, promosi/rotasi/demosi pegawai dan pejabat unit kerja; 5) Pemberian apresiasi berupa penghargaan hadiah/bagi pegawai/Cabang yang berprestasi; 6) Pelaksanaan program screening pegawai baru, terutama terkait hubungan keluarga; 7) Program *Assessment Center* Pegawai.

KESETARAAN DALAM PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Mandiri Syariah secara berkesinambungan menyelenggarakan beberapa metode program pendidikan dan pelatihan untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan. Mandiri Syariah juga selalu menjamin bahwa setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti setiap program pendidikan dan pelatihan yang dibuka sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangan Perusahaan. Penjelasan lebih lanjut mengenai Program Pelatihan dan Pendidikan yang telah dilaksanakan di sepanjang 2018 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

REMUNERASI

Mandiri Syariah memiliki motto "Terdepan, Modern, dan Menenteramkan". Motto bermakna bahwa Mandiri Syariah menghadirkan pengelolaan perusahaan yang modern dengan memberikan rasa aman dan menentramkan bagi pihak internal (pegawai) dan eksternal (nasabah/ *stakeholders*). Komitmen tersebut tercermin dengan adanya jaminan perlakuan yang adil terhadap kesetaraan *gender* dalam kesempatan kerja bagi setiap pegawai Mandiri Syariah. Dalam pengelolaan pegawai, Bank menerapkan prinsip 3P yaitu:

1. *Pay for Performance*, Pegawai diberikan kompensasi sesuai dengan kinerjanya
2. *Pay for Position*, Pegawai diberikan kompensasi sesuai dengan posisi/jabatannya
3. *Pay for Person*, Pegawai diberikan kompensasi sesuai dengan keahlian individunya.

Mandiri Syariah senantiasa mentaati seluruh aturan yang berlaku terkait remunerasi kepada pegawai. Besaran remunerasi yang diberikan telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan berada di atas standar Upah Minimum yang berlaku di wilayah operasional Perusahaan. Terkait dengan remunerasi, Mandiri Syariah senantiasa berupaya menjaga *gap* rasio gaji seluruh pegawai agar tidak terdapat perbedaan yang terlalu tinggi.

Pada tabel berikut, dapat dilihat rasio gaji tertinggi dan terendah Mandiri Syariah selama tahun 2019.

Tabel Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Keterangan	Rasio
Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1,11 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	1,37 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2,45 : 1
Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah	25 : 1

PROMOSI

Kebijakan promosi telah diperbarui di tahun 2018, dengan sistem promosi yang baru yang mengacu kepada penilaian kinerja dan klasifikasi *talent*. Pada tahun 2019 terdapat 3.465 pegawai yang mendapatkan promosi kenaikan *grade*.

Tabel *Promotion Grade* Pegawai

Pegawai	2019	2018
Pimpinan	967	906
Pelaksana	2.498	1.003
Jumlah	**3.465**	**1.909**

Jika dibandingkan tahun 2018, pelaksanaan promosi pegawai di tahun 2019 lebih tertata dengan kriteria, waktu pelaksanaan dan ukuran yang jelas. Hal ini menjadi tolok ukur dalam setiap kegiatan.

KEBEBASAN BERSERIKAT

Mandiri Syariah memberikan jaminan kebebasan kepada pegawainya dalam berserikat dan berkumpul dalam wadah BSM Club. Pegawai bebas untuk menyalurkan berbagai macam minat, bakat dan kemampuannya dalam bidang seni, olahraga, keilmuan, kerohanian dan minta lain yang terkait hobi. Kegiatan secara berkala, dengan masingmasing bidang kegiatan memiliki struktur pengurus yang dipilih berdasarkan musyawarah nasional BSM Club yang diselenggarakan setahun sekali.

Pada tahun 2018, total aktivitas di BSM Club mencapai 32 kegiatan terdiri atas kegiatan olah raga, keilmuwan (bedah buku, finansial dan parenting) hingga kegiatan kemasyarakatan, dengan rincian antara lain 20 kegiatan olahraga, 5 (lima) kegiatan seni dan 7 (tujuh) kegiatan social keilmuan.

PELATIHAN PENSIUN

Program pelatihan atau pembekalan untuk pegawai yang akan memasuki masa purna bakti telah disusun kebijakannya agar pelatihan tersebut dapat dilaksanakan secara terstruktur dengan kriteria peserta dan waktu yang jelas dan lebih terencana. Pelaksanaan pelatihan tersebut diikuti pula oleh pasangan pegawai. Hingga tahun 2018, jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan pembekalan memasuki masa purna bakti (pensiun) sebanyak 60 orang pegawai.

DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN KETENAGAKERJAAN

Dampak dari pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial terkait dengan ketenagakerjaan adalah tingginya tingkat engagement pegawai. Adapun untuk tingkat engagement pegawai, pada tahun 2019 Mandiri Syariah memperoleh skor ...% meningkat/menurun dibandingkan tahun 2018 yang tercatat sebesar 75,40%.

KEGIATAN DAN DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN KESEHATAN

Kesehatan pegawai merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dinilai memiliki peranan penting dalam mendukung kinerja pegawai sebagai individu maupun perusahaan secara keseluruhan. Oleh karenanya, Bank senantiasa berupaya menunjang kualitas kesehatan seluruh pegawai dengan memberikan fasilitas *general medical check-up* dan fasilitas jaminan kesehatan kepada seluruh pegawai serta dengan mengikutsertakan pegawai dalam program BPJS Kesehatan. Forum berbagi pengethauan mengenai kesehatan dari para pakar kesehatan, juga dilakukan untuk seluruh pegawai, sehingga dengan demikian, pegawai dapat lebih termotivasi dalam menjaga kesehatannya masing-masing. Selain terhadap pegawainya, Bank juga memberikan fasilitas kesehatan kepada keluarga pegawai. Setiap individu diharapkan dapat menjaga kesehatannya dengan melaksanakan pola hidup sehat sedini mungkin.

DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN KESEHATAN

Mandiri Syariah telah memberikan fasilitas kesehatan yang memadai untuk pegawainya. Hal ini berdampak pada meningkatnya produktifitas pegawai di tahun 2019 yaitu sebesar Rp984,30 juta meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp882,75 juta.

KEGIATAN DAN DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN KESELAMATAN KERJA

Selain kesehatan, keselamatan kerja juga menjadi salah satu aspek yang juga mendapatkan perhatian besar dari manajemen. Bank selalu berupaya untuk meminimalisir seluruh risiko kecelakaan kerja agar tercipta lingkungan kerja yang aman dan nyaman demi mengoptimalkan produktivitas kinerja perusahaan. Sebagai wujud komitmen Bank dalam menjaga keselamatan kerja seluruh Pegawainya, Bank juga sudah melakukan pengelolaan risiko kecelakaan kerja sesuai dengan kebutuhan Pegawai di dalam kantor dan di lapangan saat dinas, yaitu antara lain:

1. Mengadakan pelatihan dan pemberian informasi evakuasi dari gedung bertingkat secara berkala, mengadakan pelatihan dasar terhadap penggunaan alat pemadam kebakaran, melengkapi seluruh kantor

operasional dengan peralatan dasar keselamatan yang relevan dan memadai, termasuk alat pemadam kebakaran dan kotak obat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
2. Untuk meningkatkan kinerja tim *security* dalam menjamin keamanan dan keselamatan seluruh pegawai selama bekerja, hingga tahun 2018 terdapat 18 orang *security* yang telah mengikuti pelatihan K3.
3. Untuk latihan kesiapan prosedur tanggap darurat gedung, dilakukan juga pengecekan peralatan dan sarana keselamatan gedung. Pengecekan dilakukan secara internal dan eksternal. Pengecekan internal dilakukan oleh tim *security* secara berkala, sedangkan pengecekan eksternal dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran.

Mandiri Syariah terus berupaya menciptakan suasana kerja yang nyaman bagi setiap pegawai perusahaan, dengan melengkapi sarana dan prasarana penunjang pekerjaan. Kelengkapan sarana dan prasarana tersebut untuk memastikan terjaminnya kebutuhan operasional perusahaan dan terjaminnya keselamatan kerja bagi pegawai. Disamping hal tersebut, Mandiri Syariah menerapkan praktik kerja dengan prinsip kehati-hatian dan patuh terhadap peraturan yang berlaku sehingga dapat mencapai "*Zero Accident*".

Beberapa kali Mandiri Syariah telah mengikutsertakan pegawainya dalam kegiatan pelatihan keselamatan kerja, diantaranya:
1. Kegiatan evakuasi pegawai di dalam gedung dalam rangka mitigasi apabila ada bencana kebakaran/gempa bumi. Pelatihan ini dilakukan bersama dengan pihak pengelola gedung (PT UG Mandiri).
2. Kegiatan penanganan kebakaran. Pelatihan ini dilakukan bersama dengan pihak pengelola gedung (PT UG Mandiri) dan juga dari Suku Dinas Pemadam Kebakaran setempat.

Rincian mengenai pelaksanaan kegiatan terkait Keselamatan Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Jenis Kegiatan	Target Kegiatan	Peserta
Sosialisasi Keadaan Darurat	Wisma Mandiri 1 dan 2	Seluruh Pegawai Wisma Mandiri 1 dan 2
Pelatihan *Emergency Response*	Wisma Mandiri 1 dan 2	HSE, Teknisi, Security
Simulasi Evakuasi Kebakaran	Wisma Mandiri 1 dan 2	Seluruh Pegawai Wisma Mandiri 1 dan 2
Safety Induction	Wisma Mandiri 1 dan 2	Seluruh Pegawai Wisma Mandiri 1 dan 2

Mandiri Syariah juga rutin melaksanakan Sosialisasi Keadaan Darurat Gedung baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Region, Area dan Cabang. Rincian mengenai pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Keadaan Darurat Gedung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Pelaksanaan Sosialisasi Keadaan Darurat Gedung di Kantor Pusat

Lokasi Gedung Kantor	Materi Sosialisasi	Waktu Pelaksanaan	Peserta
Lantai 20 Wisma mandiri 2	Tanggap Darurat Kebakaran	4 Desember 2019	Seluruh Pegawai Wisma Mandiri 1 dan 2

Rincian mengenai pelaksanaan kegiatan Pelatihan Tim *Emergency Response* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Pelaksanaan Pelatihan Tim *Emergency Response*

Jenis Pelatihan	Lokasi/ Gedung	Waktu Pelaksanaan	Peserta
Penggunaan pilar *hydrant*	Area parkir Wisma Mandiri I dan II	23 November 2019	HSE,Teknisi dan Sekurity (30 orang)

Selain itu, Mandiri Syariah melakukan simulasi evakuasi darurat kebakaran gedung terhadap penghuni gedung untuk mengukur kesiapan Tim Tanggap Darurat dan mengukur lama waktu evakuasi dari lokasi gedung ke titik berkumpul. Pelaksanaan simulasi ini dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali yang dihadir pula oleh Dinas Pemadam Kebakaran.

Mandiri Syariah juga rutin melaksanakan Simulasi Evakuasi Darurat Kebakaran Gedung baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Region, Area dan Cabang. Rincian mengenai pelaksanaan kegiatan Simulasi Evakuasi Darurat Kebakaran Gedung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Pelaksanaan Pelatihan Pengangkutan Korban Dengan Tandu

Lokasi Gedung Kantor	Waktu Pelaksanaan	Peserta
Wisma Mandiri 1	26 Desember 2019	HSE dan Security (6 orang)

Tabel Pelaksanaan Simulasi Evakuasi Darurat Kebakaran Gedung

Lokasi Gedung Kantor	Waktu Pelaksanaan	Peserta
Wisma Mandiri 1 dan 2	30 Desember 2019	Seluruh Pegawai Wisma Mandiri 1 dan 2

Mandiri Syariah juga mengikutsertakan seluruh pegawainya sebagai peserta jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

melalui BPJS Ketenagakerjaan. Adapun program BPJS Ketenagakerjaan yang dikuti antara lain Program Jaminan Hari Tua (JHT), Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JK). Sedangkan untuk Pegawai yang melaksanakan kegiatan Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga dilakukan Asuransi Jiwa.

Tahun 2019, pembayaran BPJS Ketenagakerjaan iuran Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Pensiun sebesar Rp68.108.844.292 sebanyak 8.597 peserta. Sedangkan untuk pembayaran BPJS Kesehatan sebesar Rp28.958.305.219 sebanyak 20.414 peserta.

DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN KESELAMATAN KERJA

Mandiri Syariah berkomitmen Bank dalam menjaga keselamatan kerja seluruh Pegawainya, yaitu dengan adanya pelaksanaan pengelolaan keselamatan kerja yang didukung dengan kegiatan sosialisasi dan berbagai pelatihan. Oleh karena itu, sepanjang tahun 2019, tidak terdapat kecelakaan kerja para pegawai (zero accident).

SALURAN PENGADUAN

Saluran Pengaduan terkait ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja melalui sistem *e-Care* yang ditangani oleh Human Capital Service. dapat pula mengirimkan saran dan kritik kepada Divisi *Corporate Secretary Group* pada alamat emai csg@bsm.co.id.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KONSUMEN

Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, Mandiri Syariah senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen dengan memberikan layanan terbaik. Mandiri Syariah tidak hanya menjual produk perbankan yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat namun juga memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen (*product responsibility*).

Merespon hal tersebut, Kebijakan yang diambil oleh Mandiri Syariah berupa Kebijakan Jaminan Perlindungan Simpanan Nasabah. Bentuk jaminan perlindungan simpanan nasabah yang telah dilakukan oleh Bank adalah dengan mendaftarkan sebagai peserta Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dan pembentukan cadangan kerugian pembiayaan aktiva produktif.

Latar Belakang Penanganan Pengaduan Nasabah

a. Setiap nasabah memiliki hak untuk mengajukan pengaduan.
b. Nasabah dapat melakukan pengaduan melalui Kantor Cabang, Mandiri Syariah *Call* ataupun melalui surat.
c. Unit Kerja di Bank berkewajiban menyelesaikan pengaduan yang masuk baik pengaduan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis.

Mandiri Syariah mengacu pada kebijakan dan regulasi yang berlaku di Indonesia, yaitu:

a. Undang-undang No. 21 tahun 2008 perihal Perbankan Syariah.
b. Undang-undang No. 8 tahun 2010 perihal Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
c. Undang-undang No. 8 tahun 1999 perihal Perlindungan Konsumen
d. Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 perihal Penyelesian Pengaduan Nasabah
e. Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 tanggal 28 Februari perihal Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 perihal Penyelesian Pengaduan Nasabah
f. Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
g. Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 perihal Bank Umum Syariah.
h. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.
i. Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 perihal Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

j. Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2015 perihal Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
k. Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2015 perihal Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.
l. Surat Edaran OJK No. 2/SEOJK.07/2015 perihal Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Jasa Keuangan.
m. Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 perihal Bank Umum Syariah.
n. SE Operasi No. 12/026/OPS tanggal 31 Mei 2010 perihal Penetapan Penanggung Jawab Beban Kerugian Akibat Terjadi Risiko Operasional.
o. SE Operasi No. 16/124/OPS tanggal 27 Juni 2015 perihal Standar Prosedur Operasional (SPO) Penanganan Pengaduan Nasabah Terkait Indikasi Penipuan.
p. SE Operasi No. 16/039/OPS tanggal 22 September 2014 perihal Standar Prosedur Operasional (SPO) Penanganan dan Tindak Lanjut Pengaduan Nasabah Mandiri Syariah.

TARGET/RENCANA KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KONSUMEN

Sesuai dengan semangat Perseroan untuk memberikan dampak positif kepada seluruh nasabah, bentuk tanggung jawab Mandiri Syariah kepada nasabah yaitu:

1. Memberikan jaminan layanan yang tertuang dalam bentuk *Standard Level Agreement (SLA)* pengaduan yang terus dikaji dan diperbaharui merujuk pada ekspektasi nasabah. Selain itu, penentuan Besarnya SLA pengaduan disesuaikan dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini pengaduan tertulis diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, dan dalam kondisi tertentu dapat diperpanjang hingga 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya.
2. Melakukan edukasi perbankan kepada seluruh elemen masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab Perseroan atas semangat Spirit Memakmurkan Negeri.
3. Melakukan survei kepuasan nasabah sebagai bagian dari perbaikan kualitas atas produk dan layanan yang diberikan Perseroan kepada nasabah.

KEGIATAN

KEGIATAN PENGADUAN NASABAH

Mandiri Syariah telah membentuk pusat informasi produk dan layanan serta sekaligus sebagai sarana pengaduan bagi konsumen atas layanan perbankan. Kemudaan akses informasi dan jaringan layanan perbankan telah disediakan oleh Bank antara lain:

1. Melalui Situs Internet dengan alamat laman web: www.mandirisyariah.co.id;
2. Jejaring sosial: facebook, twitter;
3. Mandiri Syariah Call 14040;
4. Chatbot AISYAH (Asisten Interaktif Mandiri Syariah); dan
5. Kemudahaan fasilitas *mobile banking* dan internet *banking* serta keberadaan kantor cabang dan ATM Bank.

Saat ini pengaduan nasabah yang diterima oleh Mandiri Syariah dikelola oleh Unit Kerja Customer Care Management yang berada di Cash and Trade Operations Group. Sedangkan Pusat pengaduan konsumen ini dapat diakses oleh konsumen melalui beberapa saluran antara lain:

1. Syariah Mandiri Call Center yang beroperasi 24 jam melalui panggilan 14040 atau (021) 29534040.
2. Email: bsmcall@bsm.co.id.
3. Customer Service yang berada di cabang-cabang Mandiri Syariah terdekat.

Melalui pusat layanan informasi produk dan pengaduan ini, Mandiri Syariah memberikan respon yang cepat atas permintaan informasi produk dan layanan perbankan serta pengaduan yang masuk. Lebih lanjut, Bank dapat memberikan penyelesaian atas aduan secara lebih cepat dan bijak.

MANDIRI SYARIAH CALL 14040

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah, Mandiri Syariah membentuk unit layanan yaitu Mandiri Syariah Call 14040 yang dapat diakses selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 7 (tujuh) hari.

Fungsi Unit layanan tersebut adalah untuk melayani kebutuhan nasabah akan informasi terkait produk, fasilitas dan layanan Bank serta pengaduan nasabah yang dapat disampaikan melalui media komunikasi antara lain: telepon, *handphone*, *fax* dan *email*.

Tugas dan tanggung jawab Mandiri Syariah Call 14040

Kategori layanan Mandiri Syariah Call meliputi:

1. Informasi, terdiri dari:
   - Informasi Saldo
   - Informasi Mutasi
   - Informasi Produk Mandiri Syariah
2. Pemblokiran
   - Blokir kartu Mandiri Syariah
   - Blokir/penutupan Mandiri Syariah Mobile
3. Penerimaan pengaduan nasabah
4. Transaksi
   - Cek saldo melalui mesin saldo melalui mesin *Interactive Voice Recorder* (IVR);
   - Informasi mutasi 7 (tujuh) transaksi terakhir; dan
   - Permintaan rekening koran melalui *fax* dan *email.*

KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KONSUMEN

Target *performance (Succsess Call Ratio)* layanan Mandiri Syariah Call l 14040 adalah sebesar 95%. Berikut pencapaian layanan Mandiri Syariah Call 14040 selama tahun 2019:

1. IVR *Phone Banking*

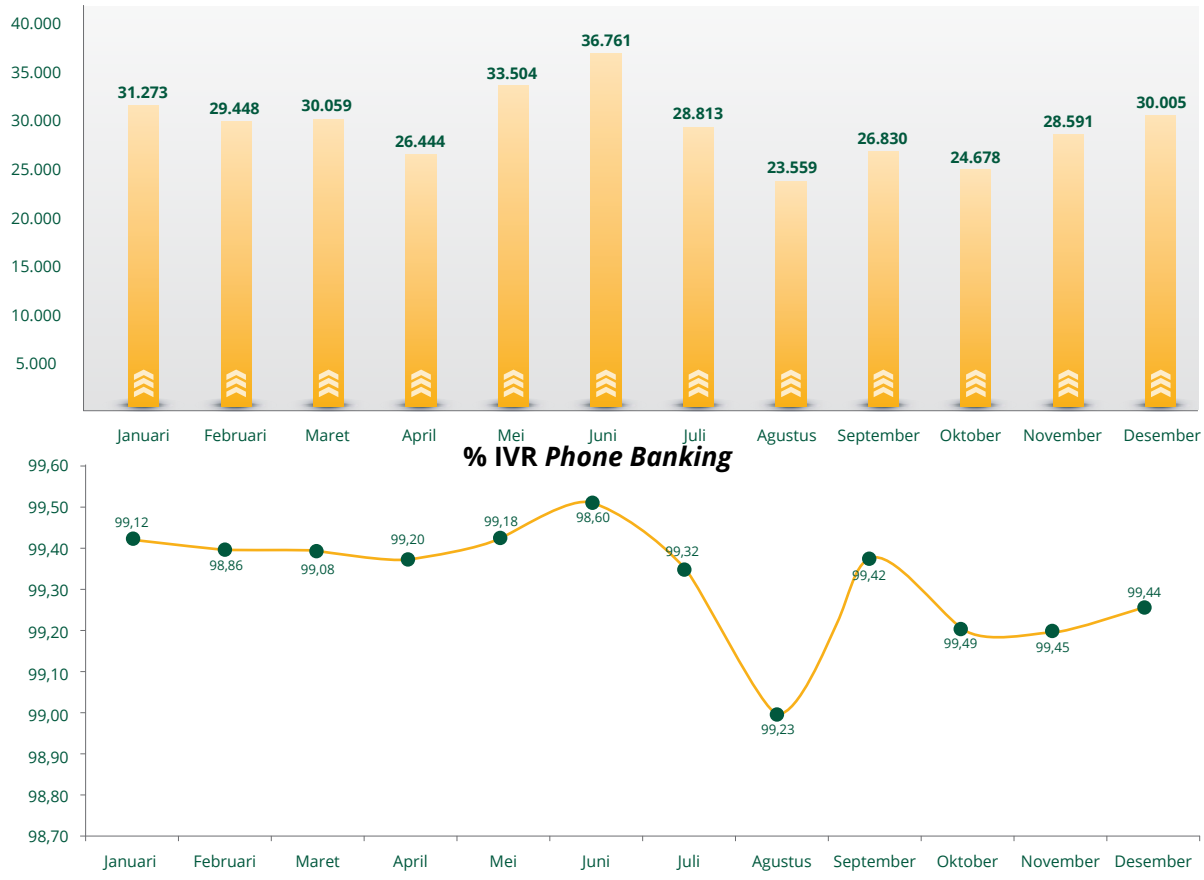

2. Petugas Mandiri Syariah Call

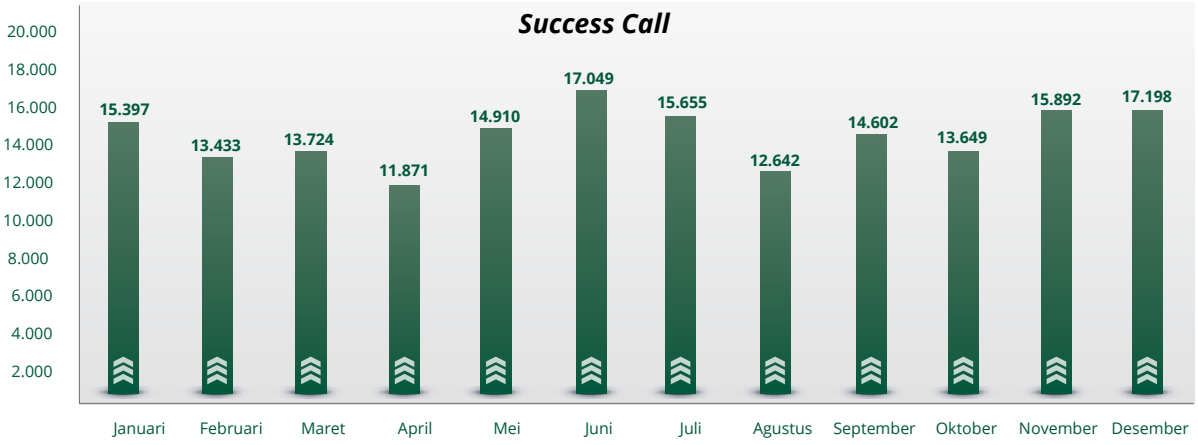

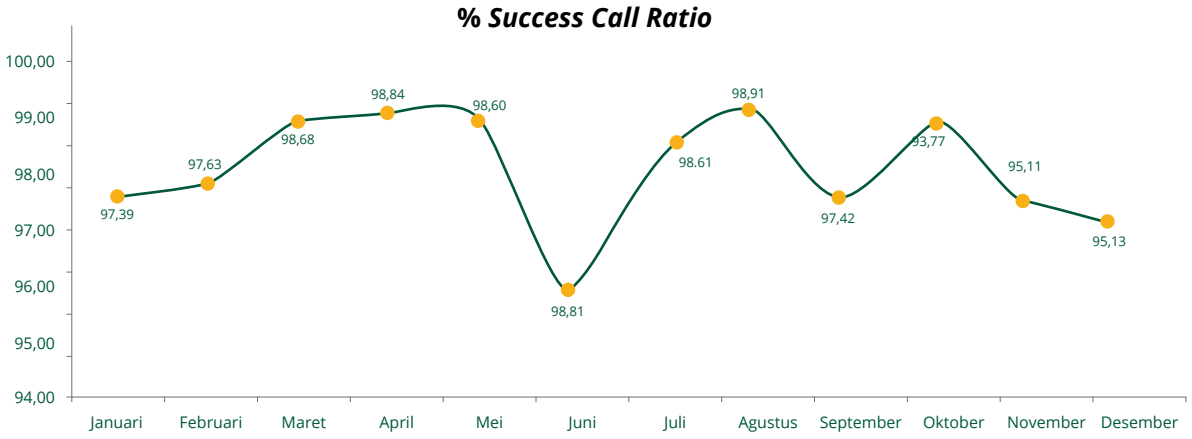

PENANGANAN PENGADUAN NASABAH

Pencatatan pengaduan nasabah sudah menggunakan aplikasi yang bernama *Complaint Handling Management System* (CHMS).

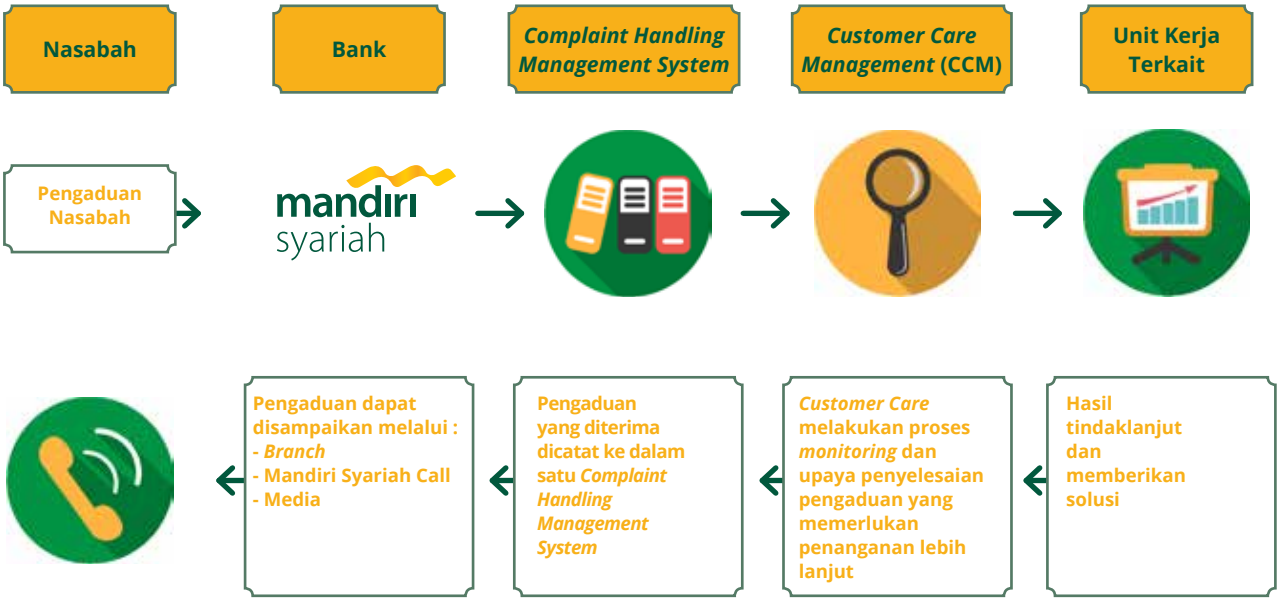
Nasabah
Bank
Complaint Handling Management System
Customer Care Management (CCM)
Unit Kerja Terkait
Pengaduan Nasabah
mandiri syariah
Pengaduan dapat disampaikan melalui :
- Branch
- Mandiri Syariah Call
- Media
Pengaduan yang diterima dicatat ke dalam satu Complaint Handling Management System
Customer Care melakukan proses monitoring dan upaya penyelesaian pengaduan yang memerlukan penanganan lebih lanjut
Hasil tindaklanjut dan memberikan solusi

Melalui pusat pengaduan, Mandiri Syariah memberikan respon yang cepat atas pengaduan yang masuk dan penyelesaian secara bijak. Mandiri Syariah telah membentuk Customer Care Management di Cash And Trade Operations group. Pengaduan nasabah dapat disampaikan melalui seluruh cabang dengan melakukan pengisian formulir permintaan/ pengaduan nasabah yang diatur tersendiri dalam peraturan internal Bank atau nasabah dapat juga menyampaikan pengaduannya melalui Mandiri Syariah Call. Selanjutnya Bank akan melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan keluhan dari nasabah. Secara singkat, mekanisme tindak lanjut pengaduan nasabah sebagai berikut:

- Nasabah dapat menyampaikan pengaduan melalui cabang atau Mandiri Syariah *Call*;
- Cabang atau Mandiri Syariah Call meng-input pengaduan yang disampaikan nasabah ke dalam *Complaint Handling Management System (CHMS)*;
- Data yang tercatat di CHMS akan dimonitor dan ditindaklanjuti oleh unit Customer Care Management;
- Pengaduan yang tidak dapat diselesaikan kantor cabang atau Mandiri Syariah *Call* akan di tindaklanjuti oleh Customer Care Management dan unit kerja terkait;
- Hasil tindaklanjut dan informasi penyelesaian dari unit kerja terkait akan diteruskan kepada penerima pengaduan (Cabang atau Mandiri Syariah *Call*);
- Penerima pengaduan akan meneruskan informasi/ jawaban atas pengaduan yang diterima kepada nasabah; dan
- Penerima pengaduan akan merubah status pengaduan di CHMS menjadi "Selesai".

JENIS DAN SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PENGADUAN NASABAH

Pengaduan yang disampaikan oleh nasabah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

a. Pengaduan secara lisan, yakni terdiri dari:
   - Pengaduan wajib ditanggapi dan/atau diselesaikan oleh Unit Kerja Penerima Pengaduan/Unit Kerja *Customer Care* dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak pengaduan diterima.
   - Apabila pengaduan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja, maka Unit Kerja Penerima Pengaduan wajib meminta nasabah untuk menyampaikan pengaduannya secara tertulis.

b. Pengaduan secara tertulis
   - Pengaduan wajib diselesaikan oleh Unit kerja Penerima Pengaduan/Unit Kerja *Customer Care* dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima.
   - Apabila pengaduan belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, maka penerima pengaduan wajib menyampaikan informasi perpanjangan waktu kepada nasabah secara tertulis.
   - Bank dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya (jika perlu).

PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN KONSUMEN

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen, Mandiri Syariah melaksanakan program-program antara lain:

1. Pengkinian panduan layanan dan perlindungan nasabah sesuai dengan ketentuan dari regulator.
2. Peningkatan sistem pembukaan rekening antara lain: digitalisasi pembukaan rekening serta *sales kit* produk.
3. Pengkinian fitur dan layanan Mandiri Syariah *Mobile* yang semakin lengkap untuk memenuhi kebutuhan transaksi perbankan nasabah.
4. *Chatbot* AISYAH (Asisten Interaktif Mandiri Syariah sebagai) yang merupakan *chatbot* bank syariah pertama di Indonesia.
5. Peningkatan kompetensi untuk pegawai, melalui sertifikasi CS dan Teller, pelatihan layanan prima, pelatihan *service leadership* dan *guest speaker* layanan.

Sebagai wujud pelayanan prima yang diberikan oleh Mandiri Syariah kepada nasabah, data terkait penyelesaian pengaduan dan keluhan nasabah yang sudah dilakukan oleh Mandiri Syariah dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Data pengaduan Tahun 2019

	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total
Total Pengaduan	15.885	10.600	11.404	11.929	49.818
Dalam Proses	0	0	0	307	307
Selesai	15.885	10.600	11.404	11.622	49.511

	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total
Maksimal 20 HK	14.955	10.343	10.811	10.573	46.682
Maksimal 40 HK	782	184	450	874	2.290
Maksimal >40 HK	148	73	143	175	539
Total	15.885	10.600	11.404	11.622	49.511

Kategori	Total
Proses/Transaksi dan Fasilitas	**47.067**
Kejahatan Perbankan	**1.796**
Produk	**807**
Pelayanan	**148**

Tabel Pengaduan Nasabah berdasarkan Kategori Produk pada tahun 2019

Kategori Produk	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total
Tabungan	118	92	130	101	**441**
Pembiayaan	42	18	48	57	**165**
Tabungan Mabrur	13	5	8	9	**35**
Bancassurance	3	12	7	7	**29**
Deposito	6	3	4	8	**21**
Tabungan Investa Cendikia (TIC)	6	3	5	3	**17**

Tabel Pengaduan Nasabah berdasarkan Kategori Proses/Transaksi dan Fasilitas pada tahun 2019

Kategori Proses/Transaksi & Fasilitas	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total
ATM Mandiri	8.240	3.463	2.786	1.192	**15.681**
Mandiri Syariah Mobile	2.343	2.002	1.917	4.130	**10.392**
ATM Bersama	1.364	1.222	1.381	839	**4.806**

Kategori Proses/Transaksi & Fasilitas	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total
ATM Mandiri Syariah	956	782	1.406	1.101	**4.245**
Net Banking	1.031	693	1.343	729	**3.796**
ATM Prima	402	628	861	1.128	**3.019**

Tabel Pengaduan Nasabah berdasarkan Kategori Layanan pada tahun 2019

Kategori Layanan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total
Kecewa Dengan Marketing	1	10	13	15	**39**
Customer Service Lamban	5	10	3	5	**23**
Kantor Cabang Sulit Dihubungi	3	4	1	3	**11**
Teller Lamban	2	1	2	2	**7**
Layanan Security Kurang Baik	1	1	1	0	**3**

Tabel Pengaduan Nasabah berdasarkan Kategori Kejahatan Perbankan pada tahun 2019

Kategori Kejahatan Perbankan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total
Penipuan oleh Nasabah70.912 mm	250	284	239	172	**945**
Kejahatan oleh Non Nasabah	169	248	207	214	**838**
Suspect Skimming ATM Mandiri	0	1	2	4	**7**
Suspect Skimming ATM Prima	0	0	3	0	**3**
Suspect Skimming ATM Bersama	1	0	1	1	**3**

Pengaduan Nasabah Tahun 2019

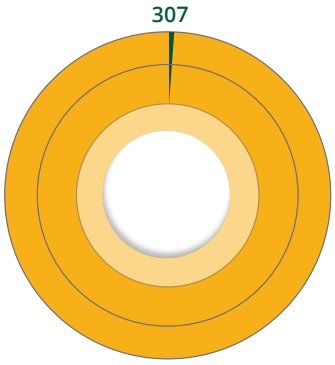

Pengaduan Nasabah Tahun 2018

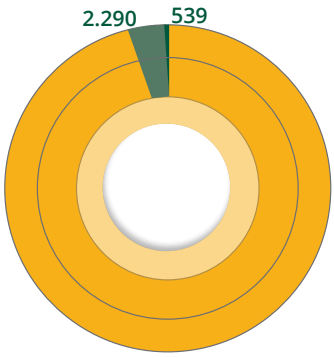

Pengaduan
Total : 49.818 Pengaduan
Selesai : 49.511 Pengaduan
Proses : 307 Pengaduan (0,61%)

Waktu Peyeleaian :
Di bawah 20 HK : 94,28%
20 HK- 40 HK : 4,62%
Diatas 40 HK : 1,08%

PENGEMBANGAN PENANGANAN PENGADUAN NASABAH
Sistem pencatatan pengaduan nasabah melalui *Complaint Handling Management System* (CHMS) terus dikembangkan menjadi *user friendly* dan data yang lebih lengkap.

KEGIATAN KERAHASIAAN DATA NASABAH

Mandiri Syariah mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola kerahasiaan data nasabah. Terjaminnya kerahasiaan data nasabah oleh Bank mencerminkan kepercayaan publik terhadap Bank. Jajaran Bank berusaha senantiasa memahami dan meningkatkan pengetahuan bahwa seluruh informasi yang berhubungan dengan Bank dan Nasabah merupakan bersifat rahasia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku. Jajaran Bank bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data nasabah melalui pengelolaan Bank yang prudent dan profesional.

Mandiri Syariah telah menginternalisasi kerahasiaan data nasabah kepada jajaran bank antara lain melalui penetapan kebijakan, pemberian opini oleh unit kerja kepatuhan, sosialisasi internal pada pelatihan pegawai, workshop internal maupun eksternal yang diikuti pegawai bank.

KEGIATAN INFORMASI PRODUK

Dalam rangka inklusi dan literasi atas produk-produk yang dipasarkan (tersedia) pada Bank dilaksanakan dengan promosi di beberapa media massa, *website*, sosial media, brosur, *chatbot* dan lain-lain. Tujuan Bank dalam penyampaian produk-produk bank untuk publik/ masyarakat dan dilayani kebutuhanya dalam produk bank yang menjalankan prinsip sesuai syariah. Disamping itu produk-produk bank senantiasa selalu dilakukan *Research and Development*, evaluasi dan mengedepankan kebutuhan nasabah sesuai ekspektasi dan melebihi ekspektasi nasabah. Bank dalam pengembangan produk selalu menyesuaikan ketentuan Regulasi yang belaku melalui persetujuan Regulator. Di samping itu dalam internal bank senantiasa melakukan penyempurnaan kebijakan, sistem dan prosedur terkait produk bank serta melaksanakan sosialisasi ketentuan yang berkaitan dengan produk bank dalam *training, workshop*, dan *refreshment test*.

KEGIATAN YANG MELIBATKAN KONSUMEN

Mandiri Syariah terus mengembangkan berbagai program/ kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung melibatkan partisipasi aktif nasabah terhadap produk layanan perbankan. Hal ini bertujuan untuk menjaga loyalitas nasabah menggunakan produk layanan BSM dan tidak beralih kepada produk perbankan lainnya.
Kegiatan-kegiatan yang melibatkan konsumen sebagai upaya peningkatan kualitas layanan dan menjaga loyalitas pelanggan antara lain:

1. Sahabat BSM (*Customer Get Customer*);
2. BSM Fantasi (Hadiah Langsung);
3. BSM *Brand Awareness* - Spekta/Gerai (*event Direct Sales* yang dilakukan di *indoor/ outdoor* dengan tema yang beragam);
4. Gebyar (Kumpul Bersama Nasabah dengan kegiatan gowes sepeda, *fun walk* dan senam bersama);
5. iBvaganza (Program edukasi perbankan syariah kepada nasabah Indonesia);
6. *Direct gift* untuk *fresh fund* nasabah reguler;
7. *Priority Gathering* (Silaturahim Nasabah *Priority*); dan
8. Kunjungan Nasabah berupa kunjungan pegawai Kantor Pusat kepada nasabah individu besar atau institusi di Cabang.

DAMPAK KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL KEPADA KONSUMEN

Efektivitas penanganan pengaduan nasabah telah memberikan dampak pada tingkat kepuasan nasabah. Untuk mengetahui sudah sejauh mana tingkat kepuasan pelanggan Mandiri Syariah di tahun 2018, dengan melakukan survei *Bank Service Excellence Monitor* yang diadakan oleh pihak eksternal yakni *Marketing Research Indonesia* (MRI). Adapun hasil dari survei tersebut menunjukkan angka 84,14% lebih besar dengan kinerja yang bagus pada kisaran indeks 78%-80%.

Pada tahun 2018, tidak terdapat keluhan dari nasabah terkait dengan kebocoran data maupun kerahasiaan data nasabah. Selain itu, tidak terdapat data nasabah yang hilang serta pengaduan lain dari pihak luar maupun pihak regulator.
Penyampaian informasi serta edukasi kepada masyarakat terkait produk dan layanan yang dimiliki oleh Perseroan dimaksudkan untuk mempermudah pemberian layanan dan akses kepada nasabah. Kemudahan layanan serta akses kepada nasabah lebih jauh telah memberikan dampak pada meningkatnya pendapatan serta pangsa pasar Perseroan. Di tahun 2018, pangsa pasar Mandiri Syariah untuk pendanaan mengalami kenaikan terhadap industri perbankan syariah di Indonesia yang tercatat mencapai sebesar 23,52% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 23,27%

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan berupa pengembangan sosial kemasyarakatan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) Mandiri Syariah dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Bangun Sejahtera Mitra (BSM) No. 21/560-PKS/DIR; 18/002/PKS/YBSMU tanggal 10 September 2019 perihal: Penyaluran Dana Infaq dan Dana Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP). LAZNAS BSM adalah mitra utama PT Bank Syariah Mandiri dalam kegiatan sosial. Adapun pendirian Yayasan BSM Umat (yang menaungi LAZNAS BSM) dikukuhkan melalui Keputusan Menteri Agama RI No. 406 tahun 2002 tentang Pengukuhan Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat sebagai Lembaga Amil Zakat.

Sedangkan terkait penyaluran Zakat mengacu kepada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Mandiri Syariah dengan Laznas BSM dan Yayasan Rumah Zakat Indonesia (Rumah Zakat) No. 21/766-PKS/DIR; 18/004/PKS/YBSMU; 324/SPJ-LEGAL/RZ/XI/2019 tanggal 25 November 2019 perihal: Penyaluran Dana Zakat. Laznas BSM merupakan Mitra dari lembaga Rumah Zakat dalam penyaluran dana zakat. Dengan demikian penyaluran Dana Zakat dilakukan dalam bentuk kerja sama 3 (tiga) pihak antara BSM, Laznas BSM dan Rumah Zakat. Dengan status Laznas BSM sebagai mitra Rumah Zakat, maka Laznas BSM tetap menyalurkan zakat yang diterima dari BSM untuk program-program yang bersifat kemanusiaan (*humanity*).

Sedangkan penyaluran Dana Infaq dan Dana Sosial/Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) dilakukan kerja sama 2 (dua) pihak antara BSM dan Laznas BSM. Penyaluran Dana Sosial/TBDSP mengacu kepada Fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah.

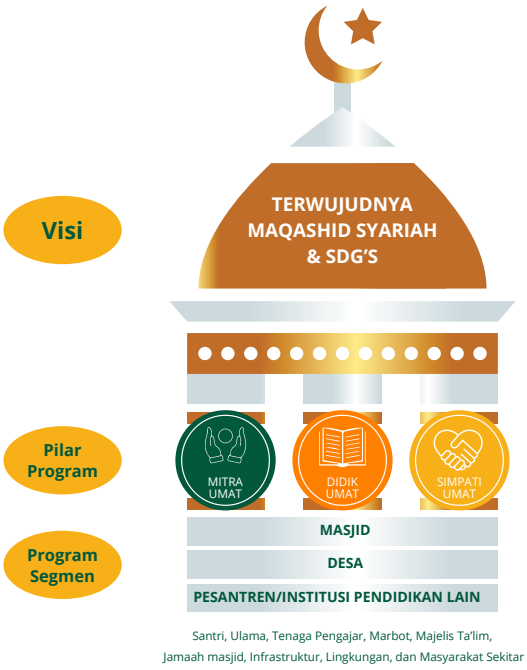

Dalam mewujudkan maqasid Syariah dan SDG's, Laznas BSM Umat akan membuat program-program terintegrasi dan berkelanjutan yang berbasis pada Masjid, Desa dan Pesantren (MDP). Program terintegrasi meliputi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan dakwah.

RISIKO SOSIAL YANG DIKELOLA PERSEROAN

Sebagai perusahaan di bidang perbankan, risiko sosial akan muncul jika kredit disalurkan kepada institusi yang memiliki permasalahan lingkungan. Oleh karena itu, Mandiri Syariah telah memiliki berbagai kebijakan untuk memitigasi risiko sosial antara lain yaitu *Green Financing, Green Funding, Green Campaign and Efficiency,* dan Program BSM *Integrated Social Action* (BISA).

LINGKUP DAN PERUMUSAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap sosial kemasyarakatan meliputi kegiatan usaha berwawasan lingkungan, program *financial inclusion*, CSR Bersama Laznas BSM, Program BSM Mengalirkan Berkah, Program pembuatan mobil musholla BSM, Pengembangan Ekonomi Umat, Program pendidikan dan pelatihan serta Program sosial kemasyarakatan.

TARGET/RENCANA KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Sebagai bagian dari masyarakat, Mandiri Syariah senantiasa menyelaraskan kehadiran dan kegiatan usahanya di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Mandiri Syariah berkomitmen untuk terus menjalankan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat agar dapat mencapai masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

KEGIATAN DAN DAMPAK TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

KEGIATAN USAHA BERWAWASAN LINGKUNGAN SOSIAL DAN MASYARAKAT

Untuk mendukung kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL) sebagaimana tercantum dalam POJK 60/POJK.04/2017 dan POJK No. 51/POJK.03/2017, berupa:

a. *Green Financing*
b. *Green Funding*
c. *Green Campaign and Efficiency*
d. Program BSM *Integrated Social Actions* (BISA)

PROGRAM *GREEN FINANCING*

Program *green financing* adalah aktivitas pembiayaan yang memiliki kontribusi positif terhadap upaya Bank dalam merealisasikan TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan). Penerapan program *Green Financing* di Bank diupayakan untuk dilakukan secara inklusif. Dalam hal ini, Bank mengutamakan aktivitas pembiayaan sebagaimana terdapat di dalam target/portofolio pada Rencana Bisnis Bank, khususnya untuk program pembiayaan yang berada di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Beberapa kegiatan utama yang akan dilakukan dalam program *Green Financing* ini, termasuk diantaranya adalah:

1. Pembiayaan untuk tenaga pengajar.
2. Pembiayaan untuk paramedik/tenaga kesehatan.
3. Pembiayaan untuk infrastruktur/konstruksi untuk menunjang pembangunan daerah tertinggal.

PROGRAM *GREEN FUNDING*

Program *green funding* adalah aktivitas penghimpunan dana yang akan digunakan oleh Bank untuk merealisasikan TJSL. Termasuk di dalamnya adalah produk tabungan/simpanan nasabah yang berkaitan langsung dengan realisasi program aksi sosial. Adapun dasar pemikiran antara lain:

1. Bank secara umum memiliki program *Green Funding* sebagai program yang akan dicantumkan pada RAKB. Kemudian, dengan upaya penguatan pada portofolio green funding, dengan potensi dan portofolio bisnis nasabah yang besar pada sektor pendidikan dan kesehatan, diharapkan keberlanjutan bisnis maupun kelangsungan hidup Bank dapat berjalan secara berkelanjutan.
2. Beberapa kegiatan utama yang akan dilakukan dalam program *Green Funding* ini, termasuk diantaranya yakni:
   - *Funding* di fokus sektor Bank memiliki potensi bisnis yang besar.
   - Bank memiliki portofolio bisnis besar di sektor unggulan (Pendidikan dan kesehatan).

PROGRAM *GREEN CAMPAIGN* AND *EFFICIENCY*

Program *Green Campaign and Efficiency* adalah kegiatan mensosialisasikan konsep *sustainability* kepada segenap pemangku kepentingan Bank yang terkait. Adapun dasar pemikiran pada program tersebut antara lain:

1. Menghadirkan paradigma baru bahwa industri juga harus dapat memberikan manfaat pada lingkungan dan masyarakat.
2. Membangun dan meningkatkan *awereness* terhadap penerapan *Sustainable Finance* baik secara umum maupun implementasi penerapannya di Bank.
3. Memberikan pemahaman dasar tentang penerapan *Sustainable Finance* dan manfaatnya bagi Bank.

PROGRAM BSM *INTEGRATED SOCIAL ACTIONS* (BISA)

Adapun dasar pemikiran program BISA antara lain:

1. Implementasi *Maqashid* Syariah terutama unsur *Hifdz Ad-Din* (memelihara agama), *Hifdz Al-Maal* (memelihara harta), *Hifdz Al-Aql* (memelihara pikiran), *Hifdz An-Nafs* (memelihara jiwa), dan *Hifdz An-Nasab* (memelihara keturunan).
2. Kontribusi Bank untuk mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai berikut:
   - Goal 1: *No Proverty*.
   - Goal 8: *Decent Work and Economic Growth*.
   - Goal 11 : *Sustainable Cities and Communities*.
   - Goal 15 : *Life on Land*.
   - Goal 17 : *Partnerships For The Goals*.
3. Menjalankan fungsi intermediasi perbankan melalui penyiapan calon nasabah untuk masuk ke sektor pembiayaan yang dapat dibiayai Bank.
4. Upaya meningkatkan reputasi Bank dengan memaksimalkan pengelolaan dana sosial dan zakat korporasi.

PROGRAM *FINANCIAL INCLUSION*

Mandiri Syariah juga telah menerapkan beberapa program inklusi keuangan dengan tujuan mengembangkan keuangan syariah kepada masyarakat luas terhadap layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat dari berbagai daerah dan wilayah. Dalam program *financial inclusion* Mandiri Syariah juga merujuk pada visi nasional keuangan inklusif dari Bank Indonesia yakni mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Mandiri Syariah juga berkomitmen dengan adanya program inklusi keuangan tersebut akan memberikan dampak pada meningkatnya jumlah masyarakat yang menabung maupun berinvestasi pada setiap layanan keuangan syariah. Adapun program kegiatan inklusi keuangan yang telah dilaksanakan oleh Mandiri Syariah dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel Program Kegiatan *Financial Inclusion* Mandiri Syariah Tahun 2019

No.	Tanggal	Lokasi	Program	Jumlah Peserta	Tujuan
INKLUSI					
1	21 Januari 2019	Kantor Pusat Mandiri Syariah Jakarta	*Company Visit* dari The University of Western Australia	3 Mahasiswa	Memperkenalkan produk layanan perbankan syariah kepada siswa/mahasiswa
2	02 Mei 2019	Dhanapala Jakarta	*Simpel Day*	100 Siswa	Memperkenalkan produk layanan perbankan syariah kepada siswa/mahasiswa
3	16 Juli 2019	Kantor Pusat Mandiri Syariah Jakarta	*Company Visit* dari SMK Ma'arif NU Kajen Pekalongan	100 Siswa	Memperkenalkan produk layanan perbankan syariah kepada siswa/mahasiswa
4	30 Juli 2019	BPPT Jakarta	Program Si Muda Emasku	50 Pelajar	Memperkenalkan produk layanan perbankan syariah kepada siswa/mahasiswa
5	15 Agustus 2019	Kantor Pusat Mandiri Syariah Jakarta	*Company Visit* dari Universitas Indonesia	50 Mahasiswa	Memperkenalkan produk layanan perbankan syariah kepada siswa/mahasiswa
6	14 September 2019	Kantor Pusat Mandiri Syariah Jakarta	*Company Visit* dari IAIN Metro Lampung	90 Mahasiswa	Memperkenalkan produk layanan perbankan syariah kepada siswa/mahasiswa
7	1 September 2019	Aceh	Media *Briefing* Wartawan Aceh	30 Wartawan	Memperkenalkan produk layanan perbankan syariah kepada media
8	26 September 2019	Kampus Yarsi Jakarta	Literasi Keuangan Syariah	100 Mahasiswa	Memperkenalkan produk layanan perbankan syariah kepada siswa/mahasiswa
9	1 Oktober 2019	Solo	Media *Briefing* Wartawan Solo	30 Wartawan	Memperkenalkan produk layanan perbankan syariah kepada media

No.	Tanggal	Lokasi	Program	Jumlah Peserta	Tujuan
10	15 Oktober 2019	Kantor Pusat Mandiri Syariah Jakarta	*Company Visit* dari SMK Somagede Banyumas	50 Siswa	Memperkenalkan produk layanan perbankan syariah kepada siswa/mahasiswa
11	16 Oktober 2019	Medan	Media *Briefing* Wartawan Medan	30 Wartawan	Memperkenalkan produk layanan perbankan syariah kepada media
12	24 November 2019	Bukittinggi	Media *Training* Perbankan Syariah	40 Wartawan	Memperkenalkan produk layanan perbankan syariah kepada media
13	5 November 2019	Langsa Aceh	Pembekalan Ketaspenan Nasabah BUP Kota Langsa dan Perencanaan Keuangan melalui Mandiri Syariah	250 Peserta	memperkenalkan produk tabungan pensiun kepada pegawai yang akan memasuki usia pensiun dengan Batas Usia Pensiun (BUP) tahun 2019-2020
14	15 Desember 2019	Jakarta	*Company Visit President University*	55 Mahasiswa	Memperkenalkan produk layanan perbankan syariah kepada siswa/mahasiswa
LITERASI					
1	16 Mei 2019	Grand Cempaka Putih Jakarta	Safari Ramadhan	50 Siswa	Memperkenalkan produk layanan perbankan syariah kepada masyarakat
2	21 Mei 2019	Universitas Al Azhar Jakarta	Safari Ramadhan	50 Siswa	Memperkenalkan produk layanan perbankan syariah kepada masyarakat
3	17 Oktober 2019	Mal Kota Kasablanka	Fin Expo 2019	2500 Masyarakat Umum	Memperkenalkan produk layanan perbankan syariah kepada masyarakat
4	5-30 Mei 2019	RO I,II,III,IV,V,VI,VII	Serambi Berkah Ramadhan di RO I,II,III,IV,V,VI,VII	1500 Masyarakat Umum	Memperkenalkan produk layanan perbankan syariah kepada masyarakat
5	4-6 Maret dan 2-3 Mei 2019	Kementrian BUMN	*Open booth* di kementrian BUMN	1000 Pegawai/ Masyarakat Umum	Memperkenalkan produk layanan perbankan syariah kepada pegawai Kementrian BUMN dan masyarakat umum

No.	Tanggal	Lokasi	Program	Jumlah Peserta	Tujuan
6	25 Februari - 4 Maret 2019	Wisma Mandiri, Plaza Mandiri, Sentra Mandiri, Menara Mandiri	*Open booth* bonus Mandiri	1000 Pegawai/ Masyarakat Umum	Memperkenalkan produk layanan perbankan syariah kepada pegawai Mandiri Group dan masyarakat
7	5-7 April 2019	Atrium E-Walk Balikpapan	iB Vaganza Balikpapan	2500 Masyarakat Umum	
8	23-25 Agustus 2019	Palembang Icon	iB Vaganza Palembang		
9	20-22 September 2019	Plaza Medan Fair	iB Vaganza Medan		
10	17-20 Oktober 2019	Mal Kota Kasablanka	iB Vaganza Jakarta (*Financial* Expo)		
11	6-9 November 2019	Grand City Convex Surabaya	Festival Syariah		
12	12-16 November 2019	Solo Paragon Mall	Indonesia Sharia *Economic* Festival (ISEF)		
13	22-23 November 2019	Solo Paragon Mall	iB Vaganza Solo		

KEGIATAN SOSIAL BERSAMA LAZNAS BSM

Dalam implementasi fungsi sosial, Mandiri Syariah menjalin kerjasama dengan Laznas BSM Umat/lembaga mitra dalam melaksanakan program-program yang bersifat kemanusiaan (*humanity*). Adapun bentuk program terdiri dari Didik Umat, Mitra Umat dan Simpati Umat.

Program **Didik Umat** terdiri dari:
1. Sahabat Pelajar Indonesia, program beasiswa anak SMP-SMA dari keluarga tidak mampu.
2. ISDP (*Islamic Sociopreneur Development Program*), program beasiswa mahasiswa dari keluarga tidak mampu berorientasi *sociopreneur*.

Untuk program **Mitra Umat** terdiri dari:
1. Pemberdayaan Ekonomi, program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan skala ekonomi masyarakat.
2. BSM Mengalirkan Berkah, program menguatkan fungsi masjid sebagai sarana keumatan.

Untuk program **Simpati Umat** terdiri dari:
1. Bantuan Kemanusiaan, program pemberian bantuan terkait kemanusiaan antara lain: pemeriksanaan kesehatan, *charity*, dan bantuan sosial lainnya.
2. *Disaster Emergency* dan *Recovery Center*, program menguatkan fungsi pengelolaan respon kebencanaan.

PENGELOLAAN DANA CSR (LAZNAS)

Pelaksanaan program CSR di Mandiri Syariah memiliki 2 (dua) sumber dana, yakni Dana Zakat Infak Shadaqah (ZIS) dan Dana Kebajikan/Sosial. LAZNAS BSM sebagai lembaga amil zakat yang ditunjuk dan diamanahi untuk mengelola dana zakat dari BSM mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Adapun dasar hukum pengelolaan dana zakat sebagai berikut:
a. Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

b. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
c. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
d. Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat No. 001/DP/YBSMU/VI/2009 tanggal 8 Juni 2009 tentang Garis Besar Kebijakan Manajemen Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM).
e. Standar Operation Procedure (SOP) sesuai dengan SK Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat No. 09/001/LAZNAS BSM.

KONSEP PENGELOLAAN DANA ZAKAT

Penghimpunan dan penyaluran zakat oleh lembaga zakat dalam kaitannya dengan BSM didasarkan atas Perjanjian Kerjasama (PKS) No. 21/766-PKS/DIR; 18/004/PKS/YBSMU; 324/SPJ-LEGAL/RZ/XI/2019 tanggal 25 November 2019 perihal Penyaluran Dana Zakat. Untuk memperkuat status Laznas BSM, maka Laznas BSM sudah menjadi Mitra Rumah Zakat. Mengingat status Laznas BSM sebagai mitra Rumah Zakat, untuk penyaluran dana zakat yang dikumpulkan oleh BSM, maka kerja sama penyaluran zakat tersebut juga melibatkan Rumah Zakat.

Konsep penyaluran zakat merujuk pada Fatwa MUI No. 15/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Dana Zakat) yang dinyatakan sebagai Zakat *Muqayyadah* (peruntukannya telah ditentukan oleh Muzakki) dengan tetap mengacu pada *ashnaf* zakat.

Adapun ruang lingkup penyaluran zakat dilaksanakan melalui program:
a. Mitra Umat, Didik Umat dan Simpati Umat dengan tetap mengacu pada 8 *ashnaf* zakat (*mustahik*), yaitu Fakir, Miskin, Amil, *Muallaf, Riqob, Gharimin, Fisabilillah, Ibnu Sabil*.
b. BSM *Fellowship* Program bagi anak-anak yatim/piatu dari pegawai atau pensiunan pegawai yang meninggal dunia.

Tabel Konsep Pendistribusian Zakat

No	Ashnaf	Metode Penilaian / Kriteria	Penerimaan Manfaat
1	Fakir	Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT, RW/ Kelurahan, Wawancara Calon Penerima Bantuan, yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan pokoknya	Perorangan
2	Miskin	Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT, RW/ Kelurahan, Wawancara Calon Penerima Bantuan, Berpenghasilan sama atau dibawah UMR	Perorangan
3	Amil	-	-
4	*Mualaf*	Surat Keterangan masuk Islam dari masjid.	Orang yang baru masuk Islam dan masih lemah Islamnya
5	*Riqob*	-	-
6	*Gharimin*	Surat Keterangan Hutang	Orang yang terlibat hutang untuk kebutuhan pokok.

No	Ashnaf	Metode Penilaian / Kriteria	Penerimaan Manfaat
7	*Fisabilillah*	Surat keterangan aktif dalam kegiatan keislaman. Susunan kepengurusan DKM/Takmir Masjid (untuk pembangunan masjid/ musholla).	• Perorangan (Da'i, Guru Agama, Pelajar/Mahasiswa) • Masjid/Musholla yang penerima manfaatnya tergolong tidak mampu dan/atau didaerah yang tidak mampu • Lembaga Pendidikan dan Dakwah yang penerima manfaatnya tergolong tidak mampu dan/atau didaerah yang tidak mampu • Lembaga Dakwah
8	*Ibnu Sabil*	Surat keterangan aktif dalam kegiatan keislaman. Susunan kepengurusan DKM/Takmir Masjid (untuk pembangunan masjid/ musholla).	Orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal dan atau kena musibah

DANA SOSIAL/TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP)

Penyaluran Dana Sosial/TBDSP mengacu kepada Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah.

Dana Sosial/TBDSP Mandiri Syariah bersumber dari:

a. Dana TBDSP dari Penalti
   Dana yang berasal dari denda keterlambatan (*penalty*) pembayaran angsuran.
b. Dana TBDSP dari Jasa Giro
   Dana TBDSP yang berasal dari jasa giro yang diterima Bank dari penempatan pada bank konvensional.
c. Dana TBDSP lainnya
   Dana TBDSP yang berasal dari komisi, *fee*, atau pendapatan dalam bentuk lainnya dari rekanan Bank selain pendapatan yang berhak diterima sesuai dengan ketentuan manajemen.

Bentuk-bentuk penyaluran dana TBDSP adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan korban bencana.
2. Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam.
3. Masjid/Musholla dan penunjangnya.
4. Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial.
5. Sosialisasi, edukasi dan literasi ekonomi, keuangan dan bisnis syariah untuk masyarakat umum.
6. Beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu.
7. Kegiatan produktif bagi *dhuafa*.
8. Faqir-miskin.
9. Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
10. Dan lain-lain yang relevan sesuai opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) Mandiri Syariah.

PEMBANGUNAN MASJID MANDIRI SYARIAH DI REST AREA TOL CIPALI

Mandiri Syariah berinisiatif menghadirkan sarana ibadah yang representatif bagi masyarakat. Pada tahun 2014 Mandiri Syariah sudah membangun sarana ibadah untuk mendukung pariwisata yaitu pembangunan Mushalla Syariah Mandiri di Puncak Pananjakan, Bromo, Jawa Timur (Mushalla Di Atas Awan), dan Masjid Al Amin Syariah Mandiri di Kinahrejo, Merapi, DI Yogyakarta.

Selanjutnya Mandiri Syariah berupaya menghadirkan sarana ibadah di lokasi keramaian atau tempat strategis yang belum memiliki masjid yang *representative*. Berkat dukungan dari seluruh *stakeholder*, maka di tahun 2019 Mandiri Syariah menghadirkan Masjid Mandiri Syariah di Rest Area KM 166 jalan tol Cipali. Posisi Masjid berada di *Rest Area* arah dari Jakarta ke Cirebon. Keberadaan Masjid Mandiri Syariah merupakan salah satu daya Tarik bagi masyarakat untuk beristirahat di *Rest Area* KM 166, sehingga secara tidak langsung keberadaan masjid dapat mendukung pelaku usaha di rest area dimaksud.

PROGRAM BANK SYARIAH MANDIRI MENGALIRKAN BERKAH

Sesuai dengan misi Mandiri Syariah ke enam yaitu, "Meningkatkan kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan", eksistensi Bank Mandiri Syariah seharusnya dirasakan seimbang di tengah masyarakat. Selain dirasakan perannya dalam menumbuhkan kemampuan keuangan nasabah, Mandiri Syariah juga dirasakan perannya dalam berkontribusi sosial (mengalirkan).

Mandiri Syariah selain menumbuhkan, juga memiliki *concern* untuk mengalirkan keberkahan. Baik mengalirkan keberkahan bagi nasabah, bagi Mandiri Syariah sendiri, maupun bagi pegawai. Program BSM Mandiri Syariah Mengalirkan Berkah 2019 adalah program bantuan berupa perbaikan fisik masjid/musholla dan sarana pendukung serta pemeliharaan kebersihan masjid dan lingkungan sekitar masjid. Di tahun 2019, sarana ibadah yang mendapatkan bantuan program BSM Mengalirkan Berkah berjumlah sekitar 57 masjid/musholla di seluruh Indonesia.

PROGRAM PEMBUATAN MOBIL MUSHOLLA BSM

Di tahun 2018, Mandiri Syariah telah menghadirkan 1 (satu) unit Mobil Musholla untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Keberadaan Mobil tersebut dirasakan manfaatnya oleh pengunjung acara dimana Mobil Musholla hadir.

Melihat manfaat kehadiran Mobil Musholla tersebut, Mandiri Syariah memperluas jangkauan pelayanan dengan menghadirkan 2 (dua) unit Mobil Musholla di tahun 2019 untuk wilayah RO VI/Surabaya dan Area Denpasar. Mandiri Syariah berharap masyarakat di masyarakat di Surabaya atau Denpasar dan sekitarnya dapat memanfaatkan Mobil Musholla tersebut untuk mendukung kegiatan yang dilakukan, dimana Masjid/Musholla berada cukup jauh dari lokasi acara.

PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT

Pelaksanaan CSR di bidang pengembangan ekonomi umat (Mitra Umat) bertujuan untuk menciptakan kemandirian masyarakat dalam mencapai peningkatan kesejahteraan dalam jangka panjang. Program CSR ini diwujudkan dalam pemberian bantuan permodalan, sarana kerja dan sebagainya. Contohnya pemberdayaan petani padi di Lampung Tengah melalui program padi sehat, pemberdayaan peternak di Purbalingga, Jawa Tengah melalui pengembangbiakan kambing Kejobong dan peternak sapi di Trenggalek, Jawa Timur. Program Mitra Umat selama tahun 2019 disalurkan sebesar Rp1,011 miliar.

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Program Didik Umat difokuskan kepada peningkatan kualitas pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk pemberian beasiswa kepada siswa dari keluarga kurang mampu mulai pelajar SD sampai dengan perguruan tinggi. Kegiatan dilaksanakan secara menyeluruh baik di lingkungan kantor pusat di Jakarta maupun melalui kantor cabang di sleuruh pelosok negeri. Untuk mahasiswa perguruan tinggi, program Didik Umat juga membantu pengembangan kewirausahaan mahasiswa melalui program *Islamic Sociopreneur Development Program* (ISDP). Dana program Didik Umat yang disalurkan tahun 2019 adalah sebesar Rp10,364 miliar.

PROGRAM SOSIAL KEMASYARAKATAN

Program CSR di bidang sosial kemasyarakatan melalui Simpati Umat selama tahun 2019 menggunakan dana sebesar Rp11,233 miliar. Program diwujudkan dalam bentuk santunan dhuafa, bantuan korban bencana alam serta kegiatan sosial lainnya.

DAMPAK KEGIATAN

Selama tahun 2019, jenis program yang telah dilaksanakan pada kegiatan bersama Laznas BSM terdiri dari dua bagian antara lain:

1. Pendistribusian, merupakan kegiatan penyaluran untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup penerima manfaat (konsumtif) serta penyaluran/bantuan sosial untuk kebutuhan individu/ masyarakat yang sifatnya darurat.
2. Pendayagunaan, merupakan kegiatan dalam memaksimalkan dana untuk pemberdayaan dan kemaslahatan umat serta memaksimalkan dana untuk kegiatan produktif atau penambahan *income generating* yang berkelanjutan.

Dalam setiap jenis program yang dilakukan Laznas BSM telah memberikan dampak bagi masyarakat luas. Adapun penjelasan dampak pada kegiatan Laznas BSM dapat diurakan pada tabel di bawah ini:

Tabel Program dan Dampak Kegiatan Laznas BSM pada tahun 2019

No.	Nama Program	Jenis Program	Dampak Kegiatan
Mitra Umat			
1.	Desa BSM	Pendayagunaan	• Meningkatkan pendapatan mustahik (petani dan peternak). • Berjalannya usaha mustahik yang berkelanjutan. • Meningkatkan kualitas hidup petani dan peternak.
2.	Mitra UKM Berdaya	Pendayagunaan	• Meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi. • Memberdayakan UMKM. • Menciptakan Lapangan Pekerjaan. • Meningkatkan Kualitas Hidup PKL.
3.	BMB - BSM Mengalirkan Berkah	Pendistibusian	Memperbaiki fasilitas ibadah yang kurang layak
Didik Umat			
1.	SPI - Sahabat Pelajar Indonesia	Pendayagunaan	• Meningkatkan kapasitas *softskill* pelajar • Meringankan biaya Pendidikan pelajar Dhuafa
2.	ISDP – *Islamic Sociopreneur Development Program*	Pendayagunaan	• Melahirkan *Sociopreneur* Muda • Meningkatkan kapasitas *softskill* mahasiswa Dhuafa • Menciptakan lapangan kerja
3.	Beasiswa *Fellowship*	Pendistibusian	Meringankan biaya Pendidikan bagi anak yatim eks pegawai BSM
Simpati Umat			
1.	DERC – *Disaster Emergency and Recovery Center* (Respon Bencana)	Pendayagunaan	Dukungan respon tanggap darurat pada 4 (empat) klaster meliputi: • Kesehatan dan nutrisi, • Pendidikan, • Perlindungan, serta • Logistik dengan memberikan supply kebutuhan pengungsi sehari-hari dan sanitasi Selain itu, melakukan aktivitas rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana.
2.	RAMADHAN (Sahabat Belanja Yatim)	Pendistribusian	• Memberikan santunan kepada anak yatim dalam kegiatan sosial dan *event* • Menunjang kegiatan Cabang BSM
3.	Umrah Marbot, guru dan tenaga kesehatan	Pendistribusian	• Memberikankesempatan umroh kepada yng berjasa dalam bidang agama, kesehatan dan pendidikan • Meningkatkan Branding BSM Umat
4.	Qurban BSM & LAZNAS BSM Umat	Pendistribusian	• Menyebarkan bantuan hewan qurban kedaerah-daerah pelosok • Meningkatkan kepedulian kepada sesama • Meningkatkan *Branding* BSM Umat

PENGGUNAAN TENAGA KERJA LOKAL

Mandiri Syariah telah melakukan proses rekrutmen yang berdasarkan pada kebutuhan dan kompetensi yang memperhatikan ketersediaan tenaga kerja lokal/nasional telah disajikan pada bagian CSR terhadap ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja dalam Laporan Tahunan ini.

BIAYA YANG DIKELUARKAN TERKAIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

PENYALURAN DANA KEBAJIKAN

Dana Zakat bersumber dari zakat perusahaan (Mandiri Syariah), zakat dari nasabah dan umum, serta zakat pegawai Bank. Pada tahun 2019 Mandiri Syariah menyalurkan zakat melalui Laznas BSM sebesar Rp36,850 miliar. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Rp27,751 miliar.

SALURAN PENGADUAN

Dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial terkait pengembangan sosial kemasyarakatan, Mandiri Syariah senantiasa menyelaraskan kehadiran dan kegiatan usahanya di tengah masyarakat. Namun apabila terdapat kendala atau keluhan dalam kegiatan kemasyarakatan, dapat mengirimkan email ke divisi Corporate Secretary Group pada alamat email csg@bsm.co.id

Tabel Sumber Dana Zakat Selama Tahun 2018-2019

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2019	2018
Sumber dana zakat		
Zakat dari Bank	43.974	20.916
Zakat dari nasabah dan umum	5.296	3.181
Zakat dari pegawai Bank	12.245	11.228
Jumlah sumber dana zakat	61.515	35.325
Penyaluran dana zakat		
Disalurkan melalui Laznas BSM Umat	(36.850)	(27.751)
Jumlah penyaluran dana zakat	(36.850)	(27.751)
Kenaikan dana zakat	24.665	7.574
Saldo awal dana zakat	**22.263**	**14.688**
Saldo akhir dana zakat	**46.928**	**22.263**

Pada tahun 2019, dana zakat yang telah disalurkan Mandiri Syariah melalui Lembaga Zakat sebesar Rp36,850 miliar. Sedangkan Laznas BSM Umat pada tahun 2019 telah menyalurkan zakat kepada murtahik sebesar Rp26,738 miliar (sudah termasuk Hak Amil), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Penyaluran Dana Zakat Korporat Bersama LAZNAS BSM 2019

(dalam jutaan Rupiah)

Program	2019	2018
Mitra Umat	1.011	9.488
Didik Umat	10.364	12.894
Simpati Umat	11.233	11.645
Porsi Amil	4.131	3.840
Jumlah	**26.738**	**37.867**

Tabel Penyaluran Dana Zakat Tahun 2019 untuk Kategori Mitra Umat

(dalam jutaan Rupiah)

No	Nama Program	Jumlah Penyaluran
1.	Gerobak Berkah	137
2.	Desa BSM	863
3.	Bantuan Ekonomi Masyarakat	11
	Jumlah	**1.011**

Tabel Penyaluran Dana Zakat Tahun 2019 untuk Kategori Didik Umat

(dalam jutaan Rupiah)

No	Nama Program	Jumlah Penyaluran
1	ISDP – *Islamic Sociopreneur Development Program*	1.335
2	SPI - Sahabat Pelajar Indonesia	4.827
3	Inklusi Keuangan Syari'ah	21
4	Ponpes *Tahfidz* BESQ	119
5	Bantuan Pendidikan Mahasiswa	1.125
6	Bantuan Pendidikan Pelajar	827
7	Sarana dan Prasarana Pendidikan	1.773
8	*Training, Workshop* dan Seminar	213
9	Beasiswa *Fellowship*	126
	Jumlah	**10.364**

Tabel Penyaluran Dana Zakat Tahun 2019 untuk Kategori Simpati Umat

(dalam jutaan Rupiah)

No	Nama Program	Jumlah Penyaluran
1	*Charity* Kesehatan	1.524
2	DERC – *Disaster Emergency and Recovery Center* (Respon Bencana)	1.401
3	Sehat Sentra Terpadu	159
4	Umrah Marbot, guru dan tenaga kesehatan	1.503
5	*Charity* Sosial	195
6	RAMADHAN (Sahabat Belanja Yatim)	2.799
7	*Charity* Kemanusiaan	1.413
8	Sarana dan Prasarana Ibadah	2.012
9	Sarana dan Prasarana Umum	228
	Jumlah	**11.233**

PENYALURAN DANA SOSIAL/TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP)

Dana Sosial/TBDSP bersumber dari Denda, Pendapatan Non Halal dan Dana Sosial lainnya. Penerimaan Dana Kebajikan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp16.709 Miliar, menurun dibanding periode tahun 2018 sebesar Rp23,973 miliar. Dana kebajikan tersebut telah disalurkan melalui LAZNAS BSM Umat pada tahun 2019 sebesar Rp61,699 Miliar.

Tabel Sumber Dana Sosial/Kebajikan Selama Tahun 2019-2018

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2019	2018
Sumber dana sosial/kebajikan		
Denda	15.667	22.809
Penerimaan non-halal	139	628
Dana sosial lainnya	903	536
Jumlah sumber dana sosial/kebajikan	16.709	23.973
Penyaluran dana sosial/kebajikan		
Disalurkan melalui Laznas BSM Umat	(61.699)	85.894
Jumlah penyaluran dana sosial/kebajikan	(61.699)	85.894
Keuntungan/(kerugian) selisih kurs	(227)	686
Kenaikan/ (penurunan) dana sosial/kebajikan	(45.216)	(61.235)
Saldo awal dana sosial/kebjikan	**78.357**	**139.592**
Saldo akhir dana sosial/kebajikan	**33.141**	**78.357**

Penyaluran dana sosial/TBDSP meliputi: pembangunan/ renovasi sarana ibadah, bantuan kebencanaan, beasiswa, kegiatan keagamaan/dakwah, dan lain-lain.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA PEMASOK

KEBIJAKAN

Mandiri Syariah menetapkan ketentuan pengadaan dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) *Procurement* yang tertuang pada tanggal 01 Desember 2016, dimaksudkan sebagai pedoman bagi Unit Kerja dalam melaksanakan proses *Procurement*. Selain itu dalam pengadaan yang dilakukan Mandiri Syariah merujuk pada:

1. Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berikut segala perubahannya.
2. Peraturan Bank Indonesia No.11/03/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah berikut segala perubahannya.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI2009 tanggal 7 Desember 2009 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahannya.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 perihal Rencana Bisnis Bank berikut segala perubahannya.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahannya.
6. Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain berikut segala perubahannya.
7. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/32.DPbS tanggal 10 November 2010 perihal Rencana Bisni Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahannya.
8. Anggaran Dasar PT Bank Syariah Mandiri berikut segala perubahannya.

TARGET KEGIATAN

Mandiri Syariah menargetkan bahwa seluruh proses pengadaan barang dan jasa telah menerapkan prinsip Syariah, Efektif, Efisien, Terbuka dan Bersaing, Transparan, Adil dan Tidak diskriminatif, Akuntabel, Tanggung Jawab, Independen serta penggunaan produk dalam negeri. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut diharapkan tingkat kepuasan pemasok akan terjaga dengan baik dan selanjutnya akan berdampak pada peningkatan kinerja Bank secara keseluruhan.

KEGIATAN

PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG SESUAI ETIKA DAN PRINSIP

ORGANISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Organisasi Pengadaan Barang dan jasa yang bersifat permanen berada pada Unit Pelaksana Procurement. Unit Pelaksana Procurement adalah Unit Kerja yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses Pengadaan. Adapun tugas Unit Pelaksana Pengadaan antara lain:

a. Menyusun dokumen pengadaan;
b. Menetapkan rekanan yang akan diundang dalam proses pengadaan;
c. Menyelenggarakan rapat penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*);
d. Membuat dan menetapkan HPS;
e. Menyelenggarakan proses pemasukan penawaran;
f. Melakukan proses evaluasi administrasi dan penawaran biaya;
g. Melakukan proses negosiasi harga;
h. Membuat usulan hasil proses Pengadaan kepada Pejabat Pemutus;
i. Membuat dokumen Ikatan Kerja; dan
j. Melaksanakan proses administrasi tagihan pembayaran atas hasil pekerjaan.

Unit pelaksana procurement terdiri atas:

a. Pelaksana Procurement di Kantor Pusat

Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan oleh:

1. Unit Kerja Procurement terkait:
   - Pengadaan Barang dan Jasa.
   - Pengadaan Jasa *Outsourcing* Tenaga Alih Daya termasuk Jasa *Outsourcing* Borongan untuk jenis pekerjaan *security service*, *cleaning service* atau jenis pekerjaan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
   - Pengadaan asuransi terkait tenaga kerja.

   Khusus untuk Jasa *Outsourcing* Tenaga Alih Daya termasuk Jasa *Outsourcing* Borongan, penerbitan kontrak, operasional dan pembayaran tetap dilakukan oleh Unit Human Capital.
2. Unit Kerja Bisnis dan Unit Corporate Secretary untuk pengadaan Barang promosi yang bersifat mendesak (maksimal 5 hari kerja), atas beban biaya promosi.

3. Unit Kerja Lainnya di Kantor Pusat sesuai bidang unit kerja, khusus untuk pengadaan jasa konsultan dan pihak ketiga lainya.

b. Pelaksana Procurement di *Region Office*

Pengadaan Barang dan Jasa untuk mendukung operasional *Region/Area/Branch* dilaksanakan oleh *Region Office* berdasarkan ketentuan dan kewenangan yang di atur dalam SPO. Kewenangan di atas tidak berlaku untuk jenis barang/jasa kebutuhan Region/ Area/Branch yang pengadaannya dilaksanakan oleh Unit Kerja Procurement Kantor Pusat secara tersentralisasi. Hal ini dengan pertimbangan efisiensi, efektivitas dan/atau keamanan, antara lain pengadaan komputer sistem, barang-barang *corporate image, security printing*, Sewa Kendaraan Dinas Operasional.

c. Unit Kerja Terkait

Unit Kerja lainnya yang terlibat dalam proses pengadaan, dapat berfungsi sebagai:

- *Counterpart* yaitu unit kerja pendamping dari *User*.
- Unit Kerja IT untuk pengadaan barang/jasa bidang IT yang bersama dengan *User* melakukan tugas dan fungsi.
- Unit Kerja Legal untuk kajian aspek legal dalam proses pengadaan.
- Unit Kerja Compliance berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi eksternal dan internal.

PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA

Mandiri Syariah memiliki prosedur dalam melakukan pengadaan barang dan jasa melalui 2 (dua) cara sebagai berikut:

1. Melalui Cara Swakelola

Swakeloka adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa yang dilakukan dengan cara direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh Bank dengan menggunakan alat, tenaga sendiri atau upah borongan tenaga. Pengadaan dengan cara swakelola dapat dilakukan apabila pengadaan melalui penyedia barang dan jasa tidak dapat dilakukan, antara lain karena:

a. Pengadaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan, pengembangan sistem tertentu, penelitian atau pekerjaan yang bersifat rahasia bagi Bank.
b. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan yang dilaksanakan secara intern.
c. Pengadaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang dan Jasa.
d. Pengadaan yang secara rinci tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan Jasa akan menanggung risiko yang besar.
e. Pekerjaan yang bersifat rahasia.
f. Pekerjaan yang harus segera dilaksanakan karena dapat mengganggu operasional.
g. Pengadaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/Metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan Jasa.

2. Melalui Cara Penyedia Barang dan Jasa

Pengadaan dengan cara ini dapat dilaksanakan apabila spesifikasi barang yang akan diadakan jelas dan tidak termasuk dalam kategori swakelola sehingga lebih efisien dan tepat waktu. Pengadaan melalui Penyedia Barang dan Jasa dapat dilakukan dengan cara *Trade-In*, bahwa pemenang pengadaan atas dasar metode pelelangan, pemilihan langsung atau penunjukan langsung dapat melakukan pemenuhan barang dengan sekaligus membeli barang milik Bank dalam transaksi *trade-in*.

Tujuan *trade-in* adalah mengoptimalkan biaya yang dikeluarkan oleh Bank dalam rangka melaksanakan pengadaan barang. Pelaksanaan *Trade-in* harus dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:

a. Barang yang dapat dilaksanakan *trade-in* hanya Aktiva Tetap Bergerak.
b. *Trade-in* melibatkan konsultan/*appraisal* untuk menilai barang yang akan di *Trade-in*.
c. Nilai buku aset yang akan di *trade-in* telah mencapai Rp1 atau tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Bank antara lain karena regulasi, teknologi atau kapasitasnya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Bank, rusak tidak dapat diperbaiki, atau jika rusak biaya perbaikannya > 50% dari harga baru.

Kewenangan memutus pengadaan secara *trade-in* sekaligus kewenangan memutus pelepasan asset mengacu kepada kewenangan memutus pengadaan secara *trade-in* yang diatur Penetapan Kewenangan Memutus Pengadaan Barang dan Jasa.

Pengadaan melalui penyedia barang dan jasa dapat dilakukan secara:

a. Individual yaitu antara Bank dengan Penyedia barang/Jasa, atau
b. Bersama yaitu antara Bank dan Bank Mandiri/ Institusi/Instansi lainnya dengan Penyedia Barang/ Jasa.

Dalam hal pengadaan dilakukan secara bersama dengan Bank Mandiri (selaku induk perusahaan) /Institusi/Instansi lainnya, prosedur dapat dilakukan atas dasar kesepakatan seluruh pihak yang terlibat dalam Pengadaan bersama dimaksud dengan mengacu pada prinsip transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Prosedur dimaksud di setujui oleh Kepala Unit Kerja *Procurement*.

AUDIT PENGADAAN BARANG DAN JASA

Mandiri Syariah senantiasa melaksanakan *review* terhadap proses Pengadaan Barang dan Jasa, Pengadaan Sewa Properti dan Pembelian Tanah/Tanah dan Bangunan setelah proses pengadaan selesai dilaksanakan. Adapun unit kerja yang melakukan audit pengadaan barang dan jasa antara lain:

1. Unit Pelaksana Procurement
   Melakukan evaluasi terhadap ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, kualitas hasil kerja, kooperatif, dan hal-hal lain yang dirasa perlu untuk diinformasikan secara tertulis kepada Unit Vendor Management sebagai masukan untuk penilaian kinerja rekanan.

2. Unit Kerja Kepatuhan-Decentralized Compliance dan Operational Risk (DCOR)
   Melakukan *review* terhadap prosedur dan pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa, Pengadaan Sewa Properti dan Pembelian Tanah/Tanah dan Bangunan yang telah selesai dilaksanakan.
   a. Menindaklanjuti dan melaksanakan *monitoring* terhadap tindaklanjut temuan audit internal dan eksternal yang masih *outstanding*.
   b. Melakukan monitoring *Risk Profile* Unit Kerja setiap 3 (tiga) bulan.
   c. Melakukan *compliance review* terhadap dokumen unit kerja lain yang perlu dimintakan *review* dan Perjanjian/Kontrak/Nota sebelum ditandatangani sesuai kewenangan.

3. Unit Kerja Legal
   Membantu unit kerja dalam menyelesaikan permasalahan *procurement* yang menyangkut aspek legal.

4. Unit Kerja Pengguna/*User*, terdiri dari:
   a. *User* wajib meyakini kesesuaian barang dan jasa yang diserahkan dengan syarat dan kondisi yang ditetapkan dalam SP/SPK/Surat Perjanjian/Kontrak, meliputi:
      1. Kuantitas dan kualitas barang dan jasa yang diserahkan.
      2. Ketepatan waktu/efektifitas penyerahan barang dan jasa.
   b. Menandatangani BAST Barang atau pekerjaan (oleh pejabat yang berwenang).
   c. *User* wajib memberitahukan secara tertulis kepada Unit Pelaksana Procurement, apabila terdapat ketidaksesuaian antara barang dan jasa yang diserahkan dengan syarat dan kondisi yang ditetapkan dalam SP/SPK/Surat Perjanjian/Kontrak.

5. *Vendor Management*
   a. *Monitoring* Data Rekanan.
      Pembaharuan/*Update* data rekanan dilakukan terhadap perubahan-perubahan baik pada Akta Perusahaan, masa laku Ijin Usaha, penambahan/pengurangan usaha, maupun perubahan lain jika ada.
   b. *Monitoring* Kinerja Rekanan.
      Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap performa/kinerja penyedia barang dan jasa (*vendor*) berdasarkan masukan/laporan tertulis *User*.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEMASOK

Dalam rangka mendapatkan *review*, masukan dan saran perbaikan dari Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan perusahaan, Mandiri Syariah menyelenggarakan program *gathering* dengan pemasok. Selama tahun 2018, Mandiri Syariah telah mengadakan kegiatan *vendor gathering* dengan

tema “Partner Gathering, dengan Sosialisasi Akad-Akad Perbankan Syariah” pada acara kamis, 20 Desember 2018 dengan jumlah total rekanan yang hadir sebanyak 132 rekanan pemasok.

DAMPAK KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan CSR terkait dengan pemasok telah memberikan dampak pada tingginya tingkat kepuasan pemasok. Mandiri Syariah telah melakukan survei kepuasan pemasok sejak tahun 2013. Kepuasan pemasok mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan interval skala likert antara lain: < 1,00 skala likert adalah tidak memuaskan; 1,01 - 2,00 adalah kurang memuaskan; 2,01 - 3,00 adalah cukup memuaskan; 3,01 - 4,00 adalah memuaskan serta 4,01 - > 5 adalah sangat memuaskan. Tingkat kepuasan pemasok dalam proses procurement di tahun 2018 adalah sebesar 5,07 skala likert yang mencerminkan bahwa proses procurement Mandiri Syariah dengan kategori sangat memuaskan untuk para rekanan pemasok Mandiri Syariah. Apabila dibandingkan pada tahun 2017 tingkat kepuasan pemasok sebesar 4,88 skala likert dengan kategori memuaskan. Sementara itu, jumlah rekanan pemasok Mandiri Syariah mengalami kenaikan dari 120 rekanan di tahun 2017 menjadi 301 rekanan di tahun 2018.

Selama tahun 2018, tidak terdapat temuan-temuan audit, baik oleh auditor eksternal dan auditor internal mengenai pengadaan yang merugikan Mandiri Syariah.

SALURAN PENGADUAN

Dalam proses pengadaan barang dan jasa, Mandiri Syariah telah menerapkan prinsip efektif, efisien, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, akuntabel, tanggung jawab, serta independen. Maka dari itu, apabila *vendor* memiliki keluhan dapat mengirimkan saran dan kritik kepada Divisi Corporate Secretary Group pada alamat emai csg@bsm.co.id .